



**QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
ACEH TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH ACEH
2019**



QANUN ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
ACEH TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 sebagai perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 selama 5 (lima) tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Qanun;
- e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Aceh.

7. Satuan ...

7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Aceh adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
13. Rencana Strategis SKPA Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra-SKPA adalah Dokumen Perencanaan SKPA untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang berpedoman kepada RPJM Aceh.
14. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 dan tahun 2018.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah SKPA sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.
17. Kepala Bappeda Aceh adalah Kepala SKPA yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, serta penelitian dan pengembangan di Aceh.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH

Pasal 2

- (1) RPJM Aceh merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur Aceh hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2017.
- (2) RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan Aceh dan keuangan Aceh serta program SKPA dan lintas SKPA yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 5 (lima) tahun.

(3) RPJM ...

- (3) RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 3

Sistematika RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Aceh;
BAB III : Gambaran Keuangan Aceh;
BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Aceh;
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Aceh;
BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program SKPA;
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;
BAB IX : Penutup.

Pasal 4

RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

- a. SKPA dalam menyusun Renstra-SKPA dan seluruh pemangku kepentingan di Aceh dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2017-2022;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJM Kabupaten/Kota.
- c. Pemerintah Aceh dalam penyusunan RKPA setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Aceh dilaksanakan oleh Gubernur dan SKPA dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Aceh.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ACEH

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Aceh lingkup Aceh dan antar Kabupaten/Kota.

(2) Pengendalian ...

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Aceh; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Aceh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH ACEH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJM Aceh dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Aceh kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Aceh.
- (5) Perubahan RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPA dan perubahan Renstra-SKPA.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dan ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun Aceh ini.
- (2) Pada saat Qanun Aceh ini mulai berlaku, maka RPJM Aceh menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai RPJM Aceh Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPA tahun 2023 sebelum ditetapkannya RPJM Aceh Tahun 2023-2028.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 April 2019 M
28 Rajab 1440 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 April 2019 M
28 Rajab 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

HELVIZAR

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 9

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 5
1.4. Maksud dan Tujuan	I - 6
1.5. Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH	II - 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II - 1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II - 1
2.1.1.2. Topografi	II - 2
2.1.1.3. Geologi	II - 2
2.1.1.4. Hidrologi	II - 3
2.1.1.5. Klimatologi	II - 7
2.1.1.6. Penggunaan Lahan	II - 7
2.1.2. Demografi	II - 8
2.1.2.1. Distribusi dan Kepadatan Penduduk	II - 8
2.1.2.2. Struktur dan Indek Ketergantungan Penduduk	II - 9
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah	II - 11
2.1.4. Wilayah Rawan Bencana	II - 12
2.1.5. Sosiologi	II - 14
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 15
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 15
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB	II - 15
2.2.1.2. Laju Inflasi	II - 17
2.2.1.3. Pendapatan Perkapita	II - 18
2.2.1.4. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)	II - 19
2.2.1.5. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)	II - 19
2.2.1.6. Kemiskinan	II - 20
2.2.1.7. Pengangguran	II - 23
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II - 24
2.2.2.1. Angka Melek Huruf	II - 24
2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II - 26
2.2.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah	II - 27
2.2.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)	II - 28
2.2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)	II - 29
2.2.2.6. Angka Kematian Balita (AKABA)	II - 30
2.2.2.7. Angka Usia Harapan Hidup	II - 31
2.2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia	II - 32
2.2.2.9. Indeks Kebahagiaan Aceh	II - 34
2.2.3. Fokus Seni Budaya	II - 34

2.3.	Aspek Pelayanan Umum-----	II - 36
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh -----	II - 36
2.3.1.1.	Penyelenggaraan Kehidupan Beragama-----	II - 36
2.3.1.1.1.	Syariat Islam -----	II - 36
2.3.1.1.2.	Pelaksanaan Ibadah-----	II - 38
2.3.1.2.	Penyelenggaraan Kehidupan Adat -----	II - 38
2.3.1.3.	Penyelenggaraan Pendidikan -----	II - 38
2.3.1.4.	Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah --	II - 39
2.3.1.5.	Perdamaian -----	II - 41
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib -----	II - 42
2.3.2.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar-----	II - 42
2.3.2.1.1.	Pendidikan -----	II - 42
2.3.2.1.2.	Kesehatan-----	II - 48
2.3.2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang---	II - 59
2.3.2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -----	II - 71
2.3.2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat -----	II - 73
2.3.2.1.6.	Sosial -----	II - 75
2.3.2.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar-----	II - 76
2.3.2.2.1.	Ketenagakerjaan-----	II - 76
2.3.2.2.2.	Pangan-----	II - 78
2.3.2.2.3.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-----	II - 79
2.3.2.2.4.	Pertanahan -----	II - 84
2.3.2.2.5.	Lingkungan Hidup-----	II - 86
2.3.2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-----	II - 92
2.3.2.2.7.	Perhubungan-----	II - 96
2.3.2.2.8.	Komunikasi dan Informatika -----	II - 102
2.3.2.2.9.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ----	II - 103
2.3.2.2.10.	Penanaman Modal -----	II - 104
2.3.2.2.11.	Kepemudaan dan Olahraga-----	II - 105
2.3.2.2.12.	Kebudayaan -----	II - 106
2.3.2.2.13.	Perpustakaan -----	II - 107
2.3.2.2.14.	Kearsipan -----	II - 107
2.3.3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan -----	II - 107
2.3.3.1.	Pariwisata-----	II - 108
2.3.3.2.	Pertanian-----	II - 109
2.3.3.2.1.	Pertanian Tanaman Pangan -----	II - 109
2.3.3.2.2.	Perkebunan-----	II - 110
2.3.3.2.3.	Peternakan -----	II - 113
2.3.3.3.	Kehutanan -----	II - 115
2.3.3.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral-----	II - 118
2.3.3.5.	Perdagangan-----	II - 124
2.3.3.6.	Perindustrian-----	II - 124
2.3.3.7.	Kelautan dan Perikanan-----	II - 125
2.3.3.8.	Transmigrasi -----	II - 128
2.3.4.	Penunjang Urusan -----	II - 129
2.3.4.1.	Perencanaan Pembangunan -----	II - 129

	2.3.4.2. Keuangan-----	II - 131
	2.3.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan -----	II - 131
	2.3.4.4. Penelitian an Pengembangan-----	II - 132
	2.3.4.5. Pengawasan -----	II - 132
	2.3.4.6. Sekretariat Dewan-----	II - 132
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah -----	II - 133
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah-----	II - 133
2.4.1.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita --	II - 133
2.4.1.2.	Nilai Tukar Petani -----	II - 134
2.4.1.3.	Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan) -----	135
2.4.1.4.	Keterbukaan Ekonomi -----	II - 135
2.4.1.5.	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank -----	II - 136
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur -----	II - 137
2.4.2.1.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun -----	II - 137
2.4.2.2.	Persentase Penduduk yang menggunakan air bersih -----	II - 138
2.4.2.3.	Rasio ketersediaan daya listrik -----	II - 139
2.4.2.4.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik-----	II - 139
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN ACEH-----	III - 1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu -----	III - 1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBA -----	III - 2
3.1.1.1	Pendapatan Aceh -----	III - 6
3.1.1.2	Belanja Aceh-----	III - 17
3.1.1.3	Pembiayaan Aceh-----	III - 23
3.1.2	Neraca Aceh -----	III - 25
3.1.2.1	Aset Lancar -----	III - 28
3.1.2.2	Aset Tidak Lancar -----	III - 29
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu -----	III - 30
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran -----	III - 32
3.2.2	Analisis Pembiayaan-----	III - 34
3.3	Kerangka Pendanaan -----	III - 38
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja -----	III - 39
3.3.1.1.	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA) -	III - 39
3.3.1.2.	Proyeksi Pendapatan Asli Aceh (PAA)-----	III - 40
3.3.1.3.	Kebijakan Belanja Aceh Tahun 2018-2022 -----	III - 43
3.3.1.4.	Proyeksi Anggaran APBA Tahun 2018-2022 -----	III - 44
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan-----	III - 48
3.4	Analisis Antisipasi Menurunnya Pendanaan Sumber Dana Otsus ----	III - 51
3.4.1	Dana Cadangan -----	III - 51
3.4.2	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) -----	III - 51
3.4.3	Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) -----	III - 52
3.4.4	Corporate Social Responsibility (CSR) -----	III - 52
3.4.5	Imbal Jasa Perdagangan Karbon -----	III - 52
3.4.6	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus -----	III - 53
3.4.7	Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) -----	III - 53

	3.5	Analisis Pasca Berakhirnya Sumber Pendanaan Otonomi Khusus (Otsus)-----	III - 54
	3.5.1	Pemanfaatan aset -----	III - 54
	3.5.2	Perpanjangan pendanaan sumber dana Otsus-----	III - 54
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ACEH -----	IV - 1
	4.1.	Permasalahan Pembangunan -----	IV - 1
	4.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi -----	IV - 1
	4.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat-----	IV - 2
	4.1.3.	Aspek Pelayanan Umum -----	IV - 2
	4.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah-----	IV - 6
	4.2.	Isu Strategis Pembangunan Aceh 2017 - 2022 -----	IV - 6
	4.2.1.	Peningkatan sumber Penerimaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah -----	IV - 7
	4.2.2.	Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik-----	IV - 7
	4.2.3.	Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan-----	IV - 7
	4.2.4.	Penguatan perdamaian secara berkelanjutan -----	IV - 8
	4.2.5.	Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan-----	IV - 8
	4.2.6.	Pengembangan pertanian dan perikanan -----	IV - 8
	4.2.7.	Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM -----	IV - 8
	4.2.8.	Pengembangan pariwisata -----	IV - 8
	4.2.9.	Ketenagakerjaan -----	IV - 8
	4.2.10.	Ketersediaan dan ketahanan energi -----	IV - 9
	4.2.11.	Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi -----	IV - 9
	4.2.12.	Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah -----	IV - 9
	4.2.13.	Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni -----	IV - 9
	4.2.14.	Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan -----	IV - 9
	4.2.15.	Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga -----	IV - 10
	4.2.16.	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan -----	IV - 10
	4.2.17.	Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)-----	IV - 10
	4.2.18.	Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup -----	IV - 10
BAB	V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN -----	V - 1
	5.1.	Visi -----	V - 1
	5.2.	Misi-----	V - 1
	5.3.	Tujuan dan Sasaran -----	V - 2
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN ACEH -----	VI - 1
BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT ACEH -----	VII - 1
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH -----	VIII - 1
BAB	IX	PENUTUP -----	IX - 1
	9.1.	Pedoman Transisi -----	IX - 1
	9.2.	Kaidah Pelaksanaan-----	IX - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan Tahun 2017 -----	II - 4
Tabel 2.2.	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2016 -----	II - 4
Tabel 2.3.	Potensi Danau Aceh-----	II - 5
Tabel 2.4.	Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh -----	II - 6
Tabel 2.5.	Kondisi Rata-Rata Suhu Udara, Curah Hujan dan Kelembaban Tahun 2012-2017-----	II - 7
Tabel 2.6.	Jenis Penggunaan Lahan di Aceh Tahun 2012-2017-----	II - 8
Tabel 2.7.	Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017-----	II - 9
Tabel 2.8.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 -----	II - 16
Tabel 2.9.	Distribusi PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Aceh, 2012-2017 -----	II - 17
Tabel 2.10.	Laju Inflasi Tahun 2010 - 2017-----	II - 17
Tabel 2.11.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 - 2017 -----	II - 21
Tabel 2.12.	Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Aceh Tahun 2010 - 2017 -----	II - 22
Tabel 2.13.	Perkembangan Komponen Ketenagakerjaan Aceh, Tahun 2012-2017 -----	II - 23
Tabel 2.14.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2012 - 2017 -----	II - 24
Tabel 2.15.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Sumatera Utara dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2012 - 2017 -----	II - 25
Tabel 2.16.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016 -----	II - 26
Tabel 2.17.	Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2012 - 2017-----	II - 26
Tabel 2.18.	Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2012-2017-----	II - 27
Tabel 2.19.	Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2012 - 2017-----	II - 28
Tabel 2.20.	Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2012 - 2017 -----	II - 29
Tabel 2.21.	Angka Kematian Balita (AKABA) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2012 - 2017-----	II - 30
Tabel 2.22.	Angka Usia Harapan Hidup di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 32
Tabel 2.23.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2012 - 2017 -----	II - 33
Tabel 2.24.	Indeks Dimensi dan Sub Dimensi Kebahagiaan Aceh Tahun 2017-----	II - 34
Tabel 2.25.	Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2016-----	II - 34
Tabel 2.26.	Jumlah pelanggaran Syariat Islam Tahun 2012 - 2017-----	II - 37
Tabel 2.27.	Jumlah Dai di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2012 - 2017 -----	II - 38
Tabel 2.28.	Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2012 - 2017 -----	II - 39
Tabel 2.29.	Data Peran Ulama dalam Pembangunan/ Fatwa Ulama tahun 2012-2017--	II - 39

Tabel 2.30.	Target dan Realisasi Bantuan Reintegrasi Aceh Periode 2016 -----	II - 41
Tabel 2.31.	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2012 – 2017 -----	II - 41
Tabel 2.32.	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Aceh Tahun 2012– 2017-----	II - 42
Tabel 2.33.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16 – 18 Tahun 2012 – 2017 -----	II - 43
Tabel 2.34.	Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD/SMP/SMA/Sederajat Tahun 2015-2017 --	II - 44
Tabel 2.35.	Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Jenjang SD/SMP/SMA/SMK Tahun 2015-2016-----	II - 45
Tabel 2.36.	Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2017 -----	II - 46
Tabel 2.37.	Data Akreditasi Sekolah Jenjang SD/SMP/SMA/SMK Tahun 2017 -----	II - 47
Tabel 2.38.	Angka Kesakitan Tahun 2012-2017 -----	II - 48
Tabel 2.39.	Angka Kematian Neonatus (AKN) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2012 – 2017 -----	II - 49
Tabel 2.40.	Rasio Posyandu dan Balita Di Aceh Tahun 2012-2017-----	II - 50
Tabel 2.41.	Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk dan Kurang di Aceh Tahun 2015 – 2017 -----	II - 50
Tabel 2.42.	Prevalensi Balita Stunting di Aceh Tahun 2015-2017-----	II - 51
Tabel 2.43.	Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 52
Tabel 2.44.	Rasio Rumah Sakit di Aceh Tahun 2012-2016-----	II - 53
Tabel 2.45.	Ketersediaan Tenaga Medis di Aceh tahun 2012 - 2017 -----	II - 53
Tabel 2.46.	Rasio Dokter di Aceh Tahun 2012 - 2017-----	II - 54
Tabel 2.47.	Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk Tahun 2012- 2017 -----	II - 54
Tabel 2.48.	Cakupan Komplikasi Kebidanan di Aceh Tahun 2012 - 2017-----	II - 55
Tabel 2.49.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Aceh Tahun 2012 - 2017 -----	II - 55
Tabel 2.50.	Persentase Desa UCI di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 55
Tabel 2.51.	Cakupan Desa/Kelurahan UCI menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2012 - 2017 -----	II - 56
Tabel 2.52.	Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan Tahun 2012-2017-----	II - 57
Tabel 2.53.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+ di Aceh Tahun 2012– 2017 -----	II - 57
Tabel 2.54.	Persentase Cakupan Kunjungan Bayi Di Aceh Periode 2012-2017 -----	II - 58
Tabel 2.55.	Cakupan Puskesmas di Aceh periode 2012-2017-----	II - 58
Tabel 2.56.	Cakupan Puskesmas Pembantu Di Aceh periode 2012-2017 -----	II - 58
Tabel 2.57.	Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2012 – 2017 -----	II - 59
Tabel 2.58.	Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2012-2017-----	II - 60
Tabel 2.59.	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2012-2017 -----	II - 61
Tabel 2.60.	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033 -----	II - 63
Tabel 2.61.	Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2012-2016 -----	II - 64

Tabel 2.62.	Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya -----	II - 64
Tabel 2.63.	Jenis Irigasi dan Luasannya -----	II - 65
Tabel 2.64.	Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota-----	II - 65
Tabel 2.65.	Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan -----	II - 66
Tabel 2.66.	Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan -----	II - 66
Tabel 2.67.	Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 67
Tabel 2.68.	Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2012-2017-----	II - 69
Tabel 2.69.	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2012 s.d 2017 -----	II - 72
Tabel 2.70.	Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 72
Tabel 2.71.	Organisasi/Lembaga Pemerintah Tahun 2012 - 2017 di Lingkungan Pemerintah Aceh -----	II - 73
Tabel 2.72.	Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Tahun 2015 - 2017 di Lingkungan Pemerintah Aceh-----	II - 74
Tabel 2.73.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2012-2017-----	II - 75
Tabel 2.74.	Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2012 - 2017 -----	II - 80
Tabel 2.75.	Proporsi Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2012- 2017 -----	II - 81
Tabel 2.76.	Komposisi Jumlah Kursi Legislatif menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017 -----	II - 82
Tabel 2.77.	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Tahun 2014-2017-----	II - 83
Tabel 2.78.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2012 - 2017 -----	II - 84
Tabel 2.79.	Penerima Penghargaan Adipura Tingkat Provinsi di Provinsi Aceh -----	II - 90
Tabel 2.80.	Peringkat Proper untuk Perusahaan-Perusahaan di Provinsi Aceh -----	II - 90
Tabel 2.81.	Persentase Jumlah Sampah Tertangani di Provinsi Aceh Tahun 2017 -----	II - 92
Tabel 2.82.	Persentase Penduduk yang Telah Memiliki KTP-Elektronik 2014 - 2017---	II - 93
Tabel 2.83.	Kepemilikan Akta kelahiran Tahun 2017-----	II - 94
Tabel 2.84.	Persentase Kepemilikan Akta Nikah Tahun 2014 - 2017 -----	II - 95
Tabel 2.85.	Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 98
Tabel 2.86.	Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2012-2017-----	II - 99
Tabel 2.87.	Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan di Aceh Tahun 2012-2017-----	II - 100
Tabel 2.88.	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2012-2017	II - 101
Tabel 2.89.	Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 101
Tabel 2.90.	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan yang Menggunakan Alat Komunikasi dan Informatika di Aceh Tahun 2012 - 2017 -----	II - 102
Tabel 2.91.	Organisasi Kepemudaan, 2012-2017-----	II - 105

Tabel 2.92.	Cabang Olahraga, Atlit, Pelatih, Prestasi dan Infrastruktur Olahraga Aceh, 2012-2017-----	II - 105
Tabel 2.93.	Luas Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017 -----	II - 112
Tabel 2.94.	Perkembangan Populasi Ternak Sapi dan Kerbau per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017 -----	II - 114
Tabel 2.95.	Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya Tahun 2017-----	II - 115
Tabel 2.96.	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan di Aceh Tahun 2013-2017-----	II - 116
Tabel 2.97.	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2013-2017	II - 117
Tabel 2.98.	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB Tahun 2013-2017 -----	II - 117
Tabel 2.99.	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan, 2012-2017 -----	II - 118
Tabel 2.100.	Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN Menurut Jenisnya di Aceh Tahun 2012-2017-----	II - 118
Tabel 2.101.	Rencana Pembangunan Pembangkit -----	II - 120
Tabel 2.102.	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 121
Tabel 2.103.	Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Juni 2017 -----	II - 121
Tabel 2.104.	Jumlah Pelabuhan Perikanan per Kabupaten Kota Tahun 2012-2016 -----	II - 127
Tabel 2.105.	Produksi Garam Aceh -----	II - 128
Tabel 2.106.	Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/ Angka IPP Tahun 2012-2017-----	II - 131
Tabel 2.107.	Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017-----	II - 132
Tabel 2.108.	Nilai Tukar Petani pada Kelompok Sub Sektor Pertanian, 2012-2017 -----	II - 135
Tabel 2.109.	Nilai Ekspor dan Impor Melalui Pelabuhan di Provinsi Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 136
Tabel 2.110.	Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2017 -----	II - 138
Tabel 2.111.	Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 139
Tabel 2.112.	Persentase Rumah Tangga Berlistrik di Aceh tahun 2012-2017 -----	II - 140
Tabel 3.1.	Pengesahan APBA Tahun 2012-2017 -----	III - 2
Tabel 3.2.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 4
Tabel 3.3.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 6
Tabel 3.4.	Proporsi Realisasi Jenis Penerimaan Aceh Terhadap Total Pendapatan Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 7
Tabel 3.5.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2012-2017 ---	III - 9
Tabel 3.6.	Skala Interval Efektivitas Keuangan Daerah -----	III - 9
Tabel 3.7.	Anggaran dan Realisasi Pajak Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 10
Tabel 3.8.	Anggaran dan Realisasi Retribusi Aceh Tahun 2012-2017-----	III - 11

Tabel 3.9.	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 11
Tabel 3.10.	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2012-2017 -----	III - 12
Tabel 3.11.	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012-2017 -----	III - 12
Tabel 3.12.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2012-2017 -----	III - 14
Tabel 3.13.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2012-2017 -----	III - 14
Tabel 3.14.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012-2017 ----	III - 15
Tabel 3.15.	Anggaran dan Realisasi Otonomi Khusus Tahun 2012-2017 -----	III - 16
Tabel 3.16.	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah Tahun 2012-2017-----	III - 17
Tabel 3.17.	Realisasi Belanja Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 17
Tabel 3.18.	Rasio Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Belanja Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 18
Tabel 3.19.	Total Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 18
Tabel 3.20.	Rasio Realisasi Belanja Langsung terhadap Realisasi Belanja Aceh Tahun 2012-2017-----	III - 20
Tabel 3.21.	Rasio Realisasi Belanja Pegawai terhadap Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012-2017 -----	III - 21
Tabel 3.22.	Rasio Realisasi Belanja Barang dan Jasa terhadap Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012-2017 -----	III - 21
Tabel 3.23.	Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Langsung Tahun 2012-2017 -----	III - 22
Tabel 3.24.	Anggaran dan Realisasi Total Belanja Langsung Tahun 2012-2017-----	III - 22
Tabel 3.25.	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 23
Tabel 3.26.	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Aceh Tahun 2012-2017- -	III - 24
Tabel 3.27.	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Aceh Tahun 2012-2017	III - 25
Tabel 3.28.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2012-2017 Provinsi Aceh -	III - 26
Tabel 3.29.	Balance Sheet Ratio Tahun 2012-2017 Pemerintah Aceh -----	III - 28
Tabel 3.30.	Kondisi Aset Lancar Pemerintah Aceh tahun 2016-2017-----	III - 28
Tabel 3.31.	Kondisi Aset Tidak Lancar Pemerintah Aceh -----	III - 29
Tabel 3.32.	Kondisi Aset Tetap Pemerintah Aceh-----	III - 30
Tabel 3.33.	Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012-2017 -----	III - 33
Tabel 3.34.	Analisis Realisasi Proporsi Dana Pendidikan Tahun 2012-2017-----	III - 33
Tabel 3.35.	Analisis Realisasi Proporsi Dana Kesehatan Tahun 2012-2017 -----	III - 34
Tabel 3.36.	Proporsi Anggaran Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh Tahun 2012-2017 ----	III - 34
Tabel 3.37.	Defisit Riil Anggaran Aceh Tahun 2012-2017 Pemerintah Aceh -----	III - 36
Tabel 3.38.	Realisasi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2012 -2017 Provinsi Aceh -	III - 36
Tabel 3.39.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2012-2017 Provinsi Aceh -----	III - 37
Tabel 3.40.	Proyeksi Pajak Aceh Tahun 2018-2022-----	III - 40
Tabel 3.41.	Proyeksi Retribusi Aceh Tahun 2018-2022 -----	III - 42

Tabel 3.42.	Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Tahun 2018-2022 -----	III - 42
Tabel 3.43.	Proyeksi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2018-2022-----	III - 43
Tabel 3.44.	Proyeksi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2018-2022-----	III - 44
Tabel 3.45.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2022 Provinsi Aceh -----	III - 46
Tabel 3.46.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Aceh-----	III - 48
Tabel 3.47.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Aceh Tahun 2018-2022-----	III - 50
Tabel 3.48.	Dana Cadangan Aceh per 31 Desember 2017-----	III - 51
Tabel 5.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh, 2017-2022 Berdasarkan Misi ----	V - 3
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, 2017-2022-----	VI - 2
Tabel 6.2	Lima Belas Unggulan Aceh Hebat berdasarkan Misi Pembangunan -----	VI - 12
Tabel 6.3.	Prioritas Pembangunan RPJM Aceh, 2017-2022 -----	VI - 16
Tabel 6.4.	Program Pembangunan Berdasarkan Prioritas Pembangunan RPJM Aceh, 2017-2022-----	VI - 17
Tabel 6.5.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif, 2018-2022 --	VI - 26
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Aceh Tahun 2018-2022-----	VII - 1
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018-2022 -----	VII - 2
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Aceh, 2018-2022-----	VIII - 1
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan-----	VIII - 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Antar Dokumen -----	I - 1
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Aceh-----	II - 1
Gambar 2.2.	Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh Tahun 2016-----	II - 3
Gambar 2.3.	Struktur Penduduk Aceh Tahun 2017 (dalam Persen)-----	II - 10
Gambar 2.4.	Perkembangan Indeks Ketergantungan Penduduk Aceh 2010-2017-----	II - 10
Gambar 2.5.	Peta Indeks Rawan Bencana Aceh-----	II - 13
Gambar 2.6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, 2012-2017 dengan Migas dan Tanpa Migas (Persen) -----	II - 15
Gambar 2.7.	PDRB Perkapita ADHB Aceh 2012-2017 -----	II - 18
Gambar 2.8.	Indeks Gini Rasio Aceh Tahun 2012 – 2017 -----	II - 19
Gambar 2.9.	Indeks Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson) Aceh Tahun 2012 – 2017 -----	II - 20
Gambar 2.10.	Persentase Kemiskinan Aceh Tahun 2012 – 2017 -----	II - 20
Gambar 2.11.	Perkembangan Persentase Pengangguran Menamatkan Pendidikan SMA Sederajat dan Universitas, Tahun 2012-2017 -----	II - 24
Gambar 2.12.	Angka Usia Harapan Hidup Aceh Tahun 2012 – 2018-----	II - 28
Gambar 2.13.	Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2012-2017 ---	II - 33
Gambar 2.14.	Pemanfaatan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tahun 2013-2017--	II - 37
Gambar 2.15.	Jumlah Sertifikat Halal yang Diterbitkan Tahun 2013 – 2017 -----	II - 40
Gambar 2.16.	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2012-2017 -----	II - 62
Gambar 2.17.	Pembagian Wilayah Sungai Aceh -----	II - 70
Gambar 2.18.	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Aceh, 2012-2017 -----	II - 76
Gambar 2.19.	Perkembangan Laju Produktivitas Tenaga Kerja Aceh, 2012-2017 -----	II - 77
Gambar 2.20.	Perkembangan Pengangguran Berdasarkan Kelompok Usia di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 78
Gambar 2.21.	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2012-2016 -----	II - 78
Gambar 2.22.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2012 – 2017 -----	II - 79
Gambar 2.23.	Indeks Pemberdayaan Gender Aceh Tahun 2012 – 2017-----	II - 81
Gambar 2.24.	Tahapan Penyusunan RPPLH Aceh -----	II - 86
Gambar 2.25.	Penanganan Kasus Lingkungan Hidup di Aceh Tahun 2013-2017-----	II - 91
Gambar 2.26.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2012-2017 --	II - 96
Gambar 2.27.	Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 97
Gambar 2.28.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 98
Gambar 2.29.	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 100
Gambar 2.30.	Jumlah Koperasi Aktif di Aceh -----	II - 103

Gambar 2.31.	Perkembangan Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) Aceh, 2012-2017 -----	II - 104
Gambar 2.32.	Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Aceh (Persen), Tahun 2012-2017-----	II - 108
Gambar 2.33.	Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Utama Aceh (ton/ha), Tahun 2012-2017 -----	II - 109
Gambar 2.34.	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh (ton), Tahun 2012-2017-----	II - 110
Gambar 2.35.	Perkembangan Harga Global terhadap Komoditi Minyak Kelapa, Minyak Sawit dan Kopra selama 10 tahun terakhir 2007-2017 (dalam USD/Ton)-----	II - 111
Gambar 2.36.	Perkembangan Harga Global terhadap Komoditi Karet, Kakao dan Kopi Arabica selama 10 tahun terakhir 2007-2017 (dalam USD/Ton)-----	II - 112
Gambar 2.37.	Perkembangan Produksi Daging Ternak Ruminansia (ton) Aceh, Tahun 2012-2017 -----	II - 114
Gambar 2.38.	Peta Sistem Kelistrikan Provinsi Aceh-----	II - 119
Gambar 2.39.	Daya Listrik Tersambung Per Sektor Pelanggan di Aceh Tahun 2017----	II - 121
Gambar 2.40.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sub Sektor Listrik dan Gas di Aceh 2012-2016 -----	II - 122
Gambar 2.41.	Kontribusi Perdagangan dan Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh, Tahun 2012-2017 -----	II - 124
Gambar 2.42.	Kontribusi Sektor Industri dan Pertumbuhan Industri Aceh (persen), Tahun 2012-2017 -----	II - 125
Gambar 2.43.	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Aceh, Tahun 2012-2016 -----	II - 125
Gambar 2.44.	Produksi Perikanan Aceh (persen), Tahun 2012-2016 -----	II - 126
Gambar 2.45.	Perkembangan Volume Ekspor Perikanan Aceh (Ton), Tahun 2012-2017 -----	II - 127
Gambar 2.46.	Perkembangan dan Laju Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita Aceh (Juta), Tahun 2012-2017 -----	II - 133
Gambar 2.47.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh, Tahun 2012-2017 -----	II - 134
Gambar 2.48.	Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan, Tahun 2012-2017 -----	II - 135
Gambar 2.49.	Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh, Tahun 2012-2017 -----	II - 136
Gambar 2.50.	Perkembangan FDR di Aceh Tahun 2012-2017 -----	II - 137
Gambar 3.1.	Realisasi APBA Berdasarkan Komponen Tahun 2012-2017 -----	III - 6
Gambar 3.2.	Grafik Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 7
Gambar 3.3.	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Aceh Tahun 2012-2017-----	III - 8
Gambar 3.4.	Pertumbuhan Realisasi PAA Tahun 2012-2017 -----	III - 10
Gambar 3.5.	Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012-2017-----	III - 13
Gambar 3.6.	Pertumbuhan Realisasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2012-2017 -----	III - 16
Gambar 3.7.	Pertumbuhan Pembiayaan Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 24
Gambar 3.8.	Pertumbuhan Realisasi Neraca Aceh Tahun 2012-2017 -----	III - 27

Gambar 3.9.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Periode Tahun 2012-2017 -----	III - 33
Gambar 3.10.	Kapasitas Riil Keuangan Aceh Tahun 2018-2022 -----	III - 48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Ketiga peraturan ini memberikan arahan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Hal ini ditujukan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2017-2022 telah dilantik pada tanggal 5 Juli 2017. Atas dasar ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan peraturan daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Agar pembangunan dapat

memberikan hasil yang optimal, maka RPJMD harus pula memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan spasial yang telah digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJM Aceh 2017-2022 merupakan tahapan pembangunan ketiga dari RPJP Aceh 2005-2025. Tahapan ini memfokuskan pada pemantapan basis pengembangan industri manufaktur. Sejalan dengan hal tersebut fokus pembangunan juga menguatkan agroindustri yang belum berkembang secara optimal pada tahapan pembangunan sebelumnya.

Pengembangan SDM diarahkan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi pengembangan agroindustri melalui sekolah menengah kejuruan, politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK). Pengembangan infrastruktur diarahkan pada infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi untuk memperlancar arus orang, barang dan jasa. Sementara untuk pembangunan pendidikan diarahkan pada pemerataan akses, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Pelayanan pendidikan akan ditingkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pelayanan pendidikan Aceh memiliki daya saing yang lebih tinggi secara nasional dan global. Demikian juga pembangunan kesehatan ditingkatkan melalui reformasi pelayanan kesehatan berkualitas untuk memenuhi standarisasi dan akreditasi.

Mengingat dokumen RPJM Aceh merupakan dokumen publik yang merangkum daftar rencana program pembangunan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka penyusunan RPJMD dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan penting yaitu: **Pertama**, pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan dengan berdasarkan pada penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. **Kedua**, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJMD. **Ketiga**, pendekatan politis yakni menetapkan RPJMD melalui proses legislasi daerah dalam bentuk Qanun. **Keempat**, pendekatan *bottom up* dan *top down* yang proses perencanaannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan. Selain menggunakan pendekatan di atas, penyusunan RPJM Aceh dilaksanakan melalui pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai suatu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, sasaran dan kebijakan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan, serta tetap mensinkronkan dengan sasaran, kebijakan dan program strategis nasional.

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPJM Aceh 2017-2022 telah terintegrasi dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMA karena Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang termuat dalam KLHS RPJMA menjadi pertimbangan untuk merumuskan isu-isu strategis dan menetapkan program-program dalam RPJM yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian, KLHS RPJMA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMA sebagai upaya mewujudkan pembangunan Aceh yang berkelanjutan (*sustainable development*).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017 -2022 yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah sebagai berikut:

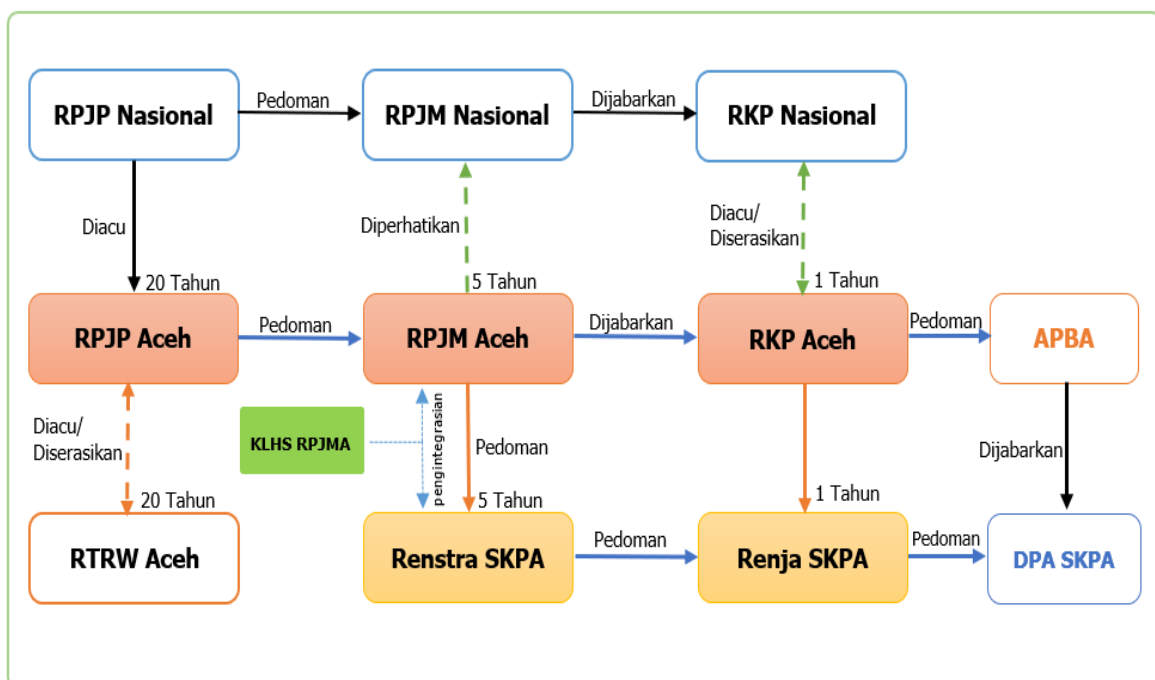
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 19. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh;
 20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 25. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53).

26. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1;
27. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9).
28. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
29. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
30. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
31. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 87);
32. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Sehingga dalam penyusunan RPJM Aceh harus berpedoman pada RPJP Aceh dan mengacu pada RTRW Aceh serta memperhatikan RPJM Nasional (Gambar 1.1).



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen

RPJM Aceh ini menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti:

1. Rencana pembangunan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPA;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
3. Rencana Pembangunan Tahunan SKPA, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJM Aceh Tahun 2017-2022 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Aceh untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJM Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan menetapkan program pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Aceh, dan perencanaan serta penganggaran;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Aceh Tahun 2017–2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN ACEH
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ACEH
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT ACEH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH; DAN
BAB IX	PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH

Gambaran umum kondisi Aceh diuraikan dalam beberapa aspek yang meliputi: aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

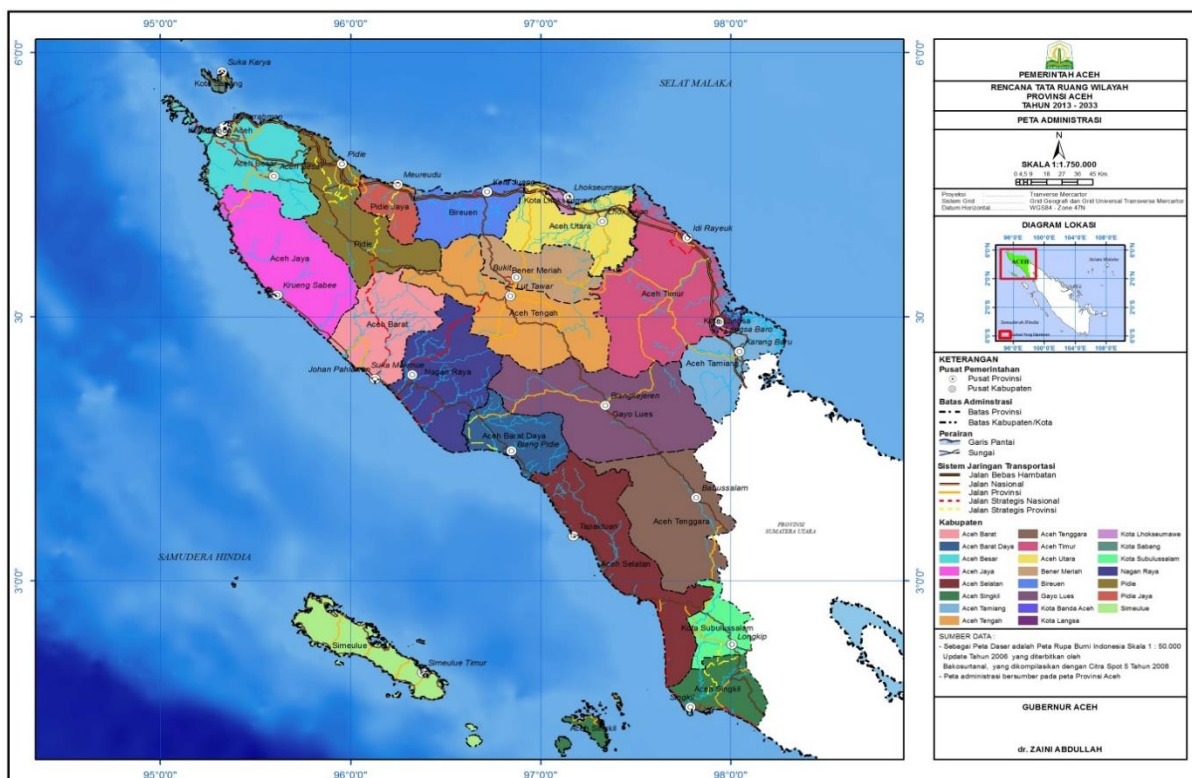
Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada 01°58'37,2"-06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"- 98°17'13,2" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia



Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh

Gambar 2.1. menunjukkan bahwa Aceh memiliki luas wilayah darat 58.880,87 Km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 Km², dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan

5 (lima) Kota, 289 Kecamatan, 805 Mukim dan 6.497 Gampong/Desa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 140/632/2017.

2.1.1.2. Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat dibagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 - 8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 - 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat – selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 - 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (> 40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 m dpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 - 1.000 m dpl, terdapat diseluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 - 2.000 m dpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl, berada didaerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

2.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi.

Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggung; dengan potensi air tanah sangat rendah;
- b. Sedimen padu - tak terbedakan (*consolidated sediment - undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
- c. Batu gamping atau dolomit (*ilimestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
- d. Hasil gunung api - lava, lahar, tufa, dan breksi (*volcanic products - lava, lahar, tuff, bereccia*), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar

Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah;

- e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment (gravel, sand, silt, clay)*), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

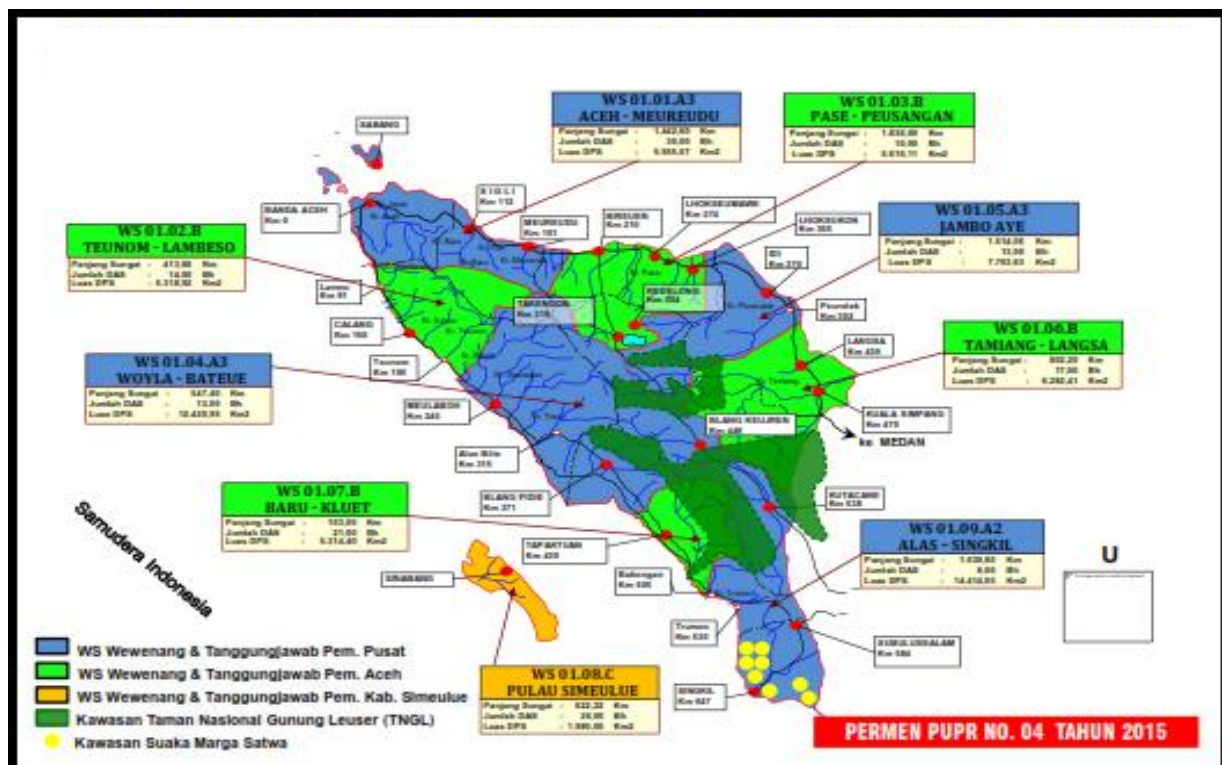
2.1.1.4. Hidrologi

A. Air Permukaan

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi sungai, danau, rawa dan sumber air permukaan lainnya (Permen PUPR Nomor 1/2016).

1. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015 Provinsi Aceh memiliki 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS) terdiri dari 3 (tiga) WS Strategis Nasional dan 1 (satu) WS Lintas Provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; 4 (empat) WS Lintas Kabupaten/Kota, yang dikelola oleh Pemerintah Aceh; dan 1 (satu) WS satu Kabupaten yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Pemerintah Pusat mengelola 4 (empat) WS yaitu Wilayah Sungai Aceh-Meureudu, Wilayah Sungai Jambo Aye, Wilayah Sungai Woyla-Bateue, dan Wilayah Sungai Alas-Singkil. Pemerintah Aceh mengelola 4 (empat) WS yaitu Wilayah Sungai Pase-Peusangan, Wilayah Sungai Tamiang-Langsa, Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso, dan Wilayah Sungai Baru-Kluet. Sedangkan Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Wilayah Sungai Pulau Simeulue. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan luas masing-masing Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan pada Tabel 2.1.



Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh Tahun 2016

Dalam gambar diatas luas DAS masing-masing Wilayah Sungai dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.
Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan Tahun 2017

No.	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km ²)
I	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh – Meureudue	5.555,57
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	7.763,83
			WS 01.04.A3	Woyla – Bateue	12.429,95
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas – Singkil	14.414,65
II	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase – Peusangan	5.610,11
			WS 01.06.B	Tamiang – Langsa	6.282,41
			WS 01.02.B	Teunom – Lambesoi	5.318,92
			WS 01.07.B	Baru – Kluet	5.314,40
III	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.980,00

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2018

Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dan peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah. Selain itu, pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budidaya perikanan.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: sungai - sungai yang bermuara ke Samudera Hindia atau ke arah Barat - Selatan dan sungai - sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur - Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Tahun 2016

No.	Nama Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m ³ /dt	milyar. m ³ /thn	m ³ /dt	milyar. m ³ /thn
KEWENANGAN PUSAT							
1.	WS Aceh - Meureudue	30	447,79	197,38	6,23	117,13	3,69
2.	WS Jambo Aye	13	660,16	200,37	6,32	91,08	2,87
3.	WS Woyla - Batee	13	547,40	638,76	20,14	109,37	3,45
4.	WS Alas - Singkil	8	639,80	890,63	28,09	109,77	3,46
KEWENANGAN PROVINSI							
5.	WS Pase- Peusangan	10	536	205,39	6,48	2,82	2,82

No.	Nama Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m ³ /dt	milyar. m ³ /thn	m ³ /dt	milyar. m ³ /thn
6.	WS Teunom-Lambesoi	14	502,20	604,67	19,07	2,81	2,81
7.	WS Tamiang-Langsa	17	261,30	354,09	11,17	4,08	4,08
8.	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,25	7,83	102	3,22
KEWENANGAN KAB/KOTA							
9.	WS Simeulue	26	102,22	98,88	3,12	10,69	0,34
TOTAL		152	3.825,	3.825,82	108,45	847,59	26,74

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km², Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik/km², dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik/km².

Potensi air yang ada di Aceh belum dikelola secara optimal, sehingga frekuensi banjir dan kekeringan sering terjadi. Dengan demikian, perlu pengelolaan sumber daya air yang lebih baik melalui konservasi dan budaya hemat air.

2. Danau

Aceh memiliki 7 danau besar dan 6 danau kecil tersebar di seluruh kabupaten/kota. Danau besar antara lain: Danau Laut Tawar di Aceh Tengah; Danau Aneuk Laot di Sabang, sementara beberapa danau kecil seperti: Danau Laut Bangkai di Aceh Selatan; Danau Peastep di Aceh Singkil; Danau Paris dan Danau Bungara di Aceh Singkil, dengan potensi seperti disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1.	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2.	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3.	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4.	Danau Laut Bangkai	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5.	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6.	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7.	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8.	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9.	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10.	Danau Opupu	Simeulue	138,10	19.334.000
Total			6.201,49	220.673.015

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2017

Potensi daya tampung air danau yang cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan

sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal.

B. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah perlu dijaga melalui pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, dengan kegiatan utama pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Sesuai dengan Atlas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasi 14 (empat belas) CAT seperti disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4.
Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

NO	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Sional-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
JUMLAH			1,743,681.75

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

2.1.1.5. Klimatologi

Aceh yang beriklim tropis memiliki dua musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi antara Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada April sampai September. Curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada November sampai Februari. Kondisi rata-rata suhu udara, curah hujan dan kelembaban disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Kondisi Rata-Rata Suhu Udara, Curah Hujan dan Kelembaban
Tahun 2012-2017

Kondisi	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Suhu Udara (C)	23.0	27.0	23.2	27.1	27.4	27,1
Curah Hujan (mm)	91.5	135.3	135.3	115.3	209.1	199,9
Kelembaban (%)	79.6	80.7	*	80.3	79.7	78,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

*Data tidak tersedia

Suhu udara selama periode tahun 2012 hingga 2014 berfluktuatif dan cenderung stabil pada periode tiga tahun terakhir. Curah hujan mengalami peningkatan pada periode tahun 2012 sampai 2016 dan menurun pada tahun 2017 sedangkan kelembaban relatif stabil. Rata-rata suhu udara tahunan di Aceh berkisar antara 23-27 °C. Pada tahun 2017, rata-rata suhu udara di Aceh sebesar 27,1 °C. Dalam periode yang sama, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 209,1 mm, meningkat jauh dari rata-rata curah hujan pada tahun 2012 yang hanya sebesar 91,5 mm. Sementara itu kondisi rata-rata kelembaban udara tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam rentang waktu 2012 sampai 2017.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spiritual. Pemanfaatan lahan harus disesuaikan dengan kemampuan tanah dan pemberian perlakuan harus disesuaikan dengan syarat-syarat yang diperlukan, agar tanah dapat berfungsi dengan baik tanpa harus mengurangi tingkat kesuburannya, sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Agar pemanfaatan lahan sesuai dengan kemampuan tanah dan tidak terjadi kerusakan lingkungan, maka perlu adanya suatu perencanaan tata guna lahan.

Perencanaan tata guna lahan (*land use planning*) merupakan suatu proses perencanaan terhadap penggunaan/pemanfaatan lahan dan alternatif pola tata guna lahan dengan mempertimbangkan faktor pengembangannya, baik fisik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Perencanaan tata guna lahan ini memiliki tujuan diantaranya adalah untuk melakukan penentuan pilihan dan penerapan salah satu pola tata guna lahan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi yang ada sehingga diharapkan dapat mencapai suatu sasaran. Perencanaan tata guna lahan pada setiap daerah dapat disusun dalam suatu perencanaan penataan ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Jenis penggunaan lahan di Aceh didominasi oleh hutan (lebat, belukar dan sejenis), perkebunan dan pertanian tanah kering yang secara lebih rinci dapat di lihat pada Tabel 2.6. Pada periode 2012 hingga 2017, luas beberapa jenis penggunaan lahan cenderung berkurang seperti: perkampungan, persawahan dan pertambangan.

Jenis penggunaan lahan perkampungan menurun sejak tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan perkampungan yang sebelumnya berada dalam kawasan hutan diperhitungkan dalam jenis penggunaan lahan perkampungan tidak lagi dihitung sebagai perkampungan dengan luasan sebesar 41.246,16 Ha. Sementara itu jenis penggunaan lahan sektor pertambangan mengalami penurunan selama periode yang sama yaitu sebesar 179.493,88 Ha. Demikian juga dengan jenis penggunaan lahan persawahan pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2015 mengalami penurunan signifikan mencapai 87.045,61 Ha.

Tabel 2.6.
Jenis Penggunaan Lahan di Aceh Tahun 2012-2017

No	Penggunaan Lahan	Luas/Area (Ha)					
		2012	2013	2014	2015*	2016	2017
1	Perkampungan	125.444	125.439	152.725	152.725	111.446,86	111.478,84
2	Industri	3.928	3.928	2.096	2.096	1.657,14	1.662,59
3	Pertambangan	206.049	198.000	180.000	180.000	494,12	506,12
4	Persawahan	314.988	397.512	324.118	324.118	245.256,55	237.072,39
5	Pertanian tanah kering semusim	139.053	139.049	598.286	598.286	571.020,47	597.576,07
6	Kebun	305.709	305.624	250.752	250.752	411.092,82	368.427,93
7	Perkebunan	1.001.263	1.001.081	1.065.350	1.065.350	580.261,92	621.520,57
8	Padang (Padang rumput, alang-alang dan semak)	231.055	232.023	130.000	130.000	120.082,11	117.617,17
9	Hutan (Lebat, belukar sejenis)	2.290.874	2.270.080	2.270.080	2.270.080	3.473.058,62	3.453.316,97
10	Perairan Darat (Kolam air tawar, tambak, penggaraman, waduk danau dan rawa)	206.738	206.741	206.741	206.741	102.334,70	110.579,40
11	Tanah terbuka (Tandus, rusak dan <i>land cleaning</i>)	44.418	8.433	5.004	5.004	56.509,67	54.967,52
12	Lainnya/ <i>others</i>	807.562	789.171	491.930	491.930	3.866,02	19.187,54
TOTAL		5.679.093	5.679.094	5.679.096	5.679.096	5.679.097	5.695.930

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

*Menggunakan data tahun 2014 dikarenakan data tahun 2015 tidak tersedia

Jenis penggunaan lahan berupa hutan (termasuk hutan lebat, belukar dan sejenisnya) mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu seluas 1.183.236,97 ha atau sebesar 20,77 persen pada tahun 2017. Peningkatan jenis penggunaan lahan berupa hutan diperkirakan meningkat karena adanya perubahan perhitungan jenis penggunaan lahan berupa hutan yang sebelumnya diperhitungkan sebagai penggunaan lahan berupa perkampungan, perkebunan, dan pertambangan menjadi jenis penggunaan lahan berupa hutan. Sebaliknya luas sawah menurun sebesar 87.045,61 Ha atau 1,53 Persen pada tahun 2017 dibandingkan pada tahun 2015 disebabkan oleh alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan lahan lainnya.

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk Aceh periode tahun 2012-2017 tersebar di 18 kabupaten dan 5 (lima) kota seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2012-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Simeulue	84.722	86.206	87.598	89.117	90.291	91.375
2.	Aceh Singkil	107.697	110.108	112.161	114.518	116.712	119.49
3.	Aceh Selatan	212.612	216.994	220.971	224.897	228.603	231.893
4.	Aceh Tenggara	187.276	192.013	196.249	200.014	204.468	208.481
5.	Aceh Timur	378.424	386.212	394.933	402.976	411.279	419.594
6.	Aceh Tengah	183.792	188.214	192.204	196.090	200.412	204.273
7.	Aceh Barat	181.886	185.903	190.244	193.791	197.921	201.682
8.	Aceh Besar	369.134	376.491	384.618	392.584	400.913	409.109
9.	Pidie	397.590	404.817	410.580	418.882	425.974	432.599
10.	Bireuen	408.608	417.289	423.397	435.300	443.627	453.224
11.	Aceh Utara	555.746	565.370	572.961	583.892	593.492	602.554
12.	Aceh Barat Daya	132.612	135.385	138.140	140.689	143.312	145.726
13.	Gayo Lues	83.189	84.717	86.262	87.881	89.500	91.024
14.	Aceh Tamiang	264.167	269.007	272.228	278.324	282.921	287.007
15.	Nagan Raya	146.386	149.397	152.352	155.070	158.223	161.329
16.	Aceh Jaya	80.575	82.385	86.123	86.385	87.622	89.618
17.	Bener Meriah	128.070	131.023	134.015	136.821	139.890	142.526
18.	Pidie Jaya	139.399	142.887	145.584	148.719	151.472	154.795
19.	Banda Aceh	234.517	239.404	249.499	250.303	254.904	259.913
20.	Sabang	31.822	32.215	32.739	33.215	33.622	33.978
21.	Langsa	156.505	159.761	162.814	165.890	168.820	171.574
22.	Lhokseumawe	179.376	183.232	187.455	191.407	195.186	198.98
23.	Subulussalam	71.003	72.103	73.708	75.188	77.084	78.725
	Aceh	4.715.108	4.811.133	4.906.835	5.001.953	5.096.248	5.189.466

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

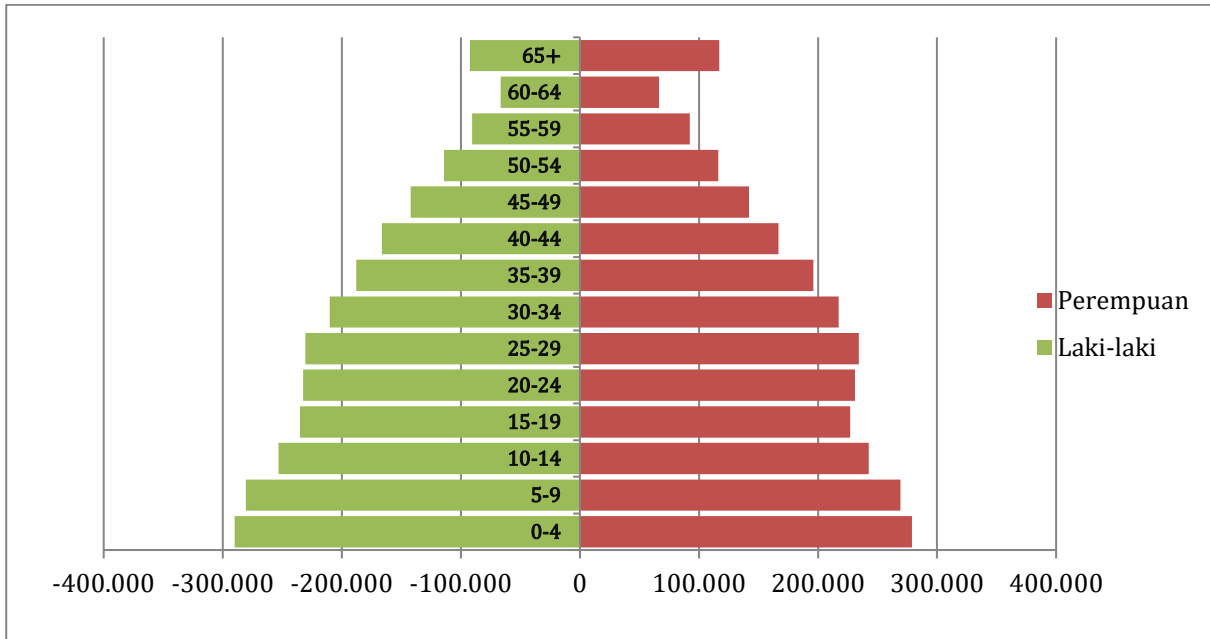
Tabel 2.7, menggambarkan bahwa penduduk Aceh pada tahun 2016, berjumlah 5.096.248 jiwa yang terdiri dari 2.545.113 jiwa laki-laki dan 2.551.135 jiwa perempuan. Dilihat dari distribusinya, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebanyak 593.429 jiwa atau sebesar 11,64 persen dari total penduduk Aceh. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kota Sabang, yaitu sebanyak 33.622 jiwa atau sebesar 0,66 persen dari total penduduk Aceh. Dilihat dari perkembangannya, penduduk Aceh mengalami peningkatan sebesar 8,08% dari tahun 2012 sejumlah 4.715.108 jiwa menjadi 5.096.248 jiwa pada tahun 2016.

Kepadatan penduduk kota lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk kabupaten. Pada tahun 2016, Kota Banda Aceh memiliki kepadatan penduduk kota tertinggi (4.552 jiwa/km²), disusul Kota Lhokseumawe (1.276 jiwa/Km²) dan Kota Langsa (832 jiwa/Km²). Sedangkan Kota Subulussalam memiliki kepadatan penduduk terendah (66 jiwa/Km²). Kepadatan penduduk kabupaten yang tertinggi adalah Kabupaten Bireuen (247 jiwa/km²) dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kepadatan penduduk Kabupaten Gayo Lues sebesar 16 jiwa/km² merupakan kepadatan penduduk terendah di antara kabupaten lainnya.

2.1.2.2. Struktur dan Indek Ketergantungan Penduduk

Struktur penduduk Aceh memiliki pola struktur yang relatif serupa dengan struktur penduduk nasional yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu 1) Piramida penduduk muda. Struktur ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Struktur penduduk ini menunjukkan jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian; 2) Piramida

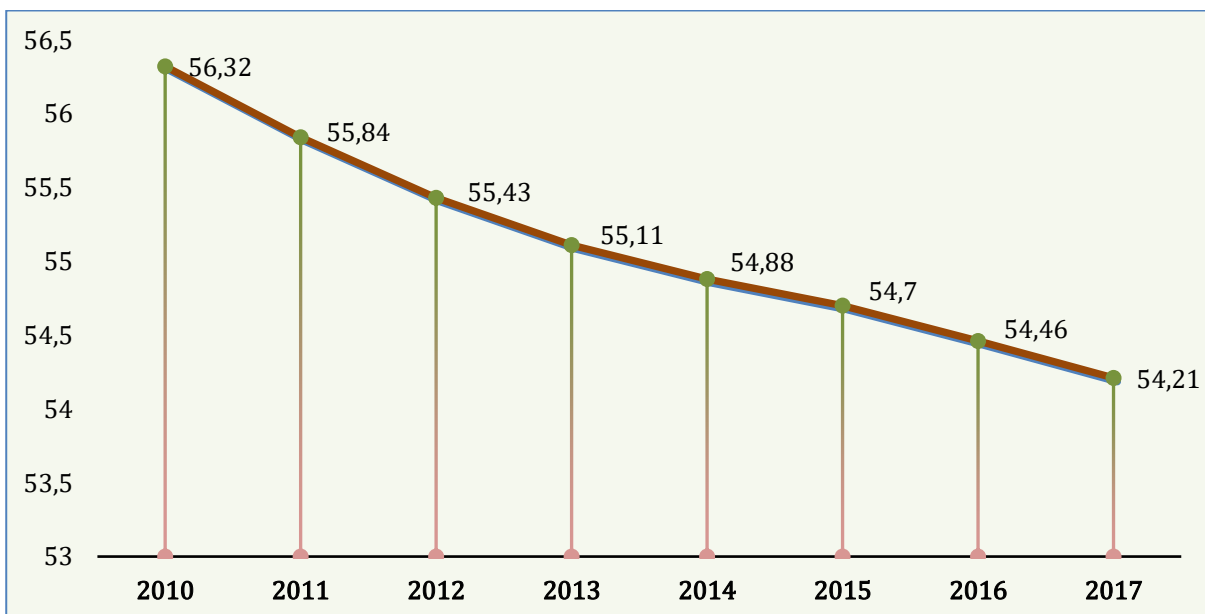
stationer. Struktur ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran relatif tidak tinggi; 3) Piramida penduduk tua. Struktur ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang relatif kecil. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2018

Gambar 2.3. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2017 (dalam Persen)

Gambar 2.3. ini menunjukkan bahwa secara demografis struktur penduduk Aceh pada Tahun 2017 tergolong tipe ekspansif yaitu komposisi penduduk Aceh berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk usia muda yang tergolong dalam kelompok umur 0-14 tahun yaitu sebesar 1.614.699 jiwa, kelompok umur 15 – 59 tahun (usia produktif) sebesar 3.232.110 jiwa, dan kelompok umur 60 tahun keatas (lanjut usia) sebesar 342.567 jiwa.



Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2018

Gambar 2.4. Perkembangan Indeks Ketergantungan Penduduk Aceh 2010-2017

Gambar 2.4, menjelaskan bahwa Indeks Ketergantungan Penduduk memberi gambaran tentang perbandingan antara jumlah penduduk produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif.

Kondisi indeks ketergantungan penduduk Aceh menunjukkan kecenderungan terus menurun yang diikuti oleh menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk. Diperkirakan sepuluh tahun ke depan, Aceh akan mendapat Bonus Demografi dengan struktur penduduk Aceh akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Peluang Bonus Demografi ini harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh karena akan memberikan pengaruh positif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat dan keuntungan Bonus Demografi ini, diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai keahlian dan memiliki daya saing; dan meningkatkan peluang kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

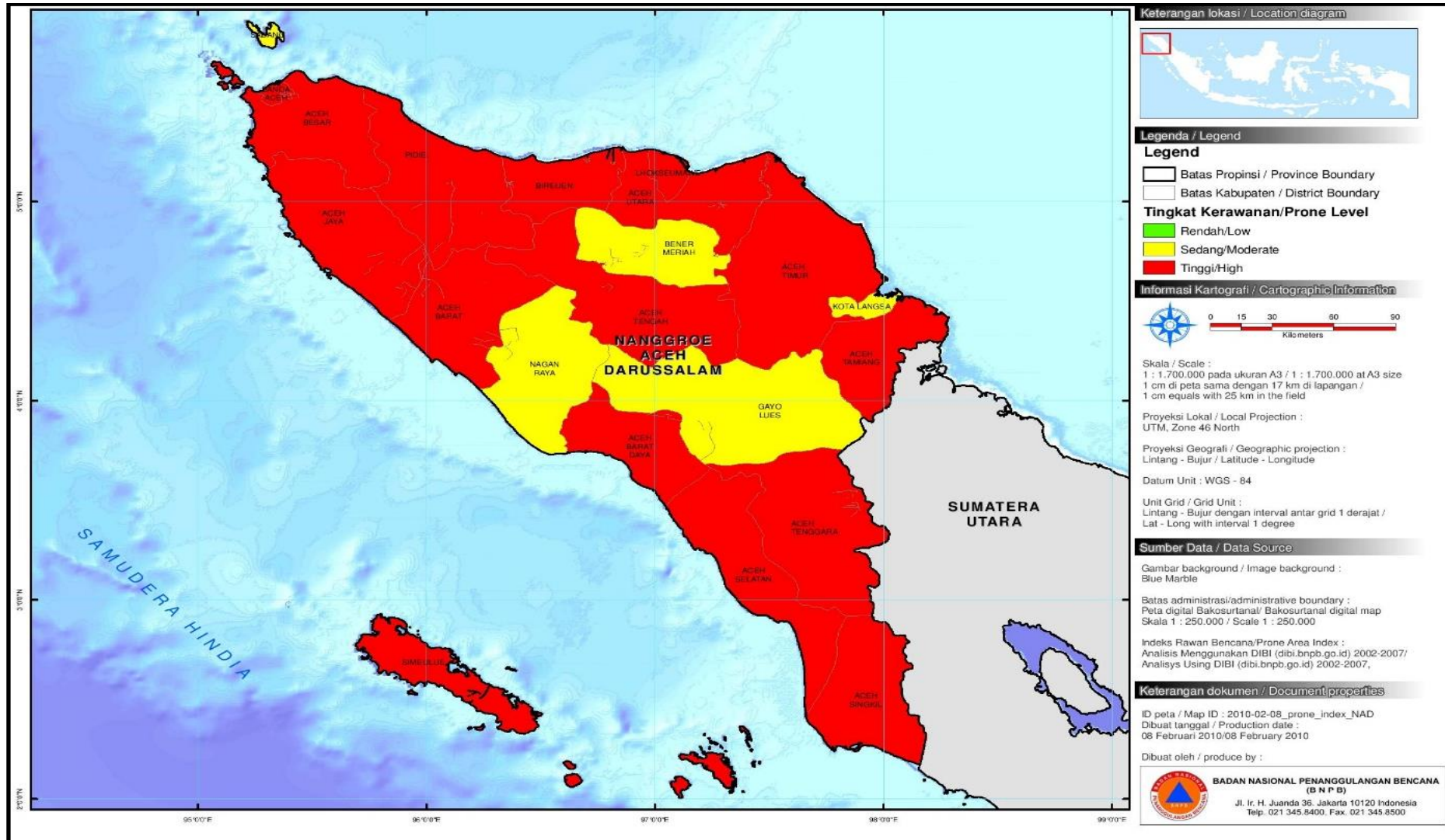
- a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) tersebar di 6 (enam) zona, meliputi;
 1. Zona Pusat : Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Besar.
 2. Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Bireuen.
 3. Zona Timur : Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Tamiang.
 4. Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Tenggara.
 5. Zona Selatan : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Barat Daya.
 6. Zona Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Barat.
- b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri;
- c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
- d. Kawasan khusus.
Aceh memiliki potensi dan keunggulan antara lain: di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maka potensi dan keunggulan tersebut dikembangkan melalui pola pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata, dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus yang wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api); bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan); bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak); dan kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Selain itu, bencana sosial karena ulah manusia seperti: konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik manusia dengan satwa, alasan ideologi, agama dan politik.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memberikan informasi tentang kategori bencana, yaitu: kategori rendah (<36), kategori sedang (36-144) dan kategori tinggi (>144). Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Kondisi alam yang kompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana berkategori tinggi di Indonesia dengan indeks 160.

Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Nagan Raya, serta Kota Langsa dan Kota Sabang memiliki indeks risiko bencana kategori sedang. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya termasuk kategori tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2017

Gambar 2.5. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir genangan dengan durasi yang semakin cenderung meningkat, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung, longsor, dan kebakaran lahan dan hutan. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dilaporkan sebanyak 682 kejadian bencana atau rata-rata 136 kejadian bencana per tahun. Dalam rentang waktu dari tahun 2012 sampai dengan 2017, telah terjadi berbagai jenis bencana dengan sebaran titik kejadian.

Di samping itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 juga memberikan informasi beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

1. Kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi: Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;
3. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir Utara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
4. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (*Modified Mercally Intensity*) meliputi seluruh wilayah Aceh;
5. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Nagan Raya;
6. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Hindia di sebelah barat, perairan laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
7. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
8. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;
9. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang;
10. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

2.1.5. Sosiologi

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe

membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

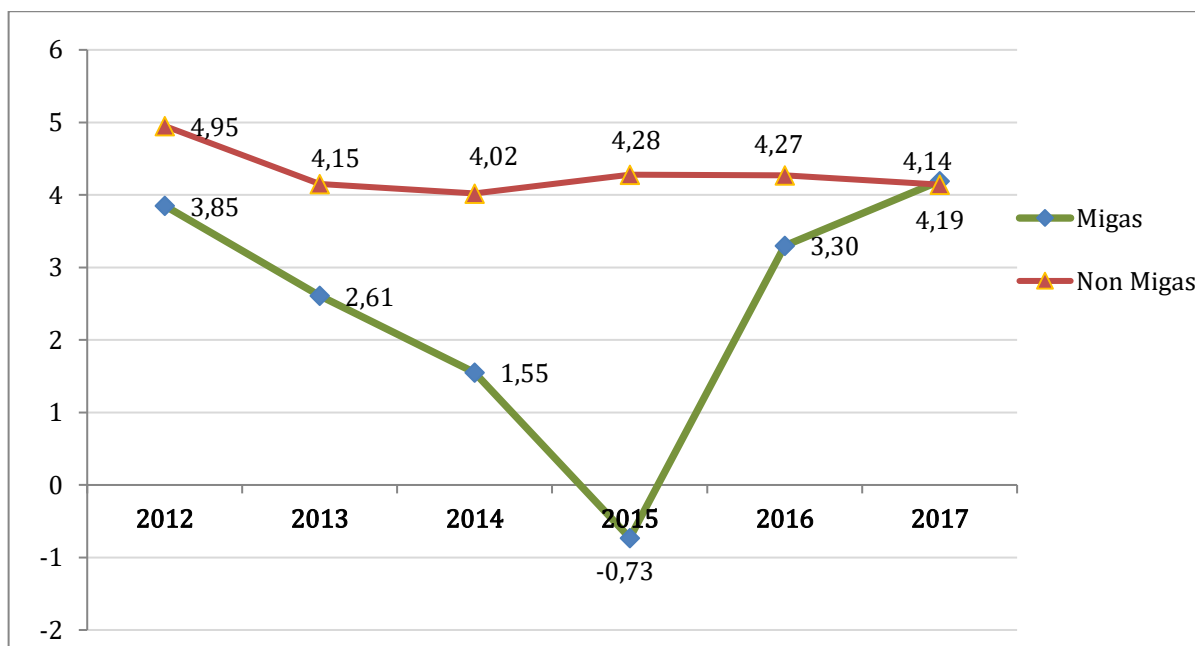
Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu, maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan dengan ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesahajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari nilai PDRB. Pertumbuhan PDRB Aceh periode 2012-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, 2012-2017 dengan Migas dan Tanpa Migas (Persen)

Gambar 2.6, menunjukkan pertumbuhan PDRB Aceh berdasarkan migas dan tanpa migas. Pertumbuhan PDRB dengan migas mengalami penurunan pada kurun waktu 2012 hingga 2015 yaitu dari 3,85 menjadi minus 0,73 persen. Pada tahun 2016 dan 2017 PDRB Aceh mengalami pertumbuhan positif 3,30 persen dan 4,19 persen. Jika tidak memperhitungkan migas, ekonomi Aceh tumbuh positif dengan kecenderungan melambat. Berdasarkan Gambar tersebut penurunan perekonomian Aceh pada kurun waktu 2012-2015 disebabkan oleh penurunan produksi dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalan serta sektor industri pengolahan. Kedua sektor ini mengalami pertumbuhan negatif dari tahun 2012 hingga 2015. Sektor pertambangan dan penggalan turun signifikan pada tahun 2015 sebesar

-27,1 persen dan merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan penurunan sektor lainnya. Namun demikian sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, Jasa pendidikan, dan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha terdapat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2012-2017

Lapangan Usaha	Tahun (%)											
	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,41	25,88	4,68	26,58	2,45	26,88	5,04	29,15	3,76	29,43	5,21	29,63
Pertambangan dan Penggalian	-2,47	13,41	-5,16	12,15	-9,21	10,62	-27,19	5,69	-12,82	4,48	5,65	4,64
Industri Pengolahan	2,39	8,61	-4,78	8,04	-7,67	7,41	-20,70	5,99	-5,87	5,36	(3,00)	5,14
Pengadaan Listrik dan Gas	8,69	0,10	4,02	0,10	6,52	0,11	7,44	0,11	10,40	0,12	4,54	0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,93	0,03	5,96	0,03	4,84	0,03	6,74	0,04	9,31	0,04	4,52	0,04
Konstruksi	6,60	8,40	4,64	8,57	5,46	8,98	4,85	9,56	12,81	10,27	(4,14)	9,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,27	14,31	5,60	14,43	4,03	14,83	3,90	15,77	3,13	16,34	3,52	16,28
Transportasi dan Pergudangan	5,32	7,51	4,31	7,70	3,05	7,70	2,18	7,91	-0,56	7,11	5,07	6,96
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,98	1,00	6,17	1,06	6,50	1,14	6,66	1,27	8,39	1,37	11,27	1,52
Informasi dan Komunikasi	7,17	3,27	4,96	3,23	5,43	3,11	2,12	3,18	2,80	3,08	2,94	2,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	1,64	6,06	1,74	1,48	1,75	3,02	1,86	9,85	1,97	4,46	2,00
Real Estate	4,94	3,12	5,31	3,18	7,67	3,43	7,01	3,80	7,79	3,89	7,94	4,08
Jasa Perusahaan	4,97	0,54	4,08	0,55	8,68	0,57	2,38	0,59	7,14	0,61	4,67	0,62
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	6,98	2,95	7,29	7,13	7,92	6,83	9,02	9,75	9,62	8,62	9,99
Jasa Pendidikan	3,55	1,83	4,43	1,88	5,12	1,99	6,43	2,25	9,99	2,43	9,98	2,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,44	2,22	6,69	2,30	5,40	2,33	5,98	2,52	7,21	2,56	9,21	2,63
Jasa lainnya	5,65	1,14	4,74	1,16	5,94	1,20	5,36	1,30	6,41	1,33	8,25	1,39
Produk Domestik Regional Bruto	3,85		2,61		1,55		-0,73		3,30		4,19	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Aceh juga dapat dilihat dari distribusi sektor penyumbang PDRB. Dari 17 sektor penyumbang PDRB Aceh, terdapat 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi terbesar secara berurutan yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; konstruksi; dan transportasi dan pergudangan.

Selanjutnya dari Tabel 2.8 juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi Aceh tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap mendominasi struktur ekonomi Aceh dengan tren meningkat yang kontribusinya melebihi 25 persen. Lapangan usaha terbesar kedua dan ketiga adalah perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi berturut-turut sebesar 14,31 dan 6,96 persen pada tahun 2012 menjadi 16,28 dan 9,99 persen pada tahun 2017. Adapun lapangan usaha konstruksi dan transportasi dan

perdagangan berada pada urutan keempat dan kelima dengan kontribusi sebesar 8,40 dan 7,51 pada tahun 2012 menjadi 9,40 dan 6,96 persen tahun 2017.

Jika kondisi di atas terus berlangsung maka sulit untuk mengharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa mendatang. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mendominasi kontribusi ekonomi Aceh hanya mampu tumbuh rata-rata 3,14 persen. Sedangkan lapangan pekerjaan yang tumbuh relatif tinggi (rata-rata 8,37 persen) disumbangkan oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tidak mungkin digantungkan pada lapangan usaha tersebut.

Selain melihat kondisi PDRB Aceh berdasarkan sektor lapangan usaha, perlu juga memahami kondisi PDRB Aceh berdasarkan pendekatan pengeluaran. Kondisi PDRB Aceh dari pendekatan pengeluaran terdapat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Distribusi PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Aceh, 2012-2017

Komponen	Tahun (%)						Rata-rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,5	56,72	58	61,86	62,37	62,65	59,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,49	1,61	1,89	1,93	2,03	2,13	1,85
Pengeluaran konsumsi Pemerintah	21,96	24,44	24,6	27,25	24,91	26,05	24,87
Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,83	32,12	33,76	35,69	37,37	39,51	35,38
Perubahan Inventori	1,52	-0,03	0,03	-0,09	0,03	-0,09	0,23
Ekspor Luar Negeri	10,74	8,69	5,83	1,65	1,12	1,57	4,93
Dikurangi Impor Luar Negeri	1,44	1,27	1,69	2,74	1,69	1,85	1,78
Net Ekspor Antar Daerah	(23,59)	(22,27)	(22,43)	(25,65)	(26,14)	(27,61)	(24,62)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Tabel 2.9, menunjukkan bahwa kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat dominan terhadap pembentukan PDRB dengan kontribusi rata-rata sebesar 59,52 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi kedua terbesar dengan rata-rata sebesar 35,38 persen. PMTB ini merupakan bentuk pengeluaran barang modal yang memiliki usia pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. Namun demikian, eksporbersih perdagangan Aceh menjadi masalah pokok mengingat selama periode tahun 2012-2017 menunjukkan defisit yang cukup besar dengan rata-rata yaitu sebesar minus 24,62 persen.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang/jasa secara terus menerus di suatu daerah/wilayah pada periode tertentu, biasanya 1 (satu) tahun. Perkembangan laju inflasi di Aceh selama periode tahun 2012 -2017 dapat dilihatpada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.
Laju Inflasi Tahun 2010 – 2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Banda Aceh	0,66	6,39	7,83	1,27	3,13	4,86
Lhokseumawe	0,39	8,27	8,53	2,44	5,6	2,87
Meulaboh	*)	*)	8,2	0,58	3,77	4,76
Aceh	0,22	7,31	8,09	1,53	3,95	4,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

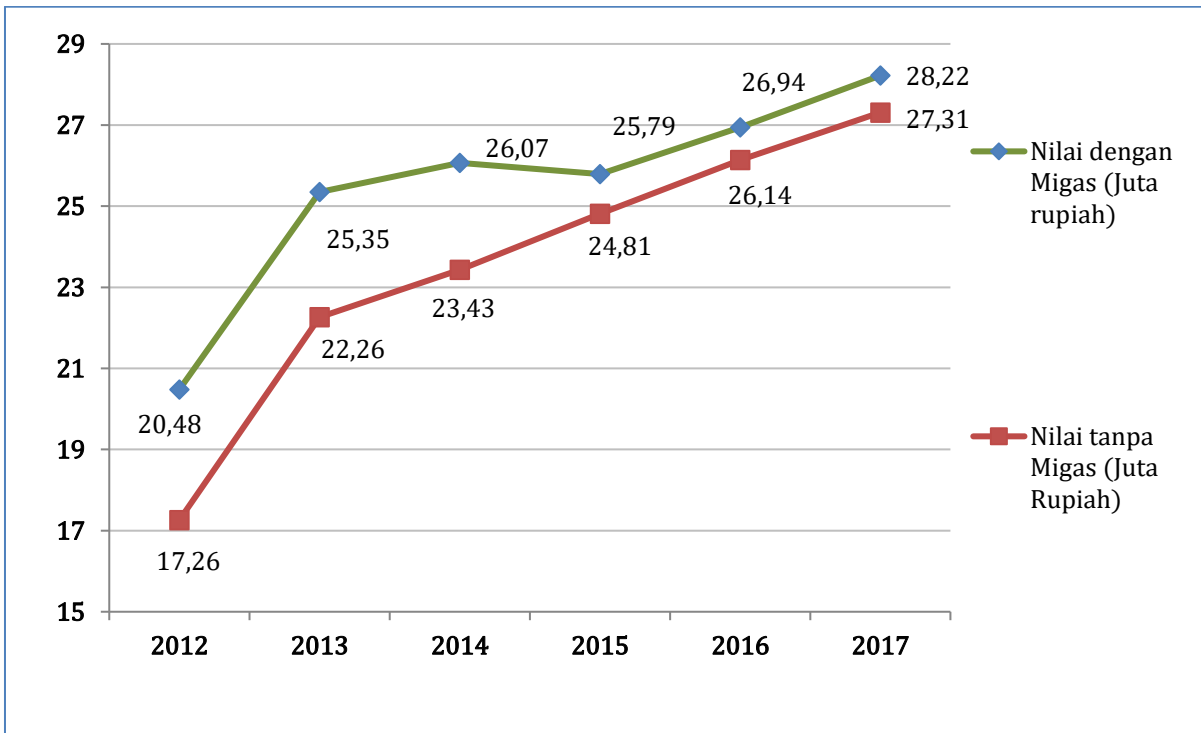
Ket: *) Meulaboh belum termasuk sebagai kabupaten perhitungan inflasi

Perkembangan laju inflasi Aceh selama periode tahun 2012-2017 mengalami fluktuasi pada 2 (dua) kota di Aceh yakni Banda Aceh dan Lhokseumawe. Khusus untuk Meulaboh, nilai inflasi mulai dihitung pada tahun 2014. Secara umum perkembangan inflasi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan. Peningkatan nilai inflasi di Aceh mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga pangan strategis masih tinggi.

2.2.1.3. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang dihitung dari pembagian PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan di daerah tersebut menjadi lebih baik.

PDRB perkapita Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas dan tanpa migas terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2012 - 2017. Pada tahun 2012, PDRB perkapita dengan migas dan tanpa migas masing-masing sebesar Rp 20,48 juta dan Rp 17,26 juta. Nilai PDRB perkapita tanpa migas terus meningkat hingga tahun 2017 dengan nilai mencapai Rp 27,31 juta. Sedangkan PDRB perkapita dengan migas, nilainya meningkat tajam pada tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 25,35 juta. Kemudian PDRB perkapita ini mengalami penurunan pada tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp 25,79 juta. Meskipun demikian, PDRB perkapita Aceh kembali menguat hingga mencapai Rp 28,22 juta pada tahun 2017. Secara umum PDRB perkapita Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan PDB Nasional yang mencapai Rp. 51,89 juta. Perkembangan PDRB Perkapita Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat dilihat pada Gambar 2.7.

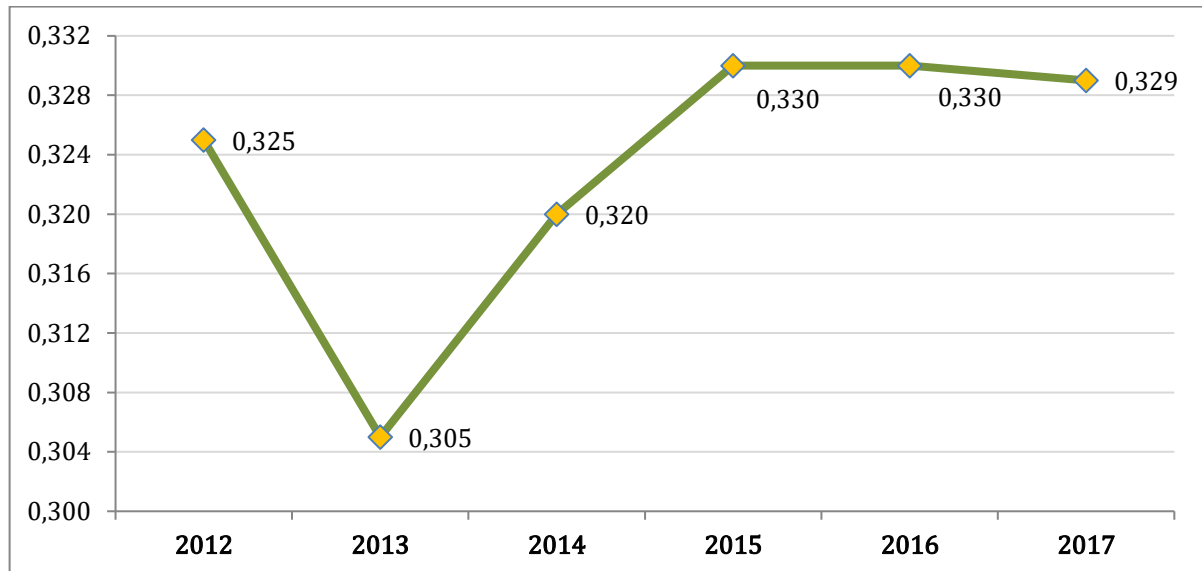


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.7. PDRB Perkapita ADHB Aceh 2012-2017

2.2.1.4. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan individu dalam suatu daerah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0–1. Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin lebar. Secara rinci Indeks Gini Aceh periode 2012-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.8. Indeks Gini Rasio Aceh Tahun 2012 – 2017

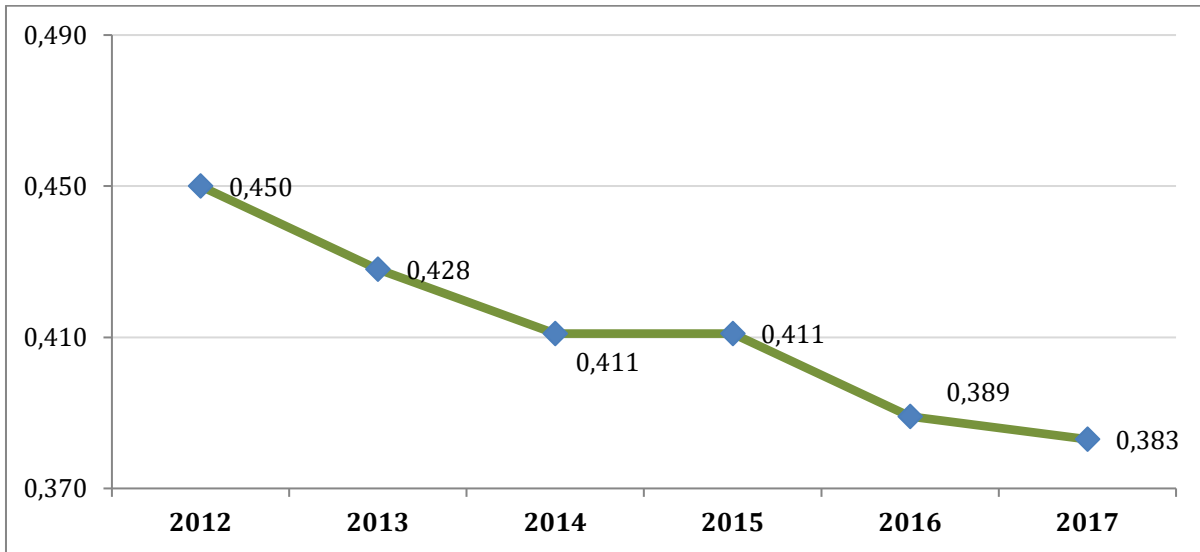
Gambar 2.8, menunjukkan fluktuasi perkembangan ketimpangan pendapatan Aceh selamaturun waktu 2012 – 2017. Hal ini terlihat dari Indeks Gini Aceh pada tahun 2012 sebesar 0,325 dan menurun hingga mencapai 0,305 pada tahun 2013. Namun demikian, Indeks Gini ini kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 0,329 pada tahun 2017. Meskipun mengalami kecenderungan meningkat. Namun secara umum Indeks Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,40.

2.2.1.5. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis suatu wilayah, serta adanya wilayah yang sudah maju dan wilayah yang masih terbelakang. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan wilayah (*regional disparity*). Indeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Apabila indeks ketimpangan wilayah mendekati nol, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah merata. Perkembangan Indeks Williamson Aceh periode 2012 – 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Perkembangan ketimpangan wilayah Aceh tahun 2012 - 2017 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat melalui Indeks Williamson sebesar 0,450 pada tahun 2012 menjadi 0,383 pada tahun 2017. Indeks tersebut menggambarkan bahwa ketimpangan pembangunan dan distribusi pendapatan antar wilayah kabupaten/kota di Aceh menuju ke arah pemerataan. Penurunan

ketimpangan pendapatan antar wilayah antara lain disebabkan oleh menurunnya pendapatan di kabupaten/kota penghasil migas.



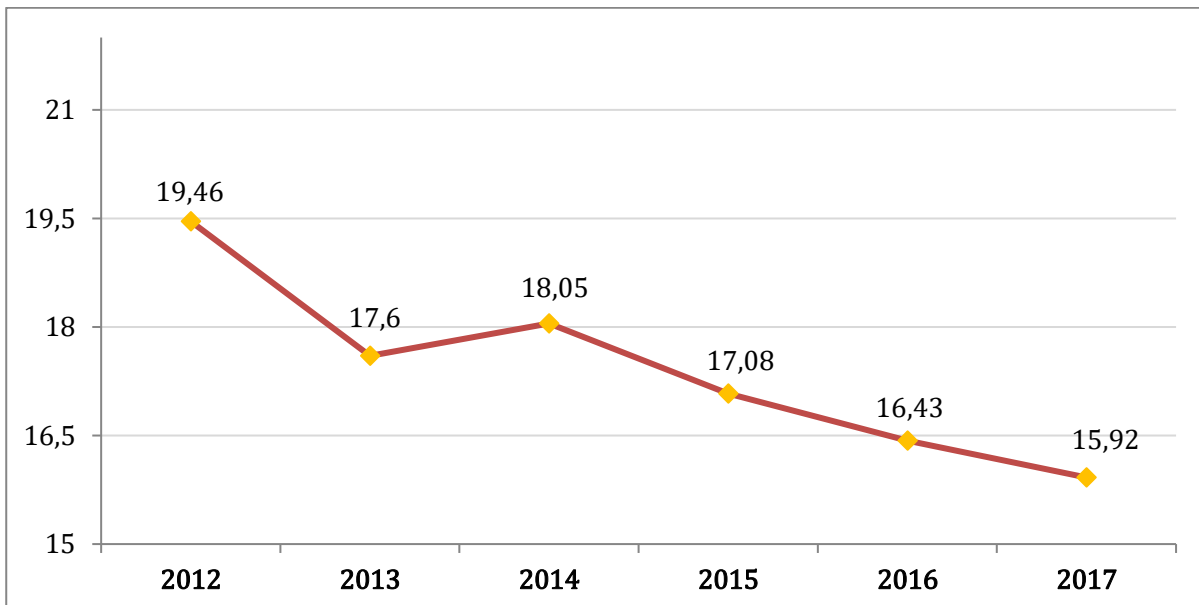
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.9. Indeks Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson) Aceh Tahun 2012 – 2017

2.2.1.6. Kemiskinan

2.2.1.6.1. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2012-2017. Gambar 2.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 19,46 persen dan mengalami penurunan menjadi 15,92 persen pada tahun 2017 dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 0,70 persen. Meski mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan tingkat kemiskinan sebesar 18,05 persen dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 17,60 persen. Namun demikian, selama tahun 2015 dan 2017, tingkat kemiskinan Aceh mengalami penurunan masing-masing menjadi 17,08 persen dan 15,92 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017 (diolah)

Gambar 2.10. Persentase Kemiskinan Aceh Tahun 2012 – 2017

Kondisi tingkat kemiskinan Aceh jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Aceh dan kabupaten/kota jauh lebih tinggi. Satu-satunya kabupaten/kota di Aceh yang mempunyai tingkat kemiskinan lebih rendah dari angka nasional adalah Kota Banda Aceh, yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 7,44 persen. Kabupaten Gayo Lues, Pidie, Aceh Singkil, Bener Meriah dan Pidie Jaya merupakan kabupaten dengan kondisi kemiskinan yang parah dengan tingkat kemiskinan mencapai lebih dari 21 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017 secara rinci disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota
Tahun 2012 – 2017

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nasional	11,66	11,47	10,96	11,13	10,70	10,64
Aceh	18,58	17,72	16,98	17,11	16,43	15,92
Simeulue	21,88	20,57	19,92	20,43	19,93	20,20
Aceh Singkil	17,92	18,73	17,77	21,72	21,60	22,11
Aceh Selatan	14,81	13,44	12,79	13,24	13,48	14,07
Aceh Tenggara	15,64	14,39	13,75	14,91	14,46	14,86
Aceh Timur	17,19	16,59	15,88	15,85	15,06	15,25
Aceh Tengah	18,78	17,76	16,99	17,51	16,64	16,84
Aceh Barat	22,76	23,70	22,97	21,46	20,38	20,28
Aceh Besar	17,50	16,88	16,13	15,93	15,55	15,41
Pidie	22,12	21,12	20,29	21,18	21,25	21,43
Bireuen	18,21	17,65	16,94	16,94	15,95	15,87
Aceh Utara	21,89	20,34	19,58	19,20	19,46	19,78
Aceh Barat Daya	18,51	18,92	17,99	18,25	18,03	18,31
Gayo Lues	22,31	22,33	21,43	21,95	21,86	21,97
Aceh Tamiang	16,70	15,13	14,58	14,57	14,51	14,69
Nagan Raya	22,27	21,75	20,85	20,13	19,25	19,34
Aceh Jaya	18,30	17,53	16,52	15,93	15,01	14,85
Bener Meriah	24,50	23,47	22,45	21,55	21,43	21,14
Pidie Jaya	24,35	22,70	21,78	21,40	21,18	21,82
Kota Banda Aceh	8,65	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44
Kota Sabang	20,51	18,30	17,02	17,69	17,33	17,66
Kota Langsa	13,93	12,62	12,08	11,62	11,09	11,24
Kota Lhokseumawe	13,06	12,47	11,93	12,16	11,98	12,32
Kota Subulussalam	22,64	20,69	19,72	20,39	19,57	19,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Aceh periode tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12.
Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Aceh
Tahun 2010 – 2017

Rincian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,90	1,89	1,75	1,84	1,74	1,79
Indeks Kedalaman Kemiskinan Aceh	3,07	3,2	3,14	3,1	3,06	2,97
Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional	0,48	0,48	0,44	0,51	0,44	0,46
Indeks Keparahan Kemiskinan Aceh	0,83	0,83	0,86	0,84	0,87	0,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Tabel 2.12, menunjukkan bahwa nilai indeks kedalaman kemiskinan Aceh mengalami penurunan. Pada tahun 2012 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 3,07 sedangkan pada tahun 2017 mencapai 2,97. Pada tahun yang sama, indeks kedalaman kemiskinan nasional sebesar 1,79. Perbandingan kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Aceh jauh lebih rendah dari rata-rata pengeluaran penduduk miskin Indonesia. Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk Aceh yang memiliki pendapatan setara dengan 40 persen terendah nasional adalah sebesar 44 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Indeks keparahan kemiskinan Aceh tahun 2017 sebesar 0,80 lebih tinggi dari indeks keparahan nasional sebesar 0,46. Kondisi dua indeks kemiskinan ini mengindikasikan permasalahan kemiskinan di Aceh lebih kronis dibanding rata-rata nasional.

Tingkat kemiskinan di Aceh lebih dominan di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Tingkat kemiskinan perdesaan pada tahun 2017 sebesar 19,37 persen, sedangkan di kawasan perkotaan adalah sebesar 11,11 persen. Jika ditinjau dari mata pencaharian penduduk miskin dan berpendapatan rendah, maka sektor pertanian tanaman padi dan palawija merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja miskin terbesar yaitu 40,4 persen atau sejumlah 307.913 orang (BDT 2015), diikuti oleh sektor perkebunan dan perdagangan masing-masing menampung 19,4 persen (147.952 orang) dan 7,7 persen (58.793 orang) dari total pekerja yang berpendapatan rendah. Rendahnya pendapatan pekerja di sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan juga ditunjukkan dengan rendahnya nilai tukar petani (NTP) pada kedua sektor tersebut masing-masing sebesar 94,74 dan 87,50 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.108.

Selain itu, garis kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan merupakan batas bawah pengeluaran yang diperlukan seorang individu untuk hidup miskin yaitu seperti dapat membeli makanan setara dengan 2.100 kilo kalori dan membeli keperluan non makanan lainnya. Garis Kemiskinan perdesaan di Aceh lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional pada tahun 2017, yaitu masing-masing sebesar Rp. 442.869,- dan Rp. 370.910,-. Persentase kenaikan garis kemiskinan perdesaan juga lebih tinggi di Aceh yaitu 5,43 persen dibanding nasional yaitu 5,22 persen. Kedua indikator garis kemiskinan tersebut memberikan tekanan lebih bagi penduduk berpendapatan rendah di Aceh sehingga lebih banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan sebagai penduduk miskin. Karena itu, pengendalian harga (inflasi) menjadi penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan di Aceh sebagai berikut; 1) Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan masih cenderung tinggi ; 2). Lebih dominan

di kawasan perdesaan; 3). Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan merupakan sektor utama mata pencaharian penduduk miskin; 4). Nominal dan peningkatan garis kemiskinan di Aceh cenderung tinggi.

2.2.1.7. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh selama periode 2012-2017 sangat berfluktuatif. Pada tahun 2012 TPT di Aceh sebesar 9,10 persen dan meningkat pada tahun 2013 (10,30 persen). Pada tahun berikutnya TPT tersebut menurun hingga mencapai angka pengangguran sebesar 6,57 persen (150.265 orang) pada tahun 2017.

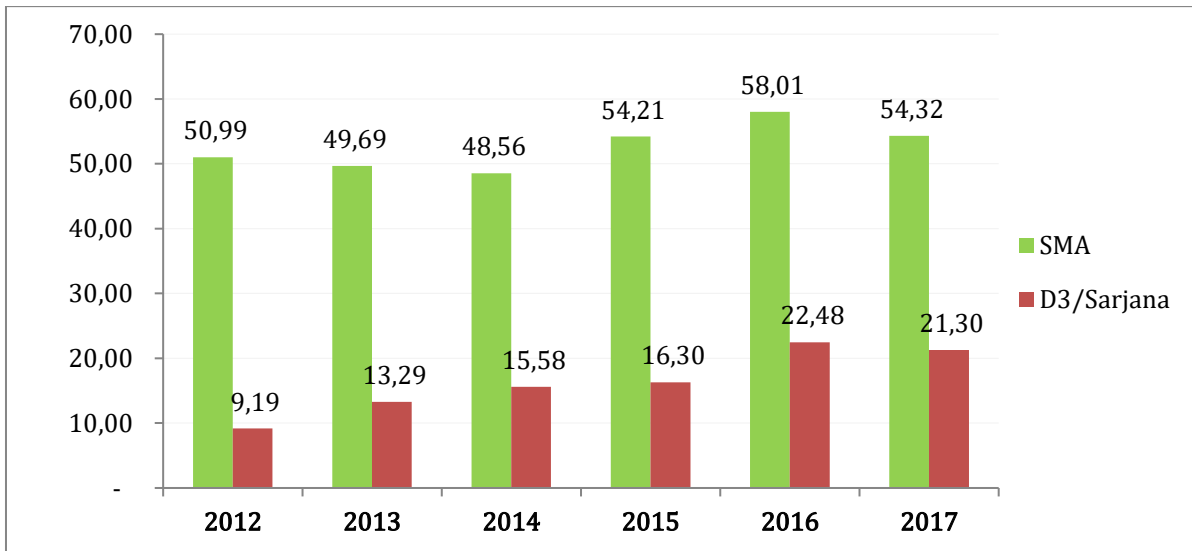
Tabel 2.13.
Perkembangan Komponen Ketenagakerjaan Aceh, Tahun 2012-2017

Komponen Ketenagakerjaan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk Usia 15+ (orang)	3.202.964	3.276.943	3.367.007	3.440.634	3.513.965	3.590.825
a. Angkatan Kerja (Orang)	1.978.491	2.034.107	2.123.312	2.182.824	2.257.943	2.288.777
Bekerja (Orang)	1.798.547	1.824.586	1.931.823	1.966.018	2.087.045	2.138.512
Pengangguran (Orang)	179.944	209.521	191.489	216.806	170.898	150.265
e. Bukan Angkatan Kerja	1.224.473	1.242.836	1.243.695	1.257.810	1.256.022	1.302.048
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	9,10	10,30	9,02	9,93	7,57	6,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Bila dilihat dari distribusi pengangguran berdasarkan kelompok pendidikan, sebagian besar pengangguran disumbangkan oleh penduduk yang menamatkan pendidikan SMA sederajat dan menamatkan pendidikan di tingkat universitas. Pengangguran dengan pendidikan SMA cenderung mengalami penurunan di tahun 2014 dan terus meningkat hingga 2016, dimana persentase tahun 2012 sebesar 50,99 persen dan tahun 2016 sebesar 58,01 persen. Pada tahun 2017 persentase pengangguran dengan pendidikan SMA mengalami penurunan menjadi 54,32 persen. Persentase penurunan pengangguran tersebut menandakan bahwa pengangguran berpendidikan SMA telah dibekali oleh keterampilan khusus yang berpotensi untuk menurunkan angka pengangguran. Namun peranan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) di Aceh harus terus dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan pengangguran tersebut.

Kondisi yang sama juga terjadi pada pengangguran terdidik dengan laju tingkat kenaikan rata-rata sebesar 25,65 persen pertahun. Ini terlihat dari Gambar 2.11 yang menunjukkan bahwa persentase lulusan universitas sederajat sebesar 9,19 persen pada tahun 2012 dan terus meningkat menjadi 21,30 persen pada tahun 2017. Kenaikan persentase tersebut diduga akibat masih kurangnya lapangan pekerjaan di sektor formal yang disebabkan lemahnya kinerja sektor riil sehingga mengakibatkan sektor industri juga menjadi lemah. Selain itu, link and match antara institusi penyedia tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri belum baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.11. Perkembangan Persentase Pengangguran Menamatkan Pendidikan SMA Sederajat dan Universitas, Tahun 2012-2017

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintah Aceh terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat dengan pendidikan dapat membuka pola pikir masyarakat serta membuka wawasan untuk berusaha keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka alami selama ini. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan pencapaian pendidikan dasar dalam memberikan keahlian melek huruf terhadap penduduk, sehingga dengan kemampuan ini masyarakat dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya. AMH dapat digunakan untuk; (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD), (2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan.

Saat ini, AMH Aceh sudah berada di atas AMH Nasional, dimana AMH Nasional adalah 95,50 sedangkan AMH Aceh 97,94. Namun bila dibandingkan dengan AMH propinsi lain di Sumatera, maka AMH Aceh masih berada di bawah AMH Sumatera Utara (98,89) dan rata-rata Sumatera (98,29). Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2012 – 2017 dan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Sumatera Utara dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2012 – 2017 masing disajikan pada Tabel 2.14 dan Tabel 2.15.

**Tabel 2.14.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Tahun 2012 – 2017**

Kabupaten/Kota	Tahun						Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Simeulue	99,29	99,79	99,96	99,00	98,71	98,84	99,27
Aceh Singkil	92,64	94,74	96,51	97,26	96,83	96,14	95,69
Aceh Selatan	93,27	94,90	96,91	96,54	96,89	96,15	95,78
Aceh Tenggara	96,77	98,08	99,26	98,65	98,59	99,24	98,43

Kabupaten/Kota	Tahun						Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Aceh Timur	97,54	97,85	98,68	97,85	98,16	98,35	98,07
Aceh Tengah	98,33	98,98	99,37	99,19	99,03	99,31	99,04
Aceh Barat	94,96	96,63	98,41	96,32	96,94	98,37A	96,94
Aceh Besar	95,59	96,68	98,76	98,15	98,05	97,21	97,41
Pidie	95,24	94,16	96,93	95,40	95,87	96,57A	95,70
Bireuen	97,65	98,25	99,09	98,69	98,98	98,98	98,61
Aceh Utara	96,43	97,09	98,70	97,18	98,05	97,63	97,51
Aceh Barat Daya	93,83	94,65	96,39	96,64	96,12	97,12	95,79
Gayo Lues	87,89	90,37	91,42	93,13	94,20	96,72	92,29
Aceh Tamiang	95,97	96,75	97,38	98,09	97,65	98,45	97,38
Nagan Raya	93,57	93,93	97,20	96,01	96,22	95,58	95,42
Aceh Jaya	95,30	95,67	97,40	95,98	96,90	96,46	96,29
Bener Meriah	97,78	98,73	98,81	99,46	98,96	99,25	98,83
Pidie Jaya	92,75	92,81	96,49	96,96	95,64	97,51	95,36
Banda Aceh	99,25	99,39	99,99	99,62	99,10	99,42	99,46
Sabang	98,25	98,71	98,75	98,03	98,94	98,71	98,57
Langsa	99,01	99,01	99,91	99,08	99,29	98,50	99,13
Lhokseumawe	98,17	99,41	99,84	99,37	98,99	99,43	99,20
Subulussalam	90,32	91,12	94,42	96,30	95,94	98,08	94,36
Aceh	96,11	96,75	98,25	97,63	97,74	97,94	97,40
Nasional	93,10	94,14	95,88	95,22	95,38	95,50	94,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (Data diolah)

Tabel 2.15.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Sumatera Utara dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2012 – 2017

Tahun	Aceh	Sumatera utara	Rata-rata sumatera	Nasional
2012	96,11	97,35	96,53	93,10
2013	96,75	97,81	97,04	94,14
2014	98,25	98,57	98,03	95,88
2015	97,63	98,68	98,05	95,22
2016	97,74	98,88	98,20	95,38
2017	97,94	98,89	98,29	95,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017 (Data diolah)

Dalam rangka meningkatkan AMH, maka Pemerintah Aceh dan Kab/Kota berupaya untuk meningkatkan indikator angka melek huruf, perspektif harus diarahkan pada: (1) bagaimana mendorong orang-orang yang buta huruf agar termotivasi untuk belajar menulis dan membaca; (2) merubah bentuk fasilitasi dari suasana “kelas” yang cenderung formal menjadi hubungan personal yang bersifat informal dan interaktif; (3) “merawat” kemampuan baca-tulis orang yang sudah melek huruf yang sebelumnya buta huruf; (4) mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan buta huruf.

Upaya pemberantasan buta huruf diarahkan pada daerah-daerah dengan tingkat angka melek huruf yang rendah, yaitu Kabupaten Gayo Lues, Kota Subulussalam, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. Rendahnya angka melek huruf di daerah ini tampaknya berbanding lurus dengan angka rata-rata lama sekolah yang juga relatif rendah. Oleh karena itu, daerah ini menjadi lokasi prioritas pemberantasan buta huruf di Provinsi Aceh.

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. RLS di Aceh pada tahun 2017 adalah 8,98 tahun, artinya rata-rata penduduk Aceh menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2 SMP atau tidak dapat menamatkan SMP. Kota Subulussalam merupakan daerah yang terendah capaian angka rata-rata lama sekolah dan tertinggi adalah Kota Banda Aceh. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses menuju sekolah. Untuk lebih rinci, angka rata-rata lama sekolah tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Simeulue	8,34	8,55	8,89	8,90	8,91	9,06	1,67
Aceh Singkil	7,16	7,33	7,48	7,50	7,69	7,84	1,83
Aceh Selatan	7,56	7,59	7,60	7,79	8,02	8,33	1,96
Aceh Tenggara	8,57	8,58	8,77	9,32	9,33	9,63	2,36
Aceh Timur	7,13	7,28	7,38	7,40	7,60	7,80	1,81
Aceh Tengah	9,19	9,25	9,31	9,65	9,66	9,67	1,02
Aceh Barat	7,77	7,83	8,17	8,47	8,70	9,04	3,07
Aceh Besar	9,45	9,46	9,61	9,91	9,92	9,93	1,00
Pidie	8,08	8,15	8,25	8,74	8,75	8,76	1,63
Bireuen	8,50	8,58	8,85	9,14	9,15	9,16	1,51
Aceh Utara	7,69	7,83	8,06	8,07	8,09	8,10	1,04
Aceh Barat Daya	7,53	7,69	7,89	7,90	7,93	8,12	1,52
Gayo Lues	6,88	7,00	7,04	7,06	7,10	7,39	1,44
Aceh Tamiang	7,66	7,69	7,71	7,95	8,21	8,47	2,03
Nagan Raya	7,73	7,78	7,93	8,22	8,24	8,25	1,31
Aceh Jaya	7,64	7,70	7,88	7,89	7,95	8,13	1,25
Bener Meriah	8,63	8,93	9,00	9,42	9,43	9,55	2,05
Pidie Jaya	7,93	7,95	8,30	8,45	8,46	8,84	2,20
Banda Aceh	12,07	12,19	12,37	12,38	12,57	12,59	0,85
Sabang	10,16	10,21	10,35	10,37	10,51	10,70	1,04
Langsa	10,43	10,47	10,48	10,49	10,71	10,90	0,89
Lhokseumawe	10,16	10,37	10,39	10,41	10,53	10,88	1,38
Subulussalam	6,53	6,65	6,77	6,78	6,88	7,12	1,75
Aceh	8,36	8,44	8,71	8,77	8,86	8,98	1,44
Nasional	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10	1,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (Data diolah)

Apabila ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah, Aceh berada diatas rata-rata Sumatera (8,57 tahun), namun masih berada dibawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara (9,25 tahun), seperti ditunjukkan pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-Rata Sumatera Tahun 2012 - 2017

Tahun	Aceh	Sumatera utara	Rata-Rata Sumatera	Nasional
2012	8,36	8,72	8,10	7,59
2013	8,44	8,79	8,16	7,61
2014	8,71	8,93	8,27	7,73
2015	8,77	9,03	8,34	7,84
2016	8,86	9,12	8,44	7,95
2017	8,98	9,25	8,57	8,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (Data diolah)

Pemerintah Aceh berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.

2.2.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah

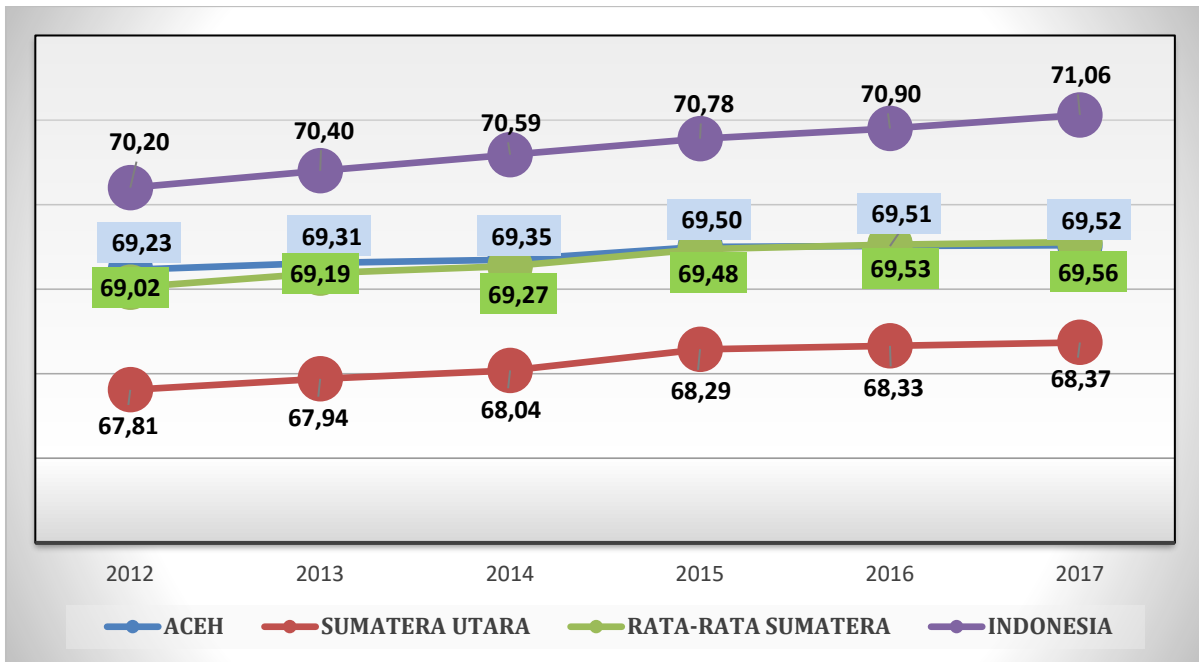
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah Aceh meningkat dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah Aceh (14,13 tahun) sudah berada di atas rata-rata Nasional (12,85). Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Simeulue dengan capaian HLS terendah tahun 2017 dan menjadi fokus peningkatan HLS dalam lima tahun kedepan.

Tabel 2.18.
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2012-2017

Kabupaten/Kota	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Simeulue	12,67	12,67	12,75	12,83	13,07	13,23	0,88
Aceh Singkil	13,49	13,85	14,05	14,26	14,27	14,28	1,14
Aceh Selatan	12,57	13,01	13,05	13,24	13,53	13,80	1,89
Aceh Tenggara	13,18	13,54	13,59	13,62	13,96	13,97	1,17
Aceh Timur	11,69	11,76	11,83	12,23	12,55	13,00	2,16
Aceh Tengah	13,55	13,76	14,11	14,21	14,23	14,24	1,00
Aceh Barat	14,29	14,32	14,35	14,55	14,56	14,57	0,38
Aceh Besar	13,91	14,21	14,35	14,47	14,48	14,49	0,82
Pidie	13,21	13,36	13,50	13,61	13,93	14,25	1,52
Bireuen	14,03	14,22	14,25	14,41	14,42	14,80	1,08
Aceh Utara	13,77	13,89	13,99	14,10	14,11	14,42	0,93
Aceh Barat Daya	12,98	13,02	13,11	13,20	13,54	13,55	0,86
Gayo Lues	12,89	13,01	13,03	13,13	13,27	13,28	0,60
Aceh Tamiang	12,57	12,79	13,27	13,54	13,55	13,56	1,52
Nagan Raya	13,27	13,34	13,42	14,04	14,09	14,10	1,22
Aceh Jaya	13,30	13,69	13,81	13,93	13,94	13,95	0,96
Bener Meriah	12,78	12,93	13,02	13,04	13,42	13,43	1,00
Pidie Jaya	13,76	13,92	14,03	14,14	14,51	14,52	1,08
Banda Aceh	16,16	16,26	16,36	17,01	17,03	17,10	1,14
Sabang	12,07	12,23	12,39	12,98	13,17	13,58	2,38
Langsa	13,93	14,25	14,58	15,16	15,17	15,18	1,74
Lhokseumawe	14,91	14,92	15,11	15,14	15,16	15,17	0,35
Subulussalam	13,03	13,16	13,30	13,73	14,18	14,19	1,73
Aceh	13,19	13,36	13,53	13,73	13,89	14,13	1,39
Nasional	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	1,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (Data diolah)

Dalam rangka meningkatkan HLS dilakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat serta membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di 23 kabupaten/kota.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (Data diolah)

Gambar 2.12. Angka Usia Harapan Hidup Aceh Tahun 2012 – 2018

2.2.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Anak mendapat perhatian khusus. Penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu penting untuk dilakukan pemantauan. Hal tersebut dikarenakan AKI merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat disuatu negara.

Angka kematian Ibu di Aceh masih berfluktuasi, pada tahun 2015 sebesar 134/100.000 kelahiran hidup, namun terjadi kenaikan pada tahun 2016 menjadi 167/100.000 kelahiran hidup dan menurun lagi menjadi 143/100.000 kelahiran hidup di tahun 2017 (Tabel 2.19). Hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak masih rendah, kompetensi tenaga kesehatan masih kurang, fasilitas kesehatan belum memadai, serta akses terhadap pelayanan kesehatan masih rendah.

Penyebab langsung kematian ibu terbanyak di Aceh adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi serta penyakit penyerta pada ibu hamil. Sedangkan penyebab tidak langsung disebabkan karena 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu dekat) dan 3 terlambat yakni terlambat mengenali tanda bahaya dan terlambat mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan serta terlambat penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2017 mulai dilakukan pendampingan ibu hamil di Aceh Besar dan Aceh Timur melibatkan kader dan mahasiswa kebidanan sehingga kehamilan ibu terpantau dengan baik

Tabel 2.19.

Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2012 – 2017

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Simeulue	7	0	2	8	5	7
Aceh Singkil	5	7	10	6	8	11
Aceh Selatan	7	2	1	2	5	6
Aceh Tenggara	9	5	10	1	8	1

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh Timur	12	16	11	14	21	20
Aceh Tengah	5	9	6	7	5	3
Aceh Barat	6	4	6	3	6	9
Aceh Besar	11	10	3	6	9	5
Pidie	22	9	9	12	9	15
Bireuen	17	13	7	11	11	10
Aceh Utara	16	15	29	15	26	18
Aceh Barat Daya	3	5	2	3	6	4
Gayo Lues	4	5	5	0	2	1
Aceh Tamiang	13	18	9	10	9	5
Nagan Raya	7	6	5	4	3	5
Aceh Jaya	2	3	8	0	6	4
Bener Meriah	1	5	5	7	6	6
Pidie Jaya	3	3	4	3	5	3
Banda Aceh	1	6	5	6	2	2
Sabang	1	0	1	2	1	0
Langsa	10	4	2	7	3	5
Lhokseumawe	9	5	5	5	9	6
Subulussalam	3	1	4	3	4	3
Jumlah Kematian Ibu Aceh	174	151	149	135	169	149
Angka Kematian Ibu/100.000 Aceh	191	158	149	134	167	143

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

2.2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Aceh sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 berfluktuasi dimana pada tahun 2014 terjadi peningkatan sampai 14 per 1000 kelahiran hidup dari 11 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 dan menurun kembali pada tahun 2017 menjadi 9 per 1000 kelahiran hidup. AKB secara Nasional diperoleh dari hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan terakhir dilakukan pada tahun 2017 yaitu pada posisi 24 per 1000 Kelahiran Hidup, sementara AKB di Aceh sebesar 9 per 1000 Kelahiran Hidup, dimana angka ini jauh lebih baik dari angka nasional (Tabel 2.20).

Tabel 2.20.
Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2012 – 2017

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Simeulue	22	29	32	23	21	19
Aceh Singkil	13	9	15	14	16	14
Aceh Selatan	13	11	12	9	12	8
Aceh Tenggara	3	11	10	4	3	1
Aceh Timur	10	12	14	10	10	8
Aceh Tengah	11	12	17	12	10	14
Aceh Barat	20	21	12	27	17	15
Aceh Besar	9	12	16	12	6	4
Pidie	14	18	18	20	18	15
Bireuen	9	16	16	12	12	12
Aceh Utara	6	7	11	7	8	5
Aceh Barat Daya	14	17	19	15	15	12
Gayo Lues	16	17	18	14	16	5
Aceh Tamiang	16	13	15	12	12	14

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nagan Raya	13	11	22	15	18	11
Aceh Jaya	16	18	16	19	7	16
Bener Meriah	15	21	15	14	20	15
Pidie Jaya	9	13	13	13	7	10
Banda Aceh	3	6	7	3	4	2
Sabang	14	9	9	15	12	8
Langsa	9	11	15	11	11	8
Lhokseumawe	10	8	12	6	5	4
Subulussalam	11	11	11	7	8	9
Aceh	11	13	14	12	11	9
Nasional	32					24

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2017

AKB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil. Hal ini menyebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit.

2.2.2.6. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun.

Satu target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara. Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas sektor kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah AKABA Aceh dapat dipastikan lebih baik dibandingkan Nasional hal ini terlihat dimana jumlah AKABA Aceh sebesar 10 per 1000 kelahiran hidup sedangkan nasional 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Namun apabila dilihat lebih jauh selama kurun waktu 2012-2017 AKABA Aceh terjadi peningkatan pada tahun 2014 menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup, kemudian tahun 2015 dan 2016 berturut turut turun kembali menjadi 13 dan 12 per 1000 kelahiran hidup. AKABA secara Nasional di peroleh dari hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan terakhir dilakukan pada tahun 2017 yaitu pada posisi 32 per 1000 Kelahiran Hidup sementara AKABA untuk Aceh 10 per 1000 Kelahiran Hidup, angka ini jauh lebih baik dari nasional. Selanjutnya Angka Kematian Balita (AKABA) menurut kabupaten/kota di Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2012 - 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21.
Angka Kematian Balita (AKABA) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2012 - 2017

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Simeulue	27	33	36	24	23	21
Aceh Singkil	13	10	19	16	18	17

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh Selatan	13	12	13	9	13	9
Aceh Tenggara	4	10	12	5	3	1
Aceh Timur	10	13	14	11	12	8
Aceh Tengah	12	13	17	13	11	14
Aceh Barat	23	21	14	30	18	15
Aceh Besar	10	12	17	14	6	4
Pidie	17	20	20	21	19	17
Bireuen	10	17	18	13	13	13
Aceh Utara	7	9	11	7	8	6
Aceh Barat Daya	16	18	19	16	16	13
Gayo Lues	16	19	20	14	19	5
Aceh Tamiang	17	14	16	12	12	14
Nagan Raya	13	12	23	15	19	12
Aceh Jaya	17	20	17	20	8	17
Bener Meriah	17	23	17	14	21	17
Pidie Jaya	11	15	13	14	11	10
Banda Aceh	3	6	8	3	4	2
Sabang	16	11	12	20	17	8
Langsa	10	11	16	13	14	10
Lhokseumawe	12	9	13	6	5	4
Subulussalam	11	13	16	7	17	9
Aceh (/1000 KH)	12	14	16	13	12	10
Nasional (/1000 KH)	40				40	32

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

2.2.2.7. Angka Usia Harapan Hidup

Status kesehatan masyarakat Aceh dalam lima tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup berarti pada beberapa indikator, namun demikian beberapa indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang cukup rendah. Masyarakat Aceh saat ini dihadapkan pada kondisi beban ganda (*double burden*), baik penyakit maupun permasalahan gizi. Masyarakat Aceh mengalami *double burden* penyakit dikarenakan pada waktu yang bersamaan menghadapi permasalahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Aceh juga dihadapkan pada persoalan Beban Gizi Ganda (*Double Burden Malnutrition*), di mana Aceh masih memiliki prevalensi yang sama tinggi antara kekurangan gizi dengan kelebihan gizi pada berbagai siklus kehidupan.

Untuk menggambarkan status kesehatan masyarakat, beberapa indikator utama yang digunakan diantaranya; Angka Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kesakitan, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatus (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Cakupan Balita Gizi Buruk dan Persentase Stunting.

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, UHH orang Aceh tidak banyak mengalami peningkatan selama periode 2012-2017. UHH hanya sedikit meningkat dari 69,23 di tahun 2012 menjadi 69,52 di tahun 2017 dan masih berada dibawah angka Nasional (71,06). Sedangkan secara internal Aceh, masih terdapat disparitas UHH antar kabupaten/kota.

Penduduk di Kota Lhokseumawe mempunyai UHH tertinggi mencapai 71,14 tahun sedangkan yang berdomisili di Kota Subulussalam merupakan daerah yang paling rendah UHH di Aceh hanya 63,56 tahun (BPS, 2018). Salah satu penyebab masih rendahnya UHH di Kota Subulussalam antara lain disebabkan oleh rendahnya kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.22.
Angka Usia Harapan Hidup di Aceh Tahun 2012-2017

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Simeulue	64,22	64,23	64,24	64,66	64,78	64,90
Aceh Singkil	66,85	66,91	66,94	66,97	67,02	67,07
Aceh Selatan	63,12	63,16	63,18	63,61	63,75	63,89
Aceh Tenggara	66,96	67,03	67,07	67,40	67,51	67,62
Aceh Timur	68,02	68,05	68,06	68,20	68,26	68,33
Aceh Tengah	68,30	68,35	68,38	68,44	68,48	68,53
Aceh Barat	67,25	67,30	67,33	67,49	67,56	67,62
Aceh Besar	69,41	69,44	69,46	69,47	69,49	69,52
Pidie	66,25	66,27	66,28	66,46	66,52	66,58
Bireuen	70,32	70,34	70,35	70,64	70,72	70,80
Aceh Utara	68,40	68,41	68,42	68,48	68,51	68,54
Aceh Barat Daya	63,63	63,69	63,72	64,20	64,35	64,51
Gayo Lues	64,38	64,42	64,44	64,77	64,88	64,98
Aceh Tamiang	68,65	68,66	68,67	68,99	69,08	69,16
Nagan Raya	68,26	68,28	68,29	68,59	68,67	68,76
Aceh Jaya	66,39	66,45	66,48	66,63	66,70	66,77
Bener Meriah	68,58	68,62	68,64	68,79	68,85	68,90
Pidie Jaya	69,07	69,11	69,13	69,49	69,59	69,68
Banda Aceh	70,76	70,79	70,80	70,89	70,92	70,96
Sabang	69,54	69,54	69,54	69,93	70,01	70,09
Langsa	68,75	68,78	68,79	68,94	69,00	69,06
Lhokseumawe	70,59	70,61	70,62	70,96	71,05	71,14
Subulussalam	62,83	62,86	62,87	63,27	63,42	63,56
Aceh	69,23	69,31	69,35	69,50	69,51	69,52
Nasional	70,20	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

2.2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI) adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*standard of living*) suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara.

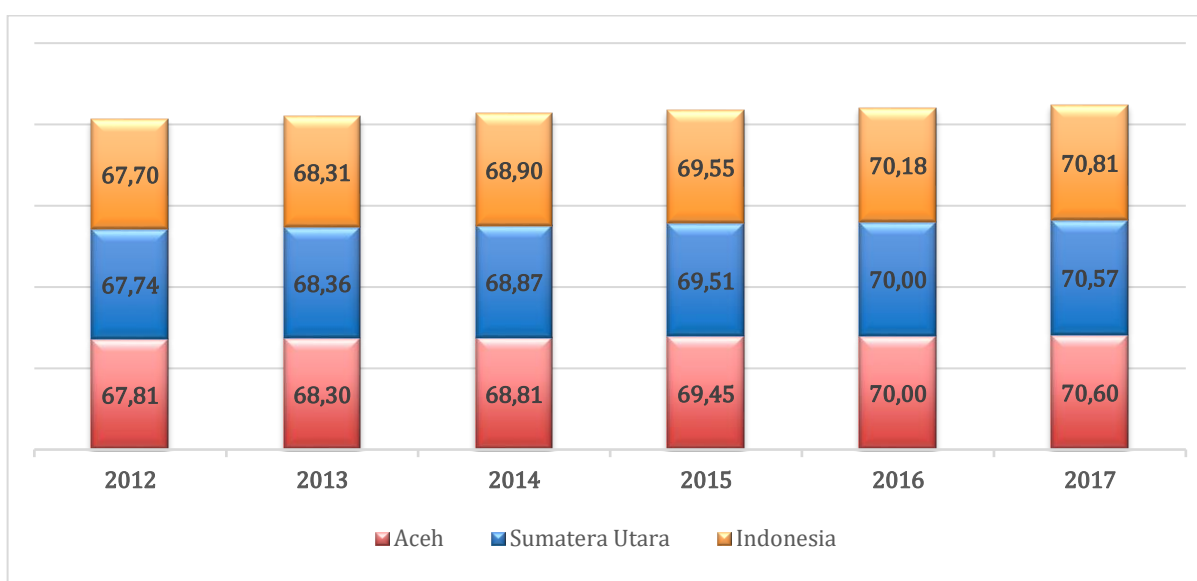
IPM Aceh mengalami peningkatan secara teratur dari tahun 2012 (67,81) meningkat menjadi 70,60 pada tahun 2017. Jika dilihat dari peringkatnya, Aceh menempati peringkat ke-11 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2013. Bila diperhatikan IPM per Kabupaten/Kota, IPM Kota Banda Aceh mempunyai nilai yang sangat tinggi sebesar 83,95 disusul dengan Kota Lhokseumawe sebesar 76,34 dan selanjutnya Kota Langsa sebesar 75,89 dan sebaliknya Kabupaten yang paling kecil angka IPM adalah 62,88 yaitu Kota Subulussalam, yang selanjutnya adalah Kota Simeulue sebesar 64,41 dan yang selanjutnya adalah gayo Lues 65,01. Angka Indeks Pembangunan Manusia Aceh tahun 2012 sampai 2017 (Tabel 2.33).

Tabel 2.23.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2012 - 2017

Kabupaten/Kota	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Simeulue	61,25	61,68	62,18	63,16	63,82	64,41
Aceh Singkil	64,23	64,87	65,27	66,05	66,96	67,37
Aceh Selatan	61,69	62,27	62,35	63,28	64,13	65,03
Aceh Tenggara	64,99	65,55	65,90	66,77	67,48	68,09
Aceh Timur	62,93	63,27	63,57	64,55	65,42	66,32
Aceh Tengah	70,18	70,51	70,96	71,51	72,04	72,19
Aceh Barat	66,66	66,86	67,31	68,41	69,26	70,20
Aceh Besar	70,10	70,61	71,06	71,70	71,75	72,00
Pidie	67,30	67,59	67,87	68,68	69,06	69,52
Bireuen	67,57	68,23	68,71	69,77	70,21	71,11
Aceh Utara	64,82	65,36	65,93	66,85	67,19	67,67
Aceh Barat Daya	62,15	62,62	63,08	63,77	64,57	65,09
Gayo Lues	62,85	63,22	63,34	63,67	64,26	65,01
Aceh Tamiang	65,21	65,56	66,09	67,03	67,41	67,99
Nagan Raya	64,91	65,23	65,58	66,73	67,32	67,78
Aceh Jaya	66,42	66,92	67,30	67,53	67,70	68,07
Bener Meriah	69,14	69,74	70,00	70,62	71,42	71,89
Pidie Jaya	68,90	69,26	69,89	70,49	71,13	71,73
Banda Aceh	81,30	81,84	82,22	83,25	83,73	83,95
Sabang	70,84	71,07	71,50	72,51	73,36	74,10
Langsa	72,75	73,40	73,81	74,74	75,41	75,89
Lhokseumawe	73,55	74,13	74,44	75,11	75,78	76,34
Subulussalam	59,76	60,11	60,39	61,32	62,18	62,88
Aceh	67,81	68,30	68,81	69,45	70,00	70,60
Nasional	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (Data diolah)

IPM Aceh pada tahun 2017 sebesar 70,60, atau 0,3 lebih tinggi dari IPM Sumatera Utara (70,57). Namun angka ini masih di bawah angka nasional yaitu 70,81 untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2012 - 2017 (Gambar 2.13).



Gambar 2.13. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2012-2017

2.2.2.9. Indeks Kebahagiaan Aceh

Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) telah merilis data Indeks Kebahagiaan Penduduk Tahun 2017. Hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat Aceh cukup bahagia dengan indeks sebesar 71,96 pada skala 0 – 100. Indeks kebahagiaan Aceh ini lebih tinggi dari indeks kebahagiaan nasional (70,69). Bila dilihat lebih rinci dari masing-masing dimensi penyusun kebahagiaan, Indeks Perasaan nilainya paling rendah yaitu 68,56 dibandingkan Indeks Kepuasan Hidup 72,95. Sedangkan Indeks Makna Hidup memiliki nilainya paling tinggi 74,05 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Indeks Dimensi dan Sub Dimensi Kebahagiaan Aceh Tahun 2017

Dimensi Penyusun Kebahagiaan					Total
Indeks Kepuasan Hidup			Indeks Perasaan	Indeks Makna Hidup	71,96
Sub Dimensi		Total			
Personal	Sosial				
67,24	78,66	72,95	68,56	74,05	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.2.3. Fokus Seni Budaya

Aceh memiliki keragaman budaya dan seni yang memiliki nilai tinggi hal ini dikarenakan Aceh didiami oleh beragamnya etnis masyarakat dan ditunjang posisi geografis yang strategis sehingga memudahkan bangsa lain mencapai Aceh. Keragaman budaya Aceh juga dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya, baik budaya benda (tangible) maupun budaya tak benda (intangible). Peninggalan sejarah budaya benda dapat diuraikan mulai dari masa prasejarah, masa klasik, masa Islam, masa kolonial dan masa setelah kemerdekaan.

Peninggalan budaya masa prasejarah dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan manusia prasejarah di kawasan Gua Kampung Mendale, Takengon. Pada masa periode klasik, Aceh memiliki tiga situs sejarah seperti situs Indrapurwa, Indrapuri, dan Indrapatra. Selanjutnya, pada masa Islam dan kolonial, situs/cagar budaya banyak ditemukan di seluruh Aceh. Gambaran penyebaran situs/cagar budaya di Aceh, secara keseluruhan dapat dilihat di Tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2016

No.	Kabupaten / Kota	Makam	Mesjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpus-takaan	Bangunan/Gedung	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Jumlah
1.	Aceh Selatan	8	1	0	2	0	4	0	1	0	1	0	17
2.	Aceh Tenggara	5	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	8
3.	Aceh Timur	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	12
4.	Aceh Tengah	3	0	1	1	0	0	0	0	6	0	1	12
5.	Aceh Barat	8	4	1	0	0	0	1	1	2	0	0	17
6.	Aceh Besar	53	4	2	2	1	8	1	3	0	1	1	76
7.	Pidie	20	10	0	3	0	1	0	2	0	0	0	36
8.	Aceh Utara	69	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	70
9.	Simeulue	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7
10.	Aceh Singkil	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
11.	Bireuen	44	8	3	1	4	3	0	4	1	0	0	68
12.	Aceh Barat Daya	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5

No.	Kabupaten / Kota	Makam	Mesjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpus-takaan	Bangunan/Gedung	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Jumlah
13.	Gayo Lues	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
14.	Aceh Jaya	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
15.	Nagan Raya	8	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	13
16.	Aceh Tamiang	14	0	1	3	0	0	0	4	4	0	0	26
17.	Bener Meriah	3	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	7
18.	Pidie Jaya	15	2	1	0	0	2	0	1	0	0	0	21
19.	Banda Aceh	28	5	5	1	4	0	0	10	2	0	0	55
20.	Sabang	3	2	1	0	0	4	0	54	0	0	0	64
21.	Lhokseumawe	10	0	2	0	1	2	0	0	3	0	1	19
22.	Langsa	10	1	2	1	0	0	0	8	0	2	0	24
23.	Subulussalam	10	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	13
Jumlah		345	39	24	17	12	33	2	90	23	4	6	595

Sumber: data Statistik Kebudayaan dan pariwisata, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.34, menunjukkan bahwa situs/cagar budaya terbanyak berada di wilayah pesisir pantai Utara Aceh yaitu : Kabupaten Aceh Besar 76 situs (terdiri dari 53 makam, 4 masjid, 2 tugu, 2 rumah tradisonal, 1 monumen, 8 benteng, 1 perpustakaan, 3 bangunan/gedung, 1 arca dan 1 gua), Kabupaten Aceh Utara 70 situs (terdiri dari 69 makam dan 1 tugu) sedangkan situs/cagar budaya paling sedikit terdapat di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 3 situs (terdiri dari 2 makam dan 1 tempat bersejarah) dan Gayo Lues sebanyak 3 situs juga (2 masjid dan 1 gua).

Dari jumlah situs/cagar budaya yang diuraikan di atas, hanya 9 (sembilan) buah situs/cagar budaya yang telah memiliki SK Menteri atau Register Nasional yaitu : Komplek Makam Kandang Meuh, Komplek Taman Sari Gunongan, Benteng Indrapatra, Benteng dan Masjid Indrapuri, Pendopo Gubernur, Gedung Bapperis, Gedung Menara (Sentral Telepon Militer Belanda) dan Gedung Bank Indonesia (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 014/M/1999 tanggal 12 Januari 1999), Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin di Kec. Mutiara Kab. Pidie (Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT.007/MKP/2004 tanggal 10 Agustus 2004).

Kondisi situs/cagar budaya di beberapa daerah ada yang sudah mengalami kerusakan dan yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah yang terkena bencana tsunami seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Cagar Budaya yang mengalami kerusakan antara lain situs Kampung Pande di Kota Banda Aceh, sebelumnya juga nisan-nisan di situs ini belum satupun yang tertata dan masih berserakan di rawa-rawa. Hasil penelitian Edwar Mc. Canon tahun 2007 memberikan informasi bahwa terdapat tulang-tulang manusia di lokasi Cot Makam Kampung Pande, namun pada saat ini tulang-tulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada situs Makam Syiah Kuala, situs Lamreh dan situs Ujung Pancu. Selayaknya dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, maka situs/cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus.

Dari jumlah total 595 situs/cagar budaya yang ada di Aceh masih banyak yang belum memiliki juru pelihara. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2016 terdapat 86 (delapan puluh enam) situs/cagar budaya yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah Aceh dan Sumatera Utara, serta 54 (lima puluh empat) situs/cagar budaya yang dibiayai oleh Pemerintah Aceh. Selanjutnya, terdapat juga situs/cagar budaya yang juru peliharaannya dibiayai oleh Pemerintah Kab/Kota, namun masih ada situs/cagar budaya lainnya yang sudah teregistrasi belum mendapat perhatian dari pemerintah sesuai kewenangannya masing-masing. Demikian juga situs/cagar budaya yang termasuk naskah-

naskah kuno yang belum teregistrasi perlu dilakukan pengkajian, pencatatan dan penetapan, sehingga pelestarian situs/cagar budaya dapat dilaksanakan sesuai kode etik.

Selain memiliki budaya benda berupa situs/cagar budaya, Aceh juga memiliki Budaya Tak Benda (intangibile) yang beragam seperti Tarian, Adat-Istiadat, dan kegiatan Spiritual. Berbagai jenis budaya tak benda tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan ciri khas tersendiri, seperti: rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana, qasidah gambus, pantun, syair, hikayat, seumapa dan seni lukis (kaligrafi) dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi dayatarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak tahun 2011 dan akan dievaluasi kembali di akhir tahun 2015.

Gedung kesenian adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk mewedahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk melakukan sebuah pameran. Auditorium dan galeri dilengkapi dengan tata pencahayaan serta akustik yang secara arsitektural mendukung untuk dilakukan sebuah pertunjukan maupun pameran. Sampai saat ini baru 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang memiliki gedung kesenian, yaitu; Sabang, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Simeulue dan Aceh Singkil. Kondisi gedung kesenian tersebut ada yang baru dibangun, ada juga yang sudah tidak layak digunakan lagi seperti di Sabang, Aceh Tengah dan Aceh Jaya.

Ketersediaan gedung kesenian di Aceh masih sangat kurang, demikian juga dari sisi pemerataan juga belum merata di seluruh Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Aceh mendorong Kabupaten/Kota untuk memprioritaskan program/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan revitalisasi gedung kesenian diseluruh Kabupaten/Kota secara bertahap.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

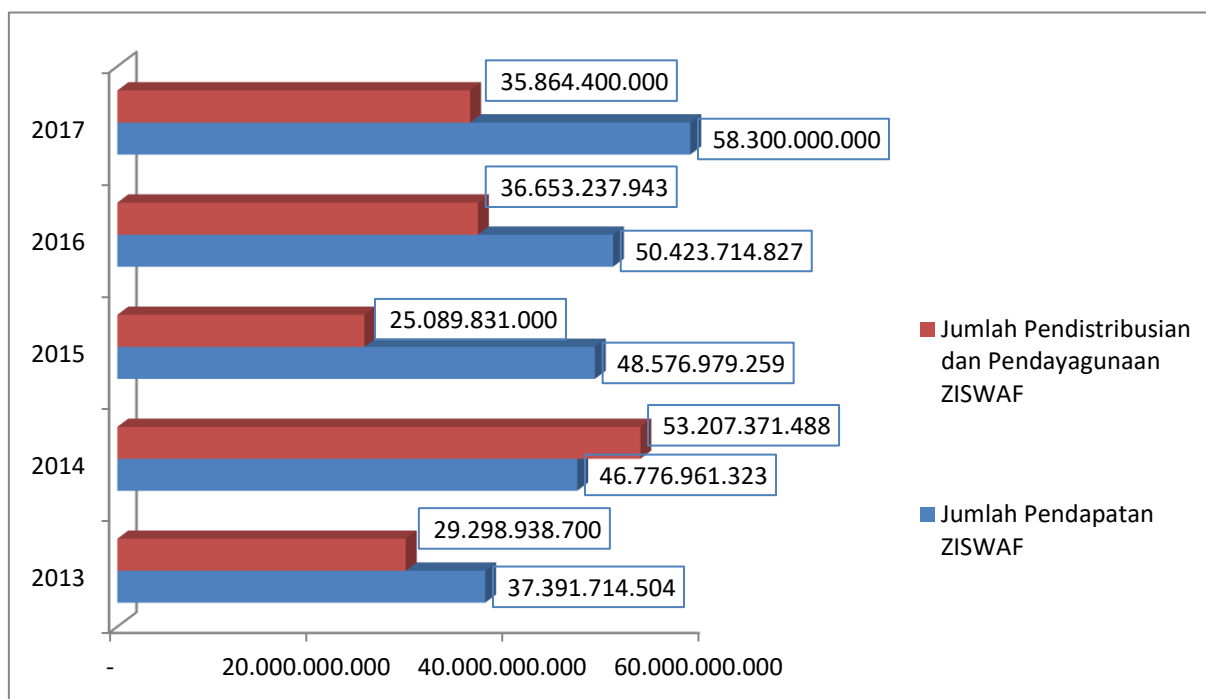
2.3.1.1. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

2.3.1.1.1. Syariat Islam

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syri'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan perilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum sinkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak. Secara umum pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) di Aceh belum optimal.



Sumber : Sekretariat Baitul Maal Aceh, 2017

Gambar 2.14. Pemanfaatan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tahun 2013-2017

Akhlik masyarakat Aceh cenderung menurun yang ditunjukkan semakin meningkatnya pelanggaran syariat Islam terutama jenis pelanggaran khamar dan khalwat. Hal ini terlihat dari masih terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat Islam, seperti terlihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Jumlah pelanggaran Syariat Islam Tahun 2012 - 2017

No	Jenis Pelanggaran	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Khamar (Qanun No. 12 Tahun 2003)	-	-	2	-	2	15
2	Maisir (Qanun No. 13 Tahun 2003)	72	53	122	53	122	99
3	Khalwat (Qanun No. 14 Tahun 20013)	3	3	8	3	8	18
Total		75	56	132	56	132	132

Sumber : Dinas Syariat Islam, 2017

Dari tahun 2012 - 2017, kondisi pelanggaran seperti khamar yang naik menjadi 15 kasus di tahun 2017, sedangkan kasus maisir dan khalwat meningkat hampir 2 kali lipat di tahun 2014 dan masing-masing pada tahun 2017 adalah 99 dan 18 kasus. Pada pemutusan perkara pada setiap tahunnya apabila belum selesai diputuskan pada tahun tersebut, maka sisa perkara dilanjutkan pada tahun selanjutnya.

Selain masih banyaknya jumlah kasus pelanggaran syariat Islam di wilayah perbatasan dan daerah terpencil masih dijumpai kerawanan terhadap pemahaman syariat Islam. Dalam rangka meningkatkan pemahaman syariat Islam di daerah tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan sejumlah da'i. Jumlah da'i perbatasan dan da'i terpencil setiap tahunnya terus mengalami

perkembangan, pada tahun 2012 total da'i perbatasan dan dai terpencil sebanyak 150 orang dan meningkat menjadi 200 orang da'i pada tahun 2017.

Tabel 2.27.
Jumlah Dai di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2012 - 2017

Kabupaten/ Kota	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl
Aceh Singkil	24	14	26	12	27	14	26	12	27	14	16	31
Subulussalam	13	2	10	5	10	8	10	5	10	8	11	13
Aceh Selatan	0	10	0	10	0	15	0	10	0	15	0	19
Aceh Tamiang	25	5	5	22	21	12	5	22	21	12	22	17
Aceh Tenggara	30	10	33	7	33	10	33	7	33	10	4	42
Simeulue	0	17	0	17	0	20	0	17	0	20	0	25
Jumlah	92	58	74	73	91	79	74	73	91	79	53	147
Total	150		147		170		147		170		200	

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.

Ket: Pbts : Perbatasan; Tpcl : Terpencil

Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Aceh antara lain berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui suatu program pengkaderan dan pemberdayaan ulama.

2.3.1.1.2. Pelaksanaan Ibadah

Kondisi rumah ibadah berupa Mesjid dan meunasah, yang terus meningkat jumlahnya dalam provinsi Aceh, ternyata tidak menjamin pelaksanaan ibadah secara berjemaah. Faktanya, dari 3.883 masjid yang tersebar di Aceh, hanya 283 atau 6 persen masjid yang benar-benar rutin melaksanakan salat berjemaah lima waktu. Sisanya hanya melaksanakan salat berjemaah Magrib dan Isya serta pelaksanaan salat jemaah Jumat.

Data yang diperoleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Aceh, data tahun 2013, jumlah masjid yang melaksanakan salat berjemaah lima waktu belum mencapai 10 persen. Padahal, jumlah masjid di Serambi Mekkah sudah mencapai 4.000 masjid. Namun tahun 2017 dari total 6.497 jumlah mesjid dan meunasah yang ada dalam provinsi Aceh yang sudah melaksanakan shalat lima waktu sudah mencapai 25 persen (Dinas Syariat Islam/Kemenag Aceh, 2017)

2.3.1.2. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman didalam bermasyarakat Aceh. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistim dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimipin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Dan jika adat ini bertentangan Ajaran Syariat maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai keagamaan.

2.3.1.3. Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang.

Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Aceh melalui dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga pendidikan baru, namun masyarakat Aceh tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama islam (Tabel 2.28).

Tabel 2.28.
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2012 – 2017

Tahun	Jumlah Tipe Dayah						Jumlah Dayah Tipe & Non Tipe	Jumlah Guru Dayah
	Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D	Non Tipe		
2012	-	69	94	164	145	395	867	1,374
2013	-	69	94	164	145	395	867	1,374
2014	-	69	129	273	0	573	1,044	6,595
2015	-	69	129	273	0	573	1,044	6,565
2016	9	69	141	360	436	573	1,588	8,280
2017	24	86	194	314	122	387	1,127	7,410

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2017 (Diolah)

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah dayah tipe maupun non tipe terus mengalami peningkatan. Tahun 2012-2015 belum ada dayah dengan kategori A+, dan mulai tahun 2016 dayah tipe A+ ada sebanyak 9 dayah dan meningkat menjadi 24 dayah pada tahun 2017. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan Dayah, dengan melakukan verifikasi dan pendataan ulang dayah yang ada di Aceh serta melakukan akreditasi dayah, sehingga lulusan dayah juga setara dengan pendidikan formal. Selain itu perlu pendataan kembali guru dayah yang tersedia, sehingga rasio antara santri dan guru dayah sesuai

2.3.1.4. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Dengan pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) ini diharapkan akan lahir para ulama muda dan da'i yang mumpuni dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh sehingga nantinya dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

Tabel 2.29.
Data Peran Ulama dalam Pembangunan/ Fatwa Ulama tahun 2012-2017

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Fatwa, Himbauan, Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam	Dokumen	15	13	19	9	8	5

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2	Jumlah saran/pertimbangan yang rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah sesuai syar'i	Naskah	2	5	15	14	8	0
3	Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	40	120	159	120	-	25

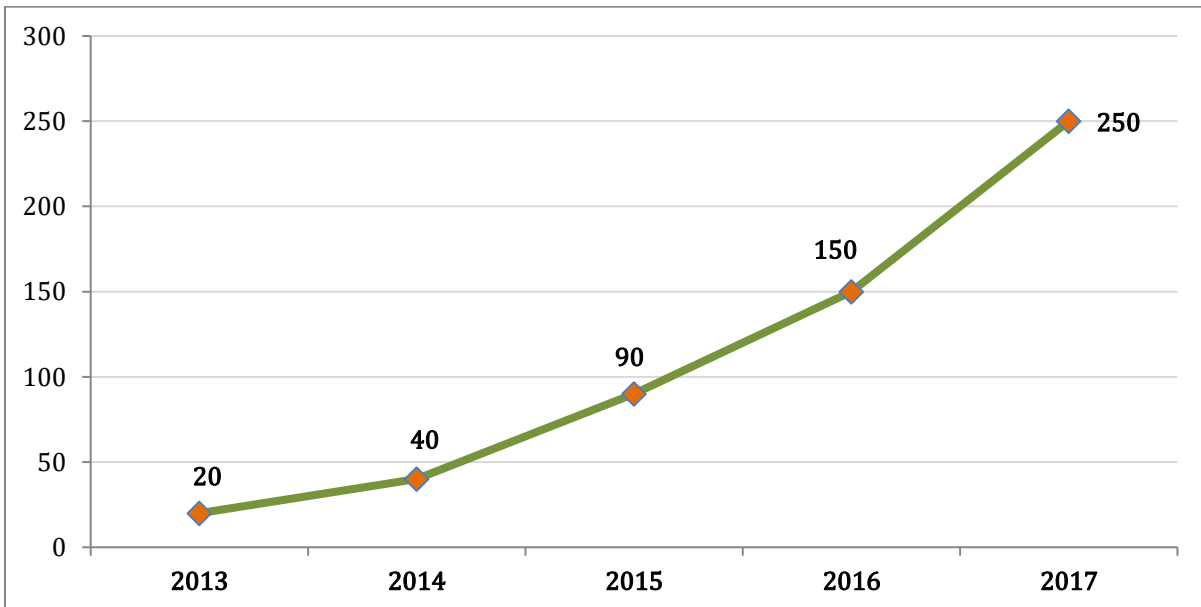
Sumber: Sekrt. MPU Aceh, Tahun 2018

Berdasarkan data Tabel 2.38. dapat diketahui jumlah ulama yang ditingkatkan kompetensinya masih sangat terbatas. Hal ini dilihat dari jumlah pendidikan kader ulama dari tahun 2015 sebanyak 120 kader ulama menjadi 25 kader ulama pada tahun 2017. Minimnya kader ulama pada 23 Kabupaten/Kota berdampak pada syiar agama untuk mencegah pelanggaran syariat islam di Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan peran ulama dalam pembangunan, terutama TOT pengkaderan ulama untuk 23 Kabupaten/ Kota.

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam tidak hanya menyangkut bidang ibadah, muamalah dan aqidah semata tetapi termasuk juga masalah kehalalan suatu produk berupa barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat Aceh. Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan hal penting dan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam juga harus mencakup bidang pangan, makanan, obat-obatan dan kosmetika

Oleh karenanya menjadi penting adanya penguatan terhadap lembaga pengkajian kehalalan ini sehingga pada akhirnya masyarakat Aceh terlindungi dan terhindarkan dari mengkonsumsi barang barang yang haram atau diragukan kehalalannya. Penentuan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) suatu barang dan jasa, Pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada MPU dengan membentuk sebuah badan otonom yang berada langsung dibawah MPU Aceh yang diberi nama Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh.

Sampai dengan Tahun 2017, LP-POM Aceh sudah melakukan audit terhadap 250 sertifikat halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan. Penerbitan sertifikat ini meningkat dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada Gambar 2.15.



Sumber : Sekretariat MPU Aceh, 2018

Gambar 2.15. Jumlah Sertifikat Halal yang Diterbitkan Tahun 2013 – 2017

2.3.1.5. Perdamaian

Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengan sukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Sejak dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/106/2006 tertanggal 2 Mei 2006, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi pemangku mandat penyaluran dana dan pelaksanaan 3 (tiga) program utama reintegrasi (perumahan, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan sosial). Berbagai hal yang berkaitan dengan keterbatasan kelembagaan hingga terisolasinya dukungan penguatan perdamaian dari perencanaan pembangunan reguler menjadi catatan tambahan BRA, selain berbagai kendala di lapangan, diantaranya disebabkan oleh ketidakakuratan data. BRA di awalnya dibangun sebagai organisasi skala kecil, organisasi ini didesentralisasikan di bawah kepemimpinan paruh waktu dengan kapasitas terbatas untuk mendistribusikan dana reintegrasi dari Pemerintah Indonesia, target dan realisasi bantuan reintegrasi Aceh sebagaimana disajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Target dan Realisasi Bantuan Reintegrasi Aceh Periode 2016

No	Kelompok Target	Jumlah
Pemberdayaan Ekonomi		
1	TAPOL/NAPOL	4.000 Orang
2	Masyarakat Korban Konflik	23.793 Orang
3	Korban cacat	8.427 orang
	Jumlah	36.220 orang
Rehabilitasi dan Bantuan Sosial		
	Bantuan Untuk Cacat	8.427 orang
Bantuan untuk anak korban konflik		
	Anak Korban Konflik	1.227 Orang

Sumber: Badan Reintegrasi Aceh, 2017

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Capaian IDI pemerintah Aceh dari tahun 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 66,29. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2016 sebesar 72,48; walaupun pada akhirnya kembali turun menjadi 70,93 di tahun 2017. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Aceh. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Provinsi Aceh tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang” (Tabel 2.31).

Tabel 2.31.
Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2012 – 2017

Aspek	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aspek kebebasan sipil	60,16	71,78	69,76	74,81	92,92	87,27

Aspek	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aspek hak-hak politik	47,16	48,59	63,94	63,98	63,94	63,94
Aspek lembaga demokrasi	57,21	76,97	88,73	64,97	60,33	61,47
Indeks Demokrasi Indonesia	54,02	63,56	72,29	67,78	72,48	70,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan seluruh aspek mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, aspek kebebasan sipil mengalami peningkatan, sedangkan aspek lainnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Nilai indeks dari aspek kebebasan sipil pada tahun 2016 merupakan yang tertinggi dibandingkan sejak tahun 2012. Sementara itu, aspek Lembaga Demokrasi menjadi aspek dengan penurunan nilai terbesar dan menempatkannya menjadi aspek dengan nilai terendah.

Pada tahun 2017 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil yang di tahun sebelumnya berada pada kategori “sedang”. Sedangkan kondisi di tahun 2016 menjadi kategori “baik”.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.2.1.1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah

Pembangunan pendidikan Aceh telah mencapai kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara rinci APM pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32.
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Aceh Tahun 2012– 2017

Kabupaten/kota	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Simeulue	69,43	75,46	88,21	82,29	78,53	80,07	2,89
Aceh Singkil	54,04	66,36	69,86	76,10	73,08	72,36	6,01
Aceh Selatan	64,09	65,19	69,45	68,25	70,56	68,66	1,39
Aceh Tenggara	75,19	72,07	77,87	79,95	72,81	71,42	-1,02
Aceh Timur	57,76	58,36	60,39	68,68	52,13	54,64	-1,10
Aceh Tengah	74,26	65,96	73,18	84,39	71,31	71,41	-0,78
Aceh Barat	67,86	71,44	73,09	77,55	75,49	74,72	1,94
Aceh Besar	57,96	62,74	74,96	71,15	66,87	68,61	3,43
Pidie	56,02	60,82	62,08	65,42	75,03	75,31	6,10
Bireuen	61,82	65,37	70,20	63,80	66,54	69,58	2,39
Aceh Utara	63,64	58,70	63,44	66,96	63,44	65,69	0,63
Aceh Barat Daya	60,83	63,48	72,68	69,27	75,96	74,73	4,20
Gayo Lues	64,26	70,58	76,35	71,39	71,70	73,15	2,62
Aceh Tamiang	53,89	57,31	61,67	63,73	65,06	66,23	4,21
Nagan Raya	66,69	63,59	75,21	80,16	72,04	71,61	1,43
Aceh Jaya	55,94	70,16	72,58	71,92	72,41	74,20	5,81

Kabupaten/kota	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Bener Meriah	55,36	65,91	77,40	72,55	72,63	70,83	5,05
Pidie Jaya	56,08	53,54	70,47	73,55	75,16	73,99	5,70
Banda Aceh	60,95	55,83	58,41	54,98	85,79	78,29	5,14
Sabang	72,51	57,47	77,75	76,30	83,56	82,59	2,64
Langsa	65,72	64,13	68,10	59,84	75,46	72,93	2,10
Lhokseumawe	64,24	76,95	79,61	78,19	80,83	77,49	3,82
Subulussalam	58,18	67,68	80,60	73,63	79,84	79,42	6,42
Aceh	61,82	63,43	69,20	69,82	70,00	70,15	2,56
Nasional	51,88	54,25	59,35	59,71	59,95	60,37	3,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (data diolah)

Berdasarkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Aceh tahun 2012 – 2017 terus meningkat dari 61,82 tahun 2012 menjadi 70,15 pada tahun 2017. Namun masih ada beberapa kabupaten/kota yang pencapaian APM nya masih rendah, seperti Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Besar, Bireuen dan Aceh Tamiang. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh adanya anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di luar wilayah asalnya, dengan dasar pertimbangan sekolah diluar wilayahnya memiliki kualitas yang lebih baik dari pada wilayah tempat tinggalnya

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. Selama periode tahun 2012-2017, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah terus mengalami kenaikan. Tabel 2.33 terlihat bahwa rata-rata APS Penduduk Aceh usia 16 – 18 tahun (78,69) sudah berada di atas rata-rata Nasional (67,42).

Tabel 2.33.
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16 – 18 Tahun 2012 – 2017

Kabupaten/Kota	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Simeulue	78,99	82,47	98,53	86,40	89,75	86,44	1,82
Aceh Singkil	66,90	87,05	88,67	85,66	82,33	80,15	3,68
Aceh Selatan	74,39	73,05	78,61	80,83	84,75	83,67	2,38
Aceh Tenggara	80,49	79,82	86,04	86,66	81,67	83,50	0,74
Aceh Timur	64,53	65,40	69,61	79,07	73,27	68,26	1,13
Aceh Tengah	78,44	79,32	85,27	91,64	81,87	84,06	1,39
Aceh Barat	87,87	77,49	87,19	84,56	84,79	86,31	-0,36
Aceh Besar	74,33	74,50	86,52	83,66	76,89	84,78	2,67
Pidie	66,91	70,26	74,44	75,95	86,64	90,04	6,12
Bireuen	72,93	76,34	78,55	77,39	79,24	79,54	1,75
Aceh Utara	75,51	74,53	75,50	75,65	75,49	80,16	1,20
Aceh Barat Daya	70,64	73,61	81,71	74,44	87,53	82,63	3,18
Gayo Lues	76,92	81,88	85,55	81,23	81,76	91,08	3,44
Aceh Tamiang	65,63	66,03	77,60	76,49	71,50	78,77	3,72
Nagan Raya	83,01	70,61	87,02	89,55	93,46	87,42	1,04
Aceh Jaya	67,60	79,21	82,44	84,38	83,17	80,79	3,63
Bener Meriah	71,65	75,87	85,08	82,98	85,47	78,45	1,83
Pidie Jaya	71,28	69,72	80,65	79,84	84,96	76,57	1,44
Banda Aceh	89,34	77,29	80,95	88,32	96,74	93,70	0,96

Kabupaten/Kota	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Sabang	83,13	67,66	98,17	80,65	93,86	91,66	1,97
Langsa	78,07	75,51	82,48	83,09	84,21	79,94	0,47
Lhokseumawe	82,29	85,22	85,99	90,92	86,17	83,20	0,22
Subulussalam	74,63	79,13	91,93	79,87	89,37	83,82	2,35
Aceh	74,59	74,70	80,89	81,43	81,82	82,15	1,95
Nasional	61,49	63,84	70,31	70,61	70,83	71,42	3,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (Data diolah)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16 - 18 tahun sudah mencapai 82,15 persen. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat sekitar 17,85 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah, baik karena putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. APS terendah terdapat di Kabupaten Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Aceh Tamiang.

C. Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang menunjang proses pembelajaran. Sarana merupakan semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah

Jumlah sekolah dalam Provinsi Aceh, terus mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jenjang, begitu juga dengan kondisi ruang kelas sekolah yang terus dilakukan perbaikan demi kenyamanan proses belajar-mengajar. Data kondisi ruang kelas sekolah Negeri/ Swasta tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD/SMP/SMA/Sederajat Tahun 2015-2017

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Ruang Kelas	% Kondisi Baik
2015	SD	5.644	16.373	2.519	24.536	23,00
	SMP	2.254	7.087	1.022	10.363	21,75
	SMA/SMK	3.486	5.409	448	9.343	37,31
2016	SD	5.548	14.157	1.429	21.134	26,25
	SMP	1.980	5.371	509	7.860	25,19
	SMA/SMK	2.759	3.996	237	6.992	39,46
2017	SD	5.876	15.809	2.461	24.146	24,34
	SMP	2.012	5.908	1.061	8.981	22,40
	SMA/SMK	2.728	4.742	284	7.754	35,18

Sumber: Data Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2017

Berdasarkan data Tabel 2.17 diatas dapat diketahui bahwa kondisi ruang kelas dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jenjang pendidikan SD dengan jumlah 24.146 ruang kelas, dimana kondisi layak/baik sebanyak 5.876 ruang kelas (24,34%); jenjang SMP jumlah ruang kelas sebanyak 8.981 ruang, dengan kondisi baik sebanyak 2.012 (22,40%) dan jenjang SMA/SMK ruang kelas berjumlah 7.754 ruang, dengan kondisi baik sebanyak 2.728 ruang kelas (35,18%). Rendahnya persentase ruang kelas dalam kondisi baik untuk semua jenjang pendidikan disebabkan antara lain rendahnya kualitas infrastruktur.

Dengan meningkatnya jumlah ruang kelas dalam kondisi baik dapat berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Kondisi kelas yang kurang kondusif bisa menyebabkan menurunnya tingkat konsentrasi siswa dalam mengikuti proses belajar siswa, namun sebaliknya kondisi kelas yang

mendukung serta kondusif memberikan kesan yang berbeda bagi para penggunanya, terutama para siswa. Dengan ruangan kelas yang nyaman, tenang dan menyenangkan para siswa akan lebih nyaman dengan proses belajar, tentunya hal ini akan mendukung kemajuan prestasi dalam sekolah.

D. Uji Kompetensi Guru

UKG (Ujian Kompetensi Guru) merupakan sebuah kegiatan berupa ujian yang berfungsi untuk mengukur kompetensi dasar mengenai bidang studi atau *subject matter* dan pedagogik dalam domain seorang guru. Khusus untuk guru yang sudah bersertifikat pendidik, maka kompetensi dasar yang akan diujikan akan disesuaikan dengan bidang studi sertifikasi tersebut. Selain itu, materi yang akan diujikan juga akan disesuaikan dengan kualifikasi akademik seorang guru bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Untuk kompetensi pedagogik yang akan diujikan sendiri merupakan integrasi dari konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran dalam bidang studi yang diampu di kelas. Berikut adalah nilai hasil UKG jenjang SD/SMP/SMA/SMK tahun 2016 dalam provinsi Aceh (Tabel 2.35).

Tabel 2.35.
Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Jenjang SD/SMP/SMA/SMK Tahun 2015-2016

Kabupaten/Kota	2015			
	SD	SMP	SMA	SMK
Simeulue	45,11	46,38	46,48	49,29
Aceh Singkil	47,03	51,02	54,05	52,87
Aceh Selatan	45,02	49,66	53,58	51,05
Aceh Tenggara	43,22	48,19	50,52	50,52
Aceh Timur	46,19	46,75	46,99	49,26
Aceh Tengah	44,94	47,99	52,63	54,92
Aceh Barat	43,75	46,81	51,96	50,18
Aceh Besar	47,22	48,90	53,20	54,91
Pidie	45,62	46,72	47,26	48,44
Bireuen	46,18	46,28	48,65	50,39
Aceh Utara	46,01	46,58	48,30	48,70
Aceh Barat Daya	45,74	49,05	54,89	55,03
Gayo Lues	44,76	49,31	55,45	48,62
Aceh Tamiang	51,81	53,47	56,78	56,20
Nagan Raya	42,80	45,70	50,22	51,37
Aceh Jaya	48,61	50,57	50,26	51,22
Bener Meriah	44,53	46,87	51,26	49,94
Pidie Jaya	46,07	44,29	45,11	46,97
Banda Aceh	51,71	52,81	56,38	55,23
Sabang	51,13	53,85	56,22	57,13
Langsa	50,04	52,30	57,54	55,03
Lhokseumawe	48,57	51,55	56,09	54,09
Subulussalam	46,93	50,24	55,00	52,84
ACEH	46,20	48,10	51,10	51,90
NASIONAL	-	-	-	-

Sumber: Data Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2018

Guru mata pelajaran jenjang SD tahun 2016 jenjang SD hasil UKG yang memiliki kompetensi profesional rendah, hal ini terlihat dari 100,00 persen yang memperoleh Skor dibawah 55 dan 17,39 persen yang memperoleh skor 50 keatas, yaitu sebanyak 4 Kabupaten/ Kota (Kabupaten

Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Langsa). Dengan skor Aceh 46,23 dibawah hasil UKG Nasional 54,33.

Guru mata pelajaran jenjang SMP tahun 2016 jenjang SMP hasil UKG juga yang memiliki kompetensi profesional rendah, hal ini terlihat dari 100,00 persen yang memperoleh Skor dibawah 55, dan 34,78 persen yang memperoleh skor 50 keatas, yaitu sebanyak 8 kabupaten Kota (Kabupaten Aceh Singkil, kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam). Dengan skor Aceh 48,12 dibawah hasil UKG Nasional 58,25.

Guru mata pelajaran jenjang SMA tahun 2016 jenjang SMA hasil UKG juga yang memiliki kompetensi profesional baik, hal ini terlihat dari 69,56 persen yang memperoleh Skor dibawah 55, dan 73,91 persen yang memperoleh skor 50 keatas, yaitu sebanyak 17 kabupaten/Kota. Dengan skor Aceh 51,05 dibawah hasil UKG Nasional 61,74 persen.

Guru mata pelajaran jenjang SMK tahun 2016 jenjang SMK hasil UKG juga yang memiliki kompetensi profesional baik, hal ini terlihat dari 78,26 persen yang memperoleh Skor dibawah 55, dan 69,56 persen yang memperoleh skor 50 keatas, yaitu sebanyak 16 kabupaten/Kota. Dengan skor Aceh 51,88 dibawah hasil UKG Nasional 58,30.

Dalam rangka meningkatkan nilai UKG, terutama jenjang SD/SMP pada kabupaten/kota yang memperoleh nilai UKG terendah dengan cara: 1) membangun pusat pengembangan kompetensi guru pada cabang Dinas Pendidikan di kabupaten/kota; 2) bimbingan secara intensif terhadap guru mata pelajaran sebagai calon peserta UKG; 3) memberikan motivasi kepada guru mata pelajaran dengan memberikan penghargaan kepada guru yang memperoleh skor terbaik dan memberikan pelatihan khusus kepada guru yang memperoleh skor rendah.

E. Kualifikasi Guru

Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang *qualified* adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Guru profesional harus memenuhi kriteria dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Persoalannya banyak guru pada jenjang pendidikan dasar yang memperoleh kesajarannya di luar bidang studi atau mata pelajaran yang diampu. Kualifikasi guru berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36.
Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2017

Kabupaten/Kota	SD		SMP		SMA		SMK	
	< D4	≥ D4	< D4	≥ D4	< D4	≥ D4	< D4	≥ D4
Simeulue	53,0	47,0	17,6	82,4	4,5	95,5	5,7	94,3
Aceh Singkil	28,3	71,7	7,3	92,7	0,4	99,6	3,9	96,1
Aceh Selatan	39,9	60,1	9,4	90,6	2,7	97,3	5,0	95,0
Aceh Tenggara	22,3	77,7	7,9	92,1	2,8	97,2	8,8	91,2
Aceh Timur	34,7	65,3	9,5	90,5	3,0	97,0	6,6	93,4
Aceh Tengah	32,5	67,5	12,7	87,3	5,8	94,2	5,0	95,0
Aceh Barat	35,9	64,1	11,3	88,7	2,1	97,9	6,3	93,7
Aceh Besar	23,3	76,7	9,1	90,9	2,8	97,2	3,0	97,0

Kabupaten/Kota	SD		SMP		SMA		SMK	
	< D4	≥ D4	< D4	≥ D4	< D4	≥ D4	< D4	≥ D4
Pidie	27,3	72,7	7,8	92,2	2,2	97,8	3,8	96,2
Bireuen	27,5	72,5	11,6	88,4	2,2	97,8	3,2	96,8
Aceh Utara	25,6	74,4	9,8	90,2	5,6	94,4	8,1	91,9
Aceh Barat Daya	43,5	56,5	8,2	91,8	2,3	97,7	2,5	97,5
Gayo Lues	39,7	60,3	6,5	93,5	2,2	97,8	9,1	90,9
Aceh Tamiang	17,7	82,3	4,6	95,4	5,7	94,3	1,3	98,7
Nagan Raya	34,8	65,2	16,2	83,8	4,2	95,8	3,7	96,3
Aceh Jaya	32,4	67,6	7,0	93,0	1,5	98,5	2,4	97,6
Bener Meriah	35,0	65,0	6,7	93,3	2,6	97,4	3,8	96,2
Pidie Jaya	23,8	76,2	6,4	93,6	2,0	98,0	4,9	95,1
Banda Aceh	20,3	79,7	8,0	92,0	1,6	98,4	3,5	96,5
Sabang	17,0	83,0	0,4	99,6	2,1	97,9	0,0	100,0
Langsa	21,1	78,9	9,0	91,0	3,4	96,6	1,5	98,5
Lhokseumawe	26,9	73,1	12,4	87,6	3,6	96,4	6,3	93,7
Subulussalam	33,3	66,7	8,5	91,5	2,1	97,9	8,6	91,4
ACEH	30,0	70,0	9,4	90,6	3,2	96,8	4,8	95,2

Sumber: Data Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2018

Tabel 2.36, memberikan informasi, pada jenjang SD Kabupaten Simeulue, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan merupakan daerah tertinggi pendidikan guru yang tidak lulus minimal D4. Pada jenjang SMP Kabupaten Simeulue, Nagan Raya, dan Aceh Tengah merupakan yang tertinggi guru berpendidikan minimal D4; jenjang SMA Kabupaten Aceh Tengah, Tamiang, dan Aceh Utara. Sedangkan untuk jenjang SMK, Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Subulussalam adalah daerah tertinggi pendidikan guru yang tidak lulus minimal D4.

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam kerangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan hukum dan perlindungan profesi bagi mereka. Langkah-langkah strategis ini perlu diambil, karena apresiasi tinggi suatu bangsa terhadap guru sebagai penyandang profesi yang bermartabat merupakan pencerminan sekaligus sebagai salah satu ukuran martabat suatu bangsa.

F. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran pendidikan dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan masing masing sub unsur saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Berikut adalah Status Akreditasi Sekolah tahun 2017 jenjang SD/SMP/SMA/SMK (Tabel 2.37).

Tabel 2.37.
Data Akreditasi Sekolah Jenjang SD/SMP/SMA/SMK Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	SD				SMP				SMA				SMK			
	A	B	C	Belum	A	B	C	Belum	A	B	C	Belum	A	B	C	Belum
Simeulue	28,7	50,0	15,6	5,7	14,3	59,2	20,4	6,1	20,0	52,0	28,0	0,0	10,3	17,9	10,3	61,5
Aceh Singkil	11,1	59,8	16,2	12,8	19,5	56,1	14,6	9,8	31,3	56,3	0,0	12,5	2,4	19,5	17,1	61,0

Kabupaten/ Kota	SD				SMP				SMA				SMK			
	A	B	C	Belum	A	B	C	Belum	A	B	C	Belum	A	B	C	Belum
Aceh Selatan	16,4	57,3	20,2	6,1	24,6	49,2	12,3	13,8	33,3	48,5	15,2	3,0	2,2	37,0	8,7	52,2
Aceh Tenggara	7,9	46,6	41,0	4,5	10,4	44,8	32,8	11,9	12,9	64,5	9,7	12,9	8,6	18,5	3,7	69,1
Aceh Timur	20,9	51,3	6,1	21,7	20,2	56,2	7,9	15,7	46,9	34,4	12,5	6,3	9,3	20,4	0,9	69,4
Aceh Tengah	12,6	57,0	19,8	10,6	9,8	54,9	27,5	7,8	40,0	40,0	15,0	5,0	14,1	25,0	0,0	60,9
Aceh Barat	18,7	63,9	15,5	1,9	17,2	44,8	19,0	19,0	42,9	42,9	14,3	0,0	6,3	25,3	5,1	63,3
Aceh Besar	27,2	54,0	16,4	2,3	18,7	52,0	20,0	9,3	37,2	41,9	14,0	7,0	18,3	11,0	4,9	65,9
Pidie	6,8	66,4	23,6	3,2	21,0	69,4	8,1	1,6	57,1	35,7	7,1	0,0	16,7	15,3	2,8	65,3
Bireuen	13,6	60,9	23,0	2,6	11,8	52,9	30,6	4,7	22,9	57,1	11,4	8,6	7,2	18,4	0,0	74,4
Aceh Utara	26,1	61,7	7,5	4,6	28,2	51,4	9,2	11,3	35,7	46,4	12,5	5,4	12,7	10,8	3,8	72,6
Aceh Barat Daya	22,5	61,7	5,0	10,8	27,3	39,4	18,2	15,2	37,5	43,8	12,5	6,3	8,3	36,1	8,3	47,2
Gayo Lues	3,2	32,3	46,2	18,3	13,5	51,4	21,6	13,5	40,0	46,7	13,3	0,0	0,0	42,9	0,0	57,1
Aceh Tamiang	13,1	59,5	25,6	1,8	15,5	51,7	31,0	1,7	55,6	33,3	7,4	3,7	3,2	20,0	3,2	73,7
Nagan Raya	8,8	61,0	27,9	2,2	21,1	71,1	5,3	2,6	19,0	61,9	4,8	14,3	10,5	26,3	0,0	63,2
Aceh Jaya	30,1	61,2	2,9	5,8	20,0	65,7	11,4	2,9	17,6	52,9	5,9	23,5	10,7	39,3	3,6	46,4
Bener Meriah	10,1	64,3	23,3	2,3	13,6	61,0	13,6	11,9	8,7	69,6	21,7	0,0	11,8	23,5	5,9	58,8
Pidie Jaya	31,2	67,7	0,0	1,1	24,2	63,6	3,0	9,1	42,9	50,0	0,0	7,1	7,0	23,3	0,0	69,8
Banda Aceh	61,6	36,0	0,0	2,3	56,3	43,8	0,0	0,0	60,0	30,0	10,0	0,0	21,0	11,1	0,0	67,9
Sabang	48,0	44,0	8,0	0,0	77,8	22,2	0,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	46,2	0,0	0,0	53,8
Langsa	29,9	56,7	7,5	6,0	47,1	47,1	5,9	0,0	22,2	77,8	0,0	0,0	14,8	17,0	4,5	63,6
Lhokseumawe	60,3	32,4	4,4	2,9	35,5	45,2	6,5	12,9	46,2	46,2	0,0	7,7	20,2	8,4	0,0	71,4
Subulussalam	11,2	46,1	31,5	11,2	11,5	38,5	30,8	19,2	30,8	53,8	7,7	7,7	13,3	16,7	6,7	63,3
ACEH	19,5	56,5	17,2	6,8	20,9	53,4	16,4	9,3	35,6	47,6	11,3	5,6	11,7	18,6	3,3	66,4

Sumber: Data Neraca Pendidikan Daerah, KEMENDIKBUD, 2018

Berdasarkan data Tabel 2.37 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sekolah terbanyak yang belum terakreditasi untuk jenjang Sekolah Dasar mencapai 21,7 persen di Kabupaten Aceh Timur dan 18,3 persen di Kabupaten Gayo Lues. Untuk jenjang SMP yang belum terakreditasi terbanyak di Kota Subulussalam sebesar 19,2 persen dan Aceh Barat 21,7 persen. Sedangkan pada jenjang SMA jumlah sekolah yang belum terakreditasi sebesar 23,55 persen di Kabupaten Aceh Jaya dan 14,3 persen di Kabupaten Nagan Raya. Untuk jenjang SMK secara keseluruhan masih ada 66,4 persen SMK yang belum terakreditasi. Dalam rangka meningkatkan/mempertahankan Akreditasi Sekolah, sekolah harus memenuhi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan serta standar sarana dan prasarana.

2.3.2.1.2. Kesehatan

A. Angka Kesakitan

Angka keluhan kesehatan (sakit) dihitung pada penduduk yang pernah mengeluh menderita salah satu penyakit selama satu bulan yang lalu (pada saat survey dilakukan), pada tahun 2017 sebesar 24,85 persen, terjadi penurunan sekitar 5 persen dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 30,71 persen. Angka kesakitan masyarakat Aceh di tahun 2012 (30,71 persen) masih berada di atas rata-rata angka kesakitan nasional yang sebesar 28,57 persen. Namun di tahun 2017, angka kesakitan masyarakat Aceh turun sebanyak 5,85 persen dan berada di bawah rata-rata nasional yaitu 28,62 persen, sebagaimana secara rinci disajikan pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Angka Kesakitan Tahun 2012-2017

Provinsi	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	30,71	28,66	30,55	27,92	25,78	24,85
Sumatera Utara	20,55	21,3	23,55	23,04	22,88	23,51
Sumatera Barat	29,97	29,43	31,80	28,92	29,38	28,81
Riau	24,40	24,04	26,19	29,71	27,89	27,28

Provinsi	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jambi	21,29	20,66	21,91	24,45	23,68	20,62
Sumatera Selatan	24,88	24,41	26,75	29,41	26,63	26,82
Bengkulu	28,62	28,02	29,96	27,96	27,66	24,83
Lampung	31,67	28,94	28,63	31,42	27,39	28,52
Kep. Bangka Belitung	28,72	27,25	26,27	30,42	31,33	27,70
Kepulauan Riau	27,34	24,37	22,82	21,28	22,17	21,46
Nasional	28,57	27,94	29,22	30,35	28,53	28,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

B. Angka Kematian Neonatus (AKN)

Angka Kematian Neonatus (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0 - 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Kematian bayi terbanyak terjadi pada masa neonatus, dengan penyebab kematian utama adalah asfiksia, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan infeksi. Angka Kematian Neonatus (AKN) di Aceh tahun 2012 sebesar 9 per 1.000 kelahiran hidup dan menurun secara bertahap hingga mencapai 7 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi lebih separuh (68 persen) terhadap jumlah kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Angka Kematian Neonatus (AKN) secara Nasional di peroleh dari hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 Tahun sekali dan terakhir dilakukan pada tahun 2017 yaitu pada posisi 15 per 1000 Kelahiran Hidup sementara AKN untuk Aceh 7 per 1000 Kelahiran Hidup, angka ini jauh lebih baik dari nasional (Tabel 2.36).

Tabel 2.39.
Angka Kematian Neonatus (AKN) Aceh per 1000 Kelahiran Hidup
Tahun 2012 – 2017

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Simeulue	14	18	22	18	13	11
Aceh Singkil	6	7	8	11	12	9
Aceh Selatan	10	9	9	7	8	6
Aceh Tenggara	1	7	7	2	2	1
Aceh Timur	8	10	11	8	8	7
Aceh Tengah	10	10	13	10	8	11
Aceh Barat	15	19	9	18	11	9
Aceh Besar	8	9	12	2	4	4
Pidie	13	15	14	1	12	12
Bireuen	8	13	12	10	9	10
Aceh Utara	5	7	8	6	6	5
Aceh Barat Daya	10	13	12	13	11	7
Gayo Lues	14	14	10	12	10	4
Aceh Tamiang	12	9	9	9	9	11
Nagan Raya	11	9	16	11	14	8
Aceh Jaya	14	12	11	13	5	14
Bener Meriah	12	19	9	13	14	12
Pidie Jaya	8	11	11	11	6	6

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Banda Aceh	3	5	6	2	3	2
Sabang	13	8	4	9	3	4
Langsa	8	8	10	9	8	6
Lhokseumawe	7	6	10	5	4	4
Subulussalam	9	8	15	5	15	6
Aceh	9	10	11	8	8	7
Nasional	19					15

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

C. Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita untuk setiap 1.000 balita disuatu wilayah. Jumlah posyandu di Aceh pada tahun 2017 adalah sebanyak 7.458 yang melayani balita sebanyak 452.796. Adapun perkembangan rasio posyandu dan balita di Aceh tahun 2012-2017 seperti terlihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Rasio Posyandu dan Balita Di Aceh Tahun 2012-2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Posyandu	7.152	7.152	13.505	7.428	7.462	7.458
Jumlah Balita	415.821	450.536	393.743	565.567	567.780	452.796
Rasio Per 1000 Balita	17,20	15,87	34,30	13,10	13,10	16,5

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

Rasio posyandu diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2012-2017 setiap satu posyandu di Aceh hanya melayani balita sebanyak 13-35 orang, sedangkan idealnya satu posyandu dapat melayani 100 balita. Hal ini menunjukkan jumlah posyandu di Aceh sudah sangat memadai. Banyaknya jumlah posyandu dimungkinkan karena jumlah penduduknya yang tersebar, sehingga dalam 1 desa me Penyediaan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat mempunyai lebih dari satu posyandu.

D. Gizi Buruk

Gizi balita di Aceh menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Secara umum beberapa kabupaten termasuk ke dalam kategori akut-kronik pada Tahun 2017. Rata-rata masalah gizi balita untuk katagori gizi kurang 16,7 persen, pendek 26,4 persen, kurus 13,3 persen dan gemuk 3,1 persen. Kabupaten Pidie dan Kota Subulussalam memiliki permasalahan gizi buruk yang tertinggi pada tahun 2017 dibandingkan dengan kabupaten lain (Tabel 2.41).

Tabel 2.41.
Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk dan Kurang di Aceh Tahun 2015 – 2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Simeulue	19,0	22,2	26,7
2	Aceh Singkil	20,3	7,7	15,4
3	Aceh.Selatan	27,0	20,8	24,2
4	Aceh Tenggara	27,0	6,3	22,1
5	Aceh Timur	24,0	25,2	32,5
6	Aceh Tengah	8,7	13,1	18,5

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2015	2016	2017
7	Aceh Barat	24.0	14.0	19,5
8	Aceh Besar	26.7	6.7	22,1
9	Pidie	29.3	25.8	35,0
10	Bireuen	26.7	20.2	25,2
11	AcehUtara	26.0	26.7	31,9
12	Aceh Barat Daya	22.3	29.2	26,0
13	Gayo Lues	18.7	2.7	26,0
14	Aceh Tamiang	11.0	4.8	19,8
15	Nagan Raya	25.0	16.8	12,7
16	Aceh Jaya	19.3	9.6	25,2
17	Bener Meriah	18.3	14.0	21,4
18	Pidie Jaya	30.3	13.6	27,9
19	Banda Aceh	18.0	20.3	23,3
20	Kota Sabang	20.3	19.0	23,5
21	Kota Langsa	23.3	16.7	10,7
22	Lhokseumawe	31.0	23.0	22,2
23	Subulussalam	22.7	23.4	29,1
Aceh		22.6	16.7	24,8
Indonesia		19.6	17.8	17,8

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

E. Balita Stunting

Dari data Pemantauan Status Gizi (PSG) pada tahun 2015, didapatkan bahwa prevalensi balita Stunting di Aceh sebesar 31.6 persen dan nasional 37.2 persen. Pada tahun 2017, prevalensi balita Stunting di Aceh menurun menjadi 26,4 persen namun berada diatas angka Nasional (21,7%). Jika dibandingkan dengan standar anthropometri yang ditetapkan oleh WHO 2015, maka persentase balita stunting di Aceh tergolong dalam masalah yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan.

Stunting dapat dicegah dengan perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dimulai saat ibu hamil sampai bayi berusia 2 tahun, diiringi dengan perbaikan sanitasi dan peningkatan akses air bersih serta perilaku dan pola asuh yang mendukung kesehatan.

Tabel 2.42.
Prevalensi Balita Stunting di Aceh Tahun 2015-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)		
		2015	2016	2017
1	Simeulue	37,7	28,6	35,9
2	Aceh Singkil	37,0	28,9	38,7
3	Aceh.Selatan	43,7	26,6	44,9
4	Aceh Tenggara	39,0	21,0	38,1
5	Aceh Timur	31,3	32,3	43,3
6	Aceh Tengah	13,0	27,0	37,0
7	Aceh Barat	36,3	25,5	33,1
8	Aceh Besar	25,0	12,2	31,2
9	Pidie	32,3	27,7	44,0
10	Bireuen	28,0	36,6	34,4
11	AcehUtara	39,0	36,1	35,9
12	Aceh Barat Daya	28,7	31,6	31,4

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)		
		2015	2016	2017
13	Gayo Lues	30,3	15,5	38,5
14	Aceh Tamiang	25,3	15,1	32,3
15	Nagan Raya	40,3	28,6	26,3
16	Aceh Jaya	25,7	22,8	38,3
17	Bener Meriah	34,3	38,0	37,5
18	Pidie Jaya	37,0	17,4	34,5
19	Banda Aceh	24,0	27,1	25,2
20	Sabang	27,3	24,3	29,7
21	Langsa	25,3	22,2	26,6
22	Lhokseumawe	34,3	27,4	25,5
23	Subulussalam	31,7	32,9	47,3
Aceh		31,6	26,4	35,7
Indonesia		37,2	21,7	29,6

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

F. Rasio puskesmas, polindes, pustu per satuan penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Aceh sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Rasio fasilitas pelayanan kesehatan dasar tahun 2012-2017 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu di Aceh Tahun 2012-2017

NO	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas	332	334	337	339	340	347
2	Jumlah Polindes	1.932	1.986	2.402	2.679	2.731	2.819
3	Jumlah Puskesmas Pembantu	988	988	979	988	991	903
	Jumlah Penduduk	4.715.108	4.811.133	4.906.835	5.001.953	5.096.248	5.189.466
1	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
2	Rasio Polindes persatuan penduduk	0,41	0,41	0,49	0,54	0,54	0,54
3	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,17

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

Data diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah puskesmas sebanyak 15 unit dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Bertambahnya jumlah puskesmas sangat relevan dengan jumlah penduduk Aceh yang juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.

G. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio Rumah sakit persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk setiap 100.000 penduduk disuatu wilayah. Tabel 2.44 menunjukkan rasio rumah sakit di Aceh dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.44.
Rasio Rumah Sakit di Aceh Tahun 2012-2016

NO	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah/Provinsi)	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	4	4	4	4	5	5
4	Rumah Sakit Umum (Pemda)	24	24	24	24	24	24
5	Rumah Sakit Umum (Swasta)	26	18	18	34	34	35
6	Jumlah seluruh Rumah Sakit	57	49	49	65	66	67
7	Jumlah Penduduk	4.715.108	4.811.133	4.906.835	5.001.953	5.096.248	5.189.466
8	Rasio per 100.000 penduduk	1.257	1.043	1.044	1.299	1.295	1.291
9	Jumlah Tempat Tidur	6.112	6.105	6.794	8.282	8.532	8.628
10	Rasio Tempat Tidur per 1000 penduduk	1,30	1,27	1,38	1,66	1,67	1,66

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

Data diatas menunjukkan dari Tahun 2012 sampai dengan 2017 jumlah Rumah Sakit pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan. Hal ini berbeda dengan rumah sakit swasta yang semakin bertambah, dari 57 unit di tahun 2012 menjadi 67 unit pada tahun 2017. Banyaknya jumlah RS di Aceh sudah sangat memadai, hal ini terlihat dari rasio dimana terdapat 1 RS dalam 100.000 penduduk

H. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter, dokter spesialis dan dokter gigi per 100.000 penduduk adalah dokter, dokter spesialis dan dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan) per 100.000 penduduk. Rasio ideal dokter umum adalah 40/100.000 penduduk atau 1 orang dokter melayani 2.500 penduduk (1 : 2.500). Dengan jumlah penduduk Aceh pada tahun 2012 berjumlah 4.715.108 jiwa memerlukan 1.886 dokter umum, sementara yang tersedia sebanyak 840 dokter artinya Pemerintah Aceh untuk mencapai rasio ideal masih memerlukan ($1.886 - 840 = 1.046$) dokter umum. Rasio dokter spesialis adalah 20/100.000 penduduk (1 : 5.000) yang artinya 1 orang dokter spesialis melayani 5.000 penduduk, tahun 2012 jumlah dokter spesialis di Aceh sebanyak 68dokter, sedangkan kebutuhan dokter spesialis yang ideal adalah sebanyak 943 dokter, hal ini berarti Pemerintah Aceh masih kekurangan dokter spesialis sebanyak 875 dokter. Demikian juga untuk dokter gigi rasio dokter gigi (1 : 9.000), tahun 2012 jumlah dokter gigi yang ada di Aceh sebanyak 178 dokter, idealnya sebanyak 519 dokter. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Aceh masih kekurangan dokter gigi sebanyak 341 dokter. Hal serupa terjadi di tahun 2017, kebutuhan dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi terus mengalami peningkatan. Terlihat pada Tabel 2.45 berikut ini.

Tabel 2.45.
Ketersediaan Tenaga Medis di Aceh tahun 2012 - 2017

Tenaga Medis		Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dokter Umum	Tersedia	840	795	1.175	1.187	1.234	2.034
	Kebutuhan	1.886	1.925	1.963	1.980	2.000	1.533

Tenaga Medis		Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dokter Spesialis	Tersedia	68	440	629	300	565	738
	Kebutuhan	943	962	982	998	1.017	1.045
Dokter Gigi	Tersedia	178	195	223	240	234	265
	Kebutuhan	519	529	540	567	579	603

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

Tahun 2014 rasio dokter yang tersedia di Aceh adalah sebesar 0,42, tetapi pada Tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,49. Hal ini terjadi disebabkan karena dokter umum mengikuti pendidikan spesialis dalam jangka waktu yang lama dan tidak adanya pengangkatan dokter, sementara jumlah penduduk bertambah.

Tabel 2.46.
Rasio Dokter di Aceh Tahun 2012 - 2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio Dokter
2012	4.693.934	2484	0,53
2013	4.791.924	1075	0,22
2014	4.906.835	2037	0,42
2015	5.001.953	1739	0,35
2016	5.096.248	1740	0,34
2017	5.189.466	2537	0,49

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2017

I. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

Jumlah tenaga kesehatan untuk semua jenis tenaga meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2009 dan 2010 menurut kategori ketenagaan yang dilaporkan pada profil kesehatan tahunan. Sampai tahun 2010, total jumlah tenaga kesehatan sekitar 20.456 tenaga (sekitar 5 tenaga kesehatan melayani orang 1.000 orang penduduk). Secara umum, rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan masih rendah, kecuali untuk tenaga perawat dan bidan yang sudah mencukupi (standar nasional untuk perawat dan bidang masing-masing 170 dan 100 tenaga per 100.000 penduduk). Rasio tenaga medis tahun 2009 sebesar 11,34 persen meningkat menjadi 20,74 persen pada tahun 2013. Rasio Tenaga kesehatan persatuan penduduk Aceh tahun 2009 sampai tahun 2013 disajikan pada Tabel 2.47.

Jumlah tenaga kesehatan Aceh pada tahun 2012 sebanyak 27.019 orang, tetapi pada tahun 2013 terjadi penurunan sebanyak 3.004 orang di karenakan banyak tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan, pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 31.747 orang.

Tabel 2.47.
Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk Tahun 2012- 2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan
2012	4.693.934	27.019	5,76
2013	4.791.924	24.015	5,01
2014	4.906.835	28.023	5,71
2015	5.001.953	26.696	5,34
2016	5.096.248	25.789	5,06
2017	5.189.466	31.747	6,12

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

J. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan penanganan komplikasi kebidanan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan (Tabel 2.48). Meningkatnya cakupan penanganan komplikasi kebidanan menunjukkan kualitas pelayanan kebidanan yang semakin meningkat.

Tabel 2.48.
Cakupan Komplikasi Kebidanan di Aceh Tahun 2012 - 2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penanganan Komplikasi Kebidanan	8.813	11.297	13.776	15.124	15.606	18.724
BUMIL dengan Komplikasi Kebidanan	22.451	23.718	23.678	25.705	25.699	25.650
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	39,25	47,63	58,18	58,84	60,73	73,00

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

K. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah sebagai mana terlihat pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2012 cakupannya sebesar 88,28 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 84,72. Hal ini dikarenakan jumlah ibu yang melakukan persalinan terus meningkat dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia.

Tabel 2.49.
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Aceh Tahun 2012 - 2017

Uraian/Jumlah	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persalinan dengan bantuan Tenaga Kesehatan (Nakes)	93.957	95.295	97.280	100.135	100.005	103.713
Jumlah Ibu Bersalin	106.431	110.493	109.848	122.683	122.657	122.421
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes (%)	88,28	86,25	89,00	81,62	81,53	84,72

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

G. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Desa *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa yang memiliki jumlah bayi lebih dari 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pencapaian desa UCI di Aceh pada tahun 2012 sebanyak 64,02 persen, meningkat di tahun 2014 sebesar 72 persen, dan menurun kembali di tahun 2017 menjadi 63,96 persen.

Tabel 2.50.
Persentase Desa UCI di Aceh Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah		%
	Desa	Desa Uci	
2012	6.493	4.157	64,02
2013	6.464	4.540	70,24
2014	6.522	4.676	72,00
2015	6.457	4.429	68,59
2016	6.506	4.228	64,99
2017	6.506	4.161	63,96

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

Cakupan desa *UCI* pada tahun 2012 yang mencapai 100 persen adalah Kota Sabang dan terendah di Kota Subulussalam yang hanya mencapai 24,39 persen, sementara pada tahun 2017 kabupaten Aceh Barat memiliki peringkat tertinggi (100,31 persen), dan yang terendah di Kabupaten Pidie yang hanya 22,19 persen. Cakupan desa *UCI* di kabupaten/kota sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi dasar yang lengkap

Tabel 2.51.
Cakupan Desa/Kelurahan UCI menurut Kabupaten/Kota di Aceh
Tahun 2012 - 2017

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Simeulue	84,78	84,78	76,81	95,65	81,88	94,93
Aceh Singkil	92,50	92,50	84,17	87,50	93,97	79,17
Aceh Selatan	77,82	77,82	64,62	82,31	92,31	90,77
Aceh Tenggara	89,90	89,90	100,00	90,39	85,97	74,03
Aceh Timur	41,41	41,41	39,38	61,79	38,99	31,77
Aceh Tengah	99,32	99,32	93,49	97,29	98,64	97,82
Aceh Barat	58,39	58,39	53,11	59,19	62,31	100,31
Aceh Besar	64,57	64,57	75,83	60,26	72,35	85,60
Pidie	51,10	51,10	47,53	26,30	19,45	22,19
Bireuen	72,25	72,25	69,62	68,97	69,95	59,11
Aceh Utara	75,94	75,94	77,46	61,97	58,33	70,19
Aceh Barat Daya	71,71	71,71	82,24	71,71	75,00	67,76
Gayo Lues	81,94	81,94	94,44	87,59	88,97	83,45
Aceh Tamiang	84,04	84,04	95,31	90,14	85,45	84,04
Nagan Raya	70,72	70,72	72,07	84,68	79,73	61,26
Aceh Jaya	73,26	73,26	73,84	97,67	55,81	41,28
Bener Meriah	83,26	83,26	87,98	78,11	73,82	78,54
Pidie Jaya	58,56	58,56	69,82	58,11	54,95	37,84
Banda Aceh	84,44	84,44	91,11	81,11	82,22	65,56
Sabang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	55,56
Langsa	86,36	86,36	96,97	93,94	95,45	93,94
Lhokseumawe	66,18	66,18	73,53	60,29	57,35	55,88
Subulussalam	24,39	24,39	51,22	52,44	68,29	53,66
Aceh	69,87	69,87	71,70	68,03	64,99	65,38
Nasional	79,30	80,23	81,82	81,76	81,82	35,06

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

H. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Rata berat badannya hanya sekitar 60-80 persen dari badan ideal. Pada tahun 2012 terdapat 759 kasus dan tertangani 100 persen sedangkan pada tahun 2013 terdapat 820 kasus dan yang tertangani sebesar 783 kasus (95,49%). Pada tahun 2017, dari 158 kasus yang ditemukan, 100% dapat tertangani. Upaya pemerintah ke depan untuk meningkatkan persentase penanganan kasus balita gizi buruk akan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi perbaikan gizi keluarga kepada seluruh masyarakat. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut kabupaten/kota di Aceh tahun 2012-2017 di sajikan pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan Tahun 2012-2017

Kabupaten/Kota	2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	Jmlh Ditemukan	Mdpt Perawatan	%	Jmlh Ditemukan	Mdpt Perawatan	%	Jmlh Ditemukan	Mdpt Perawatan	%	Jmlh Ditemukan	Mdpt Perawatan	%	Jmlh Ditemukan	Mdpt Perawatan	%	Jmlh Ditemukan	Mdpt Perawatan	%
Simeulue	20	20	100	19	19	100	11	11	100	8	8	100	4	4	100	9	9	100
Aceh Singkil	10	10	100	7	7	100	13	13	100	6	6	100	1	1	100	3	3	100
Aceh Selatan	6	6	100	38	38	100	24	24	100	15	15	100	21	21	100	2	2	100
Aceh Tenggara	9	9	100	9	9	100	9	9	100	3	3	100	9	9	100	9	9	100
Aceh Timur	13	13	100	21	21	100	28	28	100	19	19	100	20	20	100	10	10	100
Aceh Tengah	4	4	100	11	11	100	7	7	100	4	4	100	4	4	100	5	5	100
Aceh Barat	22	22	100	32	32	100	19	19	100	14	14	100	17	17	100	6	6	100
Aceh Besar	0	0	100	160	160	100	59	59	100	21	21	100	28	28	100	4	4	100
Pidie	61	61	100	63	63	100	47	47	100	15	15	100	21	21	100	12	12	100
Bireuen	187	187	100	149	149	100	19	19	100	27	27	100	16	16	100	22	22	100
Aceh Utara	36	36	100	21	5	100	13	13	100	104	104	100	50	50	100	18	18	100
Aceh Barat Daya	42	42	100	34	34	100	6	6	100	5	5	100	3	3	100	2	2	100
Gayo Lues	2	2	100	7	7	100	8	8	100	0	0	100	3	3	100	0	0	100
Aceh Tamiang	111	111	100	86	86	100	26	26	100	9	9	100	6	6	100	8	8	100
Nagan Raya	6	6	100	17	17	100	11	11	100	12	12	100	9	9	100	4	4	100
Aceh Jaya	15	15	100	22	22	100	18	18	100	1	1	100	10	10	100	11	11	100
Bener Meriah	2	2	100	13	13	100	6	6	100	8	8	100	10	10	100	12	12	100
Pidie Jaya	13	13	100	10	10	100	6	6	100	7	7	100	10	10	100	0	0	100
Banda Aceh	7	7	100	22	22	100	3	3	100	5	5	100	5	5	100	2	2	100
Sabang	1	1	100	4	4	100	1	1	100	4	4	100	2	2	100	4	4	100
Langsa	144	144	100	30	9	100	3	3	100	1	1	100	3	3	100	4	4	100
Lhokseumawe	31	31	100	28	28	100	16	16	100	10	10	100	10	10	100	5	5	100
Subulussalam	17	17	100	17	17	100	13	13	100	10	10	100	6	6	100	6	6	100
Jumlah	759	759	100	820	783	100	366	366	100	308	308	100	268	268	100	158	158	100

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

I. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ adalah angka yang menyatakan jumlah penderita TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja kesehatan selama setahun dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA+ dalam kurun waktu yang sama dikali dengan seratus persen, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ dari tahun 2012 sampai tahun 2017 cukup mengembirakan, tetapi bersifat fluktuatif dari tahun ketahun.

Tabel 2.53.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+ di Aceh Tahun 2012- 2017

Jenis	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus Baru TB BTA+ yang Diobati	3.602	4.002	3.828	4.130	3.975	3.514
Jumlah Seluruh Kasus TB BTA +	4.028	3.815	4.062	4.023	3.563	3.069
Cakupan Penemuan dan Penanganan TBC BTA	89,42	104,9	94,2	102,7	111,6	114,5

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

J. Cakupan kunjungan bayi

Cakupan pelayanan kesehatan bayi adalah jumlah kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun kunjungan rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan mendapat pelayanan dari petugas kesehatan.

Cakupan kunjungan bayi di Aceh dari tahun 2012 telah mencapai 88 persen, namun tahun 2017 menurun menjadi 79 persen. Hal ini disebabkan karena belum terintegrasinya pencatatan kunjungan bayi yang dilakukan di praktek dokter/klinik kesehatan swasta.

Tabel 2.54.
Persentase Cakupan Kunjungan Bayi Di Aceh Periode 2012-2017

Jenis	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
BCG	91.506	90,47	92.167	86,57	87.173	87,10	87.593	74,97	86.527	74,07	102.40	89,00
DPT3+HB3	86.400	85,43	86.603	81,34	81.657	76,08	75.320	65,46	78.563	68,28	85.145	74,00
Polio	89.471	88,46	88.693	83,31	83.842	78,11	81.025	70,42	83.901	72,92	86.296	75,00
Campak	86.655	85,68	85.264	80,09	82.656	77,01	79.908	69,45	83.350	72,44	88.597	77,00
Jumlah Bayi	101.140		106.466		107.336		115.061		115.057		115.061	
Cakupan Kunjungan Bayi		88,00		83,61		81,10		77,00		79,00		78,75

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

K. Cakupan puskesmas

Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas yang ada dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan yang ada dikali seratus persen, rasio cakupan puskesmas di Aceh sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sangat menggembirakan dimana dalam 1 kecamatan terdapat lebih dari 1 puskesmas. Cakupan Puskesmas di Aceh disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55.
Cakupan Puskesmas di Aceh periode 2012-2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Puskesmas	330	334	337	339	340	347
Jumlah Kecamatan	289	289	289	289	289	289
Cakupan Puskesmas (%)	114,2	115,6	116,6	117,3	117,6	120,1

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

L. Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas pembantu di Aceh pada tahun 2013 sebesar 13,9 persen turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 15,2 persen. Penurunannya ini sesuai dengan jumlah puskesmas pembantu di Aceh semakin berkurang, dari 988 unit pada tahun 2012 menjadi 903 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena berubahnya fungsi puskesmas pembantu menjadi puskesmas. Cakupan Puskesmas Pembantu di Aceh disajikan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.
Cakupan Puskesmas Pembantu Di Aceh periode 2012-2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Puskesmas Pembantu	988	988	979	988	991	903
Jumlah Desa*	6.489	6.498	6.513	6.510	6.506	6506
Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	15,2	15,2	15,0	15,2	15,2	13,9

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, 2018

M. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dari sisi kuantitas, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sudah memadai. Hal ini terlihat dari rumah sakit yang sudah tersedia di seluruh kabupaten/kota. Pada tahun 2012 jumlah rumah sakit di Aceh sebanyak 57 unit. Rumah Sakit diseluruh Aceh yang terdiri dari 24 RSU pemerintah dan 26 RSU swasta.

Dari sisi kualitas, pelayanan kesehatan di Aceh masih sangat rendah. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari lama dan banyaknya antrian pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; 1) upaya preventif dan promotif, 2) upaya kuratif dan rehabilitatif.

2.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Jalan

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk pengelompokan jalan sebagai berikut:

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

A.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap

Data panjang dan kondisi jalan provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 2.57. Proporsi jalan provinsi dengan kondisi mantap lebih rendah dari kondisi mantap jalan nasional.

Tabel 2.57.
Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2012 – 2017

Tahun	Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap			Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		
		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi
2012	1.847,91	1.107,57	0	0,60	1.758,09	1.339,01	324,38	0,76
2013	1.801,61	1.009,52	98,05	0,60	1.803,35	1.166,69	532,58	0,94
2014	1.701,82	444,24	674,68	0,66	1.803,36	1.267,10	439,24	0,95
2015	1.781,72	624,00	407,02	0,58	2.102,08	1.334,08	621,46	0,93
2016	1.781,72	741,78	360,85	0,62	2.102,08	1.522,17	477,11	0,95
2017	1.781,72	823,43	306,08	0,63	2.102,08	982,08	1.019,76	0,95

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh 2018 dan Satker P2JN Aceh 2018

Berdasarkan data pada Tabel 2.57, total panjang jalan provinsi mengalami perubahan dikarenakan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional sepanjang 46,30 km pada tahun 2013 dan 99,79 km pada tahun 2014 (Keputusan Menteri PUPERA No. 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1(JKP-1)). Selanjutnya pada tahun 2015 terjadi penambahan panjang jalan provinsi akibat adanya peningkatan status jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi sebesar 79,9 km (Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 620/1245/2015 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi).

Jaringan jalan provinsi cenderung mengalami penurunan kondisi, hal ini terlihat dari tabel proporsi jalan provinsi dan nasional dalam kondisi mantap di atas. Kondisi mantap jalan provinsi mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2013 dan tahun 2015 yang kemudian kembali mengalami perbaikan kondisi pada tahun 2017 sedangkan kondisi baik jalan nasional cenderung stabil. Untuk memperlambat kecepatan penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi mantap, jaringan jalan tersebut perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sepanjang waktu dan sesuai dengan yang direncanakan melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (IRMS).

A.2. Rasio Jumlah Penduduk dengan Panjang Jalan

Jumlah penduduk Aceh yang semakin bertambah tanpa diiringi penambahan panjang jalan menyebabkan menurunnya rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik atau semakin tinggi pula jumlah masyarakat atau penduduk yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memberikan informasi tingkat penggunaan jalan atau mencerminkan tingkat kepadatan penggunaan jalan yang ada. Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan tahun 2012 hingga 2017 disajikan pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58.
Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2012-2017

Tahun	Panjang Jalan (M)				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio (jiwa/km)
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Total Panjang Jalan (KM)		
2012	1.758,09	1.847,91	18.875,48	22.481,48	4.693.934	208,79
2013	1.803,35	1.801,61	24.187,78	27.792,74	4.791.900	172,42
2014	1.803,35	1.701,82	19.600,99	23.106,16	4.907.000	212,37
2015	2.102,08	1.781,72	19.712,78	23.596,58	5.001.900	211,98
2016	2.102,08	1.781,72	17.918,40	21.802,20	5.096.248	233,75
2017	2.102,08	1.781,72	19.766,26	23.650,05	5.189.470	219,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Tabel 2.57, menggambarkan di Provinsi Aceh dari tahun 2012 sampai dengan 2017 terjadi penambahan jumlah penduduk yang terlayani dari total panjang jalan yang ada. Pada tahun 2012 rasio jumlah penduduk per panjang jalan sebesar 208,79 jiwa/km meningkat menjadi 219,43 jiwa/km pada tahun 2017. Kondisi rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Aceh lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk per panjang jalan Sumatera sebesar 300 jiwa/km, Sulawesi sebesar 250 jiwa/km dan Kalimantan sebesar 260 jiwa/km. Sementara itu, rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Jawa sebesar 1.360 jiwa/km. Dengan demikian, panjang jalan di Aceh masih mampu melayani aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa.

A.3. Persentase jalan provinsi dalam kondisi Mantap

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan, oleh karena itu diperlukan kondisi mantap jalan agar dapat terus memberikan pelayanan selama umur rencana jalan yang telah ditetapkan. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti standar tertentu.

Berdasarkan data survey atau pengelompokan kinerja jalan provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kondisi mantap dari tahun 2012-2017 ditunjukkan pada Tabel 2.59

Tabel 2.59.
Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2012-2017

Keterangan	Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi				Mantap	
			Baik (B) (Km)	% Baik	Sedang (S) (Km)	% Sedang	Km	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)	(6)	(7) = (6)/(3)	(8)=(4)+(6)	(9)=(8)/(3)
Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	2012	1.847,91	1.107,57	59,94	0	0	1.107,57	59,94
	2013	1.801,61	1.009,52	56,03	98,05	5,44	1.107,57	61,48
	2014	1.701,82	444,24	26,10	674,68	39,64	1.118,92	65,75
	2015	1.781,72	624,00	35,02	407,02	22,84	1.031,02	57,87
	2016	1.781,72	741,78	41,63	360,85	20,25	1.102,63	61,89
	2017	1.781,72	823,43	46,22	306,08	17,18	1.129,51	63,39

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, 2018

Tabel 2.59 menunjukkan bahwa kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2017 baru mencapai 63,39 persen dari total panjang jalan 1.781,72 Km. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 target jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 80 persen. Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat.

B. Air Minum dan Sanitasi

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

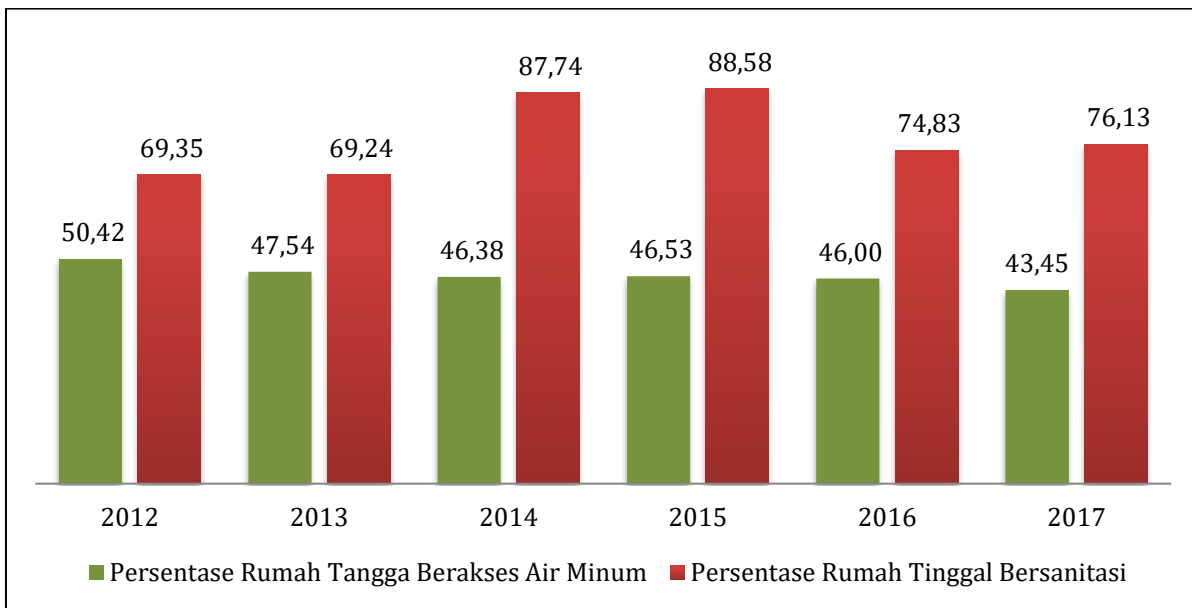
Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum dan sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal).

B.1. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal's).

Persentase rumah tangga berakses air minum terus mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 50,42 persen menjadi 43,45 persen pada tahun 2017. Demikian juga dengan rumah tinggal bersanitasi mengalami penurunan sejak tahun 2015 sebesar 88,58 persen menjadi 76,13 persen pada tahun 2017. Beberapa faktor penyebab menurunnya akses terhadap air minum dan sanitasi layak adalah belum terpenuhinya akses air minum dari sumber air terlindungi, masih terjadi kesenjangan akses air minum antar wilayah dan antar status sosial ekonomi, terjadi kecenderungan peningkatan konsumsi air minum terutama dari air kemasan dan air isi ulang, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, kondisi sarana dan prasarana sanitasi yang belum memadai serta belum terkelolanya limbah dan sampah rumah tangga dengan benar. Selanjutnya persentase rumah tangga berakses air minum dan rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Aceh dari tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 2.16.



Sumber: Banda Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Gambar 2.16. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2012-2017

C. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan

mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Aceh diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, yang menggambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

C.1. Ketaatan Terhadap RTRW

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Pola ruang berdasarkan RTRW Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Hutan Lindung	1.790.626	Permukiman Perkotaan	64.164,14
Cagar Alam Serbajadi	300	Permukiman Perdesaan	89.847,78
SM. Rawa Singkil	81.837	Bandar Udara	835,06
SM. Pinus Jantho	15.375	Hutan Produksi Terbatas	141.876,42
TNGL Aceh	624.651	Hutan Produksi	555.948,52
TWA Pulau Weh Darat	1.250	Hutan Produksi Konversi	15.578,28
TWA P. Weh Laut	5.280	Hutan Pendidikan	230,36
TWA Pinus Jantho	2.614	Kawasan Konservasi	4.764,08
TWA P. Banyak Darat	24.693	Pertanian Lahan Basah	252.063,34
TWA P. Banyak Laut	205.725	Pertanian Lahan Kering	436.004,66
TWA Kuta Malaka	1.549	Hortikultura	24.131,38
Tahura PMI	6.218,34	Perkebunan Besar	392.713,78
Tahura Teupah Selatan	919,58	Perkebunan Rakyat	761.099,36
Tahura Gunung Kapor	1.484,95	Hutan Rakyat	11.711,78
Taman Buru Lingga Isaq	86.319,80	Kawasan Peternakan	12.930,99
Kawasan Lindung Mangrove	1.122,50	Budidaya Perikanan	45.223,43
Kawasan Lindung Resapan Air	2.910	Kawasan Pertambangan	27.776,62
Kawasan Lindung Sempadan Danau	1.504,23	Kawasan Transmigrasi	69.354,01
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	9.865,06	Kawasan Industri	6.838,58
Kawasan Lindung Sempadan Sungai	72.780,35	Pelabuhan	264,18
Kawasan Lindung Sempadan Waduk	27,86	Kawasan Pariwisata	1.909,77
Kawasan Lindung Cagar Budaya	64,55	Cagar Budaya	510,26
Kawasan Lindung Geologi	1.141,87	Pertahanan Keamanan	567,04
Kawasan Lindung Laut	319,88	Aset Sumber Daya Air	180,64
		TPA	20,44
		Tubuh Air	32.961,93
Jumlah	2.938.579,68	Jumlah	2.949.506,83

Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033

Pola ruang yang diuraikan di dalam Tabel 2.60 menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya persentase ketaatan terhadap tata ruang.

Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dengan permohonan pemanfaatan ruang oleh pihak ketiga. Pada tahun 2017, luas wilayah pemanfaatan ruang yang dimohon oleh pihak ketiga sebesar 152.866,44 Ha sementara luas wilayah pemanfaatan ruang yang direkomendasikan sesuai dengan RTRW Aceh sebesar 152.452,01 Ha atau 99,73 persen. Dengan kata lain, ada sebesar 0,27 persen dari luas wilayah yang dimohon tidak direkomendasikan karena tidak sesuai dengan RTRW Aceh.

C.2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan RTH publik di Aceh sampai dengan tahun 2017 sebesar 17,76 persen, hal ini bermakna luasan RTH publik di Aceh masih belum mencukupi.

Tabel 2.61.
Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2012-2016

Keterangan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	-	14,72	18,71	16,99	17,16	17,76

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2018

D. Pengairan

Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkap sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan primer, skunder dan tersier. Sedangkan ditinjau dari sisi kewenangan jaringan dibedakan menjadi jaringan irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten. Beberapa indikator terkait dengan pengairan diuraikan berikut ini.

D.1. Jaringan Irigasi

D.1.1. Luas dan Jenis Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015. Luas Daerah irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari Lintas Kabupaten/Kota dan Utuh Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

No	Kewenangan	Lintas Kabupaten/Kota (Ha)	Utuh Kabupaten/Kota (Ha)	Total	
1	Pemerintah	26.397,00	82.225	108.622 Ha	13 DI
2	Pemerintah Provinsi	2.144,00	76.324	78.468 Ha	47 DI
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	203.428	203.428 Ha	1.439 DI
Total		28.541	361.977	390.518 Ha	1.499 DI

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya sesuai kewenangan yang terdiri dari Irigasi Permukaan adalah 363.292 Ha dengan 1.400 DI; Irigasi Air Tanah adalah 1.858 Ha dengan 66 DI; Irigasi Rawa adalah 5.724 Ha dengan 3 DI; dan Irigasi Tambak adalah 19.644 Ha dengan 30 DI sebagaimana disajikan pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Jenis Irigasi dan Luasannya

No	Daerah Irigasi	Kewenangan					
		Pemerintah		Aceh		Kabupaten/Kota	
		D.I	Ha	D.I	Ha	D.I	Ha
1	Permukaan	12	101.622	38	65.409	1.350	196.261
2	Air Tanah	-	-	-	-	66	1.858
3	Rawa	-	-	3	5.724	-	-
4	Tambak	1	7.000	6	7.335	23	5.309
Total		13	108.622	47	78.468	1.439	203.428

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Tabel 2.63, menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah pusat memiliki 13 DI dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi memiliki 47 DI dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota memiliki 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha. Dimana dari jumlah DI dan luasan setiap kewenangan bertempat di seluruh wilayah Provinsi Aceh sebagaimana disajikan pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64.
Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota	
		D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)
1	Simeulue	-	-	-	-	52	5,343
2	Aceh Singkil	1	7,000	1	1,300	11	698
3	Aceh Selatan	-	-	6	10,630	131	13,655
4	Aceh Tenggara	1	15,000	6	8,169	83	15,028
5	Aceh Timur	-	-	6	10,179	73	7,578
6	Aceh Tengah	-	-	-	-	126	16,010
7	Aceh Barat	-	-	1	1,000	97	15,660
8	Aceh Besar	2	12,040	-	-	131	21,070
9	Pidie	2	19,118	1	1,100	121	12,232
10	Bireuen	2	9,683	5	8,380	74	13,045
11	Aceh Utara	3	32,539	5	7,834	132	22,040
12	Aceh Barat Daya	1	5,793	2	3,234	30	3,040
13	Gayo Lues	-	-	2	4,675	116	10,011
14	Aceh Tamiang	-	-	1	2,000	41	7,115
15	Nagan Raya	1	7,449	-	-	37	6,931
16	Aceh Jaya	-	-	7	13,859	58	10,669
17	Bener Meriah	-	-	1	1,270	72	14,617
18	Pidie Jaya	-	-	3	4,838	58	6,258
19	Banda Aceh	-	-	-	-	2	655
20	Sabang	-	-	-	-	-	-
21	Langsa	-	-	-	-	2	1,773
22	Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-
23	Subulussalam	-	-	-	-	-	-
Total		13	108,622	47	78,468	1,439	203.428

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya Daerah irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah menurun, disebabkan kondisi saluran, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi Daerah Irigasi permukaan dan bangunan-bangunan yang ada pada Daerah Irigasi disajikan pada Tabel 2.65 dan Tabel 2.66.

Tabel 2.65.
Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Luas		Kuantitas	Kondisi Saluran					
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat	
		(Ha)	(Ha)		(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)
1	Pusat	101,622	90.554	1.195 km	817	68,36	351	29,40	27	2,24
2	Provinsi	65.409	49.228	705 km	432	61,28	174	24,68	99	14,04
3	Kab/Kota	196.261	104.018	1.760 km	1.057	60,06	273	15,49	430	24,45

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2018

Tabel 2.66.
Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Unit)	Kondisi Bangunan			
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak	
		(Ha)	(Ha)		(Unit)	(%)	(Unit)	(%)
1	Pusat	101,622	90.544	3.347	2.147	64,16	1.200	35,84
2	Provinsi	65.409	49.228	1.743	1.431	82,10	312	17,90
3	Kab/Kota	196.261	104.018	4.968	2.711	54,57	2.257	45,43

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2018

Tabel 2.65 dan Tabel 2.66 menjelaskan bahwa setiap daerah irigasi memiliki luas layanan dan fungsi dari saluran dan bangunan yang telah dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing. Daerah irigasi kewenangan kabupaten memiliki jumlah jaringan dan bangunan irigasi terbesar dengan panjang jaringan 1,760 km, jumlah bangunan 4.968 unit dengan luas layanan fungsional 104.018 Ha, selanjutnya daerah irigasi kewenangan pusat dengan panjang jaringan 1.195 km, jumlah bangunan 3.347 unit dengan luas layanan fungsional 90,544 Ha, sedangkan daerah irigasi kewenangan provinsi memiliki panjang jaringan 705 km, jumlah bangunan 1.743 unit dengan luas layanan fungsional 49,228 Ha.

Ditinjau dari kondisi jaringan terdapat kondisi baik, kondisi sedang dan kondisi rusak berat. Pada tahun 2017 kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam keadaan baik mencapai 61,28 persen dan dalam keadaan rusak sedang dan rusak berat 38,72 persen. Masih rendahnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sampai saat ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum dapat optimal. Untuk itu diperlukan peningkatan kondisi jaringan irigasi.

Salah satu upaya pemerintah lainnya dengan mendorong keterlibatan masyarakat khususnya petani melalui Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP). Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan

perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi.

D.1.2. Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian yang sebagai luas lahan irigasi permukaan. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67.

Rasio Jaringan Irigasi dan Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2012-2017

Keterangan	Satuan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Indeks	0,61	0,62	0,64	0,66	0,66	0,67
Luasan Cakupan Layanan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	42,62	52,35	66,56	70,01	71,13	71,61

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2018

Perhitungan rasio jaringan irigasi hanya berdasarkan data daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi saja. Luas lahan budidaya pertanian yang merupakan luas areal irigasi permukaan yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 dimana daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari 38 Daerah Irigasi dengan luasan 65.09 ha/654,09 km². Berdasarkan Tabel 2.64 Rasio jaringan irigasi dan luas cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik cenderung meningkat dari tahun 2012-2017. Namun, rasio jaringan irigasi baru mencapai 0,67 dengan cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik 71,61 persen pada tahun 2017. Hal ini bermakna kinerja jaringan irigasi masih perlu ditingkatkan untuk penyediaan air secara optimal.

D.1.3. Permasalahan di bidang irigasi

Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi adalah:

- a. Terbatasnya debit andalan di beberapa daerah irigasi;

Debit andalan pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) terjadi penurunan dari debit andalan rencana khususnya untuk Daerah irigasi yang ada di Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi yaitu WS Pase-Peusangan dan WS Tamiang Langsa seperti D.I. Buloh Blang Ara (2.100 Ha). Sedangkan untuk Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Pusat yaitu WS Aceh-Meureudu, WS Jambo Aye yaitu Daerah Irigasi yang paling besar terjadi penurunan debit andalan adalah D.I. Baro Raya (19.100 Ha), D.I. Jambo Aye (17.000 Ha), dan D.I. lainnya yang ada di WS – WS tersebut. Akibatnya indeks penanaman untuk D.I. tersebut hanya berkisar 1,4. Kondisi tersebut perlu didukung oleh bangunan reservoir seperti waduk dan embung untuk menjamin ketersediaan air irigasi secara kontinyu.

- b. Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal;

Sebagian besar daerah irigasi Teknis fungsinya menurun, yang diakibatkan umur konstruksi yang sudah cukup lama yaitu D.I. yang dibangun pada tahun 1990-an sehingga banyak saluran dan bangunan yang rusak. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan

pelayanan irigasi seperti semula. Disamping masih banyak saluran tanah (belum pasangan) disepanjang jaringan irigasi juga saluran – saluran pasangan yang sudah ada pada umumnya sudah banyak yang rusak begitu juga bangunan – bangunan bagi/sadap dan bangunan air lainnya, sehingga proses pengaliran dan pembagian air ke areal persawahan tidak efektif dan efisien.

c. Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan lahan;

Untuk meningkatkan luas areal irigasi teknis dalam rangka ketahanan pangan perlu dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru dan pengembangan areal irigasi dari jaringan irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan areal potensial dan sumber daya air yang ada, namun salah satu kendala utama adalah masalah pembebasan lahan. Ada beberapa Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi yang perlu dibangun dan ditingkatkan jaringan irigasinya, seperti; D.I. Kuala Bhee seluas 1.500 Ha, D.I. Krueng Nalan (Suplesi) di Kabupaten Bireun, D.I. Peunaron seluas 1.000 Ha di Kabupaten Aceh Tamiang dan D.I. Jamuan seluas 1.300 Ha di Kabupaten Aceh Utara, D.I. Weih Tilis (Suplesi) seluas 2.500 Ha di Kabupaten Gayo Lues, dan D.I. Lhok Naga seluas 1.500 Ha di Kabupaten Pidie serta D.I. Sigulai seluas 1.982 Ha Kab. Simeulue.

Sedangkan Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang lokasinya mempunyai potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi, seperti: D.I. Lhok Guci seluas 18,542 Ha (Kab. A. Barat) D.I. Peureulak seluas 5.000 Ha (Kab. A. Timur), D.I. Jambo Aye Kanan seluas 3.500 Ha (Kab. Aceh Timur), Kr. Pase seluas 8.922 Ha (Kab. Aceh Utara), D.I. Tamiang seluas 5.000 Ha (Kab. A. Tamiang) dan D.I. Rajui seluas 3.500 Ha di Kabupaten Pidie. Maka dari itu perlu kiranya pemerintah daerah ikut membantu/memfasilitasi untuk mempercepat pembangunan daerah irigasi tersebut.

d. Belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan.

Selanjutnya manajemen operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi masih belum optimal karena penyediaan O&P belum berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi di lapangan yang selama ini dialokasikan berdasarkan harga satuan dan berdasarkan luas areal.

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier merupakan kewenangan dan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun substansi yang diatur saling terkait, saling ketergantungan, maka kedua-duanya diperlukan kelembagaan yang mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi No. 4 tahun 2011, bahwa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi; Lembaga Adat, SKPA yang membidangi irigasi, Keujreun Blang dan Komisi Irigasi. Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung (PPB). Namun petugas tetap untuk mengelola irigasi tersebut masih belum tersedia. Demikian juga halnya lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun Blang, yang belum tersedia perlu dibentuk. Selanjutnya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber Daya Air untuk irigasi yang partisipatif perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf SKPA dan kelompok petani (P3A dan GP3A); dibentuk Komisi Irigasi, yang beranggotakan Lembaga Adat, SKPA terkait, dan Wakil Keujreun Blang; dilaksanakan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipatif serta menyusun rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan provinsi dan kalibrasi bangunan ukur debit.

D.2. Rawa

Rawa merupakan potensi lahan pertanian dalam arti luas. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat

Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

D.3. Pantai

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini masih terus terjadi dimana abrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur merupakan penyebab kerusakan yang paling dominan terjadi. Panjang garis pantai Aceh sebesar 2.442 km dengan total panjang pantai kritis yang berhasil diidentifikasi adalah sepanjang 239,58 km pada tahun 2017. Rincian besaran pantai kritis di kabupaten/kota di Aceh ditunjukkan pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68.
Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2012-2017

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sabang	4	3.9	3.57	3.57	3.57	3.57
2	Banda Aceh	8	5.9	5.86	5.78	5.78	5.86
3	Aceh Besar	41	40.76	40.51	39.31	38.69	38.69
4	Aceh Jaya	36.5	36.4	35.45	35.45	35.03	35.03
5	Aceh Barat	31.5	31.4	31.25	30.9	30.9	30.9
6	Nagan Raya	5	5	5	5	5	5
7	Aceh Barat Daya	15	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
8	Aceh Selatan	19	18.6	18.3	18.3	18.3	18.3
9	Aceh Singkil	3	2.81	2.61	2.41	2.22	2.22
10	Aceh Pidie	26.5	25.92	25.52	25.02	25.02	25.02
11	Pidie Jaya	5.5	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94
12	Bireuen	11	6.65	5.17	5.17	5.17	6.68
13	Lhokseumawe	7	6.13	6.06	6.06	6.06	6.06
14	Aceh Utara	17	16.53	16.08	15.53	15.53	15.22
15	Aceh Timur	11	10.36	10.24	9.74	9.47	9.82
16	Langsa	6	5.44	5.34	5.34	5.34	5.57
17	Simeulue	12	11.27	11.27	11.27	11.27	12
Jumlah		259	246.71	241.87	238.49	236.99	239.58

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2018

*Data masih dalam perhitungan Dinas Pengairan Aceh

Berdasarkan Tabel 2.68, total panjang pantai kritis pada tahun 2012 adalah sepanjang 259 km, dimana 15,8 persen diantaranya berada di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan kondisi pantai kritis pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 239,58 km. Hal ini menunjukkan penanganan terhadap pantai kritis ini telah dilakukan sepanjang 19,42 km selama rentang waktu 2012 hingga 2017. Dari total pantai yang masih kritis pada tahun 2017, pantai kritis terbesar masih berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sepanjang 38,69 km atau 16,15 persen.

Salah satu penyebab kritisnya suatu pantai berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pasca bencana alam gempa dan tsunami, gelombang tsunami memberikan pengaruh terhadap perubahan morfologi di daerah pesisir pantai. Pergeseran pantai berkisar antara 20 - 50 meter ke arah daratan serta terjadi penurunan daratan di beberapa Kabupaten/Kota yaitu; Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Pulau Simeulue.

Kerusakan pantai karena abrasi di Aceh diperkirakan sepanjang 231,5 km. Untuk mengatasi abrasi pantai diperlukan kebijakan penanggulangan secara terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder baik masyarakat, pemerintah, dan swasta. Hal – hal yang perlu dilakukan antara lain adalah: 1) pembangunan tanggul dan jetty pada daerah-daerah yang kritis dan 2) penanaman vegetasi jenis mangrove sesuai dengan karakteristik pantai.

D.4. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS yaitu dalam strategis Nasional terdapat 56 DAS yaitu WS. Aceh–Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla–Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom–Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase–Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru–Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.



Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

Gambar 2.17. Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu

dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya.

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungai tersebut diperlukan upaya penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan asset pemerintah.

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar.

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sedimentasi di muara sungai; 3) pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; 2) pengerukan sedimen pada muara sungai dan 3) mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir.

2.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat. Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase Rumah Layak Huni, Rasio Permukiman Layak

Huni, Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69.
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2012 s.d 2017

Indikator	Satuan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Rumah Layak Huni	%	43,70	48,64	49,58	51,94	54,34	58,14
Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97
Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Unit	10.843	15.484	20.969	25.120	28.660	34.311
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2018

Berdasarkan Tabel 2.68, capaian layanan sektor perumahan dan kawasan permukiman menunjukkan kondisi makin terpenuhinya kebutuhan akan prasarana dan sarana dasar serta meningkatnya mutu lingkungan perumahan dan permukiman yang ditunjukkan dengan peningkatan capaian angka pelayanan dari tahun 2012 sampai 2017.

Selanjutnya pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai Kawasan Kumuh .

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Beberapa karakteristik kawasan kumuh menggambarkan suatu kawasan permukiman yang secara fisik memiliki kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti kotor, tercemar, lembab, dan lain-lain. Kondisi tersebut secara ekologis timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan daya dukung lingkungan mengatasi beban aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Di berbagai kawasan kumuh, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau adalah dengan melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.

Luas kawasan kumuh di Provinsi Aceh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota memiliki total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Aceh Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70.
Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2012-2017

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2017 (Revisi)	
	Kawasan	Luas	Kawasan	Luas
Aceh	362	5,814.07	319	5,310.68
Banda aceh	21	797.56	22	462.73
Aceh barat	15	175.49	12	152.29
Sabang	6	28.26	3	48.73
Aceh besar	21	226.48	7	190.50
Langsa	14	90.14	9	87.66

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2017 (Revisi)	
	Kawasan	Luas	Kawasan	Luas
Simeulue	5	97.92	3	97.92
Aceh tamiang	6	61.83	3	61.66
Aceh timur	10	567.90	10	567.90
Bireuen	29	1,031.72	29	1,031.72
Aceh tenggara	52	563.89	52	563.89
Bener meriah	10	337.25	10	337.25
Aceh utara	7	62.97	7	62.97
Aceh singkil	9	108.86	9	108.86
Aceh barat daya	41	561.44	41	561.44
Nagan raya	4	108.33	4	108.33
Gayo lues	30	69.34	30	69.34
Pidie jaya	12	206.10	12	206.10
Lhokseumawe	19	208.50	5	81.30
Subulussalam	5	61.77	5	61.77
Aceh tengah	23	189.59	23	189.59
Pidie	10	67.04	10	67.04
Aceh selatan	5	55.40	5	55.40
Aceh jaya	8	136.29	8	136.29

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2018

Tabel 2.70, memberikan informasi jumlah dan luas kawasan kumuh di Aceh periode 2012 hingga 2017 cenderung menurun. Jumlah kawasan kumuh pada tahun 2012 sebanyak 362 kawasan menurun menjadi 319 kawasan pada tahun 2017 dengan persentase luasan kawasan kumuh yang sudah mendapat penanganan sebesar 8,66 persen. Selanjutnya, kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian terhadap permasalahan kawasan kumuh adalah Kabupaten Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya dan Kota Banda Aceh.

2.3.2.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Perkembangan organisasi/lembaga sosial masyarakat di Aceh dapat dilihat dari jumlah akumulasi Ormas, LSM dan lembaga yang telah menerima Surat Keterangan Terdaftar/Surat Tanda Lapor keberadaan Lembaga dari Tahun 2012 hingga tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 2.71.
Organisasi/Lembaga Pemerintah Tahun 2012 - 2017
di Lingkungan Pemerintah Aceh

No	Organisasi/lembaga	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Organisasi/lembaga Kesamaan Agama	15	11	6	2	1	-
2	Lembaga Swadaya Masyarakat	67	44	32	25	19	16
3	Organisasi/lembaga Kesamaan Profesi	8	6	5	3	5	-
4	Yayasan	8	-	-	-	5	18
5	Organisasi/lembaga Kesamaan Fungsi	24	18	9	9	8	8
Jumlah		122	79	52	39	38	42

Sumber: Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh, 2018

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat organisasi/lembaga sosial masyarakat yang belum melaporkan keberadaannya secara tertulis. Selanjutnya Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Tingkat Provinsi Aceh difokuskan pada Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Ormas dan LSM yang bersumber dari APBA, di tingkat pemerintah Aceh dari tahun 2012 s.d 2017 yang berupa bantuan hibah dan bantuan sosial sebagaimana disajikan pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72.
Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Tahun 2015 - 2017
di Lingkungan Pemerintah Aceh

No	Nama Ormas	Jumlah	Tahun	Keterangan
1	- Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	500.000.000	2015	SK. GUB 180/1344/2015, 10 Desember 2015
	- POLDA Aceh	500.000.000		
2	- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh	1.280.000.000	2016	SK. GUB 220/630/2016, 29 Juli 2016
	- Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	1.000.000.000		
	- Panwaslih	37.511.630.000		
	- KIP Aceh	69.478.201.600		SK. GUB 220/940/2016, 15 Desember 2016
	- Polda Aceh	24.870.493.100		
	- Panwaslih	17.000.000.000		
	- KIP Aceh	110.000.000.000		
- Polda Aceh	8.000.000.000	SK. GUB 220/380/2016, 28 April 2016		
3	- Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	1.500.000.000	2017	SK. GUB 220/657/2017, 22 Juni 2017

Sumber: Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh, 2018

B. Kegiatan pembinaan politik daerah

Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik Aceh telah melakukan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Tingkat Provinsi sejak tahun 2012-2014 sebanyak 5 (lima) kegiatan untuk setiap tahunnya. Selanjutnya, jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRA pertahun sejak tahun 2009-2013 adalah sebesar Rp.1.377.059.868 nilai tersebut terdapat dari jumlah suara sah menurut perhitungan KIP yaitu 1.599.643 suara di kalikan dengan nilai persuara yaitu Rp. 771. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Selanjutnya jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu tahun 2014-2019 sebesar Rp.1.765.992.462, nilai tersebut didapat dari jumlah suara sah (2.290.522) yang dikalikan dengan nilai persuara sebesar Rp. 771.

Pada tahun 2018 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik diatur besaran nilai bantuan keuangan sebesar sebesar Rp. 1.000 per suara sah. Dana bantuan keuangan kepada parpol ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

2.3.2.1.6. Sosial

A. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Selama kurun waktu 2009-2014 jumlah panti asuhan pemerintah dan swasta berdasarkan kapasitas dan jumlah anak di Aceh cenderung tidak terjadi perubahan sedangkan kapasitas dan jumlah anak asuh mengalami kenaikan.

B. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Aceh telah memberikan dampak positif terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kemajuan kondisi masyarakat terutama PMKS ini tercermin pada indikator sosial, antara lain meningkatnya jangkauan pelayanan sosial, menurunnya jumlah PMKS, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS, serta semakin tumbuh berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

Walaupun demikian, Pemerintah Aceh masih dihadapkan pada kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, seperti: kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, kerasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi.

Tabel 2.73.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2012-2017

No	Nama Kegiatan	Satuan	Tahun						Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Fakir Miskin Mendapat Bantuan								
	- Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	KUBE	99	82	288	222	117	120	Fakir Miskin, Wanita
	- Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	UEP	1.148	1.891	1.664	659	5.395	1.265	Rawan Sosial Ekonomi, Keluarga Rentan, Komunitas Adat Terpencil
2.	Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu								
	- Kursi Roda	Unit	129	389	1.221	150	353	353	Tuna Netra, Tuna Rungu
	- Tongkat (Ketiak, Peraba, Tongkat 3 Kaki dan 4 Kaki)	Pasang	50	366	1.845	-	253	52	Tuna Daksa
	- Becak Modifikasi untuk Penyandang Disabilitas	Unit	-	1	20	-	1	6	
	- Alat Bantu Dengar	Unit	43	212	-	-	106	27	
	- Kaki Palsu dan Tangan Palsu	Orang	-	-	-	20	19	-	
3.	Bantuan Becak untuk Fakir Miskin	Unit	33	-	80	-	29		
4.	Remaja Putus Sekolah yang mendapatkan Bantuan	Orang	155	80	80	160	60	60	Remaja Putus Sekolah
5.	Jumlah Anak Panti Asuhan yang Mendapatkan Bantuan	Anak	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu
6.	Bantuan Sosial Lansia	Lansia	-	-	-	-	-	-	Lansia yang berada di dalam panti

No	Nama Kegiatan	Satuan	Tahun						Keterangan
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
7.	Bantuan Asistensi Lansia Terlantar	Orang	-	-	-	-	-	-	
8.	Bantuan Asistensi Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB)	Orang	-	-	-	-	-	-	
9.	Jaminan Hidup (Jadup) untuk Eks Kusta	Orang	827	551	551	551	551	551	
10.	Jaminan Hidup (Jadup) untuk Komunitas Adat	KK	567	-	-	-	-	-	
11.	Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan bantuan	KK	270	295	50	240	-	41	Masyarakat yang tinggal jauh dari pemukiman penduduk
12.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit	58	1.115	80	745	210	574	Fakir Miskin

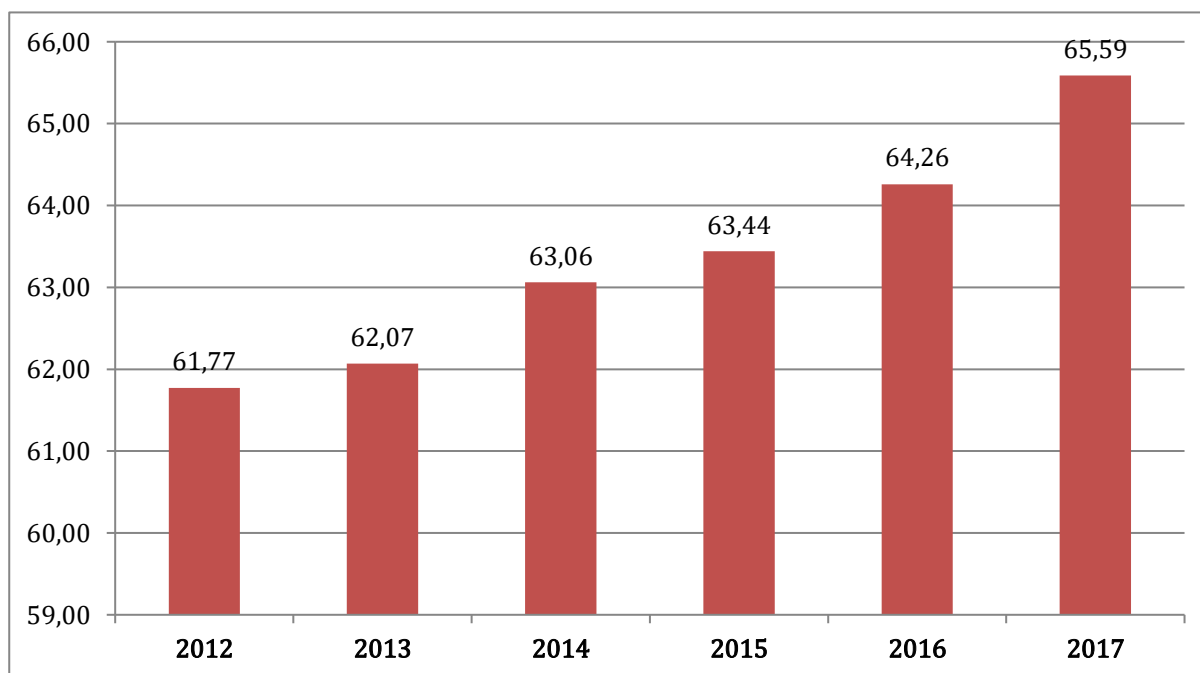
Sumber: Dinas Sosial Aceh, 2018

Berbagai program dan kegiatan pelayanan sosial telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti: pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Namun demikian, upaya-upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilaksanakan. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial dan hambatan tersebut, menimbulkan tantangan ke depan bagi Pemerintah Aceh adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

2.3.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.2.1. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan sebagai indikator tingkat partisipasi angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

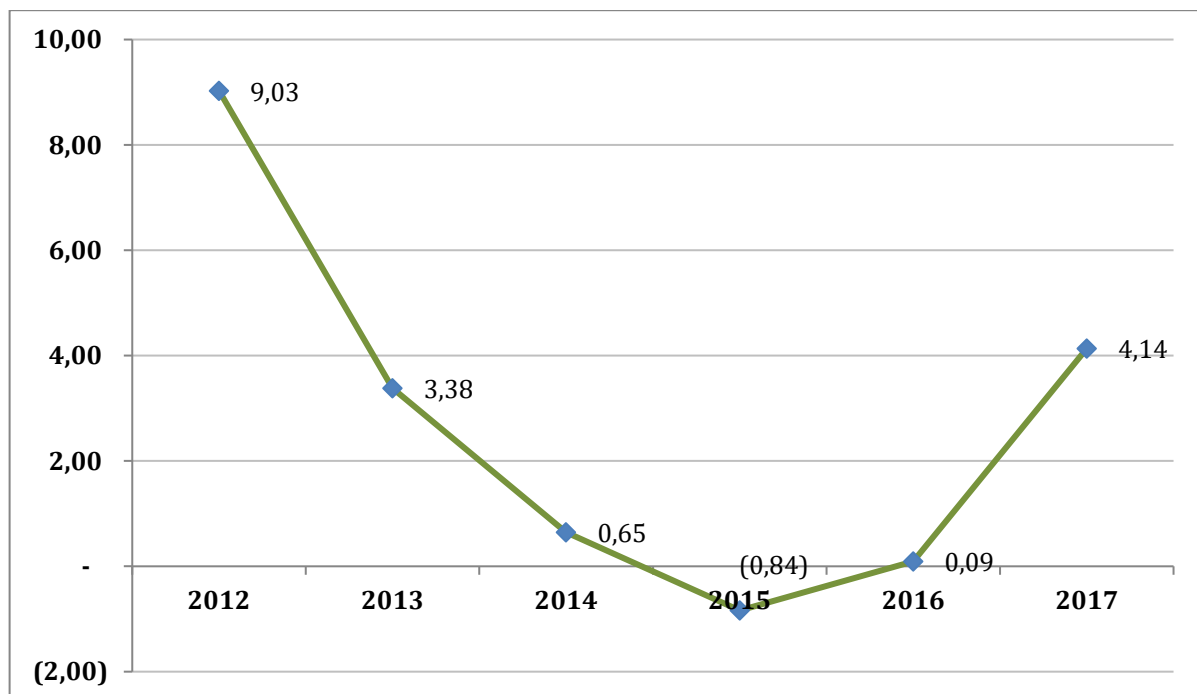


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.18. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Aceh, 2012-2017

Berdasarkan Gambar 2.18 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Aceh dari tahun 2012–2017 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 persentase TPAK sebesar 61,77 persen dan terus meningkat menjadi 65,59 persen di tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,62 persen. Secara terperinci persentase TPAK lebih tinggi oleh laki-laki sebesar 80,68 persen, sedangkan perempuan sebesar 50,84 persen. Ini menunjukkan bahwa persentase laki-laki yang mau bekerja lebih banyak dibandingkan perempuan.

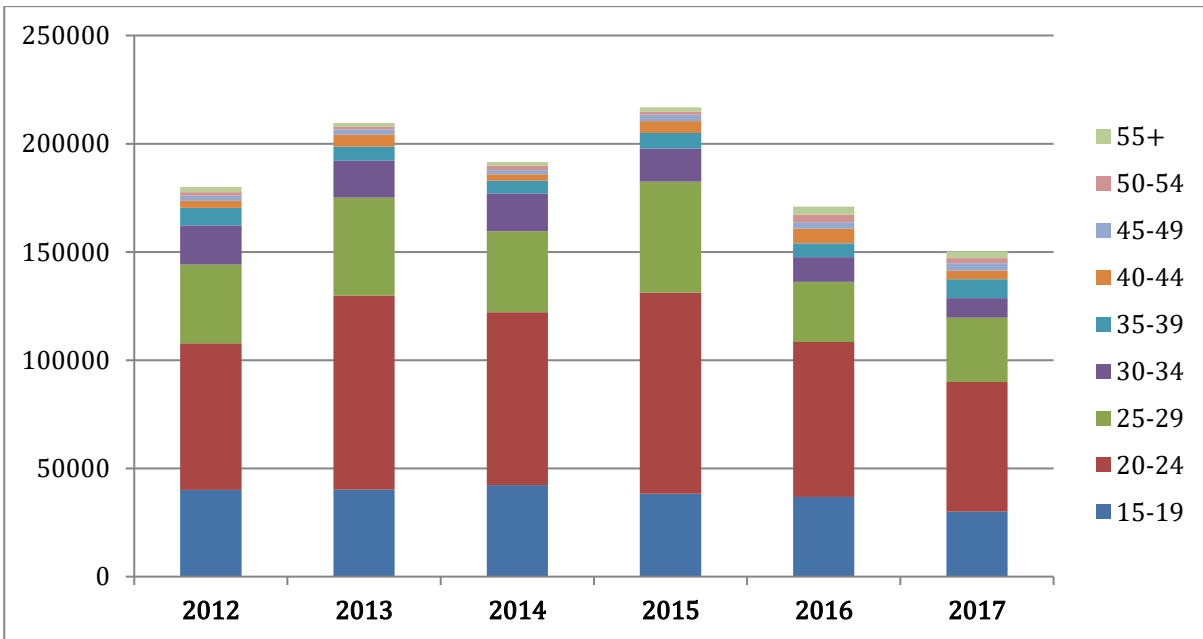
Permasalahan ketenagakerjaan di Aceh bukan hanya terletak pada peningkatan jumlah pengangguran terdidik saja, namun juga bila dilihat dari produktivitas tenaga kerjanya juga mengalami puncak penurunan yang drastis di tahun 2015 sebesar minus 0,84 persen. Namun pada tahun 2016 hingga 2017 kembali meningkat menjadi 4,14 persen. Bila dilihat berdasarkan lapangan usahanya, penurunan tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan industri meningkat pada tahun 2015 namun nilai inputnya tidak sebanding dengan output dihasilkan yang tergambar dari nilai kontribusi sektornya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.19. Perkembangan Laju Produktivitas Tenaga Kerja Aceh, 2012-2017

Bila dilihat dari kelompok usia, pengangguran Aceh tertinggi terdapat pada kelompok usia 20-24 tahun. Persentase pengangguran pada kelompok usia tersebut rata-rata mencapai 43 persen pertahun. Namun berdasarkan laju perkembangannya, kelompok usia 20-24 tahun cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga 2017. Hal ini berkorelasi dengan tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan SMA, Diploma dan Sarjana. Perkembangan pengangguran berdasarkan kelompok usia terdapat pada Gambar 2.20.

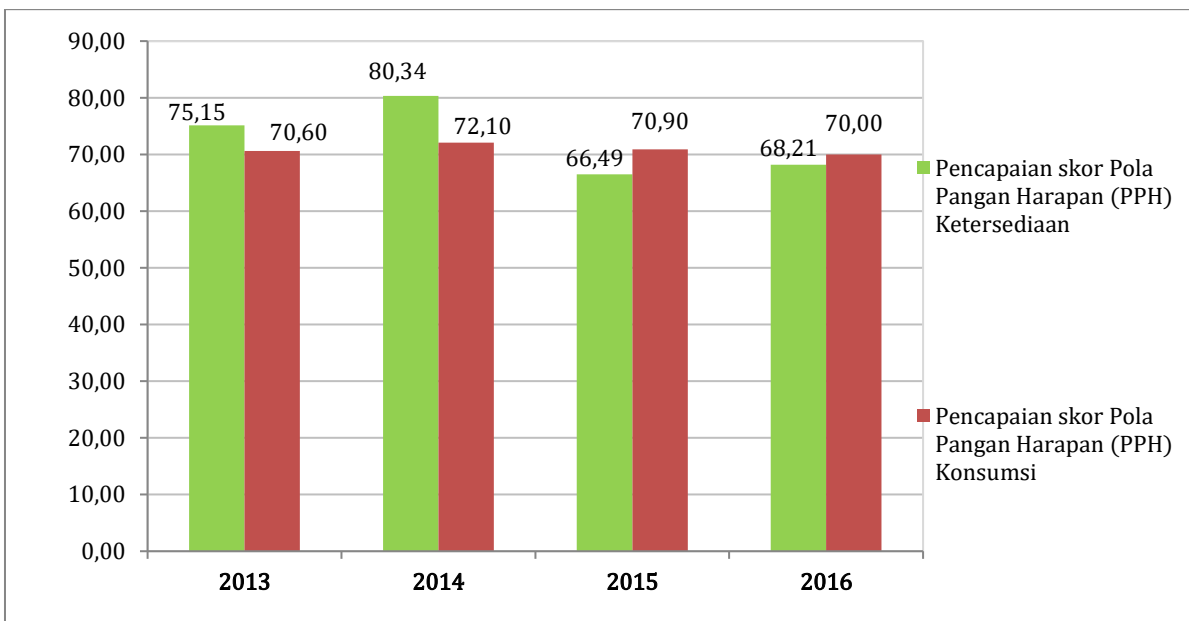


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017 (diolah)

Gambar 2.20. Perkembangan Pengangguran Berdasarkan Kelompok Usia di Aceh Tahun 2012-2017

2.3.2.2.2. Pangan

Pangan masih menjadi isu strategis di Aceh. Pencapaian keberhasilan pangan akan terlihat dari nilai ketersediaan pangan di Aceh saat ini. Pada tahun 2015 angka ketersediaan pangan utama Aceh sebesar 3.612 kkal/perkapita. Nilai tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2.662 kkal/perkapita (tahun 2014). Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa angka ketersediaan pangan utama di Aceh melebihi angka konsumsi standar 3.600 kkal/kapita, namun bila dikaji secara lebih mendalam bahwa angka konsumsi tersebut sebagian besarnya merupakan konsumsi karbohidrat sedangkan proporsi konsumsi protein masih sedikit. Ini menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat masih rendah.



Sumber: Dinas Pangan Aceh, 2017 (diolah)

Gambar 2.21. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2012-2016

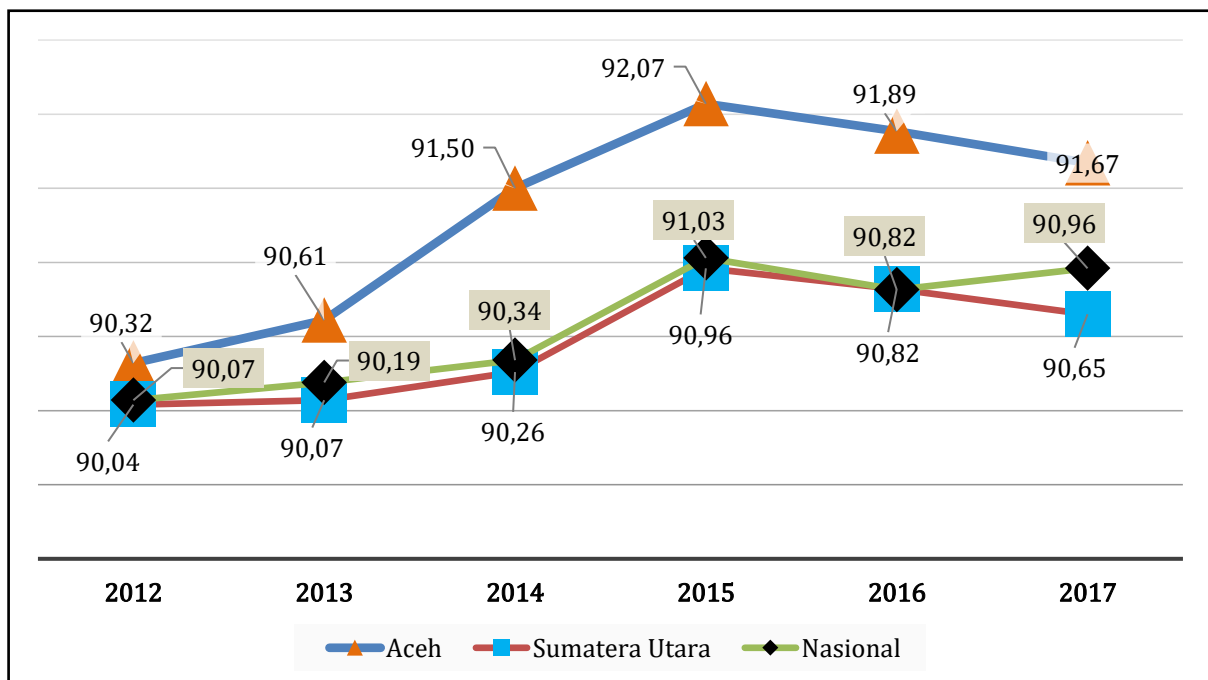
Gambar 2.21, menjelaskan bahwa Indikasi capaian ketersediaan pangan utama akan terlihat dari besarnya skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi maupun produksi yang diperoleh dari tahun ke tahun. Berdasarkan angka skor PPH ketersediaan atau produksi pada tahun 2016 terlihat nilai skor PPH cenderung berfluktuatif dimana nilai tertinggi terdapat pada tahun 2014 (80,34 persen) dan nilai terendah pada tahun 2015 sebesar 66,49 persen. Sedangkan skor PPH konsumsi menurun perlahan dari tahun 2014 sebesar 72,10 persen menjadi 70 persen di tahun 2016.

Dalam mencapai beberapa indikator pangan tersebut tidak terlepas dari beberapa peran prasarana dan sarana pangan berupa lumbung pangan di beberapa kabupaten/kota yang saat ini belum mampu dioptimalkan. Selain itu, meskipun banyak daerah yang merupakan daerah lumbung pangan namun beberapa kecamatan dan desa masih dikategorikan sebagai kecamatan dan desa rawan pangan. Kecamatan rawan pangan di Aceh berjumlah 117 kecamatan pada tahun 2016. Dari sisi produksi atau ketersediaan kondisi ini diakibatkan masih rendahnya diversifikasi komoditas pangan, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian serta rendahnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dari sisi konsumsi permasalahan ketahanan pangan disebabkan masih rendahnya konsumsi pangan yang berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan dan protein.

2.3.2.2.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah ukuran Pembangunan yang merupakan komposit dari empat indikator. IPG menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang dilihat dari komponen yang sama dengan IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita. Sampai dengan tahun 2017, angka IPG Aceh (91,67) berada di atas angka nasional (90,96). Ini dapat dilihat pada Gambar 2.22 di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Gambar 2.22. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2012 – 2017

Angka IPG Aceh meningkat hampir 2 poin dari tahun 2012 sebesar 90,32 menjadi 92,07 di tahun 2015, di atas angka nasional sebesar 90,07 dan 91,03. Namun angka ini menurun kembali di tahun berikutnya menjadi 91,89 pada tahun 2016 dan 91,67 di tahun 2017. Penyebab utama turunnya IPG tahun 2016 dan 2017 dikarenakan pertumbuhan harapan lama sekolah perempuan lebih lambat dari pada laki-laki. Perkembangan IPG untuk kabupaten/kota dapat diuraikan pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Aceh
Tahun 2012 – 2017

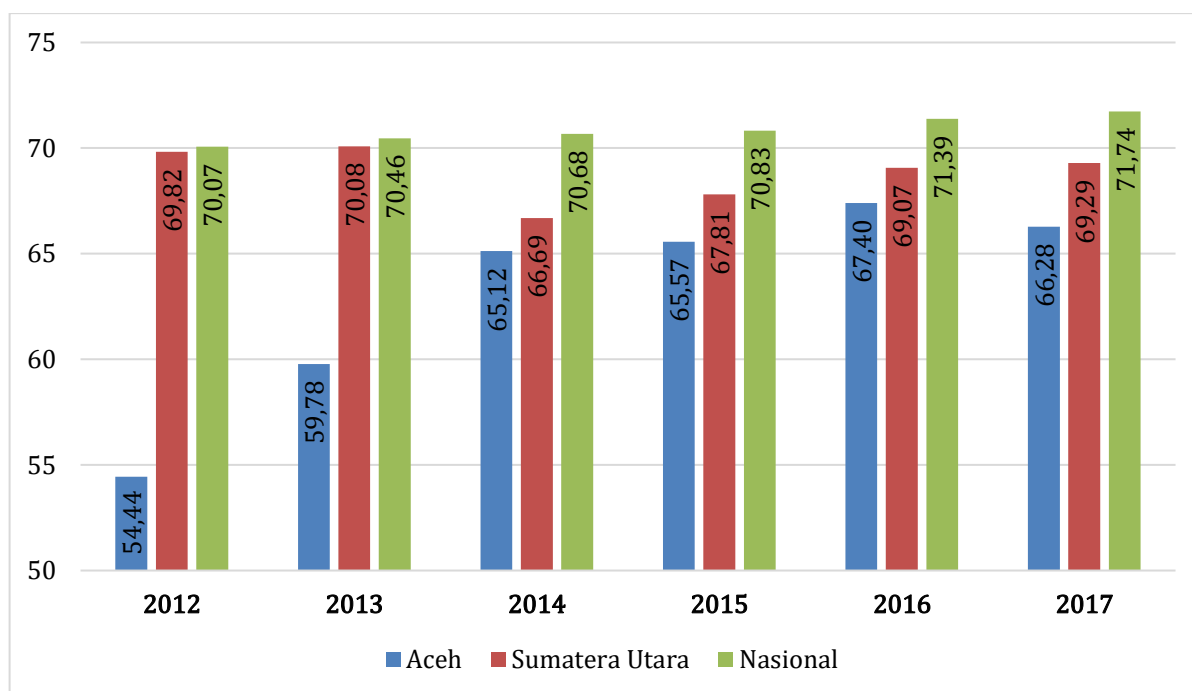
NO	Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
		2012	2013	2014	2015	2016*)	2017
1	Simeulue	72,51	74,55	75,55	76,19	*)	76,72
2	Aceh Singkil	79,75	81,52	82,8	82,91	*)	83,98
3	Aceh Selatan	90,10	90,57	90,82	91,01	*)	91,46
4	Aceh Tenggara	90,27	90,64	91,52	91,65	*)	92,77
5	Aceh Timur	84,75	84,77	84,92	85,42	*)	86,03
6	Aceh Tengah	97,03	97,04	97,19	97,81	*)	97,69
7	Aceh Barat	83,25	83,36	83,50	84,58	*)	84,92
8	Aceh Besar	94,10	94,59	94,65	95,23	*)	95,09
9	Pidie	93,72	93,77	94,33	94,54	*)	94,03
10	Bireuen	91,63	93,56	94,86	95,63	*)	95,15
11	Aceh Utara	90,92	92,23	92,41	92,52	*)	92,77
12	Aceh Barat Daya	87,38	88,59	89,39	89,54	*)	89,49
13	Gayo Lues	86,31	86,70	87,03	87,04	*)	87,77
14	Aceh Tamiang	78,39	78,90	80,37	81,12	*)	81,28
15	Nagan Raya	82,63	86,35	90,40	89,62	*)	89,80
16	Aceh Jaya	83,31	85,59	88,06	88,08	*)	88,46
17	Bener Meriah	95,31	96,36	96,44	96,46	*)	96,35
18	Pidie Jaya	94,01	94,11	94,70	94,98	*)	95,19
19	Banda Aceh	94,79	94,94	95,30	95,83	*)	95,40
20	Sabang	94,09	94,60	96,31	96,05	*)	95,83
21	Langsa	95,16	96,03	96,31	96,34	*)	95,70
22	Lhokseumawe	92,36	93,15	93,76	94,62	*)	94,60
23	Subulussalam	81,74	81,80	81,93	82,94	*)	83,96
Aceh		90,32	90,61	91,5	92,07	91,89	91,67
Nasional		90,07	90,19	90,34	91,03	91,82	90,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Ket: *) Tidak dilakukan survey untuk kabupaten/kota

B. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjelaskan tingkat partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG Aceh cenderung meningkat dari tahun 2012 (54,44) menjadi 66,28 di tahun 2017, namun masih di bawah IDG Nasional (Gambar 2.23). Peningkatan kapasitas perempuan melalui pendampingan sangat penting agar dapat berperan dalam politik dan ekonomi. Dengan meningkatnya kapasitas perempuan ini maka diharapkan dapat meningkatkan nilai IDG Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017

Gambar 2.23. Indeks Pemberdayaan Gender Aceh Tahun 2012 – 2017

C. Proporsi Perempuan di Parlemen

Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara termasuk perempuan untuk dipilih sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi sangat penting. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan parlemen harus bisa memberikan keadilan bagi perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2016 “Pembangunan Manusia Berbasis Gender” menyatakan bahwa negara telah menjamin kepentingan perempuan tersebut dengan adanya kebijakan Afirmasi, sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif.

Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.

Tabel 2.75, menggambarkan keadaan jumlah anggota legislatif perempuan se-Aceh, jumlah lembaga legislatif yang ditampilkan adalah 23 Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota dan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Tabel 2.75.
Proporsi Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2012- 2017

NO	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Simeulue	5,00	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Aceh Singkil	16,00	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3	Aceh Selatan	0,01	0,01	3,33	3,33	3,33	3,33
4	Aceh Tenggara	12,00	16,00	13,33	13,33	13,33	13,33

NO	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5	Aceh Timur	5,71	5,71	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Aceh Tengah	6,67	6,67	3,33	3,33	3,33	3,33
7	Aceh Barat	3,33	3,33	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Aceh Besar	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
9	Pidie	4,44	4,44	17,50	17,50	17,50	17,50
10	Bireuen	2,86	5,71	2,50	2,50	2,50	2,50
11	Aceh Utara	2,22	4,44	2,22	2,22	2,22	2,22
12	Aceh Barat Daya	0,01	0,01	4,00	4,00	4,00	4,00
13	Gayo Lues	10,00	0,01	15,00	10,00	10,00	10,00
14	Aceh Tamiang	6,67	13,33	33,33	30,00	30,00	30,00
15	Nagan Raya	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
16	Aceh Jaya	0,01	0,01	5,00	5,00	5,00	5,00
17	Bener Meriah	4,00	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00
18	Pidie Jaya	16,00	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00
19	Kota Banda Aceh	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
20	Kota Sabang	10,00	10,00	25,00	30,00	30,00	30,00
21	Kota Langsa	16,00	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00
22	Kota Lhokseumawe	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
23	Subulussalam	26,67	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Provinsi Aceh		5,80	10,14	14,81	14,81	13,58	14,81
Nasional		18,04	18,04	17,32	17,32	13,58	17,32

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2018

Keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat masih terlihat jelas terdapat ketimpangan dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan data yang tersedia proporsi perempuan pada parlemen secara rata-rata adalah sebesar 14,81 persen pada tahun 2017 meningkat bila dibandingkan pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,80. Selanjutnya keterwakilan perempuan di parlemen berdasarkan kabupaten/kota adalah Kota Sabang dan Kabupaten Tamiang yang memiliki keterwakilan perempuan terbanyak di parlemen pada tahun 2017 yaitu sebesar 30 persen, kemudian diikuti kabupaten Nagan Raya sebesar 16 persen.

D. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase perempuan di lembaga pemerintah akan berpengaruh dalam pengambilan kebijakan, karena pengambilan kebijakan yang tidak memiliki perspektif gender yang baik akan melahirkan kebijakan berbeda dengan pengambil kebijakan yang memiliki perspektif gender. Saat ini, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih terbilang rendah dibandingkan laki-laki, seperti terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.76.
Komposisi Jumlah Kursi Legislatif menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	3	3	3	2
2	Jumlah Perempuan yang menempati jabatan eselon III	52	51	49	52	54

NO	URAIAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Jumlah Perempuan yang menempati jabatan eselon IV	233	248	240	238	253
4	Pekerja Perempuan di Pemerintah	3.424	3.419	4.288	3616	12503
5	Jumlah Pekerja Perempuan	1.667.787	1.703.515	1.740.405	1.798.000	-
Presentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah		0,23	0,22	0,26	0,20	0,54

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2017

Walaupun persentasenya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun persentasenya masih sangat kecil. Sedikitnya keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan dikarenakan oleh berbagai faktor antara karena masih adanya keraguan terhadap kemampuan perempuan untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi di lembaga pemerintah.

E. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak makin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 tercatat ada 973 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2017 meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 2.412 kasus. Hal ini terjadi salah satunya karena unit layanan PPPA yaitu P2TP2A semakin berfungsi secara optimal sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk melapor. Lembaga layanan ini diharapkan aktif mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun, ada beberapa beberapa unit layanan di Kabupaten/Kota belum berfungsi secara optimal karena lemahnya manajemen kelembagaan dan lemahnya sistem jejaring dan koordinasi antar sektor sehingga berdampak pada banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak tertangani. Data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77.
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Tahun 2014-2017

No	Jenis Kekerasan	2014		2015		2016		2017	
		Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak
1	Fisik	138	47	169	17	93	243	255	165
2	Psikis	105	20	132	32	171	332	359	399
3	Pelecehan Seksual	20	122	14	141	8	268	33	240
4	Penelantaran	140	23	26	87	51	172	118	83
5	TPPO	27	24	2	2	0	2	4	1
6	Seksual (incest)	0	13	0	5	0	17	0	16
7	Sodomi	0	17	0	12	0	47	0	70
8	Eksplorasi Ekonomi	0	0	0	0	0	18	0	14
9	Eksplorasi Seksual	8	21	3	2	18	0	2	15
10	Pemeriksaan	2	21	3	49	6	27	42	102
11	KDRT	50	11	129	6	181	237	316	56
12	ABH	0	7	0	20	0	9	0	48
13	DLL	25	132	51	26	27	49	24	50
JUMLAH		515	458	529	399	555	1.421	1.153	1.259
TOTAL		973		928		1.976		2.412	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2018

Dari Tabel 2.77, dapat dilihat di dua tahun terakhir bahwa ada lima jenis kekerasan yang sering terjadi yaitu Kekerasan phisik, kekerasan psikis, Kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran dan eksploitasi seksual. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 515 kasus di tahun 2012 menjadi 1.259 kasus di tahun 2017.

F. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Aceh dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan peningkatan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2012 sebesar 35,13 persen, tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 38,46 persen. Namun bila kita lihat Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki pada tahun 2017 menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK perempuan yaitu sebesar 38,46 persen jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 61,54 persen. Kesenjangan ini terjadi disebabkan antara lain karena beban ganda (*double burden*) perempuan dalam menyeimbangkan antara urusan domestik dan publik.

Tabel 2.78.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2012 - 2017

Jenis Kelamin	Tahun					
	2012	2013	Feb-14	2015	2016	2017
Laki-laki	64,87	63,63	63,30	63,17	62,80	61,54
Perempuan	35,13	36,37	36,70	36,83	37,20	38,46
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (Data diolah)

2.3.2.2.4. Pertanian

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat semakin besar pula tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan suatu daerah. Reformasi agraria menargetkan 4,5 juta ha yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Separuh dari total alokasi 9 juta ha berupa sertifikasi lahan. Dengan demikian, pemerintah akan memberikan status legal bagi tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat, termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

a. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Konflik atas tanah yang berkepanjangan di Aceh, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah.

b. Jumlah Lahan Masyarakat Miskin Yang Bersertifikat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ekonomi lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reforma agraria.

c. Jumlah Penyelesaian Sengketa Dan Konflik yang Di Fasilitasi

Penanganan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang meliputi mekanisme pelayanan pengaduan dan informasi, pengkajian, penanganan, dan penyelesaian konflik pertanahan, serta bantuan hukum dan perlindungan hukum. Penanganan konflik pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Penanganan konflik pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, pencegahan dampak konflik, dan penyelesaian konflik.

d. Penyelesaian izin lokasi

Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

e. Penyelesaian Penetapan Lokasi (pemerintah)

Penetapan lokasi atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

f. Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria.

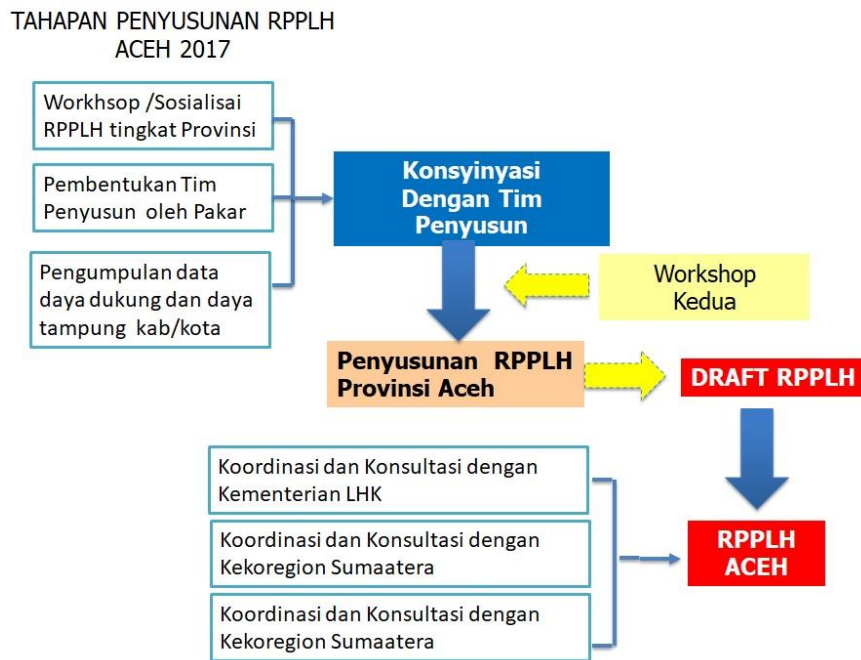
g. Luas Tanah Objek Reforma Agraria Yang Diredistribusi

Tanah negara dan tanah HGU yang diindikasikan terlantar menjadi salah satu objek TORA yang akan diinventarisasi penggunaan dan penguasaannya dan selanjutnya akan didistribusi dan dilegalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pelaksanaan TORA, pemerintah Aceh akan melakukan 3 (tiga) tahapan yaitu; 1. Pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial, 2. Redistribusi dan Legalisasi TORA dan, 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.3.2.2.5. Lingkungan Hidup

A. Tersusunnya RPPLH Provinsi

Dalam penyusunan RPPLH, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni inventarisasi lingkungan hidup, Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup, Analisis Data dan Informasi, Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup yang digunakan di dalam penyusunan RPPLH adalah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir, profil daerah, Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir atau Data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup, Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung dan Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun tahapan penyusunan RPPLH dapat dilihat dalam gambar 2.26.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2017

Gambar 2.24. Tahapan Penyusunan RPPLH Aceh

Mengingat pentingnya dokumen RPPLH ini, percepatan penyelesaian dokumen ini sangat dibutuhkan. Sampai saat ini dokumen RPPLH masih belum tersedia.

B. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi

Sesuai dengan amanah UU Nomor 32 tahun 2009, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Pasal 10, Ayat 5). Diharapkan jika dokumen RPPLH tersedia maka bisa langsung diimplementasikan ke dalam RPJM Daerah sehingga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk periode tahun 2013 - 2017, RPPLH belum terintegrasi di dalam RPJM daerah.

C. Tersedianya dokumen KLHS Provinsi

Landasan hukum pelaksanaan KLHS tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut undang-undang tersebut, Kajian

Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai UU PPLH Pasal 15 Ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP).

Adapun tujuan KLHS adalah:

- 1) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui penyusunan dokumen KLHS;
- 2) Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP;
- 3) Mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha/kegiatan

Sampai saat ini dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RPJMA dan KLHS RTRWA. Sementara KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum tersedia.

D. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi

Tujuan KLHS adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan atau Program. KLHS menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan atau pembangunan dalam suatu wilayah.

Penyelenggaraan KLHS sangat penting untuk menjamin kebijakan dan rencana program yang diimplementasikan telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMA memberikan pilihan scenario pembangunan di Aceh perlu disertai dengan intervensi kebijakan dan rencana aksi baik yang bersifat mitigasi maupun adaptasi antara lain: (a) lebih fokus pada upaya-upaya intensifikasi, (b) menekan upaya ekstensifikasi, utamanya yang akan menyebabkan alih fungsi lahan hutan, dan (c) menyiapkan sejumlah input teknologi kreatif sebagai upaya meningkatkan daya dukung lingkungan hidup sumber daya alam.

E. Peningkatan Indeks Kualitas Air

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks Pencemaran Air (IPA) dalam 4 (empat) tahun terakhir berfluktuatif dari 56,50 (2013) meningkat menjadi 58,02 (2014), 57,79 (2015) terus menurun menjadi 57,12 pada tahun 2016 namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 67,84.

Ada beberapa sungai yang melewati daerah perkotaan di Propinsi Aceh yang menampung limbah perkotaan dari berbagai jenis kegiatan seperti rumah sakit, hotel, industri, PLTD, limbah pasar, dan limbah rumah tangga. Sungai tersebut adalah Krueng Tamiang, Sungai Krueng Aceh, dan Krueng Daroy. Masih terdapat beberapa sungai lain yang melintasi perkotaan, namun keempat sungai ini merupakan sungai yang melewati perkotaan dengan kepadatan penduduknya tinggi. Sungai- sungai ini dapat dijadikan indikator kualitas air sungai perkotaan di Aceh.

F. Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Jika melihat hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Aceh, maka menunjukkan trend yang menurun dan ini menjadi indikasi yang mengkhawatirkan bagi kondisi udara di Aceh dan tentunya memerlukan perhatian lebih dari berbagai stakeholder.

Indeks Pencemaran Udara (IPU) dalam 4 (empat) tahun terakhir berfluktuatif dari 77,70 (2013) meningkat menjadi 97,70 (2014), 60,07 (2015) terus menurun menjadi 56,80 pada tahun 2016 namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 89,87. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan lingkungan dan polusi udara.

G. Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks tutupan lahan selama periode tahun 2013 – 2016 juga menunjukkan trend yang menurun. Kerusakan hutan yaitu penurunan luas tutupan lahan hutan yang diakibatkan oleh perambahan hutan. Degradasi hutan di daerah hulu akan berdampak terhadap daerah hilir dan bahkan menimbulkan dampak secara global baik berdampak langsung maupun tidak langsung pada seluruh komponen lingkungan baik fisik, kimia, biologi maupun sosial ekonomi dan sosial budaya. Luas kawasan terbuka akibat deforestasi mengakibatkan tingginya aliran sedimen dari kawasan pengunungan ke wilayah yang lebih rendah yang biasanya didiami oleh banyaknya penduduk. Hal ini berdampak juga pada menurunnya kualitas air permukaan yang biasanya digunakan oleh penduduk di Aceh untuk aktifitas sehari-hari dan aktifitas pertanian. Jika kondisi ini tidak segera ditangani akan berpotensi meningkatkan intensitas bencana seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Indeks Tutupan Hutan (ITH) dalam 4 (empat) tahun terakhir berfluktuatif dari 63,71 persen (2013) meningkat menjadi 65,64 persen (2014 dan 2015). Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi 55,63 persen dan kembali meningkat menjadi 65,18 persen pada tahun 2017. Hal ini mempunyai kaitan dengan aktivitas perambahan hutan baik di kawasan lindung maupun kawasan hutan produksi.

H. Laporan Inventarisasi GRK

Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) bertujuan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi gas rumah kaca termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Secara nasional Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen pada tahun 2019 untuk 5 (lima) sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah.

Pengendalian perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar bagi kehidupan manusia pada saat ini dan akan datang. Berbagai kejadian alam telah menunjukkan bahwa perubahan suhu, kenaikan permukaan air laut, curah hujan, dan iklim ekstrim telah mengakibatkan berbagai dampak buruk terhadap kehidupan. Faktor penyebab utama dari perubahan iklim tersebut adalah meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer.

Komitmen Pemerintah Aceh untuk menurunkan laju emisi dari kebakaran lahan dan deforestasi sebesar 7 persen atau sebesar 42.875.908,18 ton CO₂. Komitmen Pemerintah Aceh tersebut diutamakan pada kabupaten-kabupaten yang emisinya besar seperti Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Beberapa upaya yang dapat menurunkan emisi CO₂ antara lain: melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, pengembangan pengelolaan kinerja persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

I. Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi

Pemerintah Aceh menginisiasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim). Pembangunan desa proklim bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya. Pembangunan Proklim diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Beberapa kegiatan Proklim meliputi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan berupa: pembangunan rumah kompos, pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle (3R), pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta penanaman untuk peningkatan tutupan vegetasi yang melibatkan masyarakat setempat. Pemerintah Aceh telah melakukan pembangunan desa proklim dari tahun 2012-2017 sebanyak 11 gampong Proklim yang tersebar di 7 kabupaten/kota.

J. Jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola

Selama tahun 2013 -2016, Pemerintah Aceh telah melakukan pemantauan pengelolaan limbah B3 untuk 31 (tiga puluh satu) kegiatan/usaha/perusahaan. Kegiatan ini direalisasikan dengan melaksanakan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan B3. Persentase pengelolaan limbah B3 periode 2013-2016 sejumlah 9 kegiatan (2013), 7 kegiatan (2014), 8 kegiatan (2015) , 7 kegiatan (2016) dan 15 kegiatan (2017).

K. Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.

Jenis izin pengumpulan limbah B3 berdasarkan kewenangannya:

- 1) Pengumpulan skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari satu kabupaten/kota dan harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota.
- 2) Pengumpulan skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dan harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- 3) Pengumpulan skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) provinsi atau lebih dan harus mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Selama periode tahun 2013 – 2017, tidak ada satupun izin pengumpulan limbah B3 yang dikeluarkan oleh provinsi karena umumnya pihak swasta langsung meminta perizinan dari pusat dikarenakan kewenangan pengumpulan yang mendapatkan izin dari pusat lebih luas.

L. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Aceh telah melakukan pengawasan terkait kegiatan/usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari sektor pemerintah maupun swasta. Sejak tahun 2013 sampai 2017 terdapat 103 kegiatan yang sudah dilakukan pengawasan terkait dengan izin lingkungan.

M. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi

Pemerintah Aceh hanya memiliki 1 (satu) orang PPLHD dalam masa periode tahun 2013 – 2017. Terbatasnya jumlah PPLHD tidak dapat melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara optimal. Peningkatan jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana PPLHD perlu mendapat perhatian. Untuk mengoptimalkan peran PPLHD diperlukan kerjasama dengan Masyarakat

Hukum Adat (MHA) dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, upaya inventarisasi MHA dan kearifan lokal penting untuk dilaksanakan.

N. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat

Selama periode tahun 2013 – 2017, Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat sebagai contoh pelatihan pengelolaan sampah 3R, bank sampah, peleatihan pengelolaan limbah, sosialisasi gampong iklim dan berbagai sosialisasi lingkungan hidup lainnya. Pendidikan dan pelatihan ini dinilai sangat penting untuk tetap memberikan awareness kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

O. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Selama periode tahun 2013 – 2017, Pemerintah Aceh juga memberikan penghargaan lingkungan tingkat Provinsi Aceh untuk berbagai elemen masyarakat dan lembaga yang telah aktif melestarikan lingkungan di Provinsi Aceh. Daftar penerima penghargaan Proper, Adiwiyata, Adipura, SLHD, dan Duta Lingkungan.

P. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Selama periode tahun 2013 – 2017, Pemerintah Aceh juga memberikan penghargaan lingkungan tingkat Provinsi Aceh untuk berbagai elemen masyarakat dan lembaga yang telah aktif melestarikan lingkungan di Provinsi Aceh. Daftar penerima penghargaan Proper, Adiwiyata, Adipura, SLHD, dan Duta Lingkungan.

Tabel 2.79.
Penerima Penghargaan Adipura Tingkat Provinsi di Provinsi Aceh

No	Nama Orang/ Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	Banda Aceh	Adipura/Kota Sehat I	Gubernur Provinsi Aceh	2017
2	Kota Langsa	Adipura/Kota Sehat II	Gubernur Provinsi Aceh	2017
3	Kota Takengon	Adipura/ Kota Sehat Harapan	Gubernur Provinsi Aceh	2017

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2017

Tabel 2.80.
Peringkat Proper untuk Perusahaan-Perusahaan di Provinsi Aceh

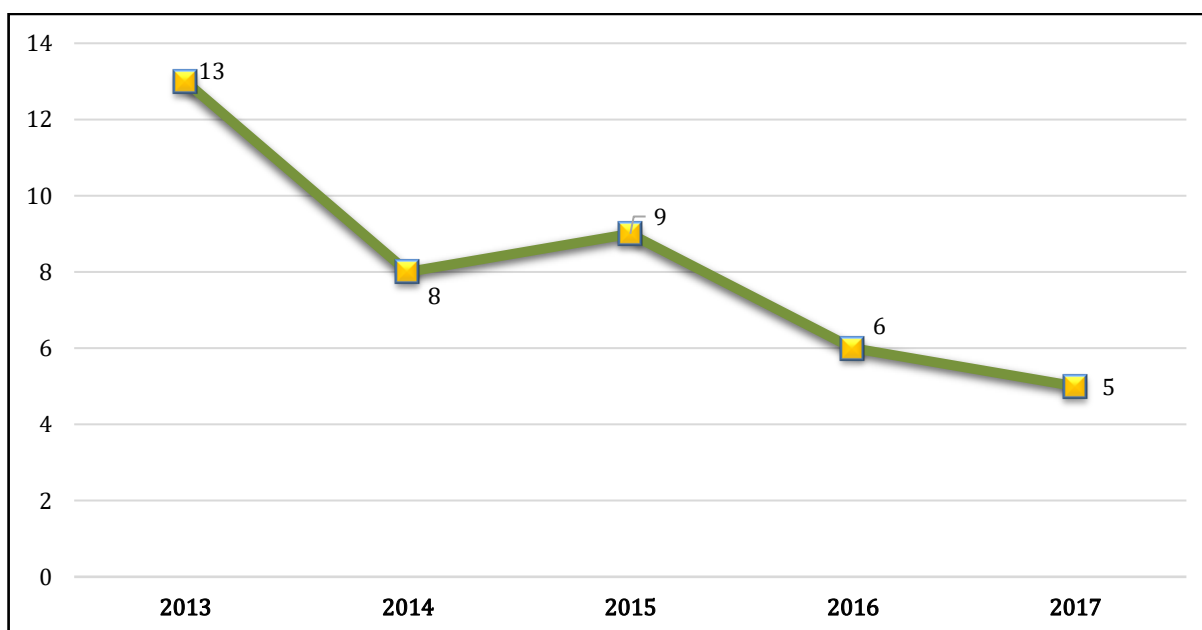
No	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	PT. Pertamina EP Asset 1 - Field Rantau	PROPER EMAS	Menteri LHK	2017
2	PT. Astra Agro Lestari, Tbk UU PKS Karya Tanah Subur	PROPER HIJAU	Menteri LHK	2017
3	PT. Nafasindo	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
4	PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) - PKS Pulo Tiga	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
5	PT. Socfindo - Perkebunan Sei Liput	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
6	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I TBBM Krueng Raya	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
7	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I TBBM Lhokseumawe	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
8	PT. Astra Agro Lestari UU PT. Perkebunan Lembah Bhakti	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
9	PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) PKS Tanjung Seumantoh	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
10	PT.Scofin Indonesia Perkebunan Lae Butar-Singkil	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017

No	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
11	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Terminal BBM Sabang	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
12	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Terminal BBM Meulaboh	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
13	PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) – PKS COT GIREK	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
14	PT. Perkasa Subur Sakti	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
15	PT. PP. Pati Sari	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
16	PT. Sisirau	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
17	PT. Socfindo – Perkebunan Seumanyam	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
18	PT. Socfindo – Perkebunan Seunagan	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
19	PT. Pupuk Iskandar Muda	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
20	PT. Lafarge Cement Indonesia	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
21	PT. PLN (PERSERO) Pembangkit Sumatera Bagian Unit Sektor Pembangkit Lueng Bata	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
22	MOBIL EXPLORATION INDONESIA INC.(MEII)	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017
23	Exxon Mobil Oil Indonesia, Inc.(EMOI)	PROPER BIRU	Menteri LHK	2017

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2018

Q. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat terinventarisir kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi di kabupaten/kota dengan tindak lanjut penyelesaian sesuai kewenangan provinsi. Selama 2013-2017 kasus-kasus yang yang diterima baik melalui pengaduan (laporan) masyarakat, publikasi media informasi (surat kabar) dan berdasarkan hasil temuan anggota DPRD seluruhnya telah ditangani atau ditindaklanjuti. Jumlah kasus lingkungan hidup untuk periode 2013 sampai 2017 cenderung menurun. Penanganan kasus lingkungan hidup pada tahun 2013 sebanyak 13 kasus menurun menjadi 8 (delapan) kasus pada tahun 2017. Seluruh kasus lingkungan hidup telah ditindaklanjuti untuk masing-masing tahun seperti yang disajikan pada Gambar 2.25.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2018

Gambar 2.25. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup di Aceh Tahun 2013-2017

R. Persentase Jumlah Sampah Tertangani

Penanganan timbulan sampah di Aceh masih tergolong rendah dengan rata-rata penanganan sebesar 19,26 persen. Penanganan timbulan sampah di kota pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan penanganan timbulan sampah di kabupaten. Penanganan timbulan sampah per hari di Aceh pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81.
Persentase Jumlah Sampah Tertangani di Provinsi Aceh Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Volume Timbulan Sampah (m ³ /hari)	Volume Sampah Tertangani (m ³ /hari)	Sampah Tertangani (%)
1	Simeulue	91.149	51.434	40,00	0,08
2	Aceh Singkil	107.781	88.133	50,00	0,06
3	Aceh Selatan	224.897	447.213	12,00	0,00
4	Aceh Tenggara	200.014	492,00	150,00	30,49
5	Aceh Timur	394.933	1.086,00	35,00	3,22
6	Aceh Tengah	212.720	529,00	82,00	15,50
7	Aceh Barat	193.791	523	103,00	19,69
8	Aceh Besar	380.962	1.086	96,00	8,84
9	Pidie	2.156.563	219.000	25,00	0,01
10	Bireuen	435.300	101.010	160,00	0,16
11	Aceh Utara	583.892	1.576	100,00	6,35
12	Aceh Barat Daya	154.024	137.566	41,00	0,03
13	Gayo Lues	87.881	5.575,38	31,00	0,56
14	Aceh Tamiang	304.400	241.626	28,00	0,01
15	Nagan Raya	162.448	12.439	70,00	0,56
16	Aceh Jaya	86.123	26.097,60	52,00	0,20
17	Bener Meriah	136.821	13.575	24,00	0,18
18	Pidie Jaya	844.337	556,00	180,00	32,37
19	Banda Aceh	249.281	200.240,40	550,00	0,27
20	Sabang	38.177	24.050	60,00	0,25
21	Langsa	197.021	186.508	34,00	0,02
22	Lhokseumawe	191.407	120,00	45,00	37,50
23	Subulussalam	92.534	1.102	22,00	2,00
ACEH		5.189.470	1.833.537	1.990	6,88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2018

Kota Lhokseumawe dapat dijadikan contoh dalam penanganan sampah dengan persentase tertinggi sebesar 37,50 persen dibandingkan kota lainnya. Sementara kabupaten yang terendah dalam menanganani sampah adalah Kabupaten Aceh Selatan (0,003 persen), Pidie (0,01 persen), Aceh Aceh Tamiang (0,01 persen) dan Langsa (0,02 persen). Rendahnya persentase penanganan sampah disebabkan oleh terbatasnya sarana prasarana persampahan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara baik.

2.3.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Persentase Penduduk yang memiliki KTP

Jumlah penduduk Aceh Semester II Tahun 2017 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Kementerian Dalam Negeri telah mencapai 5.184.003 jiwa. Dari jumlah tersebut, 3.566.282 jiwa merupakan penduduk yang wajib

KTP Elektronik (KTP-El). Sementara yang sudah memiliki KTP-El berjumlah 1.752.659 jiwa. Ini artinya masih ada penduduk Aceh yang belum memiliki KTP-El sebanyak 1.813.623 jiwa. Adapun Persentase penduduk ber KTP seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2.82.
Persentase Penduduk yang Telah Memiliki KTP-Elektronik 2014 - 2017

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Cetak KTP	%	Cetak KTP	%	Cetak KTP	%	Cetak KTP	%
1	Aceh Selatan	97.319	60,19	96.109	59,17	94.539	57,58	92.774	55,67
2	Aceh Tenggara	33.601	22,75	33.170	22,41	32.634	21,96	31.801	21,18
3	Aceh Timur	93.791	33,99	97.399	35,98	94.776	34,58	94.306	33,77
4	Aceh Tengah	86.645	62,58	86.073	61,38	85.232	60,01	84.045	58,14
5	Aceh Barat	77.228	57,77	75.382	58,14	74.110	55,25	73.973	53,86
6	Aceh Besar	185.230	70,84	180.678	69,98	177.877	68,31	175.994	66,64
7	Pidie	115.780	37,68	116.707	37,99	115.252	37,34	113.287	36,47
8	Aceh Utara	242.577	62,70	237.801	62,85	233.969	60,26	231.002	58,33
9	Simeulue	31.312	53,81	30.892	52,95	30.543	51,27	30.228	49,55
10	Aceh Singkil	53.661	65,66	49.342	60,90	47.398	57,15	45.630	55,72
11	Bireuen	87.927	29,76	92.301	31,50	91.914	30,79	91.305	30,24
12	Aceh Barat Daya	70.345	67,90	70.100	67,80	69.255	66,15	68.127	63,85
13	Gayo Lues	29.784	46,95	27.619	44,04	27.011	42,63	26.860	41,14
14	Aceh Jaya	26.577	46,61	29.078	50,97	28.749	49,16	28.866	47,55
15	Nagan Raya	45.849	38,53	45.688	38,46	44.589	37,37	43.876	36,71
16	Aceh Tamiang	75.201	39,70	76.038	40,56	74.536	38,69	74.533	37,84
17	Bener Meriah	52.375	50,49	54.533	53,56	53.886	52,18	53.345	50,52
18	Pidie Jaya	51.617	47,09	53.547	49,28	53.061	48,08	51.803	46,72
19	Banda Aceh	102.110	61,50	110.656	67,61	110.179	67,30	108.940	65,96
20	Sabang	20.060	76,47	20.029	75,03	19.916	73,33	19.405	70,98
21	Lhokseumawe	105.026	81,52	105.956	83,37	104.254	80,18	102.090	77,38
22	Langsa	71.476	56,96	71.676	57,02	71.642	55,53	69.880	53,73
23	Subulussalam	43.532	90,03	42.608	88,84	40.455	81,32	40.589	77,20
Jumlah		1.799.023	51,56	1.803.382	52,15	1.775.777	50,55	1.752.659	49,15

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Data Konsolidasi Bersih SM II, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Tahun 2017), diolah

Dari tabel di atas terlihat cakupan penerbitan KPT-El di Aceh pada tahun 2017 baru mencapai 49,15 persen. Persentase tertinggi kepemilikan akta kelahiran terdapat di Kota Lhokseumawe sebesar 77,38 persen, diikuti oleh Kota Subulussalam sebesar 77,2 persen dan Kota Sabang sebesar 70,98 persen. Kepemilikan cakupan penerbitan KPT-El terendah berada di Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 21,18 persen dan Kabupaten Bireuen sebesar 30,24 persen.

Masih rendahnya Rasio Penduduk berKTP-El, disebabkan antara lain karena cepatnya laju pertambahan jumlah penduduk wajib KTP yang belum dapat diimbangi dengan kecepatan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-El kepada masyarakat.

B. Persentase Bayi yang memiliki Akta kelahiran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya.. Gambaran mengenai Rasio Berikut disajikan secara rinci rasio kepemilikan aktakelahiran untuk masing-masing kabupaten/kota pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83.
Kepemilikan Akta kelahiran Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Cetak akta	%	Cetak akta	%	Cetak akta	%	Cetak akta	%
1	Aceh Selatan	235	86	365	56	296	49	343	54
2	Aceh Tenggara	96	45	71	20	132	28	205	37
3	Aceh Timur	254	32	114	18	630	,28	339	37
4	Aceh Tengah	439	75	198	54	406	93	196	96
5	Aceh Barat	206	77	143	58	306	46	155	49
6	Aceh Besar	772	85	577	78	789	58	0	00
7	Pidie	475	75	202	,35	1.008	86	1.404	100
8	Aceh Utara	438	47	274	37	400	33	56	60
9	Simeulue	60	51	78	32	90	30	101	50
10	Aceh Singkil	245	81	184	78	261	88	315	91
11	Bireuen	987	61	507	52	1.216	67	733	69
12	Aceh Barat Daya	251	82	232	68	310	69	435	87
13	Gayo Lues	106	78	74	45	160	39	106	32
14	Aceh Jaya	129	65	182	52	171	58	65	65
15	Nagan Raya	113	66	86	28	178	36	163	34
16	Aceh Tamiang	785	,78	410	78	1.300	83	100	73
17	Bener Meriah	428	78	132	63	232	66	223	68
18	Pidie Jaya	14	44	116	38	200	59	243	64
19	Banda Aceh	855	93	459	92	863	81	417	87
20	Sabang	105	84	66	70	162	85	146	85
21	Lhokseumawe	418	74	256	64	353	62	464	79
22	Langsa	313	84	244	59	551	69	547	75
23	Subulussalam	184	82	58	81	140	69	42	71
JUMLAH		7.908	70	5.028	53	10.154	59	6.798	68

Sumber: DinasRegistrasiKependudukan Aceh (Data Konsolidasi Bersih SM II,DirjenDukcapilKemendagri, Tahun 2017), diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Aceh pada tahun 2017 sebesar 70 persen, pada tahun 2015 sebesar 53 persen, pada tahun 2016 sebesar 59 persen dan tahun 2017 sebesar 68 persen. Persentase bayi berakte kelahiran pada tahun 2017 tertinggi terdapat di Kabupaten Pidi sebesar 100 persen dan terendah terdapat di Kabupaten Gayo Lues sebesar 32 persen.

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan bayi nya. Hal ini bisa dilakukan salah satu nya dengan sosialisasi kepada masyarakat serta koordinasi lintas sektor antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kesehatan serta tenaga medis yang membantu persalinan ibu hamil.

C. Persentase pasangan yang Memiliki Akta Nikah

Persentase kepemilikan akta nikah penduduk Aceh sejak 2014 relatif meningkat, peningkatan persentase kepemilikan akta nikah untuk Aceh pada tahun 2014 (13,2persen) meningkat di tahun 2017 (22,26 persen). Persentase akta nikah tertinggi adalah Kabupaten Aceh Tamiang (49,58 persen). Kota Banda Aceh selaku ibukota juga masih memiliki angka rasio yang relatif rendah (32,42 persen), meski lebih tinggi dari rasio kepemilikan akta nikah Aceh (22,26 persen). Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat serta terobosan dari

pemerintah dalam pembuatan akta nikah masih harus terus diupayakan. Persentase Kepemilikan Akta Nikah menurut kabupaten/kota di Aceh dari Tahun 2014 – 2017 disajikan pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84.
Persentase Kepemilikan Akta Nikah Tahun 2014 - 2017

No	Kabupaten/Kota	2014		2015		2016		2017	
		Akta Nikah	%	Akta Nikah	%	Akta Nikah	%	Akta Nikah	%
1	Aceh Selatan	24.657	26,63	28.816	30,50	32.512	33,87	34.860	36,09
2	Aceh Tenggara	7.657	8,47	10.442	11,41	14.050	15,29	17.233	18,49
3	Aceh Timur	25.375	15,87	31.082	19,27	37.619	23,09	43.360	26,15
4	Aceh Tengah	8.424	9,09	12.719	13,47	17.323	18,01	19.725	20,21
5	Aceh Barat	3.011	3,58	5.579	6,54	8.076	9,37	10.154	11,49
6	Aceh Besar	44.261	27,76	53.331	33,23	58.095	35,89	64.422	38,95
7	Pidie	23.478	13,97	26.718	15,72	34.703	20,24	42.615	24,49
8	Aceh Utara	311	0,14	556	0,25	885	0,38	1.253	0,53
9	Simeulue	10.518	28,95	11.324	30,33	11.427	30,62	12.098	31,97
10	Aceh Singkil	3.371	6,54	3.998	7,66	4.364	8,29	5.428	10,37
11	Bireuen	19.520	12,08	26.096	16,01	33.740	20,23	40.114	23,72
12	Aceh Barat Daya	3.170	5,15	5.123	8,33	3.415	5,51	3.427	5,45
13	Gayo Lues	485	1,18	1.422	3,39	2.779	6,46	3.039	6,88
14	Aceh Jaya	4.988	13,65	6.700	17,80	7.809	20,39	9.109	23,14
15	Nagan Raya	527	0,67	572	0,72	732	0,92	890	1,11
16	Aceh Tamiang	22.332	18,38	52.922	42,78	58.998	47,24	62.952	49,58
17	Bener Meriah	20.229	28,53	23.993	33,94	27.040	37,92	29.231	40,33
18	Pidie Jaya	715	1,16	841	1,35	1.518	2,39	1.766	2,75
19	Banda Aceh	24.412	24,48	27.627	27,29	26.490	25,99	33.775	32,42
20	Sabang	3.296	20,10	4.020	23,84	4.515	26,49	4.849	28,50
21	Lhokseumawe	8.503	11,19	12.118	15,78	14.004	18,04	15.469	19,72
22	Langsa	10.117	13,62	13.398	17,80	16.595	21,64	19.103	24,88
23	Subulussalam	6.115	19,90	7.774	24,22	8.403	26,54	9.447	28,16
JUMLAH		275.472	13,20	367.171	17,36	425.092	19,85	484.319	22,26

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2018

D. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi

Hingga saat ini ketersediaan dan pemanfaatan data kependudukan Skala Provinsi yang dimiliki Pemerintah Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan terhubung melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Kependudukan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Data semesteran yang diperoleh melalui SIK disebut dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB). Data Konsolidasi Bersih merupakan data kependudukan dari pelayanan perekaman dan pencatatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang terhubung secara nasional dan terpusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. DKB tersebut selanjutnya di distribusikan ke provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia setiap semester/tahun untuk mendukung pemanfaatan data dan pelayanan informasi administrasi kependudukan. Sejak tahun 2017 melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) dan pemberian hak akses yang dapat terintegrasi melalui sistem informasi, data

warehousekependudukan sudah dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan perencanaan yang lebih efisien dan efektif.

E. Penerapan KTP Berbasis NIK

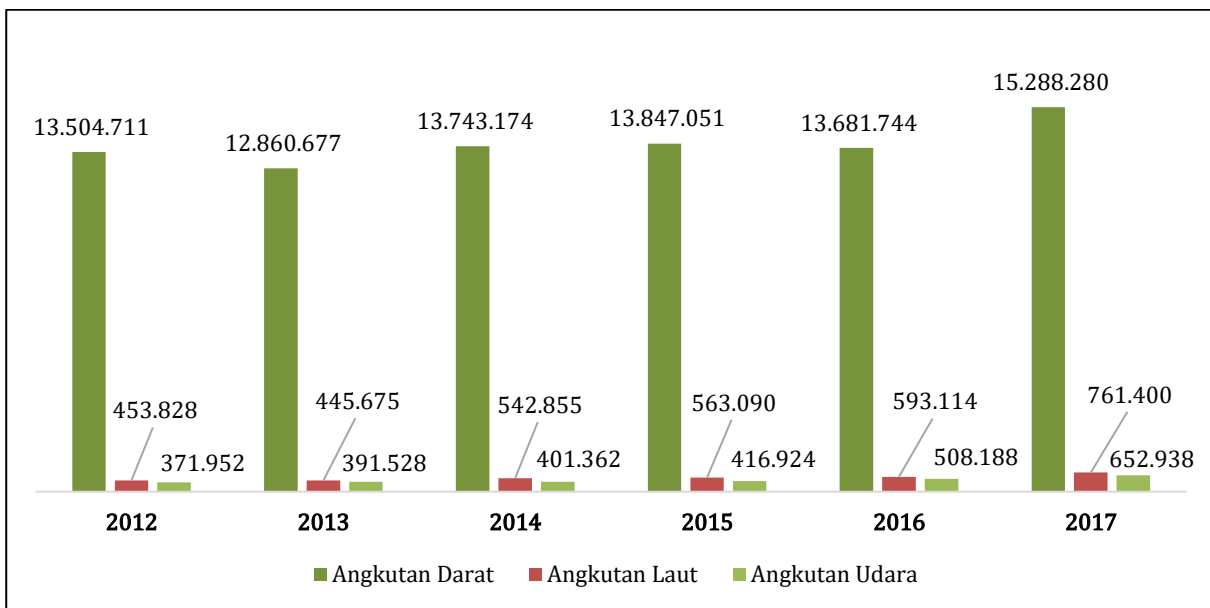
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP-El wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun keatas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

Selaku lembaga pemerintah di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat pusat, NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan sejak mulai dilaksanakannya sistem KTP nasional yang terkomputerisasi.

2.3.2.2.7. Perhubungan

A. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum berupa angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara belum menunjukkan kenaikan yang signifikan untuk periode tahun 2012-2017. Jumlah arus penumpang didominasi oleh angkutan udara dibandingkan angkutan laut dan angkutan darat. Hal ini menunjukkan angkutan udara lebih diminati oleh masyarakat luar dan dalam Aceh dibandingkan angkutan darat dan angkutan laut. Jumlah arus penumpang angkutan umum di Aceh selama periode 2012 sampai 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.26.

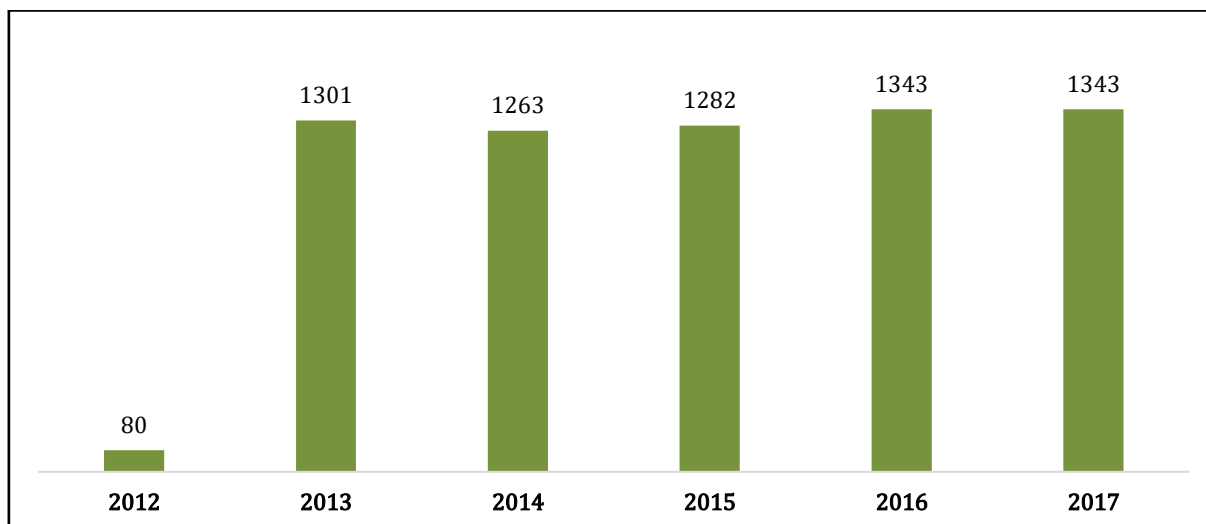


Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2018

Gambar 2.26. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2012-2017

B. Rasio ijin trayek

Seluruh angkutan umum yang melayani trayek antar Kabupaten/Provinsi (AKDP dan AKAP) wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Rasio izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.343 izin per jumlah penduduk. Rasio ijin trayek per jumlah penduduk di Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.27.



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2018

Gambar 2.27. Rasio Ijin Trayek di Aceh Tahun 2012-2017

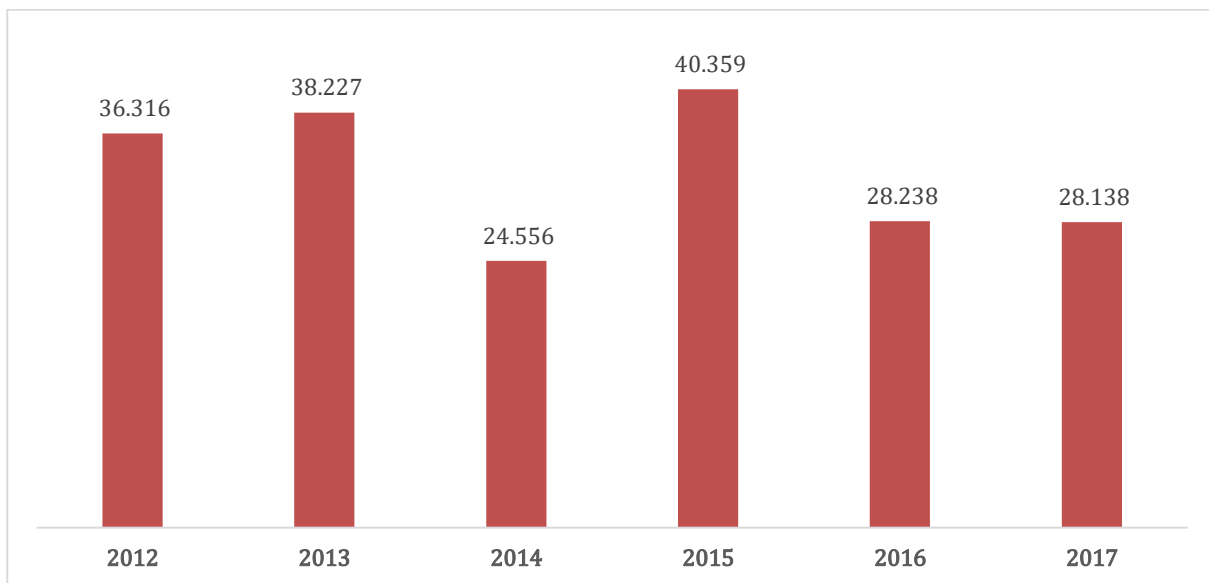
C. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Seluruh angkutan umum yang beroperasi di Aceh baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015, uji berkala kendaraan bermotor ditujukan untuk; (1) memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan; (2) mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan di jalan; (3) memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Lamanya proses pengujian kendaraan bermotor untuk 1 unit kendaraan lebih kurang 20 menit per kendaraan. Pengujian kendaraan bermotor menggunakan beberapa alat uji yang dilakukan untuk menjamin kendaraan tersebut memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan.

Biaya uji KIR bervariasi di tiap kabupaten/kota. Secara umum biaya uji KIR di Aceh berkisar antara Rp. 140.000 sampai dengan Rp. 160.000 per kendaraan. Akan tetapi jika kendaraan hanya melakukan uji kendaraan bermotor tanpa penggantian buku uji berkisar antara Rp. 60.000 sampai dengan Rp. 75.000 (sesuai dengan qanun kabupaten/kota masing-masing). Jumlah uji KIR angkutan umum selama tahun 2012 sampai 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.28.



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2018

Gambar 2.28. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2012-2017

D. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal

Sejak tahun 2012 sampai 2017 Aceh memiliki 12 bandara, 11 pelabuhan laut dan 8 pelabuhan penyeberangan serta 30 terminal (tipe A/tipe B/tipe C). Jumlah pelabuhan, bandara dan terminal di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85.
Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2012-2017

Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelabuhan Laut	11	11	11	11	11	11
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	8	8	8	8	8	8
Jumlah Bandar Udara	12	12	12	12	12	12
Jumlah Terminal Tipe A	4	4	4	4	4	4
Jumlah Terminal Tipe B	10	9	9	9	9	9
Jumlah Terminal Tipe C	12	13	23	23	23	23

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2018

Berdasarkan zona ATDC, pelabuhan laut di Aceh sampai tahun 2017 berjumlah sebanyak 11 unit yang tersebar di 6 (enam) zona ATDC:

1. Zona Pusat terdapat 2 (dua) unit yang berada di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar;
2. Zona Utara terdapat 1 (satu) unit berada di Kota Lhokseumawe;
3. Zona Timur terdapat 2 (dua) unit yang berada di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa;
4. Zona Tenggara terdapat 1 (satu) unit tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil;
5. Zona Selatan terdapat 3 (tiga) unit yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan Kabupaten Simeulue; dan
6. Zona Barat terdapat 2 (dua) unit pelabuhan laut yang terdapat di kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya.

Sementara itu, berdasarkan zona ATDC jumlah pelabuhan udara sampai tahun 2017 terdapat 12 unit, dengan rincian sebagai berikut:

1. Zona Pusat terdapat 2 (dua) unit yang berada di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar;
2. Zona Utara terdapat 3 (tiga) unit berada di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tengah;
3. Zona Tenggara terdapat 1 (satu) unit berada di Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Zona Selatan terdapat 3 (tiga) unit yang berada di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan Kabupaten Simeulue; dan
5. Zona Barat terdapat 1 (satu) unit yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya.

E. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR

Layanan angkutan darat cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun-tahun. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap angkutan darat semakin menurun. Faktor penyebab utama adalah jarak tempuh dari Banda Aceh ke Medan lebih lama dibandingkan dengan angkutan udara dan pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga mampu untuk menggunakan angkutan udara. Persentase layanan angkutan darat dan kepemilikan KIR angkutan umum di Aceh tahun 2012-2017 disajikan pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86.
Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2012-2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase layanan angkutan darat	73,62	76,87	75,62	75,37	74,36	76,30
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	16,63	19,36	14,12	17,74	13,46	13,19

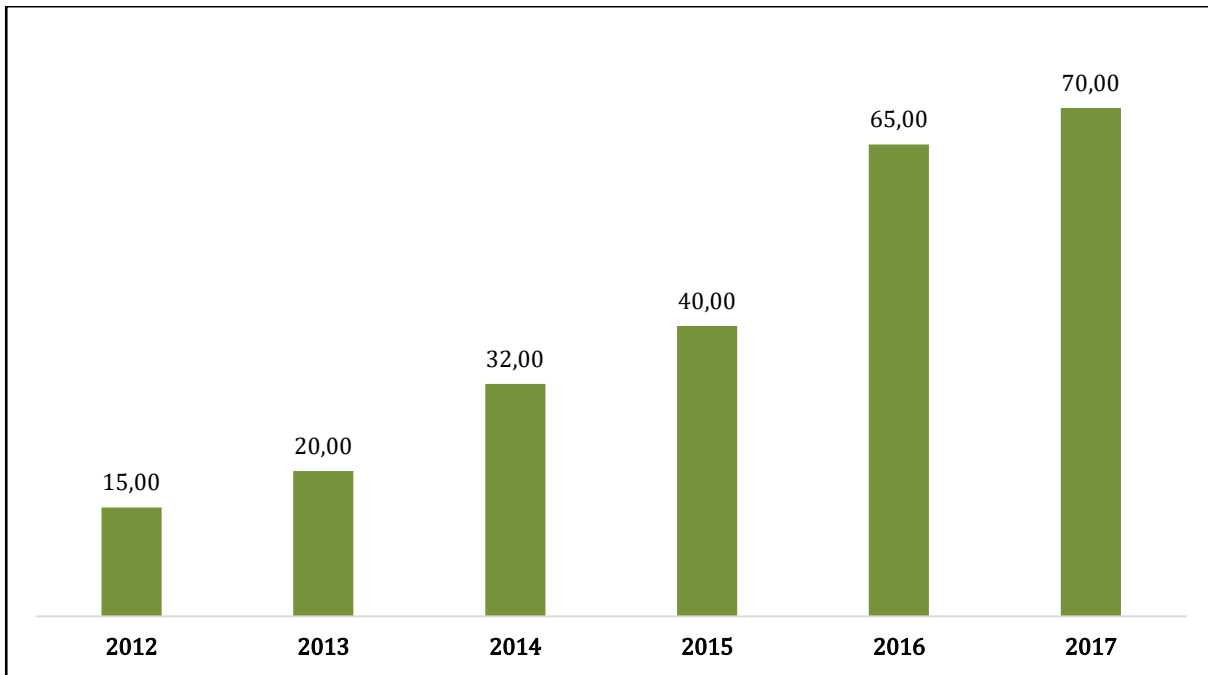
Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2018

Berdasarkan Tabel 2.85, persentase kepemilikan KIR angkutan umum masih rendah. Pada tahun 2017 persentase kepemilikan KIR hanya 13,19 persen dari total angkutan umum yang beroperasi di Aceh. Hal ini menunjukkan kesadaran pemilik angkutan umum terhadap persyaratan teknis dan laik jalan masih rendah.

F. Pemasangan Rambu-rambu

Perlengkapan jalan merupakan prasarana jalan yang diharuskan dipasang pada ruas jalan yang bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan jalan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: rambu-rambu lalu lintas, rambu pendahulu petunjuk jurusan, *delineator*, *guard rail* (Pagar Pengaman Jalan), *traffic light*, cermin tikungan, *speed bump*, lampu penerangan jalan umum dan marka Jalan.

Persentase pemasangan rambu-rambu jalan cenderung meningkat dari 15 persen tahun 2012 menjadi 70 persen pada tahun 2017. Selanjutnya upaya pengendalian pengamanan lalu lintas melalui pemasangan fasilitas keselamatan jalan (rambu-rambu) cenderung semakin baik. Namun, seiring dengan peningkatan atau rehabilitasi panjang jalan provinsi serta bertambahnya daerah rawan kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan (volume lalu lintas) maka perlu dilengkapi dengan pemasangan fasilitas keselamatan jalan. Persentase pemasangan rambu-rambu di Aceh tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.31.



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2018

Gambar 2.29. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2012-2017

G. Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan

Rasio jumlah kendaraan per panjang jalan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Aceh tahun 2012-2016 di sajikan pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87. Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan di Aceh Tahun 2012-2017

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total Panjang Jalan (km)	22.481,48	27.792,74	23.106,16	23.596,58	23.416,76	23.650,05
Total Jumlah Kendaraan (unit)	0	1.255.990	1.510.377	1.614.388	1.738.460	1.898.398
Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan	0	45,19	65,37	68,42	79,74	80,27

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2018

Rasio jumlah kendaraan per panjang jalan di Aceh selama periode 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Namun rasio jumlah kendaraan per panjang jalan di Aceh sebesar 80 kendaraan per km masih rendah jika dibandingkan dengan rasio jumlah kendaraan per panjang jalan di Sumatera sebesar 174 kendaraan per km, Jawa sebesar 604 kendaraan per km dan Kalimantan sebesar 152 kendaraan per km (Buku Informasi Statistik, 2017). Hal ini bermakna panjang jalan di Aceh masih mampu memberikan aksesibilitas bagi masyarakat.

H. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum didominasi oleh angkutan darat sebanyak 15.288.280 orang atau mencapai 91,53 persen dari total penumpang pada tahun 2017. Sementara

jumlah orang yang terangkut angkutan laut sebesar 4,56 persen dan angkutan udara sebesar 3,91 persen. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum semakin membaik seiring dengan semakin meningkatnya pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi layak. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Aceh Tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88.
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2012-2017

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Tahun						% Pertumbuhan rata-rata/thn
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Angkutan Darat	13.504.711	12.860.677	13.743.174	13.847.051	13.681.744	15.288.280	2,29
Angkutan Laut	453.828	445.675	542.855	563.090	593.114	761.400	9,37
Angkutan Udara	371.952	391.528	401.362	416.924	508.188	652.938	10,26
Jumlah	14.330.491	13.697.880	14.687.391	14.827.065	14.783.046	16.702.618	2,85

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2018

Tabel 2.88, menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum semakin membaik seiring dengan semakin meningkatnya pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi layak. Persentase pertumbuhan rata-rata jumlah orang yang terangkut angkutan umum didominasi pada moda angkutan udara sebesar 10,26 persen jika dibanding moda angkutan darat dan laut. Pelayanan angkutan udara dengan waktu tempuh yang lebih singkat dan perbedaan tarif yang tidak terlalu signifikan, menjadikan alasan masyarakat untuk lebih memilih moda angkutan udara.

I. Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan. Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal di Aceh Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89.
Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2012-2017

Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Tahun						% Pertumbuhan rata-rata/thn
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Terminal	3.524.500	3.710.000	3.920.000	4.230.000	4.442.592	4.586.484	5,12
Bandara	806.517	848.965	1.018.711	1.084.043	1.159.881	1.242.102	8,17
Dermaga	847.796	981.228	1.161.621	1.191.924	1.267.916	1.088.949	4,25
Jumlah	5.178.813	5.540.193	6.100.332	6.505.967	6.870.389	6.917.535	5,59

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2018

Jumlah orang melalui terminal lebih tinggi dibandingkan jumlah orang melalui bandara dan dermaga. Persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2017 sebesar 66,30 persen cenderung menurun dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2013 sebesar 68,06 persen. Namun, persentase jumlah orang melalui bandara dan dermaga cenderung meningkat untuk periode tahun 2012-2017. Hal ini diperkirakan bahwa moda transportasi udara dan laut lebih efisien

dan efektif dari sisi waktu tempuh dan pelayanan. Di sisi lain interkoneksi antarkabupaten/kota dan antarprovinsi sudah membaik mengakibatkan jenis angkutan tersebut lebih diminati oleh masyarakat. Tingkat pertumbuhan rata-rata jumlah orang yang melalui dermaga, bandara dan terminal di Aceh lebih didominasi pada sektor perhubungan udara, hal ini disebabkan jumlah penumpang yang naik dan turun hanya melalui satu pintu sedangkan sektor perhubungan darat penumpang masih ada yang naik dan turun di luar terminal, pelayanan transportasi darat *door to door* mempengaruhi terhadap jumlah orang yang melalui terminal.

2.3.2.2.8. Komunikasi dan Informatika

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama periode 2012-2017 sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah terus menurun dari 3,23 persen menjadi 0,74 persen. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon di daerah perkotaan sebesar 5,62 persen menjadi 2,05 persen dan di daerah pedesaan juga terjadi penurunan yaitu dari 2,3 persen tahun 2012 menjadi 0,8 persen pada tahun 2017.

Di lain pihak, penggunaan telepon seluler terus meningkat. Dalam hal ini, jika ada salah satu anggota rumah tangga yang memiliki telepon selular, maka rumah tangga tersebut dianggap sudah memiliki alat tersebut. Selama periode 2012-2017 persentase rumah tangga yang memiliki telepon selular dan Komputer/Notebook meningkat cukup signifikan khususnya di daerah perkotaan. Persentase rumah tangga yang menggunakan telepon seluler meningkat dari 81,91 di tahun 2012 menjadi 85,32 di tahun 2015. Selanjutnya persentase rumah tangga berdasarkan perkotaan dan pedesaan yang menggunakan alat komunikasi dan informatika di Aceh secara rinci disajikan pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90.
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan yang Menggunakan Alat Komunikasi dan Informatika di Aceh Tahun 2012 - 2017

Jenis	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ACEH (Kota + Desa)							
1	Telepon	3,23	3,35	2,90	0,62	0,52	0,74
2	Telepon Seluler/HP	81,91	83,9	85,32	*)	*)	*)
3	Komputer/Notebook	12,87	13,83	15,16	16,81	17,48	18,5
PERKOTAAN							
1	Telepon	5,62	5,22	4,04	1,72	1,35	2,05
2	Telepon Seluler/HP	92,28	93,37	92,74	*)	*)	*)
3	Komputer/Notebook	31,08	32,21	33,73	34,72	34,91	35,49
PEDESAAN							
1	Telepon	2,3	2,62	2,45	0,19	0,18	0,18
2	Telepon Seluler/HP	77,91	80,2	82,38	*)	*)	*)
3	Komputer/Notebook	5,83	6,64	7,81	9,85	10,45	11,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

*) Tidak dilakukan survey lagi.

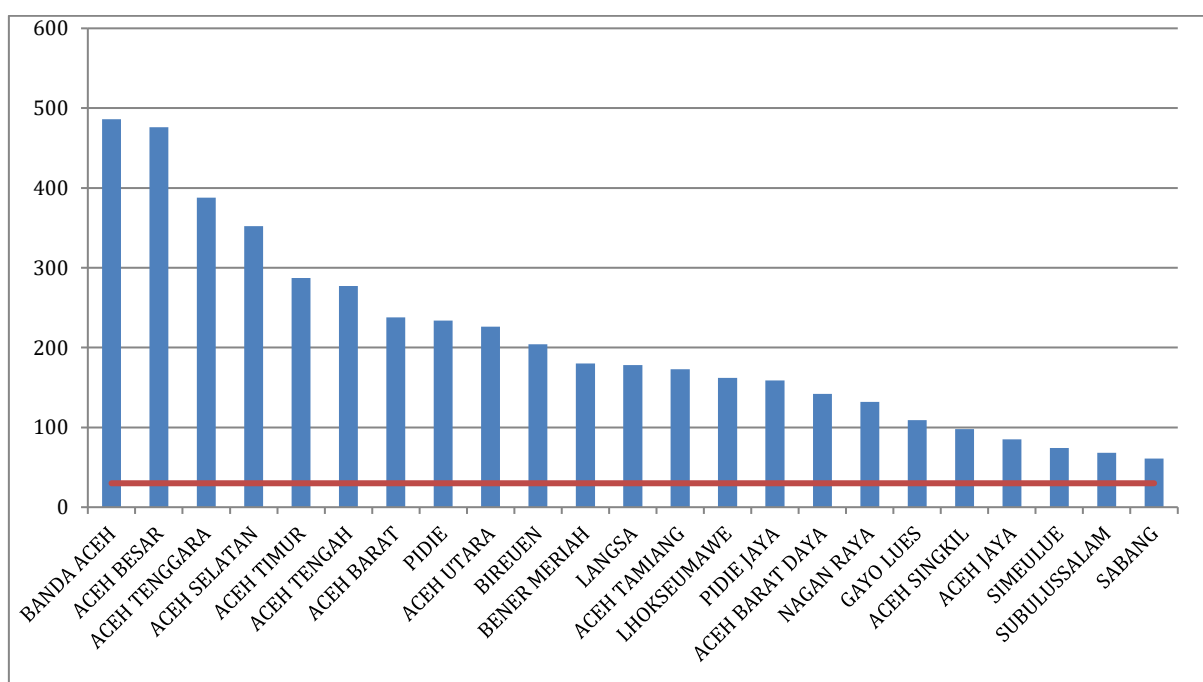
2.3.2.2.9. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

A. Koperasi

Koperasi merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang cukup strategis dalam peningkatan perekonomian rakyat. Namun sayangnya koperasi belum berkembang menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat terutama di pedesaan. Belum berkembangnya koperasi sebagaimana diharapkan diantaranya disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Namun demikian, kinerja koperasi ditinjau dari sisi koperasi aktif mengalami perbaikan. Peningkatan rata-rata persentase koperasi aktif sebesar 7,74 persen. Jumlah koperasi aktif terbanyak per kabupaten/kota pada tahun 2016 terdapat di Banda Aceh sebanyak 486 unit, sedangkan jumlah koperasi aktif terbanyak kedua terdapat di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 476 unit. Jumlah koperasi aktif paling sedikit terdapat di Kota Sabang sebanyak 61 unit.

Penyebab tidak aktifnya koperasi diantaranya adalah: 1) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, diantaranya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyampaikan laporan kegiatannya ke dinas teknis karena masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi serta masyarakat/anggota koperasi terhadap manfaat berkoperasi; 2) rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pembina koperasi. Langkah tepat yang dapat dilakukan guna meningkatkan persentase koperasi aktif yakni melakukan inventarisasi koperasi yang tidak aktif dengan mengelompokkan dalam kriteria a) koperasi tidak aktif namun berpotensi untuk dilakukan pembinaan, b) koperasi tidak aktif dan tidak berpotensi untuk diaktifkan kembali. Dengan beberapa langkah yang dilakukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan persentase koperasi aktif di Aceh. Jumlah koperasi aktif per kabupaten/kota tahun 2016 terdapat pada Gambar 2.30.



Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Aceh, 2017(diolah)

Gambar 2.30. Jumlah Koperasi Aktif di Aceh

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu sektor yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usahaproduktif masyarakat. Secara umum sektor UMKM didominasi usaha mikro dan kecil yang terus menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal

tersebut ditandai dengan meningkatnya populasi UMKM dari tahun ke tahun. Tahun 2013 jumlah UMKM sebanyak 21.643 unit dan meningkat secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 83.247 unit. Umumnya kenaikan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya usaha mikro sebanyak 58.935 dan usaha kecil sebanyak 22.335 unit. Meskipun dari segi jumlah yang terus meningkat, sektor ini belum berkembang secara optimal dari segi produktivitas dan daya saingnya. Ini tergambar dari masih rendahnya permintaan pasar domestik dan pasar regional bahkan internasional.

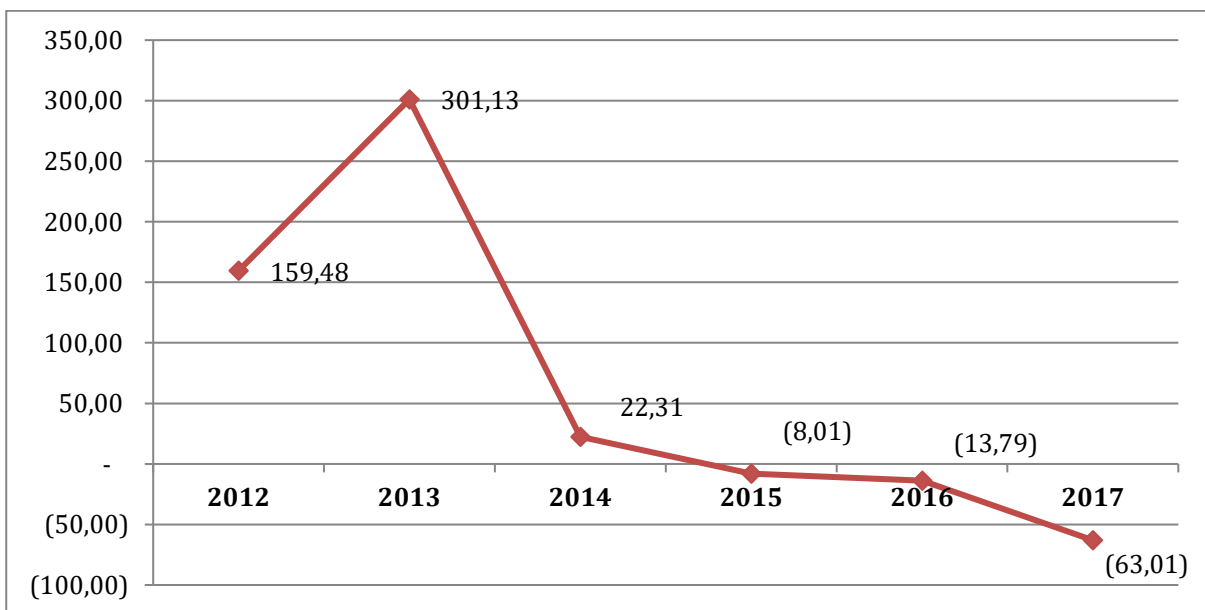
Beberapa faktor penyebab belum berkembangnya UMKM di Aceh diantaranya: 1) besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan persaingan pasar yang tinggi; 2) terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku dan permodalan; 3) terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar; 4) rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia; dan 5) terbatasnya dukungan modal.

2.3.2.2.10. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut, kehadiran investasi dari pihak dalam dan luar negeri sangat diperlukan. Berdasarkan data tahun 2017 jumlah proyek investasi di Aceh baik PMDN maupun PMA tercatat sebanyak 470 proyek. Dimana jumlah terbanyak merupakan investor PMDN sebanyak 471 dan investor PMA sebanyak 30 proyek.

Dalam periode tahun 2012-2017 perkembangan nilai realisasi investasi di Aceh menunjukkan kecenderungan penurunan. Puncak realisasi investasi tertinggi terdapat pada tahun 2013 dengan pertumbuhan realisasi mencapai 301,13 persen. Selama triwulan II tahun 2013 terjadi realisasi investasi sebesar Rp. 1.562 miliar dengan kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 96 persen. Selain itu, penyaluran kredit perbankan untuk kredit investasi juga tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan, yaitu dari 18,72 menjadi 61,64 persen.

Sementara itu, penurunan investasi terjadi sejak tahun 2014 hingga 2017 dengan pertumbuhan realisasi terendah sebesar minus 63,01 persen pada tahun 2017. Penurunan realisasi investasi tersebut dikarenakan: 1) berkurangnya pelaporan sektor tambang; 2) berkurangnya proyek investasi baru.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.31. Perkembangan Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) Aceh, 2012-2017

Kendala investasi yang terus dihadapi saat ini yakni sarana dan prasarana investasi di Aceh masih sangat minim khususnya ketersediaan listrik dan air bersih. Selain itu kesiapan kelembagaan kawasan industri dan status lahan masih menjadi kendala bagi masuknya investor. Secara eksternal masuknya investasi juga dipengaruhi oleh persepsi investor terhadap iklim investasi di Aceh yang belum membaik

2.3.2.2.11. Kepemudaan dan Olahraga

A. Kepemudaan

Pemuda merupakan aset potensial yang dapat meneruskan cita-cita bangsa dan merupakan kader pemimpin bangsa. Pada era globalisasi, kegagalan dalam menyiapkan pemuda yang berkualitas dapat menyebabkan suatu negara mengalami kemunduran dan tidak mampu bersaing dengan negara lain.

Tahun 2017 jumlah organisasi pemuda di Aceh sebanyak 68 organisasi yang terhimpun di bawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Organisasi kepemudaan tersebut diarahkan untuk dapat merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91.
Organisasi Kepemudaan, 2012-2017

Organisasi Kepemudaan	Satuan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pemuda	Orang	1.333.444	1.432.667	1.444.632	1.452.666	1.487.619	1.488.419
Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	4	5	6	9	10	10
Jumlah Organisasi Kepemudaan Politik (OKP)	Unit	68	68	68	68	68	68

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, 2018

Kualitas pemuda Aceh masih belum menggembirakan yang terlihat dari kurangnya pemuda yang berprestasi dalam bidang wirausaha, sosial, politik, akademik, hukum dan agama. Jumlah pemuda Aceh tahun 2017 sebanyak 1.488.419 orang, hanya 10 orang yang berprestasi. Di sisi lain, jumlah organisasi kepemudaan juga tidak berubah dari tahun ke tahun.

B. Keolahragaan

Organisasi olahraga merupakan wadah berkumpulnya para atlet berbagai cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Olahraga tersebut merupakan olahraga yang diminati dan digemari oleh masyarakat Aceh seperti club sepak bola, badminton, tenis meja, futsal, voly, renang, sepeda, tinju, panjat tebing, lari dan senam sehat. Club olah raga tersebut pada umumnya bernaung di bawah organisasi keolahragaan.

Tabel 2.92.
Cabang Olahraga, Atlit, Pelatih, Prestasi dan Infrastruktur Olahraga Aceh, 2012-2017

No	Keolahragaan	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cabang Olahraga Binaan	Cabor	12	12	14	16	16	16
2	Atlit Olahraga Binaan	Orang	120	120	120	120	120	125
3	Atlit Berprestasi	Orang	30	30	40	50	50	50
4	Pelatih Berprestasi	Orang	6	6	6	6	8	8

No	Keolahragaan	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
5	Pelatih Olahraga Binaan	Orang	12	12	14	16	16	16
6	Prestasi Olahraga	Cabor	6	7	8	8	8	8
7	Gedung Pemuda	Unit	27	32	42	44	50	50
8	Lapangan Olahraga Terbuka	Unit	600	620	741	760	800	810
9	Lapangan Olahraga Tertutup	Unit	19	19	20	21	23	23

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, 2018

Dari Tabel 2.92 di atas, terlihat bahwa perkembangan prestasi olahraga masih sangat minim, pada tahun 2012 ada 6 cabang olahraga berprestasi, meningkat sedikit menjadi 8 cabang olahraga pada tahun 2017. Sedangkan atlet yang berprestasi meningkat dari 30 orang di tahun 2012 menjadi 50 orang di tahun 2017.

Beberapa penyebab prestasi olahraga Aceh belum dapat bersaing di level nasional dan internasional antara lain: (1) belum profesionalnya pengelolaan keolahragaan, (2) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung (3) belum optimalnya pembinaan atlet, (4) sistem rekrutmen atlet yang belum profesional, serta (5) rendahnya kualitas pelatih.

2.3.2.2.12. Kebudayaan

Budaya sebuah bangsa akan menentukan nasib suatu bangsa dimasa yang akan datang. Nilai-nilai budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dan karakteristik suku dan bahasa, karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku/ anak suku dan bahasa di Aceh. Yang terdiri dari suku dan bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, dan Simeulue. Jika ditinjau dari segi kelompok pendaptan, kareakteristik sosial budaya masyarakat aceh dapat diklasifikasi dalam golongan kaya (ureung kaya), golongan berkecukupan (ureung sep pajoh), golongan miskin (ureung gasin), golongan melarat atau fakir (ureung papa).

Berdasarkan pengalaman di beberapa gampong dan mukim Aceh, budaya meusaraya (gotongroyong) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut.

- masalah bersama atau kepentingan bersama diselesaikan secara bersama (lingkup keluarga, lingkungan tempat tinggal hingga negara).
- keputusan bersama
- Berbagi sumberdaya
- Bekerja bersama disertai berbagai peran
- Partisipatif
- Murah dan mudah

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melakukan promosi guna memperkenalkan budaya Aceh yang beragam kepada masyarakat lokal secara umum dan wisatawan secara terkhusus. Penyelenggaraan festival ini bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah semata, namun juga memperkenalkan beberapa kebudayaan Aceh yang berbasis islami melalui festival seni. Dalam kurun waktu 2013-2016 terlihat bahwa festival seni yang dilakukan sangat beragam dengan rata-rata jumlah festival

sebanyak 5 hingga 25 festival, dengan jumlah festival terbanyak dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 25 festival.

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pengembangan cagar budaya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya. Bentuk kegiatannya dapat berupa konservasi, penerbitan buku, dokumentasi digital, workshop, dll. Aceh terdapat sejumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya di Aceh yang terdiri dari: naskah kuno, koin emas, peralatan emas, makam, mesjid, tugu, rumah tradisional, monumen, benteng, perpustakaan, bangunan/gedung, tempat bersejarah, arca, gua, dll yang belum dilestarikan. Selama tahun 2013 sampai tahun 2016 telah dilakukan pelestarian terhadap 35 situs cagar budaya, 210 buah naskah kuno, 410 buah koin emas dan 4 buah peralatan emas. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, digitalisasi naskah kuno, workshop dan pembiayaan juru pelihara situs sebagai kegiatan rutin tahunan, selain konservasi yang dilakukan di Museum Aceh. Pada akhir tahun 2016 jumlah benda dan situs kawasan cagar budaya sebanyak 806 buah.

2.3.2.2.13. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup rakyat. Minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan terus meningkat, tahun 2013 jumlah pengunjung sebesar 230.400 orang meningkat menjadi 385.269 orang pada tahun 2017 dengan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 55.575 judul dan 247.082 eksemplar pada tahun 2017.

2.3.2.2.14. Kearsipan

Dalam bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat berada pada masyarakat luas, naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Aceh maupun di luar Aceh bahkan sampai keluar negeri. Arsip merupakan memori kolektif bangsa karena dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dibangun tempat penyimpanan arsip (DEPO) di beberapa wilayah untuk mendukung program penyelamatan arsip.

Selama periode tahun 2013-2017, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku cenderung meningkat dari tahun 2013 (11,11 persen) menjadi 21,82 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran perangkat daerah untuk mengelola arsip secara baku sudah mengacu kepada standar pelayanan minimum.

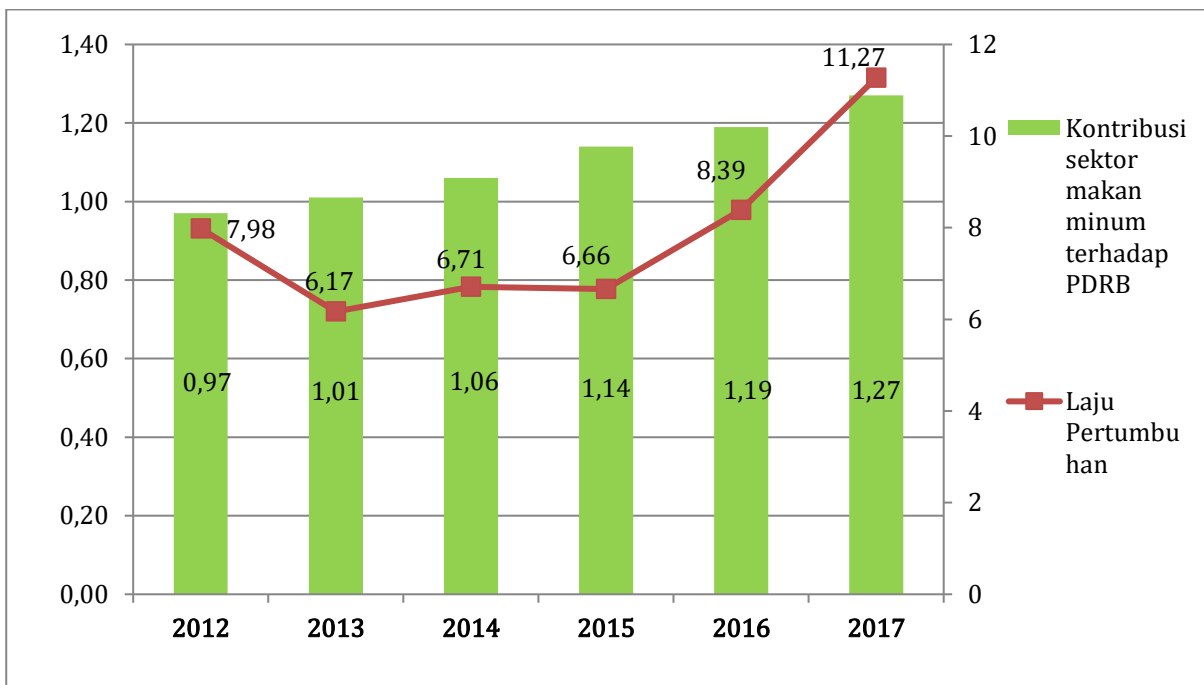
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian

2.3.3.1. Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini dapat menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus. Sektor ini jugadapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata.

Dalam kurun waktu 2012-2017, kontribusi sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan kontribusinya setiap tahun. Diawali pada tahun 2012 dengan kontribusi sebesar 0,97 persen meningkat menjadi 1,27 persen pada tahun 2017. Selain kontribusinya, laju pertumbuhan sektor ini juga mengalami kecenderungan meningkat, dimana laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 (11,27 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017 (diolah)

Gambar 2.32. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Aceh (Persen), Tahun 2012-2017

Pada tahun 2012 tercatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1,05 juta orang dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 2,36 juta orang dengan rata-rata peningkatan sebesar 20 persen pertahun. Jumlah kunjungan wisata ke Aceh masih didominasi oleh wisatawan nusantara dengan persentase mencapai 96,79 sedangkan persentase wisatawan mancanegara relatif kecil yaitu baru mencapai 3,31 persen. Namun demikian, perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara semakin meningkat mencapai rata-rata 16,49 persen pertahun. Sebagian besar kunjungan wisatawan mancanegara berasal dari Malaysia yang berkunjung ke beberapa destinasi wisata religi dan budaya yang ada di Aceh. Meskipun dari jumlah kunjungannya meningkat, namun rata-rata lama kunjungan wisatawan masih tergolong rendah. Pada tahun 2017 lama kunjungan wisatawan mancanegara hanya 2,58 hari, sedangkan wisatawan nusantara selama 1,95 hari.

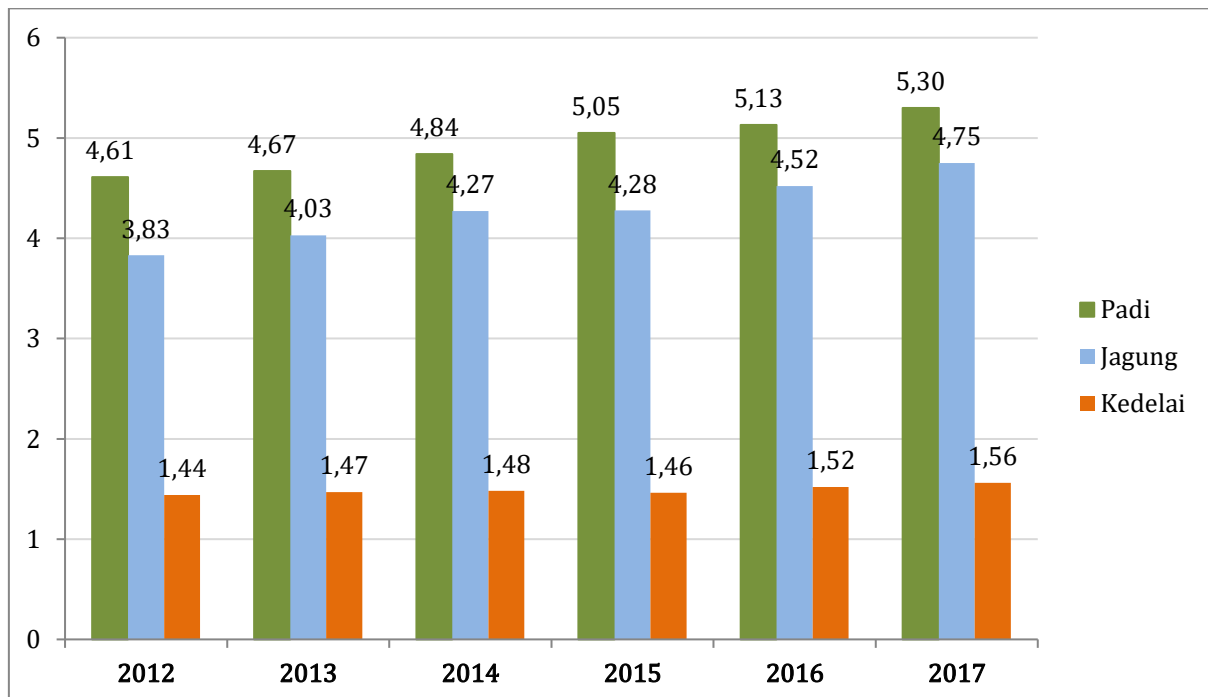
Selain infrastruktur, permasalahan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih menjadi kendala utama dalam peningkatan sektor pariwisata. SDM pariwisata yang berperan sebagai pemandu wisata masih kurang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sehingga langkah pendidikan vokasional yang terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) akan memberikan andil yang besar terhadap pengembangan SDM kepariwisataan di Aceh. Sedangkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata di Aceh dengan *brand* "The Light of Aceh" atau disebut juga "Cahaya Aceh" belum mampu dioptimalkan.

2.3.3.2. Pertanian

Pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,17 persen dari 25,42 persen tahun 2012 menjadi 29,63 persen tahun 2017 membuktikan bahwa sektor rill ini menjadi *prime mover* atau memberi daya ungkit yang besar dalam perekonomian Aceh. Bila dilihat secara lebih mendalam bahwa sumbangan kontribusi sektor tersebut meliputi beberapa sub sektor utama diantaranya: pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

2.3.3.2.1. Pertanian Tanaman Pangan

Persentase kontribusi pertanian tanaman pangan Aceh mencapai 4,80 hingga 5,52 persen. Namun bila dilihat dari perkembangannya sub sektor ini memiliki tren fluktuatif. Kondisi naik turunnya kontribusi sektor ini sangat dipengaruhi oleh pencapaian produksi dan produktivitas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh, luas lahan sawah di Aceh 307.417 Ha yang terdiri dari luas lahan beririgasi seluas 191.721,5 Ha dan non irigasi Aceh berjumlah 115.696 Ha pada tahun 2016.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.33. Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Utama Aceh (ton/ha), Tahun 2012-2017

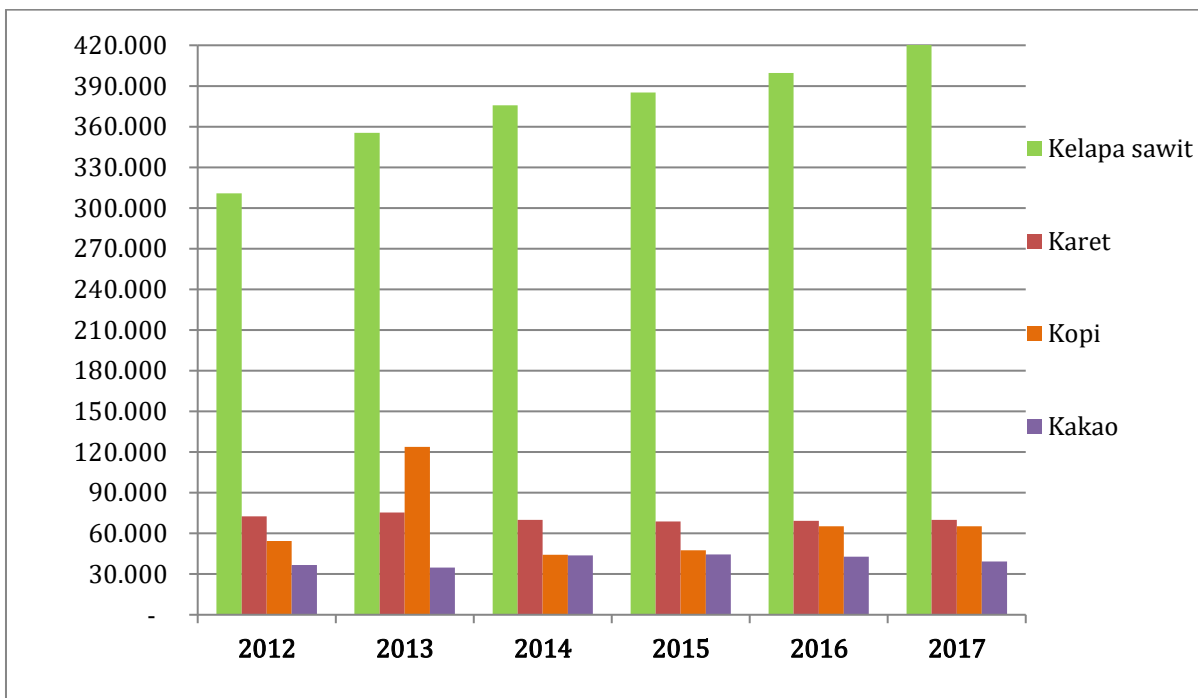
Capaian produktivitas tanaman pangan utama Aceh yang diuraikan pada Gambar 2.36, memberikan informasi bahwa komoditas padi, jagung, dan kedelai merupakan komoditas utama yang cocok dibudidayakan di Aceh. Berdasarkan produktivitasnya, dua komoditas utama yakni padi dan jagung memiliki nilai produktivitas meningkat dari tahun ke tahun.

Pencapaian padi tahun 2012 sebesar 4,61 ton/ha dan pada tahun 2017 sebesar 5,30 ton/ha. Sementara itu, tahun 2017 capaian luas tanam padi sebesar 461.142 Ha atau 90,06 persen dari target 512.000 Ha. Meskipun produktivitas padi meningkat, namun bila dibandingkan dengan produktivitasnya dengan Pulau Jawa produktivitas tersebut masih tergolong rendah. Saat ini produktivitas padi di Pulau Jawa mencapai di atas 6 ton/ha. Untuk komoditas jagung, produktivitas yang diperoleh pada tahun 2012 sebesar 3,83 ton/ha dan tahun 2017 sebesar 4,75 ton/ha. Demikian juga produktivitas komoditas kedelai mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 1,52 ton/ha menjadi 1,56 ton/ha pada tahun 2017.

Kendala yang masih dihadapi pada subsektor pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi diantaranya adalah ketersediaan pupuk bersubsidi yang memenuhi 54 persen dari kebutuhan. Setiap tahunnya dibutuhkan 150.000 ton pupuk hanya untuk tanaman padi saja untuk mencapai target luas tanam. Sementara itu, kemampuan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pupuk rata-rata sebesar 80.000 ton. Disamping itu ketersediaan benih unggul masih menjadi kendala dalam distribusinya, masih ada sebagian petani menggunakan bibit yang belum bersertifikasi. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan juga masih menjadi kendala bagi petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitasnya

2.3.3.2. Perkebunan

Perkebunan menyumbangkan kontribusi sebesar 6,63 sampai 7,84 persen dalam periode 2012-2017. Persentase kontribusi tersebut memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan persentase kontribusi sub sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas utama di Aceh diantaranya kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh Tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 2.36.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017 (diolah)

Gambar 2.34. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Aceh (ton), Tahun 2012-2017

Secara terperinci, perkembangan jumlah produksi kelapa sawit Aceh terus meningkat dari tahun 2012 hingga 2017. Pada tahun 2012 produksi kelapa sawit sebesar 310.765 ton dan pada tahun 2017 sebesar 426.438 ton. Sedangkan komoditas kopi memiliki jumlah produksi yang berfluktuatif dimana puncak produksi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 123.764 ton dan produksi terendah pada tahun 2014 (44.343 ton). Begitu juga dengan komoditas karet dan kakao dengan produksi tertinggi berturut-turut pada tahun 2017 dan 2015 yaitu sebesar 70.001 dan 68.809 ton.

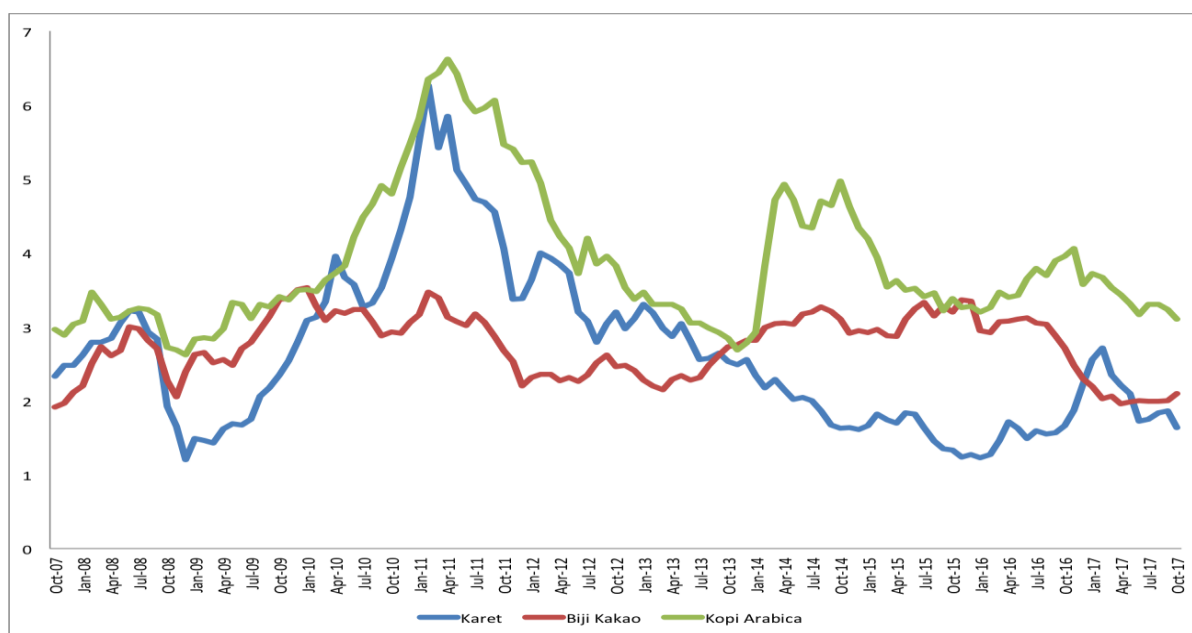
Dalam pembangunan sektor perkebunan, beberapa permasalahan yang sering dihadapi diantaranya kurang intensifnya pemeliharaan terhadap komoditas perkebunan, penggunaan bibit yang tidak bersertifikat serta SDM petani yang masih kurang adaptif terhadap penggunaan teknologi pertanian dan perkebunan. Selain itu juga fluktuasi harga komoditas perkebunan masih menjadi permasalahan yang dapat mempengaruhi rendahnya daya saing komoditas perkebunan tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan kualitas SDM petani dan ekstensifikasi pertanian serta menjaga kestabilan harga komoditas perkebunan melalui sistem resi gudang.



Sumber : <http://www.indexmundi.com>

Gambar 2.35. Perkembangan Harga Global terhadap Komoditi Minyak Kelapa, Minyak Sawit dan Kopra selama 10 tahun terakhir 2007-2017 (dalam USD/Ton)

Perkembangan harga komoditas global masih tertekan seiring dengan belum membaiknya perkembangan perekonomian global sebagaimana terlihat pada Gambar 2.38 dan Gambar 2.39. Namun demikian beberapa komoditas seperti kakao dan kelapa terlihat mengalami perbaikan. Sedangkan komoditas karet harganya belum banyak mengalami perubahan masih berada di level bawah.



Sumber : <http://www.indexmundi.com>

Gambar 2.36. Perkembangan Harga Global terhadap Komoditi Karet, Kakao dan Kopi Arabica selama 10 tahun terakhir 2007-2017 (dalam USD/Ton)

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2012–2016) kondisi luasan tanaman-tanaman perkebunan rakyat dan perkebunan besar terutama komoditas unggulan Aceh terjadi perubahan yang signifikan dimana kondisi luasan ada yang bertambah dan juga terjadi stagnasi dikarenakan motivasi petani terhadap tanaman tertentu tergantung dari permintaan pasar dan harga yang tinggi

Tabel 2.93. Luas Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017

Besar	Rakyat									
	2012		2013		2014		2015		2016	
	Rakyat	Besar	Rakyat	Besar	Rakyat	Besar	Rakyat	Besar	Rakyat	Besar
Simeulue	34.281	-	32.727	-	34.350	-	35.817	-	39.933	-
Aceh Singkil	32.117	33.839	33.173	33.839	44.551	33.331	44.495	33.331	45.248	33.331
Aceh Selatan	40.500	2.301	38.102	2.301	38.977	3.686	39.728	3.686	40.875	3.686
Aceh Tenggara	47.697	-	48.373	-	44.793	-	44.885	-	36.744	-
Aceh Timur	64.064	64.390	64.232	50.970	70.408	40.413	70.841	40.413	71.380	40.413
Aceh Tengah	68.846	-	64.659	-	58.432	-	58.773	-	56.559	-
Aceh Barat	35.547	23.061	37.178	23.128	38.134	56.259	40.167	56.259	40.524	56.259
Aceh Besar	29.708	7	30.309	7	31.240	12	31.566	12	31.677	12
Pidie	33.923	10	34.348	10	34.746	-	34.927	-	35.581	-
Bireuen	34.308	2.221	35.988	2.221	36.413	2.138	39.169	2.138	39.163	2.138
Aceh Utara	69.084	12.701	67.051	12.701	67.717	17.149	68.218	17.149	70.347	17.149
Aceh Barat Daya	30.128	3.567	29.668	3.567	28.151	6.032	28.021	6.032	28.007	6.032
Gayo Lues	37.106	-	37.484	-	37.484	-	37.571	-	37.788	-
Aceh Tamiang	45.053	35.827	44.976	35.857	45.236	38.824	45.215	38.824	44.559	38.824

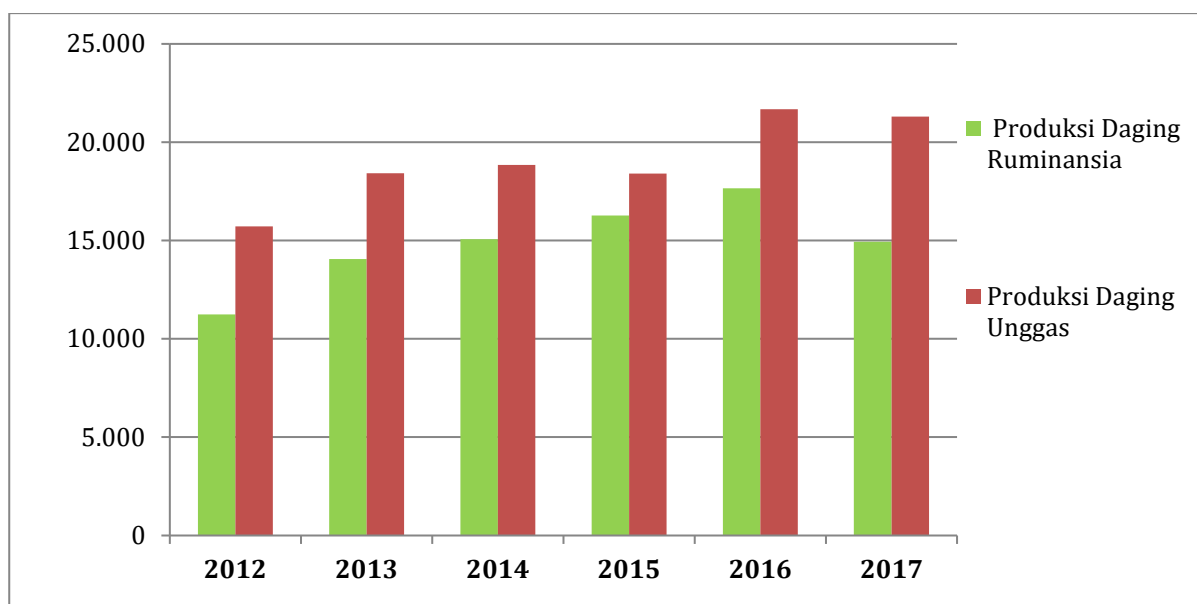
Besar	Rakyat									
	2012		2013		2014		2015		2016	
	Rakyat	Besar	Rakyat	Besar	Rakyat	Besar	Rakyat	Besar	Rakyat	Besar
Nagan Raya	58.558	11.079	60.368	42.036	60.370	44.496	63.081	44.496	72.022	44.496
Aceh Jaya	37.612	3.170	38.843	3.170	38.843	3.399	39.942	3.399	39.497	3.399
Bener Meriah	54.914	-	56.452	-	54.989	-	55.468	-	54.379	-
Pidie Jaya	20.201	167	20.225	167	20.450	108	20.655	108	22.290	108
Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sabang	7.313	-	5.766	-	6.038	-	5.988	-	5.991	-
Langsa	3.179	-	3.082	-	1.843	-	1.799	-	1.798	-
Lhokseumawe	1.445	-	1.307	-	1.264	-	1.327	-	1.343	-
Subulussalam	22.445	6.092	22.645	6.108	23.979	7.390	23.567	7.390	24.299	7.390
Total	808.029	198.432	806.956	216.081	818.408	253.237	831.218	253.237	840.004	253.237

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2018 (diolah)

Perkembangan perkebunan Aceh tahun 2016 dapat digambarkan bahwa komoditas karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, karet, dan kakao masih tinggi luasannya karena masih dibudidayakan petani. Luas seluruh tanaman perkebunan di Aceh baik perkebunan rakyat dan perkebunan besar tahun 2016 seluas 1.093.241 ha terdiri dari perkebunan rakyat 840.004 hektar dan perkebunan besar 253.237 hektar. Luasan perkebunan tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang luasnya sebesar 806.956 hektar dengan rincian perkebunan rakyat 808.004 hektar dan perkebunan besar 198.432 hektar. Kabupaten yang memiliki luas perkebunan rakyatnya 5 (lima) besar terluas antara lain Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Nagan Raya, dan Bener Meriah. Sedangkan luasan perkebunan besar di kabupaten peringkat 5 (lima) besar adalah Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Tamiang. Komoditas yang banyak ditanam adalah kelapa sawit dan kopi.

2.3.3.2.3. Peternakan

Kontribusi sub sektor peternakan mengalami peningkatan dari tahun 2012-2017. Kontribusi sektor ini pada tahun 2012 sebesar 3,47 persen dan meningkat mencapai 3,94 persen pada tahun 2017. Peningkatan nilai kontribusi sub sektor peternakan berasal dari produksi daging, baik ternak ruminansia maupun non ruminansia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Aceh produksi daging ternak ruminansia mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar 11.250 ton menjadi 17.658 ton, sedangkan tahun 2017 produksi daging ternak ruminansia menurun menjadi 14.930 ton. Kecenderungan peningkatan produksi dan konsumsi daging ternak ruminansia terjadi pada saat-saat tertentu seperti meugang, kenduri dan pesta rakyat dengan komoditas utama sapi dan kerbau. Keadaan yang sama juga terjadi pada non ruminansia, dimana produksi dagingnya cenderung meningkat dari 15.719 ton pada tahun 2012 menjadi 21.670 ton pada tahun 2016, sedangkan tahun 2017 turun menjadi 21.306 ton. Meskipun produksi daging pada kedua kelompok ternak cukup tinggi, namun secara jumlah populasi masih sangat rendah karena sebagiannya merupakan peternakan rakyat dengan jumlah populasi yang sangat terbatas. (Gambar 2.37).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.37. Perkembangan Produksi Daging Ternak Ruminansia (ton) Aceh, Tahun 2012-2017

Jumlah populasi ternak juga menjadi indikator pencapaian pembangunan sektor peternakan. Perkembangan jumlah populasi ternak sapi dan kerbau di Aceh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir terdapat pada Tabel 2.94 berikut.

Tabel 2.94. Perkembangan Populasi Ternak Sapi dan Kerbau per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017

Kabupaten/ Kota	Tahun											
	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau
Simeulue	1.881	34.256	1.039	22.412	2.038	35.120	2.764	35.820	3.564	38.505	3.467	26.700
Aceh Singkil	3.907	751	3.709	745	3.790	770	4.308	844	4.381	938	4.626	862
Aceh Selatan	1.982	6.399	1.944	5.142	1.858	6.148	2.293	6.185	2.232	7.799	3.444	7.324
Aceh Tenggara	5.859	456	3.628	352	4.705	493	4.755	543	5.019	593	4.019	363
Aceh Timur	70.874	11.455	48.444	4.082	51.428	14.273	69.616	10.412	72.101	11.791	65.468	13.628
Aceh Tengah	7.044	13.244	5.480	11.918	6.886	12.398	8.089	12.728	8.351	13.861	9.479	13.047
Aceh Barat	4.195	20.082	4.695	18.863	5.323	19.447	5.968	22.893	4.814	21.769	5.252	24.553
Aceh Besar	72.874	16.139	60.221	10.864	89.421	25.064	108.084	30.133	111.060	32.530	138.038	31.361
Pidie	55.513	9.720	46.252	6.285	61.408	10.807	66.869	10.836	72.390	11.756	64.455	11.328
Bireuen	58.366	3.406	49.074	1.363	56.422	4.124	47.980	1.946	67.741	4.529	62.463	2.516
Aceh Utara	90.388	4.510	65.307	2.142	92.365	4.619	105.214	5.426	107.119	5.902	102.256	5.789
Aceh Barat Daya	2.010	6.375	1.167	3.558	1.967	6.498	2.169	4.200	2.544	4.710	2.181	3.306
Gayo Lues	5.524	19.402	5.078	9.185	5.126	8.698	5.954	9.032	6.485	5.727	8.276	6.299
Aceh Tamiang	54.672	457	47.984	276	62.836	582	68.169	582	76.984	674	76.461	284
Nagan Raya	9.032	9.207	9.398	8.321	9.587	8.629	11.021	9.100	11.195	10.495	11.074	10.069
Aceh Jaya	17.355	3.226	13.084	2.387	15.370	3.475	19.276	4.325	20.350	5.391	17.479	5.277
Bener Meriah	968	2.351	903	2.197	1.677	2.876	3.035	3.790	3.876	5.710	3.942	5.467
Pidie Jaya	19.625	2.071	17.229	1.463	18.967	2.333	21.393	2.375	21.580	2.554	21.636	2.316
Banda Aceh	1.915	99	2.194	40	1.947	79	2.196	36	2.661	48	2.048	52
Sabang	2.336	108	2.052	42	2.678	111	3.076	115	3.198	129	3.025	127
Langsa	7.094	316	5.487	155	6.572	155	7.328	167	7.447	187	7.168	180
Lhokseumawe	9.548	119	7.858	36	7.044	106	8.028	6	9.642	77	8.819	67
Subulussalam	2.209	145	1.940	122	1.947	107	2.702	253	2.895	295	2.622	280
Total	505.171	164.294	404.221	111.950	511.362	166.903	580.287	171.747	627.629	185.970	627.698	171.195

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2018 (diolah)

Tabel 2.94 menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan jumlah populasi sapi dan kerbau yang drastis di tahun 2013. Jumlah sapi pada tahun 2012 sebanyak 505.171 ekor menjadi 404.221 ekor pada tahun 2013 atau terjadi penurunan jumlah populasi sebesar 20 persen. Sedangkan kerbau mengalami penurunan dari 164.294 ekor pada tahun 2012 menjadi 111.950 ekor pada tahun 2013. Besarnya penurunan populasi pada tahun 2013 dikarenakan banyaknya kasus infeksi parasit yang terjadi pada tahun 2012 sebanyak 10.248. Namun populasi ternak sapi dan kerbau terus meningkat hingga tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,63 persen sapi dan 4,09 persen ternak kerbau. Adapun populasi sapi dan kerbau terbanyak terdapat di Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah 138.038 ekor dan 31.361 ekor pada tahun 2017

Capaian keberhasilan dari sub sektor peternakan bukan hanya terletak pada kemampuan memproduksi daging semata, namun juga ditentukan dari capaian produksi telur dan susu yang dihasilkan oleh hewan ternak tersebut. Bila dilihat dari perkembangannya, produksi telur dan susu yang dihasilkan dalam kurun waktu 2012-2017 sangat berfluktuasi. Produksi susu tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebanyak 140 ton, sedangkan puncak produksi telur tertinggi terjadi pada tahun 2012 (18.385 ton). Ketidakstabilan produksi susu dipengaruhi oleh belum berkembangnya pengelolaan susu di sektor hilir melalui ketersediaan industri susu, sehingga menyebabkan ketersediaan susu sapi perah Aceh menjadi belum cukup stabil. Sedangkan telur juga belum menunjukkan perkembangan produksi yang cukup baik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan telur harus dipasok dari Sumatera Utara.

Permasalahan utama pada sub sektor peternakan yakni terbatasnya ketersediaan bibit ternak disebabkan oleh belum optimalnya sistem reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB); Selanjutnya, permasalahan pengembangan ternak unggas diantaranya: 1) terbatasnya populasi ayam petelur karena sulitnya memperoleh bibit ayam petelur dan mahalnya pakan ternak; 2) sistem pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak berorientasi bisnis; dan 3) belum adanya industri pakan ternak lokal. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan penyediaan bibit ternak ruminansia berkualitas serta pengembangan industri pakan ternak lokal melalui kawasan peternakan terpadu.

2.3.3.3. Kehutanan

Luas kawasan hutan Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh adalah seluas 3.575.243,13 Ha. Kawasan hutan Aceh berdasarkan luas dan fungsi Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95.
Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya Tahun 2017

Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persentase
Hutan Konservasi	1.057.628	29,68
Hutan Lindung	1.794.350	50,35
Hutan Produksi Tetap (HP)	551.073	15,46
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	145.384	4,08
Hutan Produksi Konversi	15.378	0,43
Jumlah	3.563.813	100

Sumber: SK Menteri LHK Nomor 859/2016

Tabel 2.95, memberikan informasi kawasan hutan Aceh didominasi oleh hutan lindung seluas 1.788.266 ha atau 50,26 persen dan hutan konservasi seluas 1.058.144 atau 29,74 persen dari total luas hutan.

Luas kawasan hutan Aceh sebesar 60 persen dari luas total daratan sebesar 5.888.087 ha. Ditinjau dari peran hutan dalam mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan maka kondisi hutan Aceh perlu dijaga dengan baik.

A. Kerusakan Kawasan Hutan

Persentase kerusakan hutan di Aceh tahun 2013 sampai 2017 berfluktuasi. Kerusakan hutan tertinggi pada tahun 2015 mencapai 12.236 ha atau 0,34 persen dari total luas kawasan hutan. Persentase kerusakan hutan di Aceh disajikan pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96.
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan di Aceh Tahun 2013-2017

Persentase Kerusakan Hutan			
Tahun	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan	Persentase
2013	3.244	3.557.928	0,09
2014	2.566	3.557.928	0,07
2015	12.236	3.557.928	0,34
2016	6.015	3.557.928	0,17
2017	1.590	3.563.813	0,04

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2018

Penyebab kerusakan hutan antara lain perambahan permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan dan *Illegal Logging*. Kerusakan kawasan hutan dapat menimbulkan beragam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Dalam rangka menekan laju kerusakan hutan Pemerintah Aceh telah melakukan operasi pemberantasan *Illegal logging* dan tertanganinya kasus *illegal logging*, operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Kerusakan kawasan hutan juga berakibat berkurangnya habitat satwa. Beberapa organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa laju berkurangnya populasi satwa dilindungi atau satwa kunci di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) pada tahun 2011 – 2017 mencapai angka cukup tinggi. Setidaknya populasi gajah yang hilang mencapai 14 persen, sedangkan harimau mencapai 4 persen, dan orangutan sebesar 4 persen.

Berkurangnya satwa-satwa kunci tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya konflik dengan manusia secara terus menerus, baik secara tersembunyi maupun secara terbuka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat bahwa konflik antara orangutan dengan manusia pada tahun 2017 adalah berjumlah 20 kasus atau lebih besar dibanding tahun 2015 yang hanya sebanyak 17 kasus. Konflik juga terjadi antara manusia dengan harimau. Pada tahun 2017 BKSDA menghimpun data konflik tersebut mencapai 10 kejadian, padahal pada tahun 2016 hanya berjumlah 1 kejadian.

B. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis di Aceh cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai 2017. Lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2017 seluas 23.876 ha atau 24,10 persen dari total luas hutan dan lahan kritis. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Aceh tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97.
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2013-2017

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis			
Tahun	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Luas total hutan dan lahan kritis (Ha)	Persentase
2013	38.417	101.384,19	37,89
2014	31.282	164.089,00	19,06
2015	23.876	99.062,00	24,10
2016	23.876	99.052,00	24,10
2017	23.876	99.052,00	24,10

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2018

*Mengacu ke data 2016 karena data 2017 masih dalam Perhitungan DLHK Aceh

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas rehabilitasi hutan dan lahan tersebut memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah: 1) identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting; 2) melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan; 3) keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya; 4) mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat; dan 5) memberikan jaminan tidak adanya gangguan bagi lahan yang telah direhabilitasi

C. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan dalam struktur PDRB termasuk ke dalam sektor pertanian yang terdiri dari 5 (lima) sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub sektor kehutanan dan subsektor perikanan, PDRB Aceh beberapa tahun terakhir didominasi oleh Sektor Pertanian dan mempunyai trend peningkatan yang menggembirakan. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB berdasarkan ADHB tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98.
Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kontribusi Sub Sektor Kehutanan	2.175.133.696	1.406.639.685	2.983.387.749	5.366.091.217	6.522.950.204
PDRB Dengan Migas	1.655.743	1.776.030	1.824.864	1.926.487	1.991.797
PDRB Tanpa Migas	1.655.743	1.776.030	1.824.864	1.926.487	1.991.797
Kontribusi Terhadap PDRB dengan Migas	1,36	1,39	1,42	1,40	1,36
Kontribusi Terhadap PDRB Tanpa Migas	1,56	1,55	1,47	1,45	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Tabel 2.98, memberikan informasi kontribusi sub sektor kehutanan mengalami peningkatan dari tahun 2013 senilai Rp. 2.175.133.696 menjadi Rp. 6.522.950.204 pada tahun 2017. selanjutnya Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2017 dengan migas sebesar 1,36 persen.

D. Rasio Luas Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang fungsi utamanya melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Penetapan luas kawasan hutan dan perairan yang secara khusus dialokasikan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan telah dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan hutan lindung melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan Aceh yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Aceh. Secara rinci luas kawasan lindung Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99.
Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan, 2012-2017

Tahun	Luas kawasan lindung (ha)	Total luas kawasan hutan (ha)	Rasio
2013	1.790.256,00	3.562.291,00	0,50
2014	1.744.240,00	3.557.916,00	0,49
2015	1.788.265,00	3.557.928,00	0,50
2016	1.788.265,00	3.557.928,00	0,50
2017	1.794.350,00	3.563.813,00	0,50

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2018

E. Penyelesaian Konflik Tenurial

Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Jenis konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Aceh seperti batas kawasan, pemilikan dan penguasaan lahan, perizinan, akibat tumpang tindih kebijakan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat hukum adat dan perhutanan sosial. Pencegahan konflik tenurial dalam kawasan hutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melalui UPTD KPH dengan upaya pemetaan potensi konflik, sosialisasi penyuluhan, pemantapan batas kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar hutan.

2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN

Sistem kelistrikan di Aceh terdiri dari sistem interkoneksi 150 kV Sumut-Aceh dan sistem isolated dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem kelistrikan Aceh di pasok oleh sistem Sumbagut dan sebagian kecil masih berada di daerah Isolated (Tabel 2.100).

Data beban puncak sistem grid 150 kV di wilayah Banda Aceh, Sigli, Lhokseumawe, Langsa dan Meulaboh pada Juni 2017 adalah 374 MW, sedangkan pada sistem Isolated beban puncak pada juni 2017 adalah sebesar 115 MW (PLN Aceh 2017).

Tabel 2.100.
Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN Menurut Jenisnya di Aceh Tahun 2012-2017

Tahun	Keterangan	PLTU	PLTD	PLTA	Pembangkit Lainnya	Total
2012	Kapasitas (MW)	0	226.75	1,75	0	228.50
	Jumlah (Unit)	0	225	4	0	229
2013	Kapasitas (MW)	0	197.98	2,13	0	200.11
	Jumlah (Unit)	0	216	4	0	220

Tahun	Keterangan	PLTU	PLTD	PLTA	Pembangkit Lainnya	Total
2014	Kapasitas (MW)	220	197.98	2,13	0	420.11
	Jumlah (Unit)	2	183	4	0	189
2015	Kapasitas (MW)	220	210.38	2,13	0	432.51
	Jumlah (Unit)	2	203	4	0	209
2016	Kapasitas (MW)	180	166,1	0	187,9	534
	Jumlah (Unit)	2	2	-	3	7
2017	Kapasitas (MW)	180	60,1	0	249,9	490
	Jumlah (Unit)	2	3	-	3	8

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2018-2027

Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem inter koneksi 150 kV meliputi pantai Timur Provinsi Aceh serta Meulaboh dan sekitarnya. Sedangkan wilayah pantai barat lainnya dan tengah Aceh serta kepulauan masih dipasok PLTD berbahan bakar *High Speed Diesel* (HSD) melalui sistem kelistrikan 20 kV.

Pada *system Isolated* 20 kV yang meliputi sistem Calang (Aceh Jaya), sistem Blang Pidie (Aceh Barat Daya), Sistem Tapak Tuan (Aceh Selatan) dan Sistem Kuta Fajar, Sistem Blangkejeren (Gayo Lues), Sistem Takengon (Aceh Tengah) terdapat sewa genset untuk mengatasi devisa pada sistem Isolated tersebut. Sistem Isolated di luar pulau Sumatera adalah Kota Sabang, sistem Sinabang (Simeulue) dan sistem kecil lainnya. Peta Sistem Kelistrikan Provinsi Aceh sebagaimana disajikan pada Gambar 2.38.



Sumber : RUPTL PLN 2017-2026

Gambar 2.38. Peta Sistem Kelistrikan Provinsi Aceh

Potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Aceh terdiri dari potensi air, panas bumi, minyak bumi, gas dan batubara. Diperkirakan potensi sumber tenaga air mencapai 1.655 MW yang tersebar di 18 lokasi di wilayah Aceh. Potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik yang diperkirakan sekitar 1.307 Mwe yang

tersebar di 19 lokasi. Adapun potensi minyak bumi dan gas bumi yang dimiliki adalah 151 MMSTB dan 6,93 TSCF. Sedangkan potensi batubara di Provinsi Aceh sebesar 452 juta ton⁷.

Terdapat juga potensi pembangkit listrik tenaga Gas Weehed dengan kapasitas sekitar 140 MW. Potensi ini dapat dikembangkan apabila telah diselesaikan studi kelayakan dan studi penyambungan sistem yang telah diverifikasi oleh PLN, mempunyai kemampuan pendanaan, dan harga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sampai tahun 2017 diperlukan pembangunan pusat pembangkit di Provinsi Aceh dengan rekapitulasi dan rincian seperti pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101.
Rencana Pembangunan Pembangkit

No.	Sistem Tenaga Listrik	Jenis	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
1	Sumbagut	PLTG	MPP Banda Aceh	55	2018	PPA	PLN
2	Sumbagut	PLTA	Krueng Isep	20	2018/2019	Konstruksi	Swasta
3	Sumatera	PLTBm	Tanjung Semanto	9,9	2019	PPA	Swasta
4	Sumatera	PLTG	MPP Banda Aceh 2	110	2019	PPA	PLN
5	Sumatera	PLTMG	Sumbagut-2 Peaker (Arun Ekspansi)	240	2019	Konstruksi	PLN
6	Sumatera	PLTM	Lawe Sikap	7	2019	Konstruksi	Swasta
7	Sumatera	PLTBg	Geso	3	2020	PPA	Swasta
8	Sumatera	PLTBm	Tamiang	10	2020	PPA	Swasta
9	Sumatera	PLTA	Peusangan 1-2	43&45	2020/2021	Konstruksi	PLN
10	Sumatera	PLTU	Meulaboh (Nagan raya)#3,4 MT	400	2020/2021	PPA	Swasta
11	Sumatera	PLTM	Nengar	2022	2021	PPA	Swasta
12	Sumatera	PLTA	Kumbih-3	45	2022	Committed	PLN
13	Sumatera	PLTU	Hydro Tersebar Aceh	582,2	2021-2025	Rencana	Swasta
14	Sumatera	PLTP	PLTP Tersebar Aceh	105	2023-2024	Rencana	Unallocated
15	Sumatera & Isolated Aceh	PLTS	PLTS Tersebar Aceh	19	2020	Proses PPA	Swasta
16	Sabang	PLTP	Jaboi (FTP2)	10	2019/2020	PPA	Swasta
17	Sabang	PLTMG	Sabang	6	2025/2026	Rencana	PLN
18	Sinabang	PLTMG	Sinabang-1	6	2019/2020	Rencana	PLN
19	Sinabang	PLTBn	Sinabang/Siemeulue	5	2019	Rencana	Swasta
20	Sinabang	PLTMG	Sinabang-2	3	2024	Rencana	PLN
Total				1.725			

Sumber: PLN Aceh, 2018

Penerangan listrik untuk pelanggan rumah tangga di Aceh mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dilihat dari sumber penerangan, pelanggan rumah tangga terbesar masih menggunakan sumber penerangan dari PLN dengan persentase 98,59 persen, Non PLN 0,43 dan sumber penerangan bukan listrik PLN 0,98 persen (Tabel 2.102).

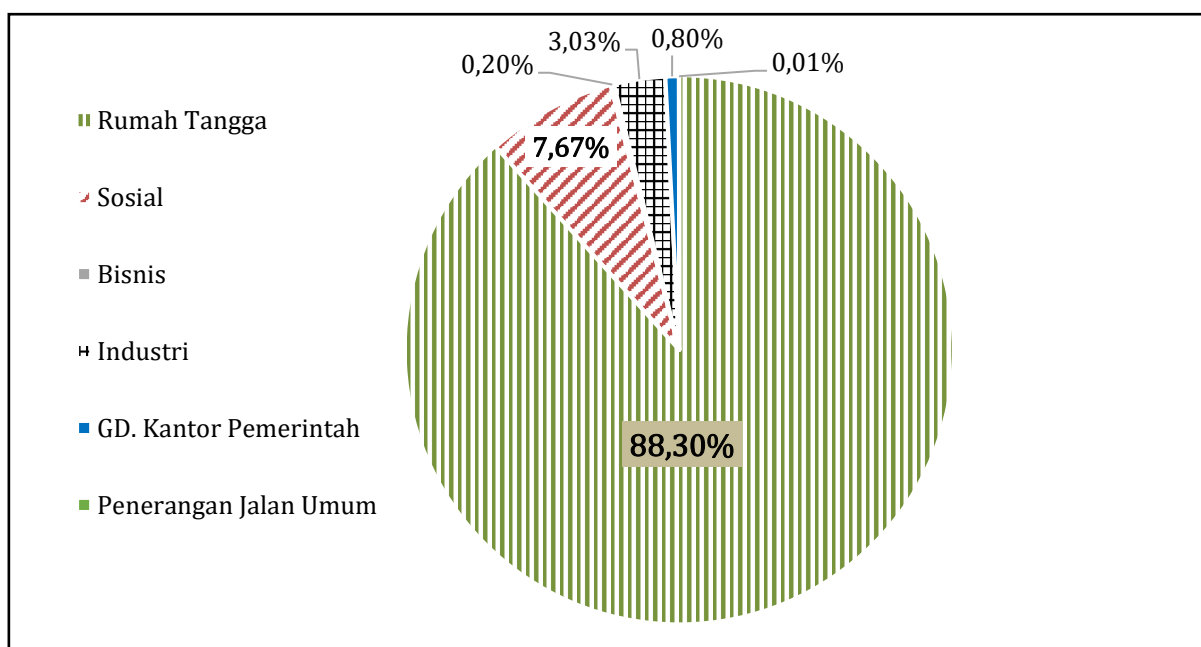
Tabel 2.102.
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan di Aceh Tahun 2012-2017

Sumber Penerangan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PLN	95,2	96,19	96,97	97,48	97,88	98,59
Non PLN	1,35	1,07	0,59	0,96	0,86	0,43
Bukan Listrik	3,3	2,75	2,45	1,56	1,26	0,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

B. Persentase Daya Tersambung Per Sektor Pelanggan

Berdasarkan Jumlah kelompok pelanggan PLN di Aceh s.d Juni 2017 adalah 1.322.947 pelanggan dengan persentase daya tersambung per sektor pelanggan paling besar adalah kelompok rumah tangga dengan persentase 88,94 persen dengan jumlah pelanggan 1.176.690. Sedangkan Kelompok pelanggan paling rendah di sektor penerangan Jalan Umum yaitu 0,11 persen dengan jumlah pelanggan 1.478 pelanggan (Gambar 2.41 dan Tabel 2.103).



Sumber: Overview PLN Aceh 2017

Gambar 2.39. Daya Listrik Tersambung Per Sektor Pelanggan di Aceh Tahun 2017

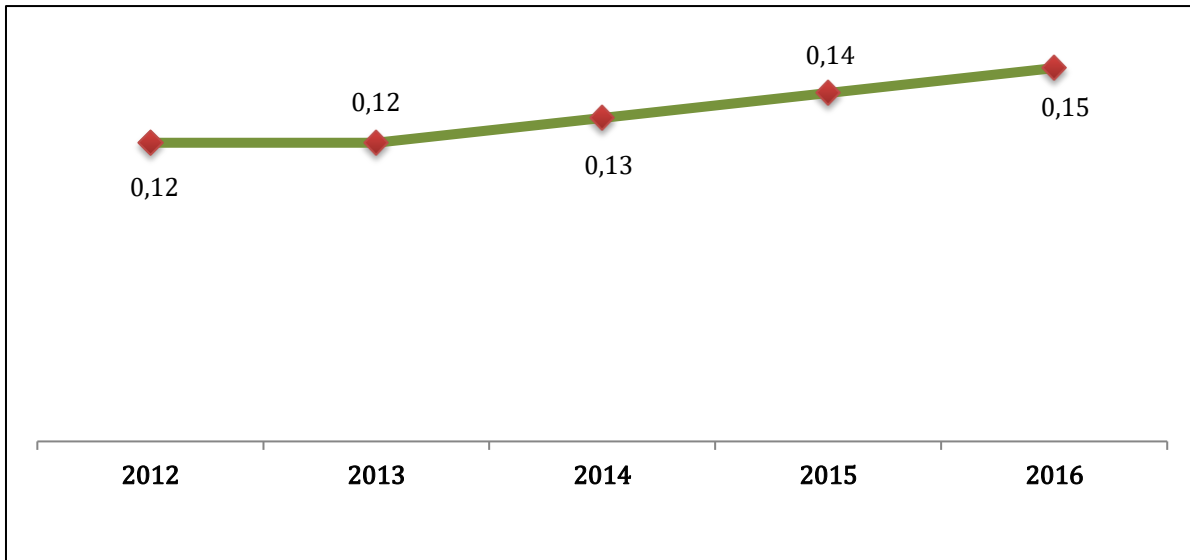
Tabel 2.103.
Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Juni 2017

Kelompok Pelanggan	Jumlah	Persentase
Rumah Tangga	1.200.091	88,30
Sosial	104.186	7,67
Bisnis	2.669	0,20
Industri	41.172	3,03
GD. Kantor Pemerintah	10.815	0,80
Penerangan Jalan Umum	199	0,01
Jumlah	1.359.132	100,00

Sumber: Overview PLN Aceh 2017

C. Kontribusi Sub Sektor Listrik dan Gas

Struktur perekonomian Aceh pada tahun 2012 masih menunjukkan besarnya kontribusi migas (subsektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas). Kontribusi kedua subsektor terhadap PDRB Aceh pada tahun 2012 secara agregat mencapai 0,12 persen dan semakin meningkat di tahun 2016 mencapai 0,15 persen. Struktur PDRB Aceh sub sektor listrik dengan migas menunjukkan bahwa dua sektor yang merupakan leading sektor bagi perekonomian Aceh selama tahun 2012 (Gambar 2.40).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018

Gambar 2.40. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sub Sektor Listrik dan Gas di Aceh 2012-2016

D. Pertambangan tanpa izin

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang melimpah yang dapat diandalkan pada sektor pertambangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya, namun belum semua pemanfaatan sumberdaya tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Masih banyak kegiatan pertambangan (khususnya komoditas emas) masih bersifat ilegal sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian dan persoalan baik bagi daerah maupun bagi masyarakat sendiri dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Daerah kehilangan pendapatan karena para penambang ilegal ini yang lazim kegiatannya disebut pertambangan tanpa izin (PETI), tidak membayar pajak dan royalti, terjadi pemborosan sumberdaya mineral sementara lingkungan menjadi rusak dan tercemar karena cara penambangan dan pengolahan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah good mining practices.

Kegiatan PETI di Aceh telah ada sejak tahun 1930an. Bermula aktifitasnya di bantaran sungai Kr. Kila dan Kr. Cut Kabupaten Nagan Raya dan Kr. Woyla Kabupaten Aceh Barat, masyarakat mencoba mengambil emas dengan cara tradisional yaitu dengan cara mendulang. Sejak saat itu kegiatan PETI mulai tumbuh dan berkembang di beberapa kabupaten lainnya di Aceh. Sejak tahun 2006 kegiatan PETI di Aceh sudah sangat marak dan meresahkan serta terkonsentrasi di Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh selatan yang notabeneanya memiliki kandungan emas yang cukup potensial untuk ditambang.

Lokasi PETI di Provinsi Aceh yang tersebar di beberapa kabupaten, secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi dan lahan areal

penggunaan lain (APL) milik masyarakat. Di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Jenis komoditas penambangan tanpa izin yang marak dilakukan di beberapa wilayah Provinsi Aceh adalah penambangan tanpa izin komoditas emas, baik emas primer yang terdapat di wilayah perbukitan/pegunungan maupun emas placer yang banyak terdapat di bantaran sungai-sungai. Secara rinci komoditas emas yang diambil pada kegiatan PETI di Aceh adalah sebagai berikut:

Lokasi Kecamatan Geumpang	: komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Tangse	: komoditas emas (primer);
Lokasi Gunung ujeun	: komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Manggamat	: komoditas emas (primer);
Lokasi Kecamatan Sawang	: komoditas emas (primer);
Lokasi Tutut Kec. Sungai Mas	: komoditas emas (placer);
Lokasi Pantou Reu	: komoditas emas (placer);
Lokasi Kr. Kila dan Kr. Cut	: komoditas emas (placer);

Sebagian besar kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten/Kota di Aceh belum dapat ditertibkan dan diarahkan untuk memiliki izin dari pemerintah setempat. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota setempat belum juga dapat mengatasi kegiatan penambangan ilegal tersebut diantaranya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta penutupan kegiatan pertambangan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Beberapa opsi telah diwacanakan untuk mengatasi PETI di daerah ini telah dilakukan diantaranya adalah dengan melegalkan kegiatan PETI dan telah dilakukan di Lokasi Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya (Telah Adanya WPR yang diterbitkan Bupati Aceh Jaya), namun demikian apakah pilihan untuk melegalkan PETI merupakan pilihan terbaik, perlu kajian lintas sektor yang lebih mendalam.

Kendala utama dalam melegalkan kegiatan pertambangan rakyat adalah aspek regulasi di bidang pertambangan diantaranya adalah belum tersedianya ruang wilayah pertambangan yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk itu Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sudah mengusulkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai usulan dari Pemerintah/Kabupaten Kota kepada Pemerintah Pusat dan mendorong segera ditetapkannya wilayah pertambangan di beberapa daerah tempat berlangsungnya kegiatan PETI selama ini, agar PETI didorong menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang memenuhi aspek legal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan rakyat segera dapat dieliminir melalui pembinaan dan pengawasan yang baik.

E. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

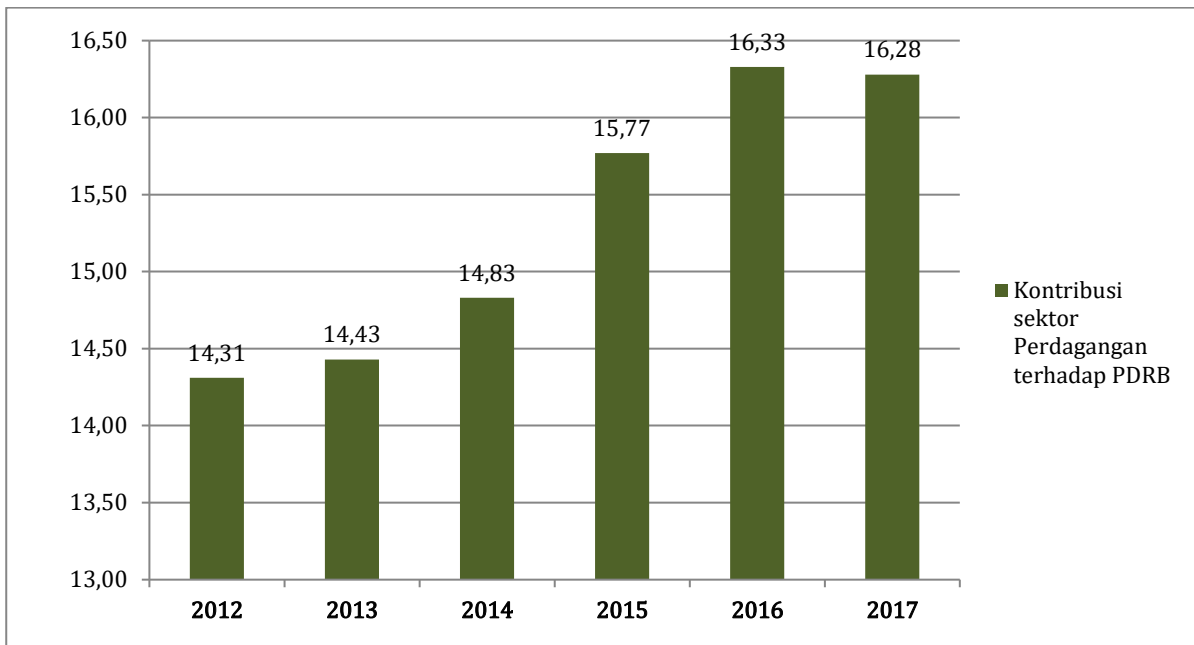
Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Provinsi Aceh terus mengalami penurunan dengan cepat dalam satu dekade terakhir, tahun 2003 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian menjangkai 30,03 persen dengan nilai tambah sebesar 14,60 triliun, hingga pada tahun 2013 kontribusinya hanya tinggal 9,56 persen dengan nilai tambah sebesar 9,85 triliun rupiah. Meskipun sejak tahun 2005 Aceh sudah memulaimelakukan eksplorasi tambang non migas, yaitu batu bara dan biji logam, namun nilai produksinya belum cukup besar untuk dapat mengimbangi penurunan sektor pertambangan migas.

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan pendukung utama sektor konstruksi, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas Aceh sebesar 1,20 persen, demikian juga kondisi kontribusi PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten/Kota berkisar antara 0 – 2,4

persen, Kabupaten/Kota dengan kontribusi PDRB sektor pertambangan dan penggalian yang tertinggi adalah Kabupaten Nagan raya sebesar 2,33 persen diikuti oleh Kabupaten Aceh Besar sebesar 2,08 persen. Kontribusi Kabupaten terhadap nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian Non migas terbesar adalah Kabupaten Pidie dengan nilai sebesar 12,68 persen, Kabupaten Aceh Timur sebesar 11,41 persen dan Kabupaten Bireuen sebesar 10,20 persen.

2.3.3.5. Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Aceh. Pada tahun 2012 sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 14,31 persen, dan terus meningkat menjadi 16,33 persen di tahun 2016, namun tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 16,28 persen. Bila dilihat dari kontribusinya, sektor tersebut menempati urutan kedua setelah pertanian. Meskipun kontribusi sektor perdagangan mengalami peningkatan, namun bila dilihat dari perkembangan net ekspor antar daerah, Aceh masih mengalami defisit dengan persentase pada tahun 2012 sebesar minus 23,59 persen menjadi minus 24,62 persen pada tahun 2017. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Aceh terdapat pada Gambar 2.41.

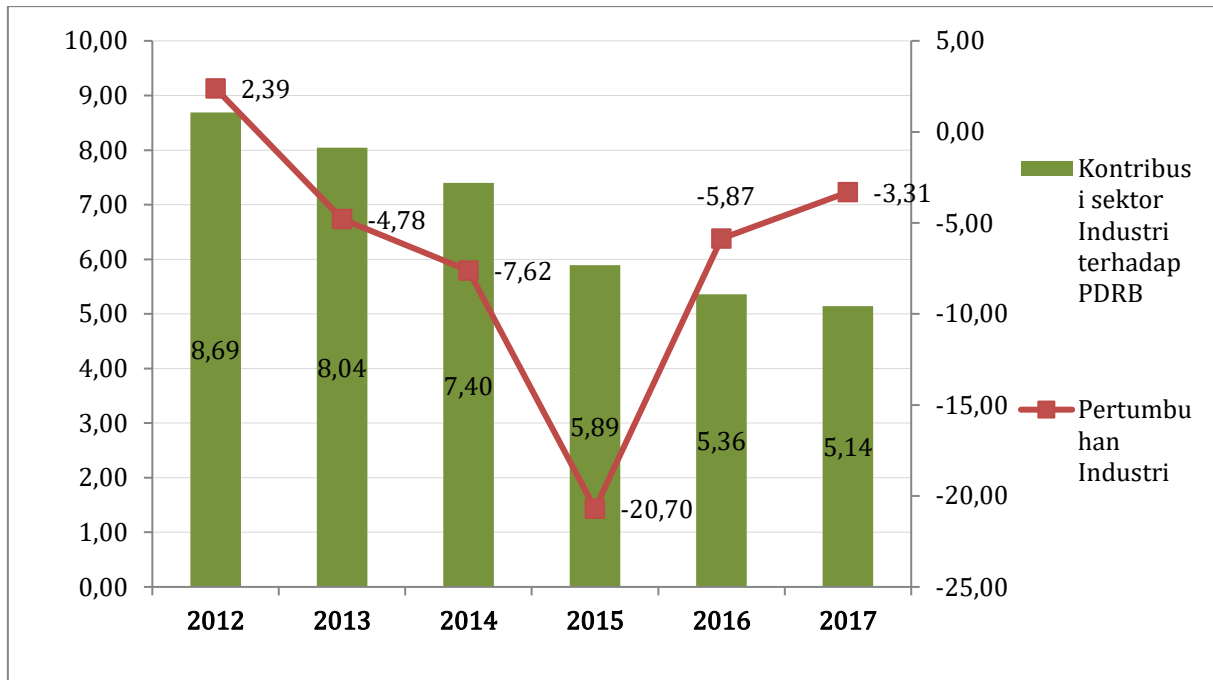


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.41. Kontribusi Perdagangan dan Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh, Tahun 2012-2017

2.3.3.6. Perindustrian

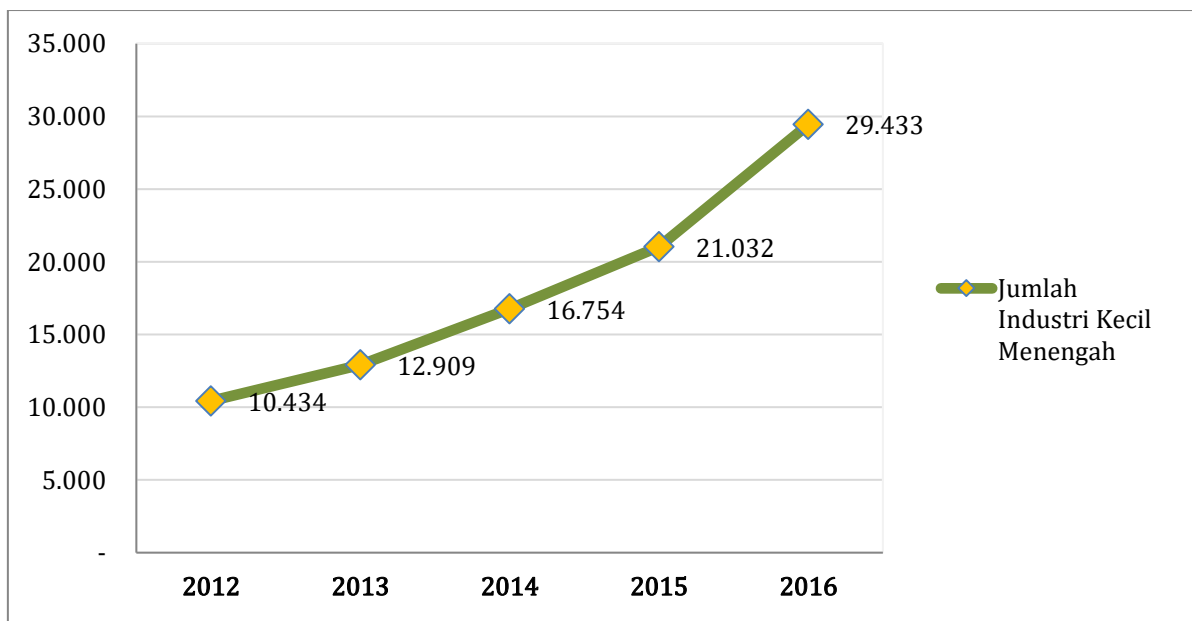
Industri Aceh sebagian besar masih mengandalkan pada industri pengolahan migas. Namun sektor ini terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi migas Aceh yang dihasilkan. Tanpa menghilangkan migas, secara akumulatif kontribusi sektor industri di Aceh merosot tajam dari 8,69 persen pada tahun 2012 menjadi 5,14 persen pada tahun 2017 (Gambar 2.44). Perkembangan sektor industri yang mulai melemah tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Aceh untuk mendongkrak kembali sektor tersebut terutama dalam mengembangkan agroindustri berbahan baku komoditas lokal.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.42. Kontribusi Sektor Industri dan Pertumbuhan Industri Aceh (persen), Tahun 2012-2017

Sektor Industri Kecil dan Menengah di Aceh dalam kurun waktu 2012–2016 mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sekitar 17 persen pertahun. Adapun jumlah Industri Kecil dan Menengah di Aceh pada Tahun 2016 mencapai 29.433 unit, meningkat cukup signifikan dibanding pada tahun 2015 yang berjumlah 21.032 unit usaha.



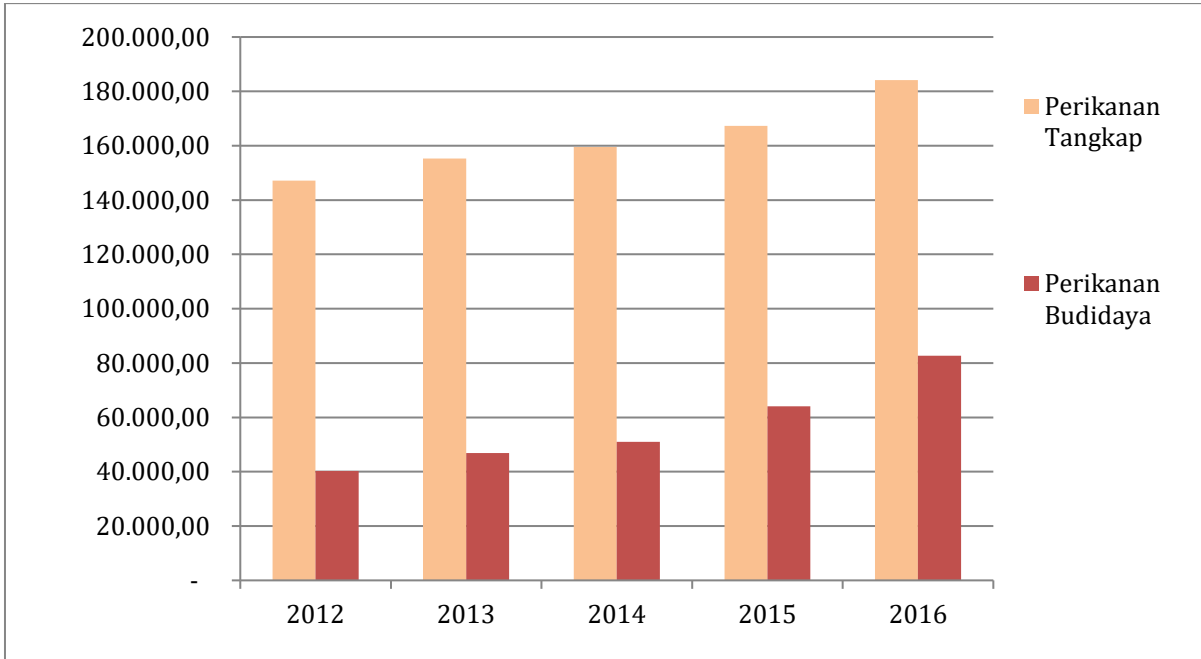
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 2017

Gambar 2.43. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Aceh, Tahun 2012-2016

2.3.3.7. Kelautan dan Perikanan

Perikanan juga menjadi sektor andalan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Meskipun merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Aceh, namun bila dilihat dari persentase kontribusi sektornya masih berada dibawah dari kontribusi sub sektor pertanian pangan dan perkebunan. Pada

tahun 2017 kontribusi sektor ini mencapai 4,92persen atau menurun sebesar 0,05 persen dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 (4,87 persen). Peranan produksi perikanan memberikan andil besar terhadap pencapaian kontribusi sub sektor perikanan saat ini. Dalam kurun waktu 2012-2016 produksi perikanan Aceh mencapai 187.402 ton (tahun 2012) dan meningkat menjadi 266.882 ton pada tahun 2016. Dari besarnya produksi tersebut, perikanan tangkap memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan budidaya. Produksi perikanan tangkap yang diperoleh pada tahun 2016 sebesar 184.190 ton, sedangkan budidaya mencapai 82.692 ton (Gambar 2.44).

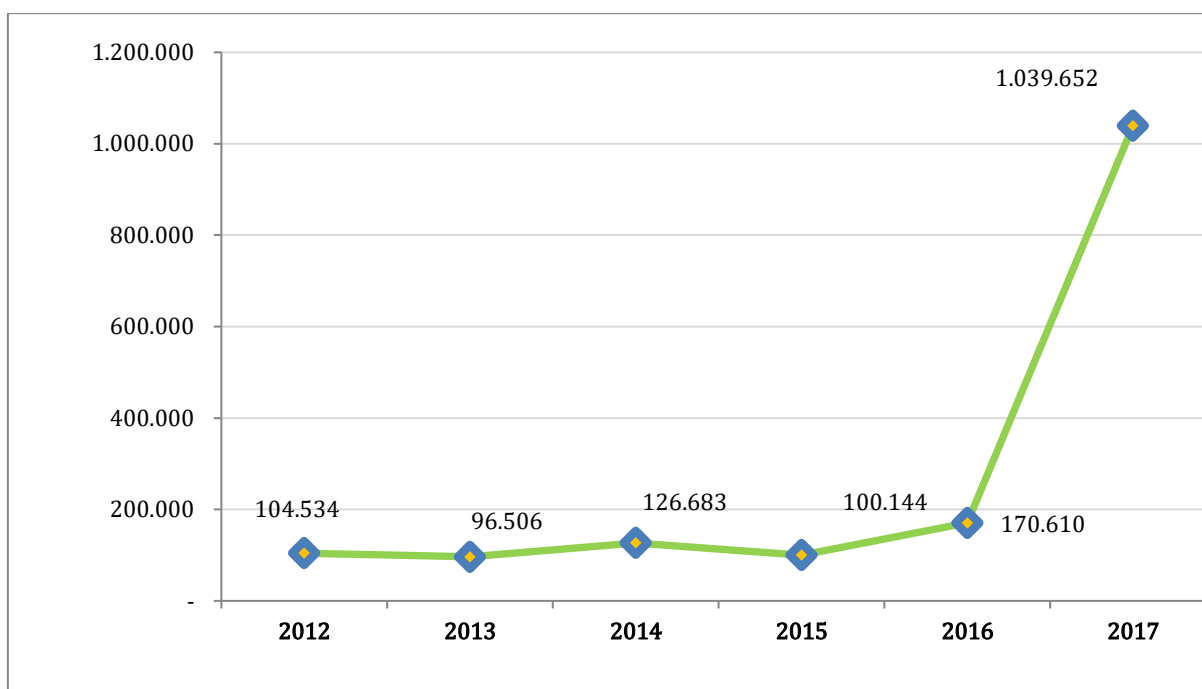


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017 (diolah)

Gambar 2.44. Produksi Perikanan Aceh (persen), Tahun 2012-2016

Gambar 2.44 menunjukkan proporsi produksi perikanan tangkap lebih besar dibandingkan produksi perikanan budidaya. Besarnya produksi perikanan tangkap terbesar didominasi oleh jenis ikan cakalang dengan dengan produksi pada tahun 2012 sebesar 10.574 ton menjadi 12.932 ton pada tahun 2016. Sedangkan produksi terbesar kedua yaitu jenis ikan tongkol krai dengan produksi pada tahun 2012 sebesar 5.275 ton pada tahun 2012 menjadi 10.552 ton di tahun 2016. Ikan tuna yang terdiri dari jenis madidihang dan tuna mata besar adalah jenis ikan terbesar ketiga dengan produksi pada tahun 2012 sebesar 8.477,5 ton dan menjadi 13.647,7 ton pada tahun 2016, kemudian diikuti ikan tongkol abu-abu yang produksinya meningkat tajam dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2012 sebesar 944 ton meningkat pada 2016 menjadi 10.254 ton.

Produksi jenis ikan tangkap yang diperoleh sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Kondisi tersebut berdampak terhadap angka konsumsi ikan di Aceh juga akan semakin besar. Pada tahun 2015 angka konsumsi ikan di Aceh sebesar 46,85 Kg/Kapita/tahun, dimana angka tersebut hampir mendekati angka target konsumsi ikan nasional sebesar 47 Kg/Kapita/tahun. Sebagian besar ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat bukan merupakan ikan olahan, sehingga nilai tambah dan daya saing produk ikan olahan di Aceh juga masih tergolong rendah. Selain untuk dikonsumsi, produksi ikan di Aceh juga digunakan untuk kepentingan ekspor perikanan. Perkembangan ekspor perikanan Aceh tahun 2012-2017 terdapat pada Gambar 2.45.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.45. Perkembangan Volume Ekspor Perikanan Aceh (Ton), Tahun 2012-2017

Gambar 2.45 menunjukkan volume ekspor perikanan Aceh yang didominasi oleh komoditas udang dan ikan. Perkembangan volume ekspor perikanan tersebut berfluktuatif dari tahun 2012 hingga 2016. Namun volume ekspor meningkat cukup tajam pada tahun 2017 sebesar 1.039.652 Ton. Sebagian besar ikan diekspor dengan menggunakan pesawat udara ke berbagai negara salah satunya Jepang.

Peningkatan ekspor perikanan bukan hanya membutuhkan optimalisasi pelabuhan ekspor semata, namun juga pelabuhan perikanan. Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 45/Kepmen-Kp/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional telah ditetapkan sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) buah pangkalan pendaratan ikan (PPI). Distribusi jumlah pelabuhan perikanan yang terdapat di kabupaten/kota terdapat pada Tabel 2.104 berikut.

Tabel 2.104.
Jumlah Pelabuhan Perikanan per Kabupaten Kota Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Simeulue	19	19	19	19	19
Aceh Singkil	10	10	10	10	10
Aceh Selatan	21	21	21	21	21
Aceh Tenggara	-	-	-	-	-
Aceh Timur	9	9	9	9	9
Aceh Tengah	-	-	-	-	-
Aceh Barat	4	4	4	4	4
Aceh Besar	17	17	17	17	17
Pidie	10	10	10	10	10
Bireuen	9	9	9	9	9

Kabupaten/Kota	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh Utara	6	6	6	6	6
Aceh Barat Daya	5	5	5	5	5
Gayo Lues	-	-	-	-	-
Aceh Tamiang	2	2	2	2	2
Nagan Raya	3	3	3	3	3
Aceh Jaya	12	12	12	12	12
Bener Meriah	-	-	-	-	-
Pidie Jaya	3	3	3	3	3
Banda Aceh	7	7	7	7	7
Sabang	3	3	3	3	3
Langsa	1	1	1	1	1
Lhokseumawe	1	1	1	1	1
Subulussalam	-	-	-	-	-
Total	142	142	142	142	142

Sumber : Kepmen Kelautan dan Perikanan RI (2014)

Tabel 2.104 menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 142 unit pelabuhan yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Namun dari jumlah tersebut telah diklasifikasikan ke dalam Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Tahun 2015 pelabuhan Kuala Idi Aceh Timur ditetapkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan tahun 2016 pelabuhan perikanan Lampulo Banda Aceh ditetapkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS). Terdapat 5 (lima) pelabuhan di kabupaten/kota lainnya yang saat ini akan dikelola oleh Pemerintah Aceh yaitu pelabuhan Labuhan Haji, pelabuhan Peudada, pelabuhan Krueng Mane, pelabuhan Ujong Baroh, dan pelabuhan Ujong Serangga.

Di sisi lain, garam merupakan salah satu produk perikanan yang terus dikembangkan, dimana pada tahun 2012 produksi garam aceh mencapai 7.303 ton dan meningkat signifikan pada tahun 2016 sebesar 12.883 ton. Produksi garam yang dihasilkan umumnya masih dengan cara tradisional yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota dengan luas lahan sementara mencapai 41,63 Ha.

Tabel 2.105.
Produksi Garam Aceh

Kabupaten/ Kota	Produksi Garam Tahun 2016 (ton)	Jumlah Petani Garam (orang)	Luas Lahan (Ha)
Pidie	2.844	241	24,83
Pidie Jaya	1.650	275	10,13
Bireuen	2.916	243	0,84
Aceh Utara	2.688	224	3,96
Aceh Timur	1.392	116	0,94
Aceh Besar	1.393,5	226	0,93

Sumber : Dinask Kelautan dan Perikanan Aceh, 2017

2.3.3.8. Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi merupakan harapan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Aceh untuk dapat membuka akses yang cukup besar terhadap kawasan yang berada di sekitarnya. Saat ini, aksesibilitas tersebut masih menjadi kendala utama dari kemajuan sebuah kawasan transmigrasi di Aceh. Prasarana dan sarana berupa jalan dan infrastruktur dasar seperti air bersih, jaringan listrik juga masih minim sehingga pengembangannya pun menjadi

terhambat. Pemerintah Aceh akan memfokuskan pengembangan kawasan transmigrasi pada 5 kawasan yaitu: 1) Kawasan Pantan Limeng -Kumba yang meliputi Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya; 2) Kawasan Krueng Jamboe Aye yang meliputi Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara; 3) Kawasan Gempang-Pamee-Sungai Mas, yang meliputi Kabupaten Pidie, Aceh Tengah dan Aceh Barat; 4) Kawasan Seulimum-Muara Tiga, yang meliputi Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie; dan 5) Kawasan Sigulai-Latiung di Kabupaten Simeulue. Penetapan kawasan tersebut bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih fokus, terarah dan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah transmigrasi. Pengembangan kawasan transmigrasi juga harus berkoordinasi dan berintegrasi dengan prioritas kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penempatan transmigran dari tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi sesuai dengan jumlah rumah yang dibangun. Tahun 2013 transmigran lokal yang ditempatkan berjumlah 218 KK, tahun 2014 sebanyak 182 KK, tahun 2015 berjumlah 53 KK, dan 144 KK di tahun 2016. Perkembangan transmigrasi lokal di Aceh saat ini masih harus mendapat perhatian besar dari aspek sumberdaya manusia agar dapat meningkatkan skill untuk dapat menambah pendapatan transmigran lokal. Selain pengembangan kawasan transmigrasi, Pemerintah Aceh juga akan menetapkan status salah satu kawasan transmigrasi di Aceh menjadi kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Permasalahan utama transmigrasi Aceh yakni minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kualitas SDM transmigran, masih banyaknya kawasan transmigrasi terlantar, serta masih kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap warga transmigrasi. Untuk itu perlu dipenuhinya sarana dan prasarana dasar serta peningkatan mutu SDM transmigran, sehingga terbentuknya kawasan transmigrasi mandiri.

2.3.4. Penunjang Urusan

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh, badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah; pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBA dan APBN; penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah; dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim

Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

A. Tersedianya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJP Aceh 2012 – 2032 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Aceh periode tahun 2012 sampai tahun 2032 yang diundangkan pada tanggal 19 November 2012, Visi Aceh dalam RPJPA 2012 – 2032 adalah “ ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA” yang akan dicapai visi tersebut melalui misi – misi sebagai berikut; Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai – nilai Islami; Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual; Mewujudkan masyarakat demokrasi berdasarkan hukum; Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu; mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata; Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi daerah tersebut secara bertahap akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Dalam RPJP Aceh 2012 – 2032 sudah ditetapkan tahapan – tahapan pembangunan lima tahunan yang merupakan fokus pembangunan atau arah kebijakan yang menitik beratkan pencapaian Visi dan Misi Aceh sampai tahun 2032 sebagaimana yang sudah disepakati bersama.

B. Tersedianya dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka menengah atau RPJM Aceh periode 2012 -2017 ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Aceh periode tahun 2012 sampai tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 13 Desember 2013 dan dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala Daerah terpilih. Visi Aceh untuk periode 2012-2017 adalah ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI” Dengan Misi adalah Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi; Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat; Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia; Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan; Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.

C. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Aceh (RKPA) disusun berpedoman pada Arah Kebijakan Tahunan dalam RPJM Aceh pada Bab VI Arah kebijakan yang mempunyai fokus pembangunan setiap tahunnya. Berdasarkan RKPA ini SKPA akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBA setiap tahunnya,

2.3.4.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan dan aset daerah baik di lingkup pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh pada umumnya belum berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011 terhadap pengelolaan keuangan tahun 2010 di Aceh yang pada umumnya masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan kata lain, hanya 4 (empat) Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 1 (satu) Pemerintah Daerah (Kabupaten) yang memperoleh predikat Tidak Wajar (TW). Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh WTP adalah Kabupaten Aceh Tengah, Banda Aceh, Nagan Raya dan Lhokseumawe. Sementara itu, Kabupaten Simeulue memperoleh predikat TW. Demikian juga, angka dugaan korupsi di Aceh yang tergolong tinggi yang menempatkan Aceh pada posisi lima besar daerah penyumbang kerugian negara akibat korupsi di Indonesia.

Dalam hal belanja pemerintah masih belum terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran dan belum efektifnya pelaksanaan kegiatan. Hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi belanja langsung (65%) dan belanja tidak langsung (35%). Belanja langsung ini pada hakikatnya ditujukan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat. Namun, dalam belanja langsung masih juga terdapat belanja tidak langsung seperti belanja yang digunakan aparatur untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester II BPK-RI tahun 2011, temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi harga standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama. Dalam laporan ini juga diungkapkan bahwa penyebab kasus-kasus ketidakhematan ini pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab lalai, tidak cermat, belum optimal dalam melaksanakan tugas, tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

2.3.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, kewenangan dalam mengatur distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pendistribusian guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh dilakukan secara tersistem dan terintegrasi.

Selain itu, dari Tabel 2.106 di bawah ini terlihat bahwa profesionalitas pegawai yang diukur melalui Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) angkanya masih relatif rendah (62 persen).

Tabel 2.106.

Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/ Angka IPP Tahun 2012-2017

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)	57,60	57,70	60,15	58,60	60,20	62,00

Sumber: Badan Kepegawaian Aceh, Tahun 2018

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan persentase Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP) dengan penempatan pimpinan OPD yang berkualitas melalui Fit and Proper Test, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada publik.

Tabel 2.107.
Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Diklat Teknis Fungsional		
		Jlh PNS Aceh	Jlh Peserta Diklat	%
1	2012	8.921	250	2,8
2	2013	9.160	1.226	13,38
3	2014	9.283	415	4,47
4	2015	9.319	305	3,27
5	2016	9.075	330	3,64
6	2017	23.180	455	1,96

Sumber: BPSDMA/BKA, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 2.107, dapat diketahui bahwa persentase aparatur Pemerintah Aceh yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional tahun 2012 sebesar 2,8 persen, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 3,64 persen, namun kembali turun di tahun 2017 menjadi 1,96 persen karena jumlah pegawai yang meningkat drastis. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan data tahun 2017 dari jumlah total Aparatur Pemerintah Aceh sebanyak 9,075 ASN, yang sudah mengikuti diklat sebanyak 455 ASN.

Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (BPSDMA) terus berupaya meningkatkan profesionalisme ASN dengan melakukan Diklat bagi Aparatur sesuai harapan dan kewajiban Aparatur untuk memenuhi SPM dalam melayani masyarakat

2.3.4.4. Penelitian an Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

2.3.4.5. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawaawasan internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan.

Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program.

2.3.4.6. Sekretariat Dewan

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRA untuk melaksanakan fungsi

pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPA); dan terintegrasi program-program DPRA untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRA

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

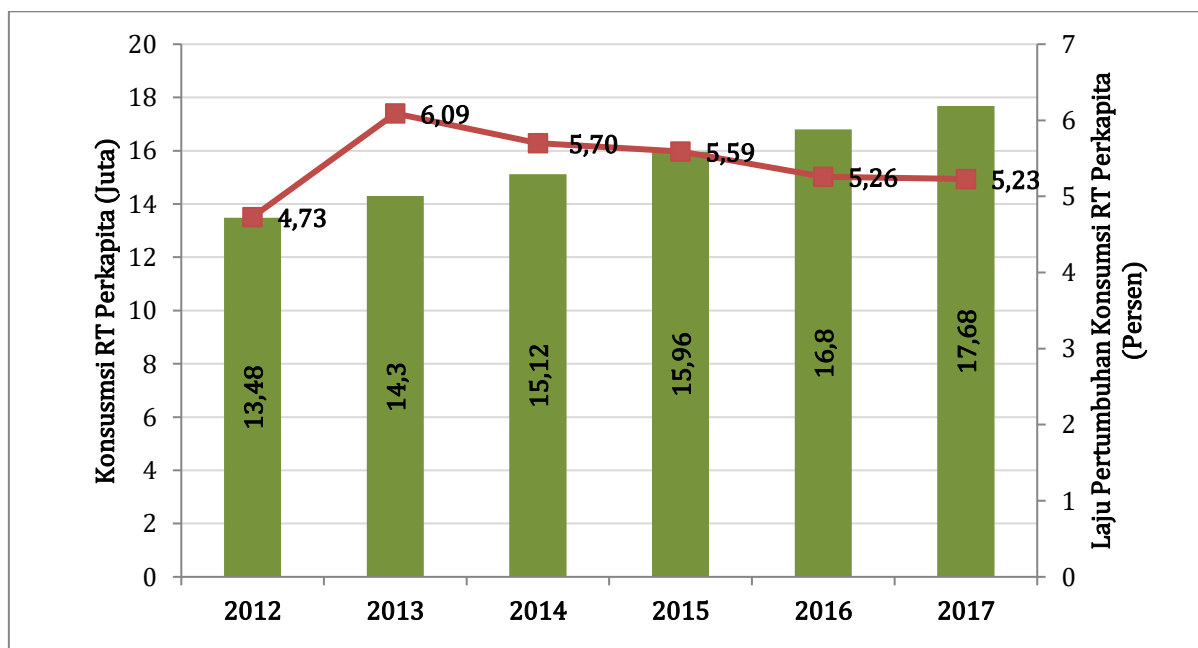
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan rumah tangga. Besaran pengeluaran tersebut pada dasarnya diperuntukkan baik untuk pemenuhan makanan maupun non makanan. Selama ini berkembang pengertian bahwa besarnya proporsi yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan merupakan cerminan dari kesejahteraan rumah tangga tersebut. Semakin tinggi pendapatan maka pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin kecil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran non makanan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Aceh dalam kurun waktu 2012-2017 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan pengeluaran konsumsi dengan rata-rata 5,6 persen pertahunnya, dimana pada tahun 2012 sebesar 13,48 juta dan terus meningkat mencapai 17,68 juta pada tahun 2017. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa adanya peningkatan rata-rata daya beli masyarakat Aceh, serta inflasi yang mengakibatkan nilai konsumsi rumah tangga juga semakin meningkat (Gambar 2.46).

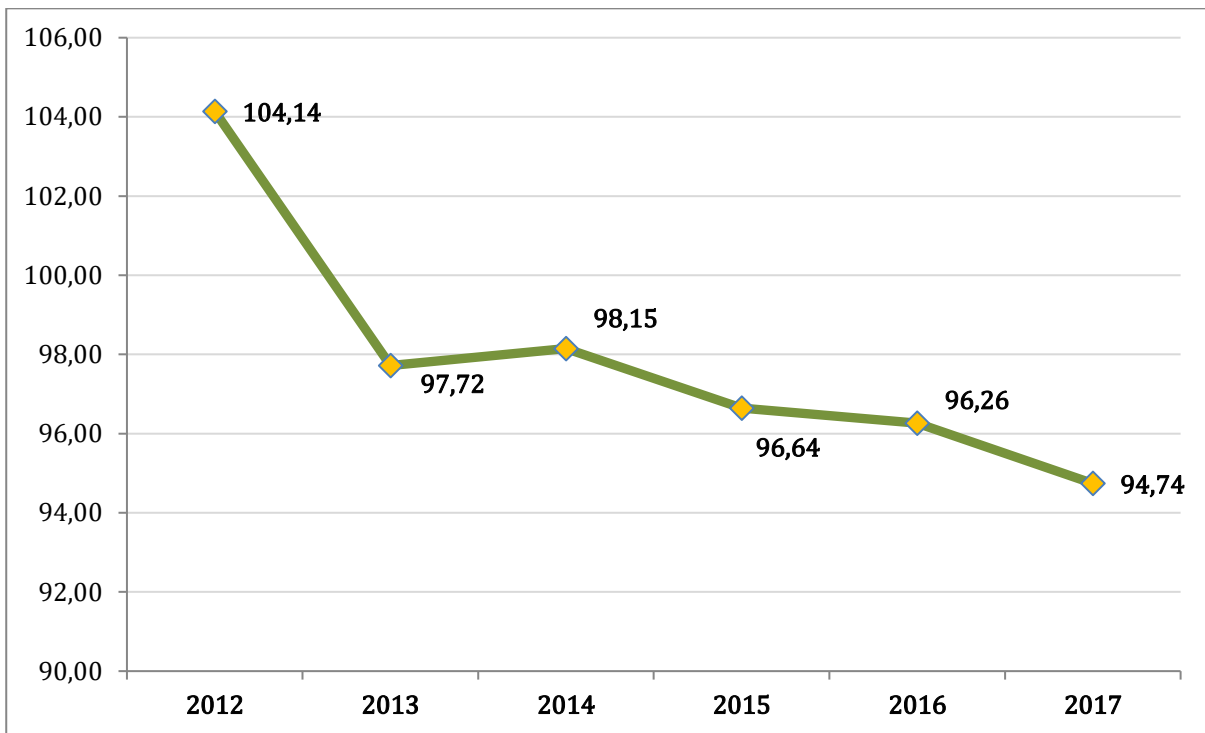


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.46. Perkembangan dan Laju Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Aceh (Juta), Tahun 2012-2017

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang menunjukkan kesejahteraan di tingkat petani. Pada dasarnya nilai NTP ini juga merupakan gambaran sejauh mana pendapatan yang diperoleh petani dari hasil berproduksi dan yang dikeluarkannya untuk kebutuhan konsumsi. NTP tersebut dibagi kedalam beberapa sub sektor pertanian diantaranya: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Bila dilihat dari NTP gabungan, kecenderungan nilainya mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2017, meskipun sempat mengalami peningkatan dengan lambat pada tahun 2014 sebesar 98,15. Penurunan NTP dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan petani Aceh masih kurang sejahtera. Hal tersebut juga menjadi sangat relevan dengan tingkat kemiskinan yang sebagian besar berada pada sektor tersebut (Gambar 2.47).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.47. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh, Tahun 2012-2017

Berdasarkan pengelompokannya kedalam lima sub sektor, hortikultura memiliki NTP tertinggi pada tahun 2017 sebesar 106,22. Sedangkan peternakan memiliki nilai NTP tertinggi kedua dengan nilai mencapai 103,12. Kedua sub sektor tersebut memiliki capaian nilai NTP lebih besar 100 dari tahun 2015 hingga 2017. Perikanan menjadi sub sektor terbesar ketiga dengan nilai NTP sebesar 97,16. Bila dilihat perkembangannya dari tahun 2013 hingga 2014 NTP sub sektor perikanan sempat mengalami peningkatan dengan nilai mencapai lebih besar dari 100. Besarnya NTP perikanan pada tahun tersebut dipengaruhi oleh besarnya nilai Indeks yang diterima (IT) nelayan yang besar dibandingkan Indeks yang diterima (IB) nelayan dengan nilai berturut-turut 110,25 dan 109,53. Kecenderungan indeks yang diterima nelayan perikanan tangkap lebih besar dibandingkan dengan pembudidaya ikan disebabkan oleh pasar ikan hasil tangkapan nelayan dipengaruhi oleh harga ikan komoditas ekspor seperti harga ikan tuna, cakalang, layur dan beberapa ikan pelagis kecil lainnya sehingga cakupan pasarnya lebih luas (domestik dan ekspor). Besarnya NTP pada setiap sub sektor pertanian terdapat pada Tabel 2.108.

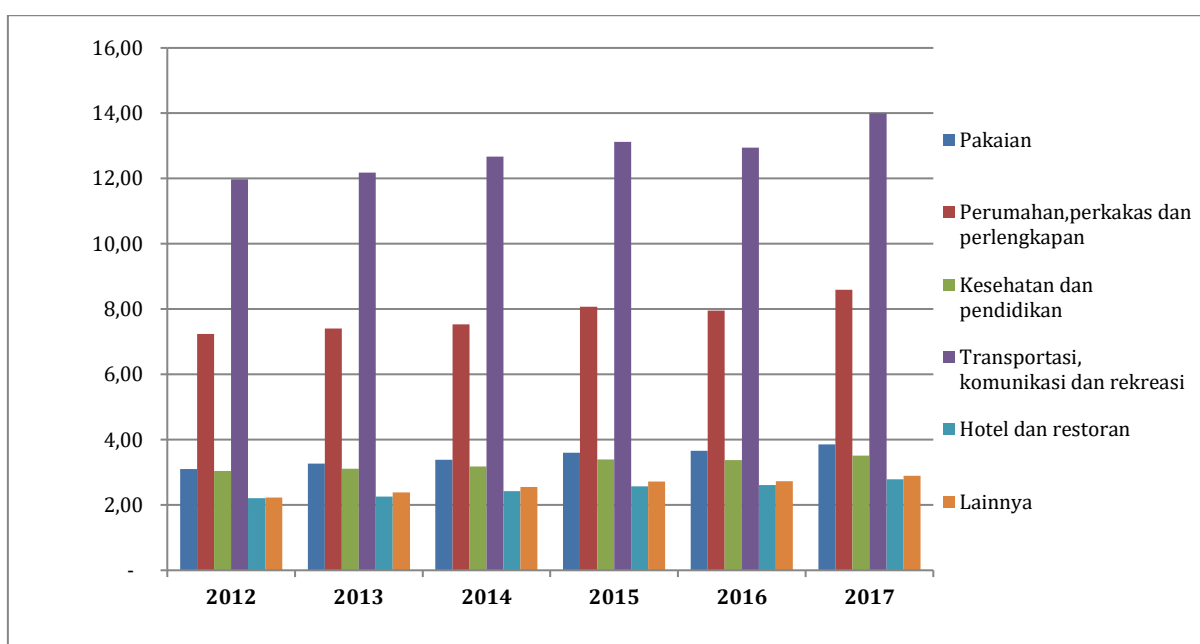
Tabel 2.108.
Nilai Tukar Petani pada Kelompok Sub Sektor Pertanian, 2012-2017

SUB SEKTOR	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sub Sektor Tanaman Pangan	111,82	110,98	102,78	95,91	93,54	94,74
Sub Sektor Hortikultura	100,01	98,79	99,85	105,55	104,84	106,22
Sub Sektor Perkebunan Rakyat	110,81	95,86	97,38	90,33	91,73	87,5
Sub Sektor Peternakan	99,22	98,57	98,99	100,57	100,89	103,12
Sub Sektor Perikanan	99,22	100,60	100,66	97,48	97,86	97,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2012-2017 (diolah)

2.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan perkapita juga akan memperlihatkan kecenderungan besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh pada umumnya. Besarnya konsumsi non pangan yang dikeluarkan oleh masyarakat Aceh pada umumnya untuk pengeluaran transportasi, komunikasi dan rekreasi dengan persentase sebesar 11,97-13,99 persen. Pengeluaran terbesar kedua digunakan untuk perumahan, perkakas dan perlengkapan rumah dengan persentase sebesar 7-8 persen. Sedangkan pengeluaran terkecil digunakan untuk pengeluaran hotel dan restoran dengan persentase sebesar 2 persen (Gambar 2.48).

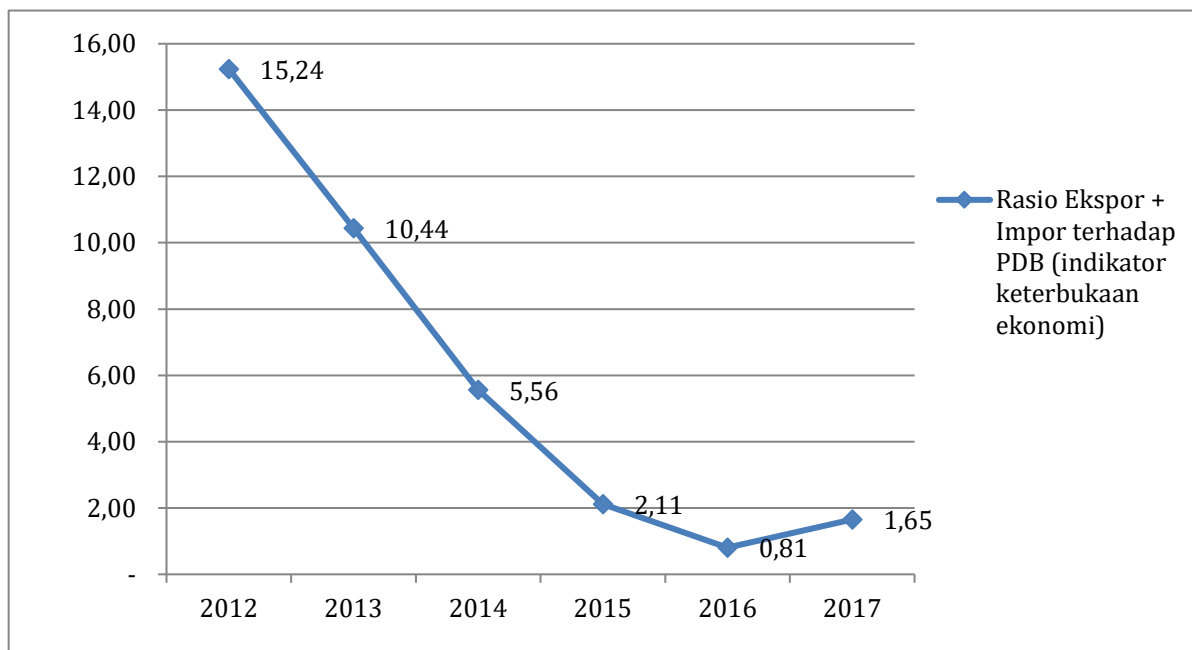


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018 (diolah)

Gambar 2.48. Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan, Tahun 2012-2017

2.4.1.4. Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Nilai tersebut dapat dihitung dari rasio ekspor dan impor terhadap nilai PDRB. Indeks keterbukaan ekonomi Aceh masih sangat rendah dan memiliki tren menurun dari tahun 2012 hingga 2016, meskipun terjadi peningkatan dengan lambat sebesar 1,65 persen pada tahun 2017. Rendahnya nilai keterbukaan perdagangan tersebut mengindikasikan bahwa sektor perdagangan Aceh masih bersifat lokal dan peran ekspor perdagangan luar negeri masih sangat kurang (Gambar 2.49).



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2017 (diolah)

Gambar 2.49. Indeks Keterbukaan Ekonomi Aceh, Tahun 2012-2017

Nilai ekspor Aceh yang dilakukan lewat pelabuhan di Aceh pada tahun 2017 mencapai USD 77.679.139 mengalami penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 2015 yakni 106.916.377. Sementara itu nilai impor Aceh melalui pelabuhan pada tahun 2017 sebesar USD 9.313.804, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 sebagai tahu impor tertinggi. Komoditas utama yang diimpor pada tahun 2017 yaitu mesin-mesin/peralatan listrik, gandum-gandum, gula dan kembang gula, dan garam/kapur, yang berasal dari Finlandia, Thailand, Singapura, Malaysia dan Jepang. Sedangkan komoditas ekspor Aceh berasal dari komoditas non migas, dengan jenis terbesar yakni bahan kimia anorganik dan bahan bakar mineral. Secara umum permasalahan sektor perdagangan Aceh masih tergolong defisit, terutama perdagangan antar daerah.

Tabel 2.109. Nilai Ekspor dan Impor Melalui Pelabuhan di Provinsi Aceh Tahun 2012-2017

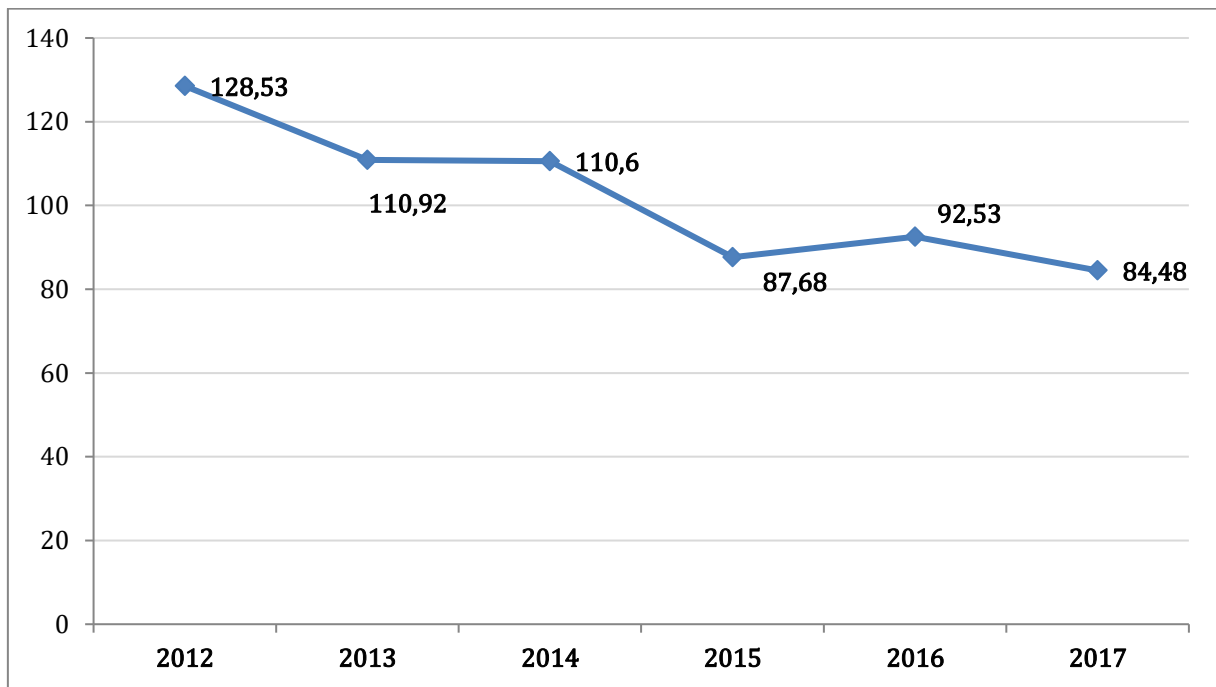
Tahun	Ekspor		Impor		Neraca (USD)	Perubahan (%)		
	Volume (Ton)	Nilai FOB (USD)	Volume (Ton)	Nilai CIF (USD)		Nilai Ekspor	Nilai Impor	Neraca
	2012	1.725.188.558	1.257.398.628	104.832.149	85.316.413	1.172.082.215	(15,25)	(25,19)
2013	1.486.982.850	962.969.640	41.189.798	11.130.170	951.839.470	(23,42)	(86,95)	63,54
2014	715.003.350	507.414.478	185.802.707	40.515.391	466.899.087	(47,31)	264,01	(311,32)
2015	1.189.537.494	106.916.377	149.058.410	116.817.672	(9.901.295)	(78,93)	188,33	(267,26)
2016	296.632.559	22.869.514	121.872.735	28.994.572	(6.125.058)	(78,61)	(75,18)	(3,43)
2017	517.468.611	77.679.139	92.321.035	9.313.804	38.365.335	239,66	35,59	204,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2018

2.4.1.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank

Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank atau yang lebih dikenal dengan *Financing to Deposit Ratio*(FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan membagi jumlah pembiayaan yang

diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK, dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank *Return of Asset* (ROA) akan semakin meningkat. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, nilai FDR di Aceh cenderung mengalami penurunan dari 128,53 persen pada tahun 2012 menjadi 84,48 persen pada triwulan ketiga tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan penurunan suku bunga sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengurus kredit untuk investasi dari pada menabung. Namun demikian, perbankan syariah tetap melaksanakan fungsi intermediasinya dalam menghimpun dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (Gambar 2.50).



Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh, 2018

Gambar 2.50. Perkembangan FDR di Aceh Tahun 2012-2017

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.4.2.1. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Faktor aksesibilitas daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas.

Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka

wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas kabupaten/kota di Aceh disajikan secara lengkap pada Tabel 2.110.

Tabel 2.110.
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km ²)	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)
Banda Aceh	56,17	259.910	762,51	13,58	2,93
Aceh Barat	2.758,72	201.680	884,95	0,32	4,39
Sabang	122,09	33.980	202,24	1,66	5,95
Aceh Besar	2.902,56	409.110	1.636,71	0,56	4,00
Langsa	203,41	171.570	660,71	3,25	3,85
Simeulue	1.827,35	91.370	767,67	0,42	8,40
Aceh Tamiang	2.119,73	287.010	1.053,53	0,50	3,67
Aceh Timur	5.427,09	419.590	1.763,71	0,32	4,20
Bireuen	1.796,31	453.220	1.317,82	0,73	2,91
Aceh Tenggara	4.169,63	208.480	1.253,59	0,30	6,01
Bener Meriah	1.904,01	142.530	1.484,35	0,78	10,41
Aceh Utara	2.694,66	602.550	2.194,31	0,81	3,84
Aceh Singkil	1.858,03	119.490	555,49	0,30	4,65
Aceh Barat Daya	1.882,05	145.730	843,86	0,45	5,79
Nagan Raya	3.544,91	161.330	1.151,96	0,32	7,14
Gayo Lues	5.549,91	91.020	1.115,17	0,20	12,25
Pidie Jaya	952,11	154.800	582,06	0,61	3,76
Lhokseumawe	153,44	198.980	447,16	2,91	2,25
Subulussalam	1.391	78.730	604,51	0,43	7,68
Aceh Tengah	4.454,04	204.270	1.090,03	0,24	5,34
Pidie	3.169,24	432.600	1.336,41	0,42	3,09
Aceh Selatan	4176,59	231.890	1.230,61	0,29	5,31
Aceh Jaya	3.877,25	89.620	710,69	0,18	7,93

Sumber: Buku Tataran Transportasi Wilayah Aceh Tahun 2018

Tabel 2.110, memberikan informasi bahwa indeks aksesibilitas tertinggi ditemukan di Kota Banda Aceh (13,58 km/km²), sedangkan indeks aksesibilitas terendah di Kabupaten Aceh Jaya (0,18 km/Km²). Dengan demikian, pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kabupaten/kota yang memiliki indeks aksesibilitas rendah sangat diperlukan. Selanjutnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki indeks mobilitas tertinggi (12,25 km per 1.000 penduduk), sedangkan Kota Lhokseumawe memiliki nilai indeks mobilitas terendah (2,25 km per 1.000 penduduk). Kota-kota di Aceh (kecuali Subulussalam) pada umumnya memiliki indeks mobilitas yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya.

2.4.2.2. Persentase Penduduk yang menggunakan air bersih

Provinsi Aceh tahun 2017 jumlah penduduk terhadap Air Minum Berkualitas dengan akses berkelanjutan dan memenuhi syarat dan bukan jaringan perpipaan yaitu sumur gali terlindung 1.105.966 jiwa, sumur gali dengan pompa 226.332 jiwa, sumur Bor dengan pompa 266.160 jiwa, terminal Air 33.409 jiwa, mata air terlindung 141.113 jiwa, penampungan air hujan 29.672 jiwa. Jumlah penduduk terhadap Air Minum Berkualitas dengan Akses berkelanjutan dan memenuhi syarat dengan perpipaan (PDAM, BPSPAM) 1.154.208 jiwa. Total penduduk yang memiliki akses air minum 2.941.086 jiwa (56 persen) (Profil Kesehatan Aceh, 2017).

Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum sehingga memenuhi standar, belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan khusus. Permasalahan lainnya yaitu tingginya tingkat kebocoran/kehilangan air fisik yang mencapai lebih dari 60 persen dari jumlah produksi dan rendahnya sumber daya manusia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya berupa fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum kepada PDAM, pembangunan sarana prasarana air minum pada masyarakat berpenghasilan rendah seperti pada kawasan rumah sehat sederhana/rusunawa, dan kawasan kumuh/nelayan serta pengembangan sistem distribusi air minum pada 5 kawasan, 50 ibu kota kecamatan (IKK), 135 perdesaan, serta kawasan khusus seperti: kabupaten/kota pemekaran, kawasan perbatasan, kawasan Kapet, ataupun kawasan pelabuhan perikanan.

Data pembangunan prasarana air minum yang ada saat ini di 23 kabupaten/kota dengan kapasitas terpasang sebesar 4.451,5 liter/detik yang terdiri dari sarana dan prasarana air minum perkotaan dengan kapasitas 2.582 liter/detik, ibukota kecamatan 93 IKK dengan kapasitas 849 lt/dt dan pedesaan 310 unit dengan kapasitas 1020,5 lt/dt. Sedangkan prasarana dan sarana air minum yang beroperasi 2.553,3 lt/dt, terdiri dari air bersih perkotaan 1.947 lt/dt, air bersih ibukota kecamatan (IKK) 478 lt/dt dan air bersih perdesaan 128,3 lt/dt. Selanjutnya, instalasi yang tidak beroperasi berkapasitas 676 l/dtk, terdiri dari 476 l/dtk rusak, 170 l/dtk dalam tahap pembangunan terdiri dari air bersih perkotaan 120 lt/dt dan air bersih ibukota kecamatan (IKK) 50 lt/dt dan 1.000,2 l/dtk tidak diketahui operasionalnya terdiri dari air bersih perkotaan 10 lt/dt, air bersih ibukota kecamatan (IKK) 165 lt/dt dan pedesaan 852 lt/dt.

2.4.2.3. Rasio ketersediaan daya listrik

Rasio ketersediaan daya listrik di Aceh periode 2012-2017 meningkat sebesar 0,62. Pada tahun 2012 rasio ketersediaan daya listrik sebesar 0,49 dan meningkat menjadi 1,11 pada tahun 2017. Peningkatan ini dikarenakan sudah beroperasinya beberapa pembangkit listrik baru. Rasio kelistrikan Aceh tahun 2012-2017 disajikan pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111.
Rasio Kelistrikan Aceh Tahun 2012-2017

Jenis Penerangan	Tahun (%)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daya Listrik Terpasang (MW)	228,5	200,11	420,11	432,51	484	524
Jml. Kebutuhan Daya Listrik (MW)	470	470	470	470	456	470
Rasio	0,49	0,43	0,89	0,92	1,06	1,11

Sumber: PLN Aceh, 2018

2.4.2.4. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Proporsi Rumah Tangga dengan akses listrik di Aceh selama periode 2012-2017 terjadi peningkatan sebesar 7,63 persen. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang berlistrik di Aceh mencapai 98,59 persen, sedangkan pada tahun 2012 yaitu 90,96 persen, dengan demikian jumlah rumah tangga yang belum menggunakan listrik di Aceh sebanyak 17.358 rumah tangga atau sebesar 1,41 persen. Secara rinci persentase rumah tangga berlistrik di Aceh disajikan pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112.
Persentase Rumah Tangga Berlistrik di Aceh tahun 2012-2017

Uraian	Tahun (unit)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	999.018	1.029.003	1.074.716	1.124.657	1.164.194	1.213.700
Jumlah Seluruh Rumah Tangga	1.098.360	1.146.882	1.164.489	1.186.781	1.209.130	1.231.058
Persentase	90,96	89,72	92,29	94,77	96,28	98,59

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan, 2018

Permasalahan kelistrikan di Aceh antara lain belum tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2017. Upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan kelistrikan adalah antara lain: 1) pemanfaatan potensi energi untuk mengatasi defisit energi listrik di Aceh termasuk penyediaan energi terbaharukan untuk desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik dan 2) meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100 persen pada tahun 2018.

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN ACEH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kemampuan keuangan daerah akan memberikan daya dukung terhadap manajemen pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, diantaranya dapat diukur melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio PAD terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam melakukan pengelolaan keuangan, seluruh daerah telah diberikan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) nilai-nilai islam; b) sosial budaya; c) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d) keadilan dan pemerataan; dan e) kebutuhan. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sebagaimana halnya dengan daerah lainnya, Aceh juga memiliki kewenangan terhadap pengelolaan keuangan. Ruang lingkup pengelolaan keuangan Aceh yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Hak untuk memungut pajak dan retribusi serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah, melaksanakan pembangunan dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Pengelolaan pendapatan;
4. Pengelolaan belanja; dan
5. Pengelolaan pembiayaan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Aceh perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan Aceh, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi yaitu kinerja pencapaian Pendapatan Aceh, kinerja Belanja Aceh dan kinerja pembiayaan baik dari pelaksanaan program maupun non-program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBA. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,

maka diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBA. Setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja keuangan yang disajikan dalam Bab ini merupakan kinerja keuangan selama periode Tahun 2012-2017 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (*audited*) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh merupakan instrumen fiskal untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh serta ditetapkan dengan Qanun Aceh. Secara umum kinerja pelaksanaan APBA dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu penetapan APBA dan tingkat realisasinya. Sesuai Pasal 312 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda (Qanun) tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui selama periode tahun 2012-2017 pengesahan APBA yang tepat waktu hanya terdapat pada tahun 2014, dimana pengesahan APBA tahun 2014 dilakukan pada tanggal 20 Desember 2013.

Tabel 3.1.
Pengesahan APBA Tahun 2012-2017

Tahun	Nomor Qanun/Pergub	Tanggal Pengesahan	Pagu (Rp.)
2012	Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2012	31 Januari 2012	9.711.938.653.801
2013	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2013	04 Maret 2013	11.779.837.222.010
2014	Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013	20 Desember 2013	13.368.028.474.729
2015	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015	27 Februari 2015	12.755.643.725.149
2016	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016	22 Februari 2016	12.874.631.946.619
2017	Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017	09 Februari 2017	14.733.699.981.655

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2018

Analisis pengelolaan keuangan Aceh pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan Aceh dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat pengelolaan keuangan Aceh diwujudkan dalam suatu APBA maka analisis dilakukan terhadap APBA dan Laporan Keuangan Aceh pada umumnya. Sebelum melakukan analisis pengelolaan keuangan, terlebih dahulu kita harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBA. Secara umum struktur APBA merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

A. Pendapatan Aceh

Pendapatan Aceh meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Aceh, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Aceh dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Aceh. Pendapatan Aceh dikelompokkan atas beberapa komponen:

1. Pendapatan Asli Aceh (PAA) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal Aceh serta lain-lain PAA yang sah.
2. Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam lain, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (TDBH Migas).
3. Dana Otonomi Khusus (Otsus).

4. Lain-Lain Pendapatan yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah dan dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Pendapatan Aceh sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian Aceh, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer dan dana otonomi khusus. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan Aceh setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Pendapatan Aceh merupakan komponen yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Kemandirian Aceh harus tergambar dari semakin meningkatkannya Pendapatan Asli Aceh (PAA). Oleh karena itu, penerimaan PAA terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran Dana Transfer dan Dana OTSUS yang memiliki jangka waktu terbatas.

B. Belanja Aceh

Belanja Aceh meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Aceh yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Aceh dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Aceh. Belanja Aceh terdiri dari beberapa komponen:

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik.
2. Belanja Langsung (BL) yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

C. Pembiayaan Aceh

Pembiayaan Aceh meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Aceh terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA).
2. Pengeluaran Pembiayaan yang didalamnya meliputi penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.

Realisasi Pendapatan Aceh selama periode tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan (naik), dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,35 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi bersumber dari Dana Perimbangan yang tumbuh sebesar 39,91 persen, diikuti Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar 20,35 persen dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) tumbuh sebesar 7,80 persen. Sebaliknya untuk Lain-Lain Pendapatan Aceh yang sah mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar minus 4,73 persen. Sementara itu, realisasi Belanja Aceh selama periode tahun 2012-2017 rata-rata tumbuh sebesar 9,57 persen, dimana rata-rata pertumbuhan dari Belanja Tidak Langsung (BTL) tumbuh sebesar 16,02 persen dan Belanja Langsung (BL) tumbuh sebesar 4,51 persen. Dengan kata lain, rata-rata pertumbuhan BTL lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan BL. Sebaliknya pembiayaan Aceh selama periode tahun 2012-2017 tumbuh negatif yaitu minus 0,96 persen. Untuk lebih jelas mengenai realisasi APBA selama periode tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

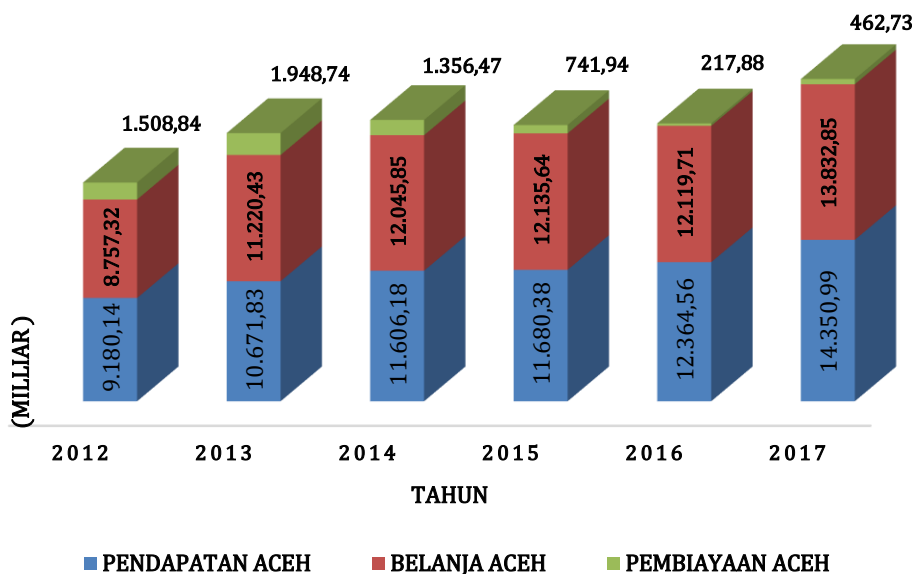
Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2012-2017

NO	URAIAN	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	PENDAPATAN	9.180.143.048.437,63	10.671.826.520.445,20	11.606.175.260.015,30	11.680.376.915.213,00	12.364.563.976.147,30	14.350.990.515.050,70	9,35
1.1	Pendapatan Asli Aceh	901.720.376.620,63	1.325.435.091.289,19	1.731.130.839.637,14	1.972.049.032.901,98	2.060.180.945.551,33	2.276.305.568.813,72	20,35
1.1.1	Pajak Aceh	687.476.816.747,00	752.846.745.436,00	1.030.679.175.160,00	1.172.685.149.787,00	1.252.745.084.804,00	1.315.393.895.060,00	13,86
1.1.2	Retribusi Aceh	6.317.974.149,00	6.346.061.307,00	3.701.216.511,00	4.799.510.950,00	9.504.916.327,71	8.050.858.918,00	14,24
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	96.317.227.941,52	123.628.754.544,62	134.013.450.262,27	165.102.922.402,00	176.799.446.549,91	180.887.942.292,61	13,43
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	111.608.357.783,11	442.613.530.001,57	562.736.997.703,87	629.461.449.762,98	621.131.497.869,71	771.972.872.543,11	71,71
1.2	Dana Perimbangan	1.334.800.285.120,00	2.675.448.212.109,00	2.551.683.310.691,00	1.561.778.472.543,00	1.572.466.631.620,00	3.802.879.497.580,00	39,91
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	251.127.884.759,00	254.514.662.920,00	77.430.824.152,00	253.017.430.543,00	178.613.269.620,00	253.413.238.471,00	34,20
1.2.2	Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain	122.177.983.361,00	1.253.339.521.189,00	1.199.685.909.539,00	-	-	-	273,85
1.2.3	Dana Alokasi Umum	911.080.707.000,00	1.092.445.518.000,00	1.201.612.787.000,00	1.237.894.986.000,00	1.263.870.989.000,00	2.060.263.235.000,00	19,61
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	50.413.710.000,00	75.148.510.000,00	72.953.790.000,00	70.866.056.000,00	129.982.373.000,00	1.489.203.024.109,00	234,48
1.3	Dana Otonomi Khusus	5.476.288.764.000,00	6.222.785.783.000,00	6.824.386.514.000,00	7.057.756.971.000,00	7.707.216.942.000,00	7.971.646.295.000,00	7,80
1.3.1	Dana Otonomi Khusus	5.476.288.764.000,00	6.222.785.783.000,00	6.824.386.514.000,00	7.057.756.971.000,00	7.707.216.942.000,00	7.971.646.295.000,00	7,80
1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.467.333.622.697,00	448.157.434.047,00	498.974.595.687,20	1.088.792.438.768,00	1.024.699.456.976,00	300.159.153.657,00	-3,30
1.4.1	Hibah	-	741.628.280,00	1.667.770.470,00	66.133.149.107,00	3.792.303.519,00	47.075.806.385,00	1259,33
1.4.2	Dana Penyesuaian	1.467.333.622.697,00	432.605.240.000,00	462.389.061.500,00	1.022.659.289.661,00	1.020.035.318.320,00	234.491.486.238,00	-3,95
1.4.3	Pendapatan Lainnya	-	14.810.565.767,00	34.917.763.717,20	-	871.835.137,00	18.591.861.034,00	1084,13
2	BELANJA ACEH	8.757.319.943.552,18	11.220.427.555.133,80	12.045.847.341.692,80	12.135.635.484.500,70	12.119.713.196.647,10	13.832.848.610.133,30	9,57
2.1	Belanja Tidak langsung	3.408.378.594.693,18	3.464.270.270.075,42	5.580.021.261.497,02	5.629.812.062.575,69	6.028.564.352.590,14	7.165.446.315.369,75	16,02
2.1.1	Belanja Pegawai	774.594.474.391,00	819.274.025.175,00	870.169.542.936,50	899.104.776.762,00	928.936.862.396,00	2.237.661.114.167,50	31,90
2.1.2	Belanja Hibah	1.065.211.457.183,00	1.219.682.992.675,00	693.008.972.946,00	642.368.429.121,00	1.167.158.911.837,00	658.892.922.198,00	0,43

NO	URAIAN	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	515.656.041.417,00	292.533.440.000,00	309.012.898.980,00	237.866.300.000,00	228.993.000.000,00	249.604.480.000,00	-11,08
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	262.803.875.869,18	269.719.474.396,42	298.490.577.100,52	503.280.080.311,69	659.116.002.216,14	588.330.573.787,75	17,49
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	693.635.000.000,00	801.680.059.868,00	3.407.472.166.724,00	3.343.547.380.181,00	3.035.461.374.641,00	3.430.551.749.224,50	68,51
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	96.477.745.833,00	61.380.277.961,00	1.867.102.810,00	3.645.096.200,00	8.898.201.500,00	405.475.992,00	2,11
2.2	Belanja Langsung	5.348.941.348.859,00	7.756.157.285.058,39	6.465.826.080.195,75	6.505.823.421.925,05	6.091.148.844.056,93	6.667.402.294.763,53	4,51
2.2.1	Belanja Pegawai	303.248.908.388,00	487.041.502.724,00	535.129.368.526,00	435.005.437.505,00	421.302.250.740,00	503.676.245.344,00	10,68
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.230.353.664.019,00	5.618.995.231.051,39	3.523.217.299.132,75	4.045.714.495.442,05	3.384.994.292.051,51	3.995.426.999.827,53	2,41
2.2.3	Belanja Modal	815.338.776.452,00	1.650.120.551.283,00	2.407.479.412.537,00	2.025.103.488.978,00	2.284.852.301.265,42	2.168.299.049.592,00	21,61
3	PEMBIAYAAN	1.508.840.608.851,30	1.948.740.094.046,82	1.356.465.864.694,80	741.935.123.460,09	217.881.122.545,44	462.731.902.045,70	-0,96
3.1	Penerimaan Pembiayaan	1.508.840.608.851,30	1.968.699.122.182,82	1.399.323.697.019,80	916.244.085.511,09	288.676.554.172,33	462.731.902.045,70	-8,23
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	1.508.840.608.851,30	1.968.699.122.182,82	1.399.323.697.019,80	916.244.085.511,09	286.676.554.172,33	462.731.902.045,70	-8,03
3.1.2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	2.000.000.000,00	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	19.959.028.136,00	42.857.832.325,00	174.308.962.051,00	70.795.431.626,89	-	120,69
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	19.959.028.136,00	42.857.832.325,00	63.355.786.795,00	65.945.431.626,89	-	55,55
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	108.804.841.916,00	4.850.000.000,00	-	-95,54
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	148.333.340,00	-	-	-
3.2.4	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	2.000.000.000,00	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Gambar 3.1 menggambarkan tren realisasi Pendapatan dan Belanja Aceh selama periode tahun 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan (naik). Sebaliknya tren realisasi pembiayaan Aceh selama periode tahun 2012-2017 cenderung mengalami penurunan. Defisit anggaran terjadi pada tahun 2013-2015, dimana realisasi Belanja Aceh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Aceh. Sementara itu pada tahun 2012, 2016-2017 terdapat surplus anggaran, hal ini disebabkan karena realisasi Belanja Aceh lebih rendah jika dibandingkan dengan Pendapatan Aceh. Lebih rinci mengenai kinerja pelaksanaan APBA periode tahun 2012-2017 dijelaskan pada sub bab berikut ini.



Gambar 3.1. Realisasi APBA Berdasarkan Komponen Tahun 2012-2017

3.1.1.1 Pendapatan Aceh

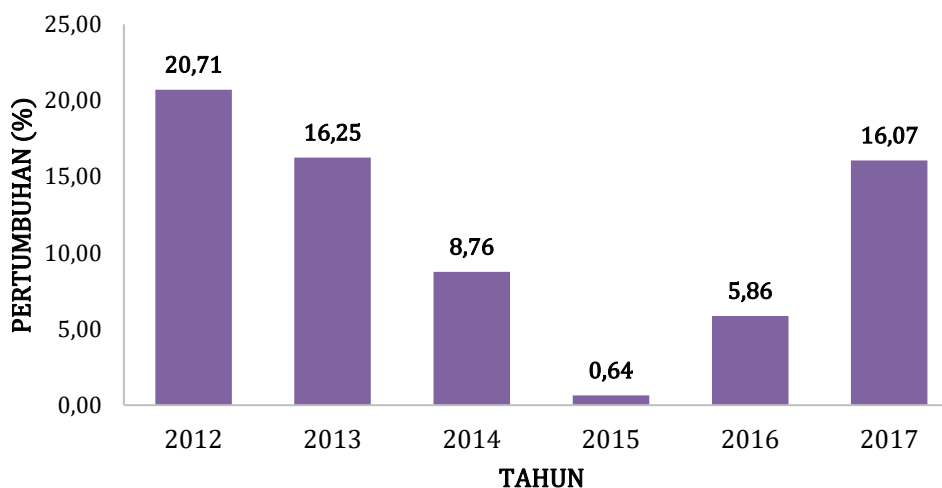
Realisasi Pendapatan Aceh selama periode tahun 2012-2017 tumbuh sebesar 9,35 persen, dimana pada tahun 2012 realisasi Pendapatan Aceh mencapai Rp. 9.180.143.048.437,63 dan terus meningkat menjadi Rp. 14.350.990.515.050,70 pada tahun 2017. Pada tahun 2012-2014 realisasi Pendapatan Aceh melebihi dari target anggaran pendapatan yang direncanakan (diatas 100%), sebaliknya tahun 2015-2017 realisasi Pendapatan Aceh tidak mencapai target yang telah direncanakan (dibawah 100 persen) (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	8.683.092.406.384,00	9.180.143.048.437,63	105,72	20,71
2013	10.471.540.786.549,00	10.671.826.520.445,20	101,91	16,25
2014	11.539.505.689.891,00	11.606.175.260.015,30	100,58	8,76
2015	11.941.681.508.075,00	11.680.376.915.213,00	97,81	0,64
2016	12.551.166.051.800,00	12.364.563.976.147,30	98,51	5,86
2017	14.448.900.907.863,00	14.350.990.515.050,70	99,32	16,07
Rata-Rata Pertumbuhan (CAGR)				9,35

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Jika dilihat dari pertumbuhan realisasi Pendapatan Aceh selama periode tahun 2012-2017, pertumbuhan realisasi tertinggi adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 20,71 persen, kemudian terus mengalami penurunan pertumbuhan sampai tahun 2015 yang hanya tumbuh sebesar 0,64 persen. Hal ini disebabkan adanya penurunan realisasi Dana Perimbangan yang hampir mencapai 61,71 persen dari anggaran sebesar Rp. 2.551.683.310.691,00 menjadi Rp. 1.561.778.472.543,00. Pada tahun 2016-2017 pertumbuhan realisasi Pendapatan Aceh kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 16,07 persen (Gambar 3.2).



Gambar 3.2. Grafik Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2012-2017

Tabel 3.4 menunjukkan proporsi realisasi PAA terhadap total Pendapatan Aceh selama periode tahun 2012-2017 cenderung meningkat/naik. Peningkatan realisasi PAA ini bersumber dari pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal Aceh dan Lain-Lain PAA yang Sah. Sebaliknya untuk Dana Perimbangan cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya penurunan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil hidrokarbon dan sumber daya alam. Tren proporsi Dana OTSUS selama periode tahun 2012-2017 cenderung naik/bertambah, seiring dengan meningkatkan DAU Nasional. Sementara itu, jika dilihat dari tren proporsi Lain-Lain Pendapatan Aceh yang sah selama periode tahun 2012-2017 juga cenderung mengalami peningkatan.

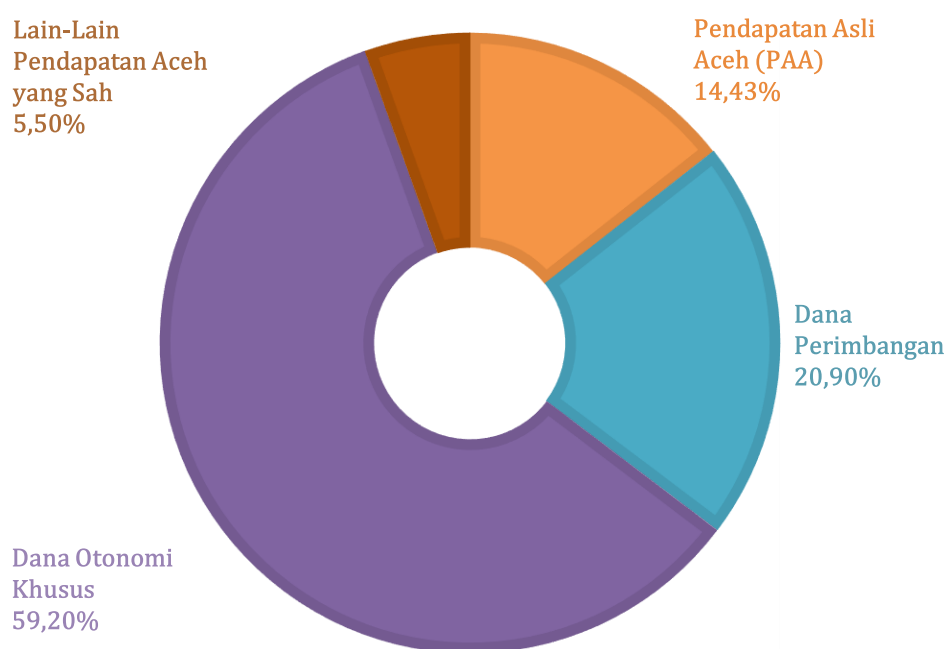
**Tabel 3.4.
Proporsi Realisasi Jenis Penerimaan Aceh Terhadap Total Pendapatan Aceh
Tahun 2012-2017**

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Aceh (%)						Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pendapatan Asli Aceh	9,82	12,42	14,92	16,88	16,66	15,90	14,43
Dana Perimbangan	25,71	25,07	21,99	13,37	12,72	26,57	20,90
Dana Otonomi Khusus	59,65	58,31	58,80	60,42	62,33	55,69	59,20
Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah	4,82	4,20	4,30	9,32	8,29	2,10	5,50
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Gambar 3.3 menunjukkan selama periode tahun 2012-2017 Dana OTSUS memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Aceh dibandingkan dengan jenis penerimaan Aceh lainnya yaitu sebesar 59,20 persen. Sebaliknya kontribusi PAA dalam kurun waktu yang sama masih tergolong

kecil hanya mencapai 14,39 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Aceh masih sangat tergantung pada penerimaan Dana OTSUS dalam membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kondisi ini tidak baik terhadap kemandirian fiskal Aceh. Terlebih lagi pendapatan dari Dana OTSUS tersebut merupakan jenis pendapatan yang tidak terjamin kesinambungannya. Masih rendahnya kontribusi PAA ini mencerminkan belum optimalnya upaya perolehan pendapatan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Selama ini sumber PAA masih didominasi oleh pajak Aceh terutama pajak kendaraan bermotor yang pertumbuhannya memiliki keterbatasan dan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kedepan diharapkan untuk peningkatan kontribusi PAA terhadap pendapatan Aceh perlu segera dicari terobosan baru untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang lebih prospektif.



Gambar 3.3. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Aceh Tahun 2012-2017

Untuk menghasilkan PAA secara berkelanjutan maka Pemerintah Aceh selama periode tahun 2012-2017 telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penyusunan regulasi pemungutan Pajak Aceh;
2. Penyusunan regulasi pemungutan Retribusi Aceh;
3. Membangun teknologi informasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Membangun layanan unggulan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
5. Pemutakhiran basis data subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor;
6. Melakukan pelatihan teknis aparatur pemungutan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh;
7. Melakukan koordinasi dan penegakan hukum;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemungutan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.

3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Pendapatan Asli Aceh (PAA) merupakan pendapatan yang diperoleh Aceh berdasarkan Qanun (Peraturan Daerah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana dalam rangka

membiayai kegiatan pembangunan Aceh. Realisasi PAA selama periode tahun 2012-2017 terus meningkat dari Rp. 901.720.376.620,63 untuk tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp. 2.276.305.568.813,72 tahun 2017. Persentase realisasi PAA mencapai diatas 100 persen terdapat pada tahun 2012-2013, 2016-2017. Sebaliknya pada tahun 2014 dan 2015 persentase realisasi PAA tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan (dibawah 100 persen) (Tabel 3.5).

Tabel 3.5.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	804.284.999.424,00	901.720.376.620,63	112,11	12,32
2013	1.167.694.484.330,00	1.325.435.091.289,19	113,51	46,99
2014	1.849.214.279.799,00	1.731.130.839.637,14	93,61	30,61
2015	2.078.154.534.331,00	1.972.049.032.901,98	94,89	13,92
2016	2.057.481.533.300,00	2.060.180.945.551,33	100,13	4,47
2017	2.247.274.970.755,00	2.276.305.568.813,72	101,29	10,49
Rata-Rata Pertumbuhan (CAGR)				20,35

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3.4 di atas dapat juga dilihat rasio efektifitas kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Perhitungan rasio efektifitas PAD dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas keuangan suatu daerah, menggambarkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah semakin baik (Tabel 3.6).

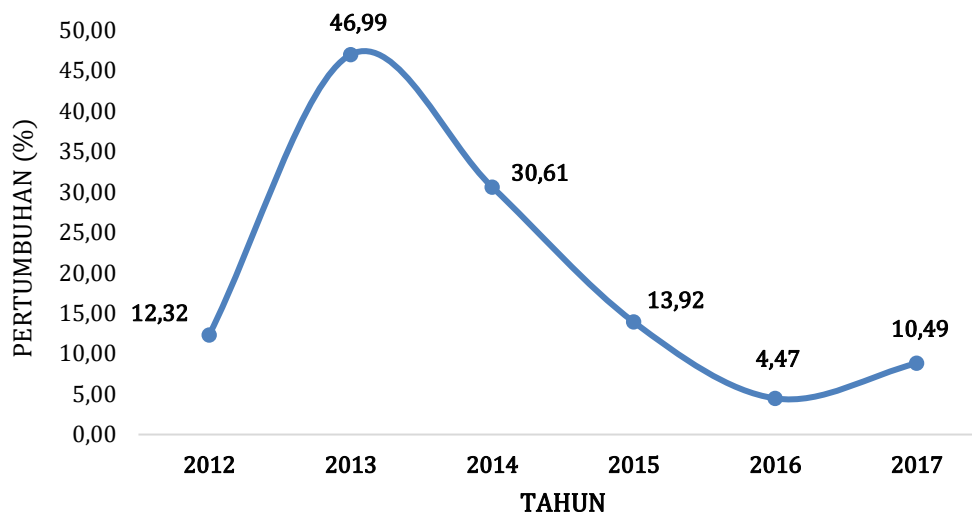
Tabel 3.6.
Skala Interval Efektivitas Keuangan Daerah

Efektifitas Keuangan Daerah (%)	Kriteria
Lebih dari 100	Sangat efektif
90 - 100	Efektif
80 - 90	Cukup efektif
60 - 80	Kurang efektif
Kurang dari 60.00	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri, 1996

Dari hasil perhitungan (Tabel 3.5) dan interpretasi skala internal efektivitas keuangan daerah (Tabel 3.6), secara keseluruhan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah selama periode tahun 2012-2017 mencapai 102,59 persen (diatas 100%) yang berarti bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya berjalan sangat efektif. Selanjutnya bila dilihat dari segi pertumbuhan, rata-rata PAA selama periode tahun 2012-2017 tumbuh sebesar 20,35 persen. Pertumbuhan PAA tertinggi adalah pada tahun 2013 yang mencapai 46,99 persen. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi yang sangat signifikan dari komponen PAA yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal

Aceh serta lain-lain PAA yang sah melalui a) kebijakan Pemerintah Aceh untuk pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Non BL, b) Laba dari PT. Bank Aceh, c) terbentuknya BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) dan d) mulai dicatatnya Bunga Deposito Dana Cadangan Pemerintah Aceh sebagai PAD. Secara keseluruhan pertumbuhan realisasi PAA cenderung mengalami perlambatan (Gambar 3.4).



Gambar 3.4. Pertumbuhan Realisasi PAA Tahun 2012-2017

Realisasi Pajak Aceh selama periode tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 realisasi Pajak Aceh mencapai sebesar Rp. 687.476.816.747,00 dan terus meningkat menjadi Rp. 1.315.393.895.060,00 pada tahun 2017. Sebagian besar realisasi Pajak Aceh selama periode tahun 2012-2017 mencapai target yang telah direncanakan, kecuali pada tahun 2015 dari target anggaran sebesar Rp. 1.228.199.449.729,00 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 1.172.685.149.787,00 atau hanya mencapai 95,48 persen. Hal ini disebabkan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok tidak terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Pertumbuhan realisasi Pajak Aceh selama periode tahun 2012-2017 tumbuh sebesar 13,86 persen, dimana pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 36,90 persen, sementara pertumbuhan realisasi terendah terdapat pada tahun 2017 sebesar 5,00 persen (Tabel 3.7).

**Tabel 3.7.
Anggaran dan Realisasi Pajak Aceh Tahun 2012-2017**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	622.705.834.000,00	687.476.816.747,00	110,40	17,28
2013	690.468.221.122,00	752.846.745.436,00	109,03	9,51
2014	985.045.441.852,00	1.030.679.175.160,00	104,63	36,90
2015	1.228.199.449.729,00	1.172.685.149.787,00	95,48	13,78
2016	1.219.985.562.000,00	1.252.745.084.804,00	102,69	6,83
2017	1.299.742.665.000,00	1.315.393.895.060,00	101,20	5,00
Rata-Rata Pertumbuhan (CAGR)				13,86

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Sesuai Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Rincian PAA yang bersumber dari Retribusi Aceh mencakup retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan Tabel 3.8 diketahui realisasi Retribusi Aceh selama periode tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 Retribusi Aceh berjumlah sebesar Rp. 6.317.974.149,00 meningkat mencapai Rp. 8.050.858.918,00 pada tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,24 persen. Pada tahun 2012-2014 realisasi Retribusi Aceh masih belum optimal. Hal ini disebabkan pada tahun 2012 dasar hukum pemungutan Retribusi Aceh masih menggunakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah tahun 1999. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa maksimal 2 (dua) tahun masih diperbolehkan menggunakan peraturan daerah yang lama untuk pemungutan retribusi. Namun pada tahun 2013 sudah harus menggunakan peraturan daerah/qanun yang baru. Ironisnya, Qanun Aceh tentang Retribusi Aceh sampai tahun 2013 belum ditetapkan sehingga Retribusi Aceh tidak memiliki target anggaran. Kemudian pada akhir tahun 2014 qanun retribusi Aceh ditetapkan, sehingga pemungutan retribusi Aceh efektif dilaksanakan pada tahun 2015.

Tabel 3.8.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Aceh Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	21.095.694.260,00	6.317.974.149,00	29,95	-32,90
2013	-	6.346.061.307,00	-	0,44
2014	20.000.000.000,00	3.701.216.511,00	18,51	-41,68
2015	4.993.750.000,00	4.799.510.950,00	96,11	29,67
2016	11.802.500.000,00	9.504.916.327,71	80,53	98,04
2017	11.652.317.000,00	8.050.858.918,00	69,09	-15,30
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				14,24

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Tabel 3.9 menginformasikan realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh selama periode tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya realisasi penerimaan deviden Pemerintah Aceh sejalan dengan besarnya keuntungan PT. Bank Aceh dan BPR Mustakim Sukamakmur. Pada tahun 2012 realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh berjumlah sebesar Rp. 96.317.227.941,52 meningkat menjadi Rp. 180.887.942.292,61 atau tumbuh sebesar 13,43 persen. Pertumbuhan realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 45,92 persen. Sementara pertumbuhan terendah adalah sebesar 7,08 persen pada tahun 2016.

Tabel 3.9.
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	102.000.000.000,00	96.317.227.941,52	94,43	45,92
2013	102.000.000.000,00	123.628.754.544,62	121,20	28,36
2014	135.178.099.215,00	134.013.450.262,27	99,14	8,40
2015	166.500.000.000,00	165.102.922.402,00	99,16	23,20
2016	201.085.953.000,00	176.799.446.549,91	87,92	7,08
2017	226.982.069.855,00	180.887.942.292,61	79,69	2,31
Rata-Rata Pertumbuhan (CAGR)				13,43

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah terdiri dari beberapa komponen yang meliputi: penambahan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan zakat, pendapatan BLUD (RSUZA, RSIA dan RSJ). Realisasi Lain-Lain PAA yang Sah selama periode tahun 2012-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2012 realisasi hanya sebesar Rp. 111.608.357.783,11 terus meningkat sampai tahun 2017 mencapai Rp. 771.972.872.543,11 atau rata-rata tumbuh sebesar 71,71 persen. Hal ini disebabkan meningkatnya penerimaan dari Jasa Giro Kas Umum Aceh, Denda Keterlambatan Perkerjaan dan Pengembalian Dana Hibah Pemerintah Aceh. Pada tahun 2013 realisasi mencapai 117,96 persen dengan pertumbuhan sebesar 296,58 persen. Hal ini disebabkan telah dibentuknya BLUD RSUDZA, RSJ dan RSIA serta pengembalian dari denda keterlambatan pekerjaan dan jasa giro kas umum Aceh dari Bunga Deposito Dana Cadangan Umum Pemerintah Aceh. Selanjutnya tahun 2014 realisasi pendapatan hanya sebesar 79,37 persen diakibatkan oleh tidak terealisasinya Penjualan Aset Pemerintah Aceh dan Denda Keterlambatan Pekerjaan yang telah ditargetkan (Tabel 3.10).

Tabel 3.10.
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	58.483.471.164,00	111.608.357.783,11	190,84	-20,98
2013	375.226.263.208,00	442.613.530.001,57	117,96	296,58
2014	708.990.738.732,00	562.736.997.703,87	79,37	27,14
2015	678.461.334.602,00	629.461.449.762,98	92,78	11,86
2016	624.607.518.300,00	621.131.497.869,71	99,44	-1,32
2017	708.897.918.900,00	771.972.872.543,11	108,90	24,28
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				71,71

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.1.1.2 Dana Perimbangan

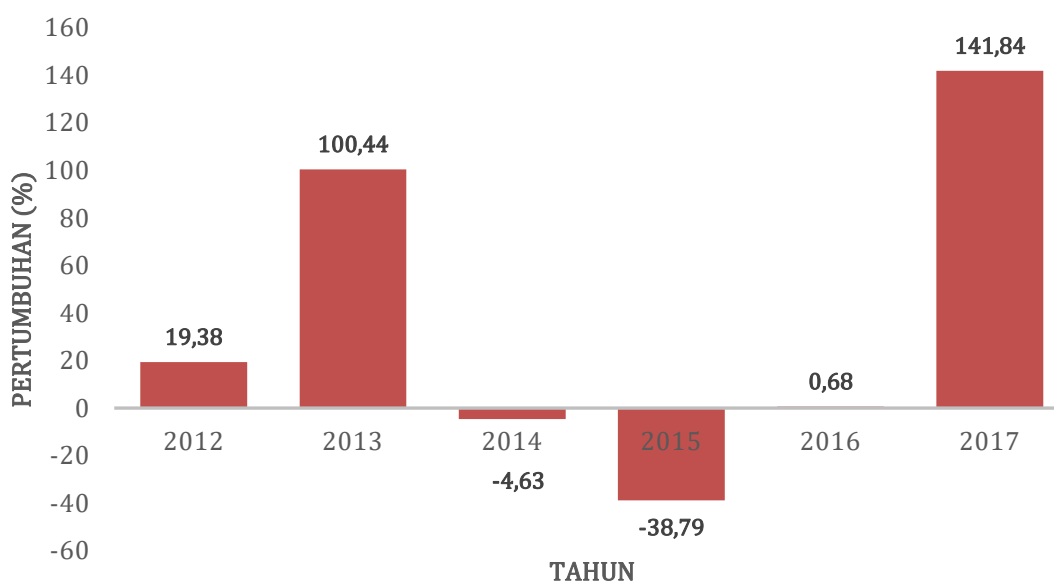
Dana Perimbangan yang disebut juga dengan dana transfer/grants adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membiayai kebutuhan daerah. Selama periode tahun 2012-2017 realisasi Dana Perimbangan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp. 1.334.800.285.120,00, kemudian meningkat menjadi Rp. 3.802.879.497.580,00 pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 39,91 persen. Persentase realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2012, 2015-2017 tidak mencapai target yang telah direncanakan (di bawah 100 persen). Hal ini disebabkan tidak terealisasinya dana bagi hasil pajak dan DAK sesuai dengan yang telah direncanakan (Tabel 3.11).

Tabel 3.11.
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	1.400.470.729.960,00	1.334.800.285.120,00	95,31	19,38
2013	2.563.800.263.239,00	2.675.448.212.109,00	104,35	100,44
2014	2.399.219.008.811,00	2.551.683.310.691,00	106,35	-4,63
2015	1.672.168.776.367,00	1.561.778.472.543,00	93,40	-38,79
2016	1.670.711.099.000,00	1.572.466.631.620,00	94,12	0,68
2017	3.871.303.445.600,00	3.802.879.497.580,00	98,23	141,84
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				39,91

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Gambar 3.5 menunjukkan pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan tahun 2012 adalah sebesar 19,38 persen, kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 100,44 persen. Peningkatan pertumbuhan ini disebabkan karena adanya kenaikan realisasi dari komponen dana bagi hasil hidrokarbon dan SDA lain yang mencapai 925,83 persen dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp. 122.177.983.361,00 menjadi Rp. 1.253.339.521.189,00 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan tumbuh negatif sebesar minus 4,63 persen, kemudian tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi minus 38,79 persen. Penurunan ini disebabkan karena adanya pengalihan dana bagi hasil hidrokarbon dan Sumber Daya Alam lainnya. Pada tahun 2016 realisasi dana perimbangan kembali tumbuh positif sebesar 0,68 persen dan terus meningkat mencapai 141,84 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan ini diakibatkan adanya kenaikan realisasi Dana Perimbangan yang bersumber dari DAU dan DAK.



Gambar 3.5. Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012-2017

Menurut komponen Dana Perimbangan, secara umum realisasi dana bagi hasil pajak tahun 2012-2017 tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan (dibawah 100%) kecuali tahun 2017 dengan persentase realisasi mencapai 101,32 persen. Bila ditinjau dari segi pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2012-2017 adalah sebesar 34,20 persen. Tahun 2012 pertumbuhan realisasi dana bagi hasil pajak tumbuh sebesar 11,79 persen, kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2014 menjadi minus 69,58 persen. Hal ini disebabkan oleh perubahan regulasi terkait pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2015 dana bagi hasil pajak kembali tumbuh positif yaitu mencapai 226,77 persen. Peningkatan pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan negara atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan dan orang pribadi dalam negeri atas PPh menurut Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta PPh atas pemungutan/pemotongan penghasilan wajib pajak menurut Pasal 21 UU PPh. Pada tahun 2016 realisasi Dana Bagi Hasil Pajak kembali tumbuh negatif (minus 29,41%), kemudian kembali tumbuh positif pada tahun 2017 sebesar 41,88 persen (Tabel 3.12).

Tabel 3.12.
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	263.467.966.064,00	251.127.884.759,00	95,32	11,79
2013	257.523.712.089,00	254.514.662.920,00	98,83	1,35
2014	197.662.588.080,00	77.430.824.152,00	39,17	-69,58
2015	345.691.220.367,00	253.017.430.543,00	73,19	226,77
2016	251.589.610.000,00	178.613.269.620,00	70,99	-29,41
2017	250.108.054.300,00	253.413.238.471,00	101,32	41,88
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				34,20

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selama periode tahun 2012-2017 realisasi DAU Aceh mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 realisasi DAU Aceh mencapai Rp. 911.080.707.000,00, dan terus meningkat menjadi Rp. 2.060.263.235.000,00 pada tahun 2017, dengan persentase realisasi mencapai 100 persen. Sementara itu, bila dilihat dari segi pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan DAU Aceh selama periode tahun 2012-2017 tumbuh sebesar 19,61 persen. Pertumbuhan realisasi DAU Aceh pada tahun 2012 mencapai 27,13 persen, kemudian terus mengalami penurunan menjadi 2,10 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017 DAU kembali tumbuh mencapai 63,01 persen. Hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan negara, sehingga alokasi DAU per daerah juga semakin besar (Tabel 3.13).

Tabel 3.13.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	911,080,707,000.00	911,080,707,000.00	100.00	27,13
2013	1,092,445,518,000.00	1,092,445,518,000.00	100.00	19,91
2014	1,201,612,787,000.00	1,201,612,787,000.00	100.00	9,99
2015	1,237,894,986,000.00	1,237,894,986,000.00	100.00	3,02
2016	1,263,870,989,000.00	1,263,870,989,000.00	100.00	2,10
2017	2.060.263.235.000,00	2.060.263.235.000,00	100,00	63,01
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				19,61

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Pada tahun 2012 realisasi DAK berjumlah sebesar Rp. 50.413.710.000,00, kemudian meningkat menjadi Rp. 75.148.510.000,00 tahun 2013. Pada tahun 2014 realisasi DAK turun menjadi Rp. 72.953.790.000,00 dan terus mengalami penurunan menjadi Rp. 70.866.056.000,00 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 realisasi DAK meningkat tajam menjadi Rp. 129.982.373.000,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan dana DAK untuk bidang perdagangan dan bidang keselamatan transportasi.

Realisasi DAK mencapai 100 persen terdapat pada tahun 2012-2014, sementara tahun 2015-2016 realisasi berada dibawah 100 persen. Selama periode tahun 2012-2017 realisasi DAK tumbuh sebesar 234,48 persen, dimana pada tahun 2012 tumbuh negatif minus 0,39 persen, kemudian tahun 2013 meningkat menjadi 49,06 persen. Pada tahun 2014-2015 pertumbuhan realisasi DAK kembali mengalami penurunan (tumbuh negatif) yakni sebesar minus 2,92 persen dan minus 2,86 persen, kemudian kembali tumbuh positif pada tahun 2016 mencapai 83,42. Tahun 2017 merupakan tahun tertinggi realisasi DAK Aceh yang mencapai Rp. 1.489.203.024.109,00 atau tumbuh sebesar 1045,70 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya penerimaan DAK reguler (DAK Bidang Infrastruktur Jalan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan). Disamping itu, untuk tahun 2017 Aceh juga memperoleh DAK Reguler (DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah), DAK Non Fisik (BOS Satuan Pendidikan Provinsi, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM dan Pelayanan Administrasi Kependudukan) (Tabel 3.14).

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	50.413.710.000,00	50.413.710.000,00	100,00	-0,39
2013	75.148.510.000,00	75.148.510.000,00	100,00	49,06
2014	72.953.790.000,00	72.953.790.000,00	100,00	-2,92
2015	88.582.570.000,00	70.866.056.000,00	80,00	-2,86
2016	155.250.500.000,00	129.982.373.000,00	83,72	83,42
2017	1.560.932.156.300,00	1.489.203.024.109,00	95,40	1045,70
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				234,48

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.1.1.3 Dana Otonomi Khusus

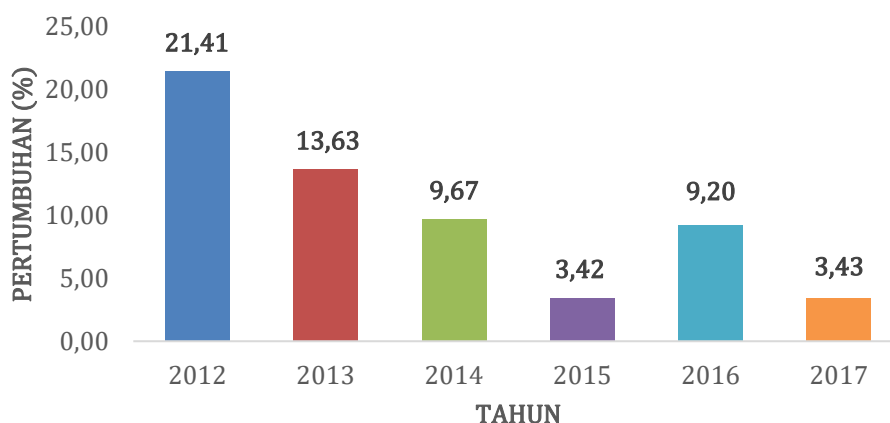
Pasal 183 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Selanjutnya, pada Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, menyebutkan bahwa Dana OTSUS ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana otonomi khusus juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh. Realisasi Dana OTSUS selama periode tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya DAU Nasional. Pada tahun 2012 realisasi Dana OTSUS mencapai Rp. 5.476.288.764.000,00 dan terus meningkat menjadi Rp. 7.971.646.295.000,00 pada tahun 2017 atau tumbuh sebesar 7,80 persen (Tabel 3.15).

Tabel 3.15.
Anggaran dan Realisasi Otonomi Khusus Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	5.476.288.764.000,00	5.476.288.764.000,00	100,00	21,41
2013	6.222.785.783.000,00	6.222.785.783.000,00	100,00	13,63
2014	6.824.386.514.000,00	6.824.386.514.000,00	100,00	9,67
2015	7.057.756.971.000,00	7.057.756.971.000,00	100,00	3,42
2016	7.707.216.942.000,00	7.707.216.942.000,00	100,00	9,20
2017	7.971.646.295.000,00	7.971.646.295.000,00	100,00	3,43
Rata-Rata Pertumbuhan (CAGR)				7,80

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Bila dilihat dari tingkat pertumbuhan realisasi Dana OTSUS selama periode tahun 2012-2017 cenderung mengalami perlambatan. Pertumbuhan realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2012 sebesar 21,41 persen, tahun berikutnya terus mengalami penurunan pertumbuhan sampai Tahun 2015 menjadi 3,42 persen dan kembali meningkat pada Tahun 2016 menjadi 9,20 persen, kemudian tahun 2017 kembali mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 3,43 persen (Gambar 3.6).



Gambar 3.6. Pertumbuhan Realisasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2012-2017

3.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah

Pendapatan Aceh dari Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Penyesuaian, Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar, Pendapatan lainnya dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Realisasi Pendapatan Aceh dari Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah selama periode tahun 2012-2017 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2012 realisasi mencapai Rp. 1.467.333.622.697,00, kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi Rp. 448.157.434.047,00. Hal ini disebabkan oleh pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Askes dan PT Taspen serta pengembalian dana hibah Pemerintah Aceh dan *Water Resources and Irrigation Sector Management Programme* (WISMP) pada tahun 2013. Pada tahun 2014 realisasi kembali meningkat menjadi Rp. 498.974.595.687,20 dan terus meningkat tajam menjadi Rp. 1.088.792.438.768,00 pada tahun 2015. Peningkatan realisasi ini disebabkan oleh adanya realisasi dari dana BOS dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) guru. Pada tahun 2016

pertumbuhan realisasi kembali mengalami pertumbuhan negatif (minus 5,89%) dan terus mengalami pertumbuhan negatif hingga mencapai minus 70,71 persen pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan adanya pengalihan Dana BOS kedalam objek pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan. Selama periode tahun 2012-2017 realisasi Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah tumbuh negatif (minus 3,30 %) (Tabel 3.16).

Tabel 3.16.
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	1.002.047.913.000,00	1.467.333.622.697,00	146,43	25,03
2013	514.004.992.430,00	448.157.434.047,00	87,05	-69,46
2014	463.066.040.000,00	498.974.595.687,20	107,39	11,34
2015	1.067.370.323.461,00	1.088.792.438.768,00	95,81	118,21
2016	1.106.918.994.000,00	1.024.699.456.976,00	92,23	-5,89
2017	358.676.196.508,00	300.159.153.657,00	83,69	-70,71
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				-3,30

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.1.2 Belanja Aceh

Selama periode tahun 2012-2017 rata-rata realisasi Belanja Aceh mencapai 92,64 persen. Realisasi ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 94,73 persen dan Belanja Langsung (BL) sebesar 90,59 persen. Untuk BTL, rata-rata realisasi tertinggi terdapat pada belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa yang mencapai 99,41 persen, dan terendah pada belanja pegawai sebesar 92,64 persen. Sementara untuk BL, realisasi tertinggi terdapat pada belanja pegawai sebesar 95,20 persen dan yang terendah adalah pada belanja modal sebesar 88,54 persen (Tabel 3.17).

Tabel 3.17.
Realisasi Belanja Aceh Tahun 2012-2017

No	Uraian	Tahun						Rata-Rata (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	BELANJA	90,17	90,50	93,09	95,18	94,14	92,77	92,64
1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	91,82	86,37	96,46	98,33	98,84	96,55	94,73
1.1.1	Belanja Pegawai	87,57	90,01	91,61	96,26	97,67	92,73	92,64
1.1.2	Belanja Hibah	92,38	92,07	93,38	99,20	98,73	96,77	95,42
1.1.3	Belanja Bantuan Sosial	92,54	81,60	90,12	92,13	95,05	93,05	90,75
1.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	96,98	98,08	99,50	100,00	99,90	99,98	99,07
1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	99,63	97,88	99,47	99,84	99,67	100,00	99,41
1.1.6	Belanja Tidak Terduga	64,32	18,97	7,67	10,88	44,49	1,01	24,56
1.2	BELANJA LANGSUNG	89,15	92,47	90,37	92,62	89,90	89,02	90,59
1.2.1	Belanja Pegawai	93,11	103,06	98,36	93,37	92,51	90,81	95,20
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91,90	91,64	88,85	91,25	90,47	89,58	90,62
1.2.3	Belanja Modal	76,12	92,54	91,01	95,32	88,62	87,60	88,54

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.1.2.1 Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) selama periode tahun 2012-2017 berjumlah sebesar Rp. 31.276.492.856.801,20. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Aceh, rasio realisasi BTL terhadap realisasi Belanja Aceh selama periode tahun 2012-2017 berkisar antara 0,31 – 0,52. Rasio realisasi BTL terhadap realisasi Belanja Aceh tertinggi terdapat pada tahun 2017 yakni sebesar 0,52. Pada tahun 2013 merupakan tahun terendah rasio realisasi BTL terhadap realisasi Belanja Aceh yakni sebesar 0,31. Hal ini menggambarkan bahwa tren rasio realisasi BTL terhadap realisasi Belanja Aceh selama periode tahun 2012-2017 mengalami peningkatan. Lebih jelas mengenai rasio realisasi BTL terhadap belanja Aceh selama periode tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18.
Rasio Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Belanja Aceh Tahun 2012-2017

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp.)	Belanja Aceh (Rp.)	Rasio
2012	3.408.378.594.693,18	8.757.319.943.552,18	0,39
2013	3.464.270.270.075,42	11.220.427.555.133,80	0,31
2014	5.580.021.261.497,02	12.045.847.341.692,80	0,46
2015	5.629.812.062.575,69	12.135.635.484.500,70	0,46
2016	6.028.564.352.590,14	12.119.713.196.647,10	0,50
2017	7.165.446.315.369,75	13.832.848.610.133,30	0,52
Jumlah	31.276.492.856.801,20	70.111.792.131.659,90	0,45

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.19 diketahui total anggaran BTL selama periode tahun 2012-2017 berjumlah sebesar Rp. 32.754.480.598.082,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.276.492.856.801,20 atau setara dengan 95,49 persen. Menurut jenis belanja BTL, kontribusi realisasi tertinggi bersumber dari belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa yang menyumbang sebesar 47,04 persen, sebaliknya kontribusi terendah bersumber dari belanja tidak terduga sebesar 0,55 persen.

Tabel 3.19.
Total Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Aceh Tahun 2012-2017

No	Uraian	Total Anggaran	Total Realisasi		
		(Rp.)	Rp.	% Anggaran	% Total
1.	Belanja Pegawai	7.042.854.627.933,00	6.529.740.795.828,00	92,71	20,88
2.	Belanja Hibah	5.730.638.838.035,00	5.446.323.685.960,00	95,04	17,41
3.	Belanja Bantuan Sosial	2.025.943.647.162,00	1.833.666.160.397,00	90,51	5,86
4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.597.493.672.818,00	2.581.740.583.681,70	99,39	8,25
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	14.766.043.127.504,00	14.712.347.730.638,50	99,64	47,04
6.	Belanja Tidak Terduga	591.506.679.630,00	172.673.900.296,00	29,19	0,55
	Jumlah BTL	32.754.480.593.082,00	31.276.492.856.801,20	95,49	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Total Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) berdasarkan komponen belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPR serta gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Realisasi belanja pegawai selama periode tahun 2012-2017 adalah sebesar 92,71 persen (Rp. 6.529.740.795.828,00) dari total anggaran sebesar Rp. 7.042.854.627.933,00. Belanja pegawai memberikan kontribusi sebesar 20,88 persen terhadap total realisasi BTL.

b. Belanja Hibah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Realisasi belanja hibah Pemerintah Aceh selama periode tahun 2012-2017 mencapai Rp. 5.446.323.685.960,00 atau setara dengan 95,04 persen dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.730.638.838.035,00. Belanja hibah diberikan kepada Badan/Lembaga, Yayasan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, antara lain diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan tinggi, Dinas Pendidikan dan Dinas Syariah Islam Kab/Kota, Badan Narkotika Nasional (BNN), PMI, bantuan penguatan kelembagaan KPA pusat dan KPA wilayah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/Eks BRA), Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh untuk program beasiswa S-1, S-2 dan S-3 dalam dan luar negeri, Lembaga Dirgantara Aceh (LDA), Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Aceh, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dana BOS untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, serta dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, olah raga, seni budaya dan kegiatan kepemudaan lainnya. Kontribusi belanja hibah terhadap total realisasi BTL adalah sebesar 17,41 persen.

c. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok masyarakat antara lain untuk kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yayasan panti sosial, bantuan sosial dan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, anak yatim, janda dan fakir miskin, bantuan sosial kaum duafa dan lain-lain. Realisasi Belanja Bantuan Sosial selama periode tahun 2012-2017 mencapai Rp. 1.833.666.160.397,00 atau sebesar 90,51 persen dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.025.943.647.162,00. Belanja Bantuan Sosial memberikan kontribusi sebesar 5,86 persen terhadap total realisasi BTL.

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa selama periode tahun 2012-2017 mencapai Rp. 2.581.740.583.681,70 (99,39 persen) dari total anggaran sebesar Rp. 2.597.493.672.818,00. Proporsi realiasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terhadap total realisasi BTL mencapai 8,25 persen.

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Total anggaran belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa selama periode tahun 2012-2017 berjumlah sebesar Rp. 14.766.043.127.504,00, dengan realisasi mencapai 99,64 persen atau sebesar Rp. 14.712.347.730.638,50. Proporsi realiasi Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terhadap total realisasi BTL adalah sebesar 47,04 persen. Besarnya anggaran belanja bantuan keuangan ini disebabkan karena adanya transfer Dana Otsus ke Kabupaten/Kota pada tahun 2014-2016 sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

f. Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga selama periode tahun 2012-2017 mencapai 29,19 persen atau sebesar Rp. 172.673.900.296,00 dari total anggaran sebesar Rp. 591.506.679.630,00. Sementara itu bila dilihat dari proporsi belanja tidak terduga terhadap total realisasi BTL hanya sebesar 0,55 persen.

3.1.1.2.2 Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung (BL) selama periode tahun 2012-2017 berjumlah sebesar Rp. 38.835.299.274.858,60. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Aceh, Rasio realisasi BL terhadap realisasi Belanja Aceh selama periode tahun 2012-2017 berkisar antara 0,48 – 0,69. Rasio tertinggi realisasi BL terhadap realisasi Belanja Aceh terdapat pada tahun 2013 yakni sebesar 0,69. Sebaliknya rasio terendah realisasi BL terhadap realisasi Belanja Aceh adalah sebesar 0,48 terdapat pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan tren rasio realisasi BL terhadap realisasi Belanja Aceh selama periode tahun 2012-2017 mengalami penurunan. Rasio realisasi BL terhadap realisasi Belanja Aceh selama periode tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20.
Rasio Realisasi Belanja Langsung terhadap Realisasi Belanja Aceh Tahun 2012-2017

Tahun	Belanja Langsung (Rp.)	Belanja Aceh (Rp.)	Rasio
2012	5.348.941.348.859,00	8.757.319.943.552,18	0,61
2013	7.756.157.285.058,39	11.220.427.555.133,80	0,69
2014	6.465.826.080.195,75	12.045.847.341.692,80	0,54
2015	6.505.823.421.925,05	12.135.635.484.500,70	0,54
2016	6.091.148.844.056,93	12.119.713.196.647,10	0,50
2017	6.667.402.294.763,53	13.832.848.610.133,30	0,48
Jumlah	38.835.299.274.858,60	70.111.792.131.659,90	0,55

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Realisasi belanja pegawai selama periode tahun 2012-2017 berjumlah sebesar Rp. 2.685.403.713.227,00. Jika dibandingkan dengan realisasi BL, rasio realisasi belanja pegawai terhadap realisasi BL selama periode tahun 2012-2017 berkisar antara 0,06 – 0,08. Tren rasio realisasi belanja pegawai terhadap realisasi BL selama periode tahun 2012-2017 cenderung berfluktuasi. Rasio realisasi belanja pegawai terhadap realisasi BL selama periode tahun 2012-2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21.
Rasio Realisasi Belanja Pegawai terhadap Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012-2017

Tahun	Belanja Pegawai (Rp.)	Belanja Langsung (Rp.)	Rasio
2012	303.248.908.388,00	5.348.941.348.859,00	0,06
2013	487.041.502.724,00	7.756.157.285.058,39	0,06
2014	535.129.368.526,00	6.465.826.080.195,75	0,08
2015	435.005.437.505,00	6.505.823.421.925,05	0,07
2016	421.302.250.740,00	6.091.148.844.056,93	0,07
2017	503.676.245.344,00	6.667.402.294.763,53	0,08
Jumlah	2.685.403.713.227,00	38.835.299.274.858,60	0,07

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Realisasi belanja barang dan jasa selama periode tahun 2012-2017 berjumlah sebesar Rp. 24.798.701.981.524,20. Rasio realisasi belanja barang dan jasa terhadap realisasi BL selama periode tahun 2012-2017 berkisar antara 0,56 – 0,79. Rasio realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2012 yakni sebesar 0,79, sementara terendah terdapat pada tahun 2016 dengan rasio sebesar 0,54. Tren rasio realisasi belanja barang dan jasa terhadap realisasi BL selama periode tahun 2012-2017 cenderung mengalami penurunan (Tabel 3.22).

Tabel 3.22.
Rasio Realisasi Belanja Barang dan Jasa terhadap Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012-2017

Tahun	Belanja Barang dan Jasa (Rp.)	Belanja Langsung (Rp.)	Rasio
2012	4.230.353.664.019,00	5.348.941.348.859,00	0,79
2013	5.618.995.231.051,39	7.756.157.285.058,39	0,72
2014	3.523.217.299.132,75	6.465.826.080.195,75	0,54
2015	4.045.714.495.442,05	6.505.823.421.925,05	0,62
2016	3.384.994.292.051,51	6.091.148.844.056,93	0,56
2017	3.995.426.999.827,53	6.667.402.294.763,53	0,60
Jumlah	24.798.701.981.524,20	38.835.299.274.858,60	0,64

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Realisasi belanja modal selama periode tahun 2012-2017 berjumlah sebesar Rp. 11.351.193.580.107,40. Jika dibandingkan dengan realisasi BL, rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi BL selama periode tahun 2012-2017 berkisar antara 0,15-0,38. Rasio tertinggi terdapat pada tahun 2016 yakni sebesar 0,38, sementara terendah terdapat pada tahun 2015 dengan rasio sebesar 0,15. Tren rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi BL selama periode tahun 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan. Lebih jelas mengenai rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi BL selama periode tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23.
Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Langsung Tahun 2012-2017

Tahun	Belanja Modal (Rp.)	Belanja Langsung (Rp.)	Rasio
2012	815.338.776.452,00	5.348.941.348.859,00	0,15
2013	1.650.120.551.283,00	7.756.157.285.058,39	0,21
2014	2.407.479.412.537,00	6.465.826.080.195,75	0,37
2015	2.025.103.488.978,00	6.505.823.421.925,05	0,31
2016	2.284.852.301.265,42	6.091.148.844.056,93	0,38
2017	2.168.299.049.592,00	6.667.402.294.763,53	0,33
Jumlah	11.351.193.580.107,40	38.835.299.274.858,60	0,29

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Persentase realisasi BL selama periode tahun 2012-2017 mencapai 90,67 persen dari total anggaran sebesar Rp. 42.831.393.637.614,00 terealisasi sebesar Rp. 38.835.299.274.858,70. Realisasi belanja barang dan jasa merupakan kontributor terbesar dalam realisasi total BL yaitu sebesar 63,86 persen, jika dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja modal (Tabel 3.24).

Tabel 3.24.
Anggaran dan Realisasi Total Belanja Langsung Tahun 2012-2017

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Rp.	% Anggaran	% Total
1.	Belanja Pegawai	2.818.372.171.459,00	2.685.403.713.227,00	95,28	6,91
2.	Belanja Barang dan Jasa	27.335.499.057.411,00	24.798.701.981.524,20	90,72	63,86
3.	Belanja Modal	12.677.522.408.744,00	11.351.193.580.107,40	89,54	29,23
Jumlah BL		42.831.393.637.614,00	38.835.299.274.858,70	90,67	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun APBA 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Lebih rinci berikut ini dijelaskan realisasi Belanja Langsung (BL) selama periode tahun 2012-2017 yang diklasifikasikan menurut sumbernya sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam belanja langsung merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau tujuan organisasi. Realisasi belanja pegawai tahun 2012-2017 mencapai 95,28 persen atau sebesar Rp. 2.685.403.713.227,00 dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.818.372.171.459,00. Belanja pegawai memberikan kontribusi realisasi terhadap total BL sebesar 6,91 persen.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi belanja barang dan jasa selama tahun 2012-2017 mencapai Rp. 24.798.701.981.524,20 atau setara dengan 90,72 persen dari total anggaran sebesar Rp. 27.335.499.057.411,00. Realisasi belanja barang dan jasa memberikan kontribusi terbesar terhadap total BL yakni sebesar 63,86 persen.

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Aceh yang digunakan untuk perolehan aset tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi belanja modal periode tahun 2012-2017 mencapai 89,54 persen atau setara dengan Rp. 11.351.193.580.107,40 dari total rencana anggaran sebesar Rp. 12.677.522.408.744,00. Kontribusi realisasi belanja modal terhadap total BL mencapai 29,23 persen.

3.1.1.3 Pembiayaan Aceh

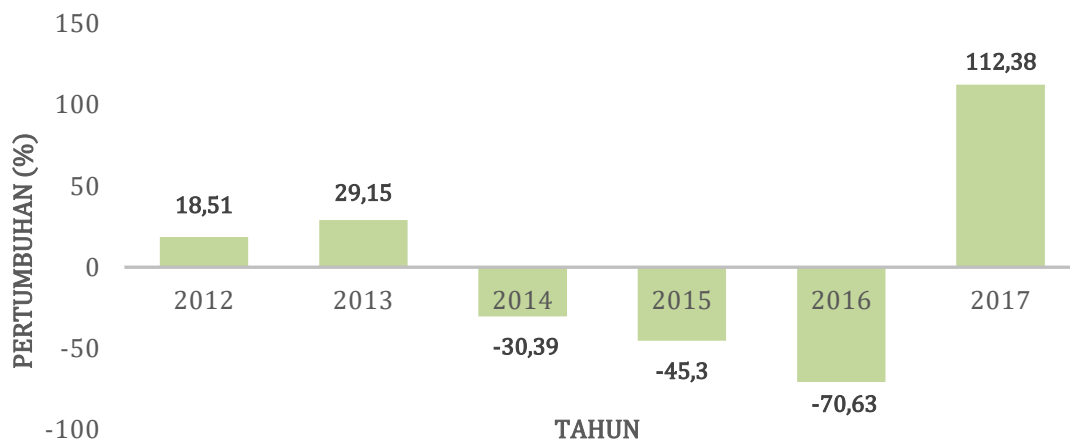
Pembiayaan Aceh terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Aceh, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang Aceh dan penerbitan obligasi Aceh. Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Aceh, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman dan pembayaran nilai nominal obligasi. Realisasi Pembiayaan Aceh selama periode tahun 2012-2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012 realisasi Pembiayaan Aceh mencapai Rp. 1.508.840.608.851,30, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 1.948.740.094.046,82. Sebaliknya pada tahun 2014 realisasi Pembiayaan Aceh turun menjadi Rp. 1.356.465.864.694,80 dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2016 menjadi Rp. 217.881.122.545,44. Hal ini disebabkan oleh realisasi belanja yang semakin meningkat setiap tahunnya (Tabel 3.25).

Tabel 3.25.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Aceh Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	1.028.846.247.417,00	1.508.840.608.851,30	146,65	18,51
2013	1.926.813.713.736,00	1.948.740.094.046,82	101,14	29,15
2014	1.400.139.059.357,00	1.356.465.864.694,80	96,88	-30,39
2015	807.990.062.760,00	741.935.123.460,09	91,82	-45,30
2016	323.465.894.819,00	217.881.122.545,44	67,36	-70,63
2017	462.731.902.045,00	462.731.902.045,70	100,00	112,38
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				-29,29

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Gambar 3.5 menginformasikan pertumbuhan realisasi Pembiayaan Aceh selama periode tahun 2012-2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012 realisasi Pembiayaan Aceh tumbuh sebesar 18,51 persen dan meningkat menjadi 29,15 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 -2016 realisasi Pembiayaan Aceh mengalami penurunan hingga mencapai minus 70,63 persen pada tahun 2016. Hal ini disebabkan penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan peningkatan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerah. Sebaliknya pada tahun 2017 realisasi Pembiayaan Aceh kembali tumbuh positif mencapai Rp. 462.731.902.045,70 atau tumbuh sebesar 112,38 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan realisasi Pembiayaan Aceh selama periode tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7. Pertumbuhan Pembiayaan Aceh Tahun 2012-2017

Berdasarkan komponen Pembiayaan Aceh, realisasi Pembiayaan Aceh yang bersumber dari penerimaan pembiayaan selama periode tahun 2012-2017 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 8,23 persen. Pada tahun 2012 realisasi Penerimaan Pembiayaan Aceh berjumlah sebesar Rp. 1.508.840.608.851,30, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.968.699.122.182,82 atau tumbuh sebesar 30,48 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014-2016, realisasi Penerimaan Pembiayaan Aceh terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp. 288.676.554.172,33 atau tumbuh negatif (minus 68,49 persen). Hal ini disebabkan realisasi belanja semakin besar dan tren SiLPA setiap tahun semakin kecil. Sebaliknya pada tahun 2017 realisasi Penerimaan Pembiayaan Aceh kembali tumbuh positif sebesar 60,29 persen. Peningkatan pertumbuhan ini disebabkan meningkatnya SiLPA (Tabel 3.26).

Tabel 3.26. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Aceh Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	1.035.846.247.417,00	1.508.840.608.851,30	145,66	15,47
2013	1.931.663.713.736,00	1.968.699.122.182,82	101,92	30,48
2014	1.400.139.059.357,00	1.399.323.697.019,80	99,94	-28,92
2015	916.943.238.016,00	916.244.085.511,09	99,92	-34,52
2016	328.465.894.819,00	288.676.554.172,33	87,89	-68,49
2017	462.731.902.045,00	462.731.902.045,70	100,00	60,29
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				-8,23

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Realisasi pembiayaan Aceh yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan selama periode tahun 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 120,69 persen. Pada tahun 2013 realisasi pengeluaran pembiayaan Aceh mencapai Rp. 19.959.028.136,00, kemudian terus meningkat sampai tahun 2015 menjadi Rp. 174.308.962.051,00. Hal ini disebabkan adanya penyertaan modal kepada PT. Bank Aceh dan BPR Mustaqim. Sebaliknya pada tahun 2016, realisasi Pengeluaran Pembiayaan Aceh kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 70.795.431.626,89 atau tumbuh negative (minus 59,39 persen) (Tabel 3.27).

Tabel 3.27.
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Aceh Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2012	7.000.000.000,00	-	0,00	-100,00
2013	4.850.000.000,00	19.959.028.136,00	411,53	-
2014	-	42.857.832.325,00	0,00	114,73
2015	108.953.175.256,00	174.308.962.051,00	159,99	306,71
2016	5.000.000.000,00	70.795.431.626,89	1415,91	-59,39
2017	-	-	-	-
Rata-Rata Pertumbuhan (AAGR)				120,69

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.1.2 Neraca Aceh

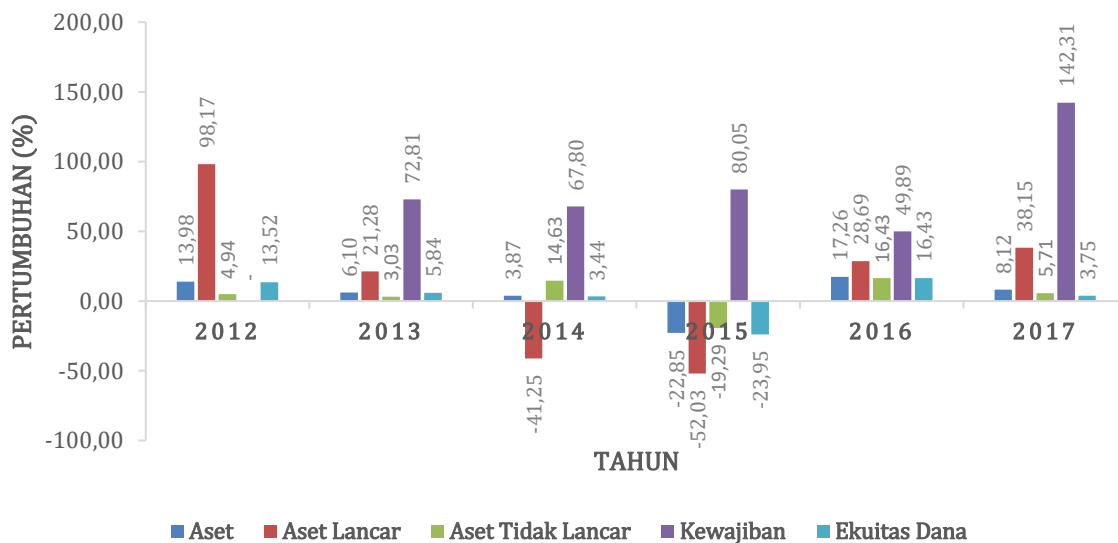
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Berdasarkan penyajian data neraca, dapat diketahui tentang jumlah Aset, baik Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar serta kewajiban dan Ekuitas Dana dalam periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 1) kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang belanja, utang kelebihan pembayaran transfer, utang transfer bagi hasil pajak, utang transfer dana otsus, utang jangka pendek lainnya; 2) kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri-setor perbankan/obligasi dan utang jangka panjang lainnya. Seterusnya, dari ekuitas dana dapat pula diketahui kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Selama periode tahun 2012 -2017 Aset Pemerintah Aceh menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni sebesar 1,51 persen. Rata-rata pertumbuhan Aset Pemerintah Aceh dari komponen Aset Lancar tumbuh negatif (minus 1,03 persen). Sebaliknya rata-rata pertumbuhan dari Aset Tidak Lancar tumbuh sebesar 3,25 persen. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Aceh selama periode tahun yang sama juga tumbuh positif (80,13%), dan ekuitas dana tumbuh sebesar 0,11 persen. Untuk lebih rinci mengenai kondisi perkembangan Neraca Pemerintah Aceh selama periode tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2012-2017 Provinsi Aceh

No	URAIAN	Tahun							Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1		ASET	18.970.445.536.273,70	20.128.519.964.571,60	20.906.506.241.211,60	16.128.417.420.379,10	18.911.685.653.620,20	20.448.129.120.525,00	1,51
1	1	Aset Lancar	3.198.058.530.033,92	3.878.546.152.529,83	2.278.593.936.212,05	1.093.013.568.284,15	1.406.650.798.825,97	1.943.342.207.013,01	-1,03
1	1	1	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	2.000.000.000,00	-	-
1	1	2	Kas	1.970.903.886.363,24	1.400.667.331.803,27	917.295.752.362,87	292.581.973.411,33	462.779.307.345,70	936.142.723.137,55
1	1	3	Piutang	119.364.228.806,17	35.663.654.158,42	39.045.460.644,96	180.670.440.552,69	344.622.738.858,10	197.035.539.468,44
1	1	4	Belanja Dibayar Dimuka	2.303.021.630,61	3.389.260.872,19	882.145.732,92	1.689.220.226,59	791.143.391,35	1.005.226.924,60
1	1	5	Persediaan	1.105.487.393.233,90	2.438.825.905.695,95	1.321.370.577.471,30	615.660.356.665,63	597.639.217.253,62	808.230.565.515,58
1	1	6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-	-	-	92.577.734,97	64.745.328,50	36.221.988,84
1	1	7	Bagian Lancar Tuntuan ganti Rugi Netto	-	-	-	318.999.692,94	753.646.648,70	891.929.978,00
1	2		Aset Tidak Lancar	15.772.387.006.239,70	16.249.973.812.041,80	18.627.912.304.999,50	15.035.403.852.094,90	17.505.034.854.794,20	18.504.786.913.512,00
1	2	1	Investasi Jangka Panjang	1.133.446.621.689,32	1.124.666.134.419,00	900.812.454.238,97	989.335.747.720,03	1.380.311.553.759,53	1.438.232.891.888,77
1	2	2	Aset Tetap	13.786.421.225.492,00	14.288.721.908.199,00	16.867.514.840.088,00	12.912.922.514.344,90	14.608.434.741.334,90	15.318.783.776.283,40
1	2	3	Dana Cadangan	753.950.159.498,00	773.909.187.634,00	816.767.019.959,00	880.122.806.754,00	946.068.238.380,89	1.018.268.199.083,20
1	2	4	Aset Lainnya	98.568.999.560,43	62.676.581.789,78	42.817.990.713,53	253.022.783.275,97	570.220.321.318,93	729.502.046.256,61
2			KEWAJIBAN	76.238.763.559,92	131.748.278.711,98	221.075.501.077,93	398.044.462.406,08	596.621.728.754,33	1.445.681.342.851,87
2	1		Kewajiban Jangka Pendek	76.238.763.559,92	107.914.352.663,76	197.093.241.689,71	374.210.536.357,86	572.787.802.706,11	1.421.847.416.803,65
2	2		Kewajiban jangka Panjang	-	23.833.926.048,22	23.982.259.388,22	23.833.926.048,22	23.833.926.048,22	23.833.926.048,22
3			EKUITAS DANA	18.894.206.772.713,70	19.996.771.685.860,00	20.685.430.740.133,60	15.730.372.957.973,00	18.315.063.924.865,90	19.002.447.777.673,10
			TOTAL KEWAJIBAN DAN AKUITAS DANA	18.970.445.536.273,60	20.128.519.964.572,00	20.906.506.241.211,60	16.128.417.420.379,10	18.911.685.653.620,30	20.448.129.120.525,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (Audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh



Gambar 3.8. Pertumbuhan Realisasi Neraca Aceh Tahun 2012-2017

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa pertumbuhan aset Pemerintah Aceh cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012-2014, realisasi aset tumbuh positif, kemudian pada tahun 2015 tumbuh negatif (minus 22,85%). Pada tahun 2016-2017 pertumbuhan realisasi aset meningkat dan tumbuh positif. Selama periode tahun 2012-2017, pertumbuhan realisasi kewajiban Pemerintah Aceh tertinggi terdapat pada tahun 2017 yakni sebesar 142,31 persen. Hal ini disebabkan meningkatnya kewajiban jangka pendek yang meliputi utang bayar dimuka, utang belanja, utang transfer bagi hasil pajak. Disamping itu, peningkatan ini juga disebabkan adanya utang dana sertifikasi dan utang dana BOS.

Dalam rangka memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial daerah, perlu dilakukan analisa atau interpretasi terhadap data finansial yang tercermin dalam laporan keuangan daerah. Terdapat dua bentuk umum rasio keuangan yang sering digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan dan kinerja yaitu rasio likuiditas (*liquidity ratio*) dan rasio solvabilitas (*solvability ratio*). Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya disebut Pemerintah Daerah yang liquid. Tingkat likuiditas suatu daerah dapat diukur dengan beberapa cara diantaranya dengan menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar (*Current Ratio*). Cara lainnya ialah dengan menunjukkan kemampuan Daerah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibanding aset lain. Cara ini lebih dikenal dengan *Quick Ratio Analysis*. Sementara rasio solvabilitas yang disebut juga dengan rasio leverage digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh daerah dengan dana yang dipinjamkan dari pemerintah pusat/swasta/investor. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah total debt to equity ratio (rasio hutang terhadap ekuitas) dan *total debt to total asset ratio* (rasio hutang terhadap total aktiva).

Tabel 3.29 menggambarkan rasio lancar (*current rasio*) selama periode tahun 2012-2017 diatas 1 atau diatas 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa aktiva lancar (aset lancar) jauh di atas jumlah hutang lancar, dengan kata lain kemampuan daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi. Sementara untuk *quick rasio* juga menunjukkan di atas 1 atau 100 persen, yang berarti kemampuan aktiva lancar paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Sementara nilai total debt to total assets ratio dan debt to equity rasio dari periode tahun 2012-2017 menunjukkan peningkatan, namun masih dalam batas aman (*solvable*) dalam artian porsi hutang terhadap aktiva masih kecil. Hal ini bermakna Pemerintah Aceh sangat mempunyai kemampuan dalam memenuhi segala kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 3.29.
Balance Sheet Ratio Tahun 2012-2017 Pemerintah Aceh

Balance Sheet Ratios		Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Liquidity Ratio	Current Ratio	41,95	35,94	11,56	2,92	2,46	1,37
	Quick Ratio	27,45	13,34	4,86	1,28	1,41	0,80
Solvability Ratio	Debt to Assets Ratio	0,40	0,65	1,06	2,47	3,15	7,07
	Debt to Equity Ratio	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03	0,08

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

3.1.2.1 Aset Lancar

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran. Tabel 3.24 menginformasikan bahwa Kas di Kas Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap total aset lancar Pemerintah Aceh tahun 2017 mencapai 46,19 persen. Kontribusi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 31,33 persen. Kas Daerah merupakan saldo kas yang terdapat pada Bank Umum yang digunakan atas nama rekening Kas Umum Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/556/2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh, Rekening Giro Pemerintah Aceh yang dikelola satuan Kerja Perangkat Aceh, Rekening Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Aceh dan Rekening Dana Pihak Ketiga yang Dikelola Pemerintah Aceh. Kondisi Aset Lancar Pemerintah Aceh per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel. 3.30.

Tabel 3.30.
Kondisi Aset Lancar Pemerintah Aceh tahun 2016-2017

No	Uraian	2017	Persentase (%)	2016	Persentase (%)
1	Kas di Kas Daerah	897.538.228.563,44	46,19	440.694.181.529,86	31,33
2	Kas di Bendahara Penerimaan	426.617.299,62	0,02	309.142.761,50	0,02
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	550.086.056,00	0,03	556.736.390,00	0,04
4	Kas Lainnya di Bendaharan Pengeluaran	27.468.876.910,72	1,41	47.405.300,00	0,00
5	Kas di Bendahara BLUD	10.158.914.307,77	0,52	21.171.841.364,34	1,51
6	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	0,00
7	Piutang Pajak	26.274.996.352,00	1,35	24.781.715.889,00	1,76
8	Penyisihan Piutang Pajak	(518.576.851,75)	(0,03)	(495.747.302,77)	-0,04

No	Uraian	2017	Persentase (%)	2016	Persentase (%)
9	Piutang Retribusi	5.000.000,00	0,00	109.000.000,00	0,01
10	Penyisihan Piutang Retribusi	(25.000,00)	(0,00)	(5.450.000,00)	0,00
11	Piutang Lain-lain PAA yang Sah	162.899.850.120,62	8,38	123.772.071.991,00	8,80
12	Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	(269.801.277,20)	(0,01)	(37.761.411,74)	0,00
13	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	10.235.423.610,86	0,53	7.692.898.610,86	0,55
14	Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(1.591.327.486,09)	(0,08)	(276.059.493,05)	-0,02
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	189.077.066.282,00	13,44
16	Piutang Pendapatan Lainnya	-	-	5.029.440,00	0,00
17	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	-	(25.147,20)	0,00
18	Belanja Dibayar Di Muka	1.005.226.924,60	0,05	791.143.391,35	0,06
19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	74.283.146,08	0,00	69.749.574,08	0,00
20	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(38.061.157,24)	(0,00)	(5.004.245,58)	0,00
21	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	891.929.978,00	0,05	753.646.648,70	0,05
22	Persediaan	808.230.565.515,58	41,59	597.639.217.253,62	42,49
	TOTAL ASET LANCAR	1.943.342.207.013,01	100,00	1.406.650.798.825,97	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

3.1.2.2 Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan. Aset Tidak Lancar Pemerintah Aceh per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31.
Kondisi Aset Tidak Lancar Pemerintah Aceh

Uraian	2017	Persentase (%)	2016	Persentase (%)
Investasi Jangka Panjang	1.438.232.891.888,77	7,77	1.380.311.553.759,53	7,89
Aset Tetap	15.318.783.776.283,40	82,78	14.608.434.741.334,90	83,45
Dana Cadangan	1.018.268.199.083,20	5,50	946.068.238.380,89	5,40
Aset Lainnya	729.502.046.256,61	3,94	570.220.321.318,93	3,26
Total Aset Tidak Lancar	18.504.786.913.512,90	100,00	17.505.034.854.794,30	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Tabel 3.31 memberikan informasi aset tetap menjadi penyumbang terbesar dalam total aset tidak lancar Pemerintah Aceh tahun 2017 yaitu sebesar 82,78 persen. Kontribusi ini mengalami penurunan dari tahun 2016 (83,45 persen). Hal ini disebabkan oleh pengurangan nilai aset tetap karena pelaksanaan hibah kepada kabupaten/kota, penghapusan nilai dan penyesuaian lainnya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap Pemerintah Aceh diperoleh melalui pembelian/pembangunan yang sebagian besar bersumber dari dana APBA, disamping adanya perolehan aset tetap yang bersumber dari BLUD, hibah/donasi maupun pengurangan aset tetap karena hibah untuk kabupaten/kota dan masyarakat, serta adanya penyesuaian-penyesuaian nilai aset tetap. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 dicatat berdasarkan hasil konsolidasi laporan keuangan SKPA. Dalam proses konsolidasi juga dilakukan rekonsiliasi terhadap saldo awal aset tetap (2016) dan rekonsiliasi realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2017.

Nilai perolehan aset tetap pemerintah Aceh per 31 Desember 2017 berjumlah sebesar Rp 23 Triliun, adapun akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp. 8.1 Triliun, sehingga nilai aset tetap netto sebesar Rp. 15.318.783.776.283,41. Kondisi aset tetap Pemerintah Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32.
Kondisi Aset Tetap Pemerintah Aceh

No.	Uraian	Saldo Aset Tetap per 31 Des 2016	Realisasi Belanja Modal Tahun 2017	Penyesuaian Nilai	Saldo Aset Tetap per 31 Des 2017 setelah penyesuaian
1	Tanah	3.673.006.943.811,00	66.023.499.551,00	54.979.395.871,00	3.794.009.839.233,00
2	Peralatan dan Mesin	2.448.640.811.219,01	380.394.030.015,00	(19.098.075.725,00)	2.809.936.765.509,01
3	Gedung dan Bangunan	3.797.680.362.375,42	781.277.676.464,00	(226.381.595.746,00)	4.352.576.443.093,42
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.575.940.540.216,00	909.970.802.580,00	270.469.432.560,00	11.756.380.775.356,00
5	Aset Tetap Lainnya	287.697.062.224,00	30.633.040.982,00	16.122.567.103,00	334.452.670.309,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	256.344.553.292,00	-	195.344.862.589,00	451.689.415.881,00
7	Akumulasi Penyusutan	(6.430.875.531.802,44)	-	(1.749.386.601.295,58)	(8.180.262.133.098,02)
JUMLAH		14.608.434.741.335,00	2.168.299.049.592,00	(1.457.950.014.643,58)	15.318.783.776.283,41

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 2.168.299.049.592,00. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2017 yang menjadi penambahan nilai aset tetap adalah realisasi belanja modal hasil rekonsiliasi dengan pengurus barang SKPA dan tercatat pada KIB SKPA. Selain itu juga terdapat penambahan lainnya misalnya seperti penambahan nilai terhadap aset tetap yang direvaluasi. Disamping itu terdapat juga pengurangan nilai aset tetap karena pelaksanaan hibah kepada kabupaten/kota, penghapusan nilai dan penyesuaian lainnya.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Aceh dirumuskan untuk memecahkan berbagai permasalahan penting dan mendesak maupun darurat yang terjadi dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan status kesehatan rakyat, serta menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Aceh. Terdapat 2 (dua) aspek penting dalam kebijakan

pengelolaan keuangan yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan (*revenue policy*) dan kebijakan di bidang belanja (*expenditure policy*). Kedua aspek tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan harus saling bersinergi. Idealnya *expenditure policy* merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya *revenue policy* dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Aceh, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBA. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pendapatan Aceh diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) sesuai dengan aspek legalitas dan karakteristik daerah, peningkatan keterampilan Aparat Pengelola Pendapatan daerah agar mendukung tingkat produktifitas yang tinggi, meningkatkan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi, otonomi khusus dan pemerataan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, dalam pengelolaan keuangan Pendapatan Aceh harus memperhatikan upaya peningkatan pajak dan retribusi tanpa harus menambah beban kepada masyarakat. Pendapatan Aceh dalam struktur APBA memegang peranan penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan public.

Arah dan Strategi terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir didasarkan pada beberapa faktor yaitu:

- a. Peningkatan pendataan objek dan subjek pajak yang lebih intensif dan akurat.
- b. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja dan pembentukan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) baru secara bertahap di setiap Kabupaten/Kota.
- c. Peningkatan ketrampilan petugas pemungut pajak.
- d. Sosialisasi dan peningkatan operasional pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak.
- e. Menggali sumber-sumber pendapatan baru (termasuk zakat/infaq/shadaqah), sesuai dengan peluang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Disamping itu beberapa kebijakan umum dan strategi untuk meningkatkan penerimaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Tim advokasi Migas yang harus bertindak proaktif terhadap perhitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak termasuk ketepatan dalam penyalurannya. Salah satu langkah pertama adalah dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh (BPMA) serta melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- b. Mempercepat proses pencairan anggaran dari Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, dengan membentuk sistem pencairan keuangan yang lebih efisien dan efektif melalui kesepakatan dan rencana aksi bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
- c. Mengatur prosedur dan mekanisme yang adil dan merata terhadap penerimaan dana otonomi khusus antara antara Pemerintah Aceh dengan Kabupaten/Kota. Hal ini dapat ditempuh berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Sementara kebijakan belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Pemerintah Aceh yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Belanja Aceh diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, harus tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas serta sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh. Untuk kebijakan pembiayaan, asumsi dasar dalam penetapan kebijakan pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu instrumen ekonomi pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan rencananya, kemudian menerjemahkannya kedalam bentuk program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka Pemerintah Daerah harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan dan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui pengelolaan APBD yang berkualitas diharapkan dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah, maka proporsi penggunaan anggaran sangat memegang peranan penting. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanahkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa pengelolaan dana pendidikan secara khusus dan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) bidang pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat Aceh. Paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari pendapatan Aceh yang berasal dari TDBH Migas dialokasikan untuk dana pendidikan Aceh dan paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari pendapatan Pemerintah Aceh yang berasal dari Dana OTSUS dialokasikan untuk dana pendidikan. Pengalokasian dana pendidikan tersebut dilakukan sebagai berikut: paling banyak 40 (empat puluh) persen dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan pendidikan Pemerintah Aceh dan paling sedikit 60 (enam puluh) persen dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan pendidikan Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana tersebut dilakukan berdasarkan alokasi dasar dan formula yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 3.27 diketahui persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2012-2017 diketahui berkisar antara 7,41 - 16,41 persen, dengan rata-rata persentase sebesar 11,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi belanja Aceh tahun 2012-2017 masih sehat/ideal (dibawah 50 persen), dengan kata lain postur belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik lebih besar. Realisasi belanja aparatur terhadap total belanja dapat dilihat pada Tabel 3.33.

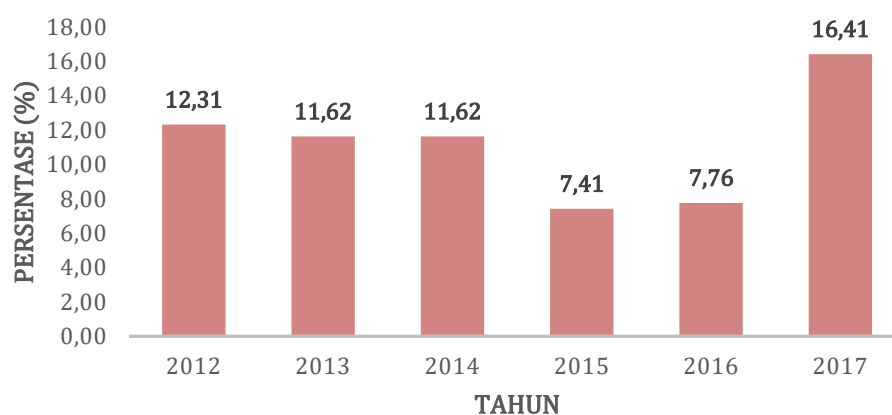
Tabel 3.33.

Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012-2017

Tahun	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Persentase (%)
2012	1.077.843.382.779,00	8.757.319.943.552,18	12,31
2013	1.306.315.527.899,00	11.240.386.583.269,80	11,62
2014	1.405.298.911.462,50	12.088.705.174.017,80	11,62
2015	912.342.355.742,00	12.309.944.446.551,70	7,41
2016	945.821.119.311,00	12.190.508.628.274,00	7,76
2017	2.270.172.083.286,50	13.832.848.610.133,30	16,41
Rata-Rata			11,19

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (Audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Tren realisasi proporsi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan. Persentase realisasi proporsi tertinggi terdapat pada tahun 2017 yang mencapai 16,41 persen, Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan yang signifikan dari gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, belanja penerimaan lainnya dan honorarium pengelolaan dana. Realisasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2012-2017 terdapat pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Periode Tahun 2012-2017

Rata-rata persentase dana pendidikan Aceh terhadap total pengeluaran tahun 2012-2017 mencapai 20,41 persen. Proporsi terbesar terdapat Tahun 2012 yakni sebesar 24,37 persen, diikuti Tahun 2013 (23,14 persen) dan Tahun 2016 (22,36 persen) (Tabel 3.34).

Tabel 3.34.

Analisis Realisasi Proporsi Dana Pendidikan Tahun 2012-2017

Tahun	Total Belanja untuk Pendidikan (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Persentase (%)
2012	2.133.972.983.498,00	8.757.319.943.552,18	24,37
2013	2.601.230.310.218,60	11.240.386.583.269,80	23,14
2014	2.623.944.972.202,80	12.088.705.174.017,80	21,71
2015	1.117.487.614.659,00	12.309.944.446.551,70	9,08
2016	2.726.342.442.268,00	12.190.508.628.274,00	22,36
2017	3.014.347.639.045,00	13.832.848.610.133,30	21,79
Rata-Rata			20,41

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Rata-rata persentase dana kesehatan terhadap total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) tahun 2012-2017 adalah sebesar 10,41 persen. Secara keseluruhan total dana kesehatan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan (Tabel 3.35).

Tabel 3.35.
Analisis Realisasi Proporsi Dana Kesehatan Tahun 2012-2017

Tahun	Total Belanja untuk Kesehatan (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Persentase (%)
2012	871.103.616.956,00	8.757.319.943.552,18	9,95
2013	1.083.961.840.478,39	11.240.386.583.269,80	9,64
2014	1.167.373.636.431,00	12.088.705.174.017,80	9,66
2015	1.158.815.423.477,05	12.309.944.446.551,70	9,41
2016	1.377.602.932.026,51	12.190.508.628.274,00	11,30
2017	1.728.722.225.139,85	13.832.848.610.133,30	12,50
Rata-Rata			10,41

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

Salah satu program prioritas bidang kesehatan adalah Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mendorong kreatifitas dan produktifitas masyarakat Aceh. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tahun 2011 JKA dialihkan menjadi Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dimana JKRA dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rata-rata proporsi anggaran JKRA terhadap Dana kesehatan Aceh tahun 2012-2017 adalah sebesar 38,95 persen. Secara keseluruhan anggaran JKRA setiap tahunnya cenderung naik atau bertambah (Tabel 3.36).

Tabel 3.36.
Proporsi Anggaran Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh Tahun 2012-2017

Tahun	Total Belanja untuk Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) (Rp.)	Total Belanja untuk Kesehatan (Rp.)	Persentase (%)
2012	419.000.000.000,00	871.103.616.956,00	48,10
2013	419.124.895.000,00	1.083.961.840.478,39	38,67
2014	402.349.142.000,00	1.167.373.636.431,00	34,47
2015	470.857.347.920,00	1.158.815.423.477,05	40,63
2016	540.978.533.326,00	1.377.602.932.026,51	39,27
2017	562.972.735.709,00	1.728.722.225.139,85	32,57
Rata-Rata			38,95

Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good government*), diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tentang defisit yang terjadi pada anggaran pemerintah daerah. Untuk pembiayaan defisit anggaran, diperlukan adanya sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan untuk menutup defisit mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (Piutang Daerah) dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pembiayaan dimasak dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2012-2017, diketahui defisit terjadi pada tahun anggaran 2013- 2015. Hal ini terjadi karena tidak seimbang antara jumlah belanja Aceh dengan jumlah pendapatan Aceh. Meskipun tren pendapatan dan belanja Aceh menunjukkan adanya peningkatan, namun pertumbuhan belanja Aceh dan pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Adanya defisit anggaran pada tahun 2013-2015 menunjukkan pengelolaan APBA belum berjalan optimal, sehingga kedepan diharapkan Pemerintah Aceh dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) seperti pajak Aceh, retribusi Aceh, Zakat/Infaq dan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah (Tabel 3.37).

Dalam hal APBA diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Dari Tabel 3.38 dan Tabel 3.39 diketahui SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 1.968.699.122.182,82, sebaliknya SiLPA terendah adalah pada tahun 2016 sebesar Rp. 286,676,554,172.33. Secara keseluruhan SiLPA selama periode tahun 2012-2017 mengalami penurunan. Sementara bila dilihat dari penerimaan piutang daerah selama periode tahun 2012-2016 cenderung naik/bertambah. Penerimaan piutang daerah tertinggi terdapat pada tahun 2016, dimana peningkatan tertingginya bersumber dari piutang transfer pemerintah lain-lain sebesar Rp. 126.748.901.561,00, diikuti piutang BLUD sebesar Rp. 123.321.891.991,00. Sebaliknya penerimaan piutang daerah terendah adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 35.663.654.158,42.

Tabel 3.37.
Defisit Riil Anggaran Aceh Tahun 2012-2017 Pemerintah Aceh

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	9.180.143.048.437,63	10.671.826.520.445,20	11.606.175.260.015,30	11.680.376.915.213,00	12.364.563.976.147,30	14.350.990.515.050,70
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja Daerah	8.757.319.943.552,18	11.220.427.555.133,80	12.045.847.341.692,80	12.135.635.484.500,70	12.119.713.196.647,10	13.832.848.610.133,30
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	19.959.028.136,00	42.857.832.325,00	174.308.962.051,00	70.795.431.626,89	-
	Defisit riil	422.823.104.885,45	(568.560.062.824,61)	(482.529.914.002,46)	(629.567.531.338,72)	174.055.347.873,34	518.141.904.917,44

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Tabel 3.38.
Realisasi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2012 -2017 Provinsi Aceh

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1.508.840.608.851,30	1.968.699.122.182,82	1.399.323.697.019,80	916.244.085.511,09	286.676.554.172,33	462.731.902.045,70
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	119.364.228.806,17	35.663.654.158,42	39.045.460.644,96	67.415.798.333,36	345.441.130.835,30	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Tabel 3.39.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2012-2017 Provinsi Aceh

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	1.508.840.608.851,30	100	1.968.699.122.182,82	100	1.399.323.697.019,80	100	916.244.085.511,09	100	286.676.554.172,33	100	462.731.902.045,70	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	97.435.377.196,63	6,5	157.740.606.959,19	8,01	(118.083.440.161,86)	(8,44)	(106.105.501.429,02)	(11,58)	2.699.412.251,33	0,94	97.910.392.812,28	21,16
3.	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	419.261.853.857,00	27,8	111.647.948.870,00	5,67	152.464.301.880,00	10,90	(110.390.303.824,00)	(12,05)	(98.244.467.380,00)	(34,27)	68.423.948.020,00	14,79
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	465.285.709.697,00	30,8	(66.589.186.663,00)	(3,38)	34.240.785.217,20	2,45	(44.711.033.800,00)	(4,88)	(86.011.840.543,00)	(30,00)	58.517.042.851,00	12,65
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	954.618.710.248,82	63,3	1.177.926.945.151,19	59,83	893.797.407.555,23	63,87	614.036.086.334,26	67,02	754.918.749.971,93	263,33	1.078.784.199.774,72	233,13
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	76.238.763.559,92	5,1	107.914.352.663,76	5,48	197.093.241.689,71	14,08	374.210.536.357,86	40,84	572.787.802.706,11	199,80	1.421.847.416.803,65	307,27
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 (audited). Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung total kapasitas dan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebelum melakukan analisis kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Disamping itu, juga diperlukan data-data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah untuk 5 (lima) tahun serta berbagai informasi pendukung dalam melakukan proyeksi APBD.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*) maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing. Untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kebijakan anggaran belanja Pemerintah Aceh untuk 5 (lima) tahun kedepan mengadopsi kebijakan anggaran nasional yang berdasarkan pada *money follow program*, dimana kebijakan ini memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi SKPA saja.

Secara umum kebijakan keuangan Aceh terdiri dari 3 (tiga) kebijakan yang meliputi: kebijakan pendapatan Aceh, kebijakan belanja Aceh dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan Aceh diarahkan pada optimalisasi PAA melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pungutan pajak Aceh, redistribusi Aceh dan zakat Aceh. Sementara kebijakan belanja Aceh diarahkan pada peningkatan kualitas belanja (*quality spending*) melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta stabilitas harga barang. Dengan kata lain, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari berbagai aspek yang meliputi aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Kebijakan pembiayaan Aceh diarahkan pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) secara efektif dan efisien melalui penyertaan modal pemerintah dan peningkatan kapasitas investasi yang berdasarkan pada kinerja investasi (*performance based*).

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.

5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan untuk memacu capaian dan target makro pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi untuk 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Aceh sangat tergantung pada berbagai sumber pendanaan. Keterbatasan APBA dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022 menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Aceh dituntut untuk berinovasi dalam membiayai infrastruktur melalui berbagai alternatif pendanaan (seperti: belanja K/L, belanja pemerintah daerah, BUMN, Swasta CSR, PINA dan KPBU). Salah satu inovasi untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pendanaan non APBA adalah melalui skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership* (PPP). PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (pemerintah) dengan sektor swasta (*private*) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian. Perjanjian ini terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko. PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Seseusi dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, KPBU merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Untuk lima tahun kedepan, Pemerintah Aceh akan menggalakkan beberapa kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta terutama untuk pengembangan kawasan strategis provinsi seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Pariwisata serta penyediaan energy terutama energi baru terbarukan (Geothermal, PLTA dan PLTMH) dan potensi daerah lainnya yang memungkinkan untuk melakukan kerjasama.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.1.1. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Pemerintah Aceh menyadari sepenuhnya, bahwa pendanaan pembangunan Aceh selama ini sebagian besar bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana OTSUS. Dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan Aceh yang terus meningkat dengan kondisi pendanaan yang terbatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pendapatan terutama yang bersumber dari PAA. Adapun upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dan Penagihan pajak kendaraan bermotor *door to door*;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;

5. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Meningkatkan pengelolaan Aset, Zakat dan Keuangan daerah;
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan penambahan personil UPTD SKPA dan Samsat baik dari internal SKPA maupun kabupaten/kota;
8. Pengadaan Sarana dan prasarana layanan unggulan yang menghasilkan pendapatan asli aceh, baik berupa pembangunan gedung Kantor Bersama SAMSAT Subulussalam, Aceh Jaya dan Pidie Jaya, 21 unit Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, 21 unit Samsat Jempol, pembentukan dan implementasi e- retribusi dan integrasi database kendaraan bermotor secara nasional;
9. Melakukan sosialisasi optimalisasi pendapatan asli aceh;
10. Penerapan Aktif Pajak Progresif bagi kendaraan roda 4 serta 250 cc roda 2;
11. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua untuk Non BL;
12. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait penagihan Pajak Aceh dan razia lapangan secara efektif dengan mitra kerja terkait di Aceh.

3.3.1.2. Proyeksi Pendapatan Asli Aceh (PAA)

A. Pajak Aceh

Pajak Aceh selama periode tahun 2018-2022 diperkirakan rata-rata tumbuh sebesar 10,25 persen. Masih rendahnya kontribusi PAA terutama pajak Aceh terhadap Pendapatan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor yang mencakup: a) belum adanya kajian mengenai potensi pajak Aceh, b) belum dimutakhirkan database pajak secara *realtime*, c) kelembagaan yang menangani pemungutan Pajak Aceh masih lemah dibandingkan dengan potensi pajak yang begitu besar, d) kualitas dan kuantitas SDM masih lemah dan terbatas, serta e) lemahnya *law enforcement* bagi wajib pajak. Untuk meningkatkan kontribusi pajak Aceh terhadap PAA maka perlu dilakukan beberapa upaya yang meliputi a) membuat kajian perluasan basis penerimaan antara lain dengan mengidentifikasi pembayaran pajak baru dari potensi dan jumlah pembayaran pajak, b) memperbaiki penagihan pajak kendaraan *door to door*, c) mempercepat proses penyusunan peraturan daerah terkait pemungutan dan pengelolaan pajak, d) membuka layanan unggulan Samsat Keliling di setiap kabupaten/kota, e) menerapkan aktif pajak progresif bagi roda dua dan roda empat, f) merevitalisasi kelembagaan dan personil. Berdasarkan Tabel 3.40 diketahui jumlah Pajak Aceh pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.481.260.884.128,00 dan terus meningkat menjadi Rp. 2.026.142.564.163,00 pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 8,15 persen. Proyeksi pertumbuhan Pajak Aceh tertinggi bersumber dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang tumbuh sebesar 17,41 persen, dimana pada tahun 2018 jumlah PAP sebesar Rp. 1.000.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 1.900.000.000,00 pada tahun 2022, kemudian disusul oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tumbuh sebesar 16,40 persen dari Rp. 413.378.203.747,00 tahun 2018 menjadi Rp. 758.811.637.808,00 pada tahun 2022 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tumbuh sebesar 7,60 persen.

Tabel 3.40.
Proyeksi Pajak Aceh Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan (%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	413.378.203.747	455.104.792.434	549.863.505.658	632.343.031.507	758.811.637.808	16,40
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	428.033.173.243	437.559.714.643	491.969.842.835	526.407.731.834	573.784.427.699	7,60

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan (%)
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	324.794.620.097	297.007.080.216	330.764.060.748	350.609.904.392	371.646.498.656	3,43
4.	Pajak Air Permukaan (PAP)	1.000.000.000	1.500.000.000	1.700.000.000	1.800.000.000	1.900.000.000	17,41
5.	Pajak Rokok	314.054.887.041	296.967.516.202	315.000.000.000	317.000.000.000	320.000.000.000	0,47
Jumlah		1.481.260.884.128	1.488.139.103.495	1.689.297.409.241	1.828.160.667.733	2.026.142.564.163	8,15

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), 2018

Keterangan:

Tahun 2019 berdasarkan RKPA 2019

B. Retribusi Aceh

Retribusi Aceh merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Aceh meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kontribusi Retribusi Aceh terhadap PAA diantaranya: a) belum adanya kajian mengenai potensi Retribusi Aceh, b) belum adanya database Retribusi Aceh, c) kelembagaan yang menangani pemungutan Retribusi Aceh masih lemah dibandingkan dengan potensi retribusi yang begitu besar, d) kualitas dan kuantitas SDM masih lemah dan terbatas, e) lemahnya *law enforcement*, serta f) masih terbatasnya regulasi yang mengatur pemungutan retribusi Aceh. Upaya untuk mencapai target proyeksi Retribusi Aceh dilakukan melalui strategi perluasan basis penerimaan retribusi, penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan retribusi, pengadaan sarana dan prasarana layanan yang mendukung retribusi, penerapan pembayaran retribusi non tunai dan implementasi e-retribusi, serta revitalisasi kelembagaan dan personil.

Selama periode tahun 2018-2022 Retribusi Aceh diperkirakan tumbuh sebesar 2,00 persen, dari jumlah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 21.647.587.500,00 pada tahun 2022. Pertumbuhan proyeksi Retribusi Aceh tertinggi bersumber dari Retribusi Jasa Umum dimana pada tahun 2018 diprediksi mencapai Rp. 6.915.550.000,00 dan terus meningkat menjadi Rp. 10.576.756.575,00 pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 11,21 persen. Sesuai Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum menyatakan Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum yang dipungut bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan pendidikan. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada Balai Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Aceh, Balai Latihan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, kecuali pelayanan pendaftaran. Sementara objek retribusi pelayanan pendidikan yang dipungut meliputi retribusi atas setiap jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Aceh. Objek retribusi pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh yang dikecualikan, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMA dan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Sebaliknya, retribusi perizinan tertentu mengalami pertumbuhan terendah dari Rp. 976.150.000,00 tahun 2018 menjadi Rp. 509.355.000,00 pada tahun 2022 atau tumbuh negatif (minus 15,01 persen).

Pada tahun 2019 retribusi Aceh diproyeksi sebesar Rp. 19.000.000.000,00 kemudian mengalami penurunan menjadi Rp. 18.742.500.000,00 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menghapus jenis retribusi diantaranya retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi perizinan tertentu. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41.
Proyeksi Retribusi Aceh Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan (%)
1.	Retribusi Jasa Umum	6.915.550.000	8.306.000.000	9.157.365.000	9.615.233.250	10.576.756.575	11,21
2.	Retribusi Jasa Usaha	12.108.300.000	10.194.000.000	9.144.135.000	9.601.341.750	10.561.475.925	-3,36
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	976.150.000	500.000.000	441.000.000	463.050.000	509.355.000	-15,01
Jumlah		20.000.000.000	19.000.000.000	18.742.500.000	19.679.625.000	21.647.587.500	2,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), 2018

Keterangan:

Tahun 2019 berdasarkan RKPA 2019

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 192.982.069.855,00 dan terus mengalami peningkatan menjadi Rp. 291.822.138.814,00 pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 10,89 persen. Kontribusi terbesar bersumber dari PT. Bank Aceh Syariah, kemudian disusul BPR MUSTAQIM Suka Makmur dan PDPA. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42.
Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun					Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
PT. Bank Aceh Syariah	190.982.069.855	190.982.069.855	201.006.157.155	251.216.361.790	288.636.481.315	10,88
BPR MUSTAQIM Suka Makmur	2.000.000.000	2.000.000.000	1.380.308.500	1.517.856.500	1.685.657.500	-2,43
PDPA	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	12,50
Jumlah	192.982.069.855	192.982.069.855	203.386.465.655	253.734.218.230	291.822.138.814	10,89

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), 2018

Keterangan:

Tahun 2019 berdasarkan RKPA 2019

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah

Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah yang Dipisahkan selama periode 2018-2022 diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,16 persen. Penerimaan dari BLUD RSIA pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 27.455.000.000,00 dan terus meningkat menjadi Rp. 29.426.820.296,00 pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 1,75 persen. Sementara pertumbuhan penerimaan dari BLUD RSUDZA selama periode tahun 2018-2022 tumbuh sebesar 8,62 persen, dari Rp. 487.030.544.104,00 tahun 2018 menjadi Rp. 677.837.867.240,00 pada tahun 2022. Proyeksi penerimaan PAA dari BLUD RSIA dan RSUDZA tersebut didasarkan pada kondisi existing sarana dan parasara yang tersedia pada saat ini. Sehingga untuk memaksimalkan penerimaan PAA dari kedua BLUD tersebut diperlukan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang

memadai. Selanjutnya untuk BLUD RSJ pada periode tahun 2018-2022 diproyeksikan tumbuh sebesar 2,71 persen, dari Rp. 27.921.456.300,00 pada tahun 2018 menjadi Rp. 31.078.963.000,00 tahun 2022. Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan kemandirian BLUD, Pemerintah Aceh akan mengupayakan pembiayaan alternatif dalam rangka percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk kemandirian BLUD. Alternatif pendanaan akan dilakukan dengan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau Public Private Partnership (PPP). Sementara proyeksi Lain-lain PAA yang Sah dari Masjid Raya Baiturrahman dan Pertanian belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan belum tuntasnya proses menjadi BLUD terkait kelembagan dan personil. Proyeksi pertumbuhan penerimaan dari sumber lain seperti zakat diperkirakan akan tumbuh sebesar 12,92 persen. Penerimaan pendapatan PAA dari zakat untuk saat ini masih bersumber dari internal Pemerintah Aceh/Aparatur Sipil Negara. Untuk meningkatkan pendapatan dari zakat, kedepan diharapkan dapat dilakukan pemungutan zakat pada pihak swasta (diluar ASN). Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.43.

Tabel 3.43.
Proyeksi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan (%)
1.	BLUD RSIA	27.455.000.000	26.650.371.817	28.284.141.000	28.849.823.820	29.426.820.296	1,75
2.	BLUD RSUDZA	487.030.544.104	497.000.000.000	532.226.514.670	557.983.955.465	677.837.867.240	8,62
3.	BLUD RSJ	27.921.496.300	26.834.809.511	30.900.870.100	31.052.992.100	31.078.963.000	2,71
4.	BLUD Masjid Raya Baiturrahman	2.000.000.000	-	-	-	-	-
5.	Pertanian	2.000.000.000	-	-	-	-	-
6.	Zakat	45.248.000.000	53.121.694.055	60.800.080.000	66.880.088.000	73.568.096.800	12,92
7.	Kerjasama Pemanfaatan	8.560.502.512	11.532.984.192	14.928.000.000	16.368.000.000	17.232.000.000	19,11
8.	Jasa Giro Kasda	10.331.906.207	14.892.269.124	15.660.560.826	15.827.664.379	15.996.648.927	11,55
9.	Bunga Deposito	80.764.582.777	105.013.871.401	128.798.229.014	132.586.761.594	136.493.771.826	14,02
Jumlah		691.312.031.900	735.046.000.100	811.598.395.609	849.549.285.358	981.634.168.089	9,16

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), 2018

Keterangan:

Tahun 2019 berdasarkan RKPA 2019

3.3.1.3. Kebijakan Belanja Aceh Tahun 2018-2022

Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Secara umum, kebijakan belanja daerah memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi ditujukan untuk mendukung faktor-faktor produksi yang sudah ada dalam masyarakat menjadi lebih optimal dan produktif. Selain peningkatan produktifitas, negara juga berkewajiban untuk menjamin bahwa pembangunan ini dilakukan secara merata (inklusif) yang merupakan bagian dari fungsi distribusi belanja daerah. Sedangkan fungsi stabilisasi berperan untuk menjaga keseimbangan dari kedua fungsi tersebut. Penerapan kebijakan belanja daerah tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian indikator pembangunan menjadi baik yang disertai dengan ketersediaan kesempatan kerja yang luas (pengangguran rendah) dan tingkat harga yang terkendali.

Belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgetting*) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas

dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan (*value for money*). Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018- 2022 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Aceh Tahun 2018- 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif
4. Stimulus belanja dalam rangka perbaikan dan pemerataan pembangunan; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Aceh dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi.

Mengenai Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik mengacu pada Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik menyatakan besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Proyeksi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2018-2022 didasarkan atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Tabel 3.44 menunjukkan bahwa Bantuan Keuangan Partai Politik pada tahun 2018-sebesar Rp. 2.748.626.400,00 meningkat sebesar Rp. 4.144.788.000,00 atau 66,32 persen untuk tahun 2019-2022.

Tabel 3.44.
Proyeksi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bantuan Keuangan Partai Politik	2.748.626.400	4.144.788.000	4.144.788.000	4.144.788.000	4.144.788.000
Total		2.748.626.400	4.144.788.000	4.144.788.000	4.144.788.000	4.144.788.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

3.3.1.4. Proyeksi Anggaran APBA Tahun 2018-2022

Tabel 3.45 menginformasikan Pendapatan Aceh tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 14.804.867.692.688,00 dan terus mengalami peningkatan menjadi Rp. 17.378.737.862.734,00 pada Tahun 2022 atau tumbuh sebesar 4,09 persen. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan sumber penerimaan, selama periode tahun 2018-2022 diproyeksikan PAA tumbuh sebesar 8,62 persen, dari jumlah sebesar Rp. 2.385.554.985.883,00 pada tahun 2018 menjadi Rp. 3.321.246.458.567,00 pada tahun 2022. Dana perimbangan pada tahun 2018 mencapai Rp. 3.878.145.270.271,00 dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp. 5.167.928.025.584,00 dengan pertumbuhan sebesar 7,44 persen. Dana OTSUS pada tahun 2018 diproyeksi berjumlah sebesar Rp. 8.423.726.447.850,00 dan menjadi Rp. 8.695.113.508.822,00 pada akhir periode RPJMA tahun 2022 atau tumbuh sebesar 0,80 persen. Untuk jenis penerimaan Lain-Lain

Pendapatan Aceh yang sah diprediksi akan berfluktuasi, pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 117.440.988.684,00 dan pada akhir periode RPJMA tahun 2022 diprediksi berjumlah sebesar Rp. 194.449.869.761,00 atau tumbuh sebesar 48,87 persen.

Belanja Aceh pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 15.316.396.314.535,00 dan terus meningkat pada tahun 2022 mencapai Rp. 17.378.737.862.733,00 atau tumbuh sebesar 3,21 persen. Berdasarkan jenis belanja, jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL) pada tahun 2018 mencapai Rp. 4.167.073.748.334 dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 hingga menjadi Rp. 7.223.737.814.747 atau tumbuh sebesar 17,55 persen. Untuk Belanja Langsung (BL), pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 11.149.322.566.201,00 dan pada tahun 2022 diprediksi menjadi Rp. 10.155.000.047.986 atau tumbuh sebesar minus 2,31 persen. Peningkatan BTL dan penurunan BL ini disebabkan adanya transfer DOKA ke kabupaten/kota mulai tahun 2019 sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Qanun Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Qanun Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. Pada tahun 2019-2022 DOKA akan ditempatkan pada BTL di objek Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Belanja Bantuan Sosial yang merupakan bahagian Belanja Tidak Langsung (BTL) sebagaimana digambarkan pada Tabel 3.45 termasuk belanja untuk Beasiswa anak yatim, yang sistem pelaksanaannya dimasukkan ke dalam Belanja Langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh untuk setiap tahunnya. Selanjutnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bahagian dari belanja hibah yang dalam pelaksanaannya menjadi bagian belanja langsung. Pembiayaan Aceh tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 11.528.621.847,00 dan meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp. 1.033.828.371.449,00. Tahun 2020-2022 direncanakan seluruh SilPA yang merupakan salah satu elemen dari pembiayaan Aceh akan digunakan sebagai pengeluaran pembiayaan atau investasi dalam rangka peningkatan PAA.

Tabel 3.45.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2022 Provinsi Aceh

NO	URAIAN	Proyeksi (Rp.)					Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN ACEH	14.804.867.692.688	14.747.490.562.630	15.661.574.407.249	16.439.912.077.985	17.378.737.862.734	4,09
1.1	Pendapatan Asli Aceh	2.385.554.985.883	2.435.167.173.450	2.723.024.770.505	2.951.123.796.321	3.321.246.458.567	8,62
1.1.1	Pajak Aceh	1.481.260.884.128	1.488.139.103.495	1.689.297.409.241	1.828.160.667.733	2.026.142.564.163	8,15
1.1.2	Retribusi Aceh	20.000.000.000	19.000.000.000	18.742.500.000	19.679.625.000	21.647.587.500	2,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	192.982.069.855	192.982.069.855	203.386.465.655	253.734.218.230	291.822.138.815	10,89
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	691.312.031.900	735.046.000.100	811.598.395.609	849.549.285.358	981.634.168.089	9,16
1.2	Dana Perimbangan	3.878.145.270.271	3.874.434.200.100	4.382.895.047.574	4.743.720.143.133	5.167.928.025.584	7,44
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	278.300.670.441	237.767.400.100	283.564.504.483	290.926.727.494	298.288.950.505	1,75
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.976.574.889.430	2.060.263.235.000	2.280.444.234.209	2.509.206.682.477	2.646.703.493.053	7,57
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.623.269.710.400	1.576.403.565.000	1.818.886.308.882	1.943.586.733.162	2.222.935.582.027	8,18
1.3	Dana Otonomi Khusus	8.423.726.447.850	8.029.791.592.980	8.357.471.654.000	8.524.621.087.080	8.695.113.508.822	0,80
1.3.1	Dana Otonomi Khusus	8.423.726.447.850	8.029.791.592.980	8.045.851.176.166	8.061.942.878.518	8.078.066.764.275	0,80
1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	117.440.988.684	408.097.596.100	198.182.935.169	220.447.051.451	194.449.869.761	48,87
1.4.1	Hibah	26.546.992.000	28.316.992.000	31.148.691.200	34.263.560.320	37.689.916.352	9,16
1.4.2	Dana Penyesuaian	90.893.996.684	379.780.604.100	167.034.243.969	186.183.491.131	156.759.953.409	64,37
2	BELANJA ACEH	15.316.396.314.535	15.781.318.934.079	15.661.574.407.248	16.439.912.077.985	17.378.737.862.733	3,21
2.1	Belanja Tidak Langsung	4.167.073.748.334	6.898.802.327.264	6.884.562.384.903	7.044.998.330.436	7.223.737.814.747	17,55
2.1.1	Belanja Pegawai	2.523.587.257.517	2.469.458.697.631	2.547.987.484.216	2.629.013.486.214	2.728.915.998.690	1,97
2.1.2	Belanja Hibah	915.927.600.000	973.573.038.000	730.179.778.500	693.670.789.575	658.987.250.096	-7,90
2.1.3	Belanja Subsidi	-	20.000.000.000	35.000.000.000	52.500.000.000	78.750.000.000	57,91
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	20.600.383.638	21.749.600.000	45.000.000.000	50.000.000.000	55.000.000.000	27,83
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	675.192.514.279	691.397.372.446	736.640.149.994	785.040.968.582	833.441.787.171	5,41

NO	URAIAN	Proyeksi (Rp.)					Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.765.992.900	2.696.149.230.604	2.761.491.928.613	2.796.776.865.195	2.841.820.255.410	38.143,94
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	26.474.388.583	28.263.043.581	37.996.220.869	26.822.523.380	-2,76
2.2	Belanja Langsung	11.149.322.566.201	8.882.516.606.815	8.777.012.022.344	9.394.913.747.550	10.155.000.047.986	-2,31
2.2.1	Belanja Pegawai	334.479.676.986	367.676.700.472	591.160.601.210	623.761.547.662	666.060.415.461	18,79
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.459.729.026.480	3.405.935.962.537	2.552.042.262.587	2.692.780.655.804	2.875.385.007.411	-10,39
2.2.3	Belanja Modal	6.355.113.862.735	5.108.903.943.806	5.633.809.158.548	6.078.371.544.083	6.613.554.625.114	1,00
	SURPLUS (DEFISIT)	(511.528.621.847)	(1.033.828.371.449)	-	-	-	-
3	PEMBIAYAAN	511.528.621.847	1.033.828.371.449	-	-	-	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	882.354.993.296	1.105.828.371.449	665.883.994.637	532.707.195.709	426.165.756.568	-13,61
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	370.826.371.449	72.000.000.000	665.883.994.637	532.707.195.709	426.165.756.568	176,06

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah), 2018

Keterangan;

Tahun 2019 berdasarkan RKPA 2019

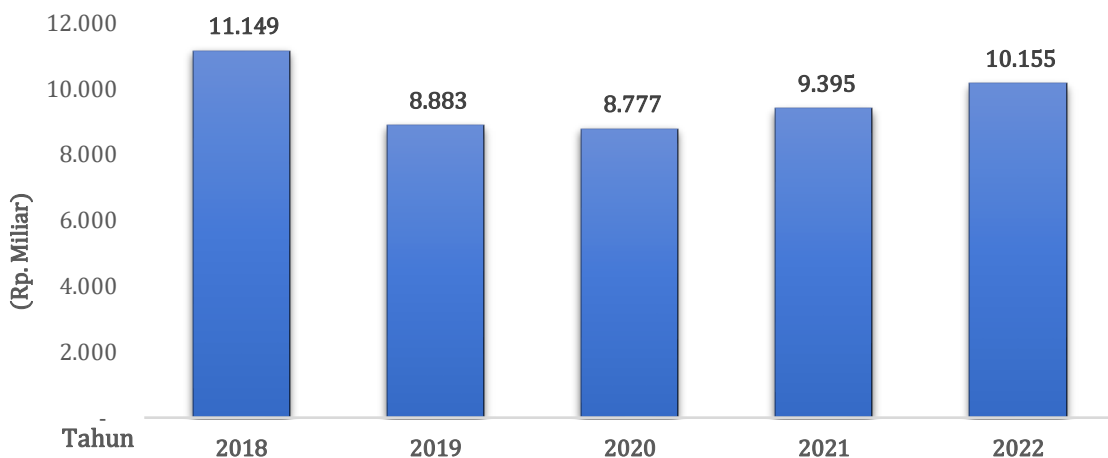
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022. Perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang disajikan dibawah ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, dalam artian tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dari perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Pemerintah Aceh diketahui pada tahun 2018 berjumlah sebesar Rp. 11.149.322.566.201,00 dan pada tahun 2022 diprediksi turun menjadi Rp. 10.155.000.047.987,00. Penurunan BL ini disebabkan adanya transfer DOKA ke kabupaten/kota mulai tahun 2019 sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Qanun Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Qanun Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. Pada tahun 2019-2022 DOKA ditempatkan pada BTL dalam objek belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Lebih rinci mengenai kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Aceh dapat lihat pada Tabel 3.46 dan Gambar 3.10.

Tabel 3.46.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Aceh

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	14.804.867.692.688	14.747.490.562.630	15.661.574.407.249	16.439.912.077.985	17.378.737.862.734
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	882.354.993.296	1.105.828.371.449	665.883.994.637	532.707.195.709	426.165.756.568
	Total Penerimaan	15.687.222.685.984	15.853.318.934.079	16.327.458.401.886	16.972.619.273.694	17.804.903.619.302
	Dikurangi:					
3	Belanja Tidak Langsung	4.167.073.748.334	6.898.802.327.264	6.884.562.384.903	7.044.998.330.436	7.223.737.814.747
4	Pengeluaran Pembiayaan	370.826.371.449	72.000.000.000	665.883.994.637	532.707.195.709	426.165.756.568
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	11.149.322.566.201	8.882.516.606.815	8.777.012.022.345	9.394.913.747.549	10.155.000.047.987

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (diolah), 2018



Gambar 3.10. Kapasitas Riil Keuangan Aceh Tahun 2018-2022

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan yang tersedia tersebut (Tabel 3.46 dan Gambar 3.10) dipergunakan untuk membiayai Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I dan Prioritas II. Pengalokasian dana pada prioritas II akan dipenuhi, setelah pemenuhan dana pada prioritas I terlebih dahulu. Adapun rencana pengeluaran terhadap masing-masing prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prioritas I, yaitu berkaitan berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMA dan amanat/kebijakan Nasional yang definitif, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20 (dua puluh) persen dan kesehatan sebesar 10 (sepuluh) persen. Prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang/jasa.
- b. Prioritas II, yaitu mencakup program prioritas di tingkat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang merupakan penjabaran dari masing-masing urusan/bidang urusan yang berdampak luas pada masing-masing kelompok masyarakat yang dilayani. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan dengan layanan dasar serta tugas pokok dan fungsi SKPA, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran serta program pendukung lainnya untuk peningkatakan pelayanan SKPA.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Aceh Tahun 2018-2022 berdasarkan masing-masing prioritas dapat dilihat pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Aceh Tahun 2018-2022

Prioritas	Tahun									
	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Kapasitas riil	11.149.322.566.201	100	8.882.516.606.815	100	8.777.012.022.345	100	9.394.913.747.549	100	10.155.000.047.987	100
Priortas 1	9.142.444.504.285	82	7.194.838.451.520	81	6.933.839.497.653	79	7.421.981.860.564	79	8.022.450.037.910	79
Priortas 2	2.006.878.061.916	18	1.687.678.155.295	19	1.843.172.524.693	21	1.972.931.886.985	21	2.132.550.010.077	21

3.4 Analisis Antisipasi Menurunnya Pendanaan Sumber Dana Otsus

Pendanaan yang bersumber dari dana Otsus mengalami penurunan menjadi satu persen dari Dana Alokasi Umum Nasional pada tahun 2023. Untuk mengantisipasi menurunnya dana Otsus tersebut maka, beberapa potensi sumber pendanaan perlu dioptimalkan seperti: Dana Cadangan, BLUD, Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), CSR, Investasi, dan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF).

3.4.1 Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan terdiri dana cadangan umum, dana abadi pendidikan dan dana cadangan pendidikan. Dana cadangan umum Aceh pada tahun 2016 sebesar Rp. 264.158.195.824,88 meningkat menjadi Rp. 284.202.617.966,31 atau meningkat sebesar 3,6 persen untuk tahun 2017. Demikian juga dengan dana abadi pendidikan dan dana cadangan pendidikan cenderung meningkat sebesar 3,6 persen dari tahun 2016. Dana Cadangan Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.48.

Tabel 3.48.
Dana Cadangan Aceh per 31 Desember 2017

No	Jenis Dana Cadangan	Nama Bank	Bentuk Penempatan	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
1	Dana Cadangan Umum	Bank Aceh Syariah	Giro	010.01.02.570482-0	15.350.241.724,31	24.665.819.582,88
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.640035.2	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	610-04.02.000001-0	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650045.1	26.492.376.242,00	26.492.376.242,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000043.3	29.360.000.000,00	-
				284.202.617.966,31	264.158.195.824,88	
2	Dana Abadi Pendidikan	Bank Aceh Syariah	Giro	010 01. 02 571159-1	21.969.078.964,27	35.055.963.288,89
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650035.8	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.640036-4	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650047.4	39.113.895.337,00	39.113.895.337,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000041.1	41.675.000.000,00	-
				402.757.974.301,27	374.169.858.625,89	
3	Dana Cadangan Pendidikan	Bank Aceh Syariah	Giro	010 01.02.571160-6	18.047.253.823,62	28.674.830.938,12
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.640034.1	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650046.2	29.065.352.992,00	29.065.352.992,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000042.2	34.195.000.000,00	-
						331.307.606.815,62
Jumlah					1.018.268.199.083,20	946.068.238.380,89

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2018

3.4.2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Aceh memiliki beberapa BLUD seperti: Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUDZA), Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Masjid Raya Baiturrahman (MRB) dan BLUD pertanian (UPTD Mekanisasi Pertanian, UPTD Balai Benih Holtikultura dan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan).

Hasil observasi lapangan menunjukkan BLUD memperoleh pendapatan dari aktivitas yang dilakukan. Namun, sampai saat ini BLUD masih mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Aceh. Untuk mengantisipasi menurunnya sumber penerimaan dari Otsus. Selama periode RPJM Aceh 2017-2022, Pemerintah Aceh merencanakan pengurangan bantuan keuangan kepada BLUD sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan anggaran BLUD dalam APBA. Di samping itu, pemerintah Aceh mendorong kemandirian BLUD dan diharapkan dapat juga menjadi sumber Pendapatan Asli Aceh di masa yang akan datang. Pemerintah Aceh akan memandirikan BLUD RSUZA pada tahun 2022 dan dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Aceh. Demikian juga, dengan BLUD lainnya diharapkan dapat menjadi mandiri dan menambah sumber penerimaan Aceh.

3.4.3 Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)

Aceh memiliki beberapa BUMA yaitu: PT. Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim Suka Makmur, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan Perusahaan Daerah Genap Mufakat (PDGM). Pada uraian sebelumnya (Tabel 3.36) telah memberikan informasi bahwa BUMA diperhitungkan sebagai bagian penerimaan pendapatan Aceh yang dipisahkan. Potensi penerimaan pendapatan terbesar diperoleh dari PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Mustaqim Suka Makmur dan PDPA. Selain memaksimalkan pendapatan PAA dari BUMA yang telah ada, maka kedepan dapat dibentuk BUMA yang baru berdasarkan sektor-sektor potensial yang mampu mendatangnya sumber penerimaan PAA. Mendorong BUMA yang bergerak di sektor minyak dan gas yang dikenal sebagai Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai peluang bagi Aceh untuk menjalin kerjasama dengan pihak lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah.

3.4.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR atau tanggungjawab sosial perusahaan merupakan kontribusi sektor swasta dalam pembangunan masyarakat yang berada disekitar perusahaan. Selama ini peranan CSR dalam pembangunan Aceh belum terlihat nyata meskipun jumlah Dana CSR milik BUMN yang ditujukan ke Aceh cukup besar. Dalam rangka mengurangi beban keuangan daerah perlu melakukan optimalisasi pengelolaan Dana CSR yang terkoordinasi, selaras dan terintegrasi dengan RPJM Aceh tahun 2017-2022.

3.4.5 Imbal Jasa Perdagangan Karbon

Laju perubahan iklim saat ini semakin mengkhawatirkan banyak negara termasuk Indonesia. Peristiwa dan bencana iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi fenomena yang semakin sering muncul seperti banjir dan kekeringan. Hal ini berkaitan dengan semakin berkurangnya penutupan lahan akibat deforestasi. Upaya mitigasi emisi karbon secara global ditujukan untuk mengurangi laju pemanasan global penyebab perubahan iklim. Untuk meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan skema imbal jasa perdagangan karbon. Dalam Peraturan Presiden No. 46 tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim, perdagangan karbon didefinisikan sebagai “kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim”. Terlihat perbedaan yang jelas antara istilah “pasar karbon” dan “perdagangan karbon” dimana pasar (market) adalah penyebab bagi perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki areal hutan hujan tropis terluas di dunia. Luas areal hutan Indonesia adalah sekitar 120,35 juta Ha atau sekitar 68% dari total luas daratan Indonesia. Dari total luas tersebut, 33,52 juta ha merupakan areal hutan lindung, 66,33 juta ha merupakan hutan produksi, dan 20,50 juta ha adalah hutan konservasi. Aceh sejauh ini memiliki luas kawasan hutan sebesar 2.255.577 Ha di Kawasan Ekosistem Leuser dan 738.856 Ha di Kawasan Hutan Ulu Masen, keduanya termasuk kategori hutan hujan tropis sebagai paru-paru

dunia menjadi komoditas yang vital dalam menyerap emisi gas rumah kaca untuk meminimalisir kerusakan atmosfer.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki komitmen dalam menanggulangi dampak perubahan iklim, sebagai salah satu peserta dalam Protokol Kyoto, Indonesia meratifikasi protokol tersebut pada 28 Juni 2004 dengan disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework of Climate Change*. Dengan potensi hutan yang sedemikian besar, Aceh memiliki potensi yang vital dalam perdagangan karbon dalam konteks mekanisme *Clean Development Mechanism* (CDM).

3.4.6 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah dibenarkan untuk melakukan kegiatan investasi yang ditujukan sebagai sumber-sumber pendapatan daerah. Mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui Badan Usaha Milik Daerah atau melalui skema *Public Private Partnership* (PPP). Investasi yang diharapkan yang dapat memberikan sumber penerimaan besar kepada Pemerintah Aceh seperti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Industri Perikanan Lampulo, dan Kawasan Strategis pariwisata lainnya.

KEK Arun Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017, pada tanggal 17 Februari 2017. KEK Arun merupakan kawasan khusus dengan luas 2.622,48 ha. Perusahaan yang sudah berkomitmen untuk beroperasi di dalam KEK Arun Lhokseumawe yaitu PT Aceh Asean Fertilizer (AAF) seluas 236,4 ha yang akan menghasilkan industri petrokimia, PT Pertamina (151,3 ha) juga menghasilkan petrokimia, PT Pelindo I (38,18 ha) menyediakan pelabuhan dan logistik, PT Pupuk Iskandar Muda (307,15 ha) juga menghasilkan petrokimia, eks PT Arun (1.689,8 ha) akan kembali menghasilkan minyak, gas, dan energi, serta PT Kertas Kraft Aceh (KKA) seluas 199,6 ha yang nantinya kembali akan menghasilkan pulp (bubur kertas) dan kertas.

Pengusul KEK Arun adalah konsorsium BUMN yang terdiri atas PT Pertamina, PT Pelindo, dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Ketiga BUMN ini telah membentuk konsorsium dengan BUMD Aceh, yakni Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Manfaat dari kehadiran KEK Arun di Lhokseumawe. Pertama, dengan adanya KEK bakal terjadi sinergi BUMN dan BUMD Aceh untuk menggali potensi sumber daya alam dalam rangka pengembangan industri migas, petrokimia, infrastruktur pelabuhan, dan agroindustri, sehingga akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Aceh, di mana pada triwulan III 2016, menurut BPS, berada pada level 2,65 persen. Ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,64 persen. Kedua, terciptanya lapangan kerja baru di Aceh yang diperkirakan 40.000 orang, baik skill maupun non-skill. Ini akan menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan yang kini berada pada peringkat tujuh nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Ketiga, meningkatkan potensi devisa ekspor dari produk migas, petrokimia, dan agroindustry dari Aceh nilai 2-3 miliar dollar Amerika Serikat per tahun, dimulai tahun 2020.

3.4.7 Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF)

Aceh memiliki potensi sumber penerimaan Ziswaf yang dikelola Badan Baitul Maal Aceh yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan dan beban keuangan daerah. Khusus untuk Zakat selama ini menjadi bagian penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan direncanakan

penerimaannya terus meningkat dan menjadi sumber penerimaan yang signifikan dalam PAA sebagaimana diuraikan sebelumnya pada Tabel 3.43.

3.5 Analisis Pasca Berakhirnya Sumber Pendanaan Otonomi Khusus (Otsus)

3.5.1 Pemanfaatan aset

Aset Pemerintah Aceh perlu diinventarisir secara serius agar dapat diidentifikasi permasalahan dan peluang aset tersebut sebagai sumber penerimaan Aceh yang potensial. Kondisi saat ini banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal bahkan cenderung tidak dikelola secara baik. Oleh karena itu, masing-masing perangkat daerah perlu mendata dan mengelola kembali aset-aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.

3.5.2 Perpanjangan pendanaan sumber dana Otsus

Setelah dilakukan upaya-upaya agar Pemerintahan Aceh dapat menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan dengan Pemerintah Pusat, namun hasil peningkatan pendapatan asli daerah yang diperoleh diproyeksikan belum optimal sehingga belum mampu membiayai pembangunan daerah. Dalam hal ini, kehadiran sumber dana Otsus pasca tahun 2027 masih tetap diperlukan keberlanjutannya. Dengan kata lain, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota mengharapkan sumber pendanaan Otsus dapat diperpanjang oleh Pemerintah Pusat.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ACEH

Tujuan pembangunan nasional dan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pembangunan di berbagai sektor dan bidang pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan ini, Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga dihadapkan kepada berbagai permasalahan utama dalam pembangunan yang harus diselesaikan baik secara bertahap maupun secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Aceh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang akan menghadapi permasalahan dan tantangan, baik yang bersifat lokal (daerah), regional (Sumatera, Kawasan Laut Andaman, Selat Malaka, dan Lautan Hindia bagian Selatan), nasional dan internasional (*global*), terutama dalam kawasan seputar Lautan Hindia. Berdasarkan konteks geo-strategis ini, maka dapat dipetakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang dihadapi Aceh ke depan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2017 - 2022.

Seiring dengan globalisasi, masyarakat Aceh mengalami tantangan yang besar dalam degradasi sosial yang dicirikan dengan menurunnya kepekaan sosial, budaya mandiri dan gotong-royong, serta melemahnya ekonomi produktif masyarakat.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih relatif tinggi. Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang diukur dengan *Gini Ratio* (GR) cenderung memburuk terutama di wilayah perkotaan. Meskipun demikian, telah terjadi penurunan ketimpangan antar wilayah kabupaten/ kota di Aceh (Kompak, 2018).

Untuk periode 2012-2017, perkembangan tingkat kemiskinan Aceh cenderung menurun, dimana pada tahun 2012 sebesar 18,58 menjadi 16,89 pada tahun 2017. Namun angka kemiskinan ini masih lebih besar dari rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10,63 persen pada tahun 2017.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh pada tahun 2016 berada pada angka 70,00, setingkat dengan Sumatera Utara, tetapi masih di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 70,18. Secara relatif, Aceh masih masuk 10 besar IPM tertinggi di Indonesia. Namun, angka IPM Aceh lebih dominan didukung oleh sektor pendidikan, jika dibandingkan dengan sektor kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya uraian rinci terkait dengan permasalahan pembangunan Aceh berdasarkan berbagai aspek yang diuraikan pada Bab II dan III sebagai berikut.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

- A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
 - A.1. Penggunaan Lahan
 - Tingginya alih fungsi lahan
- B. Demografi
 - Tingginya indeks ketergantungan penduduk
- C. Wilayah Rawan Bencana
 - Masih tingginya potensi bencana alam;
 - Masih tingginya Indeks Risiko Bencana (IRB);
 - Masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana.

- D. Sosiologi
- Belum berfungsinya peran kelembagaan wali nanggroe;
 - Belum optimalnya peran ulama dalam pembangunan;
 - Belum optimalnya peran kelembagaan adat.

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A.1. Pertumbuhan PDRB

- Rendahnya pertumbuhan PDRB Aceh

A.2. Laju Inflasi

- Fluktuasi harga pangan strategis masih tinggi

A.3. Pendapatan Perkapita

- Pendapatan perkapita masyarakat masih rendah

A.4. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

- Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat

A.5. Kemiskinan

- Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi;
- Masih tingginya indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan.

A.6. Pengangguran

- Tingginya tingkat pengangguran terbuka

B. Kesejahteraan Sosial

- Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah;
- Masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita;
- Masih rendahnya angka harapan hidup;
- Beberapa kabupaten/kota masih memiliki IPM di bawah rata-rata Aceh.

C. Fokus Seni Budaya

- Belum adanya even rutin seni budaya;
- Belum optimalnya pelestarian seni budaya;
- Belum optimalnya pelestarian budaya, seni, adat, dan adat istiadat Aceh;
- Promosi situs-situs budaya menjadi wisata religi belum optimal.

4.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

- Belum optimalnya penerapan pendidikan islami pada setiap jenjang pendidikan;
- Masih tingginya angka pelanggaran Syariat Islam;
- Masih lemahnya kualitas aparatur pembina Syariat Islam;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF);
- Belum seluruh dayah terakreditasi;
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas da'i di wilayah perbatasan, terluar dan terisolir;
- Masih lemahnya pengarusutamaan Syariat Islam dalam pembangunan;
- Belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam;
- Belum optimalnya pelaksanaan UUPA sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;
- Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan eks kombatan, eks tapol/napol dan korban konflik;
- Lemahnya pengenalan sejarah konflik Aceh dan upaya penguatan para syuhada korban konflik

B. Layanan Urusan Wajib

B.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

- Belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur pendidikan (terutama di daerah terpencil, terluar dan terisolir);
- Belum meratanya prasarana dan sarana pendidikan;
- Rendahnya mutu dan distribusi guru yang berkualitas;
- Masih lemahnya kualitas pendidikan menengah dan kualitas pembelajaran;
- Belum optimalnya tatakelola lembaga pendidikan.
- Belum optimalnya akses layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

b. Kesehatan

- Masih tingginya angka *stunting*
- Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas;
- Masih rendahnya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta kesehatan lingkungan;
- Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;
- Masih rendahnya budaya melayani oleh tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan;
- Belum optimalnya pengawasan obat dan makanan;
- Belum optimalnya ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumberdaya tenaga manusia kesehatan;
- Masih rendahnya ketersediaan alat kesehatan yang memenuhi standar;
- Belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur kesehatan;
- Masih rendahnya pelayanan kesehatan jiwa dan fasilitas pendukungnya.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur;
- Belum dikelolanya potensi sumber daya air secara optimal;
- Masih kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW;
- Masih terjadinya kekurangan debit andalan.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih rendahnya akses masyarakat terhadap hunian layak huni, aman dan terjangkau;
- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman;
- Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertangani;
- Kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin masih tinggi.

e. Sosial

- Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan;
- Belum optimalnya perlindungan anak, perempuan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Terbatasnya pengetahuan perempuan dalam mendidik anak;
- Terbatasnya keterampilan perempuan.

B.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Ketenagakerjaan

- Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja rendah;
- Tingginya pengangguran pada jenjang pendidikan SMA, Diploma dan sarjana;
- Masih tingginya pengangguran pada usia muda.

b. Pangan

- Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- Rendahnya kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- Rendahnya mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan;
- Terbatasnya prasarana dan sarana ketahanan pangan;
- Banyaknya wilayah dan keluarga rawan pangan;
- Rendahnya diversifikasi pangan.

c. Kepemudaan dan Olahraga

- Belum maksimalnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan;
- Tingginya kerentanan pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang serta pergaulan bebas;
- Masih lemahnya pembinaan dan kelembagaan olahraga;
- Minimnya ujicoba dan kompetisi olahraga;
- Terbatasnya prasarana dan sarana olahraga;
- Minimnya prestasi olahraga.

d. Pertanahan

- Masih terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

e. Lingkungan Hidup

- Belum optimalnya skema pengendalian perubahan iklim;
- Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.

f. Perhubungan

- Masih rendahnya kondisi sarana prasarana dan fasilitas perhubungan

g. Koperasi dan UKM

- Rendahnya kualitas SDM koperasi dan UKM;
- Rendahnya dukungan pembiayaan usaha.

h. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

B.3. Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

- Masih rendahnya lama kunjungan wisatawan;
- Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata dengan brand "*The Light of Aceh*";
- Lemahnya kelembagaan destinasi wisata;
- Minimnya sarana dan prasarana pariwisata.

b. Pertanian

- Rendahnya produktivitas tanaman pangan;
- Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan;

- Rendahnya produksi daging unggas dan ruminansia;
 - Rendahnya nilai tambah komoditi pertanian.
- c. Kehutanan
- Belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati;
 - Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial;
 - Masih rendahnya pengamanan kawasan hutan;
 - Meningkatnya luas lahan kritis;
 - Belum optimalnya penyelesaian konflik tenurial;
 - Masih terjadinya konflik satwa.
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral
- Masih kurangnya energi baru terbarukan dalam bauran energi;
 - Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya air untuk sumber energi.
- e. Perdagangan
- Defisit perdagangan masih tinggi;
 - Indeks keterbukaan perdagangan rendah.
- f. Perindustrian
- Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap ekonomi Aceh
- g. Kelautan dan Perikanan
- Belum optimalnya pemasaran hasil perikanan;
 - Rendahnya nilai tambah dan lemahnya daya saing komoditas perikanan;
- h. Transmigrasi
- Lemahnya kualitas SDM transmigrasi;
 - Terbatasnya prasarana dan sarana transmigrasi;
 - Banyaknya kawasan transmigrasi yang terlantar;
 - Pembinaan dan pendampingan terhadap warga transmigrasi masih kurang.
- B.4. Penunjang Urusan
- a. Perencanaan Pembangunan
- Belum terbangunnya Sistem Satu Data Pembangunan dan Terpadu;
 - Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - Belum terkoneksi dan terintegrasinya data dan informasi pembangunan;
 - Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya didukung oleh data dan fakta.
 - Penetapan APBA belum tepat waktu.
- b. Keuangan
- Belum optimalnya pengelolaan aset;
 - Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
- Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
 - Belum optimalnya penempatan pimpinan OPD sesuai dengan keahlian;
 - Lemahnya kualitas SDM aparatur pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;
 - Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan.

- d. Penelitian dan Pengembangan
 - Belum optimalnya Research and Development (R and D);
- e. Pengawasan
 - Lemahnya sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah sesuai Standar Pelayanan Minimal.

4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

- A. Kemampuan Ekonomi Daerah
 - A.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
 - A.2. Nilai Tukar Petani
 - Rendahnya nilai tukar nelayan
- B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
 - B.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
 - Masih rendahnya akses air bersih
 - B.2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik
 - Belum optimalnya fungsi transmisi jaringan listrik
 - B.3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
- C. Iklim Berinvestasi
 - Ketersediaan sarana dan prasarana investasi masih minim;
 - Kelembagaan kawasan industri dan status lahan masih menjadi kendala;
 - Persepsi investor terhadap iklim investasi di Aceh belum membaik.
- D. Sumber Daya Manusia
 - Lemahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
 - Rendahnya perlindungan tenaga kerja;
 - Belum tersedianya kelembagaan pelatihan yang representatif.

4.2. Isu Strategis Pembangunan Aceh 2017 – 2022

Isu strategis merupakan perbedaan (*gap*) antara kondisi saat ini (*existing*) dengan harapan yang tergambar dalam Visi dan Misi Pemerintah Aceh 2017-2022. Di samping itu, isu-isu strategis juga dapat dipandang sebagai masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pelaksanaan pembangunan berikutnya. Isu-isu Strategis Pembangunan Aceh terdiri dari Isu Strategis Internasional, Isu Strategis Nasional, dan Isu Strategis Daerah.

Isu Strategis Internasional meliputi:

- 1) Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
- 2) Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- 3) Berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada SDGs;
- 4) Sumber energi alternatif;
- 5) Perubahan iklim global; dan
- 6) Munculnya kekuatan ekonomi baru (India dan Cina) di Samudera Hindia.

Selanjutnya Isu Strategis Nasional yaitu:

- 1) Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan;
- 2) Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
- 3) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;

- 4) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera;
- 5) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Sabang, Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Banda Aceh Darussalam, Kawasan Ekosistem Leuser, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Sedangkan Isu Strategis Daerah yang telah diidentifikasi berdasarkan permasalahan pembangunan, maka ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

4.2.1. Peningkatan sumber Penerimaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah

Peningkatan sumber penerimaan keuangan dan pengelolaan aset keuangan menjadi isu strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) (Aceh Kaya). Dalam hal ini, optimalisasi berbagai potensi sumber penerimaan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAA (dana cadangan BLUD, BUMA, imbal jasa perdagangan karbon, Investasi, ZISWAF). Kemandirian BLUD RSUZA diharapkan dapat dicapai pada tahun 2022 sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan PAA. Berbagai BUMA seperti: Bank Aceh dan PDPA perlu dievaluasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAA, serta mendorong pembentukan BUMA sektor produktif. Di samping itu, dukungan investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata perlu dilakukan agar dapat memberikan kontribusi terhadap sumber PAA. Demikian juga dengan diinventarisir aset yang berpotensi sebagai sumber penerimaan keuangan perlu dilakukan secara optimal untuk meningkatkan PAA.

4.2.2. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik;

Isu strategis peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (*Aceh Peumulia*) difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Menempatkan pimpinan SKPA sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat. Isu strategis ini juga akan melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah. Di samping itu, penetapan APBA yang tidak tepat waktu merupakan salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya kinerja pemerintah daerah.

4.2.3. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan;

Isu strategis penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan (*Aceh Meudadab*) difokuskan untuk menurunkan angka pelanggaran Syariah Islam dan menjadikan Al Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup. Memperkuat pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap jenjang pendidikan dan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial serta membangun kembali nilai-nilai budaya ke Aceh yang Islami dan pluralistik. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan memperkuat eksistensi kelembagaan institusi ke-Islaman dalam menyebarluaskan nilai-nilai ke-Islaman.

4.2.4. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan;

Isu strategis penguatan perdamaian secara berkelanjutan (*Aceh Damee*) difokuskan untuk penguatan pelaksanaan difokuskan untuk penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Menuntaskan aturan turunan UUPA untuk diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan menciptakan situasi damai yang berkelanjutan (*sustainable peace*) melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.2.5. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan;

Isu strategis pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan (*Aceh Troe; Aceh Meugoe dan Meulaot*) difokuskan untuk pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan menjamin ketersediaan dan pemerataan pangan bagi segenap lapisan masyarakat Aceh dan secara bertahap akan memiliki kemandirian dalam penyediaan kebutuhan pangan.

4.2.6. Pengembangan pertanian dan perikanan;

Isu strategis pengembangan pertanian dan perikanan (*Aceh Meugoe dan Meulaot*) difokuskan untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang akan memberi manfaat dalam rangka membangun pertanian dan ekonomi maritim, serta mengelola rantai pasok (*supply chain management*) di seluruh sektor produksi. Meningkatkan nilai tambah (*value added*) hasil produksi pertanian dan perikanan, serta memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan daerah melalui ekspor-impor.

4.2.7. Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM ;

Isu strategis pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM (*Aceh Kaya*) ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan sumber daya daerah dan memproteksi produk-produk yang dihasilkan. Membangun basis industri sebagai bagian menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus Aceh dengan cara mendorong dan melindungi tumbuhnya industri-industri yang menyuplai kebutuhan lokal masyarakat Aceh. Koperasi dan UMKM didorong untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan penyediaan lapangan kerja. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan menciptakan lapangan kerja baru untuk tenaga kerja yang memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

4.2.8. Pengembangan pariwisata;

Sejalan dengan penerapan Syariat Islam di Aceh, maka pertimbangan wisata Islami menjadi penting untuk diimplementasikan. Isu strategis pengembangan pariwisata (*Aceh Kaya*) difokuskan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal (*length of stay*) wisata domestik dan mancanegara yang pada akhirnya akan menjadi penerimaan asli daerah dan pendapatan bagi masyarakat pelaku usaha pariwisata. Hal penting yang harus dibenahi adalah aksesibilitas, amenities, atraksi (destinasi) pariwisata, dukungan promosi objek wisata, industri pariwisata dan kelembagaan serta didukung oleh kualitas sumberdaya kepariwisataan yang Islami dan berbudaya ke-Acehan.

4.2.9. Ketenagakerjaan;

Isu strategis ketenagakerjaan (*Aceh Kreatif*) difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Demikian juga untuk menciptakan tenaga

kerja yang terampil dan berdaya saing, maka peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) perlu diutamakan. Hal ini akan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima di pasar tenaga kerja.

4.2.10. Ketersediaan dan ketahanan energi;

Isu strategis ketersediaan dan ketahanan energi (*Aceh Energi*) akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber energi bagi konsumsi rumah tangga dan industri. Kelangkaan energi akan menjadi disinsentif bagi minat investasi, terutama investasi asing, dan dengan demikian, akan menghambat pembentukan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan energi listrik yang bersumber dari energi fosil akan mengganggu ketahanan energi, akibat sumber energi fosil yang semakin langka. Selain itu, energi listrik bersumber energi fosil juga memberikan eksternalitas negatif berupa emisi gas rumah kaca, yang pada jangka panjang akan mengakibatkan pemanasan global. Dengan demikian, energi Aceh akan difokuskan pada energi baru dan terbarukan yang lebih murah dan ramah lingkungan.

4.2.11. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi;

Isu strategis pemenuhan data yang berkualitas dan terintegrasi (*Aceh SIAT*) menjadi penting untuk menghasilkan suatu perencanaan yang berkualitas. Perencanaan yang diharapkan adalah perencanaan yang berbasis satu data (*evidence-based planning*), yang didukung oleh sistem SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu). Ketersediaan data yang terpusat dan terintegrasi serta *accessible* diharapkan dapat menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan sesuai dengan prinsip *evidence-based planning*.

4.2.12. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah;

Isu strategis pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah (*Aceh Seumeugot*) diharapkan dapat menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh sesuai dengan RTRW Aceh. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar (irigasi, air baku, infrastruktur pemukiman) dan perbaikan konektivitas antarwilayah akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh.

4.2.13. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni;

Isu strategis pemenuhan perumahan dan pemukiman (*Aceh Seuninya*) merupakan esensi pembangunan Aceh, karena merupakan hak dasar bagi masyarakat, terutama bagi kaum dhuafa dan pasangan muda. Terpenuhinya perumahan dan pemukiman yang sesuai standar minimum kesehatan dapat mengangkat martabat masyarakat.

4.2.14. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan;

Isu strategis peningkatan kualitas dan pendidikan (*Aceh Caroeng*) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan siap menghadapi dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan cara yang komprehensif dan sistematis, termasuk di dalamnya penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional, peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dayah, serta peningkatan kompetensi guru. Lulusan putra-putri terbaik Aceh diharapkan dapat melanjutkan pendidikan di universitas-universitas dan politeknik bergengsi di tingkat nasional dan internasional.

4.2.15. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga;

Isu strategis peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (*Aceh Teuga*) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemuda Aceh, sehingga prestasi olahraga di tingkat nasional dan regional dapat meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas olahraga yang dapat diakses seluruh rakyat Aceh secara merata dan memberikan ruang bagi segenap rakyat Aceh untuk berprestasi dalam berbagai cabang olahraga.

Peningkatan kualitas pemuda diharapkan pula dapat mencegah risiko penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, pergaulan bebas, dan reduksi karakter ke-Acehan. Selanjutnya, pemuda diharapkan mampu mengembangkan inovasi dan jiwa *enterprenur* untuk menghindari pengangguran intelektual. Selain itu, pemuda diharapkan dapat pula menjadi ujung tombak berkembangnya industri kreatif di Aceh.

4.2.16. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (*Aceh Seujahtra*) difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan akses kesehatan diantaranya dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan rumah sakit regional dan rujukan. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan terlatih dan peningkatan Jaminan Kesehatan Aceh. Selanjutnya Penanganan *Stunting* harus diupayakan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

4.2.17. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Isu pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan PMKS (*Aceh Seujahtra*) diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender dan kesejahteraan PMKS. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan usia harapan hidup perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan, dan pengeluaran perkapita perempuan. Selanjutnya peran perempuan dalam pembangunan diharapkan dapat meningkat yang tergambar dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan pengambil kebijakan.

4.2.18. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.

Isu strategis kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup (*Aceh Green*) diterapkan melalui strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana. Dalam hal ini, indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan dapat meningkat. Untuk itu, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang didukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dapat menurunkan dampak risiko bencana. Demikian juga upaya mitigasi penyesuaian pola tanam melalui penerapan KATAM yang menyesuaikan dengan perubahan iklim dapat menurunkan risiko gagal panen komoditas pertanian.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS RPJMA maka isu-isu strategis yang terkait dengan KLHS RPJMA adalah sebagai berikut:

- 1) Degradasi hutan/lahan gambut (antara lain karena pembalakan liar);
- 2) Keterbatasan energi;

- 3) Pencemaran dan degradasi Lingkungan Hidup (utamanya tanah dan air);
- 4) Bencana hidrometeorologi dan geologi;
- 5) Alih fungsi lahan (pertanian, hutan, perkebunan dan lahan basah);
- 6) Konflik sosial (lahan dan satwa);
- 7) Keanekaragaman hayati.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

“ Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani ”

Visi ini mengandung tiga frasa kunci sebagai berikut:

1) Aceh yang Damai

Bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memmanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan;

2) Aceh yang Sejahtera

Bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak;

3) Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani

Bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

5.2. Misi

Visi di atas akan dicapai melalui 10 (sepuluh) Misi sebagai berikut:

Misi 1: Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.

Melalui Misi 1 ini akan tercipta pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar, serta merubah paradigma birokrasi bahwa aparatur adalah pelayan bagi masyarakat. Menempatkan aparatur pemerintah sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana reformasi birokrasi.

Misi 2: Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.

Melalui Misi 2 ini akan mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dan membangun kembali nilai-nilai budaya dan sejarah ke-Acehan yang islami dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan meningkatkan kualitas SDM di sektor yang mendukung wisata budaya yang bersendikan kekayaan khasanah budaya dan nilai-nilai islami.

Misi 3: Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.

Melalui Misi 3 ini akan menguatkan pelaksanaan UUPA sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan menciptakan situasi aman dan damai yang berkelanjutan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat.

Misi 4: Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.

Melalui Misi 4 ini akan melahirkan Anak Aceh Cerdas (AAC) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan mengurangi gap antara kebutuhan pembangunan daerah dengan output pendidikan dan menjadikan anak Aceh yang cerdas dan mampu bersaing serta siap menghadapi dunia kerja. Melalui Misi 4 ini juga akan mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan Aceh di tingkat nasional, regional dan internasional.

Misi 5: Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi

Melalui Misi 5 ini akan tercipta pemenuhan akses layanan kesehatan yang gratis, lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat Aceh. Pemerintah Aceh memberikan jaminan sosial bagi setiap rakyat Aceh, meningkatkan pengarusutamaan gender, dan meningkatkan kualitas pelayanan khusus disabilitas. Di samping itu, seluruh masyarakat Aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

Misi 6: Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Melalui Misi 6 ini akan tercipta pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh, menjamin ketersediaan dan pemerataan pangan, serta membangun pertanian dan ekonomi maritim.

Misi 7: Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan

Melalui Misi 7 ini akan tercipta pemenuhan energi listrik yang bersih dan terbaharukan bagi rakyat Aceh dan industri. Pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Misi 8: Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.

Melalui Misi 8 ini akan mendorong tumbuhnya sentra-sentraproduksi, industri dan pariwisata sesuai dengan potensi sumberdaya daerah, dan membangun basis industri sebagai bagian menghadapi berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh. Pemerintah Aceh merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar disektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor-sektor strategis lainnya.

Misi 9: Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Melalui Misi 9 ini akan dikembangkan sistem informasi dan *data-base* Aceh yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan Aceh.

Misi 10: Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui Misi 10 ini akan dibangun dan dikembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh sektor-sektor pembangunan Aceh.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan tujuan dan sasaran. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh, 2017-2022
Berdasarkan Misi

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Visi : Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani											
Misi 1 : Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani											
1.1.		Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	60,11	61,2	62,35	63,04	64,12	65,47	65,47
1.1.1.		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Tingkat kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	3	3	3	4	4
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	2,55/Tinggi	2,60/Tinggi	2,65/Tinggi	2,70/Tinggi	2,75/Tinggi	2,80/Tinggi	2,80/Tinggi
			Persentase penerapan pengelolaan dan pelaksanaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa	%	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	95,00
			Tingkat maturitas SPIP	Level	2	2	3	3	3	4	4
			Nilai LAKIP	Nilai	BB-	BB-	BB+	BB+	AA-	AA+	AA+
			Nilai SAKIP	Nilai	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00	64,00	64,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.2.		Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	60,07	65,30	69,50	73,30	81,20	85,50	85,50
1.1.3.		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Persentase unit kerja berpredikat Wilayah Batas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	58,24	60	62	68	71	75	75
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	40,82/C	60/C	70/B	75/B	80/B	85/A	85/A
1.1.4		Database kepegawaian yang terintegrasi	Tersedianya database kepegawaian	Tersedia/Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Misi 2: Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad AhlussunnahWaljamaah yang bersumber hukum MazhabSyafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.											
2.1.		Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indeks pembangunan Syariat Islam	Indeks	45	50	55	60	65	70	70
2.1.1.		Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al-Qur'an dan Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum islami	%	85	86	88	90	90	90	90
			Jumlah Ijtihat, Ijma', qiyas dan fatwa yang diterapkan	Fatwa	49	61	67	73	79	85	85
			Jumlah Hafiz Alqur'an	Orang	68	189	239	300	375	420	420

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Indeks Melek Alqur'an	Indeks	55	63	68	73	75	85	85
2.1.2.		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah	%	55,5	73,4	74,19	74,98	75,76	76,55	76,55
			Persentase dayah dengan program tahfiz Alqur'an	%	20,5	21,51	25,66	32,81	35,96	40,1	45,5
2.1.3.		Menguatnya tatanan Ekonomi Syari'ah	Rasio aset dan transaksi keuangan syariah terhadap total transaksi keuangan	Rasio	52,27	55,41	58,74	62,26	66,00	69,96	69,96
			Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	0,73	1,96	1	1	1	1	1
			Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	Sertifikat	250	450	750	1.050	1.350	1.650	1.650
2.1.4.		Menguatnya penegakan Syariah dalam bermasyarakat	Persentase mesjid yang melaksanakan shalat lima waktu	%	40	45	52	57	63	75	75
2.1.5.		Meningkatnya pengamalan Syariat Islam di daerah perbatasan	Persentase kemampuan membaca Al-Quran masyarakat di perbatasan	%	20	30	40	50	60	70	70
2.1.6.		Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis islami	Persentase mesjid yang memenuhi standar	%	55	60	67	73	82	85	85
2.1.7.		Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Jumlah Festival seni Budaya dan Adat Istiadat	Festival	25	45	50	55	60	65	265

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Misi 3 : Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki											
3.1.		Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki	Jumlah turunan regulasi UU-PA	Regulasi	46	48	50	53	56	59	59
3.1.1.		Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA	Persentase PP yang diselesaikan	%	50	60	70	80	85	90	90
			Persentase Qanun yang diselesaikan	%	77	80	85	85	90	95	95
3.1.2.		Tuntasnya turunan UU-PA yang tidak bisa diimplementasikan	Jumlah PP yang diselesaikan tidak bisa diimplementasikan	PP	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah Qanun yang diselesaikan tidak bisa diimplementasikan	Qanun	3	3	3	2	1	0	0
3.1.3.		Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik	Persentase pemberdayaan korban konflik	%	5	11	17	24	32	40	40
			Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	%	7	14	22	31	41	52	52
			Jumlah lembaga penanganan korban konflik	Lembaga	13	13	13	13	13	13	13
3.2.		Meningkatkan pembangunan demokrasi	Indeks demokrasi indonesiaprovinci Aceh	Indeks	72,48	72,86	73,12	73,16	73,52	73,89	73,89

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.2.1.		Meningkatnya kebebasan sipil masyarakat	skor aspek kebebasan sipil	Skor	92,92	92,98	93,12	93,21	93,35	93,58	93,58
3.2.2.		Meningkatnya hak-hak politik	Skor aspek hak-hak politik	Skor	63,94	65,46	67,42	68,93	71,18	74,52	74,52
3.2.3.		Meningkatnya peran lembaga demokrasi	skor aspek lembaga demokrasi	Skor	61,47	62,27	63,24	65,43	67,33	69,33	69,33
Misi 4 : Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional											
4.1.		Meningkatkan kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing	Persentase pendidikan yang ditamatkan	%	28,37	30,15	31,55	32,45	33,2	34	34
4.1.1.		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata - rata nilai UN Tingkat SMA/SMK								
			- SMA IPA	Nilai	41,96	43,96	46,46	49,16	52,16	55,56	59,06
			- SMA IPS	Nilai	38,67	40,67	43,17	45,87	48,87	52,27	55,77
			- SMK	Nilai	48,15	50,15	52,65	55,35	58,35	61,75	65,25
			Persentase sekolah yang terakreditasi A								
			- Jenjang SD	%	19,5	29,8	40,1	50,2	60,5	70,9	80,5
			- Jenjang SMP	%	20,9	30,1	40,5	50,2	60,4	70,2	80,5
			- Jenjang SMA	%	35,6	41,1	46,6	52,1	57,6	63,1	68,6
			- Jenjang SMK	%	11,7	13,2	15,7	17,5	19,2	21,5	25,5
			Persentase Kelulusan UN								
			- Jenjang SMA	%	99,7	99,75	99,8	99,85	99,9	99,95	100
			- Jenjang SMK	%	99,62	99,7	99,75	99,8	99,85	99,9	100
			Angka Melek Huruf	%	97,94	98,1	98,2	99	99,3	99,5	99,5

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,98	9	10	11	12	13	13
			Angka harapan lama sekolah	tahun	14,13	14,23	14,39	14,56	14,73	14,90	14,90
4.1.2.		Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)								
			- Jenjang SD	%	46,23	48,23	51,23	55,23	59,23	63,23	67,23
			- Jenjang SMP	%	48,12	50,12	53,12	57,12	61,12	65,12	69,12
			- Jenjang SMA	%	51,05	53,05	56,05	60,05	64,05	68,05	72,05
			- Jenjang SMK	%	51,88	53,88	56,88	60,88	64,88	68,88	72,88
			Persentase Distribusi Guru	%	50	55	62	69	79	87	87
			Rasio Guru-Murid								
			- Jenjang SD	Rasio	01:10	01:11	01:12	01:13	01:14	01:15	01:16
			- Jenjang SMP	Rasio	01:09	01:10	01:11	01:12	01:13	01:14	01:15
			- Jenjang SMA	Rasio	01:09	01:10	01:11	01:12	01:13	01:14	01:15
			- Jenjang SMK	Rasio	01:09	01:10	01:11	01:12	01:13	01:14	01:15
4.1.3.		Meningkatnya kualitas pendidikan vokasional	Persentase lulusan vokasional yang bersertifikasi	%	15	25	45	55	75	85	95
4.1.4.		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar :								
			SD/Sederajat	%	102,41	102	101,5	101	100,5	100	100
			SMP/Sederajat	%	99,15	99,79	100	100	100	100	100
			SMA/Sederajat	%	87,47	88	89	90	92	100	100

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.2.		Meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional	Daya saing olahraga dan kepemudaan	Tinggi, Sedang dan Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4.2.1.		Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional	Pemuda	10	55	57	60	62	65	65
			Persentase wirausaha muda	%	0,37	0,12	0,14	0,15	0,17	0,12	0,12
4.2.2.		Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah medali pada event olahraga tingkat nasional dan regional	Medali	9	12	14	18	20	25	25
Misi 5 : Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi											
5.1.		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	tahun	69,52	69,95	69,98	70	70,2	70,5	70,5
5.1.1.		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase kinerja pelayanan rumah sakit								
			- BOR	%	45	50	55	60	65	70	70
			- TOI	Hari	4	4	3	3	2	2	2
			- ALOS	Hari	2	5	5	5	5	5	5
			- NDR	< 25/1000	5,73	5,5	5,4	5,35	5,25	5,05	5,05
			- GDR	< 45/1000	9	8,35	7,1	6,75	6,33	6,23	6,23
			Angka kematian ibu	/100.000 KH	149	162	157	150	145	140	140
			Angka kematian neonatus	/1000 KH	7	6	6	6	5	5	5
			Angka kematian bayi	/1000 KH	9	9	9	9	8	8	8

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Angka kematian balita	/1000 KH	10	10	9	9	8	8	8
			Persentase balita gizi buruk	%	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1
			Persentase balita gizi kurang	%	14,1	13,6	13,1	12,7	12,2	11,8	11,8
5.1.2.		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Cakupan Kesehatan Semesta (<i>Universal health coverage</i>)	%	95,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00
5.2.		Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,67	92,53	92,99	93,46	93,93	94,39	94,39
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,28	66,55	66,78	66,90	67,20	67,60	67,60
5.2.1.		Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Angka usia harapan hidup laki-laki	Tahun	67,59	67,83	67,92	68	68,09	68,18	68,18
			Angka usia harapan hidup Perempuan	Tahun	71,49	71,74	71,82	71,91	72	72,08	72,08
			Rata-rata lama sekolah laki-laki	Tahun	9,16	9,57	9,69	9,81	9,93	10,06	10,06
			Rata-rata lama sekolah perempuan	Tahun	8,4	8,96	9,14	9,32	9,49	9,67	9,67
			Pengeluaran perkapita laki-laki	Ribu/Tahun	11.936,79	12.175	12.252	13.329	12.407	12.484	12.484
			Pengeluaran perkapita perempuan	Ribu/Tahun	7.411	8.342	8.640	8.939	9.327	9.535	9.535

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.2.2.		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	%	14,81	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05
			Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50	50	50	50	50	50	50
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80	80	80	80	80	80	80
5.3.		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks kualitas hidup PMKS	Indeks	0,28	0,44	0,47	0,57	0,62	0,65	0,65
5.3.1.		Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	5,4	8,6	9,1	9,7	10,26	10,8	10,8
5.3.2.		Meningkatnya kesejahteraan disabilitas	Persentase disabilitas yang menerima jaminan sosial	%	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
5.3.3.		Menurunnya angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	%	15,92	15,43	14,43	13,43	12,43	11,43	11,43
Misi 6 : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan											
6.1.		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB	%	4,31	5	5,25	5,5	5,75	6	6
6.1.1.		Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian	Kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan	%	29,63	29,75	29,82	29,94	30,19	30,24	30,24

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			perikanan								
6.2.		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	%	15,92	15,43	14,43	13,43	12,43	11,43	11,43
6.2.1.		Meningkatkan Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Indeks	70	73,9	75,5	77,6	78,5	80,25	80,25
6.2.2.		Meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	96,26	98	101	103	105	107	107
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	97,16	98,5	99,75	101,25	103	106	106
Misi 7 : Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbaruka											
7.1.		Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	Rasio ketersediaan daya listrik	%	1,03	1,45	2,00	1,87	1,73	1,65	1,65
7.1.1.		Terwujudnya kemandirian energi	Rasio elektrifikasi	%	95,69	98,05	98,46	99,00	99,50	99,90	99,90
			Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total Energi	%	0,54	1,93	6,67	15,12	20,06	25,17	25,17
7.2.		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB	%	4,31	5	5,25	5,5	5,75	6	6
7.2.1.		Meningkatnya kontribusi subsektor pertambangan dan penggalan	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB	%	1,22	1,91	2,6	3,3	3,99	4,68	4,68

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Misi 8 : Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi dan industri kreatif yang kompetitif											
8.1.		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB	%	4,31	5	5,25	5,5	5,75	6	6
8.1.1.		Meningkatnya pembangunan industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non Migas	%	5,14	5,84	6,37	6,94	7,57	8,25	8,99
			Persentase kontribusi sub sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya	%	0,63	0,68	0,7	0,73	0,76	0,79	0,79
8.1.2.		Meningkatnya neraca perdagangan	Pertumbuhan ekspor non migas	%	-58,1	4,9	14,44	13,59	5,56	5,7	5,7
			Pertumbuhan impor	%	-75,18	-27,68	4	4	4	4	4
			Neraca perdagangan	USD	-6.125.058	62.953.863	74.872.018	78.746.898	83.576.774	88.859.845	88.859.845
			Defisit Perdagangan Antar Daerah	Rp.Triliun	35	30,25	28	27	26	25	25
8.1.3.		Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.Miliar	4.973	5.000	5.500	6.050	6.650	7.300	7.300
8.1.4.		Meningkatnya kontribusi pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Aceh	%	2,70	2,96	3,11	3,25	3,39	3,54	3,54
8.2.		Menurunnya Angka Pengangguran	Persentase angka pengangguran (TPT)	%	6,57	6,45	6,30	6,25	6,22	6,00	6,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.2.1.		Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri, pariwisata dan jasa lainnya	Orang	123.588	138.951	150.882	162.813	174.744	186.675	186.675
Misi 9 : Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan											
9.1.		Meningkatnya kualitas kebijakan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	68	70	75	79	82	85	85
9.1.1.		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	0,389	0,361	0,348	0,336	0,324	0,313	0,313
			Persentase informasi publik yang diumumkan	%	30	50	65	85	90	95	95
			Persentase informasi publik yang disediakan	%	50	55	65	80	92	97	97
			Persentase layanan informasi publik	%	50	60	70	80	85	97	97
			Persentase pengelolaan informasi dan dokumentasi Informasi publik	%	45	53	64	71	83	96	96
			Persentase PPID OPD yang aktif	%	20	23	35	47	60	70	70
9.1.2.		Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik.	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu.	%	15	30	43	56	60	65	65

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.2.		Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning.	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	%	80	100	100	100	100	100	100
9.2.1.		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan	%	80	100	100	100	100	100	100
9.2.2.		Membangun Bank Data terintegrasi	Tersedianya satu data pembangunan	Tersedia/ Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Misi 10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan											
10.1.		Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Williamson (IW)	Indeks	0,383	0,361	0,348	0,336	0,324	0,313	0,313
10.1.1.		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase peningkatan standar pelayanan fasilitas perhubungan	%	38	42	67	73	83	92	92
			Persentase kelancaran arus lalu lintas (Indeks konektivitas)	%	3,22	3,3	3,39	3,43	3,52	3,52	3,52
			Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan	Indeks	0,5	0,56	0,72	0,85	0,9	0,98	0,98
10.2.		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	%	15,92	15,43	14,43	13,43	12,43	11,43	11,43
10.2.1.		Berkembangnya Pemukiman baru	Jumlah kawasan perkotaan baru (transmigrasi)	Kawasan	1	3	3	3	3	3	3

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.3.		Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar	Peningkatan cakupan pelayanan dasar	%	75,21	77,07	78,06	78,97	79,84	80,63	80,63
10.3.1.		Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase rumah layak huni	%	54,34	57,73	59,29	60,77	62,17	63,49	63,49
			Persentase pemukiman Layak huni	%	96,08	96,42	96,82	97,16	97,5	97,77	97,77
			Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,13	0,138	0,142	0,146	0,15	0,154	0,154
10.3.2.		Meningkatnya pelayanan pertanahan	Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan	Kasus	3	6	6	6	6	6	33
			Penyelesaian Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi	Dokumen	2	5	5	5	5	5	22
			Jumlah Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan	Kab/Kota	0	3	3	3	6	8	23
10.4.		Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,38	74,00	74,00	74,50	75,00	75,00	75,00
10.4.1.		Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Persentase Permohonan Kesesuaian Ruang Terhadap RTRW	%	94,3	95,5	95,8	97,2	97,9	98,4	98,4
			- Indeks kualitas Air	Indeks	67,84	72,00	75,00	78,00	80,00	89,50	89,50
			- Indeks kualitas Udara	Indeks	89,87	90,50	91,50	93,00	95,00	97,00	97,00
10.4.2.		Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	Luas kawasan konservasi perairan	Ha	77.856,66	145.237,77	212.618,89	280.000,00	280.500,00	281.100,00	281.100,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			luas mangrove yang dikonservasi	Ha	13.654,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.400,00
10.5.		Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan	Indektutupan hutan dan lahan	Indeks	55,63	66,00	67,25	69,00	71,00	72,00	72,00
10.5.1.		Luas kawasan hutan yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas tutupan lahan	Indeks	55,63	56,5	56,5	57	57,5	58	58
10.5.2.		Terjaganya keanekaragaman hayati	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati	Rasio	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499	0,499
10.5.3.		Menguatnya Fungsi dan Peran KPH	Persentase kelompok usaha perhutanan sosial	%	1,67 (30.000Ha)	6,13 (110.000Ha)	10,58 (190.000Ha)	15,04 (270.000Ha)	19,50 (350.000Ha)	23,96 (430.000Ha)	23,96 (430.000Ha)
10.6.		Meningkatkan tatakelolakebencanaan	Indeks resiko bencana	Indeks	160/Sedang	140/sedang	137.5/sedang	135/sedang	132.5/sedang	130/sedang	130/sedang
10.6.1.		Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan	Rasio kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	Rasio	0,33/Rendah	0,35/Rendah	0,55/Sedang	0,65/Sedang	0,75/Sedang	0,80/Tinggi	0,80/Tinggi

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN ACEH

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan Aceh, 2017 – 2022 sebagaimana telah diuraikan pada BAB V sebelumnya, maka selanjutnya disusun Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Misi Pembangunan Aceh. Arah kebijakan pembangunan Aceh disusun berdasarkan tema untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

1. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Pembangunan pada tahun 2018 diselenggarakan dengan tema ***“Memantapkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan”***. Unggulan Aceh Hebat yang terkait dengan tema pembangunan Tahun 2018 adalah Aceh Troe, Aceh Meugoe dan Meulaot, Aceh Kaya, Aceh Seuniya, Aceh Energi.

2. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019

Pembangunan pada tahun 2019 diselenggarakan dengan tema yaitu ***“Memacu pengembangan kawasan strategis dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”***. Unggulan Aceh Hebat yang terkait dengan tema pembangunan Tahun 2019 adalah Aceh SIAT, Aceh Meuadab, Aceh Pemulia, Aceh Seujahtra, Aceh Kreatif, Aceh Seuninya, Aceh Energi, Aceh Carong, Aceh Troe, Aceh Meugoe dan Meulaot, Aceh Kaya dan Aceh Green.

3. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020

Pembangunan pada tahun 2020 diselenggarakan dengan tema yaitu ***“Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur yang terintegrasi”***. Unggulan Aceh Hebat yang terkait dengan tema pembangunan Tahun 2020 adalah Aceh Meuadab, Aceh Pemulia, Aceh Seujahtra, Aceh Kreatif, Aceh Seuninya, Aceh Carong, Aceh Teuga, Aceh Meugoe dan Meulaot, dan Aceh Kaya

4. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Pembangunan pada tahun 2021 diselenggarakan dengan tema yaitu ***“Mengembangkan industri pengolahan yang didukung oleh peningkatan daya saing SDM dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”***. Unggulan Aceh Hebat yang terkait dengan tema pembangunan Tahun 2021 adalah Aceh Meuadab, Aceh Pemulia, Aceh Seujahtra, Aceh Kreatif, Aceh Carong, Aceh Teuga, Aceh Meugoe dan Meulaot, Aceh Kaya.

5. Tema Pembangunan Tahun 2022

Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema yaitu ***“Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif”***. Unggulan Aceh Hebat yang terkait dengan tema pembangunan Tahun 2022 adalah Aceh Meuadab, Aceh Pemulia, Aceh Seujahtra, Aceh Dame, Aceh Kreatif, Aceh Carong, Aceh Teuga, Aceh Meugoe dan Meulaot, dan Aceh Kaya.

Selanjutnya dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Aceh maka strategi dan arah kebijakan Tahun 2017-2022 dapat di lihat secara rinci pada Tabel 6.1. Kemudian pencapaian visi dan misi pembangunan Aceh yang didukung oleh 15 unggulan Aceh Hebat diuraikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, 2017-2022

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
Misi 1 : Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani							
	1.1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1.1.1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.1.1.1.	Penguatan akuntabilitas kinerja	Menguatkan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi
			1.1.2.	Birokrasi yang efektif dan efisien	1.1.2.1.	Peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	Mengembangkan inovasi birokrasi daerah
			1.1.3.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	1.1.3.1.	Peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik	Mengembangkan profesionalisme ASN
Misi 2: Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain							
	2.1.	Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	2.1.1.	Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas	2.1.1.1.	Penguatan pengamalan Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam kehidupan bermasyarakat	1. Meningkatkan kapasitas pelayanan pendidikan Islami 2. Mengarusutamakan Syariat Islam dalam pembangunan
					2.1.1.2.	Penyelenggaraan pendidikan Hafiz Al-Qur'an	Meningkatkan peran kelembagaan dalam pelaksanaan Syariat Islam
			2.1.2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	2.1.2.1.	Standarisasi kualitas pendidikan dayah	Mengimplementasikan standar kualitas pendidikan dayah
			2.1.3.	Menguatnya tatanan Ekonomi Syari'ah	2.1.3.1.	Penguatan kelompok pelaku usaha dan lembaga syariah	1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga/usaha ekonomi berbasis syariah 2. Mempermudah akses permodalan dan pembiayaan untuk pengembangan usaha syariah

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2.1.3.1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat ZISWAF	1. Meningkatkan transparansi pemanfaatan ZISWAF 2. Meningkatkan kualitas tatakelola lembaga pengelola ZISWAF
		2.1.4. Menguatnya penegakan Syariah dalam bermasyarakat	2.1.4.1. Pelaksanaan Syariah Islam secara kaffah	Meningkatkan kualitas tatakelola lembaga penegakan syariah
		2.1.5. Meningkatnya pengamalan Syariah Islam di daerah perbatasan	2.1.5.1. Peningkatan intensitas Syiar Islam di daerah perbatasan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas Da'i perbatasan
		2.1.6. Meningkatnya prasarana dan sarana keagamaan dan budaya berbasis islami	2.1.6.1. Pembangunan infrastruktur pendukung budaya dan pariwisata yang islami	1. Meningkatkan fasilitas infrastruktur pendukung budaya dan pariwisata yang islami 2. Meningkatkan sinergitas pembangunan lintas sektor dalam pembangunan pariwisata dan budaya Islami
		2.1.7. Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	2.1.7.1. Pelaksanaan kegiatan seni budaya dan adat istiadat	1. Memajukan dan melestarikan seni dan budaya Aceh yang Islami 2. Melaksanakan event -event pergelaran seni budaya dan adat istiadat Aceh yang Islami
Misi 3 : Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki				
3.1.	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki	3.1.1. Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA	Penuntasan penyelesaian turunan UU-PA	Meningkatkan koordinasi untuk mengawal komitmen pemerintah dalam penyelesaian turunan UU-PA
		3.1.2. Tuntasnya turunan UU-PA yang tidak bisa diimplementasikan		Mengoptimalkan komitmen eksekutif dan legislatif tentang pelaksanaan qanun turunan UU-PA
		3.1.3. Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik	3.1.3.1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik	Mengoptimalkan komitmen eksekutif dan legislatif tentang pelaksanaan qanun turunan UU-PA

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3.2. Meningkatkan pembangunan demokrasi	3.2.1. Meningkatnya kebebasan sipil masyarakat	Penjaminan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif
		3.2.2. Meningkatnya hak-hak politik		Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
		3.2.3. Meningkatnya peran lembaga demokrasi		Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
Misi 4 : Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional				
	4.1. Meningkatkan kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing	4.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	4.1.1.1. Peningkatan akses pendidikan menengah dan vokasional	Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah menengah
		4.1.2. Maningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	4.1.2.1. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan 12 tahun yang adil.	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik
		4.1.3. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	4.1.3.1. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan pelatihan bagi tenaga pendidik.
			4.1.3.2. Pendistribusian guru ke wilayah perbatasan, terluar, terpencil, dan terisolir	Mendistribusikan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan
		4.1.4. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasional	4.1.4.1. Peningkatan akses pendidikan dan kualitas tenaga pendidik serta kependidikan vokasional	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik
	4.2. Meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional	4.2.1. Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing	4.1.2.1. Peningkatan karakter pemuda Aceh	Meningkatkan karakter dan daya saing pemuda
		4.2.2. Meningkatnya prestasi olahraga	4.2.2.1. Pembinaan keolahragaan	Meningkatkan pembinaan atlet potensial

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 5 : Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi				
	5.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	5.1.1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	5.1.1.1. Optimalisasi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)	1. Melakukan review terhadap pedoman pelaksanaan JKA
			5.1.1.2. Pemantapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	1. Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2. Mendorong penerbitan qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
			5.1.1.3. Pencegahan dan pengendalian penyakit	1. Meningkatkan upaya preventif-promotif 2. Peningkatan surveilans epidemiologi 3. Pelayanan kesehatan jiwa 4. Penyehatan lingkungan
			5.1.1.4. Peningkatan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat	1. Meningkatkan SDM tenaga kesehatan 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan keluarga dan gizi
		5.1.2. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	5.1.2.1. Penguatan fasilitas kesehatan	1. Pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan 2. Meningkatkan tata kelola dan kepemimpinan
			5.1.2.2. Peningkatan sumberdaya kesehatan	1. Meningkatkan kompetensi klinis dan manajerial 2. Pemberian insentif yang wajar
			5.1.2.3. Pemanfaatan teknologi informasi	Optimalisasi penggunaan TI untuk memperluas dan memudahkan akses (layanan berbasis TI)
			5.1.2.4. Penguatan system rujukan	1. Regionalisasi system rujukan 2. Pengembangan rujukan berbasis TI 3. Penyelesaian RS Regional

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
5.2.	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	5.2.1.	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan dalam pembangunan	
		5.2.2.		Pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan pembangunan	
5.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	5.3.1.	Peningkatan kesejahteraan PMKS dan disabilitas	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pekerja sosial	
		5.3.2.		2. Meningkatkan keterampilan PMKS	
		5.3.3.		3. Pemenuhan sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial	
				Pemenuhan kebutuhan kaum difabel	
				Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS	
Misi 6 : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan					
6.1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	6.1.1.	6.1.1.1.	Penataan dan pengembangan kawasan	Mengembangkan kawasan/sentra komoditas unggulan
			6.1.1.2.	Peningkatan pembangunan infrastruktur terintegrasi dalam kawasan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi
			6.1.1.3.	Peningkatan teknologi budidaya dan alat pertanian	Meningkatkan penerapan cara budidaya yang baik dan benar di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan
			6.1.1.4.	Peningkatan nilai tambah dan akses pasar	Meningkatkan penerapan sertifikasi dan standarisasi produk
			6.1.1.5.	Peningkatan akses permodalan	Mendorong terbukanya akses permodalan terhadap sektor pertanian

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			6.1.1.6. Penguatan kelembagaan	Meningkatkan pendampingan dan penyuluhan terhadap petani dan nelayan
6.2.	Menurunnya Angka Kemiskinan	6.2.1. Meningkatkan Ketahanan Pangan	6.2.1.1. Peningkatan akses kepemilikan lahan bagi petani dan nelayan miskin	Melakukan reforma agraria
			6.2.1.2. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan	Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan
			6.2.1.3. Peningkatan diversifikasi pangan	Memasyarakatkan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
			6.2.1.4. Optimalisasi peranan dewan pangan daerah dan penguatan regulasi pengendalian stok dan harga pangan	Mengembangkan sistem pengendalian harga pangan strategis
			6.2.1.5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.	Peningkatan infrastruktur sumber daya air.
		6.2.2. Meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan	6.2.2.1. Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar petani	Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk hasil pertanian
			6.2.2.2. Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar nelayan	Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
Misi 7 : Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan				
7.1.	Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	7.1.1. Terwujudnya kemandirian energi	7.1.1.1. Meningkatkan jumlah pembangkit listrik terbaru terbaharukan dengan tetap mempertimbangkan kawasan yang bernilai keanekaragaman tinggi dan kawasan lindung setempat serta jasa lingkungan	Pengembangan sumber-sumber energi baru yang ramah lingkungan.

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			7.1.1.2. Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Energi dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Pengembangan sumber-sumber energi baru
7.2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	7.2.1. Meningkatnya kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian	7.2.1.1. Meningkatkan produktivitas pengelolaan wilayah pertambangan.	Peningkatan upaya pengelolaan pertambangan
Misi 8 : Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif				
8.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	8.1.1. Meningkatnya pembangunan industri	8.1.1.1. Peningkatan pembangunan industri pengolahan non migas dan ekonomi kreatif	Menumbuhkan, mengembangkan dan memandirikan industri kecil dan menengah di sektor industri pengolahan non migas dan ekonomi kreatif
		8.1.2. Meningkatnya neraca perdagangan	8.1.2.1. Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk	1. Mendorong penerapan standarisasi dan sertifikasi produk 2. Meningkatkan efisiensi rantai pasok produk
		8.1.3. Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	8.1.3.1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif	1. Menyediakan infrastruktur investasi yang memadai 2. Membangun citra positif iklim investasi di Aceh
			8.1.3.2. Peningkatan peran BUMA dalam investasi di sektor produktif	1. Mendirikan BUMA sektor produktif 2. Merevitalisasi BUMA eksisting 3. Meningkatkan kerjasama strategis BUMA dengan investor lainnya.
		8.1.4. Meningkatnya kontribusi pariwisata	8.1.4.1. Penguatan destinasi pariwisata halal	1. Meningkatkan kualitas akses, amenitas dan atraksi dalam destinasi pariwisata halal 2. Peningkatan pemasaran pariwisata melalui penguatan branding <i>the Light of Aceh</i> , promosi dan penjualan pariwisata berbasis digital 3. Penguatan industri dan kelembagaan pariwisata berbasis potensi lokal

MISI		TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
	8.2.	Menurunnya Angka Pengangguran	8.2.1.	Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya	8.2.1.1.	Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan vokasi 2. Mendorong kemitraan antara lembaga penyediaan tenaga kerja dengan dunia usaha dan industri menyongsong revolusi industri 4.0
Misi 9 : Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan							
	9.1.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	9.1.1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik	9.1.1.1.	Pengembangan Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi (SIAT)	Membangun sistem informasi pembangunan sektoral yang terintegrasi
			9.1.2.	Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik.	9.1.2.1.	Peningkatan ketersediaan dan pengintegrasian data secara terpadu	Meningkatkan kapasitas SDM dan kerjasama antar lembaga dalam penyediaan dan pengintegrasian satu data satu peta
	9.2.	Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning.	9.2.1.	Terjaganya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah	9.2.1.1.	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis bukti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem Perencanaan pembangunan berbasis bukti 2. Memperkuat koordinasi pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi.
Misi 10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan							
	10.1.	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	10.1.1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	10.1.1.1.	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatkan dan Pembangunan infrastruktur jalan 2. Pemeliharaan dan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan 3. Peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan
					10.1.2.1.	Peningkatan dan pengembangan konektivitas perhubungan laut, darat dan udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana transportasi 2. Bebas kabel penyeberangan




MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		10.1.2. Berkembangnya wilayah pertumbuhan baru	10.1.2.1. Pengembangan wilayah cepat tumbuh berbasis komoditas unggulan lokal	Mengembangkan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan komoditi unggulan strategis
10.2.	Menurunnya angka kemiskinan	10.2.1. Berkembangnya wilayah pemukiman baru	10.1.2.1. Pengembangan wilayah pemukiman cepat tumbuh berbasis komoditas unggulan	1. Mengembangkan sarana dan prasarana 2. Melakukan penempatan transmigran secara selektif dan tepat sasaran. 3. Penyediaan lahan transmigrasi yang <i>clear and clean</i> yang terintegrasi dengan pengembangan komoditas unggulan
10.3.	Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar	10.3.1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	10.3.1.1. Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	1. Penyediaan perumahan layak 2. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh
		10.3.2. Meningkatkan pelayanan pertanahan	10.3.2.1. Penyelesaian konflik sengketa tanah.	Mengoptimalkan penyelesaian konflik tenurial
			10.3.2.2. Penyediaan Sertifikat tanah bagi lahan publik dan masyarakat miskin.	Meningkatkan legalitas kepemilikan tanah publik dan masyarakat miskin
			10.3.2.3. Peningkatan peran kelembagaan pertanahan Aceh secara mandiri.	Meningkatkan legalitas kepemilikan tanah publik dan masyarakat miskin
10.4.	Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	10.4.1. Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup lestari	10.4.1.1. Peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan dan kawasan lindung	1. Peningkatan kepatuhan dalam implementasi RTRW 2. Peningkatan kualitas air dan udara
			10.4.1.2. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim	Penerapan rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca
			10.4.1.3. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan.	Penanganan sampah menuju sanitary landfill






MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			10.4.1.4.	Menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDG) sebagai azas pembangunan di Aceh	Pemantauan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	
			10.4.1.5.	Penerapan Implementasi skema jasa lingkungan	Pemberian insentif sesuai dengan kemampuan daerah	
			10.4.1.6.	Melakukan pengarus-utamaan konsep pembangunan berkelanjutan;	Peningkatan informasi pembangunan berkelanjutan	
			10.4.1.7.	Mewujudkan ibukota Provinsi Aceh yang madani sebagai kota dengan konsep Smart Green City	Pengembangan Banda Aceh sebagai ibukota provinsi yang ramah lingkungan, hemat energi, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan	
			10.4.1.8.	Penegakan hukum untuk perlindungan dan pengendalian konversi lahan	Pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW	
		10.4.2.	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	10.4.2.1.	Peningkatan kualitas kawasan konservasi laut dan pesisir	Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi habitat mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.
10.5.	Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan	10.5.1.	Luas kawasan hutan yang lestari dan berkelanjutan	10.5.1.1.	Peningkatan kualitas kawasan hutan dan lahan kritis	Pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan
				10.5.1.2.	Peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati	Peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati
				10.5.1.3.	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan KPH	Pengelolaan hutan yang profesional dapat memberikan manfaat secara ekologi dan ekonomi





MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			10.5.1.4. Memulihkan species kunci dan penanganan konflik satwa liar-manusia	Penanganan perlindungan satwa secara terpadu.
			10.5.1.5. Mengendalikan alih fungsi lahan dan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW 2. Pengendalian luas tutupan hutan dan lahan dari deforestasi dan forest degradasi
10.6.	Meningkatkan tatakelola kebencanaan	10.6.1. Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan	10.6.1.1. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana alam	Penerapan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat.





Selanjutnya berdasarkan misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan yang diuraikan sebelumnya, untuk pencapaian visi dan misi pembangunan selama periode tahun 2017-2022, juga didukung oleh 15 unggulan Aceh Hebat sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2
Lima Belas Unggulan Aceh Hebat berdasarkan Misi Pembangunan

M I S I		15 UNGGULAN ACEH HEBAT
1	Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.	<p>Acèh Peumulia </p> <p>Diharapkan dapat terwujud: Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) dengan menjalankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja; ▪ Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan ▪ Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dankepatutan
2	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.	<p>Acèh Meudadab </p> <p>Diharapkan mampu mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai ke-Islam-an dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap tingkatanpendidikan; ▪ Melakukan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepadapeningkatan kepekaan sosial; ▪ Penguatan eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalam menyebarluaskannilai-nilai ke-Islam-an; ▪ Mendorong sifat ketauladanan yang positif dari pimpinan masyarakat di setiaptingkatan.
3	Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.	<p>Acèh Damê </p> <p>Diharapkan mampu terwujud penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip- prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai; ▪ Penuntasan aturan turunan UUPA sehingga dapat diimplementasikan dalampembangunan dan kehidupan masyarakat; ▪ Memasukkan pendidikan damai (<i>peace education</i>) dalam kurikulum sekolah

M I S I		15 UNGGULAN ACEH HEBAT
4	Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.	<p>Aceh Carong</p>  <p>Diharapkan dapat terwujud Anak Aceh cerdas (carong) dengan pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional baik formal dan non formal; ▪ Penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian keterampilan bagi peserta didik di dayah-dayah; ▪ Pemerataan rasio guru untuk seluruh bidang studi di seluruh penjuru Aceh khususnya daerah terpencil; ▪ Peningkatan kompetensi guru dalam bidang studi yang diajarkan secara merata di seluruh Aceh; ▪ Penyediaan beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri; ▪ Pengiriman putra-putri terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas-universitas yang bergengsi di tingkat internasional dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ke depan saat kembali ke Aceh. <p>Aceh Teuga</p>  <p>Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun kerjasama bidang sepak bola dengan klub-klub/pelatih ternama luar negeri untuk membina bibit-bibit pesepak bola dari Aceh; ▪ Peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan olahraga bagi usia dini; ▪ Penyediaan sarana dan prasarana olah raga serta insentif yang mendukung peningkatan prestasi olahragawan; ▪ Meningkatkan frekuensi event kompetisi olahraga untuk menjangkau bibit-bibit unggul.
5	Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi.	<p>Aceh Seujahtra (JKA Plus)</p>  <p>Diharapkan dapat terwujud JKA Plus yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat; ▪ Pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut; ▪ Pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan hutang luar negeri (Loan); ▪ Mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh <p>Aceh Seuninya</p>  <p>Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin secara bertahap dan penyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yang kurang mampu.</p>
6	Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.	<p>Aceh Meugoë dan Meulaôt</p>  <p>Melaksanakan pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengalir seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru;

M I S I		15 UNGGULAN ACEH HEBAT
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan paska panen; ▪ Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya; ▪ Kemandirian rantai pasok (<i>supply chain</i>) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat; ▪ Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan <p>Acèh Troë</p> <p>Pemenuhan bahan pangan dan gizibagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produktifitas pertanian dan kemudahan akses terhadap bahan pangan; ▪ Penertiban distribusi bibit, pupuk dan obat di bagi pertanian rakyat; ▪ Membangun kemandirian pangan melalui penurunan ketergantungan terhadap provinsi tetangga; ▪ Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian. 
7	Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.	<p>Acèh Energi</p> <p>Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan. Agenda-agenda strategis yang akan dilakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiapan <i>Master Plan Energi</i> Aceh yang komprehensif dan terintegrasi; ▪ Penerapan <i>Public Private Partnership</i>. ▪ Memastikan komitmen PLN untuk memperbaiki sistem transmisi di Aceh; ▪ Percepatan realisasi pembangkit listrik Geothermal Seulawah dan pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas menengah; ▪ Pemberian kemudahan perizinan bagi pihak swasta yang berminat berinvestasi dalam sektor energi bersih dan terbarukan. ▪ Memperkuat eksistensi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai perwujudan amanat yang telah ditetapkan dalam UUPA. 
8	Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.	<p>Acèh Kreatif</p> <p>Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya, dilakukan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal; ▪ Perlindungan produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh; ▪ Merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial terutama di sektor jasa; <p>AcèhKaya</p> <p>Merangsang tumbuhnya <i>entrepreneur</i> yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar, yang dilaksanakan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan peran serta lembaga keuangan dan pembiayaan lokal untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagi wirausahawan muda;  

M I S I		15 UNGGULAN ACEH HEBAT
		<ul style="list-style-type: none"> Memastikan partisipasi sektor swasta dan BUMN untuk menggunakan dana CSR secara terkoordinir dan satu pintu untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi <i>entrepreneur</i>; Pelibatan perguruan tinggi dalam pembinaan manajemen bagi wirausaha muda
9	Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan	<p>Acèh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)</p>  <p>SIAT merupakan pengembangan sistem informasi dan <i>database</i> Aceh yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya SIAT seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat, dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan. Sistem ini perlu dibangun untuk menghindari perencanaan pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran akibat dari ketiadaan data yang valid dan terintegrasi.</p>
10	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan	<p>Acèh Green</p>  <p>Penegasan terhadap pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam dengan konsep pembangunan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (<i>Green growth plan</i>) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh; Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah; Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (<i>wood polymer composite</i>) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan <p>Acèh Seuninya</p>  <p>Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin secara bertahap dan penyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yang kurang mampu.</p> <p>Acèh Seumeugot</p>  <p>Diharapkan dapat tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan serta terintegrasi untuk menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi;</p>

Dari hasil telaahan Visi Dan Misi, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan 15 Unggulan Aceh Hebat maka Prioritas pembangunan RPJMA tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 6.3 dan Program Pembangunan Berdasarkan Prioritas Pembangunan RPJM Aceh Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 6.4. Sedangkan untuk Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif disajikan pada Tabel 6.4.

Tabel 6.3.
Prioritas Pembangunan RPJM Aceh,2017-2022

No.	Prioritas Pembangunan
1	Mutu Pendidikan dan Dinul Islam
2	Akses dan Kualitas Kesehatan
3	Infrastruktur Terintegrasi
4	Ketahanan dan Kemandirian Pangan
5	Nilai Tambah Sektor Strategis
6	Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja
7	Investasi dan Kemandirian Energi
8	Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan
9	Perdamaian dan Reformasi Birokrasi

Tabel 6.4.
Program Pembangunan Berdasarkan Prioritas Pembangunan RPJM Aceh,2017-2022

No	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan	15 Unggulan Aceh Hebat
I	Mutu Pendidikan dan Dinul Islam	
1	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Aceh Peumulia
2	Program Pegelaran Seni Budaya Daerah	Aceh Meudadab
3	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Aceh Meudadab
4	Program Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Aceh Meudadab
5	Program Pemberdayaan Santri	Aceh Peumulia
6	Program pemberdayaan sumberdaya dan peran ulama	Aceh Meudadab
7	Program Pembinaan Dakwah dan peribadatan sebagai Syiar Islam	Aceh Meudadab
8	Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam	Aceh Meudadab
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Aceh Meudadab
10	Program Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Aceh Meudadab
11	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Aceh Meudadab
12	Program Pembinaan Manajemen Dayah	Aceh Meudadab
13	Program Pembinaan Syariat Islam	Aceh Meudadab
14	Program Pendidikan Dayah	Aceh Peumulia
15	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	Aceh Meudadab
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Aceh Meudadab
17	Program Pengelolaan Kekayaan dan keragaman Budaya	Aceh Meudadab
18	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Aceh Meudadab
19	Program Pengelolaan ZISWAF	Aceh Meudadab
20	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah	Aceh Meudadab
21	Program Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Berkarakter Kearifan Lokal	Aceh Meudadab
22	Program Pengembangan Nilai Budaya	Aceh Meudadab
23	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Aceh Meudadab
24	Program Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Aceh Meudadab
25	Program Penguatan, pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam	Aceh Meudadab
26	Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Aceh Meudadab
27	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Aceh Meudadab
28	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	Aceh Peumulia
29	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	Aceh Meudadab
30	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama	Aceh Meudadab
31	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat	Aceh Meudadab
32	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	Aceh Peumulia
33	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Aceh Meudadab
34	Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Aceh Meudadab
35	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Al Quran	Aceh Meudadab

No	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan	15 Unggulan Aceh Hebat
36	Program Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Aceh Meudab
37	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Aceh Peumulia
38	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Aceh Meudab
39	Program Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Aceh Meudab
40	Program Silaturahmi Umara - Ulama	Aceh Meudab
41	Program kapasitas sumber daya manusia non aparatur	Aceh Caròng
42	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Aceh Caròng
43	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Aceh Teuga
44	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	Aceh Caròng
45	Program Pembinaan Kepemudaan	Aceh Teuga
46	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Aceh Caròng
47	Program Pendidikan Luar Biasa	Aceh Caròng
48	Program Pendidikan Menengah	Aceh Caròng
49	Program Pendidikan Non Formal	Aceh Caròng
50	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Aceh Caròng
51	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Aceh Teuga
52	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Aceh Teuga
53	Program Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Aceh Caròng
54	Program Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan	Aceh Caròng
55	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Aceh Caròng
56	Program Peningkatan Pendidikan Menengah Atas dan Sederajat	Aceh Caròng
57	Program Peningkatan Pendidikan Menengah Kejuruan	Aceh Caròng
58	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Aceh Teuga
59	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Aceh Teuga
60	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan	Aceh Caròng
61	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Aceh Teuga
62	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Aceh Caròng
63	Program Wajib Belajar Pendidikan Dua belas Tahun	Aceh Caròng
II	Akses dan Kualitas Kesehatan	
1	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
2	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
4	Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
5	Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
6	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
7	Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance Terpadu	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
8	Program Pelayanan Medis	Aceh Seujahtra (JKA Plus)

No	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan	15 Unggulan Aceh Hebat
9	Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
10	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
12	Program Pembinaan Anak Terlantar	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
13	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
14	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
15	Program Pembinaan Panti Asuhan/Rumah Sejahtera	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
16	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
17	Program Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Trauma	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
18	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
19	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
21	Program Pengadaan, Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
22	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
23	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
24	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
25	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
26	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
27	Program Peningkatan kesehatan Keluarga	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
28	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
29	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
31	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
32	Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
33	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
34	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
35	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
36	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Aceh Seujahtra (JKA Plus)
III	Infrastruktur Terintegrasi	
1	Program Pemanfaatan Ruang	Aceh Seumeugot
2	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	Aceh Seumeugot
3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Aceh Seumeugot
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Aceh Seumeugot
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Aceh Seumeugot
6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Aceh Seumeugot
7	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Aceh Seumeugot

No	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan	15 Unggulan Aceh Hebat
8	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Aceh Seumeugot
9	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Aceh Seumeugot
10	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Aceh Seumeugot
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Aceh Seumeugot
12	Program Pengembangan Perumahan	Aceh Seuninya
13	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Aceh Seumeugot
14	Program Pengembangan sosial ekonomi wilayah transmigrasi	Aceh Seumeugot
15	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Aceh Seumeugot
16	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Aceh Seumeugot
17	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Aceh Seumeugot
18	Program Penguatan Kelembagaan Pertanahan	Aceh Seumeugot
19	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Aceh Seumeugot
20	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Aceh Seumeugot
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Aceh Seumeugot
22	Program Penyelenggaraan Jalan	Aceh Seumeugot
23	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Aceh Seumeugot
24	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Aceh Seumeugot
IV	Ketahanan dan Kemandirian Pangan	
1	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
2	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Aceh Meugoë dan Meulaôt
3	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil	Aceh Meugoë dan Meulaôt
4	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Aceh Meugoë dan Meulaôt
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Aceh Meugoë dan Meulaôt
9	Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
10	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Aceh Meugoë dan Meulaôt
11	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Aceh Meugoë dan Meulaôt
12	Program peningkatan akses pangan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Aceh Meugoë dan Meulaôt
14	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Aceh Meugoë dan Meulaôt
15	Program peningkatan nilai tambah produksi perikanan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
16	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
19	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Aceh Meugoë dan Meulaôt

No	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan	15 Unggulan Aceh Hebat
20	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
21	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
V	Nilai Tambah Sektor Strategis	
1	Program Pengembangan Industri Strategis	Aceh Peumulia
2	Program pemasaran pariwisata	Aceh Kreatif
3	Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Konduksif	Aceh Kaya
4	Program Pengembangan dan pembinaan koperasi	Aceh Kaya
5	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	Aceh Kaya
6	Program pengembangan dan pembinaan UKM	Aceh Kaya
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Aceh Kreatif
8	Program pengembangan industri kreatif dan aneka	Aceh Kaya
9	Program pengembangan industri pangan	Aceh Kaya
10	Program Pengembangan Kemitraan	Aceh Kreatif
11	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Aceh Kaya
12	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Aceh Kreatif
13	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Aceh Kaya
14	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Aceh Kaya
15	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Aceh Kaya
16	Program peningkatan ekspor dan pengendalian impor	Aceh Kaya
17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Aceh Kaya
18	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Aceh Kaya
19	Program perwilayahan industri	Aceh Kaya
VI	Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Aceh Kreatif
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong	Aceh Kreatif
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong	Aceh Kreatif
4	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Aceh Kreatif
5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Aceh Kreatif
6	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Aceh Kreatif
VII	Investasi dan Kemandirian Energi	
1	Program Pemanfaatan Geologi dan Sumber Daya Mineral	Aceh Energi
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Aceh Energi
3	Program Pengelolaan Energi	Aceh Energi
4	Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	Aceh Energi
5	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Aceh Energi
6	Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Aceh Kaya
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Aceh Kaya
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Aceh Kaya

No	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan	15 Unggulan Aceh Hebat
VIII	Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan	
1	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Aceh Green
2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Aceh Green
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Aceh Green
4	Program Penanggulangan Bencana	Aceh Green
5	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Aceh Green
6	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Aceh Green
7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Aceh Green
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Aceh Green
9	Program Pengendalian Banjir	Aceh Green
10	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Aceh Green
11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Aceh Green
12	Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Aceh Green
13	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Aceh Green
14	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Aceh Green
15	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Aceh Green
16	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Aceh Green
17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Aceh Green
18	Program Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan	Aceh Green
19	Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aceh Green
20	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Aceh Green
21	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Aceh Green
22	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Aceh Green
23	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
IX	Perdamaian dan Reformasi Birokrasi	
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Aceh Peumulia
2	Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aceh Peumulia
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Aceh Peumulia
4	Program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Aceh Peumulia
5	Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	Aceh Peumulia
6	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan pembangunan	Aceh Peumulia
7	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Aceh Peumulia
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Aceh Peumulia
9	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Aceh Peumulia
10	Program Pendidikan Kedinasan	Aceh Peumulia

No	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan	15 Unggulan Aceh Hebat
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aceh Peumulia
12	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Strategis	Aceh Peumulia
13	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Aceh Peumulia
14	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Aceh Peumulia
15	Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya	Aceh Peumulia
16	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong	Aceh Peumulia
17	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi KORPRI	Aceh Peumulia
18	Program Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur	Aceh Peumulia
19	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Aceh Peumulia
20	Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat	Aceh Peumulia
21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Aceh Meudadab
22	Program Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur	Aceh Meudadab
23	Program Peningkatan Mutu SDM, Pengembangan Kerjasama dan Advokasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	Aceh Peumulia
24	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong	Aceh Peumulia
25	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Elektronik	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
26	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Aceh Peumulia
27	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah	Aceh Peumulia
28	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Aceh Peumulia
29	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Aceh Peumulia
30	Program peningkatan pendapatan Aceh	Aceh Peumulia
31	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Aceh Peumulia
32	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Aceh Peumulia
33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Aceh Peumulia
34	Program Peningkatan Sarana Perekonomian, Potensi dan Kerjasama Investasi, Pertambangan Dalam Pengembangan Industri Perdagangan Berbasis Lingkungan Hidup	Aceh Peumulia
35	Program Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi	Aceh Peumulia
36	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Aceh Peumulia
37	Program Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Aceh Peumulia
38	Program Revitalisasi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	Aceh Peumulia
39	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
40	Program Perencanaan Tata Ruang	Aceh Green
41	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Aceh Green
42	Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan kebangsaan	Aceh Damê
43	Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Aceh Damê
44	Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Aceh Damê

No	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan	15 Unggulan Aceh Hebat
45	Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Aceh Damê
46	Program Konsolidasi Perdamaian Aceh	Aceh Damê
47	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik	Aceh Damê
48	Program Pembauran Kebangsaan	Aceh Damê
49	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik	Aceh Damê
50	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Aceh Damê
51	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Aceh Damê
52	Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu	Aceh Damê
53	Program Penanganan Konflik	Aceh Damê
54	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Aceh Damê
55	Program Pencegahan dan Mitigasi Konflik	Aceh Damê
56	Program Pendidikan Damai	Aceh Damê
57	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Aceh Damê
58	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Aceh Damê
59	Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA	Aceh Damê
60	Program peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan	Aceh Meugoë dan Meulaôt
61	Program Diseminasi dan Informasi Teknologi	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
62	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
63	Program Inovasi Daerah	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
64	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
65	Program Kerjasama Pembangunan	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
66	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
67	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
68	Program Pengembangan Data dan Informasi	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
69	Program Pengembangan Data dan Statistik	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
70	Program Pengembangan Data/Informasi	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
71	Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
72	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
73	Program Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kepegawaian	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
74	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)

No	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan	15 Unggulan Aceh Hebat
75	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta instansi terkait	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
76	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
77	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
78	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
79	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)

Tabel 6.5.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif, 2018-2022

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Visi : Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani																			
Misi 1 : Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani						215.984.180.981		210.276.084.012		181.652.839.024		202.772.458.084		227.900.601.283		1.038.586.163.384			
1.1.		Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	60,11	61,20		62,35		63,04		64,12		65,47		65,47			
1.1.1.		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Audit BPK Atas laporan Keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
			Tingkat kemampuan Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2		3		3		3		4		4			
1.1.1.1.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP/WDP	WTP	WTP	50.392.739.109	WTP	19.762.379.100	WTP	20.693.687.787	WTP	20.619.867.999	WTP	23.466.535.053	WTP	134.935.209.048	Aceh Peumulia	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
1.1.1.2.		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Tercapainya kabupaten/kota yang mendapat WTP	Kab/Kota	22	22	4.437.815.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4.437.815.000	Aceh Peumulia	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
1.1.1.3.		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	%	86,22	-	-	60	5.604.875.000	70	5.739.337.012	80	5.346.197.756	100	6.294.191.121	100	22.984.600.889	Aceh Peumulia	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
1.1.1.4.		Program peningkatan pendapatan Aceh	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	%	17	-	-	25	23.411.911.577	26	21.107.350.188	28	23.755.594.576	30	30.567.753.175	30	98.842.609.516	Aceh Peumulia	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
1.1.1.5.		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase rancangan Perda dan Perbup APBD yang difasilitasi	%	87	90	1.531.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.531.700.000	Aceh Peumulia	Biro Administrasi Pembangunan
1.1.1.6.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	%	90	90	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	Aceh Peumulia	Biro Administrasi Pembangunan
			Nilai Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	Skor	2,55/ Tinggi	2,60/ Tinggi		2,65/ Tinggi		2,70/ Tinggi		2,75/ Tinggi		2,80/ Tinggi		2,80/ Tinggi			
1.1.1.7.		Program Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur					1.459.460.790										1.459.460.790	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan
			Skor dan status laporan penyelenggaraan pemerintahan Aceh	Skor/Status	2,55/ Tinggi	2,60/ Tinggi		-	-	-	-	-	-	-	-	2,60/ Tinggi			Biro Tata Pemerintahan
			Persentase kecamatan yang sudah menerapkan PATEN	%	41	42		-	-	-	-	-	-	-	-	42			Biro Tata Pemerintahan

Kode	Visi & Misi	Sasaran/ Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.1.8.		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan		-	-	-	981.990948	-	2.076.700.000	-	1.609.055.521		1.689.508.297		1.773.983.712	-	8.131.238.478	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan
			Skor dan status laporan penyelenggaraan pemerintahan Aceh	Skor/Status	2,55/Tinggi	2,60/Tinggi		2,65/Tinggi		2,71/Tinggi		2,74/Tinggi		2,80/Tinggi		2,80/Tinggi			Biro Tata Pemerintahan
			Persentase kecamatan yang sudah menerapkan PATEN	%	41	42		43		44		44		45		45			Biro Tata Pemerintahan
1.1.1.9.		Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi/kebijakan/naskah di bidang kesejahteraan sosial yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah	%	30	10	1.454.056.000	10	2.503.609.750	10	1.223.775.000	10	1.284.963.750	10	1.349.211.938	50	7.815.616.438	Aceh Peumulia	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			Persentase Penerapan pengelolaan dan pelaksanaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa	%	85	87		89		91		93		95		95			
1.1.1.10.		Program Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Kesesuaian pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa dengan RUP	%	60	80	13.801.393.243	85	15.088.250.000	90	12.558.884.330	95	13.109.289.737	95	15.375.956.042	95	69.933.773.352	Aceh Peumulia	Biro Pengadaan Barang/Jasa
1.1.1.11.		Program Peningkatan Mutu SDM, Pengembangan Kerjasama dan Advokasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kasus hukum pengadaan barang dan jasa yang di selesaikan	%	60	75	1.195.110.000	80	2.325.310.000	85	3.630.000.000	90	3.993.000.000	95	4.392.300.000	95	15.535.720.000	Aceh Peumulia	Biro Pengadaan Barang/Jasa
1.1.1.12.		Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RUP	%	75	80	2.221.060.000	85	2.790.908.790	90	4.950.000.000	95	5.445.000.000	98	5.989.500.000	98	21.396.468.790	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Biro Pengadaan Barang/Jasa
1.1.1.13.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Kesesuaian pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa dengan RUP	%	85	90	1.347.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.347.600.000	Aceh Peumulia	Biro Administrasi Pembangunan
			Nilai LAKIP	Nilai	BB-	BB-		BB+		BB+		AA-		AA+		AA+			
1.1.1.14.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	121.000.000	100	122.210.000	100	123.432.100	100	366.642.100	Aceh Peumulia	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
1.1.1.15.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	126.994.817	100	128.001.328	100	128.001.328	100	382.997.473	Aceh Peumulia	BLUD Rumah Sakit Jiwa

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.1.16.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	148.500.000	100	159.985.000	100	161.584.850	100	470.069.850	Aceh Peumulia	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
1.1.1.17.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	525.697.000	100	996.697.000	100	735.000.000	100	750.000.000	100	780.000.000	100	3.787.394.000	Aceh Peumulia	Dinas Kesehatan Aceh
1.1.1.18.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	115.000.000	100	132.250.000	100	152.087.500	100	399.337.500	Aceh Peumulia	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh
1.1.1.19.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	185.800.000	100	34.000.000	100	36.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	345.800.000	Aceh Peumulia	Dinas Sosial Aceh
1.1.1.20.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	-	100	76.680.340	100	73.520.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	340.200.340	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
1.1.1.21.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	%	100	100	105.000.000	100	135.350.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	555.350.000	Aceh Peumulia	Dinas Pertanahan Aceh
1.1.1.22.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	105.000.000	100	135.350.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	555.350.000	Aceh Peumulia	Dinas Pertanahan Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.1.1.23.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	146.000.000	100	183.315.000	100	185.148.150	100	514.463.150	Aceh Peumulia	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	
1.1.1.24.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	181.500.000	100	183.315.000	100	185.148.150	100	549.963.150	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
1.1.1.25.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Aceh Peumulia	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	
1.1.1.26.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	123.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	123.500.000	Aceh Peumulia	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
1.1.1.27.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	%	100	100	122.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	122.000.000	Aceh Peumulia	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
1.1.1.28.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	206.320.000	100	200.000.000	100	115.500.000	100	127.050.000	100	139.755.000	100	788.625.000	Aceh Peumulia	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
1.1.1.29.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	100	183.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	183.000.000	Aceh Peumulia	Inspektorat Aceh
1.1.1.30.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Dokumen	5	5	7.711.054.700	17	271.000.000	17	650.000.000	17	675.000.000	17	750.000.000	17	10.057.054.700	Aceh Peumulia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	
1.1.1.31.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Dokumen	5	5	1.825.025.000	17	3.245.750.000	17	2.000.000.000	17	2.000.000.000	17	2.000.000.000	17	11.070.775.000	Aceh Peumulia	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.1.32.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-		-		100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Aceh Peumulia	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
1.1.1.33.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-		-		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Aceh Peumulia	Biro Hubungan Masyarakat
1.1.1.34.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-		-		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Aceh Peumulia	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
1.1.1.35.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-		-		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Aceh Peumulia	Biro Organisasi
1.1.1.36.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-		-		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan
1.1.1.37.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-		-		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Aceh Peumulia	Biro Umum
1.1.1.38.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-		-		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Aceh Peumulia	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan

Kode	Visi & Misi	Sasaran/ Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.1.39.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Aceh Peumulia	Setda Aceh
1.1.1.40.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	Aceh Peumulia	Biro Administrasi Pembangunan
1.1.1.41.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Aceh Peumulia	Sekretariat DPRA
1.1.1.42.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	739.185.000	100	622.297.000	100	463.050.000	100	486.202.500	100	510.512.625	100	2.821.247.125	Aceh Peumulia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
1.1.2.		Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	60,07	65,30		69,50		73,30		81,20		85,50		85,50			
1.1.2.1.		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya SDM tenaga Perpustakaan dan Kearsipan	Orang	450	500	1.066.130.000	700	1.776.049.500	900	3.011.475.000	1.100	4.863.330.000	1.300	6.091.039.253	1.300	16.808.023.753	Aceh Meudab	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
1.1.2.2.		Program Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur sesuai Kebutuhan Instansi	%	100	-	-	100	6.200.000.000	100	6.673.500.000	100	7.320.850.000	100	8.032.935.000	60	28.227.285.000	Aceh Meudab	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
1.1.2.3.		Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur					600.000.000		435.000.000		661.500.000		694.575.000		729.303.750		3.120.378.750	Aceh Peumulia	Biro Organisasi
			Persentase Aparatur yang mendapat pembinaan dan pengembangan	%	80	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	Aceh Peumulia	Biro Organisasi
			Persentase Aparatur yang menduduki jabatan berdasarkan kompetensi;	%	80	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	Aceh Peumulia	Biro Organisasi

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.2.4.		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	80	80	375.000.000	80	397.000.000	80	161.516.250	80	169.592.063	80	178.071.666	80	1.281.179.979	Aceh Peumulia	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan
			Persentase Fasilitasi Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, DPRA, DPRK	%	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Peumulia	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan
			Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	-	-	-	80	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Peumulia	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan
1.1.2.5.		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, DPRA, DPRK	%	100	100	639.400.000	100	594.200.000	100	1.019.812.500	100	1.070.803.125	100	1.124.343.281	100	4.448.558.906	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	98	-	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan
1.1.2.6.		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	99	98	8.000.659.605	98	8.750.000.000	98	7.459.139.715	98	12.832.096.700	98	13.223.701.535	98	50.265.597.555	Aceh Peumulia	Biro Umum
			Persentase Fasilitasi Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, DPRA, DPRK	%	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Peumulia	Biro Umum
			Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	-	-	-	80	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Peumulia	Biro Umum
1.1.2.7.		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyerahan Aset dari Daerah Induk kepada Daerah Pemekaran	%	60	66	3.150.594.000	73	3.104.000.000	80	3.390.180.885	83	3.559.689.929	90	3.737.674.426	90	16.942.139.240	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.2.8.		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	48	53	968.070.000	58	1.166.120.488	64	2.161.275.948	70	2.260.489.745	77	2.364.664.232	77	8.920.620.413	Aceh Peumulia	Inspektorat Aceh
1.1.2.9.		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan	Kasus	3	6	500.000.000	-	420.099.208	-	-	-	-	-	-	6	920.099.208	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan
1.1.2.10.		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		-	-	-	11.107.701.080	-	8.675.289.500	-	9.654.794.246	-	8.369.782.562	-	9.397.957.264	-	47.205.524.652		Inspektorat Aceh
			Persentase objek pemeriksaan dan kasus pengaduan yang diperiksa	%	50	55	-	61	-	80	-	73	-	81	-	81	-	Aceh Peumulia	Inspektorat Aceh
			Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;	%	50	55	-	61	-	50	-	73	-	81	-	81	-	Aceh Peumulia	Inspektorat Aceh
1.1.2.11.		Program Revitalisasi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	Persentase pertumbuhan keuntungan daerah (BUMA) melalui kebijakan daerah	%	2	2	1.126.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.126.000.000	Aceh Peumulia	Biro Perekonomian
1.1.2.12.		Program Pengembangan Industri Strategis	Persentase tercapainya Kebijakan yang Sinergi dalam Pengembangan Industri Strategis	%	60	60	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60	250.000.000	Aceh Peumulia	Biro Perekonomian
1.1.2.13.		Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Strategis	Persentase tercapainya Kebijakan Strategis Perekonomian	%	50	-	-	50	2.740.000.000	55	2.650.000.000	60	2.782.500.000	75	2.950.000.000	75	11.122.500.000	Aceh Peumulia	Biro Perekonomian
1.1.2.14.		Program Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya Kebijakan yang Sinergi dalam Pengembangan Potensi Ekonomi	%	60	-	-	60	3.660.000.000	65	2.885.000.000	70	2.925.000.000	80	3.100.000.000	80	12.570.000.000	Aceh Peumulia	Biro Perekonomian
1.1.2.15.		Program Peningkatan Sarana Perekonomian, Potensi dan Kerjasama Investasi, Pertambangan Dalam Pengembangan Industri Perdagangan Berbasis Lingkungan Hidup	Persentase tercapainya Kebijakan yang Sinergi dalam Pengembangan Potensi Ekonomi	%	60	60	4.411.315.713	-	-	-	-	-	-	-	-	60	4.411.315.713	Aceh Peumulia	Biro Perekonomian

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.3.		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Unit kerja berpredikat Wilayah Batas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM)	%	58,24	60,00		62,00		68,00		71,00		75,00		75,00			
1.1.3.1.		Program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang berkompentensi	%	20	20	7.776.226.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.776.226.270	Aceh Peumulia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
1.1.3.2.		Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	Persentase Aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur	%	50	80	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	Aceh Peumulia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
1.1.3.3.		Program Pendidikan Kedinasan	Persentase aparatur yang menduduki jabatan sesuai dengan diklat kedinasan	%	38	40	10.049.448.910	50	12.555.026.270	75	13.397.402.607	80	15.244.890.112	85	18.573.104.175	85	69.819.872.074	Aceh Peumulia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
1.1.3.4.		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi KORPRI	Persentase kesejahteraan anggota KORPRI dan Persentase ASN yang Melek Al-Qur'an	%	43	45	477.521.000	55	3.500.000.000	65	2.694.452.835	75	2.963.898.119	85	3.260.287.931	85	12.896.159.885	Aceh Peumulia	Badan Kepegawaian Aceh
1.1.3.5.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase kesejahteraan aparatur	%	100	100	1.288.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.288.770.000	Aceh Peumulia	Badan Kepegawaian Aceh
1.1.3.6.		Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	Persentase pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai ASN Pemerintah Aceh	%	70	75	28.240.776.730	100	10.910.000.114	100	8.483.750.000	100	10.452.750.000	100	10.182.500.000	100	68.269.776.844	Aceh Peumulia	Badan Kepegawaian Aceh
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	40,82/C	60,00/C		70,00/B		75,00/B		80,00/B		85/A		85,00/A			
1.1.3.7.		Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil	Fasilitasi pemanfaatan data kependudukan kepada SKPA	%	2	10	327.612.470	20	277.600.000	-	-	-	-	-	-	20	605.212.470	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Skor	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	64	-	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase Organisasi Perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur	%	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	87	-	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase Ketersediaan SOP pada SKPA	%	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	60	-	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase pemerintah kab/kota di Aceh yang memperoleh nilai cc (penilaian SAKIP Kab/Kota yang memperoleh nilai cc dibagikan dengan jumlah kab/kota)	%	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	55	-	Aceh Peumulia	Biro Tata Pemerintahan

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.3.8.		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	%	30	35	194.000.000	40	521.616.000	50	596.869.350	65	656.556.285	85	722.211.914	85	2.691.253.549	Aceh Peumulia	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
1.1.3.9.		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penurunan pelanggaran qanun, kebijakan kepala daerah, dan gangguan trantibum	%	57,42	59,92	28.296.967.020	60,42	28.098.316.533	61,92	20.396.265.119	63	20.322.417.260	65	22.752.804.986	65	119.866.770.918	Aceh Peumulia	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
1.1.3.10.		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong	-	-	-	990.020.000	-	4.457.275.000	-	1.146.600.000	-	1.203.930.000	-	1.264.126.500	-	9.061.951.500	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
			Persentase kapasitas aparatur pemerintahan gampong dalam mengelola Pemerintahan Gampong	%	60	62	-	65	-	68	-	71	-	73	-	73	-	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
			Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Gampong	%	10	20	-	25	-	20	-	20	-	20	-	100	-	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1.1.3.11.		Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya	Persentase Imum Mukim yang mampu melaksanakan peran dan kewenangan	%	10	20	1.000.000.000	30	5.000.000.000	50	1.102.500.000	80	1.157.625.000	100	1.215.506.250	100	9.475.631.250	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1.1.3.12.		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					844.190.000		2.390.835.854		1.412.860.000		1.521.860.000		1.485.724.205		7.655.470.059	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
			Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Jumlah	10	14	-	18	-	22	-	23	-	23	-	23	-	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
			Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	Jumlah	1	4	-	7	-	10	-	13	-	16	-	16	-	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
1.1.3.13.		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					5.261.719.633		6.211.189.660		3.716.097.650		3.843.451.650		4.170.848.265		23.203.306.858	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
			Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	%	22	28	-	48	-	74	-	90	-	100	-	100	-	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
			Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah	-	5	-	10	-	15	-	19	-	23	-	23	-	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
			Terbentuk 7 PUSPAGA di Aceh	Jumlah	-	1	-	3	-	5	-	7	-	7	-	7	-	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.3.14.		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong	-	-	-	-	5.418.524.160	-	12.048.222.828	-	2.555.595.000	-	7.683.374.750	-	7.817.543.488	-	35.523.260.226	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
			Jumlah lembaga kemasyarakatan gampong yang berfungsi (LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna/Lembaga Pemuda Gampong)	Jumlah	11.370	11.938	-	12.506	-	13.074	-	13.642	-	14.210	-	14.210	-	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
			Lembaga Adat Gampong Yang Aktif	Jumlah	100	200	-	230	-	460	-	805	-	1150	-	1150	-	Aceh Peumulia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1.1.3.15.		Program Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan pembangunan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan	%	20	-	-	40	4.105.700.000	60	4.310.500.000	80	4.510.500.000	90	4.910.500.000	90	17.837.200.000	Aceh Peumulia	Biro Administrasi Pembangunan
1.1.3.16.		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	87	2.002.027.600	-	-	-	-	-	-	-	-	87	2.002.027.600	Aceh Peumulia	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
1.1.3.17.		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	-	87,5	2.818.474.500	88,5	4.077.597.264	89,5	4.426.744.841	89,5	4.535.652.418	89,5	15.858.469.023	Aceh Peumulia	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
		Misi 2: Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.					469.185.075.931		465.647.050.910		344.146.487.266		401.870.211.519		475.537.057.127		2.156.385.882.753		
2.1.		Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indeks pembangunan Syariat Islam	Indeks	45,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00			
2.1.1.		Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al-Qur'an dan Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum islami	%	85,00	86,00		88,00		90,00		90,00		90,00		90,00			
2.1.1.1.		Program Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Berkarakter Kearifan Lokal	Persentase Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA) yang menerapkan pendidikan berbasis kearifan lokal	%	85	90	12.852.822.594	-	-	-	-	-	-	-	-	90	12.852.822.594	Aceh Meuadab	Dinas Pendidikan Aceh
			Jumlah Ijtihad, Ijma', qiyas dan fatwa yang diterapkan	Fatwa	49,00	61,00	-	67,00		73,00		79,00		85,00		85,00			
2.1.1.2.		Program pemberdayaan sumberdaya dan peran ulama	Persentase rekomendasi/kebijakan/naskah di bidang pembinaan kelembagaan dan pengkajian kerukunan umat beragama yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah	%	50	-	-	10	2.741.000.000	72	1.097.090.400	75	1.100.000.000	80	1.110.000.000	80	6.048.090.400	Aceh Meuadab	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Jumlah Hafiz Alqur'an	Orang	68	189		239		300		375		420		420		-		
2.1.1.3.		Program Pendidikan Dayah	Persentase Santri yang Hafal Al-Qur'an dan Membaca Kitab Kuning	%	55	60	12.563.583.472	65	1.800.000.000	75	6.617.585.296	85	6.965.460.296	95	7.348.122.796	95	35.294.751.860	Aceh Carong	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
			Indeks Melek Alqur'an	Indeks	55,00	63,00		68,00		73,00		75,00		85,00		85,00		-		
2.1.14.		Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Al Quran	Persentase aparatur yang Melek Al-Qur'an	%	40	45	541.345.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.345.000	Aceh Meudad	Badan Kepegawaian Aceh	
2.1.1.5.		Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam	Persentase Gampong yang melaksanakan Pengajian ba'da Magrib	%	75	77,2	16.874.381.500	78	100.000.000	-	-	-	-	-	-	77,2	16.974.381.500	Aceh Meudad	Dinas Syariat Islam Aceh	
2.1.1.6.		Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Angka melek Al-Quran penduduk Aceh yang beragama islam	%	55	63	5.505.439.000	65	9.800.000.000	73	12.193.423.800	75	10.641.230.980	85	16.019.629.078	85	54.159.722.858	Aceh Meudad	Dinas Syariat Islam Aceh	
2.1.2.		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah	%	55,5	73,4		74,19		74,98		75,76		76,55		76,55		-		
2.1.2.1.		Program Pembinaan Manajemen Dayah	Meningkatnya persentase dayah yang menerapkan standar manajemen dayah	%	35	40	6.100.000.000	50	2.700.000.000	60	8.391.425.000	70	8.880.567.500	80	9.418.624.250	80	35.490.616.750	Aceh Meudad	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
2.1.2.2.		Program Pembinaan Manajemen Dayah	Meningkatnya persentase dayah yang menerapkan standar manajemen dayah	%	30	40	1.621.560.000	-	-	60	784.000.000	70	823.200.000	80	864.360.000	80	4.093.120.000	Aceh Meudad	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
2.1.2.3.		Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	Persentase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	70	70	1.950.000.000	73	2.000.000.000	75	7.359.500.000	85	7.595.450.000	95	7.854.995.000	95	26.759.945.000	Aceh Peumulia	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
2.1.2.4.		Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	Persentase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	65	70	113.100.000	73	500.000.000	75	423.500.000	78	444.675.000	80	466.908.750	80	1.948.183.750	Aceh Meudad	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
2.1.2.5.		Program Pemberdayaan Santri	Persentase santri yang memiliki Kecakapan Hidup (Life skill)	%	20	20	16.395.793.116	30	3.155.355.823	50	12.664.109.244	75	18.267.121.763	95	21.524.068.605	95	72.006.448.551	Aceh Carong	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
2.1.2.6.		Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	Peningkatan dan Pengembangan mutu, kualitas, Sarana dan Prasarana Dayah MUQ Pagar Air dan Dayah Perbatasan	Unit	5	5	34.346.027.000	5	16.976.082.000	5	35.883.872.347	5	38.920.352.520	5	48.990.193.981	5	175.116.527.848	Aceh Peumulia	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
2.1.2.7.		Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	Persentase tenaga pendidik dayah yang memenuhi standar pendidikan dayah	%	50	55	36.077.916.000	70	33.206.016.740	80	40.899.445.290	90	36.361.985.484	100	42.960.396.870	100	189.505.760.384	Aceh Carong	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.1.3.		Menguatnya tatanan Ekonomi Syariah	Rasio aset dan transaksi keuangan syariah terhadap total transaksi keuangan	Rasio	52,27	55,41		58,74		62,26			66,00		69,96		69,96	-	
			Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan.	Rasio	0,73	1,96		1,00		1,00			1,00		1,00		1,00	-	
2.1.3.1.		Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga sosial keagamaan	%	75	75	633.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75	633.680.000	Aceh Meudab	Sekretariat Baitul Mal Aceh
2.1.3.2.		Program Pengelolaan ZISWAF	Persentase Peningkatan Pemahaman ZISWAF	%	5	-	-	10	739.234.290	11	10.064.165.372	12	5.505.237.276	13	6.321.648.986	13	22.630.285.924	Aceh Meudab	Sekretariat Baitul Mal Aceh
2.1.3.3.		Program Pembinaan Syariat Islam	Persentase Pembayar ZIS	%	60	60	53.297.982.343	-	-	-	-	-	-	-	-	60	53.297.982.343	Aceh Meudab	Sekretariat Baitul Mal Aceh
2.1.3.4.		Program Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Persentase Penurunan Angka Kemiskinan Aceh (Dihitung dari 10% Target Penurunan Angka Kemiskinan Aceh)	%	-	-	-	10	50.958.000.000	11	62.331.596.239	12	73.605.246.302	13	82.323.065.143	13	269.217.907.684	Aceh Meudab	Sekretariat Baitul Mal Aceh
2.1.3.5.		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Persentase Peningkatan Pendapatan ZISWAF	%	-	-	-	35	2.303.160.000	45	2.986.500.000	55	3.285.150.000	65	3.613.665.000	65	12.188.475.000	Aceh Meudab	Sekretariat Baitul Mal Aceh
			Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	Sertifikat	250	450		750		1.050		1.350		1.650		1.650	-		
2.1.3.6.		Program Silaturahmi Umara - Ulama	Meningkatnya Ukhwah Islamiyah, Wathaniah, Insaniah dalam Beramal Ma'ruf Nahi Mungkar	%	45	50	330.190.000	80	587.781.000	85	1.270.280.000	90	2.192.261.000	95	2.297.500.000	95	6.678.012.000	Aceh Meudab	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
2.1.3.7.		Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Persentase peran ulama dalam pembangunan aceh	%	75	80	14.332.299.655	85	8.441.355.133	90	10.912.479.450	95	13.085.239.875	99	15.448.531.029	99	62.219.905.142	Aceh Meudab	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
2.1.3.8.		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	%	75	-	-	85	2.440.939.000	90	3.000.000.000	95	10.481.573.700	99	9.200.000.000	99	25.122.512.700	Aceh Meudab	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
2.1.3.9.		Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama	Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	%	250	450	7.529.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	450	7.529.460.000	Aceh Meudab	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
2.1.4.		Menguatnya penegakan Syariah dalam bermasyarakat	Persentase mesjid yang melaksanakan shalat lima waktu	%	40,00	45,00		52,00		57,00			63,00		75,00		75,00	-	
2.1.4.1.		Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Jumlah kasus konflik SARA yang terjadi	Kasus	1	1	88.000.000	1	300.000.000	1	165.000.000	1	368.500.000	1	405.350.000	1	1.326.850.000	Aceh Meudab	Dinas Syari'at Islam Aceh
2.1.4.2.		Program Pembinaan Syariat Islam	Jumlah tenaga keagamaan dan aparatur hukum yang memahami pelaksanaan syari'at islam di Aceh	Jumlah	2.915	1.361	4.149.623.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.149.623.623	Aceh Meudab	Dinas Syari'at Islam Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.1.4.3.		Program Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Jumlah Tenaga keagamaan dan aparaturnya yang memahami pelaksanaan syariat Islam	Orang	2615	-	2915	2.550.000.000	3315	4.007.009.848	3765	5.058.182.312	4215	6.140.568.973	17.755.761.133		Dinas Syariat Islam Aceh		
			Jumlah tenaga keagamaan dan aparaturnya yang memahami pelaksanaan syariat Islam di Aceh	Jumlah	2.615	-	2.915	-	-	-	-	-	-	-	2.915	-	Aceh Meudab	Dinas Syariat Islam Aceh	
			Tersedianya Jumlah Kajian/Riset/Referensi Syariat Islam	Jumlah	5	-	10	-	20	-	40	-	60	-	60	-	Aceh Meudab	Dinas Syariat Islam Aceh	
2.1.4.4.		Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Peningkatan pemahaman wawasan Islam	Orang	1.500	1.649	7.199.949.200	2.649	2.300.000.000	3.649	1.574.509.000	4.649	2.326.959.900	5.649	2.072.400.000	5.649	15.473.818.100	Aceh Meudab	Dinas Syariat Islam Aceh
2.1.4.5.		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang diselesaikan	%	70	75	1.087.420.000	-	-	-	-	-	-	-	75	1.087.420.000	Aceh Meudab	Dinas Syariat Islam Aceh	
2.1.4.6.		Program Penguatan, pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang diselesaikan	%	70	0	-	75	4.700.000.000	80	6.654.590.000	85	8.120.049.000	90	9.549.792.676	29.024.431.676	Aceh Meudab	Dinas Syariat Islam Aceh	
			Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang diselesaikan	%	70	-	-	75	-	85	-	90	-	95	-	95	-	Aceh Meudab	Dinas Syariat Islam Aceh
			Jumlah Regulasi Syariat Islam yang disusun	Jumlah	1	1	-	3	-	6	-	9	-	12	-	12	-	Aceh Meudab	Dinas Syariat Islam Aceh
2.1.4.6.		Program Pembinaan Dakwah dan peribadatan sebagai Syiar Islam	Persentase pembinaan syariat Islam bagi dai, takmir mesjid, khatib dan aparaturnya	%	78	0	-	85	19.634.792.032	90	16.490.851.800	95	23.208.837.615	98	25.529.721.377	84.864.202.824	Aceh Meudab	Dinas Syariat Islam Aceh	
			Persentase Gampong yang melaksanakan Pengajian ba'da Magrib	%	65	75	-	85	-	-	-	-	-	-	85	-	Aceh Meudab	Dinas Syariat Islam Aceh	
			Tersedianya Jumlah Kajian/Riset/Referensi Syariat Islam	Jumlah	10	10	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	Aceh Meudab	Dinas Syariat Islam Aceh	
2.1.5.		Meningkatnya prasarana dan sarana keagamaan dan budaya berbasis Islam	Persentase mesjid yang memenuhi standar	%	55,00	60,00	-	67,00	-	73,00	-	82,00	-	85,00	85,00	-			
2.1.5.1.		Program Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Mesjid Raya Baiturrahman Aceh	Meningkatnya aktivitas penyelenggaraan peribadatan dan pengembangan kelembagaan MRB	%	50	60	-	65	3.450.000.000	70	13.710.000.000	75	11.650.000.000	80	12.405.100.000	80	41.215.100.000	Aceh Meudab	Dinas Syariat Islam Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.1.5.2.		Program Pelayanan BLUD dalam Pelayanan Ibadah kepada Masyarakat	Meningkatnya aktivitas penyelenggaraan peribadatan dan kelembagaan BLUD MRB	%	50	60	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60	2.000.000.000	Aceh Meudab	Dinas Syari'at Islam Aceh
2.1.5.3.		Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama					6.907.710.770		9.507.372.000		6.394.500.000		6.714.225.000		7.049.936.250		36.573.744.020	Aceh Meudab	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			Tingkat kepuasan jamaah haji terhadap pelayanan Tim TPHD	%	70	80	-	10	-	90	-	95	-	98	-	98	-	Aceh Meudab	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			Persentase rekomendasi/kebijakan/naskah di bidang pembinaan kelembagaan dan pengkajian kerukunan umat beragama yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah	%	50	65	-	20	-	72	-	75	-	80	-	80	-	Aceh Meudab	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			Persentase imam yang sesuai standar	%	60	67	-	20	-	77	-	80	-	85	-	85	-	Aceh Meudab	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan hari besar islam	%	55	65	-	20	-	72	-	75	-	79	-	79	-	Aceh Meudab	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
			Persentase kemandirian dayah																
2.1.5.4.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Persentase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah	%	20	20	158.945.788.091	50	173.794.737.588	60	44.351.573.193	70	58.886.623.302	85	76.015.487.191	85	511.994.209.365	Aceh Peumulia	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
2.1.6.		Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami	Jumlah Festival seni Budaya dan Adat Istiadat	Festival	25	45		50		55		60		65		65		Aceh Meudab	
2.1.6.1.		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	60	60	2.891.220.600	70	2.676.550.000	80	1.161.600.000	90	1.277.760.000	100	1.405.536.000	100	9.412.666.600	Aceh Meudab	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
2.1.6.2.		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Penerapan Kembali Hukum Adat dan Budaya KeAcehan dalam kehidupan bermasyarakat	%	55	60	1.941.165.666	-	-	-	-	-	-	-	60	1.941.165.666	Aceh Meudab	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
2.1.6.3.		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	7 Kab/ Kota	4	4	150.000.000	4	225.000.000	5	325.000.000	5	357.500.000	5	393.250.000	23	1.450.750.000	Aceh Meudab	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
2.1.6.4.		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah situs dan cagar budaya yang dilestarikan	Situs / Cagar Budaya	8	2	760.226.000	2	1.077.100.000	2	1.100.000.000	2	1.354.100.000	2	1.610.510.000	10	5.901.936.000	Aceh Meudab	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.1.6.5.		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan Aceh	%	75	80	1.811.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.811.150.000	Aceh Meudad	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.1.6.6.		Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah Sosialisasi Hukum Adat Berdasarkan Reusam yang dihasilkan	Kab/Kota	7	4	231.000.000	5	249.000.000	14	276.000.000	18	350.000.000	23	400.000.000	23	1.506.000.000	Aceh Meudad	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
			Jumlah Keputusan, Seruan, Himbauan, Naskah hasil Kajian Adat dan Istiadat yang diadopsi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Dokumen	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-	Aceh Meudad	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
2.1.6.7.		Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah kader seni tutur tradisional yang aktif dan kolektor pelestari khsanah adat	Kader	45	32	871.752.355	40	1.220.376.823	48	502.150.000	56	552.365.000	64	607.601.500	64	3.754.245.678	Aceh Meudad	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.1.6.8.		Program Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Jumlah Rekomendasi/Saran/Pendapat Wali Nanggroe kepada Pemerintahan Aceh	Rekomen-dasi	4	0	-	7	2.249.963.444	14	2.425.000.000	21	2.667.500.000	28	2.944.249.992	28	10.286.713.436	Aceh Meudad	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
2.1.6.9.		Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Jumlah Gampong/Mukim yang melaksanakan Peradilan Adat yang telah diverifikasi	Jumlah	115	-	-	145	1.693.720.000	185	930.396.225	225	1.023.435.848	265	1.125.779.432	265	4.773.331.505	Aceh Meudad	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.1.6.10.		Program Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Jumlah Gampong/Mukim yang mengaktifkan kembali Lembaga Adat	Jumlah	80	-	-	115	2.831.787.241	125	2.530.000.000	135	2.783.000.000	145	3.061.300.000	145	11.206.087.241	Aceh Meudad	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.1.6.11.		Program Pegelaran Seni Budaya Daerah	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Aceh di Jakarta (Festival/Tahun)	Festival/Tahun	8	8	512.400.000	9	1.015.300.000	10	400.276.800	11	440.304.480	12	484.334.928	50	2.852.616.208	Aceh Meudad	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
			Jumlah Kunjungan Wisatawan di Anjungan Aceh TMII	Orang	800	1.000	-	1.200	-	1.400	-	1.600	-	1.800	-	7.000	-	Aceh Meudad	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
2.1.6.13.		Program Pegelaran Seni Budaya Daerah	Jumlah keikutsertaan dalam festival seni dan budaya (Festival/Tahun)	Festifal/Tahun	1	1 kali	10.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	11.025.000	1 kali	11.576.250	1 kali	12.155.063	1 kali	84.756.313	Aceh Meudad	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan
2.1.6.14.		Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat	Persentase rekomendasi/kebijakan/naskah di bidang pendidikan, kesehatan, dan adat istiadat yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah	%	60	20	1.121.550.000	20	1.464.538.500	20	1.221.043.442	20	1.282.095.614	20	1.346.200.394	100	6.435.427.950	Aceh Meudad	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
2.1.6.15.		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Sanggar	10	10	442.120.000	10	68.930.310.000	10	4.584.703.700	10	5.672.409.255	10	5.773.270.643	10	85.402.813.598	Aceh Meudad	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.1.6.16.		Program Pengelolaan Kekayaan dan keragaman Budaya	Meningkatkan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Jumlah Situs	11	-	-	18	27.287.579.296	18	18.452.285.820	18	29.610.036.247	18	41.442.803.220	18	116.792.704.583	Aceh Meudab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
2.1.6.17.		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Festifal/Tahun)	%	10	45	10.334.896.510	-	-	-	-	-	-	-	-	45	10.334.896.510	Aceh Meudab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
			Jumlah wisatawan	Wisatawan	2.154.249	-	-	3.292.320	-	3.786.169	-	4.354.094	-	5.007.208	-	5.007.208	-	Aceh Meudab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
			Lama kunjungan wisata	Hari	2	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	Aceh Meudab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
2.1.6.18.		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan pengelolaan cagar budaya dan nilai sejarah	Buah	11	12	15.404.014.121	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15.404.014.121	Aceh Meudab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
2.1.6.19.		Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghargai nilai budaya	%	80	80	31.259.509.315	-	-	-	-	-	-	-	-	80	31.259.509.315	Aceh Meudab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
Misi 3 : Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki						69.011.904.535	67.335.576.316	70.642.904.253	73.988.490.017	84.177.573.421	365.156.448.542								
3.1.		Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki	Jumlah turunan regulasi UU-PA	Regulasi	46	48		50		53		56		59		59			
3.1.1.		Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA	Persentase PP yang diselesaikan	%	50,00	60,00		70,00		80,00		85,00		90,00		90,00			
3.1.1.1.		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum Kewenangan Aceh yang difasilitasi	%	55	60	7.532.463.143	63	7.079.831.782		6.871.290.615		7.214.855.146		7.575.597.903		36.274.038.589	Aceh Damé	Biro Hukum
			Persentase produk hukum Kewenangan Aceh yang diselesaikan	%	-	-	-	90	-	95	-	95	-	95	-	95	-	Aceh Damé	Biro Hukum
			Persentase produk hukum kab/kota yang dikonsultasikan/fasilitasi/evaluasi yang dapat diselesaikan	%	-	-	-	90	-	95	-	95	-	95	-	95	-	Aceh Damé	Biro Hukum
			Persentase bantuan hukum fakir miskin yang diselesaikan;	%	-	-	-	90	-	95	-	95	-	95	-	95	-	Aceh Damé	Biro Hukum
3.1.1.2.		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum Kewenangan Aceh yang difasilitasi	%	55	60	600.000.000	63	515.000.000	70	661.500.000	72	694.575.000	80	729.303.750	80	3.200.378.750	Aceh Damé	Biro Hukum
			Persentase produk hukum Kewenangan Aceh yang diselesaikan	%	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-	Aceh Damé	Biro Hukum
			Persentase produk hukum kab/kota yang dikonsultasikan/fasilitasi/evaluasi yang dapat diselesaikan	%	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-	Aceh Damé	Biro Hukum

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Persentase bantuan hukum fakir miskin yang diselesaikan	%	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-	Aceh Damé	Biro Hukum
3.1.1.3.		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Qanun yang ditetapkan	%	100	100	41.335.423.139	100	35.447.652.169	100	49.561.110.522	100	51.733.174.734	100	60.678.117.322	100	238.755.477.886	Aceh Damé	Sekretariat DPRA
3.1.1.4.		Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA	Persentase Anggota DPRA yang dapat menjalankan fungsinya	%	100	100	324.000.000	100	324.000.000	100	1.118.137.284	100	1.229.951.012	100	1.352.946.114	100	4.349.034.410	Aceh Damé	Sekretariat DPRA
3.1.3.		Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik	Persentase pemberdayaan korban konflik	%	5,00	11,00		17,00		24,00		32,00		40,00		40,00	-		
3.1.3.1.		Program Pendidikan Damai	Persentase korban konflik yang mengikuti pendidikan damai	%	20	20	1.515.975.000	30	700.000.000	40	115.500.000	50	127.050.000	60	139.755.000	60	2.598.280.000	Aceh Damé	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
3.1.3.2.		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik	Peningkatan persentase masyarakat korban konflik yang dibina	%	10	11	414.450.000	17	2.300.000.000	24	231.000.000	32	254.100.000	40	279.510.000	40	3.479.060.000	Aceh Damé	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
3.1.3.3.		Program Penanganan Konflik	Persentase konflik yang tertangani	%	96	96	1.629.200.000	97	1.882.915.000	98	1.806.997.500	98	1.897.347.376	99	1.992.214.744	99	9.208.674.620	Aceh Damé	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
			Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	%	7,00	14,00		22,00		31,00		41,00		52,00		52,00			
			Jumlah lembaga penanganan korban konflik	Lembaga	13	13		13		13		13		13		13			
3.1.3.4.		Program Pencegahan dan Mitigasi Konflik	Persentase jumlah butir-butir MoU Helsinki yang sudah dilaksanakan	%	16	20	778.840.000	25	700.000.000	30	115.500.000	40	127.050.000	40	139.755.000	40	1.861.145.000	Aceh Damé	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
3.1.3.5.		Program Konsolidasi Perdamaian Aceh	Persentase jumlah konsolidasi pelaksana perdamaian Aceh	%	35	40	4.745.060.000	50	6.189.100.000	60	577.500.000	70	635.250.000	80	698.775.000	80	12.845.685.000	Aceh Damé	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
3.1.3.6.		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik	Persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial korban konflik	%	13	14	200.000.000	22	1.400.000.000	31	231.000.000	41	254.100.000	52	279.510.000	52	2.364.610.000	Aceh Damé	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
3.2.		Meningkatkan pembangunan demokrasi	Indeks demokrasi indonesia provinsi Aceh	Indeks	72,48	72,86		73,12		73,16		73,52		73,89		73,89	-		
3.2.1.		Meningkatnya kebebasan sipil masyarakat	skor aspek kebebasan sipil	Skor	92,92	92,98		93,12		93,21		93,35		93,58		93,58	-		
3.2.1.1.		Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Persentase sekolah tingkat Pendidikan Menengah Atas yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dibagi jumlah pendidik di Aceh	%	5	10	955.158.000	20	1.243.200.000	30	1.030.837.500	40	1.082.379.375	50	1.136.498.344	50	5.448.073.219	Aceh Damé	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.2.1.2.		Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	%	73	73	2.345.400.000	73	2.516.850.000	73:01:00	2.480.625.000	73:01:00	2.604.656.250	73:01:00	2.734.889.063	73:01:00	12.682.420.313	Aceh Damé	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
3.2.1.3.		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase peningkatan penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	%	82	84	890.793.253	85	953.330.733	87	1.026.185.832	88	1.077.495.124	90	1.131.369.880	90	5.079.174.822	Aceh Damé	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
3.2.1.4.		Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan /sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	%	9,8	19,9	479.842.000	39,79	776.279.000	59,69	551.250.000	79,58	578.812.500	100	607.753.125	100	2.993.936.625	Aceh Damé	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
3.2.1.4.		Program Fasilitas Kewaspadaan Nasional	Persentase Ancaman/deteksi dini Konflik yang tertangani	%	88	89	1.719.800.000	90	1.690.359.000	91	1.177.470.000	91	1.236.343.500	91	1.298.160.675	91	7.122.133.175	Aceh Damé	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
3.2.1.5.		Program Fasilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial di masyarakat	%	30	50	1.100.000.000	65	1.278.646.000	70	1.212.750.000	80	1.273.387.500	85	1.337.056.875	85	6.201.840.375	Aceh Damé	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
3.2.1.6.		Program Pembauran Kebangsaan	Jumlah konflik Sara yang tertangani	Jumlah	3	3	750.000.000	4	608.945.000	4	826.875.000	5	868.218.750	5	911.629.688	17	3.965.668.438	Aceh Damé	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
3.2.2.		Meningkatnya hak-hak politik	Skor aspek hak-hak politik	Skor	63,94	65,46		67,42		68,93		71,18		74,52		74,52	-		
3.2.2.1.		Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	Kasus	73,01	73,01	745.500.000	75,00	660.100.000	-	-	-	-	-	-	1.405.600.000	Aceh Damé	Biro Tata Pemerintahan	
3.2.3.		Meningkatnya peran lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	61,47	62,27		63,24		65,43		67,33		69,33		69,33	-		
3.2.3.1.		Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM /Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar	Jumlah LSM	35	25	950.000.000	25	1.069.367.632	22	1.047.375.000	21	1.099.743.750	23	1.154.730.938	23	5.321.217.320	Aceh Damé	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
Misi 4 : Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional							2.055.646.253.090	1.339.028.958.198	1.605.470.760.547	1.869.005.048.073	2.274.197.330.662	9.143.348.350.590							
4.1.		Meningkatkan kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing	Persentase pendidikan yang ditamatkan	%	28,37	30,15		31,55		32,45		33,20		34,00		34,00			
4.1.1.		Meningkatnya kualitas pendidikan	Persentase sekolah yang terakreditasi A																
			-Jenjang SD	%	19,5	29,8		40,1		50,2		60,5		70,9		70,9			
			-Jenjang SMP	%	20,9	30,1		40,5		50,2		60,4		70,2		70,2			

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			-Jenjang SMA	%	35,6	41,1		46,6		52,1		57,6		63,1		63,1			
			-Jenjang SMK	%	11,7	13,2		15,7		17,5		19,2		21,5		21,5			
4.1.1.1.		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	%	35	0	-	75	178.243.053.837	80	567.845.205.392	85	611.022.428.077	90	786.436.420.600	90	2.143.547.107.906	Aceh Carông	Dinas Pendidikan Aceh
			Rata - rata nilai UAN Tingkat SMA/SMK/MA																
			- SMA IPA	Nilai	41,96	43,96		46,46		49,16		52,16		55,56		55,56			
			- SMA IPS	Nilai	38,67	40,67		43,17		45,87		48,87		52,27		52,27			
			- SMK	Nilai	48,15	50,15		52,65		55,35		58,35		61,75		61,75			
4.1.1.2.		Program Peningkatan Pendidikan Menengah Atas dan Sederajat	Persentase angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA	%	87,52	0	-	89	39.600.000.000	90	35.994.748.000	92	41.818.135.931	100	50.181.763.117	100	167.594.647.048	Aceh Carông	Dinas Pendidikan Aceh
4.1.1.3.		Program Peningkatan Pendidikan Menengah Kejuruan	Persentase angka partisipasi kasar (APK) SMK	%	87,47	0	-	89	47.655.094.488	90	49.608.360.199	92	52.876.166.512	100	63.451.399.813	100	213.591.021.012	Aceh Carông	Dinas Pendidikan Aceh
			Persentase Kelulusan UN																
			- Jenjang SMA	%	99,7	99,75		99,8		99,85		99,9		99,95		99,95			
			- Jenjang SMK	%	99,62	99,7		99,75		99,8		99,85		99,90		99,90			
4.1.1.4.		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	Persentase mahasiswa terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas yang bergengsi di tingkat nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh	%	25		-	35	109.191.180.000	40	104.899.056.502	45	124.374.851.500	50	155.161.490.628	50	493.626.578.630	Aceh Carông	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
4.1.1.5.		Program kapasitas sumber daya manusia non aparatur	Persentase mahasiswa terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas yang bergengsi di tingkat nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh	%	25	25	116.171.397.730	-	-	-	-	-	-	-	-	116.171.397.730	Aceh Carông	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.1.1.6.		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan Pendidikan Tingkat SD/MI dan SMP/MTs	%	94	96	388.596.401.992	98	29.117.739.965	-	-	-	-	-	-	98	417.714.141.957	Aceh Carèng	Dinas Pendidikan Aceh
			Angka Melek Huruf	%	97,94	98,1		98,2		99		99,3		99,5		99,5			
4.1.1.7.		Program Pendidikan Non Formal	Persentase angka melek huruf	%	97,94	98,1	16.303.087.126	98,2	8.919.384.700	99	7.295.785.000	99,3	8.395.363.500	99,5	10.074.436.200	99,5	50.988.056.526	Aceh Carèng	Dinas Pendidikan Aceh
4.1.1.8.		Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Angka Melek Huruf usia 15 - 24 tahun	%	97	97	32.279.801.006	97,5	650.000.000	-	-	-	-	-	-	97,5	32.929.801.006	Aceh Carèng	Dinas Pendidikan Aceh
4.1.1.9.		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang/ Tahun	140.000	144.000	324.360.000	150.000	80.000.000	324.000	285.860.000	356.400	295.358.000	392.040	328.091.387	392.040	1.313.669.387	Aceh Carèng	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,98	9		10		11		12		13		13			
4.1.1.10.		Program Pendidikan Menengah	Meningkatkan APS, dan APM jenjang SMA/SMK/MA/ Paket A	%	78	80	995.097.270.197	85	500.000.000	-	-	-	-	-	-	85	995.597.270.197	Aceh Carèng	Dinas Pendidikan Aceh
4.1.1.11.		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	55	60	54.633.825.948	61	5.301.047.448	64	10.110.840.000	65	12.253.008.000	67	14.448.318.831	67	96.747.040.227	Aceh Carèng	Dinas Pendidikan Aceh
			Angka harapan lama sekolah	tahun	14,13	14,23		14,39		14,56		14,73		14,90		14,90			
4.1.1.12.		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	%	50	60	3.375.545.000	70	2.745.479.000	80	3.634.000.000	90	3.838.843.685	100	4.135.132.375	100	17.729.000.060	Aceh Carèng	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
4.1.1.13.		Program Wajib Belajar Pendidikan Dua belas Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,13	0	-	14,39	272.995.553.099	14,56	287.623.944.500	14,73	367.281.396.827	14,9	407.321.135.331	14,9	1.335.222.029.757	Aceh Carèng	Dinas Pendidikan Aceh
4.1.1.14.		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang/ Tahun	288.000	144.000	47.522.879.772	150.000	64.597.727.194	324.000	29.724.626.975	356.400	78.720.422.000	392.040	98.858.960.300	392.040	319.424.616.241	Aceh Carèng	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
4.1.1.15.		Program Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Persentase angka partisipasi kasar (APK) SLB dan Layanan Khusus	%	55,5	0	-	59,2	14.340.000.000	61,2	13.201.920.000	63,4	19.749.962.000	65,1	23.699.954.400	65,1	70.991.836.400	Aceh Carèng	Dinas Pendidikan Aceh
4.1.2.		Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG)																
			- Jenjang SD	%	30,60	34,60		44,60		55,60		68,60		83,60		83,60			
			- Jenjang SMP	%	31,90	35,90		45,90		56,90		69,90		84,90		84,90			
			- Jenjang SMA	%	33,50	38,50		48,50		59,50		72,50		87,50		87,50			
			- Jenjang SMK	%	25,30	29,30		39,30		50,30		63,30		78,30		78,30			
			- Jenjang SLB	%	12,90	14,90		24,90		35,90		48,90		63,90		63,90			

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Persentase distribusi guru	%	50	55		62		69		79		87		87			
			Rasio Guru - Murid																
			Jenjang SD	Rasio	1:10	1:11		1:12		1:13		1:14		1:15		1:15			
			Jenjang SMP	Rasio	1:9	1:10		1:11		1:12		1:13		1:14		1:14			
			Jenjang SMA	Rasio	1:9	1:10		1:11		1:12		1:13		1:14		1:14			
			Jenjang SMK	Rasio	1:9	1:10		1:11		1:12		1:13		1:14		1:14			
4.1.2.1.		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	%	55	60	21.791.237.102	70	23.778.595.476	80	18.860.236.250	80	20.927.759.875	100	25.113.311.850	100	110.471.140.553	Aceh Carèng	Dinas Pendidikan Aceh
4.1.2.2.		Program Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan	Meningkatnya Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	%	45,1	0	-	60,2	28.462.918.540	65,1	17.696.530.000	67,2	24.329.173.000	70	29.195.007.600	70	99.683.629.140	Aceh Carèng	Dinas Pendidikan Aceh
4.1.2.3.		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi (PPG)	%			190.146.891.933		344.066.154.561		373.109.596.988		411.091.556.686		493.309.868.023		1.811.724.068.191	Aceh Carèng	Dinas Pendidikan Aceh
			Jenjang SMA	%	37,5	38,5	-	45,5	-	59,5	-	72,5	-	87,5	-	87,5	-	-	
			Jenjang SMK	%	25,3	29,3	-	39,3	-	50,3	-	63,3	-	78,3	-	78,3	-	-	
			Jenjang SLB	%	24,5	14,9	-	24,9	-	35,9	-	48,9	-	63,9	-	63,9	-	-	
4.1.2.4.		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Persentase Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	%	60	65	832.910.000	70	989.100.000	75	1.421.852.602	80	1.492.945.232	85	1.567.592.494	85	6.304.400.328	Aceh Carèng	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
4.1.3.		Meningkatnya kualitas pendidikan vokasional	Persentase lulusan vokasional yang bersertifikasi	%	15	25		45		55		75		85		95			
4.2.		Meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional	Meningkatnya prestasi olahraga	Cabor	9	12		14		20		20		25		25			
4.2.1.		Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional	Pemuda	10	55		57		60		62		65		65			
4.2.1.1.		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Peningkatan Persentase Organisasi Pemuda yang di bina	%	100	100	224.460.000	100	409.740.000	100	2.852.740.000	100	6.000.148.000	100	6.600.162.800	100	16.087.250.800	Aceh Teuga	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
4.2.1.2.		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang berprestasi	Orang/O KP	50	60	4.526.000.000	60	4.978.600.000	65	7.987.140.000	65	6.024.106.000	65	6.626.516.600	65	30.142.362.600	Aceh Teuga	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
4.2.1.3.		Program Pembinaan Kepemudaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Unit	1	2	7.200.000.000	3	5.550.200.000	3	4.000.000.000	3	4.500.000.000	3	5.000.000.000	3	26.250.200.000	Aceh Teuga	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Persentase wirausaha muda	%	0,37	0,12		0,14		0,15		0,17		0,12		0,12			
4.2.1.4.		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausaha muda	%	12	12	600.000.000	14	2.860.000.000	15	2.000.000.000	17	3.460.600.000	21	3.806.660.000	21	12.727.260.000	Aceh Teuga	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
4.2.2.		Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah medali pada event olahraga tingkat nasional dan regional	Medali	9	12		14		18		20		25		25			
4.2.2.1.		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi	Atlet	50	60	2.260.888.000	60	4.826.920.466	65	5.574.680.000	65	6.000.148.000	65	6.600.162.800	65	25.262.799.266	Aceh Teuga	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
4.2.2.2.		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembudayaan, Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	Cabor/ Kegiatan	56	56	53.678.922.000	56	53.795.147.556	56	27.442.418.783	56	30.904.051.685	56	39.401.265.834	56	205.221.805.858	Aceh Teuga	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
4.2.2.3.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga tingkat nasional dan internasional	Cabor	22	28	120.080.375.284	35	95.375.321.868	40	34.301.219.356	49	33.648.623.563	56	42.879.679.699	56	326.285.219.770	Aceh Teuga	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
Misi 5 : Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi							2.122.985.951.044		1.943.291.904.336		1.718.607.095.823		1.710.958.493.564		1.953.857.737.894		9.449.701.182.661		
5.1.		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	tahun	69,52	69,95		69,98		70		70,2		70,5		70,5			
5.1.1.		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase kinerja pelayanan rumah sakit																
			- BOR	%	45,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00			
			- TOI	Hari	4,00	4,00		3,00		3,00		2,00		2,00		2,00			
			- ALOS	Hari	2,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
			- NDR	<25/1000	5,73	5,50		5,40		5,35		5,25		5,05		5,05			
			- GDR	<45/1000	9,00	8,35		7,10		6,75		6,33		6,23		6,23			
			Persentase kinerja pelayanan rumah sakit jiwa																
			- BOR	%	99,00	99,00		96,00		93,00		90,00		84,50		84,50			
			- TOI	Hari	3	3		2,5		2		1,5		1		1			
			- ALOS	Hari	60	60		55		51		47		42		42			
			- NDR	<25/1000	2,5	2,5		2,45		2,35		2,25		2,05		2,05			
			- GDR	<45/1000	3,35	3,35		3,10		2,75		2,33		2,23		2,23			

Kode	Visi & Misi	Sasaran/ Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran Hidup	990	990	-	991	-	991	-	992	-	992	-	992	-		
			Angka Kematian Ibu	/100.000 Kelahiran Hidup	149	162	-	157	-	150	-	145	-	140	-	140	-		
			Angka Kematian Bayi	/1000 Kelahiran Hidup	9	9	-	9	-	9	-	8	-	8	-	8	-		
			Angka kematian Balita.	/1000 Kelahiran Hidup	10	10	-	9	-	9	-	8	-	8	-	8	-		
5.1.1.1.		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	600.000.000	-	573.162.000	-	694.870.000	-	694.870.000	-	694.870.000	-	3.257.772.000	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Jiwa
			Meningkatnya Jumlah pasien dengan gangguan jiwa berat yang diobati dan tidak ditelantarkan	Jumlah pasien	500	500	-	1.700	-	1.900	-	2.100	-	2.300	-	2.300	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Jiwa
			Persentase pasien yang kembali ke RS] setelah dipulangkan (setelah mendapat perawatan)	%	55	55	-	50	-	45	-	40	-	30	-	30	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Jiwa
5.1.1.2.		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	%	50	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
5.1.1.3.		Program Upaya Kesehatan Masyarakat		-	-	22.363.257.000		39.580.810.000		12.168.536.000		12.407.053.324		12.750.612.000		99.270.268.324		Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	60	64	-	84	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Persentase RS yang terakreditasi	%	40	40	-	60	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.4.		Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis	Peningkatan Pelayanan yang lengkap dan berkualitas	%	90	95	85.840.000	95	1.167.428.252	95	3.300.823.669	100	2.823.223.669	100	2.109.444.301	100	9.486.759.891	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
5.1.1.5.		Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis	Tersedianya Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis yang Komprehensif	%	100	100	67.192.146.594	100	53.033.140.000	100	922.836.600	100	968.978.430	100	1.017.427.352	100	123.134.528.976	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
5.1.1.6.		Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis	Jumlah Jenis Pemeriksaan/Parameter laboratorium kesehatan di Labkesda	Jumlah	54/108	60/108	4.927.500.000	65/108	3.882.310.000	70/108	5.512.500.000	75/108	5.788.125.000	80/108	6.077.531.250	80/108	26.187.966.250	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.7.		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				2.945.720.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.945.720.061	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran Hidup	990	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Angka Kematian Ibu	/100.000 Kelahiran Hidup	149	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Angka Kematian Bayi	/1.000 Kelahiran Hidup	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Angka kematian Balita.	/1000 Kelahiran Hidup	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.8.		Program Pelayanan Medis	Persentase Peningkatan Pelayanan tenaga medis	%	100	100	325.090.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	325.090.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.9.		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,27	0,3	118.550.516.837	0,35	48.668.240.000	0,4	3.258.005.009	0,45	2.500.000.000	0,5	2.000.000.000	0,5	174.976.761.846	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh	
5.1.1.10.		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang fungsional	%	70	75	1.605.950.000	85	2.459.009.804	90	1.725.456.563	95	1.331.435.832	100	1.384.028.717	100	8.505.880.916	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	
5.1.1.11.		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang fungsional	%	48	60	15.072.991.000	75	5.216.860.000	85	8.886.150.000	90	9.330.457.500	100	9.796.980.375	100	48.303.438.875	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin	
5.1.1.12.		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit	%	50	70	3.969.469.391	80	12.402.106.696	90	14.321.919.666	95	15.978.334.003	100	17.968.113.060	100	64.639.942.816	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	
5.1.1.13.		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit	%	30	35	21.876.549.068	100	24.343.290.284	100	19.928.641.380	100	20.938.667.282	100	23.210.379.664	100	110.297.527.678	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Jiwa	
5.1.1.14.		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit	%	50	50	12.980.000.004	60	48.067.814.748	70	118.999.349.006	80	71.853.028.111	85	75.231.980.777	85	327.132.172.646	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin	

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.1.1.15.		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah Kab/kota yang Memiliki RSUD Tipe B	Jumlah	9	10	387.443.833.147	11	349.905.852.864	12	328.236.855.954	13	401.578.595.479	14	512.950.281.644	14	1.980.115.419.088	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.16.		Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	72	78	37.400.500.000	80	33.155.000.000	83	28.284.141.000	85	28.849.823.820	90	29.426.820.296	90	157.116.285.116	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
5.1.1.17.		Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-	-	28.771.177.916	-	28.221.495.300	-	30.900.870.100	-	31.052.992.100	-	31.078.963.000	-	150.025.498.416	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Jiwa	
			Indeks Kepuasan Pasien Jiwa	Indeks	26	80	-	85	-	94	-	95	-	97	-	97	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Jiwa
			Jenis Layanan Sub Spesialis Jiwa	Jumlah	1	1	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Jiwa
5.1.1.18.		Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-	-	494.000.000.000	-	501.000.000.000	-	532.226.514.670	-	474.338.664.115	-	525.343.407.271	-	2.526.908.586.056	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	90	-	94	-	95	-	96	-	97	-	97	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
			Kemandirian RSUZA	%	60	70	-	80	-	90	-	95	-	100	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
5.1.1.19.		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan memenuhi standar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Jumlah	6	11	899.136.379	-	-	-	-	-	-	-	-	11	899.136.379	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.20.		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		-	-	3.541.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.541.660.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh	
			Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,49	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	158	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.21.		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial	%	70	80	5.863.237.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	5.863.237.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.22.		Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance Terpadu	Terbangunnya Unit Terpadu (Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Terbentuknya Unit Public Safety Centre (PSC))	Jumlah Kab/Kota	10	15	3.927.610.000	20	5.000.000.000	23	3.328.000.000	23	3.404.400.000	23	3.389.620.000	23	19.049.630.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.1.1.23.		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase PHBS di Masyarakat	%	33	38	192.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	38	192.000.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
5.1.1.24.		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase PHBS di Masyarakat	%	33	38	8.690.492.000	43	3.373.999.962	48	3.757.950.754	53	4.000.000.000	55	4.500.000.000	55	24.322.442.716	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.25.		Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Yang memenuhi Standar Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan	%	40	50	2.112.642.266	60	1.117.064.956	70	1.653.750.000	80	1.736.437.500	90	1.823.259.375	90	8.443.154.097	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
5.1.1.26.		Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Yang memenuhi Standar Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan	%	40	50	3.020.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	3.020.000.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
5.1.1.27.		Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Terlatih	%	45	50	12.975.677.229	60	4.500.000.000	70	4.467.084.143	80	4.690.438.350	100	4.924.960.267	100	31.558.159.989	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.28.		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		-	-	-	15.668.010.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.668.010.918	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	25	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit DBD	%	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			AFP rate per 100.000 penduduk < 15 thn	/100.000 Penduduk	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.29.		Program Pengembangan Lingkungan Sehat		-	-	-	923.757.621	-	1.425.000.000	-	1.658.136.142	-	1.858.136.142	-	2.000.000.000	-	7.865.029.905	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan Rumah sehat	%	54	65	-	70	-	75	-	80	-	90	-	90	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan Jamban Sehat	%	57	60	-	65	-	70	-	80	-	90	-	90	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Persentase Penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas	%	65	75	-	80	-	90	-	90	-	90	-	90	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/ Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	49,90	56,00		58,00		60,00		62,00		64,00		64,00		Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.30.		Program Perbaikan Gizi Masyarakat		-	-	-	12.642.418.967		6.250.000.000		3.039.450.000		4.389.849.992		5.000.000.000		31.321.718.959	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Persentase Stunting	%	35,7	33	-	32	-	28	-	24	-	20	-	20	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Persentase balita gizi buruk	%	3	3	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Prevalensi balita gizi Kurang	%	14	14	-	13	-	13	-	12	-	12	-	12	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan ASI eksklusif	%	23	27	-	31	-	35	-	40	-	45	-	45	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.31.		Program Pelayanan Medis	Persentase kemampuan pelayanan medis terhadap pasien	%	75	80	14.777.082.229	90	13.245.158.480	100	13.017.270.558	100	12.573.562.208	100	14.346.341.203	100	67.959.414.678	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
5.1.1.32.		Program Pelayanan Medis	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Medis	%	10	30	3.118.085.973	100	2.965.620.000	100	3.094.260.000	100	3.094.260.000	100	3.094.260.000	100	15.366.485.973	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Jiwa
5.1.1.33.		Program Pelayanan Medis		-	-	-	40.713.465.406	-	46.245.500.003	-	9.633.007.199	-	8.151.346.598	-	9.077.426.778	-	113.820.745.984	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
			Persentase kemampuan pelayanan medis terhadap pasien	%	-	-	-	90	-	92	-	95	-	97	-	97	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
			Meningkatnya Manajemen Pelayanan Medis	%	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
			Persentase Penurunan Rujukan Pelayanan Medis terhadap pasien	%	2	2	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
			Standarisasi Pelayanan	asional/Internasional	Standar Internasional JCI	Standar Internasional JCI	-	Standar Internasional JCI	-	Standar Internasional JCI	-	Standar Internasional JCI	-	Standar Internasional JCI	-	Standar Internasional JCI	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
5.1.1.34.		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Puskesmas yang mengembangkan program Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	%	3	4	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	150.000.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.35.		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	/1.000 kelahiran hidup	10	10	3.288.118.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.288.118.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.36.		Program Pengadaan, Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		-	-	-	-	-	4.485.000.000	-	4.709.368.858	-	4.944.837.301	-	5.192.079.166	-	19.331.285.325	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan memenuhi standar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Jumlah	10	-	-	16	-	21	-	23	-	23	-	23	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial	%	70	-	-	90	-	95	-	97	-	100	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Persentase Penggunaan Obat rasional (POR) di Puskesmas	%	20	-	-	40	-	50	-	60	-	70	-	70	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.37.		Program Peningkatan kesehatan Keluarga	-	-	-	-	-	-	6.000.000.000	-	4.565.198.992	-	4.793.458.942	-	5.033.131.889	-	20.391.789.823	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan pelayanan kesehatan keluarga	%	75	-	-	80	-	82	-	85	-	88	-	90	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.1.38.		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	-	-	-	-	-	-	11.650.000.000	-	9.040.500.000	-	9.492.525.000	-	9.967.151.250	-	40.150.176.250	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	25	42	-	49	-	53	-	55	-	57	-	57	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit DBD	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	74	90	-	92	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			AFP rate per 100.000 penduduk <15 thn	/100.000 Penduduk	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	20	20	-	30	-	40	-	50	-	60	-	60	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.1.2.		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	Cakupan Kesehatan Semesta (Universal health coverage)			95,00		95,00		96,00		97,00		98,00		99,00			
5.1.2.1.		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kepesertaan asuransi kesehatan	%	97	100	579.962.650.000	100	426.300.000.000	100	430.000.000.000	100	450.000.000.000	100	500.000.000.000	100	2.386.262.650.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Kesehatan Aceh
5.2.		Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,67	92,53		92,99		93,46		93,93		94,39		94,39			
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,28	66,55		66,78		66,90		67,20		67,60		67,60			
5.2.1.		Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Angka usia harapan hidup laki-laki	Tahun	67,59	67,83		67,92		68		68,09		68,18		68,18			

Kode	Visi & Misi	Sasaran/ Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Angka usia harapan hidup Perempuan	Tahun	71,49	71,74		71,82		71,91		72		72,08		72,08			
			Rata-rata lama sekolah laki-laki	Tahun	9,16	9,57		9,69		9,81		9,93		10,06		10,06			
			Rata-rata lama sekolah perempuan	Tahun	8,4	8,96		9,14		9,32		9,49		9,67		9,67			
			Pengeluaran perkapita laki-laki	Ribu/Tahun	11.936,79	12.175		12.252		13.329		12.407		12.484		12.484			
			Pengeluaran perkapita perempuan	Ribu/Tahun	7.411	8.342		8.640		8.939		9.327		9.535		9.535			
5.2.1.1.		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi	Jumlah	400	700	1.714.777.263	1.000	2.417.200.000	1.300	1.437.950.000	1.600	1.545.400.000	1.900	1.627.400.000	1.900	8.742.727.263	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
5.2.2.		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	%	14,81	16,05		16,05		16,05		16,05		16,05		16,05		Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
			Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
5.2.2.1.		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				617.570.000		1.905.000.000		758.590.000		786.590.000		806.186.000		4.873.936.000		Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
			Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
5.3.		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks kualitas hidup PMKS	Indeks	0,28	0,44		0,47		0,57		0,62		0,65		0,65			
5.3.1.		Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	5,40	8,60		9,10		9,70		10,26		10,80		10,80			
5.3.1.1.		Program Pembinaan Anak Terlantar	-	-	-	8.507.161.034	-	17.467.465.000	-	18.263.983.000	-	19.518.218.750	-	22.718.218.750	-	86.475.046.534		01. Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
			Persentase Anak terlantar yang tertangani	%	50	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Persentase Tenaga Pendamping Terlatih	%	25	50	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mandiri dan terakreditasi	Jumlah	1	5	-	7	-	9	-	10	-	10	-	10	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
5.3.1.2.		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah penanganan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Tertangani	Jumlah	30	45	2.799.700.000	125	1.956.000.000	205	3.470.507.000	285	3.922.412.000	365	4.522.412.000	365	16.671.031.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
5.3.1.3.		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial (Orang/Lembaga)	Orang/Lembaga	36/69	39/76	21.590.340.601	42/83	17.038.400.000	45/92	10.516.101.501	52/96	14.168.471.978	59/100	15.878.471.978	59/100	79.191.786.058	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
5.3.1.4.		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	69.290.654.065	-	44.614.515.499	-	24.695.873.160	-	32.878.161.754	-	38.095.609.702	-	209.574.814.180			
			Persentase Lansia yang Mendapat Bantuan	%	4	7	-	17	-	27	-	37	-	47	-	47	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
			Persentase Korban Penyalahgunaan NAPZA yang tertangani	%	4	8	-	18	-	28	-	38	-	48	-	48	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
			Persentase Korban Tindak Kekerasan (KTK) yang tertangani	%	2	5	-	10	-	15	-	20	-	25	-	25	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
			Cakupan Pelayanan Rumah Singgah	%	0	10	-	25	-	50	-	75	-	100	-	100	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
5.3.1.5.		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Efektifitas panti dalam melayani penerima manfaat	%	40	40	26.550.499.500	60	108.546.460.488	-	-	-	-	-	-	60	135.096.959.988	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
5.3.1.6.		Program Pembinaan Panti Asuhan/Rumah Sejahtera	Efektifitas panti dalam melayani penerima manfaat	%	-	-	-	-	70	35.294.488.966	80	25.254.969.321	90	26.854.969.321	90	87.404.427.608	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh	
5.3.2.		Meningkatnya kesejahteraan disabilitas	Persentase disabilitas yang menerima jaminan sosial	%	0,02	0,03	-	0,03	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-		
5.3.2.1.		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Disabilitas dan eks Trauma yang mendapat bantuan	%	1	8	1.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.400.000.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
5.3.2.2.		Program Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Trauma	Persentase Penyandang Disabilitas dan eks Trauma yang mendapat bantuan	%	-	-	-	15,21	3.850.000.000	26,15	2.035.775.000	40,75	2.191.550.000	58,99	2.441.550.000	58,99	10.518.875.000	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
5.3.3.		Menurunnya angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	%	15,92	15,43	-	14,43	-	13,43	-	12,43	-	11,43	-	11,43	-		

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.3.3.1.		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-	-	-	57.938.663.575	-	61.263.000.000	-	20.802.380.933	-	17.129.219.063	-	21.523.850.508	-	178.657.114.079	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
			Jumlah KK Komunitas Adat Terpencil (KAT) yangmendapat bantuan	Jumlah	110	115	-	120	-	125	-	130	-	135	-	135	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
			Jumlah Fakir miskin yang mendapat bantuan (KUBE/UEP)	Jumlah	300/3.228	300/3.228	-	330/3.550	-	363/4.000	-	500/4.500	-	550/5.000	-	550/5.000	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
			Jumlah Rehab Rumah Tidak Layak Huni per KK	Jumlah	400	420	-	500	-	550	-	600	-	650	-	650	-	Aceh Seujahtra (JKA Plus)	Dinas Sosial Aceh
Misi 6 : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan							1.394.232.008.848		1.455.482.610.226		1.302.837.355.794		1.469.616.516.510		1.967.727.072.986		7.589.895.564.364		
6.1.		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB	%	4,14	5,00		5,25		5,50		5,75		6,00		6,00			
6.1.1.		Meningkatkan pembangunan sektor pertanian	Pertumbuhan sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	%	27,81	28,54		29,19		29,84		30,49		31,14		31,14			
6.1.1.1.		Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya rasio penyuluh tersertifikasi	%	3	4	15.313.457.266	4	23.877.929.753	4	15.556.213.695	4	18.853.058.895	5	23.408.242.734	5	97.008.902.343	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
6.1.1.2.		Program Pengembangan Budaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	82.692.1	98	123.083.141.567	108	59.544.164.777	118	54.239.094.237	128.470	60.842.508.277	138.682	82.390.682.876	138.682	380.099.591.734	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
6.1.1.3.		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya rasio penyuluh tersertifikasi	%	3	4	10.137.053.958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.137.053.958	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
6.1.1.4.		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	184.190.8	197.132	196.940.229.773	205.741	180.205.395.204	214.350	130.862.384.717	222.959	142.260.732.845	231.568	184.164.327.093	231.568	834.433.069.632	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
6.1.1.5.		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit				22.857.377.700		15.066.317.394		13.807.399.212		16.727.765.120		28.642.819.933		97.101.679.359	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Peternakan Aceh
			Bakteri	%	2	17	-	15	-	14	-	12	-	11	-	11	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Peternakan Aceh
			Parasit	%	22	51	-	46	-	41	-	37	-	33	-	33	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Peternakan Aceh
			Protozoa	%	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Peternakan Aceh
			Virus	%	4	19	-	18	-	16	-	14	-	13	-	13	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Peternakan Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
6.1.1.6.		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi jenis komoditi ekspor pertanian (padi)	Ton	2.204.992	2.300.000	1.486.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300.000	1.486.505.000	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
6.1.1.7.		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Tingkat penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan yang diterapkan	%	80	80	8.781.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.781.650.000	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
6.1.1.8.		Program Pelayanan Pertanian Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Meningkatnya Pelayanan Pertanian Masyarakat	%	3	4	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.000.000.000	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
6.1.1.9.		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas pangan pokok utama (padi)	Ton/Ha	5	5	102.505.728.608	5	940.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5	103.445.728.608	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
6.1.1.10.		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian	%	40	50	2.135.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2.135.600.000	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Peternakan Aceh
6.1.1.11.		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi daging dan telur				104.796.857.847		70.669.668.360		84.992.027.885		87.901.375.719		101.250.002.200		449.609.932.011	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Peternakan Aceh	
			Daging Ruminansia	Ton	17.657	45.320	-	49.852	-	54.837	-	60.321	-	66.353	-	66.353	-	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Peternakan Aceh
			Daging Non Ruminansia	Ton	21.670	24.915	-	27.407	-	30.147	-	33.162	-	36.478	-	36.478	-	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Peternakan Aceh
			Telur	Ton	18.329	21.395	-	23.535	-	25.888	-	28.477	-	31.324	-	31.324	-	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Peternakan Aceh
6.1.1.12.		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Ton			222.068.158.106		194.069.765.366		143.400.858.464		169.250.009.761		145.614.351.362		874.403.143.059	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
			Padi	Ton	2.204.992	2.539.311	-	2.625.047	-	2.713.675	-	2.805.293	-	2.900.000	-	2.900.000	-	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
			Jagung	Ton	363.033	363.033	-	383.059	-	404.188	-	426.480	-	450.000	-	450.000	-	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
			Kedelai	Ton	40.953	40.953	-	41.930	-	42.929	-	43.952	-	3.136	-	3.136	-	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
			Bawang Merah	Ton	7.414	7.414	-	7.785	-	8.172	-	8.583	-	9.012	-	9.012	-	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
			Cabai	Ton	50.108	50.108	-	52.613	-	55.244	-	58.006	-	60.906	-	60.906	-	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
			Kelapa Sawit	Ton	399.618	515.416	-	554.036	-	577.828	-	635.346	-	693.626	-	693.626	-	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
			Kelapa	Ton	62.700	62.700	-	63.500	-	64.000	-	64.500	-	65.000	-	65.000	-	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kopi	Ton	65.231	65.120	-	65.200	-	65.300	-	65.400	-	65.500	-	65.500	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
			Kakao	Ton	42.889	43.500	-	45.000	-	46.000	-	46.200	-	46.800	-	46.800	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
6.1.1.13.		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Volume tampungan air	juta m3	1	1	108.674.099.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	108.674.099.500	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pengairan Aceh
6.1.1.14.		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA kondisi baik	%	67	-	-	78,47	825.523.796.892	80,54	766.576.891.198	82,36	848.684.184.970	86,08	1.249.080.932.837	86,08	3.689.865.805.897	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pengairan Aceh
			Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian	Indeks	0,67	0,71	-	0,73	-	0,74	-	0,75	-	0,76	-	0,76	-		
6.1.1.15.		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	67,37	75,92	398.501.984.840	75,92	1.421.398.523	-	-	-	-	-	-	75,92	399.923.383.363	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pengairan Aceh
6.2.		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	%	16,89	15,43	-	14,43	-	13,43	-	12,43	-	11,43	-	11,43	-		
6.2.1.		Meningkatkan Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Indeks	70,00	73,90	-	75,50	-	77,60	-	78,50	-	80,25	-	80,25	-		
6.2.1.1.		Program peningkatan akses pangan	Terjaganya aksesibilitas dan harga pangan strategis (koefisien variasi harga beras)	%	< 5	-	-	< 5	21.700.000.000	< 5	25.957.374.247	< 5	33.746.116.267	< 5	42.064.205.254	< 5	123.467.695.768	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pangan Aceh
6.2.1.2.		Program peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum (di bawah 1500 kkal/kapita/hari)	%	< 15	-	-	< 15	14.830.079.641	< 13	28.688.298.825	< 11	33.109.376.484	< 10	41.580.014.785	< 10	118.207.769.735	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pangan Aceh
6.2.1.3.		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya Skor PPH Konsumsi	Skor	70	73,9	43.555.776.042	-	-	-	-	-	-	-	-	73,9	43.555.776.042	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pangan Aceh
6.2.1.3.		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kilo Kalori Per Hari)	Kkal/kapita/hari	3.612,10	3.160	11.262.005.068	-	-	-	-	-	-	-	-	3.160	11.262.005.068	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
6.2.2.		Meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	94,74	98	-	101	-	103	-	105	-	107	-	107	-		
6.2.2.1.		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya indeks yang diterima petani (It)	Indeks	-	-	3.516.755.000	-	18.606.932.518	-	15.174.414.957	-	33.550.851.939	-	38.732.819.801	-	109.581.774.215	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
			Tanaman Pangan	Indeks	116,99	120,05	-	121,61	-	123,19	-	124,79	-	126,41	-	126,41	-	Aceh Meugoë dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Hortikultura	Indeks	129.10	129.22	-	129.29	-	129.35	-	129.42	-	129.48	-	129.48	-	Aceh Meugoè dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
			Perkebunan	Indeks	113.10	115.28	-	116.38	-	117.50	-	118.63	-	119.77	-	119.77	-	Aceh Meugoè dan Meulaöt	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
6.2.2.2.		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Indek yang diterima peternak (It)	Indeks	120,26	133,52	7.659.748.000	146,87	6.163.269.754	161,56	6.498.495.121	177,72	7.349.185.181	195,49	8.199.875.242	195,49	35.870.573.298	Aceh Meugoè dan Meulaöt	Dinas Peternakan Aceh
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	97,16	98,50		99,75		101,25		103		106		106			
6.2.2.3.		Program peningkatan nilai tambah produksi perikanan	Meningkatnya nilai ekspor perikanan dan jumlah pengolah ikan				-	12.639.487.546			5.364.729.227		5.973.347.591		6.581.965.955		30.559.530.319	Aceh Meugoè dan Meulaöt	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
			Nilai ekspor perikanan	USD	634.679	-	-	1.250.000	-	1.357.000	-	1.475.000	-	1.552.000	-	1.552.000	-	Aceh Meugoè dan Meulaöt	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
			Jumlah masyarakat pengolah ikan	Klp	25	-	-	25	-	27	-	30	-	35	-	35	-	Aceh Meugoè dan Meulaöt	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
6.2.2.4.		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya nilai ekspor perikanan dan kelompok pengolah ikan					4.211.495.500		1.000.000.000							5.211.495.500	Aceh Meugoè dan Meulaöt	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
			Nilai ekspor perikanan	USD	634.679	1.142.899,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.142.899,8	Aceh Meugoè dan Meulaöt	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
			Kelompok pengolah ikan	Kelompok	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	Aceh Meugoè dan Meulaöt	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
6.2.2.5.		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil	Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau-pulau kecil	KK	328	-	-	150	9.224.404.498	200	11.719.174.009	250	11.368.003.461	300	16.016.832.914	300	48.328.414.882	Aceh Meugoè dan Meulaöt	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
6.2.2.6.		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Berkurangnya jumlah KK miskin di pulau-pulau kecil	KK	328	292	4.744.385.073	-	-	-	-	-	-	-	-	292	4.744.385.073	Aceh Meugoè dan Meulaöt	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		Misi 7 : Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan					76.794.284.529		65523.819547		49424.058624		53084.914919		57486.158825		302.313.236.444		
7.1.		Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	Rasio ketersediaan daya listrik	%	1,03	1,45		2,00		1,87		1,73		1,65		1,65			
7.1.1.		Terwujudnya kemandirian energi	Rasio elektrifikasi	%	95,69	98,05		98,46		99,00		99,50		99,90		99,90			
			Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total Energi	%	0,54	1,93		6,67		12,12		20,06		25,17		25,17			
7.1.1.1.		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	96,26	30	52.247.429.565	30	572.378.640							30	52.819.808.205	Aceh Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
7.1.1.2.		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Bersih Terbarukan	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total Energi	%	0,54	-	-	-	-	28,62	7.050.000.000	28,65	9.500.000.000	28,96	6.000.000.000	28,96	22.550.000.000	Aceh Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.1.1.3.		Program Pengelolaan Energi	Jumlah ketersediaan dan pemakaian daya listrik	%	20	-	-	40,8	47.840.519.847	51,2	18.924.972.911	61,6	18.741.967.229	72	20.903.042.270	72	106.410.502.257	Aceh Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
7.2.		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDDB	%	4,14	5,00		5,25		5,50		5,75		6,00		6,00			
7.2.1.		Meningkatnya kontribusi subsektor pertambangan dan penggalan	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalan terhadap PDDB	%	1,22	1,91		2,60		3,30		3,99		4,68		4,68			
7.2.1.1.		Program Pemanfaatan Geologi dan Sumber Daya Mineral	Persentase pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral bersih dan terbarukan	%	78	85	19.066.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	85	19.066.390.000	Aceh Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
7.2.1.2.		Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	Persentase peningkatan pengelolaan usaha pertambangan, penyelidikan geologi, dan pemanfaatan air tanah	%	-	-	-	23,00	17.110.921.060	41,00	23.449.085.713	60,00	24.842.947.690	68,00	30.583.116.555	68,00	95.986.071.018	Aceh Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
7.2.1.3.		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Usaha Pertambangan yang Memenuhi Kaidah Pertambangan	%	80	85	5.480.464.964	-	-	-	-	-	-	-	-	85	5.480.464.964	Aceh Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
Misi 8 : Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi dan industri kreatif yang kompetitif						346.778.994.958	251.989.038.273	364.055.435.322	355.672.785.394	437.481.113.351	1.755.977.367.298								
8.1.		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDDB	%	4,14	5		5,25		5,5		5,75		6		6			
8.1.1.		Meningkatnya pembangunan industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non Migas	%	5,36	5,84		6,37		6,94		7,57		8,25		8,99			
8.1.1.1.		Program pengembangan industri pangan	Meningkatnya kontribusi sub sektor industri pangan terhadap total PDDB	%	2	-	-	3	4.373.232.441	4	20.622.865.365	4	21.347.710.285	4	27.301.181.926	4	73.644.990.017	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
8.1.1.2.		Program pengembangan industri kreatif dan aneka	Meningkatnya kontribusi sub sektor industri kreatif dan aneka	%	5	-	-	5	14.631.825.000	5,5	16.161.594.277	5,5	17.535.507.219	6	21.724.098.309	6	70.053.024.805	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
8.1.1.3.		Program perwilayahan industri	Meningkatnya jumlah kawasan industri dan sentra industri			-	-		8.823.471.118		34.282.369.954		23.174.820.875		17.221.282.425		83.501.944.372	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
			Kawasan Industri (KI)	Kawasan	2	-	-	2	-	3	-	3	-	3	-	3	-	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
			Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM)	Unit	-	-	-	6	-	6	-	7	-	9	-	9	-	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
8.1.1.6.		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Meningkatnya kontribusi sektor industri	%	5	7	33.549.635.839	-	-	-	-	-	-	-	-	7	33.549.635.839	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Persentase kontribusi sub sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya	%	0,63	0,68		0,7		0,73		0,76		0,79		0,79			
8.1.2.		Meningkatnya neraca perdagangan	Pertumbuhan Ekspor non migas	%	-58,1	4,9		14,44		13,59		5,56		5,7		5,7			
8.1.2.1.		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas	USD	22.869.513	100.000.000	3.029.758.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	3.029.758.000	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
			Pertumbuhan impor	%	-75,18	-27,68		4		4		4		4		4			
			Neraca perdagangan	USD	-6.125.058	62.953.863		74.872.018		78.746.898		83.576.774		88.859.845		88.859.845			
8.1.2.2.		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	IKK (%)	28,46	28,46	2.581.956.118	30,1	3.000.000.000	40,1	6.292.159.736	43,1	6.694.011.045	45,5	7.065.862.354	45,5	25.633.989.253	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
8.1.2.3.		Program peningkatan ekspor dan pengendalian impor	Meningkatnya pertumbuhan ekspor dan terkendalinya impor				-		4.500.000.000		8.574.015.783		8.366.988.472		8.276.064.037		29.717.068.292	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
			Pertumbuhan Ekspor	%	-58	-	-	14	-	14	-	6	-	6	-	6	-	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
			Pertumbuhan Impor	%	-75	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
			Defisit Perdagangan Antar Daerah	Rp.Triliun	35	30,25		28		27		26		25		25			
8.1.2.5.		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya jumlah IKM	IKM	80	80	1.600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.600.000.000	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
8.1.2.6.		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terjaganya inflasi daerah	%	4	3	48.550.231.138	3	35.645.000.000	2	38.322.188.554	2	37.952.486.437	2	41.857.940.367	2	202.327.846.496	Aceh Kaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
8.1.2.7.		Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	Meningkatnya kapasitas, produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	%	54	57	50.695.719.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.695.719.000	Aceh Kaya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
8.1.2.8.		Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya persentase usaha mikro dan kecil	%	98	98	1.750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	98	1.750.000.000	Aceh Kaya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
8.1.2.9.		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah produk UKM yang kompetitif	Buah	100	120	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120	1.000.000.000	Aceh Kaya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
8.1.2.10.		Program Pengembangan dan pembinaan koperasi					-		27.302.837.374		25.910.448.428		20.906.710.515		30.258.487.009		104.378.483.326	Aceh Kaya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Jumlah KSP/USP yang menerapkan pola syariah	Unit	100	-	-	50	-	50	-	50	-	50	-	200	-	Aceh Kaya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
			Meningkatnya jumlah koperasi mandiri dan tangguh	Unit	320	-	-	10	-	10	-	11	-	12	-	12	-	Aceh Kaya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
8.1.2.11.		Program pengembangan dan pembinaan UKM	Meningkatnya jumlah UKM naik kelas	Buah	50	-	-	65	19.006.445.001	70	46.296.174.247	75	44.304.046.484	80	58.101.055.005	80	167.707.720.737	Aceh Kaya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
8.1.2.12.		Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya peningkatan koordinasi pengelolaan minyak dan gas bumi	%	87	90	2.052.233.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90	2.052.233.000	Aceh Kaya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
8.1.3.		Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.Miliar	4.973	5.000	-	5.500	-	6.050	-	6.650	-	7.300	-	7.300	-		
8.1.3.1.		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN) (triliun)	Rp (Triliun)	5	5	417.515.540	6	14.911.135.838	6	10.515.491.040	7	11.254.661.150	7	11.993.831.261	7	49.092.634.829	Aceh Kaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
8.1.3.2.		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya minat investasi	Investor	388	559	6.609.964.623	-	-	-	-	-	-	-	-	559	6.609.964.623	Aceh Kaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
8.1.4.		Meningkatnya kontribusi pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Aceh	%	2,7	2,96	-	3,11	-	3,25	-	3,39	-	3,54	-	3,54	-		
8.1.4.1.		Program pemasaran pariwisata	Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan	Hari	1,97	-	-	1) 3.292.320; 2) 3	18.150.000.000	1) 3.786.169; 2) 3	20.508.256.863	1) 4.354.094; 2) 3	22.380.099.094	1) 5.007.208; 2) 3	27.442.907.824	1) 5.007.208; 2) 3	88.481.263.781	Aceh Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
8.1.4.2.		Program Pengembangan Kemitraan	Terjalinnnya kemitraan pengelolaan pariwisata	Orang	900	900	5.598.183.000	-	-	-	-	-	-	-	-	900	5.598.183.000	Aceh Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
8.1.4.3.		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan wusantara dan mancanegara	Wisatawan	2.489.467	2.862.887	6.832.302.296	-	-	-	-	-	-	-	-	2.862.887	6.832.302.296	Aceh Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
8.1.4.4.		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kawasan pariwisata strategis provinsi	Kawasan	1	3	115.758.652.564	3	58.717.058.570	3	83.131.035.037	3	87.047.985.188	3	118.022.073.341	3	462.676.804.700	Aceh Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
8.2.		Menurunnya Angka Pengangguran	Persentase angka pengangguran (TPT)	%	6,57	6,45	-	6,30	-	6,25	-	6,22	-	6,00	-	6,00	-		
8.2.1.		Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri, pariwisata dan jasa lainnya	Orang	123.588	138.951	-	150.882	-	162.813	-	174.744	-	186.675	-	186.675	-		
8.2.1.1.		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong	-	-	-	-	14.801.089.700	-	5.200.000.000	-	3.244.115.319	-	3.406.321.085	-	3.576.637.139	-	30.228.163.243	Aceh Kreatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
			Jumlah Gampong yang cepat berkembang	Jumlah	100	115	-	230	-	345	-	460	-	575	-	575	-	Aceh Kreatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
			Jumlah Kawasan Potensi Gampong yang dikembangkan	Jumlah	5	10	-	23	-	43	-	63	-	73	-	73	-	Aceh Kreatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
8.2.1.3.		Program Pengembangan	-	-	-	-	1.286.175.000	-	3.720.720.257	-	1.598.625.000	-	1.678.556.250	-	1.762.484.063	-	10.046.560.570	Aceh Kreatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Lembaga Ekonomi Gampong																		
			Jumlah Lembaga Ekonomi Gampong yang Aktif	Jumlah	252	535	-	835	-	1135	-	1435	-	1735	-	1735	-	Aceh Kreatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
			Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong yang dikembangkan	Jumlah	90	100	-	115	-	230	-	345	-	450	-	450	-	Aceh Kreatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
8.2.1.5.		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	320	1.574	20.561.720.000	978	17.254.780.000	1.174	37.454.857.620	1.408	37.030.345.950	1.690	47.000.000.000	1.690	159.301.703.570	Aceh Kreatif	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
8.2.1.6.		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah pemutusan hubungan kerja	Kasus	8	8	6.281.276.826	8	5.000.000.000	7	5.500.000.000	6	5.600.000.000	5	5.783.942.075	5	28.165.218.901	Aceh Kreatif	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
8.2.1.7.		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari IKM	Orang	77.000	77.380	7.094.595.316	-	-	-	-	-	-	-	-	77.380	7.094.595.316	Aceh Kreatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
8.2.1.8.		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	70	70	16.727.986.998	80	11.752.532.674	85	5.641.238.099	90	6.992.535.345	100	10.093.266.216	100	51.207.559.332	Aceh Kreatif	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
Misi 9 : Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan							123.523.114.385		138.604.357.833		137.758.624.899		130.711.738.125		130.819.271.387		661.417.106.629			
9.1.		Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	0,389	0,361		0,348		0,336		0,324		0,313		0,313				
9.1.1.		Meningkatnya transparansi informasi publik	Persentase informasi publik yang diumumkan	%	30,00	50,00		65,00		85,00		90,00		95,00		95,00				
9.1.1.1.		Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Persentase press release/iklan/pariwara yang di Publikasikan melalui Media Massa Lokal terkemuka dan nasional	%	78	80	10.467.280.847	83	10.276.009.021	85	4.209.254.585	90	4.419.717.314	95	4.640.703.180	95	34.012.964.947	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Biro Hubungan Masyarakat	
9.1.1.2.		Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media		-	-	-	4.626.530.000	-	6.626.685.000	-	3.103.365.639	-	3.258.533.921	-	3.421.460.617	-	21.036.575.177	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	
			Jumlah Berita yang di Publikasikan di Media Massa	Jumlah	112	500	-	600	-	700	-	800	-	900	-	900	-	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	
			Jumlah Mas Media yang memuat berita	Jumlah	36	41	-	46	-	51	-	56	-	56	-	56	-	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	
9.1.1.3.		Program Pengembangan Data dan Informasi				34.420.000		34.420.000		47.706.120		52.476.732		57.724.405		226.747.257				
			Jumlah Pengakses Data dan Informasi pada Website Kantor Penghubung Aceh di Jakarta	Orang	1.300	1.500	-	1.700	-	1.900	-	2.500	-	2.800	-	10.400	-	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tingkat Kepuasan Pengakses Data dan Informasi pada Website Kantor Penghubung Aceh di Jakarta	%	30	30		34		38		50		56		56		Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
9.1.1.4.		Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta instansi terkait	Persentase informasi daeah yang terintegrasi	%	78	80	5.742.812.000	83	4.921.096.903	85	1.513.053.943	90	1.588.706.640	93	1.636.367.840	93	15.402.037.326	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Biro Hubungan Masyarakat
9.1.1.5.		Program Pengembangan Data dan Statistik		-	-	-	211.060.000	-	2.496.644.863	-	335.501.775	-	352.276.864	-	369.890.707	-	3.765.374.209	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
			Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online)	Jumlah	250	500	-	600	-	700	-	800	-	900	-	900	-	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
			Jumlah Informasi Publik yang diakses	Jumlah	150	200	-	250	-	300	-	350	-	400	-	400	-	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
			Persentase pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik	%	45,00	53,00		64,00		71,00		83,00		96,00		96,00			
9.1.1.7.		Program Pengembangan Data dan Informasi	Tingkat Kepuasan Pengakses Data dan Informasi	%	78	80	1.044.148.600	83	4.871.332.230	85	930.333.638	90	976.850.320	93	1.006.155.829	93	8.828.820.617	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Biro Hubungan Masyarakat
9.1.1.8.		Program Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah/jenis data dan informasi yang tersedia	Indikator	62	70	620.333.495	-	-	-	-	-	-	-	-	620.333.495	-	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Biro Administrasi Pembangunan
9.1.1.9.		Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	%	80	80	4.582.459.282	80	11.030.991.134	90	10.654.635.500	90	11.085.000.000	90	11.500.000.000	90	48.853.085.916	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
			Persentase PPID OPD yang aktif	%	20,00	23,00		35,00		47,00		60,00		70,00		70,00			
9.1.1.10.		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		-	-	-	29.965.717.631	-	27.510.434.216	-	18.421.867.581	-	19.644.388.394	-	16.354.409.734	-	111.896.817.556	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
			Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	%	60	80	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	%	25	50	-	70	-	80	-	100	-	100	-	100	-	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9.1.2.		Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik.	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu.	%	15,00	30,00		43,00		56,00		60,00		65,00		65,00			
9.1.2.1.		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Pemeliharaan Arsip dan Dokumen Perpustakaan	%	75	80	652.580.000	85	870.000.000	90	953.780.000	100	1.157.005.320	100	1.392.909.834	100	5.026.275.154	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
9.1.2.2.		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPA yang sudah menerapkan Arsip secara baku	%	75	80	344.512.500	85	817.312.606	90	820.012.606	100	1.437.954.497	100	1.681.224.172	100	5.101.016.381	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
9.1.2.3.		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Dokumen/ Arsip Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	Dok/ Arsip	9.000	10.000	2.556.400.000	11.000	2.656.905.500	12.000	2.555.860.000	13.000	5.130.926.000	14.000	4.044.889.599	14.000	16.944.981.099	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
9.1.2.4.		Program Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kepegawaian	Persentase Pengembangan Sistem dan Informasi Kepegawaian terintegrasi	%	45	55	-	65	3.095.000.000	75	6.150.000.000	85	6.655.000.000	90	7.320.500.000	90	23.220.500.000	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Kepegawaian Aceh
9.1.2.5.		Program pengembangan data dan informasi secara terpadu	Persentase integrasi sistem informasi sektoral	%	10	-	-	-	-	75	22.223.463.480	80	6.000.000.000	90	5.500.000.000	90	33.723.463.480	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
9.1.2.6.		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Orang	140	150	1.812.880.000	180	3.063.946.000	190	1.262.391.216	200	1.325.510.777	220	1.391.786.315	220	8.856.514.308	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
9.1.2.7.		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terkelolanya database dan informasinya, serta terfasilitasinya penguatan kapasitas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil	%	40	45	8.908.322.000	50	13.889.129.704	60	8.871.858.651	65	10.245.851.181	70	11.409.889.490	70	53.325.051.026	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
9.2.		Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
9.2.1.		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
9.2.1.1.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	1.625.175.000	80	2.444.953.599	80	1.500.000.000	90	1.550.000.000	90	1.650.000.000	90	8.770.128.599	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Pangan Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9.2.1.2.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	-	-	80	1.550.000.000	80	1.700.000.000	90	1.900.000.000	90	1.512.200.000	90	6.662.200.000	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
9.2.1.3.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	2.880.726.800	80	4.466.026.980	80	3.900.000.000	90	4.250.000.000	90	4.445.000.000	90	19.941.753.780	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
9.2.1.4.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	3.435.050.000	80	3.500.000.000	80	3.500.000.000	90	3.700.000.000	90	4.000.000.000	90	18.135.050.000	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
9.2.1.5.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	1.870.861.380	80	2.062.801.495	80	1.920.000.000	90	2.000.000.000	90	2.100.000.000	90	9.953.662.875	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
9.2.1.6.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	2.000.000.000	80	1.683.976.125	80	3.150.000.000	90	3.000.000.000	90	3.050.000.000	90	12.883.976.125	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
9.2.1.7.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	9.469.390.000	80	6.723.378.449	80	5.500.000.000	90	5.300.000.000	90	5.400.000.000	90	32.392.768.449	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
9.2.1.8.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	4.337.525.000	80	2.903.950.608	80	4.200.000.000	90	4.300.000.000	90	4.162.869.500	90	19.904.345.108	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Peternakan Aceh
9.2.1.9.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	2.403.135.125	80	2.500.000.000	80	2.500.000.000	90	2.600.000.000	90	2.800.000.000	90	12.803.135.125	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
9.2.1.10.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	6.175.084.798	80	500.900.000	80	1.376.540.165	90	1.376.540.165	90	1.376.540.165	90	10.805.605.293	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
9.2.1.11.		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	80	80	2.945.123.684	80	2.394.550.000	80	7.220.000.000	90	7.575.000.000	90	7.918.500.000	90	28.053.173.684	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9.2.1.12.		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan sosial budaya	%	80	80	1.583.128.500	80	1.869.000.000	80	4.300.000.000	90	4.515.000.000	90	4.740.750.000	90	17.007.878.500	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
9.2.1.13.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan proses perencanaan tepat waktu	%	80	80	10.817.051.999	80	8.827.758.400	80	9.439.000.000	90	9.615.000.000	90	10.035.500.000	90	48.734.310.399	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
9.2.1.14.		Program Inovasi Daerah	Kebijakan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan	Kebijakan	1	1	427.528.741	5	3.230.000.000	5	3.550.000.000	5	3.550.000.000	5	3.675.000.000	5	14.432.528.741	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
9.2.1.15.		Program Kerjasama Pembangunan	Sinkronisasi kebijakan pembangunan Aceh dengan provinsi Se-Sumatera	%	80	80	589.982.855	85	1.787.155.000	85	1.950.000.000	87	2.150.000.000	90	2.225.000.000	90	8.702.137.855	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
9.2.1.16.		Program Diseminasi dan Informasi Teknologi	Tersosialisasinya hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Diseminasi	5	6	83.894.148	-	-	-	-	-	-	-	6	83.894.148	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	
9.2.1.17.		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terkoordinirnya kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan	%	80	80	1.310.000.000	-	-	-	-	-	-	-	80	1.310.000.000	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	
Misi 10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan							3.612.565.720.280		2.295.441.786.261		2.315.723.267.187		2.420.259.898.593		1.774.128.391.414		12.418.119.063.735		
10.1.		Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Williamson (IW)	Indeks	0,389	0,361		0,348		0,336		0,324		0,313		0,313			
10.1.1.		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase peningkatan standar pelayanan fasilitas perhubungan	%	38	42,00		67,00		73,00		83,00		92,00		92,00			
10.1.1.1.		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah penurunan kasus angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	700	700	44.755.214.338	700	33.222.900.000	800	17.228.850.572	800	20.043.225.859	900	17.634.218.231	900	132.884.409.000	Aceh Seumeugot	Dinas Perhubungan Aceh
10.1.1.2.		Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase peningkatan kondisi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	%	63	-	-	74	245.430.186.825	79	162.416.561.906	85	194.046.529.783	92	116.372.566.748	92	718.265.845.262	Aceh Seumeugot	Dinas Perhubungan Aceh
10.1.1.3.		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase peningkatan kondisi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	%	60	65	1.246.503.800	-	-	-	-	-	-	-	65	1.246.503.800	Aceh Seumeugot	Dinas Perhubungan Aceh	
10.1.1.4.		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	%	88	90	163.317.091.966	-	-	-	-	-	-	-	90	163.317.091.966	Aceh Seumeugot	Dinas Perhubungan Aceh	
10.1.1.5.		Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang tersertifikasi (SKA)	%	95	100	764.164.012	-	-	-	-	-	-	-	100	764.164.012	Aceh Seumeugot	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Persentase kelancaran arus lalu lintas (Indeks konektivitas)	%	3,22	3,30		3,39		3,43		3,52		3,52		3,52			
10.1.1.6.		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan Aceh dalam kondisi mantap	%	61,89	-	82,26	1.142.485.125.717	87,71	1.110.372.555.843	92,88	1.114.363.048.231	98,65	483.616.195.370	98,65	3.850.836.925.161	Aceh Seumeugot	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan	Indeks	0,5	0,56	0,72		0,85		0,9	0,98		0,98					
10.1.1.7.		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	%	50	60	14.667.300.000	65	13.661.061.070	70	26.509.538.833	75	34.378.569.249	80	44.690.670.608	80	133.907.139.760	Aceh Seumeugot	Dinas Perhubungan Aceh
			Indeks keselamatan berlalu lintas																
10.1.1.8.		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase jumlah kendaraan bermotor layak jalan	%	13,46	21,74	3.545.500.000	-	-	-	-	-	-	-	21,74	3.545.500.000	Aceh Seumeugot	Dinas Perhubungan Aceh	
			Persentase jalan kondisi mantap																
10.1.1.9.		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan Aceh dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	KM	2258,6	2365	1.581.081.127.276	2365	11.609.871.326	-	-	-	-	-	2365	1.592.690.998.602	Aceh Seumeugot	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
10.1.1.10.		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	KM	1630,4	1.833	139.059.605.404	1.833	5.000.000.000	-	-	-	-	-	1.833	144.059.605.404	Aceh Seumeugot	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
10.1.1.11.		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Proporsi Panjang Jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	82	90	59.015.554.760	-	-	-	-	-	-	-	90	59.015.554.760	Aceh Seumeugot	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
10.1.1.12.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase alat berat dan sarana laboratorium kebinamargaan dalam kondisi baik	%	86	90	12.267.236.581	-	-	-	-	-	-	-	90	12.267.236.581	Aceh Seumeugot	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
10.1.2.		Berkembangnya wilayah pertumbuhan baru	Jumlah kawasan perkotaan baru (transmigrasi)	Kawasan	1	3		3		3		3		3					
10.1.2.1.		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase pencapaian SPM sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	%	45	95	58.917.599.389	96	43.572.517.468	97	43.220.503.373	98	41.422.154.922	99	45.376.386.336	99	232.509.161.488	Aceh Seumeugot	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
10.1.2.2.		Program Pengembangan sosial ekonomi wilayah transmigrasi	Persentase masyarakat kawasan transmigrasi yang keluar dari desil 1 dan 2	%	35	-	-	30	15.478.315.000	45	21.772.092.730	70	21.486.660.963	100	23.827.174.854	100	82.564.243.547	Aceh Seumeugot	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
10.3.		Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar	Peningkatan cakupan pelayanan dasar	%	75,21	77,07		78,06		78,97		79,84		80,63		80,63			
10.3.1.		Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase rumah layak huni	%	54,34	57,73		59,29		60,77		62,17		63,49		63,49			

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.3.1.1.		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Unit	34.311	40.311	291.972.099.967	46.311	530.400.000.000	52.311	536.781.000.000	58.311	537.433.490.590	68.311	541.038.685.246	68.311	2.437.625.275.803	Aceh Seuminya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
			Persentase pemukiman Layak huni	%	96,08	96,42		96,82		97,16		97,5		97,77		97,77			
10.3.1.2.		Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Luas Permukiman yang Tertangani	Ha	500	-	-	600	30.884.790.897	1100	79.768.840.728	1600	80.100.696.399	2000	103.134.119.919	2000	293.888.447.943	Aceh Seumeugot	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
10.3.1.3.		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesasaan	Rasio pemukiman layak huni	Rasio Index	0,961	0,964	263.749.687.042	0,964	589.425.101	-	-	-	-	-	-	0,964	264.339.112.143	Aceh Seumeugot	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
			Akses sanitasi layak																
10.3.1.4.		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Panjang drainase dalam kondisi baik	km	927,4	1145	67.532.502.643	1145	524.175.611	-	-	-	-	-	-	1145	68.056.678.254	Aceh Seumeugot	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
			Persentase rumah tangga dengan akses air bersih																
10.3.1.5.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum	%	70	60	120.083.043.862	-	-	-	-	-	-	-	-	60	120.083.043.862	Aceh Seumeugot	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
10.3.2.		Meningkatnya pelayanan pertahan																	
10.3.2.1.		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Sengketa dan konflik pertanahan yang diselesaikan	%/Kasus	-	20%	701.438.000	40%	700.000.000	60%/18 kasus	550.000.000	80%/24 kasus	550.000.000	100%/33 Kasus	550.000.000	100%/33 Kasus	3.051.438.000	Aceh Seumeugot	Dinas Pertanahan Aceh
			Penyelesaian Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi	Dokumen	2	5		5		5		5		5		22			
10.3.2.2.		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik dan Meningkatnya pengsertifkatan tanah masyarakat miskin	Sertifikat	-	4000	4.927.326.000	4000	5.700.000.000	4000	5.000.000.000	4000	5.000.000.000	4000	5.000.000.000	4.000	25.627.326.000	Aceh Seumeugot	Dinas Pertanahan Aceh
			Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri		0	3		3		3		6		8		23			
10.3.2.3.		Program Penguatan Kelembagaan Pertanahan	Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	Kab/Kota	-	-	-	3	1.065.266.000	3	1.925.000.000	6	2.117.500.000	8	2.329.250.000	20	7.437.016.000	Aceh Seumeugot	Dinas Pertanahan Aceh
10.3.2.4.		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	Aplikasi	-	3	546.428.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	546.428.000	Aceh Seumeugot	Dinas Pertanahan Aceh
10.4.		Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,38	74,00		74,00		74,00		75,00		75,00		75,00			

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
10.4.1.		Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Persentase Permohonan Kesesuaian Ruang Terhadap RTRW	%	94,30	95,50		95,80		97,20		97,90		98,40		98,40				
10.4.1.1.		Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW	%	93	-	-	96	11.333.494.928	97	7.683.379.617	98	7.927.909.579	98	7.296.892.537	98	34.241.676.661	Aceh Green	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
			- Indeks kualitas Air	Indeks	67,84	72		75		78		80		59,50		59,50				
			- Indeks kualitas Udara	Indeks	89,87	90,5		91,5		93		95		97		97				
10.4.1.2.		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Optimalisasi kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKA=57,12;IKU=56,8	IKA=60;IKU=56,8	1.961.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.961.850.000	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh		
10.4.1.3.		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat ketaatan terhadap RTRW	%	18	15	583.449.814	-	-	-	-	-	-	-	-	15	583.449.814	Aceh Green	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
10.4.1.4.		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	17,76	18	12.730.839.891	-	1.365.930.367	-	-	-	-	-	-	18	14.096.770.258	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
10.4.1.5.		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Peningkatan persentase hutan dan lahan	%	69	75	297.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75	297.000.000	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
10.4.1.6.		Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kab/Kota dengan Ketersediaan dokumen tata ruang dan kawasan strategis Kab/Kota	%	76	80	1.191.484.600	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.191.484.600	Aceh Green	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
10.4.1.7.		Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatnya indeks kualitas udara	%	Indeks	-	-	-	-	58	8.500.000.000	58,5	8.000.000.000	59	7.000.000.000	59	23.500.000.000	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
10.4.1.8.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	%	45,7	46	18.450.961.859	48	2.200.000.000	50	8.140.849.688	52	27.587.983.889	54	16.810.351.217	54	73.190.146.653	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)																	
10.4.1.9.		Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH	73,38	-	74	15.402.000.000	74,5	77.535.942.770	75	80.934.031.405	75	94.143.429.700	75	268.015.403.875	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh		
10.4.2.		Bertambahnya luasan kawasan konservasi perairan laut dan pesisir	Luas kawasan konservasi perairan	Ha	77.856,66	145.237,77		212.618,89		280.000,00		280.500,00		281.100,00		281.100,00				
10.4.2.1.		Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Perairan	Ha	77.856	-	212.619	8.037.486.700	280.000	6.000.000.000	280.500	6.300.000.000	281.100	6.500.000.000	281.100	26.837.486.700	Aceh Green	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.4.2.2.		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Berkurangnya kasus IUU fishing	%	10	10	4.692.585.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4.692.585.000	Aceh Green	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
			Luas mangrove yang dikonservasi	Ha	13.654,00	14.000,00		14.100,00		14.200,00		14.300,00		14.400,00		14.400,00			
10.4.2.3.		Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Penurunan persentase luas kerusakan kawasan ekosistem pesisir dan laut	%	74	80	838.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	838.540.000	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
10.5.		Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan	Indekutupan hutan dan lahan	Indeks	55,63	66,00		67,25		69,00		71,00		72,00		72,00			
10.5.1.		Luas kawasan hutan yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas tutupan lahan	Indeks	55,63	56,50		56,50		57,00		57,50		58,00		58,00			
10.5.1.1.		Program Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan	Meningkatnya Indeks Tutupan Hutan	ITH	65,18	-	-	67,25	97.941.584.886	69	116.144.434.651	71	117.166.792.935	72	133.302.070.769	72	464.554.883.241	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
			Luas alih fungsi lahan dan hutan																
10.5.1.2.		Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW	%	82	85	4.620.324.128	-	-	-	-	-	-	-	-	85	4.620.324.128	Aceh Seumeugot	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
10.5.1.3.		Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang	Persentase kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW	%	82	85	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)	Biro Administrasi Pembangunan
10.5.2.		Terjaganya keanekaragaman hayati	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati	Rasio	0,499	0,499		0,499		0,499		0,499		0,499		0,499			
10.5.2.1.		Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Penurunan luas kawasan hutan yang dirambah	Ha	8.143	445	2.133.669.000	-	-	-	-	-	-	-	-	445	2.133.669.000	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
10.5.2.2.		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Kab/Kota	3	3	7.880.291.441	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.880.291.441	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
10.5.2.3.		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	0,49	0,49	55.338.531.469	-	-	-	-	-	-	-	-	0,49	55.338.531.469	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
10.5.2.4.		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	1.727	1.806	14.892.849.502	-	-	-	-	-	-	-	-	1.806	14.892.849.502	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Kode	Visi & Misi	Sasaran/Program Pembangunan Aceh	Indikator/Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMA	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											15 Unggulan Aceh Hebat	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.5.2.5.		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	%	80	90	4.862.410.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90	4.862.410.000	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
10.5.3.		Menguatnya kelembagaan KPH	Persentase kelompok usaha perhutanan sosial		1,67 (30.000Ha)	6,13 (110.000 Ha)		10,58 (190.000 Ha)	15,04 (270.000 Ha)		19,50 (350.000 Ha)	23,96 (430.000 Ha)		23,96 (430.000Ha)					
10.5.3.1.		Program pemulihan spesies kunci terancam punah dan mitigasi konflik satwa liar	Menurunnya persentase konflik satwa liar	%	0	-	-	-	75,00	11.772.900.000	72,00	10.681.842.600	70,00	10.188.481.875	70,00	32.643.224.475		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
10.5.3.2.		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan luas hutan sosial yang dibina	Ha	30.000	3.486	35.036.218.074	-	-	-	-	-	-	-	3.486	35.036.218.074	Aceh Green	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
10.6.		Meningkatkan tatakelola kebencanaan	Indeks resiko bencana	Indeks	160/ sedang	140/ sedang		137,5/ sedang	135/ sedang		132,5/ sedang	130/ sedang		130/ sedang					
10.6.1.		Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan	Rasio kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	Rasio	0,33/ Rendah	0,35/ Rendah		0,55/ Sedang	0,65/ Sedang		0,75/ Sedang	0,80/ Tinggi		0,80/ Tinggi					
			Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana																
10.6.1.1.		Program Penanggulangan Bencana	Persentase pengurangan risiko bencana	Indeks	160	-	-	137,5	76.837.654.365	135	74.400.816.476	132,5	110.719.462.189	130	115.317.898.004	130	377.275.831.034	Aceh Green	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
10.6.1.2.		Program Pengendalian Banjir	Persentase luas genangan banjir luapan sungai dan pasang purnama	%	68,08	63,53	535.013.467.349	-	-	-	-	-	-	-	63,53	535.013.467.349	Aceh Green	Dinas Pengairan Aceh	
10.6.1.3.		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Persentase pemulihan kawasan terdampak bencana	%	70	75	39.436.882.764	-	-	-	-	-	-	-	75	39.436.882.764	Aceh Green	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
			Ketersediaan data potensi dan risiko bencana (Tersedia/ Tidak Tersedia)																
10.6.1.4.		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Menurunnya Persentase korban terdampak bencana	%	88	95	1.725.352.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.725.352.000	Aceh Green	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
			Jumlah Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana)																
10.6.1.5.		Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	79	80	35.180.453.500	80	2.000.000.000	-	-	-	-	-	80	37.180.453.500	Aceh Green	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
10.6.1.6.		Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	76	80	7.249.136.849	-	-	-	-	-	-	-	80	7.249.136.849	Aceh Green	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT ACEH

Kerangka pendanaan pembangunan Aceh Tahun 2018-2022 menjelaskan belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, serta kapasitas riil. Di samping itu, dijelaskan juga indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan Tahun 2018-2022. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan 7.2 berikut ini:

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Aceh Tahun 2018-2022

Uraian Belanja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kapasitas Riil	11.149.322.566.201	8.882.516.606.815	8.777.012.022.344	9.394.913.747.550	10.155.000.047.986
BELANJA	15.316.396.314.535	15.781.318.934.079	15.661.574.407.248	16.439.912.077.985	17.378.737.862.733
Belanja Tidak Langsung	4.167.073.748.334	6.898.802.327.264	6.884.562.384.903	7.044.998.330.436	7.223.737.814.747
Belanja Pegawai	2.523.587.257.517	2.469.458.697.631	2.547.987.484.216	2.629.013.486.214	2.728.915.998.690
Belanja Hibah	915.927.600.000	973.573.038.000	730.179.778.500	693.670.789.575	658.987.250.096
Belanja Subsidi	-	20.000.000.000	35.000.000.000	52.500.000.000	78.750.000.000
Belanja Bantuan Sosial	20.600.383.638	21.749.600.000	45.000.000.000	50.000.000.000	55.000.000.000
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	675.192.514.279	691.397.372.446	736.640.149.994	785.040.968.582	833.441.787.171
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.765.992.900	2.696.149.230.604	2.761.491.928.613	2.796.776.865.195	2.841.820.255.410
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	26.474.388.583	28.263.043.581	37.996.220.869	26.822.523.380
Belanja Langsung	11.149.322.566.201	8.882.516.606.815	8.777.012.022.344	9.394.913.747.550	10.155.000.047.986
Belanja Pegawai	334.479.676.986	367.676.700.472	591.160.601.210	623.761.547.662	666.060.415.461
Belanja Barang dan Jasa	4.459.729.026.480	3.405.935.962.537	2.552.042.262.587	2.692.780.655.804	2.875.385.007.411
Belanja Modal	6.355.113.862.735	5.108.903.943.806	5.633.809.158.548	6.078.371.544.083	6.613.554.625.114

Selanjutnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan Aceh Tahun 2018-2022 diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2018-2022

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	WAJIB					9.075.529.271.338		7.234.186.016.396		7.153.445.671.580		7.659.434.558.412		8.176.074.702.996		39.298.670.220.722				
1	1	WAJIB PELAYANAN DASAR				7.689.170.841.977		5.756.995.888.791		5.911.007.765.466		6.225.932.176.671		6.625.880.497.952		32.208.987.170.857				
1	1	1	Pendidikan			1.739.696.226.698		1.022.373.236.741		1.460.505.655.929		1.657.864.288.968		2.008.974.822.037		7.889.414.230.373				
1	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	9.133.022.800	100	12.991.052.800	100	28.587.918.300	100	31.446.710.130	100	37.736.052.156	100	119.894.756.186	Dinas Pendidikan Aceh
1	1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	5.882.681.000	100	11.053.000.000	100	43.865.408.100	100	49.296.948.910	100	59.156.338.692	100	169.254.376.702	Dinas Pendidikan Aceh
1	1	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	0	-	100	1.902.000.000	100	1.049.950.000	100	1.154.945.000	100	1.385.934.000	100	5.492.829.000	Dinas Pendidikan Aceh
1	1	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	12.979.185.000	100	2.797.641.827	100	5.655.213.200	100	6.220.734.520	100	7.464.881.424	100	35.117.655.971	Dinas Pendidikan Aceh
1	1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	55	60	54.633.825.948	61	5.301.047.448	64	10.110.840.000	65	12.253.008.000	67	14.448.318.831	67	96.747.040.227	Dinas Pendidikan Aceh
1	1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan Pendidikan Tingkat SD/MI dan SMP/MTs	%	94	96	388.596.401.992	98	29.117.739.965	-	-	-	-	98	417.714.141.957	Dinas Pendidikan Aceh		
1	1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Meningkatkan APS, dan APM jenjang SMA/SMK/MA/Paket A	%	78	80	995.097.270.197	85	500.000.000	-	-	-	-	85	995.597.270.197	Dinas Pendidikan Aceh		
1	1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase angka melek huruf	%	97,94	98,1	16.303.087.126	98,2	8.919.384.700	99	7.295.785.000	99,3	8.395.363.500	99,5	10.074.436.200	99,5	50.988.056.526	Dinas Pendidikan Aceh
1	1	1	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Angka Melek Huruf usia 15 - 24 tahun	%	97	97	32.279.801.006	97,5	650.000.000	-	-	-	-	97,5	32.929.801.006	Dinas Pendidikan Aceh		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD										
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi (PPG)	%											190.146.891.933	344.066.154.561	373.109.596.988	411.091.556.686	493.309.868.023	1.811.724.068.191	Dinas Pendidikan Aceh		
				Jenjang SMA	%	37,5	38,5	-	45,5	-	59,5	-	72,5	-	87,5	-	87,5	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh	
				Jenjang SMK	%	25,3	29,3	-	39,3	-	50,3	-	63,3	-	78,3	-	78,3	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Aceh	
				Jenjang SLB	%	24,5	14,9	-	24,9	-	35,9	-	48,9	-	63,9	-	63,9	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	%	55	60	21.791.237.102	70	23.778.595.476	80	18.860.236.250	80	20.927.759.875	100	25.113.311.850	100	110.471.140.553	Dinas Pendidikan Aceh					
1	1	1	22	Program Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Berkarakter Kearifan Lokal	Persentase Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA) yang menerapkan pendidikan berbasis kearifan lokal	%	85	90	12.852.822.594	-	-	-	-	-	-	-	90	12.852.822.594	Dinas Pendidikan Aceh						
1	1	1	23	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	%	35	0	-	75	178.243.053.837	80	567.845.205.392	85	611.022.428.077	90	786.436.420.600	90	2.143.547.107.906	Dinas Pendidikan Aceh					
1	1	1	24	Program Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Persentase angka partisipasi kasar (APK) SLB dan Layanan Khusus	%	55,5	0	-	59,2	14.340.000.000	61,2	13.201.920.000	63,4	19.749.962.000	65,1	23.699.954.400	65,1	70.991.836.400	Dinas Pendidikan Aceh					
1	1	1	25	Program Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan	Meningkatnya Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	%	45,1	0	-	60,2	28.462.918.540	65,1	17.696.530.000	67,2	24.329.173.000	70	29.195.007.600	70	99.683.629.140	Dinas Pendidikan Aceh					
1	1	1	27	Program Peningkatan Pendidikan Menengah Atas dan Sederajat	Persentase angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA	%	87,52	0	-	89	39.600.000.000	90	35.994.748.000	92	41.818.135.931	100	50.181.763.117	100	167.594.647.048	Dinas Pendidikan Aceh					
1	1	1	28	Program Peningkatan Pendidikan Menengah Kejuruan	Persentase angka partisipasi kasar (APK) SMK	%	87,47	0	-	89	47.655.094.488	90	49.608.360.199	92	52.876.166.512	100	63.451.399.813	100	213.591.021.012	Dinas Pendidikan Aceh					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	1	1	29	Program Wajib Belajar Pendidikan Dua belas Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,13	0	-	14,39	272.995.553.099	14,56	287.623.944.500	14,73	367.281.396.827	14,9	407.321.135.331	14,9	1.335.222.029.757	Dinas Pendidikan Aceh
1	1	2		Kesehatan				2.000.601.459.962		1.734.046.308.901		1.658.876.757.954		1.651.512.793.512		1.879.038.302.326		8.924.075.622.655		
1	1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	6.566.754.478	100	5.575.032.630	100	7.110.833.561	100	7.180.063.881	100	7.447.907.788	100	33.880.592.338	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
1	1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	7.117.716.627	100	7.917.774.682	100	7.755.466.132	100	7.693.366.032	100	8.081.566.032	100	38.565.889.505	BLUD Rumah Sakit Jiwa
1	1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	21.569.252.018	100	13.287.324.344	100	13.287.324.344	100	13.287.324.344	100	13.287.324.344	100	74.718.549.394	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
1	1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	9.534.522.172	100	9.521.038.808	100	8.128.732.500	100	8.535.169.125	100	8.961.927.581	100	44.681.390.186	Dinas Kesehatan Aceh
1	1	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.478.492.000	100	1.089.172.181	100	550.240.000	100	580.240.000	100	632.750.000	100	4.330.894.181	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
1	1	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	-	100	52.500.000	100	810.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.262.500.000	BLUD Rumah Sakit Jiwa
1	1	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2.516.000.000	-	-	100	2.516.000.000	100	2.516.000.000	100	2.516.000.000	100	10.064.000.000	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
1	1	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	16.016.015.661	100	4.437.180.907	100	6.500.255.337	100	6.825.268.104	100	7.166.531.509	100	40.945.251.518	Dinas Kesehatan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	1	2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	460.040.000	100	96.800.000	100	488.540.000	100	508.540.000	100	577.669.345	100	2.131.589.345	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
1	1	2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	242.500.000	100	286.000.000	100	216.450.000	100	302.900.000	100	302.900.000	100	1.350.750.000	BLUD Rumah Sakit Jiwa
1	1	2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	9.000.000	-	-	100	1.740.000.000	100	1.740.000.000	100	1.740.000.000	100	5.229.000.000	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
1	1	2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	457.360.000	-	-	100	826.875.000	100	868.218.750	100	911.629.688	100	3.064.083.438	Dinas Kesehatan Aceh
1	1	2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	81.525.000	100	76.925.000	100	55.125.000	100	55.125.000	100	60.775.313	100	329.475.313	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
1	1	2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	50.000.000	100	66.000.000	100	49.850.000	100	49.850.000	100	49.850.000	100	265.550.000	BLUD Rumah Sakit Jiwa
1	1	2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	10.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	20.010.000.000	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
1	1	2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	1.390.000.000	100	1.410.000.000	100	1.378.125.000	100	1.447.031.250	100	1.519.382.813	100	7.144.539.063	Dinas Kesehatan Aceh
1	1	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	121.000.000	100	122.210.000	100	123.432.100	100	366.642.100	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	1	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	126.994.817	100	128.001.328	100	128.001.328	100	382.997.473	BLUD Rumah Sakit Jiwa
1	1	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	148.500.000	100	159.985.000	100	161.584.850	100	470.069.850	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
1	1	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	525.697.000	100	996.697.000	100	735.000.000	100	750.000.000	100	780.000.000	100	3.787.394.000	Dinas Kesehatan Aceh
1	1	2	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial	%	70	80	5.863.237.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	5.863.237.000	Dinas Kesehatan Aceh
1	1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	600.000.000	-	573.162.000	-	694.870.000	-	694.870.000	-	694.870.000	-	-	3.257.772.000	BLUD Rumah Sakit Jiwa
					Meningkatnya Jumlah pasien dengan gangguan jiwa berat yang diobati dan tidak ditelantarkan	Jumlah pasien	500	500	-	1.700	-	1.900	-	2.100	-	2.300	-	2.300	-	BLUD Rumah Sakit Jiwa
					Persentase pasien yang kembali ke RSJ setelah dipulangkan (setelah mendapat perawatan)	%	55	55	-	50	-	45	-	40	-	30	-	30	-	BLUD Rumah Sakit Jiwa
1	1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	%	50	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	22.363.257.000	39.580.810.000	12.168.536.000	12.407.053.324	12.750.612.000	99.270.268.324	Dinas Kesehatan Aceh						
				Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	60	64	-	84	-	100	-	100	-	100	-	100	Dinas Kesehatan Aceh		
				Persentase RS yang terakreditasi	%	40	40	-	60	-	100	-	100	-	100	-	100	Dinas Kesehatan Aceh		
1	1	2	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan memenuhi standar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Jumlah	6	11	899.136.379	-	-	-	-	-	11	899.136.379	Dinas Kesehatan Aceh			
1	1	2	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Puskesmas yang mengembangkan program Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	%	3	4	150.000.000	-	-	-	-	4	150.000.000	Dinas Kesehatan Aceh				
1	1	2	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase PHBS di Masyarakat	%	33	38	192.000.000	-	-	-	-	38	192.000.000	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin				
1	1	2	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase PHBS di Masyarakat	%	33	38	8.690.492.000	43	3.373.999.962	48	3.757.950.754	53	4.000.000.000	55	4.500.000.000	55	24.322.442.716	Dinas Kesehatan Aceh
1	1	2	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		-	-	-	12.642.418.967	6.250.000.000	3.039.450.000	4.389.849.992	5.000.000.000	31.321.718.959	Dinas Kesehatan Aceh					
				Persentase Stunting	%	35,7	33	-	32	-	28	-	24	-	20	-	20	-	Dinas Kesehatan Aceh	
				Persentase balita gizi buruk	%	3	3	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Dinas Kesehatan Aceh	
				Prevalensi balita gizi Kurang	%	14	14	-	13	-	13	-	12	-	12	-	12	-	Dinas Kesehatan Aceh	
				Cakupan ASI eksklusif	%	23	27	-	31	-	35	-	40	-	45	-	45	-	Dinas Kesehatan Aceh	
1	1	2	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		-	-	-	923.757.621	1.425.000.000	1.658.136.142	1.858.136.142	2.000.000.000	7.865.029.905	Dinas Kesehatan Aceh					
				Cakupan Rumah sehat	%	54	65	-	70	-	75	-	80	-	90	-	90	-	Dinas Kesehatan Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Cakupan Jamban Sehat	%	57	60	-	65	-	70	-	80	-	90	-	90	-	Dinas Kesehatan Aceh			
		Persentase Penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas	%	65	75	-	80	-	90	-	90	-	90	-	90	-	Dinas Kesehatan Aceh			
		Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	49,90	56,00		58,00		60,00		62,00		64,00		64,00					
1	1	2	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	-	-	-	15.668.010.918	-	-	-	-	-	-	-	-	15.668.010.918	Dinas Kesehatan Aceh		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	25	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	Dinas Kesehatan Aceh			
		Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit DBD	%	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Dinas Kesehatan Aceh			
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	Dinas Kesehatan Aceh			
		AFP rate per 100.000 penduduk < 15 thn	/100.000 Penduduk	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Dinas Kesehatan Aceh			
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	Dinas Kesehatan Aceh			
1	1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	3.541.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.541.660.000	Dinas Kesehatan Aceh		
		Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,49	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62	-	Dinas Kesehatan Aceh			
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	158	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	Dinas Kesehatan Aceh			
1	1	2	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,27	0,3	118.550.516.837	0,35	48.668.240.000	0,4	3.258.005.009	0,45	2.500.000.000	0,5	2.000.000.000	0,5	174.976.761.846	Dinas Kesehatan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	1	2	26	Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya																
1	1	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit	%	50	70	3.969.469.391	80	12.402.106.696	90	14.321.919.666	95	15.978.334.003	100	17.968.113.060	100	64.639.942.816	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
1	1	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit	%	30	35	21.876.549.068	100	24.343.290.284	100	19.928.641.380	100	20.938.667.282	100	23.210.379.664	100	110.297.527.678	BLUD Rumah Sakit Jiwa
1	1	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit	%	50	50	12.980.000.004	60	48.067.814.748	70	118.999.349.006	80	71.853.028.111	85	75.231.980.777	85	327.132.172.646	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
1	1	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah Kab/kota yang Memiliki RSUD Tipe B	Jumlah	9	10	387.443.833.147	11	349.905.852.864	12	328.236.855.954	13	401.578.595.479	14	512.950.281.644	14	1.980.115.419.088	Dinas Kesehatan Aceh
1	1	2	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang fungsional	%	70	75	1.605.950.000	85	2.459.009.804	90	1.725.456.563	95	1.331.435.832	100	1.384.028.717	100	8.505.880.916	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
1	1	2	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang fungsional	%	48	60	15.072.991.000	75	5.216.860.000	85	8.886.150.000	90	9.330.457.500	100	9.796.980.375	100	48.303.438.875	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata																			
1	1	2	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kepesertaan asuransi kesehatan	%	97	100	579.962.650.000	100	426.300.000.000	100	430.000.000.000	100	450.000.000.000	100	500.000.000.000	100	2.386.262.650.000	Dinas Kesehatan Aceh
1	1	2	29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	/1.000 kelahiran hidup	10	10	3.288.118.000	-	-	-	-	-	-	-	10	3.288.118.000	Dinas Kesehatan Aceh	
1	1	2	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		-	-	-	2.945.720.061	-	-	-	-	-	-	-	-	2.945.720.061	Dinas Kesehatan Aceh	
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Dinas Kesehatan Aceh	
					Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran Hidup	990	990	-	-	-	-	-	-	-	-	990	-	Dinas Kesehatan Aceh	
					Angka Kematian Ibu	/100.000 Kelahiran Hidup	149	162	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-	Dinas Kesehatan Aceh	
					Angka Kematian Bayi	/1.000 Kelahiran Hidup	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	Dinas Kesehatan Aceh	
					Angka kematian Balita.	/1000 Kelahiran Hidup	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	Dinas Kesehatan Aceh	
1	1	2	33	Program Pelayanan Medis	Persentase Peningkatan Pelayanan tenaga medis	%	100	100	325.090.000	-	-	-	-	-	-	-	100	325.090.000	Dinas Kesehatan Aceh	
1	1	2	33	Program Pelayanan Medis	Persentase kemampuan pelayanan medis terhadap pasien	%	75	80	14.777.082.229	90	13.245.158.480	100	13.017.270.558	100	12.573.562.208	100	14.346.341.203	100	67.959.414.678	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	1	2	33	Program Pelayanan Medis	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Medis	%	10	30	3.118.085.973	100	2.965.620.000	100	3.094.260.000	100	3.094.260.000	100	3.094.260.000	100	15.366.485.973	BLUD Rumah Sakit Jiwa
1	1	2	33	Program Pelayanan Medis	-	-	-	-	40.713.465.406	-	46.245.500.003	-	9.633.007.199	-	8.151.346.598	-	9.077.426.778	-	113.820.745.984	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
					Persentase kemampuan pelayanan medis terhadap pasien	%	-	-	-	90	-	92	-	95	-	97	-	97	-	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
					Meningkatnya Manajemen Pelayanan Medis	%	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
					Persentase Penurunan Rujukan Pelayanan Medis terhadap pasien	%	2	2	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
					Standarisasi Pelayanan	Nasional/Internasional	Standar Internasional	Standar Internasional	-	Standar Internasional	-	Standar Internasional	-	Standar Internasional	-	Standar Internasional	-	Standar Internasional	-	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
1	1	2	34	Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis	Peningkatan Pelayanan yang lengkap dan berkualitas	%	90	95	85.840.000	95	1.167.428.252	95	3.300.823.669	100	2.823.223.669	100	2.109.444.301	100	9.486.759.891	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
1	1	2	34	Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis	Tersedianya Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis yang Komprehensif	%	100	100	67.192.146.594	100	53.033.140.000	100	922.836.600	100	968.978.430	100	1.017.427.352	100	123.134.528.976	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
1	1	2	34	Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis	Jumlah Jenis Pemeriksaan/Parameter laboratorium kesehatan di Labkesda	Jumlah	54/108	60/108	4.927.500.000	65/108	3.882.310.000	70/108	5.512.500.000	75/108	5.788.125.000	80/108	6.077.531.250	80/108	26.187.966.250	Dinas Kesehatan Aceh
1	1	2	35	Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Yang memenuhi Standar Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan	%	40	50	2.112.642.266	60	1.117.064.956	70	1.653.750.000	80	1.736.437.500	90	1.823.259.375	90	8.443.154.097	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
1	1	2	35	Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Yang memenuhi Standar Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan	%	40	50	3.020.000.000	-	-	-	-	-	-	-	50	3.020.000.000	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin	
1	1	2	35	Program Peningkatan	Persentase Tenaga Kesehatan Terlatih	%	45	50	12.975.677.229	60	4.500.000.000	70	4.467.084.143	80	4.690.438.350	100	4.924.960.267	100	31.558.159.989	Dinas Kesehatan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Sumberdaya Kesehatan																		
1	1	2	36	Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance Terpadu	Terbangunnya Unit Terpadu (Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Terbentuknya Unit Public Safety Centre (PSC))	Jumlah Kab/Kota	10	15	3.927.610.000	20	5.000.000.000	23	3.328.000.000	23	3.404.400.000	23	3.389.620.000	23	19.049.630.000	Dinas Kesehatan Aceh
1	1	2	37	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-	-	494.000.000.000	-	501.000.000.000	-	532.226.514.670	-	474.338.664.115	-	525.343.407.271	-	2.526.908.586.056	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	90	-	94	-	95	-	96	-	97	-	97	-	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin	
				Kemandirian RSUZA	%	60	70	-	80	-	90	-	95	-	100	-	100	-	BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin	
1	1	2	38	Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	72	78	37.400.500.000	80	33.155.000.000	83	28.284.141.000	85	28.849.823.820	90	29.426.820.296	90	157.116.285.116	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
1	1	2	39	Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-	-	28.771.177.916	-	28.221.495.300	-	30.900.870.100	-	31.052.992.100	-	31.078.963.000	-	150.025.498.416	BLUD Rumah Sakit Jiwa	
				Indeks Kepuasan Pasien Jiwa	Indeks	26	80	-	85	-	94	-	95	-	97	-	97	-	BLUD Rumah Sakit Jiwa	
				Jenis Layanan Sub Spesialis Jiwa	Jumlah	1	1	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	BLUD Rumah Sakit Jiwa	
1	1	2	40	Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit	-	-	-	-	-	11.650.000.000	-	9.040.500.000	-	9.492.525.000	-	9.967.151.250	-	40.150.176.250	Dinas Kesehatan Aceh	
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	25	42	-	49	-	53	-	55	-	57	-	57	-	Dinas Kesehatan Aceh	
				Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit DBD	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan Aceh	
				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	74	90	-	92	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		AFP rate per 100.000 penduduk <15 thn	/100.000 Penduduk	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Dinas Kesehatan Aceh			
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	20	20	-	30	-	40	-	50	-	60	-	60	-	Dinas Kesehatan Aceh			
1	1	2	41	Program Pengadaan, Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	4.485.000.000	-	4.709.368.858	-	4.944.837.301	-	5.192.079.166	-	19.331.285.325	Dinas Kesehatan Aceh			
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki usaha dan memenuhi standar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Jumlah	10	-	-	16	-	21	-	23	-	23	-	23	-	Dinas Kesehatan Aceh			
		Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial	%	70	-	-	90	-	95	-	97	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan Aceh			
		Persentase Penggunaan Obat rasional (POR) di Puskesmas	%	20	-	-	40	-	50	-	60	-	70	-	70	-	Dinas Kesehatan Aceh			
1	1	2	42	Program Peningkatan kesehatan Keluarga	-	-	-	6.000.000.000	-	4.565.198.992	-	4.793.458.942	-	5.033.131.889	-	20.391.789.823	Dinas Kesehatan Aceh			
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan Aceh			
		Cakupan pelayanan kesehatan keluarga	%	75	-	-	80	-	82	-	85	-	88	-	90	-	Dinas Kesehatan Aceh			
1	1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				2.811.407.563.691		2.032.525.072.881		1.921.090.466.401		2.007.682.148.887		1.776.952.886.879		10.549.658.138.740		
1	1	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	8.339.112.400	100	8.367.193.272	100	8.390.053.330	100	8.140.053.330	100	8.390.053.330	100	41.626.465.662	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	1	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	13.643.376.000	100	15.594.918.588	100	15.750.867.774	100	15.908.376.452	100	16.067.460.216	100	76.964.999.030	Dinas Pengairan Aceh
1	1	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2.720.510.000	100	1.470.510.000	100	2.718.200.000	100	2.718.200.000	100	2.718.200.000	100	12.345.620.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
1	1	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2.587.319.299	100	6.264.048.406	100	6.326.688.890	100	6.389.955.779	100	6.453.855.337	100	28.021.867.711	Dinas Pengairan Aceh
1	1	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	774.750.000	100	372.132.700	100	12.750.000	100	262.750.000	100	12.750.000	100	1.435.132.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
1	1	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	33.000.000	100	774.900.000	100	782.649.000	100	790.475.490	100	798.380.245	100	3.179.404.735	Dinas Pengairan Aceh
1	1	3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	279.294.500	100	251.810.500	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.731.105.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
1	1	3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	2.037.422.000	100	2.055.872.029	100	2.076.430.749	100	2.097.195.057	100	2.118.167.007	100	10.385.086.842	Dinas Pengairan Aceh
1	1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan Aceh dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	KM	2258,6	2365	1.581.081.127.276	2365	11.609.871.326	-	-	-	-	-	2365	1.592.690.998.602	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
1	1	3	18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	KM	1630,4	1.833	139.059.605.404	1.833	5.000.000.000	-	-	-	-	-	1.833	144.059.605.404	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
1	1	3	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase alat berat dan sarana laboratorium kebinamargaan dalam kondisi baik	%	86	90	12.267.236.581	-	-	-	-	-	-	-	90	12.267.236.581	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
1	1	3	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	67,37	75,92	398.501.984.840	75,92	1.421.398.523	-	-	-	-	-	75,92	399.923.383.363	Dinas Pengairan Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya																		
1	1	3	26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Volume tampungan air	juta m3	1	1	108.674.099.500	-	-	-	-	-	-	1	108.674.099.500	Dinas Pengairan Aceh		
1	1	3	28	Program Pengendalian Banjir	Persentase luas genangan banjir luapan sungai dan pasang purnama	%	68,08	63,53	535.013.467.349	-	-	-	-	-	-	63,53	535.013.467.349	Dinas Pengairan Aceh		
1	1	3	34	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kab/Kota dengan Ketersediaan dokumen tata ruang dan kawasan strategis Kab/Kota	%	76	80	1.191.484.600	-	-	-	-	-	-	80	1.191.484.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh		
1	1	3	35	Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW	%	82	85	4.620.324.128	-	-	-	-	-	-	85	4.620.324.128	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh		
1	1	3	36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat ketaatan terhadap RTRW	%	18	15	583.449.814	-	-	-	-	-	-	15	583.449.814	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh		
1	1	3	37	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA kondisi baik	%	67	-	78,47	825.523.796.892	80,54	766.576.891.198	82,36	848.684.184.970	86,08	1.249.080.932.837	86,08	3.689.865.805.897	Dinas Pengairan Aceh	
1	1	3	38	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan Aceh dalam kondisi mantap	%	61,89	-	82,26	1.142.485.125.717	87,71	1.110.372.555.843	92,88	1.114.363.048.231	98,65	483.616.195.370	98,65	3.850.836.925.161	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
1	1	3	39	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW	%	93	-	96	11.333.494.928	97	7.683.379.617	98	7.927.909.579	98	7.296.892.537	98	34.241.676.661	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
1	1	4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					814.404.371.023	578.329.728.499		632.640.490.987	633.785.743.750		660.586.877.494	3.319.747.211.754				
1	1	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	10.269.367.419	100	12.694.147.957	100	12.821.089.437	100	12.949.300.331	100	13.078.793.334	100	61.812.698.478	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1	1	4	2	Program Peningkatan Sarana	Tingkat Kelengkapan	%	100	100	533.601.318	100	2.137.188.933	100	2.158.560.822	100	2.180.146.431	100	2.201.947.895	100	9.211.445.398	Dinas Perumahan Rakyat dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur																Kawasan Permukiman Aceh		
1	1	4	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	8800.000	100	500.000.000	100	505.000.000	100	510.050.000	100	515.150.500	100	2.039.000.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1	1	4	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	475.550.000	100	600.000.000	100	606.000.000	100	612.060.000	100	618.180.600	100	2.911.790.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1	1	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Unit	34.311	40.311	291.972.099.967	46.311	530.400.000.000	52.311	536.781.000.000	58.311	537.433.490.590	68.311	541.038.685.246	68.311	2.437.625.275.803	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1	1	4	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Panjang drainase dalam kondisi baik	km	927,4	1145	67.532.502.643	1145	524.175.611	-	-	-	-	-	-	1145	68.056.678.254	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1	1	4	23	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang tersertifikasi (SKA)	%	95	100	764.164.012	-	-	-	-	-	-	-	-	100	764.164.012	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1	1	4	24	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Luas Permukiman yang Tertangani	Ha	500	-	-	600	30.884.790.897	1100	79.768.840.728	1600	80.100.696.399	2000	103.134.119.919	2000	293.888.447.943	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1	1	4	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum	%	70	60	120.083.043.862	-	-	-	-	-	-	-	-	60	120.083.043.862	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1	1	4	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Proporsi Panjang Jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	82	90	59.015.554.760	-	-	-	-	-	-	-	-	90	59.015.554.760	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1	1	4	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	Rasio pemukiman layak huni	Rasio Index	0,961	0,964	263.749.687.042	0,964	589.425.101	-	-	-	-	-	-	0,964	264.339.112.143	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1	1	5		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					123.973.992.800		122.603.700.782		113.125.427.335		150.069.789.772		157.842.647.596		667.615.558.285	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	1	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	4.097.451.994	100	3.329.802.138	100	4.169.517.040	100	4.377.992.892	100	4.596.892.536	100	20.571.656.600	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
1	1	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	3.344.996.295	100	3.287.532.295	100	3.320.407.618	100	3.353.611.694	100	3.387.147.811	100	16.693.695.713	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
1	1	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.113.416.000	100	4.871.371.463	100	5.589.398.594	100	5.868.868.524	100	6.162.311.950	100	23.605.366.531	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
1	1	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.175.000.000	100	2.082.500.000	100	2.103.325.000	100	2.124.358.250	100	2.145.601.833	100	9.630.785.083	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
1	1	5	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	173.900.000	100	-	100	219.121.875	100	230.077.969	100	241.581.867	100	864.681.711	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
1	1	5	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	125.157.270	100	158.500.000	100	160.085.000	100	161.685.850	100	163.302.709	100	768.730.829	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
1	1	5	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	1.164.485.855	100	984.693.255	100	1.525.304.781	100	1.601.570.020	100	1.681.648.521	100	6.957.702.432	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
1	1	5	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	-	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	310.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
1	1	5	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	115.000.000	100	132.250.000	100	152.087.500	100	399.337.500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	1	5	16	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Menurunnya Persentase korban terdampak bencana	%	88	95	1.725.352.000	-	-	-	-	-	-	-	1.725.352.000	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
1	1	5	17	Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	79	80	35.180.453.500	80	2.000.000.000	-	-	-	-	80	37.180.453.500	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
1	1	5	20	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Persentase pemulihan kawasan terdampak bencana	%	70	75	39.436.882.764	-	-	-	-	-	-	75	39.436.882.764	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
1	1	5	21	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	76	80	7.249.136.849	-	-	-	-	-	-	80	7.249.136.849	Badan Penanggulangan Bencana Aceh		
1	1	5	22	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase peningkatan penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	%	82	84	890.793.253	85	953.330.733	87	1.026.185.832	88	1.077.495.124	90	1.131.369.880	90	5.079.174.822	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh
1	1	5	23	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penurunan pelanggaran qanun, kebijakan kepala daerah, dan gangguan trantibum	%	57,42	59,92	28.296.967.020	60,42	28.098.316.533	61,92	20.396.265.119	63	20.322.417.260	65	22.752.804.986	65	119.866.770.918	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh
1	1	5	24	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pengurangan risiko bencana	Indeks	160	-	-	137,5	76.837.654.365	135	74.400.816.476	132,5	110.719.462.189	130	115.317.898.004	130	377.275.831.034	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
1	1	6		Sosial					199.087.227.803		267.117.840.987		124.768.966.860		125.017.411.781		142.484.961.620		858.476.409.051	
1	1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	4.536.365.028	100	5.773.000.000	100	4.685.757.300	100	4.920.045.165	100	5.166.047.423	100	25.081.214.916	Dinas Sosial Aceh
1	1	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	4.405.400.000	100	4.864.000.000	100	3.219.300.000	100	3.380.265.000	100	3.549.278.250	100	19.418.243.250	Dinas Sosial Aceh
1	1	6	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam	%	100	100	389.240.000	100	732.000.000	100	793.800.000	100	833.490.000	100	875.164.500	100	3.623.694.500	Dinas Sosial Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai																
1	1 6 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	1.493.404.000	100	979.000.000	100	955.000.000	100	775.608.750	100	814.389.188	100	5.017.401.938	Dinas Sosial Aceh	
1	1 6 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	185.800.000	100	34.000.000	100	36.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	345.800.000	Dinas Sosial Aceh	
1	1 6 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-	-	57.938.663.575	-	61.263.000.000	-	20.802.380.933	-	17.129.219.063	-	21.523.850.508	-	178.657.114.079	Dinas Sosial Aceh	
		Jumlah KK Komunitas Adat Terpencil (KAT) yangmendapat bantuan	Jumlah	110	115	-	120	-	125	-	130	-	135	-	135	-	-	
		Jumlah Fakir miskin yang mendapat bantuan (KUBE/UEP)	Jumlah	300/3.228	300/3.228	-	330/3.550	-	363/4.000	-	500/4.500	-	550/5.000	-	550/5.000	-	Dinas Sosial Aceh	
		Jumlah Rehab Rumah Tidak Layak Huni per KK	Jumlah	400	420	-	500	-	550	-	600	-	650	-	650	-	Dinas Sosial Aceh	
1	1 6 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	69.290.654.065	-	44.614.515.499	-	24.695.873.160	-	32.878.161.754	-	38.095.609.702	-	209.574.814.180	Dinas Sosial Aceh	
		Persentase Lansia yang Mendapat Bantuan	%	4	7	-	17	-	27	-	37	-	47	-	47	-	-	
		Persentase Korban Penyalahgunaan NAPZA yang tertangani	%	4	8	-	18	-	28	-	38	-	48	-	48	-	Dinas Sosial Aceh	
		Persentase Korban Tindak Kekerasan	%	2	5	-	10	-	15	-	20	-	25	-	25	-	Dinas Sosial Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		(KTK) yang tertangani																		
		Cakupan Pelayanan Rumah Singgah	%	0	10	-	25	-	50	-	75	-	100	-	100	-	100	Dinas Sosial Aceh		
1	1	6	17	Program Pembinaan Anak Terlantar	-	-	-	8507.161.034	-	17.467.465.000	-	18.263.983.000	-	19.518.218.750	-	22.718.218.750	-	86.475.046.534	Dinas Sosial Aceh	
		Persentase Anak terlantar yang tertangani	%	50	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
		Persentase Tenaga Pendamping Terlatih	%	25	50	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Sosial Aceh	
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mandiri dan terakreditasi	Jumlah	1	5	-	7	-	9	-	10	-	10	-	10	-	10	-	Dinas Sosial Aceh	
1	1	6	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Disabilitas dan eks Trauma yang mendapat bantuan	%	1	8	1.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	8	1.400.000.000	Dinas Sosial Aceh	
1	1	6	19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Efektifitas panti dalam melayani penerima manfaat	%	40	40	26.550.499.500	60	108.546.460.488	-	-	-	-	-	60	135.096.959.988	Dinas Sosial Aceh	
1	1	6	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah penanganan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Tertangani	Jumlah	30	45	2.799.700.000	125	1.956.000.000	205	3.470.507.000	285	3.922.412.000	365	4.522.412.000	365	16.671.031.000	Dinas Sosial Aceh
1	1	6	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial (Orang/Lembaga)	Orang/Lembaga	36/69	39/76	21.590.340.601	42/83	17.038.400.000	45/92	10.516.101.501	52/96	14.168.471.978	59/100	15.878.471.978	59/100	79.191.786.058	Dinas Sosial Aceh
1	1	6	22	Program Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Trauma	Persentase Penyandang Disabilitas dan eks Trauma yang mendapat bantuan	%	-	-	-	15,21	3.850.000.000	26,15	2.035.775.000	40,75	2.191.550.000	58,99	2.441.550.000	58,99	10.518.875.000	Dinas Sosial Aceh
1	1	6	23	Program Pembinaan Panti Asuhan/Rumah Sejahtera	Efektifitas panti dalam melayani penerima manfaat	%	-	-	-	-	-	70	35.294.488.966	80	25.254.969.321	90	26.854.969.321	90	87.404.427.608	Dinas Sosial Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2					915.408.892.043		1.037.504.734.690		834.870.936.570		988.431.312.338		1.029.062.478.894		4.805.278.354.535				
1	2	1				51.450.673.099		40.831.811.949		55.516.487.564		56.643.273.140		70.097.600.136		274.539.845.888				
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	3.371.039.150	100	3.383.284.275	100	3.240.626.845	100	3.240.626.845	100	16.476.203.960	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
1	2	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.774.565.000	100	623.065.000	100	871.065.000	100	871.065.000	100	5.010.825.000	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
1	2	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	209.000.000	100	196.200.000	100	209.000.000	100	209.000.000	100	1.032.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
1	2	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	121.950.000	100	121.950.000	100	99.700.000	100	99.700.000	100	543.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh		
1	2	1	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	320	1.574	20.561.720.000	978	17.254.780.000	1.174	37.454.857.620	1.408	37.030.345.950	1.690	47.000.000.000	1.690	159.301.703.570	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
1	2	1	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	70	70	16.727.986.998	80	11.752.532.674	85	5.641.238.099	90	6.992.535.345	100	10.093.266.216	100	51.207.559.332	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
1	2	1	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah pemutusan hubungan kerja	Kasus	8	8	6.281.276.826	8	5.000.000.000	7	5.500.000.000	6	5.600.000.000	5	5.783.942.075	5	28.165.218.901	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
1	2	1	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	2.403.135.125	80	2.500.000.000	80	2.500.000.000	90	2.600.000.000	90	2.800.000.000	90	12.803.135.125	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
1	2	2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					12.559.944.206		16.651.472.972		11.334.038.919		11.900.740.866		12.495.777.910		64.941.974.873	
1	2	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	1.653.395.560	100	1.841.567.118	100	2.601.466.495	100	2.615.781.359	100	2.658.960.000	100	11.371.170.532	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2.276.371.750	100	1.589.000.000	100	1.071.754.774	100	1.225.657.857	100	1.356.659.440	100	7.519.443.821	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
1	2	2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	107.500.000	100	70.000.000	100	118.200.000	100	122.000.000	100	140.000.000	100	557.700.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
1	2	2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	84.420.000	100	150.000.000	100	143.600.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	678.020.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
1	2	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	-	100	76.680.340	100	73.520.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	340.200.340	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
1	2	2	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					844.190.000		2.390.835.854		1.412.860.000		1.521.860.000		1.485.724.205		7.655.470.059	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
					Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Jumlah	10	14	-	18	-	22	-	23	-	23	-	23	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
					Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	Jumlah	1	4	-	7	-	10	-	13	-	16	-	16	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
1	2	2	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					5.261.719.633		6.211.189.660		3.716.097.650		3.843.451.650		4.170.848.265		23.203.306.858	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
					Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	%	22	28	-	48	-	74	-	90	-	100	-	100	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
					Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah	-	5	-	10	-	15	-	19	-	23	-	23	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
1	2	2	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		617570.000		1.905.000.000		758.590.000		786.590.000		806.186.000		4.873.936.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
				Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
1	2	2	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah	400	700	1.714.777.263	1.000	2.417.200.000	1.300	1.437.950.000	1.600	1.545.400.000	1.900	1.627.400.000	1.900	8.742.727.263	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
1	2	3		Pangan				49.855.298.000		43.603.098.000		61.173.737.832		73.433.557.511		90.322.284.799		318.387.976.142	
1	2	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	2.336.467.000	100	2.447.000.000	100	2.165.000.000	100	2.165.000.000	100	11.278.467.000	Dinas Pangan Aceh	
1	2	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2.337.879.958	100	1.985.964.760	100	2.463.064.760	100	2.463.064.760	100	11.713.038.998	Dinas Pangan Aceh	
1	2	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	100	95.100.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	695.100.000	Dinas Pangan Aceh	
1	2	3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	-	-	100	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	700.000.000	Dinas Pangan Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya Skor PPH Konsumsi	Skor	70	73,9	43.555.776.042	-	-	-	-	-	-	73,9	43.555.776.042	Dinas Pangan Aceh		
1	2	3	18	Program peningkatan akses pangan	Terjaganya aksesibilitas dan harga pangan strategis (koefisien variasi harga beras)	%	< 5	-	< 5	21.700.000.000	< 5	25.957.374.247	< 5	33.746.116.267	< 5	42.064.205.254	< 5	123.467.695.768	Dinas Pangan Aceh	
1	2	3	19	Program peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum (di bawah 1500 kkal/kapita/hari)	%	< 15	-	< 15	14.830.079.641	< 13	28.688.298.825	< 11	33.109.376.484	< 10	41.580.014.785	< 10	118.207.769.735	Dinas Pangan Aceh	
1	2	3	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	1.625.175.000	80	2.444.953.599	80	1.500.000.000	90	1.550.000.000	90	1.650.000.000	90	8.770.128.599	Dinas Pangan Aceh
1	2	4		Pertanahan					10.628.709.000		13.711.164.000		12.338.164.000		12.530.664.000		12.742.414.000		61.951.115.000	
1	2	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	2.913.519.000	100	3.005.000.000	100	3.419.464.000	100	3.419.464.000	100	3.419.464.000	100	16.176.911.000	Dinas Pertanahan Aceh
1	2	4	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.105.248.000	100	2.275.548.000	100	883.700.000	100	883.700.000	100	883.700.000	100	6.031.896.000	Dinas Pertanahan Aceh
1	2	4	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	89.750.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	409.750.000	Dinas Pertanahan Aceh
1	2	4	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	240.000.000	100	750.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	2.115.000.000	Dinas Pertanahan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	%	100	100	105.000.000	100	135.350.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	555.350.000	Dinas Pertanahan Aceh
1	2	4	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik dan Meningkatnya pengsertifikatan tanah masyarakat miskin	Sertifikat	-	4000	4.927.326.000	4000	5.700.000.000	4000	5.000.000.000	4000	5.000.000.000	4000	5.000.000.000	4.000	25.627.326.000	Dinas Pertanahan Aceh
1	2	4	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Sengketa dan konflik pertanahan yang diselesaikan	%/Kasus	-	20%	701.438.000	40%	700.000.000	60%/18 kasus	550.000.000	80%/24 kasus	550.000.000	100%/33 Kasus	550.000.000	100%/33 Kasus	3.051.438.000	Dinas Pertanahan Aceh
1	2	4	18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	Aplikasi	-	3	546.428.000	-	-	-	-	-	-	-	3	546.428.000	Dinas Pertanahan Aceh	
1	2	4	19	Program Penguatan Kelembagaan Pertanahan	Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	Kab/Kota	-	-	3	1.065.266.000	3	1.925.000.000	6	2.117.500.000	8	2.329.250.000	20	7.437.016.000	Dinas Pertanahan Aceh	
1	2	5		Lingkungan Hidup					45.886.353.191		18.967.930.367		85.676.792.458		108.522.015.294		110.953.780.917		370.006.872.227	
1	2	5	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	%	45,7	46	18.450.961.859	48	2.200.000.000	50	8.140.849.688	52	27.587.983.889	54	16.810.351.217	54	73.190.146.653	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
1	2	5	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Optimalisasi kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKA=57,12;IKU=56,8	IKA=60;IKU=56,8	1.961.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	IKA=60;IKU=56,8	1.961.850.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
1	2	5	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Kab/Kota	3	3	7.880.291.441	-	-	-	-	-	-	-	3	7.880.291.441	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	5	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	17,76	18	12.730.839.891	-	1.365.930.367	-	-	-	-	18	14.096.770.258	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh		
1	2	5	25	Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH	73,38	-	-	74	15.402.000.000	74,5	77.535.942.770	75	80.934.031.405	75	94.143.429.700	75	268.015.403.875	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
1	2	5	26	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	%	80	90	4.862.410.000	-	-	-	-	-	-	90	4.862.410.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh		
1	2	6		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					16.403.098.340		19.024.826.212		15.380.908.171		15.761.889.250		17.201.729.463		83.772.451.436	
1	2	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	5.354.139.340	100	4.273.709.133	100	3.829.230.520	100	4.285.949.319	100	4.494.354.385	100	22.237.382.697	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
1	2	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.969.469.000	100	630.892.375	100	2.242.724.000	100	740.880.000	100	777.924.000	100	6.361.889.375	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
1	2	6	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	-	-	100	60.000.000	100	132.250.000	100	152.087.500	100	344.337.500	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
1	2	6	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	171.168.000	100	231.095.000	100	231.095.000	100	173.643.750	100	182.325.938	100	989.327.688	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
1	2	6	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	146.000.000	100	183.315.000	100	185.148.150	100	514.463.150	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	6	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terkelolanya database dan informasi, serta terfasilitasinya penguatan kapasitas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil	%	40	45	8.908.322.000	50	13.889.129.704	60	8.871.858.651	65	10.245.851.181	70	11.409.889.490	70	53.325.051.026	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
1	2	7		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					29.784.214.360		38.208.805.000		17.375.917.729		23.234.713.616		24.136.449.297		132.740.100.002	
1	2	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	3.536.609.500	100	4.824.886.915	100	2.470.702.500	100	2.594.237.625	100	2.723.949.506	100	16.150.386.046	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1	2	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2.678.796.000	100	2.807.700.000	100	4.619.948.660	100	4.858.206.093	100	5.108.448.998	100	20.073.099.751	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1	2	6	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	73.000.000	100	150.000.000	100	256.331.250	100	269.147.813	100	282.605.203	100	1.031.084.266	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1	2	6	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	-	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1	2	6	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	181.500.000	100	183.315.000	100	185.148.150	100	549.963.150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1	2	6	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong	-	-	-	-	14.801.089.700	-	5.200.000.000	-	3.244.115.319	-	3.406.321.085	-	3.576.637.139	-	30.228.163.243	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
					Jumlah Gampong yang cepat berkembang	Jumlah	100	115	-	230	-	345	-	460	-	575	-	575	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah Kawasan Potensi Gampong yang dikembangkan	Jumlah	5	10	-	23	-	43	-	63	-	73	-	73	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1	2	6	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong	-	1.286.175.000	-	3.720.720.257	-	1.598.625.000	-	1.678.556.250	-	1.762.484.063	-	10.046.560.570	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
		Jumlah Lembaga Ekonomi Gampong yang Aktif	Jumlah	252	535	-	835	-	1.135	-	1.435	-	1.735	-	1.735	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
		Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong yang dikembangkan	Jumlah	90	100	-	115	-	230	-	345	-	450	-	450	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1	2	6	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong	-	5.418.524.160	-	12.048.222.828	-	2.555.595.000	-	7.683.374.750	-	7.817.543.488	-	35.523.260.226	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
		Jumlah lembaga kemasyarakatan gampong yang berfungsi (LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna/Lembaga Pemuda Gampong)	Jumlah	11.370	11.938	-	12.506	-	13.074	-	13.642	-	14.210	-	14.210	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
		Lembaga Adat Gampong Yang Aktif	Jumlah	100	200	-	230	-	460	-	805	-	1.150	-	1.150	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1	2	6	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong	-	990.020.000	-	4.457.275.000	-	1.146.600.000	-	1.203.930.000	-	1.264.126.500	-	9.061.951.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
		Persentase kapasitas aparatur pemerintahan gampong dalam mengelola Pemerintahan Gampong	%	60	62	-	65	-	68	-	71	-	73	-	73	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
		Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Gampong	%	10	20	-	25	-	20	-	20	-	20	-	100	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	6	21	Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya	Persentase Imum Mukim yang mampu melaksanakan peran dan kewenangan	%	10	20	1.000.000.000	30	5.000.000.000	50	1.102.500.000	80	1.157.625.000	100	1.215.506.250	100	9.475.631.250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
1	2	9		Perhubungan					242.892.749.532		324.249.549.171		226.197.235.039		268.711.031.456		199.142.589.218		1.261.193.154.416	
1	2	9	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	10.162.828.550	100	8.690.595.198	100	8.777.501.150	100	8.865.276.161	100	8.953.928.923	100	45.450.129.982	Dinas Perhubungan Aceh
1	2	9	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	4.006.410.878	100	21.247.156.078	100	9.247.156.078	100	9.339.627.639	100	9.433.023.915	100	53.273.374.588	Dinas Perhubungan Aceh
1	2	9	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	11.900.000	100	268.650.000	100	271.336.500	100	274.049.865	100	276.790.364	100	1.102.726.729	Dinas Perhubungan Aceh
1	2	9	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	1.180.000.000	100	1.729.000.000	100	1.746.290.000	100	1.763.752.900	100	1.781.390.429	100	8.200.433.329	Dinas Perhubungan Aceh
1	2	9	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	%	88	90	163.317.091.966	-	-	-	-	-	-	-	90	163.317.091.966	Dinas Perhubungan Aceh	
1	2	9	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	%	50	60	14.667.300.000	65	13.661.061.070	70	26.509.538.833	75	34.378.569.249	80	44.690.670.608	80	133.907.139.760	Dinas Perhubungan Aceh
1	2	9	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase peningkatan kondisi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	%	60	65	1.246.503.800	-	-	-	-	-	-	-	65	1.246.503.800	Dinas Perhubungan Aceh	
1	2	9	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah penurunan kasus angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	700	700	44.755.214.338	700	33.222.900.000	800	17.228.850.572	800	20.043.225.859	900	17.634.218.231	900	132.884.409.000	Dinas Perhubungan Aceh
1	2	9	20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase jumlah kendaraan bermotor layak jalan	%	13,46	21,74	3.545.500.000	-	-	-	-	-	-	-	21,74	3.545.500.000	Dinas Perhubungan Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	9	22	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase peningkatan kondisi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	%	63	-	-	74	245.430.186.825	79	162.416.561.906	85	194.046.529.783	92	116.372.566.748	92	718.265.845.262	Dinas Perhubungan Aceh
1	2	10		Komunikasi dan Informatika						46.831.426.781	53.896.492.936	52.206.853.490	37.773.986.945	34.580.488.212	225.289.248.364					
1	2	10	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	7.672.127.832	100	10.347.336.857	100	3.812.827.950	100	4.025.364.188	100	4.489.727.397	100	30.347.384.224	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
1	2	10	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.885.631.318	100	3.185.966.000	100	2.246.405.049	100	2.358.725.301	100	2.476.661.567	100	12.153.389.235	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
1	2	10	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	-	-	100	270.280.800	100	261.900.000	100	11.900.000	100	544.080.800	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
1	2	10	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	657.480.000	100	665.480.000	100	330.750.000	100	347.287.500	100	364.651.875	100	2.365.649.375	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
1	2	10	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
1	2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		-	-	-	29.965.717.631	-	27.510.434.216	-	18.421.867.581	-	19.644.388.394	-	16.354.409.734	-	111.896.817.556	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
					Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	%	60	80	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	%	25	50	-	70	-	80	-	100	-	100	-	100	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh		
1	2	10	17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Orang	140	150	1812.880.000	180	3.063.946.000	190	1.262.391.216	200	1.325.510.777	220	1.391.786.315	220	8.856.514.308	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
1	2	10	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media		-	-	-	4.626.530.000	-	6.626.685.000	-	3.103.365.639	-	3.258.533.921	-	3.421.460.617	-	21.036.575.177	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
					Jumlah Berita yang di Publikasikan di Media Massa	Jumlah	112	500	-	600	-	700	-	800	-	900	-	900	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
					Jumlah Mas Media yang memuat berita	Jumlah	36	41	-	46	-	51	-	56	-	56	-	56	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
1	2	10	19	Program Pengembangan Data dan Statistik		-	-	-	211.060.000	-	2.496.644.863	-	335.501.775	-	352.276.864	-	369.890.707	-	3.765.374.209	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
					Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online)	Jumlah	250	500	-	600	-	700	-	800	-	900	-	900	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
					Jumlah Informasi Publik yang diakses	Jumlah	150	200	-	250	-	300	-	350	-	400	-	400	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
1	2	10	20	Program pengembangan data dan informasi secara terpadu	Persentase integrasi sistem informasi sektoral	%	10	-	-	-	75	22.223.463.480	80	6.000.000.000	90	5.500.000.000	90	33.723.463.480	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	
1	2	11	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					60.299.705.880		54.001.201.122		78.744.658.175		71.828.792.499		95.077.577.514		359.951.935.190	
1	2	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	2.758.468.645	100	2.434.957.500	100	2.261.168.500	100	2.261.168.500	100	2.261.168.500	100	11.976.931.645	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
1	2	11	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.837.806.855	100	2.955.909.752	100	1.928.017.000	100	1.928.017.000	100	1.928.017.000	100	10.577.767.607	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
1	2	11	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	126.600.000	-	-	100	168.600.000	100	168.600.000	100	168.600.000	100	632.400.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	11	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang memenuhi kompetensi	%	100	100	260.250.000	100	238.250.000	100	260.250.000	100	260.250.000	100	260.250.000	100	1.279.250.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
1	2	11	15	Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Konduksif	Meningkatnya persentase usaha mikro dan kecil	%	98	98	1.750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	98	1.750.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	
1	2	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah produk UKM yang kompetitif	Buah	100	120	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	120	1.000.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	
1	2	11	20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	1.870.861.380	80	2.062.801.495	80	1.920.000.000	90	2.000.000.000	90	2.100.000.000	90	9.953.662.875	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
1	2	11	21	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	Meningkatnya kapasitas, produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	%	54	57	50.695.719.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.695.719.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	
1	2	11	22	Program Pengembangan dan pembinaan koperasi					-	27.302.837.374		25.910.448.428		20.906.710.515		30.258.487.009		104.378.483.326	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	
					Jumlah KSP/USP yang menerapkan pola syariah	Unit	100	-	-	50	-	50	-	50	-	50	-	200	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
					Meningkatnya jumlah koperasi mandiri dan tangguh	Unit	320	-	-	10	-	10	-	11	-	12	-	12	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
1	2	11	23	Program pengembangan dan pembinaan UKM	Meningkatnya jumlah UKM naik kelas	Buah	50	-	65	19.006.445.001	70	46.296.174.247	75	44.304.046.484	80	58.101.055.005	80	167.707.720.737	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	
1	2	12		Penanaman Modal					21.141.406.253	49.141.406.253		21.621.194.299	22.709.511.986		23.557.589.674		138.171.108.465			
1	2	12	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	3.900.267.626	100	4.132.679.849	100	3.202.914.785	100	3.202.914.785	100	3.202.914.785	100	17.641.691.830	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
1	2	12	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.536.066.066	100	2.590.683.066	100	2.008.411.045	100	2.008.411.045	100	2.008.411.045	100	33.468.135.267	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	12	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	100	387.400.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	987.400.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
1	2	12	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	500.480.000	100	483.980.000	100	240.240.000	100	240.240.000	100	240.240.000	100	1.705.180.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
1	2	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya minat investasi	Investor	388	559	6.609.964.623	-	-	-	-	-	-	-	559	6.609.964.623	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
1	2	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN) (triliun)	Rp (Triliun)	5	5	417.515.540	6	14.911.135.838	6	10.515.491.040	7	11.254.661.150	7	11.993.831.261	7	49.092.634.829	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
1	2	12	18	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	6.175.084.798	80	500.900.000	80	1.376.540.165	90	1.376.540.165	90	1.376.540.165	90	10.805.605.293	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
1	2	12	19	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	-	-	87,5	2.818.474.500	88,5	4.077.597.264	89,5	4.426.744.841	89,5	4.535.652.418	89,5	15.858.469.023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
1	2	12	20	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	87	2.002.027.600	-	-	-	-	-	-	-	87	2.002.027.600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
1	2	13		Kepemudaan dan Olahraga																
1	2	13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	3.811.989.463	100	5.660.187.888	100	5.646.509.833	100	8.621.114.268	100	6.832.276.898	100	30.572.078.350	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
1	2	13	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.684.249.432	100	1.896.085.382	100	2.583.370.163	100	2.841.707.180	100	3.125.877.898	100	12.131.290.055	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
1	2	13	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	188.400.000	100	106.920.000	100	117.612.000	100	129.373.200	100	142.310.520	100	684.615.720	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	13	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	184.000.000	100	214.500.000	100	235.950.000	100	259.545.000	100	285.499.500	100	1.179.494.500	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
1	2	13	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang di bina	%	100	100	224.460.000	100	409.740.000	100	2.852.740.000	100	6.000.148.000	100	6.600.162.800	100	16.087.250.800	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
1	2	13	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang berprestasi	Orang/OKP	50	60	4.526.000.000	60	4.978.600.000	65	7.987.140.000	65	6.024.106.000	65	6.626.516.600	65	30.142.362.600	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
1	2	13	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausaha muda	%	12	12	600.000.000	14	2.860.000.000	15	2.000.000.000	17	3.460.600.000	21	3.806.660.000	21	12.727.260.000	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
1	2	13	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi	Atlet	50	60	2.260.888.000	60	4.826.920.466	65	5.574.680.000	65	6.000.148.000	65	6.600.162.800	65	25.262.799.266	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
1	2	13	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pembudayaan, Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	Cabor/Kegiatan	56	56	53.678.922.000	56	53.795.147.556	56	27.442.418.783	56	30.904.051.685	56	39.401.265.834	56	205.221.805.858	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
1	2	13	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga tingkat nasional dan internasional	Cabor	22	28	120.080.375.284	35	95.375.321.868	40	34.301.219.356	49	33.648.623.563	56	42.879.679.699	56	326.285.219.770	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
1	2	13	22	Program Pembinaan Kepemudaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Unit	1	2	7.200.000.000	3	5.550.200.000	3	4.000.000.000	3	4.500.000.000	3	5.000.000.000	3	26.250.200.000	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
1	2	16		Kebudayaan				69.385.211.650		107.213.684.515		30.937.424.520		43.382.880.502		54.928.708.863		305.847.910.050		
1	2	16	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	7.020.721.704	100	5.548.037.000	100	3.978.435.000	100	3.978.435.000	100	3.978.435.000	100	24.504.063.704	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
1	2	16	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	4.070.000.000	100	3.394.791.147	100	1.654.200.000	100	1.654.200.000	100	1.654.200.000	100	12.427.391.147	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
1	2	16	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	196.100.000	-	-	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	646.100.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	16	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	657.850.000	100	502.967.072	100	417.800.000	100	417.800.000	100	417.800.000	100	2.414.217.072	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
1	2	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghargai nilai budaya	%	80	80	31.259.509.315	-	-	-	-	-	-	-	80	31.259.509.315	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
1	2	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan pengelolaan cagar budaya dan nilai sejarah	Buah	11	12	15.404.014.121	-	-	-	-	-	-	-	12	15.404.014.121	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
1	2	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Festival/Tahun)	%	10	45	10.334.896.510	-	-	-	-	-	-	-	45	10.334.896.510	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
					Jumlah wisatawan	Wisata wan	2.154.249	-	-	3.292.320	-	3.786.169	-	4.354.094	-	5.007.208	-	5.007.208	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
					Lama kunjungan wisata	Hari	2	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
1	2	16	19	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Sanggar	10	10	442.120.000	10	68.930.310.000	10	4.584.703.700	10	5.672.409.255	10	5.773.270.643	10	85.402.813.598	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
1	2	16	21	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Meningkatkan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Jumlah Situs	11	-	-	18	27.287.579.296	18	18.452.285.820	18	29.610.036.247	18	41.442.803.220	18	116.792.704.583	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
1	2	16	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	-	-	80	1.550.000.000	80	1.700.000.000	90	1.900.000.000	90	1.512.200.000	90	6.662.200.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
1	2	17		Perpustakaan					47.522.879.772		64.597.727.194		29.724.626.975		78.720.422.000		98.858.960.300		319.424.616.241	
1	2	17	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang/ Tahun	288.000	144.000	47.522.879.772	150.000	64.597.727.194	324.000	29.724.626.975	356.400	78.720.422.000	392.040	98.858.960.300	392.040	319.424.616.241	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	18	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Kearsipan					16.327.937.800		17.731.941.839		43.901.257.264		60.888.416.377		63.666.116.042		202.515.669.322			
1	2	18	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	5.162.723.680	100	5.436.882.233	100	6.546.117.078	100	9.435.446.020	100	10.382.766.221	100	36.963.935.232	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
1	2	18	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	3.326.025.000	100	3.397.375.500	100	25.666.255.000	100	34.025.449.076	100	34.751.150.952	100	101.166.255.528	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
1	2	18	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	157.650.000	100	300.000.000	100	1.166.915.000	100	1.400.544.750	100	1.540.599.225	100	4.565.708.975	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
1	2	18	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	3.061.916.620	100	2.477.416.500	100	3.180.842.580	100	3.437.760.714	100	3.781.536.786	100	15.939.473.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
1	2	18	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPA yang sudah menerapkan Arsip secara baku	%	75	80	3.445.12.500	85	817.312.606	90	820.012.606	100	1.437.954.497	100	1.681.224.172	100	5.101.016.381	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
1	2	18	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Dokumen/ Arsip Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	Dok/ Arsip	9.000	10.000	2.556.400.000	11.000	2.656.905.500	12.000	2.555.860.000	13.000	5.130.926.000	14.000	4.044.889.599	14.000	16.944.981.099	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
1	2	18	17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Pemeliharaan Arsip dan Dokumen Perpustakaan	%	75	80	652.580.000	85	870.000.000	90	953.780.000	100	1.157.005.320	100	1.392.909.834	100	5.026.275.154	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
1	2	18	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya SDM tenaga Perpustakaan dan Kearsipan	Orang	450	500	1.066.130.000	700	1.776.049.500	900	3.011.475.000	1.100	4.863.330.000	1.300	6.091.039.253	1.300	16.808.023.753	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
1	3			KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH					470.949.537.318		439.685.392.915		407.566.969.544		445.071.069.404		521.131.726.150		2.284.404.695.331	
1	3	1		Pendidikan					283.089.990.302		250.365.941.392		176.836.428.798		198.577.621.135		239.045.417.490		1.147.915.399.116	
1	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	4.212.364.200	100	4.422.724.927	100	4.660.410.727	100	5.126.451.799	100	5.639.096.979	100	24.061.048.632	Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	3.025.222.000	100	3.255.045.949	100	3.989.560.510	100	4.193.438.536	100	4.615.461.998	100	19.078.728.993	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
1	3	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.645.793.000	100	2.669.613.000	100	3.042.806.839	100	3.347.087.523	100	3.681.796.275	100	14.387.096.637	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
1	3	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	258.888.659	100	1.159.135.765	100	997.223.650	100	1.646.946.015	100	2.077.390.617	100	6.139.584.706	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
1	3	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	111.600.000	100	-	100	264.203.500	100	290.623.850	100	319.686.235	100	986.113.585	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
1	3	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	-	-	-	100	86.200.000	100	64.200.000	100	67.100.000	100	217.500.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
1	3	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	183.850.000	100	183.850.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	73.205.000	100	567.955.000	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
1	3	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	1.005.689.764	100	728.800.600	100	1.018.800.600	100	1.069.740.630	100	1.097.706.688	100	4.920.738.282	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
1	3	1	15	Program Pendidikan Dayah	Persentase Santri yang Hafal Al-Qur'an dan Membaca Kitab Kuning	%	55	60	12.563.583.472	65	1.800.000.000	75	6.617.585.296	85	6.965.460.296	95	7.348.122.796	95	35.294.751.860	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
1	3	1	16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Persentase dayah Memenuhi Standar Sasi Pendidikan Dayah	%	20	20	158.945.788.091	50	173.794.737.588	60	44.351.573.193	70	58.886.623.302	85	76.015.487.191	85	511.994.209.365	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
1	3	1	17	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dayah	Persentase tenaga pendidik dayah yang memenuhi standar pendidikan dayah	%	50	55	36.077.916.000	70	33.206.016.740	80	40.899.445.290	90	36.361.985.484	100	42.960.396.870	100	189.505.760.384	Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	3	1	18	Program Pemberdayaan Santri	Persentase santri yang memiliki Kecakapan Hidup (Life skill)	%	20	20	16.395.793.116	30	3.155.355.823	50	12.664.109.244	75	18.267.121.763	95	21.524.068.605	95	72.006.448.551	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
1	3	1	19	Program Pembinaan Manajemen Dayah	Meningkatnya persentase dayah yang menerapkan standar manajemen dayah	%	35	40	6.100.000.000	50	2.700.000.000	60	8.391.425.000	70	8.880.567.500	80	9.418.624.250	80	35.490.616.750	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
1	3	1	19	Program Pembinaan Manajemen Dayah	Meningkatnya persentase dayah yang menerapkan standar manajemen dayah	%	30	40	1.621.560.000	-	-	60	784.000.000	70	823.200.000	80	864.360.000	80	4.093.120.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
1	3	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Persentase Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	%	60	65	832.910.000	70	989.100.000	75	1.421.852.602	80	1.492.945.232	85	1.567.592.494	85	6.304.400.328	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
1	3	1	21	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	Persentase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	70	70	1.950.000.000	73	2.000.000.000	75	7.359.500.000	85	7.595.450.000	95	7.854.995.000	95	26.759.945.000	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
1	3	1	21	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	Persentase dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	65	70	113.100.000	73	500.000.000	75	423.500.000	78	444.675.000	80	466.908.750	80	1.948.183.750	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
1	3	1	22	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	Peningkatan dan Pengembangan mutu, kualitas, Sarana dan Prasarana Dayah MUQ Pagar Air dan Dayah Perbatasan	Unit	5	5	34.346.027.000	5	16.976.082.000	5	35.883.872.347	5	38.920.352.520	5	48.990.193.981	5	175.116.527.848	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
1	3	1	23	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	%	50	60	3.375.545.000	70	2.745.479.000	80	3.634.000.000	90	3.838.843.685	100	4.135.132.375	100	17.729.000.060	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
1	3	1	25	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang/ Tahun	140.000	144.000	324.360.000	150.000	80.000.000	324.000	285.860.000	356.400	295.358.000	392.040	328.091.387	392.040	1.313.669.387	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
1	3	2		Kebudayaan					39.300.495.572		38.376.713.606		34.922.283.771		36.591.990.309		41.210.226.697		190.401.709.954	
1	3	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	11.616.975.800	100	13.973.223.200	100	14.773.691.180	100	14.803.016.337	100	17.059.900.551	100	72.226.807.068	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	3	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	2.198.578.023	100	4.257.285.519	100	4.266.230.460	100	4.572.853.515	100	5.110.138.865	100	20.405.086.382	Sekretariat Majelis Adat Aceh
1	3	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	12.133.115.688	100	4.810.100.000	100	3.353.500.000	100	3.458.850.000	100	3.904.735.000	100	27.660.300.688	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
1	3	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	665.575.000	100	1.032.893.935	100	1.137.400.000	100	1.251.140.000	100	1.376.254.000	100	5.463.262.935	Sekretariat Majelis Adat Aceh
1	3	2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	154.150.000	100	183.750.000	100	237.565.906	100	261.322.497	100	287.454.746	100	1.124.243.149	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
1	3	2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	72.786.440	100	96.900.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	292.820.000	100	970.706.440	Sekretariat Majelis Adat Aceh
1	3	2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	2.323.550.000	100	1.441.513.444	100	1.450.000.000	100	1.380.022.112	100	1.374.479.111	100	7.969.564.667	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
1	3	2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	1.355.750.000	100	357.550.000	100	211.750.000	100	232.925.000	100	256.217.500	100	2.414.192.500	Sekretariat Majelis Adat Aceh
1	3	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	123.500.000	-	-	-	-	-	-	-	100	123.500.000	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	
1	3	2	15	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istitadat	Jumlah Sosialisasi Hukum Adat Berdasarkan Reusam yang dihasilkan	Kab/Kota	7	4	231.000.000	5	249.000.000	14	276.000.000	18	350.000.000	23	400.000.000	23	1.506.000.000	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
																		Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh		
1	3	2	15	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah kader seni tutur tradisional yang aktif dan kolektor pelestari khasanah adat	Dokumen	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
1	3	2	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah situs dan cagar budaya yang dilestarikan	Situs / Cagar Budaya	8	2	760.226.000	2	1.077.100.000	2	1.354.100.000	2	1.610.510.000	10	5.901.936.000	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh		
1	3	2	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan Aceh	%	75	80	1.811.150.000	-	-	-	-	-	-	80	1.811.150.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
1	3	2	17	Program Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Jumlah Rekomendasi/Saran/Pendapat Wali Nanggroe kepada Pemerintahan Aceh	Rekomendasi	4	0	-	7	2.249.963.444	14	2.425.000.000	21	2.667.500.000	28	2.944.249.992	10.286.713.436	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	
1	3	2	18	Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Jumlah Gampong/Mukim yang melaksanakan Peradilan Adat yang telah diverifikasi	Jumlah	115	-	-	145	1.693.720.000	185	930.396.225	225	1.023.435.848	265	1.125.779.432	265	4.773.331.505	Sekretariat Majelis Adat Aceh
1	3	2	19	Program Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Jumlah Gampong/Mukim yang mengaktifkan kembali Lembaga Adat	Jumlah	80	-	-	115	2.831.787.241	125	2.530.000.000	135	2.783.000.000	145	3.061.300.000	145	11.206.087.241	Sekretariat Majelis Adat Aceh
1	3	2	21	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya penyusunan data dan laporan pengembangan Keragaman budaya	7 Kab/ Kota	4	4	150.000.000	4	225.000.000	5	325.000.000	5	357.500.000	5	393.250.000	23	1.450.750.000	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
1	3	2	22	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	60	60	2.891.220.600	70	2.676.550.000	80	1.161.600.000	90	1.277.760.000	100	1.405.536.000	100	9.412.666.600	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
1	3	2	22	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Penerapkan Kembali Hukum Adat dan Budaya KeAcehan dalam kehidupan bermasyarakat	%	55	60	1.941.165.666	-	-	-	-	-	-	60	1.941.165.666	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						136.461.051.444		134.344.737.917		192.471.131.975		206.230.620.461		236.838.160.713		906.345.702.510				
1	3	3	1	Keagamaan																
1	3	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	6.038.987.250	100	6.733.000.000	100	8.343.795.560	100	9.457.957.779	100	10.875.199.446	100	41.448.940.035	Dinas Syariat Islam Aceh
1	3	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	3.900.831.948	100	4.757.451.335	100	7.210.603.970	100	7.931.664.367	100	8.724.830.804	100	32.525.382.424	Sekretariat Baitul Mal Aceh
1	3	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	2.378.892.450	100	2.510.120.000	100	4.060.816.000	100	3.205.980.000	100	3.095.452.228	100	15.251.260.678	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
1	3	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	13.733.750.000	100	6.204.756.486	100	11.892.516.600	100	6.460.962.735	100	6.272.090.725	100	44.564.076.546	Dinas Syariat Islam Aceh
1	3	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.317.990.000	100	3.175.500.000	100	1.089.000.000	100	1.197.900.000	100	1.317.690.000	100	8.098.080.000	Sekretariat Baitul Mal Aceh
1	3	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.588.629.475	100	1.132.498.641	100	12.818.750.336	100	6.346.509.219	100	13.152.129.009	100	35.038.516.680	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
1	3	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	139.175.000	100	140.000.000	100	450.000.000	100	655.000.000	100	580.750.000	100	1.964.925.000	Dinas Syariat Islam Aceh
1	3	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	152.550.000	100	180.000.000	100	363.000.000	100	399.300.000	100	439.230.000	100	1.534.080.000	Sekretariat Baitul Mal Aceh
1	3	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	251.650.000	100	225.650.000	100	232.000.000	100	353.735.000	100	315.358.500	100	1.378.393.500	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
1	3	3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	728.880.000	100	300.000.000	100	124.494.000	100	136.943.400	100	150.637.740	100	1.440.955.140	Dinas Syariat Islam Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	3	3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	352.700.000	100	280.000.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	292.820.000	100	1.433.720.000	Sekretariat Baitul Mal Aceh
1	3	3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	256.050.000	100	400.500.000	100	283.750.000	100	290.000.000	100	295.000.000	100	1.525.300.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
1	3	3	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	%	100	100	122.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	122.000.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	
1	3	3	21	Program Pembinaan Syariat Islam	Jumlah tenaga keagamaan dan aparatur hukum yang memahami pelaksanaan syariat islam di Aceh	Jumlah	2.915	1.361	4.149.623.623	-	-	-	-	-	-	-	-	4.149.623.623	Dinas Syariat Islam Aceh	
1	3	3	19	Program Pembinaan Syariat Islam	Persentase Pembayar ZIS	%	60	60	53.297.982.343	-	-	-	-	-	-	-	60	53.297.982.343	Sekretariat Baitul Mal Aceh	
1	3	3	20	Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga sosial keagamaan	%	75	75	633.680.000	-	-	-	-	-	-	-	75	633.680.000	Sekretariat Baitul Mal Aceh	
1	3	3	21	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang diselesaikan	%	70	75	1.087.420.000	-	-	-	-	-	-	-	75	1.087.420.000	Dinas Syariat Islam Aceh	
1	3	3	22	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Persentase peran ulama dalam pembangunan aceh	%	75	80	14.332.299.655	85	8.441.355.133	90	10.912.479.450	95	13.085.239.875	99	15.448.531.029	99	62.219.905.142	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
1	3	3	23	Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Peningkatan pemahaman wawasan islam	Orang	1.500	1.649	7.199.949.200	2.649	2.300.000.000	3.649	1.574.509.000	4.649	2.326.959.900	5.649	2.072.400.000	5.649	15.473.818.100	Dinas Syariat Islam Aceh
1	3	3	24	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Angka melek Al-Quran penduduk Aceh yang beragama islam	%	55	63	5.505.439.000	65	9.800.000.000	73	12.193.423.800	75	10.641.230.980	85	16.019.629.078	85	54.159.722.858	Dinas Syariat Islam Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	3	3	25	Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Jumlah kasus konflik SARA yang terjadi	Kasus	1	1	88.000.000	1	300.000.000	1	165.000.000	1	368.500.000	1	405.350.000	1	1.326.850.000	Dinas Syariat Islam Aceh
1	3	3	27	Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam	Persentase Gampong yang melaksanakan Pengajian ba'da Magrib	%	75	77,2	16.874.381.500	78	100.000.000	-	-	-	-	-	77,2	16.974.381.500	Dinas Syariat Islam Aceh	
1	3	3	29	Program Silaturahmi Ulama - Ulama	Meningkatnya Ukhwah Islamiyah, Wathaniah, Insaniah dalam Beramal Ma'ruf Nahi Mungkar	%	45	50	330.190.000	80	587.781.000	85	1.270.280.000	90	2.192.261.000	95	2.297.500.000	95	6.678.012.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
1	3	3	30	Program Pembinaan Dakwah dan peribadatan sebagai Syiar Islam	Persentase pembinaan syariat islam bagi dai, takmir mesjid, khatib dan aparatur gampong	%	78	0	-	85	19.634.792.032	90	16.490.851.800	95	23.208.837.615	98	25.529.721.377	84.864.202.824	Dinas Syariat Islam Aceh	
					Persentase Gampong yang melaksanakan Pengajian ba'da Magrib	%	65	75	-	85	-	-	-	-	-	-	-	85	-	Dinas Syariat Islam Aceh
					Tersedianya Jumlah Kajian/Riset/Referensi Syariat Islam	Jumlah	10	10	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	Dinas Syariat Islam Aceh
1	3	3	31	Program Pengelolaan ZISWAF	Persentase Peningkatan Pemahaman ZISWAF	%	5	-	-	10	739.234.290	11	10.064.165.372	12	5.505.237.276	13	6.321.648.986	13	22.630.285.924	Sekretariat Baitul Mal Aceh
1	3	3	32	Program Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Jumlah Tenaga keagamaan dan aparatur hukum yang memahami pelaksanaan syariat Islam	Orang	2615	-	-	2915	2.550.000.000	3315	4.007.009.848	3765	5.058.182.312	4215	6.140.568.973	17.755.761.133	Dinas Syariat Islam Aceh	
					Jumlah tenaga keagamaan dan aparatur hukum yang memahami pelaksanaan syariat islam di Aceh	Jumlah	2.615	-	-	2.915	-	-	-	-	-	-	2.915	-	-	Dinas Syariat Islam Aceh
					Tersedianya Jumlah Kajian/Riset/Referensi Syariat Islam	Jumlah	5	-	-	10	-	20	-	40	-	60	-	60	-	Dinas Syariat Islam Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	3	3	33	Program Penguatan, pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariah Islam	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Syariah Islam yang diselesaikan	%	70	0	-	75	4.700.000.000	80	6.654.590.000	85	8.120.049.000	90	9.549.792.676	29.024.431.676	Dinas Syariah Islam Aceh			
					Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Syariah Islam yang diselesaikan	%	70	-	-	75	-	85	-	90	-	95	-	95	-	Dinas Syariah Islam Aceh		
					Jumlah Regulasi Syariah Islam yang di susun	Jumlah	1	1	-	3	-	6	-	9	-	12	-	12	-	Dinas Syariah Islam Aceh		
1	3	3	34	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Persentase Peningkatan Pendapatan ZISWAF	%	-	-	-	35	2.303.160.000	45	2.986.500.000	55	3.285.150.000	65	3.613.665.000	65	12.188.475.000	Sekretariat Baitul Mal Aceh		
1	3	3	35	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	Persentase peran Ulama dalam kehidupan bermasyarakat	%	75	-	-	85	2.440.939.000	90	3.000.000.000	95	10.481.573.700	99	9.200.000.000	99	25.122.512.700	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh		
1	3	3	36	Program Peningkatan Pendistribusian dan Peningkatan ZISWAF	Persentase Penurunan Angka Kemiskinan Aceh (Dihitung dari 10% Target Penurunan Angka Kemiskinan Aceh)	%	-	-	-	10	50.958.000.000	11	62.331.596.239	12	73.605.246.302	13	82.323.065.143	13	269.217.907.684	Sekretariat Baitul Mal Aceh		
1	3	3	37	Program Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Mesjid Raya Baiturrahman Aceh	Meningkatnya aktivitas penyelenggaraan peribadatan dan pengembangan kelembagaan MRB	%	50	60	-	65	3.450.000.000	70	13.710.000.000	75	11.650.000.000	80	12.405.100.000	80	41.215.100.000	Dinas Syariah Islam Aceh		
1	3	3	41	Program Pelayanan BLUD dalam Pelayanan Ibadah kepada Masyarakat	Meningkatnya aktivitas penyelenggaraan peribadatan dan kelembagaan BLUD MRB	%	50	60	-	-	2.000.000.000	-	-	-	-	-	60	2.000.000.000	Dinas Syariah Islam Aceh			
1	3	4		Kesatuan dan Perdamaian							12.098.000.000		16.598.000.000		3.337.125.000		3.670.837.500		4.037.921.250		39.741.883.750	
1	3	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi kantor berjalan dengan baik	%	100	100	-	-	3.085.516.000	100	4.208.900.000	100	1.039.500.000	100	1.143.450.000	100	1.257.795.000	100	10.735.161.000	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	3	4	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	802.325.000	100	700.000.000	100	577.500.000	100	635.250.000	100	698.775.000	100	3.413.850.000	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
1	3	4	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	98.650.000	100	100.000.000	100	115.500.000	100	127.050.000	100	139.755.000	100	580.955.000	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
1	3	4	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	250.864.000	100	100.000.000	100	218.625.000	100	240.487.500	100	264.536.250	100	1.074.512.750	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
1	3	4	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	206.320.000	100	200.000.000	100	115.500.000	100	127.050.000	100	139.755.000	100	788.625.000	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
1	3	4	15	Program Konsolidasi Perdamaian Aceh	Persentase jumlah konsolidasi pelaksanaan perdamaian Aceh	%	35	40	4.745.060.000	50	6.189.100.000	60	577.500.000	70	635.250.000	80	698.775.000	80	12.845.685.000	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
1	3	4	16	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik	Peningkatan persentase masyarakat korban konflik yang dibina	%	10	11	414.450.000	17	2.300.000.000	24	231.000.000	32	254.100.000	40	279.510.000	40	3.479.060.000	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
1	3	4	17	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik	Persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial korban konflik	%	13	14	200.000.000	22	1.400.000.000	31	231.000.000	41	254.100.000	52	279.510.000	52	2.364.610.000	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
1	3	4	18	Program Pendidikan Damai	Persentase korban konflik yang mengikuti pendidikan damai	%	20	20	1.515.975.000	30	700.000.000	40	115.500.000	50	127.050.000	60	139.755.000	60	2.598.280.000	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
1	3	4	19	Program Pencegahan dan Mitigasi Konflik	Persentase jumlah butir-butir MoU Helsinki yang sudah dilaksanakan	%	16	20	778.840.000	25	700.000.000	30	115.500.000	40	127.050.000	40	139.755.000	40	1.861.145.000	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
2				PILIHAN					1.427.048.578.987		1.052.647.511.767		1.057.342.465.413		1.126.406.297.215		1.281.560.583.207		5.945.005.436.590	
2	1			Kelautan dan Perikanan					346.627.553.613		282.083.812.952		221.797.208.890		240.556.418.874		309.765.635.538		1.400.830.629.867	
2	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	7.234.056.700	100	4.830.114.227	100	5.423.826.700	100	5.423.826.700	100	5.423.826.700	100	28.335.651.027	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2.286.610.000	100	2.402.760.000	100	3.988.000.000	100	3.988.000.000	100	3.988.000.000	100	16.653.370.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
2	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
2	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	-	-	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
2	1	15		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Berkurangnya jumlah KK miskin di pulau-pulau kecil	KK	328	292	4.744.385.073	-	-	-	-	-	-	-	292	4.744.385.073	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
2	1	16		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Berkurangnya kasus IUU fishing	%	10	10	4.692.585.000	-	-	-	-	-	-	-	10	4.692.585.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
2	1	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	82.692.1	98	123.083.141.567	108	59.544.164.777	118	54.239.094.237	128.470	60.842.508.277	138.682	82.390.682.876	138.682	380.099.591.734	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
2	1	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	184.190.8	197.132	196.940.229.773	205.741	180.205.395.204	214.350	130.862.384.717	222.959	142.260.732.845	231.568	184.164.327.093	231.568	834.433.069.632	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
2	1	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya nilai ekspor perikanan dan kelompok pengolah ikan				4.211.495.500		1.000.000.000		-		-		-	5.211.495.500	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
					Nilai ekspor perikanan	USD	634.679	1.142.899.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.142.899.8	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
					Kelompok pengolah ikan	Kelompok	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
2	1	25		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	3.435.050.000	80	3.500.000.000	80	3.500.000.000	90	3.700.000.000	90	4.000.000.000	90	18.135.050.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
2	1	27		Program Pemberdayaan	Berkurangnya jumlah KK miskin di	KK	328	-	-	150	9.224.404.498	200	11.719.174.009	250	11.368.003.461	300	16.016.832.914	300	48.328.414.882	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Ekonomi Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil	pesisir dan pulau-pulau kecil																	
2	1	28	Program peningkatan nilai tambah produksi perikanan	Meningkatnya nilai ekspor perikanan dan jumlah pengolahan ikan		-	12.639.487.546		5.364.729.227		5.973.347.591		6.581.965.955		30.559.530.319		Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh			
			Nilai ekspor perikanan	USD	634.679	-	1.250.000	-	1.357.000	-	1.475.000	-	1.552.000	-	1.552.000	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh			
			Jumlah masyarakat pengolah ikan	Klp	25	-	25	-	27	-	30	-	35	-	35	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh			
2	1	29	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Perairan	Ha	77.856	-	212.619	8.037.486.700	280.000	6.000.000.000	280.500	6.300.000.000	281.100	6.500.000.000	281.100	26.837.486.700	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh		
2	2		Pariwisata			128.189.137.860		76.867.058.570		103.639.291.900		109.428.084.282		145.464.981.165		563.588.553.777				
1	2	12	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wunjungan wisatawan wusantara dan mancanegara	Wisatawan	2.489.467	2.862.887	6.832.302.296	-	-	-	-	-	2.862.887	6.832.302.296	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh			
1	2	12	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kawasan pariwisata strategis provinsi	Kawasan	1	3	115.758.652.564	3	58.717.058.570	3	83.131.035.037	3	87.047.985.188	3	118.022.073.341	3	462.676.804.700	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
1	2	12	17	Program Pengembangan Kemitraan	Terjalinnnya kemitraan pengelolaan pariwisata	Orang	900	900	5.598.183.000	-	-	-	-	-	900	5.598.183.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh			
1	2	12	20	Program pemasaran pariwisata	Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan	Hari	1,97	-	3.292.320; 2) 3	18.150.000.000	1) 3.786.169; 2) 3	20.508.256.863	1) 4.354.094; 2) 3	22.380.099.094	1) 5.007.208; 2) 3	27.442.907.824	1) 5.007.208; 2) 3	88.481.263.781	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
2	3			Pertanian			581.262.455.292		372.954.795.912		327.356.195.490		379.971.309.130		395.898.551.917		2.057.443.307.741			
2	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	25.839.801.640	100	18.454.117.348	100	20.485.533.383	100	19.416.070.516	100	20.741.845.574	100	104.937.368.461	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
2	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	6.042.612.069	100	5.460.696.362	100	4.323.063.431	100	4.323.063.431	100	4.323.063.431	100	24.472.498.724	Dinas Peternakan Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	17.769.248.330	100	3.232.500.000	100	10.082.918.842	100	9.664.658.068	100	12.087.391.640	100	52.836.716.880	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
2	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	3.096.781.700	100	4.655.830.000	100	2.098.140.000	100	2.098.140.000	100	2.098.140.000	100	14.047.031.700	Dinas Peternakan Aceh
2	3	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	100	250.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	850.000.000	Dinas Peternakan Aceh
2	3	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	100	1.393.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.993.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
2	3	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	186.200.000	100	223.440.000	100	337.130.500	100	337.130.500	100	337.130.500	100	1.421.031.500	Dinas Peternakan Aceh
2	3	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	-	-	100	264.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.764.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
2	3	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya indeks yang diterima petani (It)	Indeks			3.516.755.000		18.606.932.518		15.174.414.957		33.550.851.939		38.732.819.801		109.581.774.215	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
					Tanaman Pangan	Indeks	116.99	120.05	-	121.61	-	123.19	-	124.79	-	126.41	-	126.41	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
					Hortikultura	Indeks	129.10	129.22	-	129.29	-	129.35	-	129.42	-	129.48	-	129.48	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
					Perkebunan	Indeks	113.10	115.28	-	116.38	-	117.50	-	118.63	-	119.77	-	119.77	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
2	3	16		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya rasio penyuluh tersertifikasi	%	3	4	10.137.053.958	-	-	-	-	-	-	-	4	10.137.053.958	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	3	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi jenis komoditi ekspor pertanian (padi)	Ton	2.204.992	2.300.000	1.486.505.000	-	-	-	-	-	-	-	2.300.000	1.486.505.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
2	3	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas pangan pokok utama (padi)	Ton/Ha	5	5	102.505.728.608	5	940.000.000	-	-	-	-	-	5	103.445.728.608	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
2	3	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian	%	40	50	2.135.600.000	-	-	-	-	-	-	-	50	2.135.600.000	Dinas Peternakan Aceh	
2	3	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Ton			222.068.158.106		194.069.765.366		143.400.858.464		169.250.009.761		145.614.351.362		874.403.143.059	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
				Padi	Ton	2.204.992	2.539.311	-	2.625.047	-	2.713.675	-	2.805.293	-	2.900.000	-	2.900.000	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
				Jagung	Ton	363.033	363.033	-	383.059	-	404.188	-	426.480	-	450.000	-	450.000	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
				Kedelai	Ton	40.953	40.953	-	41.930	-	42.929	-	43.952	-	3.136	-	3.136	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
				Bawang Merah	Ton	7.414	7.414	-	7.785	-	8.172	-	8.583	-	9.012	-	9.012	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
				Cabai	Ton	50.108	50.108	-	52.613	-	55.244	-	58.006	-	60.906	-	60.906	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
				Kelapa Sawit	Ton	399.618	515.416	-	554.036	-	577.828	-	635.346	-	693.626	-	693.626	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
				Kelapa	Ton	62.700	62.700	-	63.500	-	64.000	-	64.500	-	65.000	-	65.000	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
				Kopi	Ton	65.231	65.120	-	65.200	-	65.300	-	65.400	-	65.500	-	65.500	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
				Kakao	Ton	42.889	43.500	-	45.000	-	46.000	-	46.200	-	46.800	-	46.800	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
2	3	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit				22.857.377.700		15.066.317.394		13.807.399.212		16.727.765.120		28.642.819.933		97.101.679.359	Dinas Peternakan Aceh
				Bakteri	%	2	17	-	15	-	14	-	12	-	11	-	11	-	Dinas Peternakan Aceh
				Parasit	%	22	51	-	46	-	41	-	37	-	33	-	33	-	Dinas Peternakan Aceh
				Protozoa	%	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Virus	%	4	19	-	18	-	16	-	14	-	13	-	13	-	-	Dinas Peternakan Aceh	
2	3	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi daging dan telur		104.796.857.847		70.669.668.360		84.992.027.885		87.901.375.719		101.250.002.200		449.609.932.011	Dinas Peternakan Aceh		
		Daging Ruminansia	Ton	17.657	45.320	-	49.852	-	54.837	-	60.321	-	66.353	-	66.353	-	Dinas Peternakan Aceh		
		Daging Non Ruminansia	Ton	21.670	24.915	-	27.407	-	30.147	-	33.162	-	36.478	-	36.478	-	Dinas Peternakan Aceh		
		Telur	Ton	18.329	21.395	-	23.535	-	25.888	-	28.477	-	31.324	-	31.324	-	Dinas Peternakan Aceh		
2	3	23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Indek yang diterima peternak (It)	Indeks	120,26	133,52	7.659.748.000	146,87	6.163.269.754	161,56	6.498.495.121	177,72	7.349.185.181	195,49	8.199.875.242	195,49	35.870.573.298	Dinas Peternakan Aceh
2	3	25	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	9.469.390.000	80	6.723.378.449	80	5.500.000.000	90	5.300.000.000	90	5.400.000.000	90	32.392.768.449	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
2	3	25	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	4.337.525.000	80	2.903.950.608	80	4.200.000.000	90	4.300.000.000	90	4.162.869.500	90	19.904.345.108	Dinas Peternakan Aceh
2	3	26	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Tingkat penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan yang diterapkan	%	80	80	8.781.650.000	-	-	-	-	-	-	-	80	8.781.650.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
2	3	27	Program Pelayanan Pertanian Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Meningkatnya Pelayanan Pertanian Masyarakat	%	3	4	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4	2.000.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
2	3	28	Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya rasio penyuluh tersertifikasi	%	3	4	15.313.457.266	4	23.877.929.753	4	15.556.213.695	4	18.853.058.895	5	23.408.242.734	5	97.008.902.343	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	3	29	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kilo Kalori Per Hari)	Kkal/kapita/hari	3.612,10	3.160	11.262.005.068	-	-	-	-	-	-	-	3.160	11.262.005.068	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
2	4		Kehutanan			123.756.018.945	112.320.908.686	150.971.251.689	150.549.991.743	165.335.772.414	702.933.943.478								
2	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	5.899.964.900	100	5.895.000.000	100	5.953.950.000	100	6.013.489.500	100	6.073.624.395	100	29.836.028.795	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2	4	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	8.712.720.000	100	8.184.323.800	100	8.266.167.038	100	8.348.828.708	100	8.432.316.995	100	41.944.356.542	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2	4	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	22.800.000	-	-	100	23.800.000	100	24.038.000	100	24.278.380	100	94.916.380	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2	4	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	583.726.000	100	300.000.000	100	310.000.000	100	315.000.000	100	315.000.000	100	1.823.726.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2	4	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan luas hutan sosial yang dibina	Ha	30.000	3.486	35.036.218.074	-	-	-	-	-	-	-	3.486	35.036.218.074	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
2	4	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	1.727	1.806	14.892.849.502	-	-	-	-	-	-	-	1.806	14.892.849.502	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
2	4	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	0,49	0,49	55.338.531.469	-	-	-	-	-	-	-	0,49	55.338.531.469	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
2	4	20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Penurunan luas kawasan hutan yang dirambah	Ha	8.143	445	2.133.669.000	-	-	-	-	-	-	-	445	2.133.669.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
2	4	21	Program Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan	Meningkatnya Indeks Tutupan Hutan	ITH	65,18	-	67,25	97.941.584.886	69	116.144.434.651	71	117.166.792.935	72	133.302.070.769	72	464.554.883.241	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
2	4	22	Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatnya indeks kualitas udara	%	Indeks	-	-	-	58	8.500.000.000	58,5	8.000.000.000	59	7.000.000.000	59	23.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	4	23		Program pemulihan spesies kunci terancam punah dan mitigasi konflik satwa liar	Menurunnya persentase konflik satwa liar	%	0	-	-	-	75,00	11.772.900.000	72,00	10.681.842.600	70,00	10.188.481.875	70,00	32.643.224.475	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
2	4	24		Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Penurunan persentase luas kerusakan kawasan ekosistem pesisir dan laut	%	74	80	838.540.000	-	-	-	-	-	-	80	838.540.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh		
2	4	25		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Peningkatan persentase hutan dan lahan	%	69	75	297.000.000	-	-	-	-	-	-	75	297.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh		
2	5			Energi dan Sumberdaya Mineral					84.995.417.529			72.612.829.547			60.320.384.020		64.795.882.617		339.305.472.437	
2	5	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	2.781.000.000	100	3.807.110.000	100	3.845.181.100	100	3.883.632.911	100	3.922.469.240	100	18.239.393.251	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
2	5	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	3.056.000.000	100	2.770.000.000	100	2.797.700.000	100	2.825.677.000	100	2.853.933.770	100	14.303.310.770	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
2	5	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	1.190.000	100	211.900.000	100	214.019.000	100	216.159.190	100	218.320.782	100	872.298.972	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
2	5	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	310.000.000	100	315.000.000	100	1.525.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
2	5	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Usaha Pertambangan yang Memenuhi Kaidah Pertambangan	%	80	85	5.480.464.964	-	-	-	-	-	-	85	5.480.464.964	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh		
2	5	18		Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya peningkatan koordinasi pengelolaan minyak dan gas bumi	%	87	90	2.052.233.000	-	-	-	-	-	-	90	2.052.233.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh		
2	5	20		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	96,26	30	52.247.429.565	30	572.378.640	-	-	-	-	30	52.819.808.205	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	5	21		Program Pemanfaatan Pemerintah dan Sumber Daya Mineral	Persentase pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral bersih dan terbarukan	%	78	85	19.066.390.000	-	-	-	-	-	-	85	19.066.390.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh		
2	5	22		Program Pengelolaan Energi	Jumlah ketersediaan dan pemakaian daya listrik	%	20	-	-	40,8	47.840.519.847	51,2	18.924.972.911	61,6	18.741.967.229	72	20.903.042.270	72	106.410.502.257	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
2	5	23		Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	Persentase peningkatan pengelolaan usaha pertambangan, penyelidikan geologi, dan pemanfaatan air tanah	%	-	-	-	23,00	17.110.921.060	41,00	23.449.085.713	60,00	24.842.947.690	68,00	30.583.116.555	68,00	95.986.071.018	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
2	5	24		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Bersih Terbarukan	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total Energi	%	0,54	-	-	-	28,62	7.050.000.000	28,65	9.500.000.000	28,96	6.000.000.000	28,96	22.550.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	
2	6			Perdagangan					56.161.945.256		44.828.976.125		56.338.364.073		56.013.485.954		60.249.866.758		273.592.638.166	
2	6	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	IKK (%)	28,46	28,46	2.581.956.118	30,1	3.000.000.000	40,1	6.292.159.736	43,1	6.694.011.045	45,5	7.065.862.354	45,5	25.633.989.253	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2	6	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas	USD	22.869.513	100.000.000	3.029.758.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	3.029.758.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
2	6	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terjaganya inflasi daerah	%	4	3	48.550.231.138	3	35.645.000.000	2	38.322.188.554	2	37.952.486.437	2	41.857.940.367	2	202.327.846.496	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2	6	20		Program peningkatan ekspor dan pengendalian impor	Meningkatnya pertumbuhan ekspor dan terkendalinya impor					-	4.500.000.000		8.574.015.783		8.366.988.472		8.276.064.037		29.717.068.292	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
					Pertumbuhan Ekspor	%	-58	-	-	14	-	14	-	6	-	6	-	6	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
					Pertumbuhan Impor	%	-75	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	6	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	2.000.000.000	80	1.683.976.125	80	3.150.000.000	90	3.000.000.000	90	3.050.000.000	90	12.883.976.125	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2	7			Perindustrian				47.138.451.103		31.928.297.507		75.666.598.544		66.657.807.327		70.846.331.608		292.237.486.089		
2	7	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	3.116.208.948	100	2.974.800.000	100	2.442.772.000	100	2.442.772.000	100	2.442.772.000	100	13.419.324.948	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2	7	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.487.011.000	100	909.668.948	100	1.941.696.948	100	1.941.696.948	100	1.941.696.948	100	8.221.770.792	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2	7	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	185.300.000	100	185.300.000	100	185.300.000	100	185.300.000	100	185.300.000	100	926.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2	7	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	105.700.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	225.700.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2	7	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari IKM	Orang	77.000	77.380	7.094.595.316	-	-	-	-	-	-	-	-	77.380	7.094.595.316	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2	7	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya jumlah IKM	IKM	80	80	1.600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.600.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2	7	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Meningkatnya kontribusi sektor industri	%	5	7	33.549.635.839	-	-	-	-	-	-	-	-	7	33.549.635.839	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2	7	21		Program pengembangan industri kreatif dan aneka	Meningkatnya kontribusi sub sektor industri kreatif dan aneka	%	5	-	-	5	14.631.825.000	5,5	16.161.594.277	5,5	17.535.507.219	6	21.724.098.309	6	70.053.024.805	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
2	7	22		Program pengembangan industri pangan	Meningkatnya kontribusi sub sektor industri pangan terhadap total PDRB	%	2	-	-	3	4.373.232.441	4	20.622.865.365	4	21.347.710.285	4	27.301.181.926	4	73.644.990.017	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	7	23		Program perwilayahan industri	Meningkatnya jumlah kawasan industri dan sentra industri			-	8823.471.118		34282.369.954		23.174.820.875		17.221.282.425		83.501.944.372	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
					Kawasan Industri (KI)	Kawasan	2	-	-	2	-	3	-	3	-	3	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
					Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM)	Unit	-	-	-	6	-	6	-	7	-	9	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh		
2	8			Transmigrasi					58.917.599.389		59.050.832.468		64.992.596.103		62.908.815.885		69.203.561.190	315.073.405.035		
2	8	15		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase pencapaian SPM sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	%	45	95	58.917.599.389	96	43.572.517.468	97	43.220.503.373	98	41.422.154.922	99	45.376.386.336	99	232.509.161.488	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
2	8	19		Program Pengembangan sosial ekonomi wilayah transmigrasi	Persentase masyarakat kawasan transmigrasi yang keluar dari desil 1 dan 2	%	35	-	30	15.478.315.000	45	21.772.092.730	70	21.486.660.963	100	23.827.174.854	100	82.564.243.547	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
3				PENUNJANG URUSAN					353.217.633.900		312.759.957.204		316.772.635.167		345.828.920.619		400.763.420.848	1.729.342.567.738		
3	1			Inspektorat					17.196.870.488		13.814.325.704		17.835.177.890		16.741.185.388		18.079.930.231	83.667.489.701		
3	1	3		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan perlengkapan administrasi perkantoran	%	100	100	3.014.684.000	100	2.213.765.716	100	3.255.740.592	100	3.409.377.622	100	3.470.696.503	100	15.364.264.433	Inspektorat Aceh
3	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.703.815.408	100	1.399.150.000	100	2.514.643.104	100	2.440.375.259	100	2.572.394.022	100	10.630.377.793	Inspektorat Aceh
3	1	1		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	225.600.000	100	177.000.000	100	248.724.000	100	261.160.200	100	274.218.210	100	1.186.702.410	Inspektorat Aceh
3	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang memenuhi kompetensi	%	100	100	177.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	100	177.000.000	Inspektorat Aceh
3	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan	%	100	-	100	183.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	183.000.000	Inspektorat Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total (Laopran Wajib)																		
3	1	15		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-	-	11.107.701.080	-	8.675.289.500	-	9.654.794.246	-	8.369.782.562	-	9.397.957.264	-	47.205.524.652	Inspektorat Aceh	
				Persentase objek pemeriksaan dan kasus pengaduan yang diperiksa	%	50	55	-	61	-	80	-	73	-	81	-	81	-		
				Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;	%	50	55	-	61	-	50	-	73	-	81	-	81	-	Inspektorat Aceh	
3	1	16		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	%	48	53	968.070.000	58	1.166.120.488	64	2.161.275.948	70	2.260.489.745	77	2.364.664.232	77	8.920.620.413	Inspektorat Aceh	
3	2			Perencanaan				42.774.529.554		47.218.368.014		53.037.635.500		54.879.950.000		56.963.195.000		254.873.678.068		
3	2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	6.330.275.000	100	7.347.365.000	100	7.479.000.000	100	7.789.450.000	100	7.423.445.000	100	36.369.535.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2.115.453.845	100	4.957.021.500	100	2.595.000.000	100	2.725.500.000	100	2.800.000.000	100	15.192.975.345	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	2	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	558.250.000	-	-	100	400.000.000	100	-	100	450.000.000	100	1.408.250.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	2	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	839.600.000	100	1.037.500.000	100	900.000.000	100	950.000.000	100	1.000.000.000	100	4.727.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tercapainya jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan	Dokumen	5	5	7.711.054.700	17	271.000.000	17	650.000.000	17	675.000.000	17	750.000.000	17	10.057.054.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Capaian Kinerja dan Keuangan	keuangan tepat waktu																
3	2	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	%	80	80	4.582.459.282	80	11.030.991.134	90	10.654.635.500	90	11.085.000.000	90	11.500.000.000	90	48.853.085.916	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	2	16	Program Kerjasama Pembangunan	Sinkronisasi kebijakan pembangunan Aceh dengan provinsi Se-Sumatera	%	80	80	589.982.855	85	1.787.155.000	85	1.950.000.000	87	2.150.000.000	90	2.225.000.000	90	8.702.137.855	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	2	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terkoordinirnya kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan	%	80	80	1.310.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.310.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	2	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan proses perencanaan tepat waktu	%	80	80	10.817.051.999	80	8.827.758.400	80	9.439.000.000	90	9.615.000.000	90	10.035.500.000	90	48.734.310.399	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	2	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	%	80	80	2.880.726.800	80	4.466.026.980	80	3.900.000.000	90	4.250.000.000	90	4.445.000.000	90	19.941.753.780	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	2	23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan sosial budaya	%	80	80	1.583.128.500	80	1.869.000.000	80	4.300.000.000	90	4.515.000.000	90	4.740.750.000	90	17.007.878.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	2	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	80	80	2.945.123.684	80	2.394.550.000	80	7.220.000.000	90	7.575.000.000	90	7.918.500.000	90	28.053.173.684	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	2	28	Program Diseminasi dan Informasi Teknologi	Tersosialisasinya hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Diseminasi	5	6	83.894.148	-	-	-	-	-	-	-	6	83.894.148	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
3	2	29		Program Inovasi Daerah	Kebijakan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan	Kebijakan	1	1	427.528.741	5	3.230.000.000	5	3.550.000.000	5	3.550.000.000	5	3.675.000.000	5	14.432.528.741	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	3			Keuangan					83.435.143.618		78.416.913.204		72.361.310.372		73.896.206.094		85.299.099.536		393.408.672.824	
3	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	14.309.164.509	100	13.045.847.527	100	12.657.605.385	100	12.011.215.763	100	12.807.290.187	100	64.831.123.371	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
3	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	11.063.700.000	100	12.010.700.000	100	8.471.330.000	100	8.471.330.000	100	8.471.330.000	100	48.488.390.000	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
3	3	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	664.000.000	100	659.250.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100	5.673.250.000	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
3	3	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	742.700.000	100	676.200.000	100	242.000.000	100	242.000.000	100	242.000.000	100	2.144.900.000	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
3	3	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Dokumen	5	5	1.825.025.000	17	3.245.750.000	17	2.000.000.000	17	2.000.000.000	17	2.000.000.000	17	11.070.775.000	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
3	3	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	WTP/ WDP	WTP	WTP	50.392.739.109	WTP	19.762.379.100	WTP	20.693.687.787	WTP	20.619.867.999	WTP	23.466.535.053	WTP	134.935.209.048	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
3	3	16		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Tercapainya kabupaten/kota yang mendapat WTP	Kab/Kota	22	22	4.437.815.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4.437.815.000	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
3	3	24		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	%	86,22	-	-	60	5.604.875.000	70	5.739.337.012	80	5.346.197.756	100	6.294.191.121	100	22.984.600.889	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
3	3	25		Program peningkatan pendapatan Aceh	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	%	17	-	-	25	23411.911.577	26	21.107.350.188	28	23.755.594.576	30	30.567.753.175	30	98.842.609.516	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh		
3	4			Kepegawaian						51.205.863.624			23.832.598.779		25.334.277.587		27.847.705.346		30.612.475.881		158.832.921.217	
3	4	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	3.677.127.894	100	2.839.943.261	100	4.557.574.752	100	4.005.457.227	100	5.676.502.950	100	20.756.606.084	Badan Kepegawaian Aceh		
3	4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	16.471.815.000	100	3.367.655.404	100	3.146.000.000	100	3.460.600.000	100	3.806.660.000	100	30.252.730.404	Badan Kepegawaian Aceh		
3	4	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	195.600.000	100	120.000.000	100	302.500.000	100	310.000.000	100	366.025.000	100	1.294.125.000	Badan Kepegawaian Aceh		
3	4	4		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase jumlah Purna Tugas yang terlatih	%	100	100	284.658.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	284.658.000	Badan Kepegawaian Aceh		
3	4	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang memenuhi kompetensi	%	100	100	28.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	28.250.000	Badan Kepegawaian Aceh		
3	4	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	100	-	Badan Kepegawaian Aceh		
3	4	16		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase kesejahteraan aparatur	%	100	100	1.288.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.288.770.000	Badan Kepegawaian Aceh		
3	4	17		Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	Persentase pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai ASN Pemerintah Aceh	%	70	75	28.240.776.730	100	10.910.000.114	100	8.483.750.000	100	10.452.750.000	100	10.182.500.000	100	68.269.776.844	Badan Kepegawaian Aceh		
3	4	18		Program Peningkatan Kapasitas	Persentase kesejahteraan anggota KORPRI	%	43	45	477.521.000	55	3.500.000.000	65	2.694.452.835	75	2.963.898.119	85	3.260.287.931	85	12.896.159.885	Badan Kepegawaian Aceh		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Kelembagaan Organisasi KORPRI	dan Persentase ASN yang Melek Al-Qur'an																
3	4	21	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Al Quran	Persentase aparatur yang Melek Al-Qur'an	%	40	45	541.345.000	-	-	-	-	-	-	-	-	541.345.000	Badan Kepegawaian Aceh	
3	4	22	Program Pengembangan Sistim dan Teknologi Informasi Kepegawaian	Persentase Pengembangan Sistim dan Informasi Kepegawaian terintegrasi	%	45	55	-	65	3.095.000.000	75	6.150.000.000	85	6.655.000.000	90	7.320.500.000	90	23.220.500.000	Badan Kepegawaian Aceh
3	5		Pendidikan dan Pelatihan					149.582.818.980		134.634.491.062		140.904.152.998		164.468.204.890		201.047.904.408		790.637.572.338	
3	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	5.529.104.070	100	4.071.329.791	100	7.837.376.608	100	8.621.114.268	100	9.483.225.695	100	35.542.150.432	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
3	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	3.382.937.000	100	2.360.000.000	100	3.231.788.395	100	3.554.967.235	100	3.910.463.958	100	16.440.156.588	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
3	5	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	260.275.000	100	256.955.001	100	500.940.000	100	551.034.000	100	606.137.400	100	2.175.341.401	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
3	5	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	5.913.430.000	-	-	100	4.364.088.886	100	4.800.497.775	100	5.280.547.552	100	20.358.564.213	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
3	5	15	Program Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur sesuai Kebutuhan Instansi	%	100	-	-	100	6.200.000.000	100	6.673.500.000	100	7.320.850.000	100	8.032.935.000	60	28.227.285.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
3	5	16	Program kapasitas sumber daya manusia non aparatur	Persentase mahasiswa terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas yang bergengsi di tingkat nasional dan internasional	%	25	25	116.171.397.730	-	-	-	-	-	-	-	-	116.171.397.730	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh																		
3	5	17		Program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang berkompetensi	%	20	20	7.776.226.270	-	-	-	-	-	-	-	-	7.776.226.270	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	
3	5	18		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	Persentase mahasiswa terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas yang bergengsi di tingkat nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh	%	25	-	35	109.191.180.000	40	104.899.056.502	45	124.374.851.500	50	155.161.490.628	50	493.626.578.630	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	
3	5	19		Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	Persentase Aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur	%	50	80	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	
3	5	20		Program Pendidikan Kedinasan	Persentase aparatur yang menduduki jabatan sesuai dengan diklat kedinasan	%	38	40	10.049.448.910	50	12.555.026.270	75	13.397.402.607	80	15.244.890.112	85	18.573.104.175	85	69.819.872.074	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
3	6			Penunjang Lainnya					9.022.407.636		14.843.260.441		7.300.080.820		7.995.668.901		8.760.815.792		47.922.233.590	
3	6	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	4.227.849.520	100	10.009.899.736	100	3.729.501.675	100	4.102.451.842	100	4.512.697.026	100	26.582.399.799	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
3	6	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	4.028.738.116	100	2.845.349.705	100	1.966.050.075	100	2.162.655.082	100	2.378.920.591	100	13.381.713.569	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
3	6	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	100	144.200.000	100	144.200.000	100	144.200.000	100	144.200.000	100	576.800.000	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
3	6	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	25.000.000	100	272.475.000	100	215.476.800	100	237.024.480	100	260.726.928	100	1.010.703.208	Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
3	6	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
3	6	15		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	%	30	35	194.000.000	40	521.616.000	50	596.869.350	65	656.556.285	85	722.211.914	85	2.691.253.549	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
3	6	22		Program Pegelaran Seni Budaya Daerah	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Aceh di Jakarta (Festival/Tahun)	Festiival/Tahun	8	8	512.400.000	9	1.015.300.000	10	400.276.800	11	440.304.480	12	484.334.928	50	2.852.616.208	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
					Jumlah Kunjungan Wisatawan di Anjungan Aceh TMII	Orang	800	1.000	-	1.200	-	1.400	-	1.600	-	1.800	-	7.000	-	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
3	6	44		Program Pengembangan Data dan Informasi					34.420.000		34.420.000		47.706.120		52.476.732		57.724.405		226.747.257	
					Jumlah Pengakses Data dan Informasi pada Website Kantor Penghubung Aceh di Jakarta	Orang	1.300	1.500		1.700		1.900		2.500		2.800		10.400		Badan Penghubung Pemerintah Aceh
					Tingkat Kepuasan Pengakses Data dan Informasi pada Website Kantor Penghubung Aceh di Jakarta	%	30	30	-	34	-	38	-	50	-	56	-	56	-	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
4				PENDUKUNG					276.454.399.955		264.371.810.928		231.329.850.246		244.216.501.367		276.622.497.500		1.292.995.059.996	
4	1			Sekretariat Daerah					205.198.182.136		194.103.928.681		151.677.170.073		160.482.159.889		179.300.587.196		890.762.027.975	
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelengkapan administrasi perkantoran	%	100	100	3.344.203.730	100	2.787.685.230	100	1.457.640.800	100	1.501.370.024	100	1.576.438.525	100	10.667.338.309	Biro Hubungan Masyarakat
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelengkapan alat	%	100	100	559.800.000	100	520.200.000	100	873.854.500	100	897.547.225	100	922.424.586	100	3.773.826.311	Biro Hukum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		administrasi perkantoran																	
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan kelengkapan penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	1579.843.980	100	1.844.647.500	100	949.239.660	100	996.701.643	100	1.046.536.725	100	6.416.969.508	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentasi ketersediaan alat administrasi perkantoran .	%	100	100	624.722.324	100	676.356.224	100	688.756.362	100	723.194.180	100	759.353.889	100	3.472.382.979	Biro Organisasi
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan perlengkapan administrasi perkantoran	%	100	100	942.006.000	100	900.000.000	100	994.461.615	100	1.044.184.696	100	1.096.393.931	100	4.977.046.242	Biro Tata Pemerintahan
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	100	33.044.075.000	100	32.341.967.500	100	24.617.139.576	100	24.528.009.383	100	32.129.177.859	100	146.660.369.318	Biro Umum
				Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Biro Umum
				Persentase tata kelola naskah dinas sesuai SOP	%	92	94	-	98	-	98	-	98	-	98	-	98	-	Biro Umum
				Tingkat ketersediaan perlengkapan administrasi perkantoran	%	90	90	-	93	-	95	-	95	-	97	-	97	-	Biro Umum
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Sekretariat Daerah	%	50	50	-	60	-	70	-	80	-	88	-	88	-	Biro Umum
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan perlengkapan administrasi perkantoran	%	100	100	1.984.459.087	100	2.022.545.000	100	829.839.714	100	871.331.700	100	914.898.285	100	6.623.073.786	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan perlengkapan administrasi perkantoran	%	100	100	24.865.490.000	100	23.272.529.000	100	20.812.832.491	100	20.520.226.632	100	22.733.587.837	100	112.204.665.960	Setda Aceh
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentasi ketersediaan alat	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		administrasi perkantoran .																		
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentasi ketersediaan alat administrasi perkantoran .	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang/Jasa	
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Hubungan Masyarakat		
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	50.000.000	100	150.000.000	100	33.075.000	100	34.728.750	100	36.465.188	100	304.268.938	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Organisasi	
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Tata Pemerintahan	
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	40.672.840.395	100	29.418.745.960	100	20.669.394.103	100	20.594.557.337	100	23.057.490.696	100	134.413.028.491	Biro Umum
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.723.279.996	100	1.633.194.083	100	219.728.250	100	230.714.663	100	242.250.396	100	4.049.167.388	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	3.193.000.000	100	2.994.200.000	100	3.446.910.553	100	3.581.340.065	100	3.721.012.327	100	16.936.462.945	Setda Aceh
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	137.600.000	-	-	-	-	-	-	-	100	137.600.000	Biro Administrasi Pembangunan	
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	133.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	133.450.000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Hubungan Masyarakat	
4	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	
4	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Organisasi	
4	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Tata Pemerintahan	
4	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	2.181.000.000	100	1.051.000.000	100	764.253.000	100	802.465.650	100	842.588.933	100	5.641.307.583	Biro Umum
4	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	50.200.000	100	50.200.000	100	44.596.125	100	46.825.931	100	49.167.228	100	240.989.284	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan
4	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Setda Aceh	
4	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pembangunan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4	1	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang/Jasa		
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Hubungan Masyarakat		
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat		
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	100	100	3.277.000.000	100	2.915.000.000	100	3.612.892.500	100	3.793.537.125	100	3.983.213.981	100	17.581.643.606	Biro Organisasi
					Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Biro Organisasi	
					Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Skor	50	62	-	64	-	66	-	68	-	71	-	71	Biro Organisasi	
					Persentase Organisasi Perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur	Persen	85	86	-	87	-	88	-	89	-	90	-	90	Biro Organisasi	
					Persentase Ketersediaan SOP pada SKPA	Persen	30	50	-	60	-	70	-	80	-	90	-	90	Biro Organisasi	
					Persentase pemerintah kab/kota di Aceh yang memperoleh nilai cc (penilaian SAKIP Kab/Kota yang memperoleh nilai cc dibagikan dengan jumlah kab/kota)	Persen	45	50	-	55	-	60	-	65	-	90	-	90	Biro Organisasi	
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Tata Pemerintahan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	175.000.000	100	165.000.000	100	33.075.000	100	34.728.750	100	36.465.188	100	444.268.938	Biro Umum
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	16.000.000	100	16.000.000	100	11.025.000	100	11.576.250	100	12.155.063	100	66.756.313	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	-	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Setda Aceh
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang/Jasa
4	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Hubungan Masyarakat	
4	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	
4	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Organisasi	
4	1	6		Program Peningkatan	Persentase laporan capaian kinerja dan	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Tata Pemerintahan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
4	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Biro Umum
4	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan
4	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Setda Aceh
4	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	1		Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil	Fasilitasi pemanfaatan data kependudukan kepada SKPA	%	2	10	327.612.470	20	277.600.000	-	-	-	-	-	20	605.212.470	Biro Tata Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Skor	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	Biro Tata Pemerintahan	
		Persentase Organisasi Perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur	%	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	Biro Tata Pemerintahan	
		Persentase Ketersediaan SOP pada SKPA	%	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	Biro Tata Pemerintahan	
		Persentase pemerintah kab/kota di Aceh yang memperoleh nilai cc (penilaian SAKIP Kab/Kota yang memperoleh nilai cc dibagikan dengan jumlah kab/kota)	%	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	Biro Tata Pemerintahan	
4	1	5	Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur			600.000.000		435.000.000		661.500.000		694.575.000		729.303.750		3.120.378.750		Biro Organisasi	
		Persentase Aparatur yang mendapat pembinaan dan pengembangan	%	80	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	Biro Organisasi
		Persentase Aparatur yang menduduki jabatan berdasarkan kompetensi;	%	80	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	Biro Organisasi
4	1	6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			7.532.463.143		7.079.831.782		6.871.290.615		7.214.855.146		7.575.597.903		36.274.038.589		Biro Hukum	
		Persentase produk hukum Kewenangan Aceh yang diselesaikan	%	-	-	-	90	-	95	-	95	-	95	-	95	-	95	-	Biro Hukum
		Persentase produk hukum kab/kota yang dikonsultasikan/fasilitasi/evaluasi yang dapat diselesaikan	%	-	-	-	90	-	95	-	95	-	95	-	95	-	95	-	Biro Hukum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase bantuan hukum fakir miskin yang diselesaikan;	%	-	-	-	90	-	95	-	95	-	95	-	95	-	-	Biro Hukum	
4	1	15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, DPRA, DPRK	%	100	100	639.400.000	100	594.200.000	100	1.019.812.500	100	1.070.803.125	100	1.124.343.281	100	4.448.558.906	Biro Tata Pemerintahan
				Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	98	-	Biro Tata Pemerintahan
				Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-	Biro Tata Pemerintahan
4	1	15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	99	98	8.000.659.605	98	8.750.000.000	98	7.459.139.715	98	12.832.096.700	98	13.223.701.535	98	50.265.597.555	Biro Umum
				Persentase Fasilitasi Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, DPRA, DPRK	%	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Biro Umum
				Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	-	-	-	80	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Biro Umum
4	1	15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	80	80	375.000.000	80	397.000.000	80	161.516.250	80	169.592.063	80	178.071.666	80	1.281.179.979	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan
				Persentase Fasilitasi Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, DPRA, DPRK	%	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah	%	-	-	-	80	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan	
4	1	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan	Kasus	3	6	500.000.000	-	420.099.208	-	-	-	-	-	6	920.099.208	Biro Tata Pemerintahan	
4	1	19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum Kewenangan Aceh yang difasilitasi	%	55	60	600.000.000	63	515.000.000	70	661.500.000	72	694.575.000	80	729.303.750	80	3.200.378.750	Biro Tata Pemerintahan
				Persentase produk hukum Kewenangan Aceh yang diselesaikan	%	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90	-	Biro Tata Pemerintahan	
				Persentase produk hukum kab/kota yang dikonsultasikan/fasilitasi/evaluasi yang dapat diselesaikan	%	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90	-	Biro Tata Pemerintahan	
				Persentase bantuan hukum fakir miskin yang diselesaikan	%	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90	-	Biro Tata Pemerintahan	
4	1	20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyerahan Aset dari Daerah Induk kepada Daerah Pemekaran	%	60	66	3.150.594.000	73	3.104.000.000	80	3.390.180.885	83	3.559.689.929	90	3.737.674.426	90	16.942.139.240	Biro Tata Pemerintahan
4	1	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Kesesuaian pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa dengan RUP	%	85	90	1.347.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.347.600.000	Biro Administrasi Pembangunan	
4	1	22	Program Pegelaran Seni Budaya Daerah	Jumlah keikutsertaan dalam festival seni dan budaya (Festival/Tahun)	Festifal /Tahun	1	1 kali	10.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	11.025.000	1 kali	11.576.250	1 kali	12.155.063	1 kali	84.756.313	Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan
4	1	28	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan		-	-	-	981.990.948	-	2.076.700.000	-	1.609.055.521	-	1.689.508.297	-	1.773.983.712	-	8.131.238.478	Biro Tata Pemerintahan
				Skor dan status laporan	Skor/ Status	2,55 /Tinggi	2,60/ Tinggi	-	2,65/ Tinggi	-	2,71/ Tinggi	-	2,74/ Tinggi	-	2,80/ Tinggi	-	2,80/ Tinggi	-	Biro Tata Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		penyelenggaraan pemerintahan Aceh																	
		Persentase kecamatan yang sudah menerapkan PATEN	%	41	42	-	43	-	44	-	44	-	45	-	45	-		Biro Tata Pemerintahan	
4	1	31	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang	Persentase kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW	%	82	85	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	Biro Administrasi Pembangunan		
4	1	32	Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Persentase press release/iklan/pariwara yang di Publikasikan melalui Media Massa Lokal terkemuka dan nasional	%	78	80	10.467.280.847	83	10.276.009.021	85	4.209.254.585	90	4.419.717.314	95	4.640.703.180	95	34.012.964.947	Biro Hubungan Masyarakat
4	1	36	Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	Kasus	73,01	73,01	745.500.000	75,00	660.100.000	-	-	-	-	-	-	1.405.600.000	Biro Tata Pemerintahan	
4	1	38	Program Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur				1.459.460.790		-			-				-	1.459.460.790	Biro Tata Pemerintahan	
				Skor dan status laporan penyelenggaraan pemerintahan Aceh	Skor/ Status	2,55 /Tinggi	2,60 /Tinggi										2,60 /Tinggi	Biro Tata Pemerintahan	
				Persentase kecamatan yang sudah menerapkan PATEN	%	41	42		-	-	-	-	-	-	-	-	42	Biro Tata Pemerintahan	
4	1	41	Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi/kebijakan/naskah di bidang Kesejahteraan sosial yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah	%	30	10	1.454.056.000	10	2.503.609.750	10	1.223.775.000	10	1.284.963.750	10	1.349.211.938	50	7.815.616.438	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	43	Program Peningkatan Sarana Perekonomian, Potensi dan Kerjasama Investasi	Persentase tercapainya Kebijakan yang Sinergi dalam	%	60	60	4.411.315.713	-	-	-	-	-	-	-	-	60	4.411.315.713	Biro Perekonomian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Pertambahan Dalam Pengembangan Industri Perdagangan Berbasis Lingkungan Hidup	Pengembangan Potensi Ekonomi																
4	1	44	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tingkat Kepuasan Pengakses Data dan Informasi	%	78	80	1.044.148.600	83	4.871.332.230	85	930.333.638	90	976.850.320	93	1.006.155.829	93	8.828.820.617	Biro Hubungan Masyarakat
4	1	44	Program Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah/jenis data dan informasi yang tersedia	Indikator	62	70	620.333.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.333.495	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	45	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat	Persentase rekomendasi/kebijakan/naskah di bidang pendidikan, kesehatan, dan adat istiadat yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah	%	60	20	1.121.550.000	20	1.464.538.500	20	1.221.043.442	20	1.282.095.614	20	1.346.200.394	100	6.435.427.950	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	47	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta instansi terkait	Persentase informasi daeah yang terintegrasi	%	78	80	5.742.812.000	83	4.921.096.903	85	1.513.053.943	90	1.588.706.640	93	1.636.367.840	93	15.402.037.326	Biro Hubungan Masyarakat
4	1	48	Program Revitalisasi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	Persentase pertumbuhan keuntungan daerah (BUMA) melalui kebijakan daerah	%	2	2	1.126.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.126.000.000	Biro Perekonomian
4	1	49	Program Pengembangan Industri Strategis	Persentase tercapainya Kebijakan yang Sinergi dalam Pengembangan Industri Strategis	%	60	60	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60	250.000.000	Biro Perekonomian
4	1	51	Program Pembiayaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase rancangan Perda dan Perbup APBD yang difasilitasi	%	87	90	1.531.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.531.700.000	Biro Administrasi Pembangunan
4	1	52	Program pemberdayaan	Persentase rekomendasi/kebijakan/naskah di	%	50	-	-	10	2.741.000.000	72	1.097.090.400	75	1.100.000.000	80	1.110.000.000	80	6.048.090.400	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		sumberdaya dan peran ulama																		
4	1	53		Program Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan pembangunan	bidang pembinaan kelembagaan dan pengkajian kerukunan umat beragama yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah	%	20	-	40	4.105.700.000	60	4.310.500.000	80	4.510.500.000	90	4.910.500.000	90	17.837.200.000	Biro Administrasi Pembangunan	
4	1	55		Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Strategis	Persentase tercapainya Kebijakan Strategis Perekonomian	%	50	-	50	2.740.000.000	55	2.650.000.000	60	2.782.500.000	75	2.950.000.000	75	11.122.500.000	Biro Perekonomian	
4	1	56		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	%	90	90	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	
4	1	57		Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama	Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	%	250	450	7.529.460.000	-	-	-	-	-	-	-	450	7.529.460.000	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	
4	1	58		Program Peningkatan Mutu SDM, Pengembangan Kerjasama dan Advokasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kasus hukum pengadaan barang dan jasa yang di selesaikan	%	60	75	1.195.110.000	80	2.325.310.000	85	3.630.000.000	90	3.993.000.000	95	4.392.300.000	95	15.535.720.000	Biro Pengadaan Barang/Jasa
4	1	59		Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RUP	%	75	80	2.221.060.000	85	2.790.908.790	90	4.950.000.000	95	5.445.000.000	98	5.989.500.000	98	21.396.468.790	Biro Pengadaan Barang/Jasa
4	1	60		Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama				6.907.710.770		9.507.372.000		6.394.500.000		6.714.225.000		7.049.936.250		36.573.744.020	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	
					Tingkat kepuasan jamaah haji terhadap pelayanan Tim TPHD	%	70	80	-	10	-	90	-	95	-	98	-	98	-	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
					Persentase rekomendasi/kebijakan/naskah di bidang pembinaan	%	50	65	-	20	-	72	-	75	-	80	-	80	-	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		kelembagaan dan pengkajian kerukunan umat beragama yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah																		
		Persentase imam yang sesuai standar	%	60	67	-	20	-	77	-	80	-	85	-	85	-	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat			
		tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan hari hari besar islam	%	55	65	-	20	-	72	-	75	-	79	-	79	-	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat			
4	1	61		Program Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya Kebijakan yang Sinergi dalam Pengembangan Potensi Ekonomi	%	60	-	60	3.660.000.000	65	2.885.000.000	70	2.925.000.000	80	3.100.000.000	80	12.570.000.000	Biro Perekonomian	
4	1	62		Program Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Kesesuaian pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa dengan RUP	%	60	80	13.801.393.243	85	15.088.250.000	90	12.558.884.330	95	13.109.289.737	95	15.375.956.042	95	69.933.773.352	Biro Pengadaan Barang/Jasa
4	2			Sekretariat DPRD																
4	2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Anggota DPRA terhadap Layanan Sekretariat DPRA	%	100	100	22.113.862.050	100	23.128.492.300	100	19.218.134.326	100	20.060.387.887	100	23.528.936.238	100	108.049.812.801	Sekretariat DPRA
4	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	5.798.632.630	100	9.027.237.778	100	7.653.722.541	100	8.419.094.795	100	9.261.004.275	100	40.159.692.019	Sekretariat DPRA
4	2	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran, Identitas dan Atribut	%	100	100	1.598.250.000	100	2.268.000.000	100	1.604.339.000	100	1.764.772.900	100	1.941.250.190	100	9.176.612.090	Sekretariat DPRA
4	2	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	86.050.000	100	72.500.000	100	297.236.500	100	326.960.150	100	359.656.165	100	1.142.402.815	Sekretariat DPRA
4	2	6		Program Peningkatan Pengembangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang	%	100	-	-	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Sekretariat DPRA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)																
4	2	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Qanun yang ditetapkan	%	100	100	41.335.423.139	100	35.447.652.169	100	49.561.110.522	100	51.733.174.734	100	60.678.117.322	100	238.755.477.886	Sekretariat DPRA
4	2	16	Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA	Persentase Anggota DPRA yang dapat menjalankan fungsinya	%	100	100	324.000.000	100	324.000.000	100	1.118.137.284	100	1.229.951.012	100	1.352.946.114	100	4.349.034.410	Sekretariat DPRA
5			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				17.791.146.200		18.601.310.520		18.121.399.938		19.027.469.936		19.978.843.435		93.520.170.029		
5	1		Kesatuan Bangsa dan Politik				17.791.146.200		18.601.310.520		18.121.399.938		19.027.469.936		19.978.843.435		93.520.170.029		
5	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelengkapan administrasi perkantoran	%	100	100	4.608.410.200	100	5.026.556.888	100	4.042.474.938	100	4.244.598.685	100	4.456.828.620	100	22.378.869.331	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	2.187.951.000	100	1.527.075.000	100	3.252.375.000	100	3.414.993.750	100	3.585.743.438	100	13.968.138.188	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	72.550.000	100	79.805.000	100	119.070.000	100	125.023.500	100	131.274.675	100	527.723.175	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	253.650.000	100	279.015.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	121.550.625	100	880.228.125	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	100	739.185.000	100	622.297.000	100	463.050.000	100	486.202.500	100	510.512.625	100	2.821.247.125	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	1	26		Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Persentase Ancaman/deteksi dini Konflik yang tertangani	%	88	89	1.719.800.000	90	1.690.359.000	91	1.177.470.000	91	1.236.343.500	91	1.298.160.675	91	7.122.133.175	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	1	27		Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	%	9,8	19,9	479.842.000	39,79	776.279.000	59,69	551.250.000	79,58	578.812.500	100	607.753.125	100	2.993.936.625	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	1	28		Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Persentase sekolah tingkat Pendidikan Menengah Atas yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dibagi jumlah pendidik di Aceh	%	5	10	955.158.000	20	1.243.200.000	30	1.030.837.500	40	1.082.379.375	50	1.136.498.344	50	5.448.073.219	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	1	29		Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM /Ormas/Yayasan/O KP yang terdaftar	Jumlah LSM	35	25	950.000.000	25	1.069.367.632	22	1.047.375.000	21	1.099.743.750	23	1.154.730.938	23	5.321.217.320	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	1	30		Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial di masyarakat	%	30	50	1.100.000.000	65	1.278.646.000	70	1.212.750.000	80	1.273.387.500	85	1.337.056.875	85	6.201.840.375	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	1	31		Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	%	73	73	2.345.400.000	73	2.516.850.000	73:01:00	2.480.625.000	73:01:00	2.604.656.250	73:01:00	2.734.889.063	73:01:00	12.682.420.313	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	1	32		Program Pembauran Kebangsaan	Jumlah konflik Sara yang tertangani	Jumlah	3	3	750.000.000	4	608.945.000	4	826.875.000	5	868.218.750	5	911.629.688	17	3.965.668.438	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	1	33		Program Penanganan Konflik	Persentase konflik yang tertangani	%	96	96	1.629.200.000	97	1.882.915.000	98	1.806.997.500	98	1.897.347.376	99	1.992.214.744	99	9.208.674.620	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
TOTAL									11.150.041.030.380		8.882.566.606.815		8.777.012.022.344		9.394.913.747.550		10.155.000.047.986		48.359.533.455.075	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penetapan IKU ditujukan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi SKPA. Penetapan IKU ditujukan untuk: 1) Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan 2) Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, penetapan IKU dan IKD dapat dilihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Aceh, 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Perolehan Nilai LAKIP Pemerintah Aceh	Skor	BB-	BB+	BB+	AA-	AA+
3.	Nilai LPPD Pemerintah Aceh	Skor	2,60/Tinggi	2,65/Tinggi	2,70/Tainggi	2,75/Tinggi	2,80/Tinggi
4.	Tingkat kapabilitas pengawasan internal pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	2	2
5.	Jumlah Regulasi/peraturan turunan UUPA yang ditetapkan	Regulasi	2	2	3	3	3
6.	Jumlah Sertifikasi Produk Halal	Sertifikat	100	100	100	100	100
7.	Jumlah Penerimaan Infaq/Sadaqah	Rp (000)	62.000.000	66.000.000	70.000.000	74.000.000	79.000.000
8.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Aceh	%	19,82	23,46	24,73	21,25	23,25
9.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	98,50	99,75	101,25	103,00	106,00
10.	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	98,00	101,00	103,00	105,00	107,00
11.	Jumlah Produksi Daging	Ton	44.238,92	46.931,50	49.623,07	52.315,65	55.007,22
12.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	294.965,66	313.786,90	332.608,14	351.429,38	370.250,62
13.	Skor PPH	Skor	70,60	71,20	71,80	72,40	73,00
14.	Persentase angka pengangguran terbuka	%	6,45	6,30	6,25	6,22	6,00
15.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,26	65,41	65,80	66,19	66,57
16.	Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	%	15,43	14,43	13,43	12,43	11,43

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke				
			2018	2019	2020	2021	2022
17.	Kontribusi Pajak terhadap PAA	%	61,02	60,27	60,03	59,82	59,64
18.	Kontribusi Zakat terhadap PAA	%	29,90	30,94	31,27	31,55	31,79
19.	Pertumbuhan PDRB	%	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
20.	Laju Inflasi	%	3,95	4,00	4,00	4,00	4,00
21.	Jumlah nilai Realisasi PMA/PMDN	Rp (Milyar)	3.850,00	4.235,00	4.658,50	5.124,35	5.636,78
22.	Angka Partisipasi Murni :						
22.1.	a. SD/MI (APM)	%	98,42	98,59	98,90	99,07	99,16
22.2.	b. SMP/MTs (APM)	%	86,22	86,43	86,71	87,09	87,23
22.3.	c. SMA/SMK/MA	%	71,55	72,20	73,50	75,00	77,00
23.	Melek Huruf	%	98,1	98,2	99,0	99,3	99,5
24.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9	10	11	12	13
25.	Angka Kelulusan :						
25.1.	a. SD/MI	%	99,65	99,95	100,00	100,00	100,00
25.2.	b. SMP/MTs	%	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00
25.3.	c. SMA/SMK/MA	%	99,80	99,90	100,00	100,00	100,00
26.	Umur Harapan Hidup	Tahun	69,95	69,98	70,00	70,20	70,50
27.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup.	/1000 Kelahiran Hidup	10,00	10,00	9,00	9,00	8,00
28.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup.	/100.000 Kelahiran Hidup	162,00	157,00	150,00	145,00	140,00

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke				
			2018	2019	2020	2021	2022
29.	Cakupan Keberhasilan Pengobatan TB (Success rate)	%	>90	>90	>90	>90	>90
30.	Cakupan Kabupaten/Kota yang memasuki Tahapan Eliminasi Malaria	Kab/Kota	21	21	23	23	23
31.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang	%	76,52	82,26	87,71	92,88	98,65
32.	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Index	0,71	0,73	0,74	0,75	0,76
33.	Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Unit	40.311	46.311	52.311	58.311	64.311
34.	Rasio permukiman layak huni	Rasio Index	0,964	0,968	0,972	0,975	0,978
35.	Persentase Pembangkit Listrik dari Energi Baru Terbarukan	%	1,93	6,67	15,12	20,06	25,17
36.	Indeks Resiko Pengurangan Bencana Aceh	Rendah/Sedang/Tinggi	140/sedang	137.5/sedang	135/sedang	132.5/sedang	130/sedang
37.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,50	74,50	74,50	75,50	75,50

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	%	4,14	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,00
2.	Laju inflasi	%	4,09	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3.	PDRB per kapita ADHB (Juta)	Rp Juta	28,22	28,93	30,27	31,61	32,94	34,28	34,28
4.	Indeks Gini	%	0,329	0,325	0,320	0,317	0,313	0,310	0,310
6.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Index	0,383	0,361	0,348	0,336	0,324	0,313	0,313
7.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	16,89	15,43	14,43	13,43	12,43	11,43	11,43
Kesejahteraan Sosial									
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	70,60	70,92	71,44	71,96	72,48	73,00	73,00
2.	Angka melek huruf	%	98,25	98,08	98,23	99,00	99,30	99,50	99,50
3.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,77	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	13,00
4.	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,90	69,95	69,98	70,00	70,20	70,50	70,50
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Keistimewaan dan Kekhususan Aceh									
1.	Jumlah Hafiz Alqur'an	Orang	68	289	289	289	289	289	1.491
2.	Indeks Melek Alqur'an	%	43	60	65	70	75	80	80

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Persentase Daya Dengan Program TahfizAlqur'an	%	-	2,51	2,66	2,81	2,96	3,10	3,10
4.	Jumlah dayah yang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	Dayah	1.015	745	753	761	769	777	777
5.	Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni, Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur	wilayah	4 wilayah	4 wilayah	4 wilayah	4 wilayah	4 wilayah	4 wilayah	4 wilayah
1.	Kesatuan dan Perdamaian								
1.1.	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Orang	36.220	2.078	2.286	2.514	2.766	3.042	3.042
1.2.	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	Orang	8.427	627	690	759	835	918	918
1.3.	Jumlah Anak Korban Konflik Yang Mendapat Perhatian Pemerintah	Orang	1.277	200	220	242	266	299	299
1.4.	Jumlah Lembaga Penanganan Korban Konflik	Unit	13	13	13	13	13	13	13
2.	Kesatuan Bangsa dan Politik								
2.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	3	5	6	6	6	6	6
3.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	6	7	7	7	7	7	7
2.3.	Jumlah LSM	LSM	35	40	38	35	35	34	34
Pelayanan Urusan Wajib									
Wajib Pelayanan Dasar									
1.	Pendidikan								
1.1.	Angka partisipasi kasar	%							
1.1.1.	APK SD/MI/Paket A	%	102,41	110,72	105,00	103,00	101,00	100,00	100,00
1.1.2.	APK SMP/MTs/Paket B	%	99,15	99,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.	APK SMA/SMK/MA	%	87,47	87,93	89,00	90,00	92,00	100,00	100,00
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan	%							
1.2.1.	Tamat SD Sederajat	%	32,28	33,20	34,40	34,60	35,00	35,50	35,50
1.2.2.	Tamat SLTP sederajat	%	15,08	16,30	17,25	18,10	19,30	20,30	20,30
1.2.3.	Tamat SLTA sederajat	%	28,37	30,15	31,55	32,45	33,20	34,00	34,00
1.2.4.	Diploma I/II/III	%	2,62	3,50	6,20	7,20	7,98	8,50	8,50
1.2.5.	Diploma IV/S1	%	6,65	7,50	8,90	9,50	10,25	11,15	11,15
1.2.6.	S2/S3	%	0,32	0,39	0,45	0,50	0,55	0,60	0,60
1.3.	Angka Partisipasi Murni								
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,16	98,42	98,59	98,90	99,07	99,16	99,16
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85,73	86,22	86,43	86,71	87,09	87,23	87,23
1.3.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	70,00	71,55	72,20	73,50	75,00	77,00	77,00
1.4.	Angka partisipasi sekolah								
1.4.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	97,89	98,25	99,00	99,30	99,50	100,00	100,00
1.4.3.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	81,82	91,13	92,35	93,50	95,00	97,00	97,00
1.5.	Angka Putus Sekolah:								
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,11	0,09	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,35	0,30	0,26	0,10	0,09	0,05	0,05
1.6.	Angka Kelulusan:								
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,01	99,65	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,78	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,69	99,80	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.	Angka Melanjutkan (AM):								
1.7.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	108,46	110,00	109,45	108,20	107,30	106,00	106,00
1.7.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	115,64	117,89	116,20	115,10	114,20	113,30	113,30
1.8.	Fasilitas Pendidikan:								
1.8.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95,00	96,30	97,45	98,40	99,30	100,00	100,00
1.8.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	95,30	96,30	97,50	98,30	99,45	100,00	100,00
1.9.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	70,15	75,20	77,30	78,45	79,50	78,30	78,30
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	65,30	70,00	73,20	77,40	78,45	79,45	79,45
1.11.	Guru yang tersertifikasi:								
	- Jenjang SD	%	30,60	34,60	44,60	55,60	68,60	83,60	83,60
	- Jenjang SMP	%	31,90	35,90	45,90	56,90	69,90	84,90	84,90
	- Jenjang SMA	%	33,50	38,50	48,50	59,50	72,50	87,50	87,50
	- Jenjang SMK	%	25,30	29,30	39,30	50,30	63,30	78,30	78,30
	- Jenjang SLB	%	12,90	14,90	24,90	35,90	48,90	63,90	63,90

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.	Sekolah yang terakreditasi A:								
	- Jenjang SD	%	19,50	29,80	40,10	50,20	60,50	70,90	70,90
	- Jenjang SMP	%	20,90	30,10	40,50	50,20	60,40	70,20	70,20
	- Jenjang SMA	%	35,60	41,10	46,60	52,10	57,50	63,10	63,10
	- Jenjang SMK	%	11,70	13,20	15,70	19,20	21,50	21,50	21,50
2.	Kesehatan								
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1.000 Kelahiran Hidup	9	9	8	8	7	7	7
2.2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran Hidup	10	10	9	9	8	8	8
2.3.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran Hidup	7	6	6	6	5	5	5
2.4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100.000 Kelahiran Hidup	149	145	142	137	133	130	130
2.5.	Persentase Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang	%	16,70	15,40	15,10	14,70	14,00	13,20	13,20
2.5.a	Persentase balita gizi buruk	%	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1
2.5.b	Prevalensi balita gizi kurang	%	14,1	13,6	13,1	12,7	12,2	11,8	11,8
2.6.	Prevalensi balita suntung	%	35,70	33,00	32,00	28,00	24,00	20,00	20,00
2.7.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	33,00	39,00	42,00	45,00	49,00	55,00	55,00
2.8.	Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita	12,4	13,5	14,0	14,5	15,0	16,0	16,0
2.9.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,27	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,50

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk	1,28	1,28	1,28	1,27	1,25	1,23	1,23
2.11.	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,404	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
2.12.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	134,3	158	158	158	158	158,00	158,00
2.13.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	64,30	100	100	100	100	100	100
2.14.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	100	100	100	100	100	100
2.15.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	74	90	92	100	100	100	100
2.16.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.17.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	73,5	100	100	100	100	100	100
2.18.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	/100.000 anak < 15 tahun	2	2	2	2	2	2	2
2.19.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	8,17	15	20	25	30	35	35
2.20.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	43	47	49	53	55	57	57
2.21.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	125	120	115	110	105	100	100
2.22.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	1	1
2.23.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	49,4	50	54	56	58	60	60
2.24.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	77,4	80	82	84	88	90	90
2.25.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
2.26.	Penderita diare yang ditangani	%	77,30	76,00	78,00	79,00	81,00	90,00	90,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.27.	Angka kejadian Malaria	/1000 penduduk	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,007	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2.29.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.30.	Cakupan kunjungan bayi	%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2.31.	Cakupan puskesmas (%)	%	1,18	1,23	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
2.32.	Cakupan puskesmas pembantu (%)	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2.33.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	77,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.34.	Cakupan pelayanan nifas	%	81,39	82,00	84,00	85,00	87,00	90,00	90,00
2.35.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	59,00	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
2.36.	Cakupan pelayanan anak balita	%	68,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.37.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.38.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	94,00	95,00	96,00	97,00	99,00	100,00	100,00
2.39.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.40.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.41.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	38,68	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
2.42.	Pembangunan RS Rujukan Regional di 5 Lokasi	%	35,00	55,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.43.	Persentase Penduduk Aceh yang mendapatkan jaminan kesehatan (JKA+ dan Asuransi lainnya)	%	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.44.	Jumlah Puskesmas Perawan dan Non Perawatan yang sesuai standar	Unit	13	115	200	268	308	355	355

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.45.	Jumlah Puskesmas yang sudah menjalankan Manajemen Puskesmas (MP)	Unit	13	130	185	236	288	355	355
2.46.	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	Unit	3	6	36	89	129	157	157
2.47.	Jumlah Puskesmas yang bekerjasama Quickwins pelayanan darah melalui Dinkes dengan UTD dan RS	Unit	32	35	65	118	158	186	186
2.48.	Pembentukan Sekretariat terpadu pelayanan administrasi di Rumah Sakit Daerah	RS	1	10	19	27	27	27	27
2.49.	Persentase Rumas Sakit Terakreditasi	%	26,00	50,00	65,00	75,00	85,00	100,00	100,00
2.50.	Persentasi Puskesmas Terakreditasi	%	28,20	68,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1.	Pekerjaan Umum:								
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	Rasio Index	0,633	0,765	0,822	0,877	0,928	0,986	0,986
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio Index	3,38	3,25	3,19	3,13	3,07	3,02	3,02
3.1.3.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	%	63,39	76,52	82,26	87,71	92,88	98,65	98,65
3.1.4.	Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik	%	67,37	75,92	78,47	80,54	82,36	83,77	83,77
3.1.5.	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Index	0,67	0,71	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76
3.1.6.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	76,13	77,33	78,63	80,00	81,53	83,13	83,13
3.1.7.	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	43,45	53,8	61,60	69,40	77,20	85,00	85,00
3.1.8.	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,068	0,055	0,045	0,035	0,015	0,000	0,000
3.1.9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	/1000 Penduduk	2,08	2,02	1,99	1,97	1,94	1,92	1,92

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.	Penataan Ruang:								
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	17,76	18,00	18,50	19,00	19,45	20,00	20,00
3.2.2.	Persentase permohonan kesesuaian ruang terhadap RTRW	%	94,30	95,50	95,80	97,20	97,90	98,40	98,40
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
4.1.	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	Rasio Index	0,130	0,138	0,142	0,146	0,150	0,154	0,154
4.2.	Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Unit	34.311	40.311	46.311	52.311	58.311	64.311	64.311
4.3.	Persentase rumah layak huni	%	54,34	57,73	59,29	60,77	62,17	63,49	63,49
4.4.	Rasio permukiman layak huni	Rasio Index	0,961	0,964	0,968	0,972	0,975	0,978	0,964
4.5.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	3,58	3,40	3,23	3,07	2,92	2,77	2,77
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Persentase Penegakan PERDA	%	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5.2.	Indeks Resiko Pengurangan Bencana Aceh	Rendah/Sedang/Tinggi	160/sedang	140/sedang	137.5/sedang	135/sedang	132.5/sedang	130/sedang	130/sedang
6.	Sosial								
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%							
6.1.1.	Fakir Miskin (Pemberdayaan)	%	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6.1.2.	Penyandang Disabilitas (Alat Bantu)	%	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
6.1.3.	Remaja Putus Sekolah (Pelatihan dan Modal Usaha)	%	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6.1.4.	Jumlah Panti Asuhan (Permakanan Panti)	%	0,07	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.5.	Komunitas Adat Terpencil (Jadup)	%	0,28	0,44	0,47	0,57	0,52	0,55	0,55
6.1.6.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	%	0,03	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	34,00	34,00	34,00	34,00	35,00	35,00	35,00
6.3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	5,40	8,60	9,10	9,70	10,26	10,80	10,80
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	10,58	16,93	17,99	19,05	20,11	21,16	21,16
6.5.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	20,00	30,00	31,67	33,33	35,00	36,67	36,67
6.6.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
6.7.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	21,52	34,43	36,58	38,73	40,88	43,03	43,03
Wajib Pelayanan Non Dasar									
1.	Tenaga Kerja								
1.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	%	65,59	65,75	65,80	66,19	66,57	66,96	66,96
1.2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,59	65,75	65,80	66,19	66,57	66,96	66,96
1.3.	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,57	6,45	6,30	6,25	6,22	6,00	6,00
1.4.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	/1000 perusahaan	5,11	4,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
1.5.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	17,00	25,00	20,00	18,00	15,00	12,00	12,00
1.6.	Keselamatan dan perlindungan	%	47,90	52,84	59,03	65,22	71,41	77,60	77,60

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	95.051,00	122.000,00	125.000,00	127.000,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00
1.8.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	1.890	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
1.10.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Objek	270,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	340,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00	800,00
1.12.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	160,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	900,00
1.13.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	120,00	280,00	360,00	440,00	520,00	600,00	600,00
1.14.	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,920	0,925	0,929	0,933	0,937	0,941	0,941
1.15.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	59,61	60,55	61,51	62,48	63,47	64,47	64,47
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	13,58	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05
2.2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2.5.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.	Pangan								
3.1.	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kilo Kalori Per Hari)	Kkal	3.612,10	3.690	3.695	3.700	3.700	3.700	3.700
3.2.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum (dibawah 1500 kkal/kapita/hari)	%	<15	<15	<13	<11	<10	<10	<10
3.3.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	70,00	73,90	75,50	77,60	78,50	80,25	80,25

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.	Penguatan cadangan pangan	Ton	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.5.	Penanganan daerah rawan pangan (prioritas 1,2,3)	Kecamatan	117	105	105	105	105	95	95
4.	Pertanahan								
4.1.	Sertifikat Lahan masyarakat miskin	Sertifikat	0	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000	20.000
4.2.	Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	%	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
4.3.	Persentase penyelesaian penetapan lokasi (Pemerintah)	%	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
4.4.	Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan	%	0	13,04	26,09	39,13	65,22	100,00	100,00
4.5.	Luas tanah objek reforma agraria yang didistribusi	KK	0	100	100	300	500	500	500
5.	Lingkungan Hidup								
5.1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.2.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.3.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	67,84	69,00	72,00	75,00	78,00	80,00	80,00
5.4.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,87	90,50	91,50	93,00	95,00	97,00	97,00
5.5.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	65,18	66,00	67,25	69,00	71,00	72,00	72,00
5.6.	Laporan Inventarisasi GRK	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.7.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	48,28	53,10	58,41	64,25	70,67	77,73	77,73
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	79,96	81,50	85,00	87,00	88,00	95,00	95,00
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	8,95	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	38,00
6.4.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	65,13	85,00	90,00	95,00	98,00	99,00	99,00
6.5.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	38,37	82,50	85,00	86,00	87,00	88,00	88,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	23	23	23	23	23	46	138
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	23	23	23	23	23	23	115
7.3.	Persentase LPM Aktif	%	42,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00
7.4.	Persentase LPM Berprestasi	%	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	6,9
7.5.	Persentase PKK aktif	%	2	2	2	3,85	4,62	5	5
7.6.	Persentase Posyandu aktif	%	14	15	30	33	37	40	40
7.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	63	65	67	70	73	75	75
7.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
8.	Perhubungan								
8.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Trayek/Frek							
8.1.1.	Angkutan Darat	Trayek	3.796	3.887	3.969	4.058	4.158	4.239	4.239
8.1.2.	Angkutan Laut	Frek	1.159.881	1.217.881	1.278.769	1.342.707	1.409.843	1.480.335	1.480.335
8.1.3.	Angkutan Udara	Frek	11.479	12.627	13.890	15.279	16.806	18.487	18.487

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.2.	Rasio ijin trayek	Indeks	1 : 1343	1 : 1363	1 : 1360	1 : 1355	1 : 1346	1 : 1344	1 : 1344
8.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	28.238	45.887	64.241	89.938	125.913	176.279	176.279
8.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit							
8.4.1.	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	11	11	11	11	11	11	11
8.4.2.	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Unit	8	8	8	8	8	8	8
8.4.3.	Jumlah Bandar Udara	Unit	12	12	12	12	12	12	12
8.4.4.	Jumlah Terminal Tipe A	Unit	4	5	5	5	5	5	5
8.4.5.	Jumlah Terminal Tipe B	Unit	9	9	9	9	9	9	9
8.4.6.	Jumlah Terminal Tipe C	Unit	23	23	23	23	23	23	23
8.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	74,36	73,89	74,13	74,51	74,29	74,33	74,33
8.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	13,46	21,74	30,35	42,36	59,13	80,37	80,37
8.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	65,00	70	76	81	87	92	92
8.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index	2,23	2,89	3,13	3,51	4,29	4,63	4,63
8.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang							
8.9.1.	Angkutan Darat	Orang	13.681.744	13.994.146	14.394.773	14.670.866	14.954.706	15.291.277	15.291.277
8.9.2.	Angkutan Laut	Orang	458.712	481.648	505.730	531.016	557.567	585.446	585.446
8.9.3.	Angkutan Udara	Orang	508.188	559.007	614.907	676.398	744.038	818.442	818.442
8.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang							
8.10.1.	Terminal	Orang	4.442.592	4.897.951	5.182.118	5.281.512	5.533.241	5.657.772	5.657.772

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.10.2.	Bandara	Orang	1.159.881	1.275.869	1.403.456	1.543.802	1.698.182	1.868.000	1.868.000
8.10.3.	Dermaga	Orang	468.273	491.688	516.270	542.084	569.188	597.648	597.648
9.	Komunikasi dan Informatika								
9.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0,42	0,45	0,48	0,52	0,55	0,59	0,59
9.2.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	19,82	22,32	24,82	27,32	29,82	32,32	32,32
9.3.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	18,68	19,88	21,08	22,28	23,48	24,68	24,68
10.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
10.1.	Persentase rata-rata koperasi aktif	%	7,74	65	67	71	73	74	74
10.2.	Persentase koperasi sehat	%	15	17	17	17	17	17	17
10.3.	Persentase koperasi akuntabel	%	4	4	5	5	5	5	5
10.4.	Rasio UKM naik kelas	Rasio	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28
10.5.	Usaha Mikro dan Kecil (Jumlah)	Unit	83,247	87.962	112.681	146.443	182.787	224.003	224.003
11.	Penanaman Modal								
11.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	470,00	559,00	670,00	805,00	965,00	968	968
11.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	4.973,39	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.650,00	7.300,00	7.300,00
11.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	74,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
12.	Keperguruan dan Olah Raga								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.1.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	18,75	15,43	15,43	15,43	18,52	18,52	18,52
12.2.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	54,80	59,70	59,70	59,70	59,09	59,09	59,09
12.3.	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	50	60	60	65	65	65	65
12.4.	Jumlah prestasi olahraga	Cabang Olahraga	9	12	14	20	20	25	25
12.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	/1.000 Penduduk	0,017	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,04
12.6.	Lapangan olahraga	/1.000 Penduduk	0,3	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,6
13.	Statistik								
13.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.2.	Buku "Aceh dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.3.	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.	Persandian								
14.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	1/23	46/23	46/23	46/23	46/23	46/23	46/23
15.	Kebudayaan								
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	25	45	50	50	60	65	65
15.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	806	806	806	12	810	810	810
15.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	8	8	8	6	10	10	10
15.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	-	1	1	1	1	1	1
16.	Perpustakaan								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	288.000	144.000	150.000	150.000	356.400	392.040	392.040
16.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Index	238.900	238.900	262.790	262.790	469.245	516.170	516.170
16.3.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	66.600	69.930	73.427	73.427	80.953	85.000	85.000
16.4.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	20	30	40	40	60	70	70
17.	Kearsipan								
17.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	31,00	40,00	60,00	88,00	95,00	100,00	100,00
17.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	3	8	9	11	18	23	23
Layanan Urusan Pilihan									
1.	Pariwisata								
1.1.	Kunjungan wisata	Wisatawan	2.360.000	2.862.887	3.292.320	3.786.169	4.354.094	5.007.208	5.007.208
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	2.58	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.3.	Kontribusi Sektor Pariwisata	%	2,70	2,96	3,11	3,25	3,39	3,54	3,54
2.	Pertanian								
2.1.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	%	29,63	29,75	29,82	29,94	30,19	30,24	30,24
2.2.	Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	6,68	6,76	6,82	6,93	7,06	7,19	7,24
2.3.	Kontribusi sektor Hortikultura terhadap PDRB	%	4,18	4,49	4,68	4,70	4,85	5,10	5,10
2.4.	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB	%	7,17	7,94	8,21	8,48	8,75	9,03	9,03
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,13	5,43	5,58	5,72	5,86	6,01	6,01

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.	Produksi sektor pertanian (Padi)	Ton	2.204.992,00	2.539.311,00	2.625.047,00	2.713.675,00	2.805.293,00	2.900.000,00	2.900.000,00
2.7.	Produksi sektor perkebunan	Ton	805.910	800.500	805.200	835.827	850.740	825.815	825.815
3.	Kehutanan								
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	24,10	24,13	24,16	24,18	24,21	24,24	24,24
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,040	0,035	0,03	0,025	0,02	0,015	0,015
3.3.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral								
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	96,26	98,67	99,73	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio Indeks	1,06	1,59	1,57	1,36	1,80	1,53	1,53
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	6,95	6,00	5,80	5,50	5,30	5,00	5,00
4.4.	Persentase Pembangkit Listrik dari Energi Baru Terbarukan	%	0,54	5,08	10,14	13,40	22,65	28,96	28,96
4.5.	Besaran kontribusi sektor pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	Miliar Rupiah	4.237	3.119	2.676	2.296	1.970	1.691	1.691
4.6.	Besaran kontribusi sektor Listrik dan Gas	Miliar Rupiah	175,00	215	238	262	291	324	324
4.7.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	1,22	1,91	2,60	3,30	3,99	4,68	4,68
5.	Perdagangan								
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	\$	77.679.139	77.953.863	77.972.018	78.746.898	83.576.774	88.859.845	88.859.845
5.2.	Defisit perdangan antar daerah	Rp. Triliun	35,00	30,25	28	27	26	25	25
5.3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,28	16,75	17,29	17,82	18,36	18,90	18,90

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Perindustrian								
6.1.	Jumlah kawasan dan sental industri	Kawasan	1KI	1KI	2KI ; 6 SIKIM	3KI; 6 SIKIM	3KI; 7 SIKIM	3KI; 9 SIKIM	3KI; 9 SIKIM
6.2.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5,14	5,84	6,37	6,94	7,57	8,25	8,25
6.3.	Pertumbuhan Industri	%	-3,31	-1,00	1,50	2,00	2,23	2,50	2,50
7.	Transmigrasi								
7.1.	Jumlah transmigran lokal	KK	127	150	200	250	300	300	300
8.	Kelautan dan Perikanan								
8.1.	Produksi perikanan	Ton	266.882,90	294.965,66	313.786,90	332.608,14	351.429,38	370.250,62	370.250,62
8.1.1.	- Perikanan Tangkap	Ton	188.190,80	197.132,13	205.741,12	214.350,10	222.959,09	231.568,07	231.568,07
8.1.2.	- Perikanan Budidaya	Ton	82.692,10	97.833,54	108.045,79	118.258,05	128.470,30	138.682,56	138.682,56
8.1.3.	- Garam	Ton	0,00	15.113,80	19.647,94	25.542,32	33.205,02	43.166,52	43.166,52
8.2.	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/tahun	49,86	51,92	53,60	55,28	56,96	58,64	58,64
8.3.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	66,32	69,67	73,34	77,01	80,67	84,34	84,34
8.4.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	1,38	2,57	3,76	4,95	4,96	4,97	4,97
8.5.	Luasan kawasan konservasi	Ha	77.856,66	145.237,77	212.618,89	280.000,00	280.500,00	281.100,00	281.100,00
8.6.	Nilai tukar nelayan	%	97,16	98,50	99,75	101,25	103,00	106,00	106,00
8.7.	Nilai Ekspor perikanan	US \$	1.039.652	1.142.900	1.305.815	1.468.730	1.631.646	1.794.561	1.794.561
8.8.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	4,92	4,94	5,03	5,13	5,23	5,32	5,32

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Peternakan								
9.1.	Peningkatan Produksi Peternakan Ruminansia								
9.1.1.	- Produksi daging	Ton	17.659	18.542	19.469	20.442	21.464	22.537	22.537
9.1.2.	- produksi Susu	Ton	103	108	113	119	125	131	131
9.2.	Peningkatan Produksi Peternakan Non Ruminansia								
9.2.1.	- Produksi daging Unggas	Ton	21.747	22.834	23.976	25.175	26.434	27.756	27.756
9.2.2.	- produksi Telur	Ton	19.492	20.467	21.490	22.565	23.693	24.878	24.878
9.3.	Nilai Tukar Peternak	Indeks	103,12	103,26	103,42	103,65	103,87	103,92	103,92
9.4.	Indeks terima peternak	Indeks	121,38	127,45	133,82	140,51	147,54	154,92	154,92
9.5.	Peningkatan Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit	%							
9.5.1.	- Bakteri	%	23,33	20,90	18,81	16,93	15,24	13,72	13,72
9.5.2.	- Parasit	%	39,79	35,81	32,23	29,01	26,52	23,87	23,87
9.5.3.	- Protozoa	%	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,23
9.5.4.	- Virus	%	30,41	27,37	24,63	22,17	19,95	17,95	17,95
Penunjang Urusan									
1.	Perencanaan Pembangunan								
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.	Tersedianya dokumen RKPA yang telah ditetapkan dengan Pergub	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.	Tersedianya sistem perencanaan secara elektronik	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.7.	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan sumber dana APBA	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Keuangan								
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	3.59	2.88	2.56	2.05	1.76	1.15	1.15
2.3.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	16,70	24,00	25,00	26,00	28,00	30,00	30,00
2.4.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	21	22	22	22	22	22	22
2.5.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	12	12	12	12	12	12	12
2.6.	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD	%	53.05	70.54	69.08	67.72	66.99	65.95	65.95
2.7.	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD	%	46.95	29.46	30.92	32.28	33.01	34.05	34.05
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota	%	5.12	4.53	4.75	4.30	4.32	4.32	4.32
2.9.	Penetapan APBD Kabupaten/Kota tepat waktu	Kab/Kot	22,00	13,00	19,00	20,00	21,00	22,00	22,00
2.10.	Jumlah Kab/Kota yang memperoleh Opini WTP	Kab/Kot	21,00	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	50	50	50	50	50	50	50
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2	3	4	5	6	7	7
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	11	35	45	65	80	90	90
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	64	64	64	64	64	64	64
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	6.438	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009	9.009
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188	13.188
3.7.	Indek Profesionalisme Pegawai (IPP)	Indeks	60,00	62,05	68,50	70,20	75,50	80,20	80,20
4.	Penelitian dan pengembangan								
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100
	Penerapan SIDA:								
4.3.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Pengawasan								
5.1.	Jumlah temuan BPK	Temuan	11	10	8	6	4	2	2
6.	Sekretariat Dewan								
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)								
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Keagamaan								
3.1.	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	45	50	55	60	65	70	70
3.2.	Jumlah ijthah, Ijma, Qiyas, dan Fatwa yang ditetapkan	Fatwa	49	61	67	73	79	85	85
3.3.	Jumlah Sertifikat Produk Halal Yang diterbitkan	Sertifikat	150	450	750	1.050	1.350	1.650	1.650
3.4.	Persentase Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	%	40,00	40,00	40,00	50,00	65,00	75,00	75,00
3.5.	Jumlah saran/pertimbangan dan rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah sesuai syar'i	Naskah	42	54	60	66	72	78	78
3.6.	Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	58.300.000	62.000.000	66.000.000	70.000.000	74.000.000	79.000.000	79.000.000
3.7.	Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Rp (000)	58.300.000	73.248.000	77.000.000	81.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000
3.8	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	rasio	0,73	1,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1.	Distribusi Pengeluaran konsumsi rumah tangga ADHB	%	62,65	64,59	66,48	68,38	70,27	72,17	72,17
2.	Nilai tukar petani	Indeks	94,74	98,00	101,00	103,00	105,00	107,00	107,00
3.	Distribusi Pengeluaran konsumsi rumah tangga non makanan ADHB	%	33,28	34,73	35,72	36,70	37,68	38,67	38,67
4.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	0,58	1,20	1,28	1,28	1,28	1,29	1,29

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMA
				2018	2019	2020	2021	2022	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
5.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	%	84,34	80,26	78,68	77,10	75,52	73,94	73,94
6.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	%	118,71	128,30	135,16	142,02	148,88	155,74	155,74
7.	Rasio ketergantungan	Indeks	35,26	35,16	35,06	34,96	34,86	34,77	34,77
8.	Pertumbuhan keuntungan perusahaan daerah (BUMA)	%	-1,78	2,29	2,94	3,79	4,87	6,26	6,26

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017–2022 memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh, isu-isu strategis, Visi dan Misi pembangunan. Di samping itu, RPJMA 2017-2022 juga memuat arah kebijakan, kerangka pendanaan, indikator kinerja utama dan indikator kinerja pembangunan. RPJM Aceh disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMA Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan RPJM Kabupaten/Kota.

Keberhasilan Pemerintahan Aceh periode 2017-2022 dalam mewujudkan Visi **“TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI”** perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya.

9.1 Pedoman Transisi

Pada masa berakhirnya periode Pemerintahan Aceh (2017-2022) dan belum adanya dasar dokumen perencanaan tahun berikutnya, maka RPJM Aceh ini dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk menyusun program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJM Aceh periode berikutnya. Hasil evaluasi target dan capaian program menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan di masa transisi, terutama untuk program-program prioritas yang capaiannya belum memenuhi target. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dasar dokumen perencanaan.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Dinas/Badan/Biro di lingkungan Pemerintah Aceh agar melaksanakan program-program dalam RPJMA Tahun 2017-2022 ini dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas/Badan/Biro di lingkungan Pemerintah Aceh, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas/Badan/Biro di lingkungan Pemerintah Aceh masing-masing, yang berpedoman pada RPJMA Tahun 2017-2022, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas/Badan/Biro (Renja-SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh.
3. Dokumen RPJMA Tahun 2017-2022 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) mulai tahun 2018 hingga 2022.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyelaraskan RPJMD (Kabupaten/Kota) dengan RPJM Aceh Tahun 2017-2022.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMA Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMA Tahun 2017-2022 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJM kabupaten/kota, maka Bappeda Aceh berkewajiban melaksanakan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH



Kantor Bappeda Aceh
 Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureue-eh No. 26
 Telp. (0651) 21440 (Hunting), Fax. (0651) 33654
 Banda Aceh - 23212